RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025 - 2029

RPJMD

2025 - 2029

Dr. H. ANTON ACHMAD SARAGIH — Bupati Simalungun

BENNY GUSMAN SINAGA, S.T — Wakil Bupati Simalungun

BAPPERIDA KABUPATEN SIMALUNGUN

TAHUN 2025

BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dianggap perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025-2029;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025-2029 memuat arah kebijakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6946);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 10 Seri D Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dan

BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Simalungun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi dan misi daerah.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan.
16. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*).

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD merupakan :

a. Penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Simalungun; dan

b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
   a. Penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
   b. Penyusunan Renstra PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
   c. Penyusunan Renja PD.

(2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk :
   a. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah;
   b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD dan perencanaan penganggaran; dan
   c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan kabupaten yang berbatasan.

BAB IV
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 4

Sistematika RPJMD meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 5

(1) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 adalah "BERSAMA SEMANGAT BARU SIMALUNGUN MENUJU SIMALUNGUN MAJU".

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 19 Agustus 2026
BUPATI SIMALUNGUN,

ANTON ACHMAD SARAGIH

BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dianggap perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025-2029;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025-2029 memuat arah kebijakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6946);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 10 Seri D Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dan

BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Simalungun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi dan misi daerah.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan.
16. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*).

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD merupakan :

a. Penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Simalungun; dan

b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
   a. Penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
   b. Penyusunan Renstra PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
   c. Penyusunan Renja PD.

(2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk :
   a. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah;
   b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD dan perencanaan penganggaran; dan
   c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan kabupaten yang berbatasan.

BAB IV
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 4

Sistematika RPJMD meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 5

(1) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 adalah "BERSAMA SEMANGAT BARU SIMALUNGUN MENUJU SIMALUNGUN MAJU".

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

ANTON ACHMAD SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 19 Agustus 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

ALBERT RISMAWANTO SARAGIH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA : 2-53/2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 ini dengan baik dan lancar.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan informasi mengenai analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah beserta rencana pembangunan dalam 5 tahun ke depan.

Dalam pembuatan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 ini tentunya tak lepas dari peran serta kontribusi dari berbagai pihak. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 ini.

Dokumen RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah bagi Kabupaten Simalungun.

Pamatang Raya, Agustus 2025

Bapperida Kabupaten Simalungun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... *ii*

DAFTAR ISI ..... *iii*

DAFTAR TABEL ..... *v*

DAFTAR GAMBAR ..... *x*

BAB I Pendahuluan *I-1*

I.1. Latar Belakang **I-1**

I.2. Dasar Hukum Penyusunan **I-3**

I.3. Hubungan Antar Dokumen **I-8**

I.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 ..... I-9

I.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Simalungun dengan RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2045 ..... I-9

I.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Simalungun dan Dokumen Perencanaan Lainnya I-9

I.4. Maksud dan Tujuan **I-10**

I.5. Sistematika Penulisan **I-11**

BAB II Gambaran Umum Daerah *II-1*

II.1. Aspek Geografi dan Demografi **II-1**

II.1.1. Potensi dan Peran Strategis Daerah II-1

II.1.2. Potensi Sumber Daya Alam II-3

II.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-20

II.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan II-27

II.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas II-31

II.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-33

II.1.7. Demografi II-35

II.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat **II-42**

II.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II-43

II.2.2. Kesehatan Untuk Semua II-56

II.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata II-61

II.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif II-66

II.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-67

II.2.6. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-69

II.3. Aspek Daya Saing Daerah **II-76**

II.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia II-76

II.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi II-77

II.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II-85

II.3.4. Transformasi Digital II-86

II.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-87

II.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-88

II.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro II-99

II.4. Aspek Pelayanan Umum **II-103**

II.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-103

II.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial II-105

II.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-108
II.4.4. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah II-109

II.5. Gambaran Keuangan Daerah II-147
II.5.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu II-148
II.5.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu II-165
II.5.3. Kerangka Pendanaan II-170

II.6. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah II-192
II.6.1. Permasalahan Pembangunan II-192
II.6.2. Isu Strategis II-211

BAB III Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah II-1

III.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1
III.1.1. Visi dan Misi III-1
III.1.2. Tujuan dan Sasaran III-3

III.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah .. III-23
III.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah III-23
III.2.2. Program Prioritas Daerah III-65
III.2.3. Program Hasil Terbaik Cepat III-85
III.2.4. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah. III-131

BAB IV Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah III-1

IV.1. Program Perangkat Daerah IV-1
IV.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar IV-111
IV.1.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar IV-117
IV.1.3. Urusan Pilihan IV-131
IV.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan IV-136
IV.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan IV-137
IV.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan IV-139
IV.1.7. Unsur Kewilayahan IV-140
IV.1.8. Unsur Pemerintahan Umum IV-141

IV.2. Kinerja Penyelenggaraan Daerah IV-142
IV.2.1. Indikator Kinerja Utama IV-142
IV.2.2. Indikator Kinerja Daerah IV-148
IV.2.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal IV-181
IV.2.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/*SDG's*) IV-185

BAB V PENUTUP V-1

V.1. Kesimpulan V-1

V.2. Kaidah Pelaksanaan V-2

V.3. Pengendalian dan Evaluasi V-3

V.4. Sistem Insentif dan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah V-3

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Simalungun Tahun 2023 ..II-2
Tabel II.2 Luas Menurut Ketinggian Lahan di Kabupaten Simalungun Tahun 2023 .....II-5
Tabel II.3 Luas Wilayah Menurut Kemiringan Lahan di Kabupaten Simalungun Tahun 2023 .....II-7
Tabel II.4 Luas Wilayah Kabupaten Simalungun Berdasarkan Jenis Geologi Tahun 2023 .....II-7
Tabel II.5 Daftar Sungai di Kabupaten Simalungun II-10
Tabel II.6 Luas Kabupaten Simalungun Berdasarkan Pembagian Wilayah Sungai II-11
Tabel II.7 Rencana Pola Ruang Kabupaten Simalungun Tahun 2023 .....II-16
Tabel II.8 Luas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Simalungun II-18
Tabel II.9 Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Simalungun II-19
Tabel II.10 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Simalungun II-20
Tabel II.11 Status Daya Dukung Air Kabupaten Simalungun II-22
Tabel II.12 Persentase Luas Kabupaten Simalungun Berdasarkan Jasa Lingkungan Penyedia Pangan dan Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir (%) II-24
Tabel II.13 Ketersediaan Pangan Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 .....II-29
Tabel II.14 Luas Kabupaten Simalungun Berdasarkan Jenis Penutup Lahan (Ha) Tahun 2023 .....II-30
Tabel II.15 Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024.....II-31
Tabel II.16 Kondisi Risiko Bencana Alam Untuk Risiko Tinggi per Kecamatan Di Kabupaten Simalungun Tahun 2021 .....II-33
Tabel II.17 Jumlah Penduduk di Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024.....II-36
Tabel II.18 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024.....II-39
Tabel II.19 Jumlah Penduduk Kabupaten Simalungun Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2024.....II-41
Tabel II.20 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2019 – 2024 (Juta Rupiah) II-44
Tabel II.21 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019 – 2024 (Juta Rupiah) II-45
Tabel II.22 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019 - 2024 .....II-46
Tabel II.23 Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024.....II-47
Tabel II.24 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024.....II-48
Tabel II.25 Indikator Kemiskinan Kabupaten Simalungun tahun 2020-2024.....II-50

Tabel II.26 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Simalungun (Ribu Rupiah) Tahun 2020-2024 ..... II-52
Tabel II.27 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah) II-53
Tabel II.28 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 II-56
Tabel II.29 Rata-rata lama Sekolah (RLS) Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 ..... II-61
Tabel II.30 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 II-62
Tabel II.31 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024 .. II-74
Tabel II.32 Indeks Inovasi Daerah Beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 ..... II-81
Tabel II.33 Baseline dan Target IKAD Kabupaten Simalungun II-83
Tabel II.34 Posisi Pinjaman yang Disalurkan Bank Umum Berdasarkan Pengguanaan (Juta Rupiah) Tahun 2019-2024 ..... II-84
Tabel II.35 Pembentukan Modal tetap Bruto Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 ..... II-87
Tabel II.36 Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 ..... II-88
Tabel II.37 Kondisi Jalan Kabupaten Simalungun (km) Tahun 2019-2024 ..... II-89
Tabel II.38 Penataan Ruang Kabupaten Simalungun II-89
Tabel II.39 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi dan Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024 ..... II-95
Tabel II.40 Jumlah Pasar menurut Kecamatan di Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024 ..... II-96
Tabel II.41 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Seminggu Menurut Kelompok Bahan Makanan (Rupiah) di Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024 ..... II-101
Tabel II.42 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Bukan Makanan (Rupiah) di Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024 . II-102
Tabel II.43 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks SPBE dan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 ..... II-104
Tabel II.44 Banyaknya Perkara Pidana Biasa yang Diterima dan Diselesaikan Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2019-2024 ..... II-107
Tabel II.45 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 ..... II-108
Tabel II.46 Penetapan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Simalungun Tahun 2022 - 2026 ..... II-111

Tabel II.47 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 – 2024 ..... II-114
Tabel II.48 Indikator Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal II-130
Tabel II.49 Target dan Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Simalungun Tahun 2022-2026 ..... II-133
Tabel II.50 Indikator Non Kewenangan Kabupaten Simalungun II-138
Tabel II.51 Capaian TPB Kabupaten Simalungun II-139
Tabel II.52 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Kondisi Kabupaten Simalungun II-141
Tabel II.53 Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) II-148
Tabel II.54 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) II-150
Tabel II.55 Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Rp Miliar) II-152
Tabel II.56 Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) II-153
Tabel II.57 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) II-156
Tabel II.58 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 (%) II-158
Tabel II.59 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) II-159
Tabel II.60 Neraca Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 ..... II-161
Tabel II.61 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 ..... II-166
Tabel II.62 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Simalungun Tahun 2020 – 2024 (Miliar Rupiah) II-167
Tabel II.63 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Simalungun Tahun 2022 - 2024 ..... II-168
Tabel II.64 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Simalungun Tahun 2022 - 2024 ..... II-169
Tabel II.65. Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Simalungun, 2020-2024 . II-172
Tabel II.66 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ..... II-176
Tabel II.67. LQ Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Menurut 17 Sektor Lapangan Usaha, 2023 (Tanpa Migas) II-177

Tabel II.68 Pertumbuhan Sektoral (PS) dan Daya Saing (DS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ..... II-178
Tabel II.69 Pertumbuhan Sektoral (PS) dan Daya Saing (DS) Kabupaten Simalungun Tahun 2018 -2022 ..... II-180
Tabel II.70 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Year-on-Year Kabupaten Simalungun Tahun 2025 – 2029 ..... II-182
Tabel II.71 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026 s/d Tahun 2030 Kabupaten Simalungun (Miliar Rupiah) II-186
Tabel II.72 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun II-190
Tabel II.73 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2026-2030 ..... II-191
Tabel II.74 Pohon Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun II-192
Tabel II.75 PDRB ADHB Perkapita Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024 ..... II-201
Tabel II.76 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Simalungun dengan beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024 ..... II-207
Tabel II.77 Muatan Rencana Struktur Ruang dalam RTRW Kabupaten Simalungun Tahun 2010 - 2030 ..... II-248
Tabel II.78 Penyusunan Isu Strategis Kabupaten Simalungun II-254
Tabel II.79 Keterkaitan Indikator TPB dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten Simalungun berbasis Jasa Lingkungan II-267
Tabel III.1 Penyandingan Misi Kepala Daerah dengan Misi RPJPD (Transformasi) III-3
Tabel III.2 Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2030 ..... III-16
Tabel III.3 Penyandingan Misi Kepala Daerah, Misi RPJPD, Arah Kebijakan Tahap I RPJPD dan Arah Kebijakan RPJMD III-28
Tabel III.4 Penyandingan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan III-31
Tabel III.5 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Simalungun III-54
Tabel III.6 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Simalungun III-59
Tabel III.7 Penyelarasan Arah Pembangunan RPJMD Kabupaten Simalungun dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Sasaran RPJMN III-62
Tabel III.8 Program Prioritas Kabupaten Simalungun III-66
Tabel III.9 Program Hasil Terbaik Cepat dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten Simalungun III-85
Tabel III.10 Penyelarasan Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun III-125
Tabel IV.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun IV-2

Tabel IV.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Simalungun IV-143
Tabel IV.3 Penyandingan Indikator Kinerja Utama dengan Sasaran Pembangunan
RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Sasaran Pembangunan RPJMN IV-146
Tabel IV.4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Simalungun.....IV-149

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-8
Gambar II.1 Peta Administrasi Kabupaten Simalungun..... II-3
Gambar II.2 Topografi Kabupaten Simalungun..... II-6
Gambar II.3 Peta Geologi Kabupaten Simalungun II-9
Gambar II.4 Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Simalungun..... II-11
Gambar II.5 Gambar Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah II-12
Gambar II.6 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun II-14
Gambar II.7 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Simalungun..... II-15
Gambar II.8 Persentase Rencana Kawasan Lindung dengan Kawasan Budidaya II-17
Gambar II.9 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer di Kabupaten Simalungun II-27
Gambar II.10 Indesk Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2022-2024 ..... II-31
Gambar II.11 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024 ..... II-35
Gambar II.12 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 II-37
Gambar II.13 Kepadatan Penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 ..... II-38
Gambar II.14 Piramida Penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ..... II-40
Gambar II.15 Proyeksi Penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2030 (Ribu Jiwa) II-42
Gambar II.16 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024 ..... II-49
Gambar II.17 Garis Kemiskinan di Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 (Rupiah/kapita/bulan) II-50
Gambar II.18 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 ..... II-52
Gambar II.19 Indeks Gini Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 ..... II-54
Gambar II.20 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 ..... II-55
Gambar II.21 Prevalensi Stunting Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024..... II-57
Gambar II.22 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2023 ..... II-67
Gambar II.23 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 . II-72
Gambar II.24 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 II-73

Gambar II.25 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024……..……..II-75
Gambar II.26 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Simalungun 2020-2024 .....II-77
Gambar II.27 Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024..... II-7778
Gambar II.28 Rasio Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 .....II-79
Gambar II.29 Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 .....II-80
Gambar II.30 Bauran Energi Terbarukan Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2023…….. II-86
Gambar II.31 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau II-98
Gambar II.32 Laju Inflasi Kota Pematang Siantar Tahun 2020-2024.....II-99
Gambar II.33 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 .....II-100
Gambar II.34 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Simalungun diselesaikan Tahun 2019 – 2024……..II-107
Gambar II.35 Persentase Status Ketercapaian TPB Kabupaten Simalungun..... II-140
Gambar II.36 Efektivitas Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun, 2020-2024..... II-151
Gambar II.37. Persentase Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 .....II-154
Gambar II.38 Indikator Stabilitas Makroekonomi Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 .....II-171
Gambar II.39 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 .....II-174
Gambar II.40 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Simalungun diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 .....II-174
Gambar II.41 Diagram Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Simalungun, 2023 .....II-176
Gambar II.42 Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota Simalungun Tahun 2025 – 2029 .....II-183
Gambar II.43 Proyeksi Target Belanja Daerah Kota Simalungun Tahun 2025 -2029II-184
Gambar II.44 Perbandingan IPM Kabupaten Simalungun dan Daerah Pembanding. II-196
Gambar II.45 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Simalungun dan Provinsi Sumatera Utara..... II-197

Gambar II.46 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Langkat II-198
Gambar II.47 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Simalungun dengan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024 ..... II-199
Gambar II.48 Nilai PMA dan PMDN Kabupaten Simalungun 2017-2020 ..... II-203
Gambar II.49 Net Ekspor Barang dan Jasa PDRB Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2020-2024 ..... II-204
Gambar II.50 Angka Partisipasi Murni SMA/SMK Kabupaten Simalungun dengan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumater Utara Tahun 2020-2024 ..... II-205
Gambar II.51 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia II-208
Gambar II.52 Indeks Gini Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 ..... II-210
Gambar II.53 Dampak Perubahan Iklim terhadap Aspek Kehidupan Manusia II-212
Gambar II.54 Dampak berbagai Aspek dalam Sistem Pangan yang dapat Merugikan Keamanan Pangan dan Gizi II-213
Gambar II.55 Pergerakan Kemajuan Teknologi dan Keterampilan II-215
Gambar II.56 Perbandingan Proyeksi Investasi Infrastruktur berdasarkan Sektor 2016 – 2040 (dalam miliar $) II-216
Gambar II.57 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Simalungun dengan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 ..... II-258
Gambar II.58 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2023 (%) II-260
Gambar II.59 Angka Kemiskinan Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2023 ..... II-260
Gambar II.60 Nilai Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2023 ..... II-262
Gambar II.61 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMA/SMK Kabupaten Simalungun dengan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 .... II-263

BAB I
PENDAHULUAN

RPJMD SIMALUNGUN 2025-2029

I.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah dan pembangunan nasional adalah dua konsep yang saling terkait namun memiliki fokus yang berbeda dalam konteks kebijakan dan implementasi pembangunan di suatu negara. Pembangunan daerah merujuk pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi, sosial, serta infrastruktur dengan tujuan mengatasi ketimpangan antar daerah dan memastikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Aspek penting dari pembangunan daerah meliputi pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan potensi lokal. Sementara itu, pembangunan nasional adalah upaya keseluruhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara secara menyeluruh. Kedua hal tersebut saling mendukung dan mempengaruhi satu sama lain, dimana keberhasilan pembangunan daerah dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan nasional yang baik dapat memberikan kerangka kerja dan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan daerah yang efektif.

Berdasarkan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Meskipun dibagi berdasarkan rentang waktu, esensi dari perencanaan pembangunan daerah adalah kesatuan yang seimbang, di mana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan RPJMD menjadi panduan untuk dokumen lainnya. Kesatuan ini tidak hanya berlaku di antara dokumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga berhubungan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta rencana pembangunan provinsi dan nasional. Keterkaitan ini memungkinkan pencapaian target pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara sinergis dan terkoordinasi.

Pada tahun 2024 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak, yang menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan RPJMD diawali dengan persiapan yang mencakup penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Rancangan teknokratik RPJMD adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil

kepala daerah. Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 42 ditegaskan bahwa penyusunan rancangan teknokratik RPJMD harus diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selain itu, penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 juga didasarkan pada surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tanggal 12 Juni 2024 tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Simalungun akan menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen ini akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2024.

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 disusun dengan menampung aspirasi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, media massa, akademisi, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok kepentingan lainnya. Aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan ini menjadi dasar untuk merumuskan visi, misi, dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Selain itu, perumusan berbagai kebijakan pembangunan yang terdapat dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 telah memperhatikan keselarasan dengan rancangan akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dan rancangan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 serta RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2045. Hal ini sejalan dengan Instruksi dari Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dapat merujuk pada Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045.

RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029 merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2045. Fokus utama pembangunan pada periode ini diarahkan pada pemenuhan dan pemantapan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur pendukung hilirisasi, serta pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Dalam rangka memperkuat dasar penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Simalungun 2025-2029, penyusunan RPJMD Kabupaten Simalungun 2025-2029 secara komprehensif memperhatikan kondisi aktual dan tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Simalungun. Dengan mencakup berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, lingkungan hidup, infrastruktur, daya saing, tata kelola pemerintahan, serta isu-isu strategis lain yang relevan. Penyusunan tersebut dimaksudkan untuk memastikan

bahwa perumusan RPJMD Kabupaten Simalungun 2025-2029 dilakukan secara faktual dan sesuai dengan kebutuhan riil pembangunan daerah.

Rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029 yang telah disusun menjadi bahan masukan utama dalam penyusunan RPJMD, dan selanjutnya diintegrasikan dengan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. RPJMD sebagai dokumen strategis lima tahunan yang mengoperasionalisasikan arah kebijakan jangka panjang dalam RPJPD Tahun 2025–2045, serta menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan target nasional, perlu diperhatikan pula peta jalan dalam rancangan akhir RPJPN Tahun 2025-2045. Dalam rancangan akhir RPJPN Tahun 2025-2045, terdapat peta jalan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari lima negara dengan ekonomi terbesar di dunia melalui semangat "Indonesia Emas 2045". Capaian kinerja pembangunan nasional yang diharapkan meliputi pendapatan per kapita sekitar US$ 23.000–30.300, peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0% dan PDB kemaritiman sebesar 15%, meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80%, kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5% - 0,8%, dan sebagainya. Langkah-langkah ini menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan pembangunan di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Simalungun, agar sejalan dengan visi dan target pembangunan nasional hingga tahun 2045. Melalui pendekatan ini, RPJMD Kabupaten Simalungun diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6946);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 10 Seri D Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Nomor 1);

I.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Simalungun harus berpedoman pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, Rancangan RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2025-2045, RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2036, Rancangan RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2045 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun 2012-2032.

Rancangan Teknokratik adalah proses perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam rancangan teknokratik, dilakukan kompilasi dan analisis ilmiah terhadap kondisi dan potensi daerah serta isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan. Rancangan Teknokratik RPJMD menyajikan serta menganalisis data, fakta, dan isu strategis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan RPJMD lima tahun ke depan. Rancangan teknokratik ini harus diselesaikan sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Adapun hubungan keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat pada **Gambar I.1.**

Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah

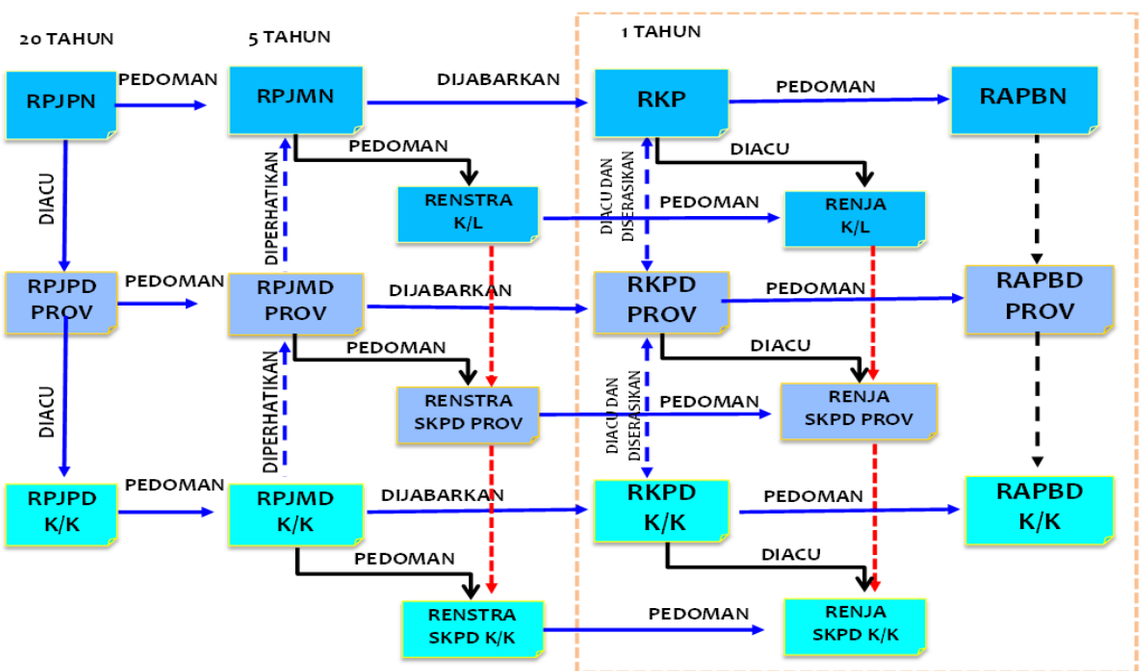

Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Sumber: analisa terhadap Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan perundang-undangan lainnya.

I.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 disusun memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keselarasan dan konsistensi antara rencana pembangunan tingkat nasional dan daerah. Dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 memperhatikan arah pembangunan wilayah dan tema pembangunan sesuai dengan arahan yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029.

I.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Simalungun dengan RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2045

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan menjadi acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi, dan program pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, terutama dalam hal arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Hal tersebut menunjukkan komitmen Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan rencana pembangunan yang sesuai dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional

I.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Simalungun dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029 disusun sebagai langkah konkret dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Simalungun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen ini memegang peran strategis sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menyusun program, kegiatan, dan anggaran pembangunan.

Dalam proses penyusunannya, RPJMD terintegrasi secara vertikal dan horizontal dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya guna menciptakan kerangka kerja pembangunan yang komprehensif, sinkron, dan berkelanjutan. Beberapa dokumen perencanaan yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan RPJMD antara lain:

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)

   RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. RPJMD disusun sebagai penjabaran lima

tahunan dari RPJPD, sehingga seluruh arah kebijakan, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD harus selaras dengan tahapan pencapaian target RPJPD. Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029 menjadi tahapan pertama dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2045.

2. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

RTRW merupakan dokumen pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang menjadi acuan dalam pembangunan fisik dan pengelolaan sumber daya alam. Integrasi RPJMD dengan RTRW bertujuan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan tidak bertentangan dengan pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan, serta mendorong pemanfaatan ruang secara optimal dan berkelanjutan.

3. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

KLHS merupakan instrumen analisis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan. Hasil KLHS menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD agar seluruh kebijakan, rencana, dan program pembangunan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta potensi risiko lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dengan demikian, RPJMD bukan merupakan dokumen yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD harus memperhatikan kesinambungan antar dokumen perencanaan serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, guna menjamin konsistensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

I.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai bentuk komitmen dari penyelenggara Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam kerangka kesinambungan jangka menengah pembangunan untuk dapat tetap dapat menyesuaikan perkembangan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

RPMJD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan menjadi panduan dan arahan pembangunan jangka menengah bagi semua pihak terkait dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan Kabupaten Simalungun. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Simalungun dapat berjalan secara terkoordinasi, sinergis, kolaboratif, dan integratif dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi. Selain itu,

dokumen ini akan menjadi *spirit* kehidupan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-sehari yang berorientasi dalam pencapaian perubahan kondisi menuju negara maju, yang terkandung dalam visi dan misi pembangunan Indonesia Emas di Tahun 2045.

I.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Simalungun secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Gambaran umum yang dibahas diantaranya adalah: (1) Gambaran umum kondisi daerah, (2) Gambaran keuangan daerah, serta (3) Permasalahan dan isu strategis.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat penjelasan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah yang menjadi dasar arah pembangunan jangka menengah. Selain itu, bab ini juga mencakup strategi, arah kebijakan, dan program prioritas daerah yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut secara terarah dan terukur.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat program perangkat daerah yang mencakup daftar program, indikator, target, serta pagu indikatif untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target penyelenggaraan pemerintahan melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025–2029.

BAB V PENUTUP

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

RPJMD SIMALUNGUN 2025-2029

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Simalungun terus berjalan seiring dengan pelaksanaan tahapan RPJMD Kabupaten Simalungun. Sebagai upaya pencapaian visi pembangunan jangka menengah tersebut, pelaksanaan pembangunan daerah berikutnya menjadi kunci dalam mewujudkan Visi Kabupaten Simalungun. Oleh karena itu, fenomena pada setiap tahapan pembangunan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan, khususnya pelaksanaan pembangunan periode terakhir.

II.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografis Kabupaten Simalungun akan merujuk pada elemen-elemen fisik dan spasial meliputi karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerawanan bencana. Sedangkan untuk aspek demografi akan meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk serta struktur kependudukan di Kabupaten Simalungun.

II.1.1. Potensi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di bagian Timur Pesisir. Secara geografis, Kabupaten Simalungun terletak pada 02°36’05’’-03°18’14’’ Lintang Utara dan 98°32’03’’- 99°35’03’’ Bujur Timur. Kabupaten Simalungun secara keseluruhan memiliki luas administrasi 4.372,50 km^2 atau 5,99% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah tersebut Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten terluas ke-3 setelah Kabupaten Madina dan Kabupaten Langkat di Sumatera Utara dan berada di kawasan wisata Danau Toba-Parapat.

Tabel II.1 menunjukkan luas tiap kecamatan di Kabupaten Simalungun, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Hatonduhan (336,26 Km2) sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi (38,97 Km2). Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Simalungun, adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan daerah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan daerah Kabupaten Karo.

Tabel II.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Simalungun Tahun 2023

No.	Kecamatan	Nagori	Kelurahan	Luas Wilayah	
				Km	Persentase
1	Silimakuta	6	1	74,16	1,70
2	Pamatang Silimakuta	10	0	79,68	1,82
3	Purba	13	1	172,71	3,95
4	Haranggaol Horison	4	1	40,97	0,94
5	Dolok Pardamean	11	0	67,90	1,55
6	Sidamanik	14	1	80,88	1,85
7	Pamatang Sidamanik	9	1	137,80	3,15
8	Girsang Sipangan Bolon	3	3	129,89	2,97
9	Tanah Jawa	19	1	174,33	3,99
10	Hatonduhan	9	0	336,26	7,69
11	Dolok Panribuan	15	0	148,62	3,40
12	Jorlang Hataran	12	1	93,70	2,14
13	Panei	16	1	77,96	1,78
14	Panombeian Panei	11	0	73,74	1,69
15	Raya	12	5	261,56	5,98
16	Dolog Masagal	10	0	105,77	2,42
17	Dolok Silou	14	0	302,66	6,92
18	Silau Kahean	16	0	228,74	5,23
19	Raya Kahean	13	1	204,89	4,69
20	Tapian Dolok	10	1	119,89	2,74
21	Dolok Batu Nanggar	14	2	106,91	2,45
22	Siantar	17	0	73,99	1,69
23	Gunung Malela	16	0	96,74	2,21
24	Gunung Maligas	9	0	51,39	1,18
25	Hutabayu Raja	15	1	191,43	4,38
26	Jawa Maraja Bah Jambi	8	0	38,97	0,89
27	Pamatang Bandar	11	2	88,16	2,02
28	Bandar Huluan	10	0	107,33	2,45
29	Bandar	14	2	100,69	2,30
30	Bandar Masilam	10	0	91,22	2,09
31	Bosar Maligas	16	1	285,43	6,53
32	Ujung Padang	19	1	228,49	5,23
Kabupaten Simalungun		**386**	**27**	**4.372,50**	**100,00**

Sumber :Kabupaten Simalungun Dalam Angka, 2024

Secara administratif, Kabupaten Simalungun terdiri dari 32 Kecamatan, 386 “Nagori” (Desa) dan 27 Kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Ujung Padang dan Kecamatan Tanah Jawa dengan 19 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon yang hanya memiliki 3 desa.

Dengan sumber daya alam yang melimpah dan potensi pariwisata yang tinggi, Kabupaten Simalungun terus berusaha mengembangkan sektor pertanian, industri, dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

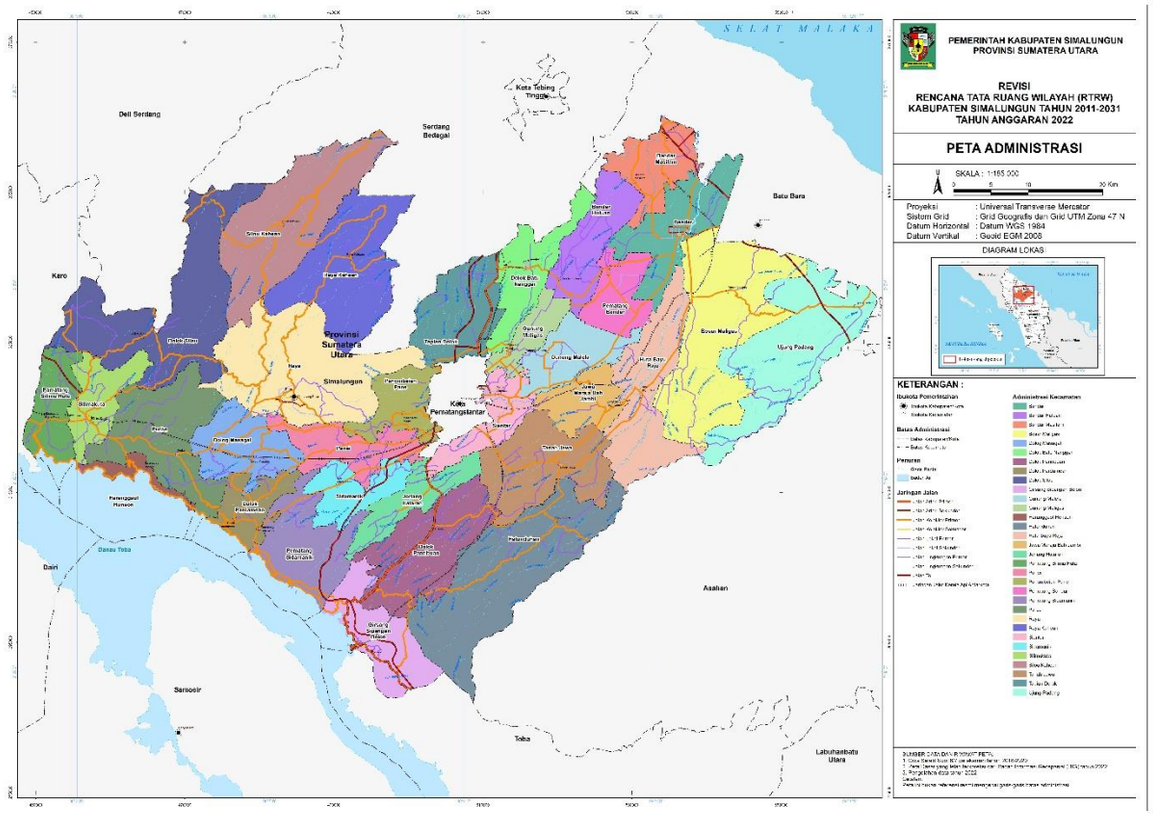

Gambar II.1 Peta Administrasi Kabupaten Simalungun

Sumber: Peta Pendukung Dokumen RTRW Kabupaten Simalungun, 2023

Kabupaten Simalungun terletak di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dengan letak yang strategis, Simalungun berbatasan langsung dengan Danau Toba di bagian barat dan utara, yang merupakan salah satu danau terbesar di dunia dan menjadi tujuan wisata terkenal. Kabupaten ini juga berbatasan dengan Kabupaten Dairi di sebelah timur, Kabupaten Karo di selatan, dan Kabupaten Asahan di bagian barat.

Kabupaten Simalungun memiliki luas wilayah sekitar 4.372,50 km^2 dan terdiri dari berbagai jenis topografi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan. Jarak dari Kota Simalungun (Pematangsiantar) ke Medan, ibu kota provinsi, adalah sekitar 130 km, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam perjalanan.

II.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan salah satu aset penting dalam pembangunan daerah. Kabupaten Simalungun memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, mulai dari sumber daya lahan, air, hutan, hingga potensi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Keberadaan potensi ini menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya alam yang diarahkan agar dapat dimanfaatkan secara optimal, berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi hijau dalam sektor pertanian dan perkebunan, serta memperhatikan daya dukung lingkungan. Pengelolaan yang baik terhadap potensi alam ini diharapkan mampu menjadi pendorong utama pembangunan

sektor-sektor unggulan daerah serta mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Simalungun.

Kabupaten Simalungun memiliki luas wilayah sebesar 4.005,53 km^2, dengan pemanfaatan lahan terdiri dari lahan sawah seluas 30.749 hektare, lahan pertanian bukan sawah seluas 364.694,14 hektare, dan lahan bukan pertanian seluas 39.400 hektare. Sektor pertanian merupakan motor utama perekonomian daerah ini, tercermin dari kontribusi sebesar 51,33 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021, yang berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Komoditas unggulan pertanian Kabupaten Simalungun meliputi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Tanaman pangan, seperti padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar, dan ubi kayu;
2. Hortikultura, mencakup aneka sayuran seperti cabai, kubis, kentang, tomat, bawang merah, dan buah-buahan seperti jeruk, durian, dan pisang;
3. Perkebunan, meliputi karet, kelapa sawit, kopi (robusta dan arabika), kakao, cengkeh, dan tembakau.

Pada tahun 2021, produksi padi mencapai 386.858 ton, terdiri dari padi sawah sebesar 354.586 ton dan padi ladang sebesar 32.272 ton. Produksi jagung tercatat sebesar 182.325 ton dan ubi kayu sebesar 208.580 ton, menjadikannya komoditas palawija utama. Di sektor hortikultura, cabai keriting dan kubis menjadi sayuran dengan luas panen dan produksi tertinggi, sedangkan jeruk merupakan komoditas buah unggulan dengan produksi 119.770 ton, terutama berasal dari Kecamatan Silimakuta. Untuk komoditas perkebunan, kelapa sawit dan karet menjadi komoditas dominan, dengan produksi masing-masing sebesar 358.271 ton dan 3.086,83 ton.

Meskipun sektor pertanian menjadi penopang utama perekonomian daerah, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

- Ketergantungan pada komoditas primer, yang menyebabkan nilai tambah hasil pertanian masih rendah karena minimnya proses hilirisasi dan industri pengolahan.
- Fluktuasi harga pasar, terutama untuk komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang, yang rentan terhadap gejolak pasar dan berdampak pada pendapatan petani.
- Keterbatasan infrastruktur pertanian, termasuk irigasi, jalan usaha tani, dan akses pasar, khususnya di wilayah kecamatan dengan potensi produksi tinggi.
- Keterbatasan akses petani terhadap teknologi dan pembiayaan, yang menghambat peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

- Kerusakan lahan dan degradasi lingkungan, khususnya pada lahan pertanian intensif dan lahan kering, yang berdampak pada keberlanjutan produksi.

Upaya strategis dalam meningkatkan produktivitas, memperluas hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan perhatian pada pengolahan hasil pertanian dan perkebunan di tingkat lokal, memperkuat ekosistem pertanian berkelanjutan perlu menjadi fokus pembangunan sektor pertanian, serta kebijakan yang mendorong industri ramah lingkungan Kabupaten Simalungun ke depan.

II.1.2.1. Topografi

Topografi adalah representasi grafis secara rinci dan akurat mengenai keadaaan alam di suatu daratan yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran roman muka bumi dan dimensinya. Representasi grafis tersebut sekurang-kurangnya dapat berupa bentuk kemiringan lereng (kelerengan) dan ketinggian daratan. Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 0-1.400 meter di atas permukaan laut dimana 75% lahannya berada pada kemiringan 0-15% dan memiliki letak yang cukup strategis serta berada di kawasan Danau Toba, Parapat. Luas Wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan ketinggian dapat dilihat pada **Tabel II.2.**

Tabel II.2 Luas Menurut Ketinggian Lahan di Kabupaten Simalungun Tahun 2023

No	Ketinggian (meter dpl)	Luas (ha)
1.	≤ 100	83.738
2.	101 – 500	161.230
3.	501 – 1000	92.392
4.	1001 – 1500	99.701
5.	≥ 1501	1.599

Sumber: Kabupaten Simalungun Dalam Angka, 2024.

Kabupaten Simalungun berbatasan dengan 8 Kabupaten yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, Karo, Toba, Samosir, Asahan, Batu Bara, dan Kota Pematang Siantar. Rata-rata jarak tempuh dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Simalungun menuju ibukota Kabupaten adalah 51,42 km, dimana jarak terjauh adalah Kecamatan Sillou Kahean 127 km dan Kecamatan Ujung Padang 113 km.

Kabupaten Simalungun mayoritas berada di ketinggian 101 – 500 meter dpl dengan total paling luas yaitu sekitar 161.230 ha. Pada ketinggian 501 – 1000 dan 1001 – 1500 memiliki luas yang hampir sama yaitu masing-masing sekitar 92.392 ha dan 99.701 ha. Pada ketinggian terendah yaitu ≤ 100 meter dpl, luas lahan sekitar 83.738 ha. Sedangkan untuk ketinggian tertinggi atau ≥ 1501 memiliki luas sekitar 1.599 ha.

Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 0 – 1.400 m dari atas permukaan laut (rata-rata 3369 m) dan dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori wilayah berdasarkan ketinggian, yaitu:

1. Daerah dengan ketinggian 0 m – 389 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran rendah yang meliputi Kecamatan Bandar, Pematang Bandar, Ujung Padang, Siantar, Huta Bayu Raja, Tanah Jawa, Bosar Maligas, Dolok Batu Nanggar dan Tapian Dolok dengan luas 2.160,83 Km atau 49,26% dari luas Kabupaten Simalungun.
2. Daerah dengan ketinggian 600 m – 920 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran sedang yang meliputi Kecamatan Panei, Jorlang Hataran, Raya Kahean, Sidamanik, Raya, Dolok Panribuan dan Girsang Sipangan Bolon dengan luas 1.276,07 Km atau 29,09% dari luas Kabupaten Simalungun.
3. Daerah dengan ketinggian 1.100 m – 1.400 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Dolok Pardamean, Purba, Silimakuta, Silau Kahean dan Dolok Silau dengan luas 939,70 Km atau 21,65% dari luas Kabupaten Simalungun.

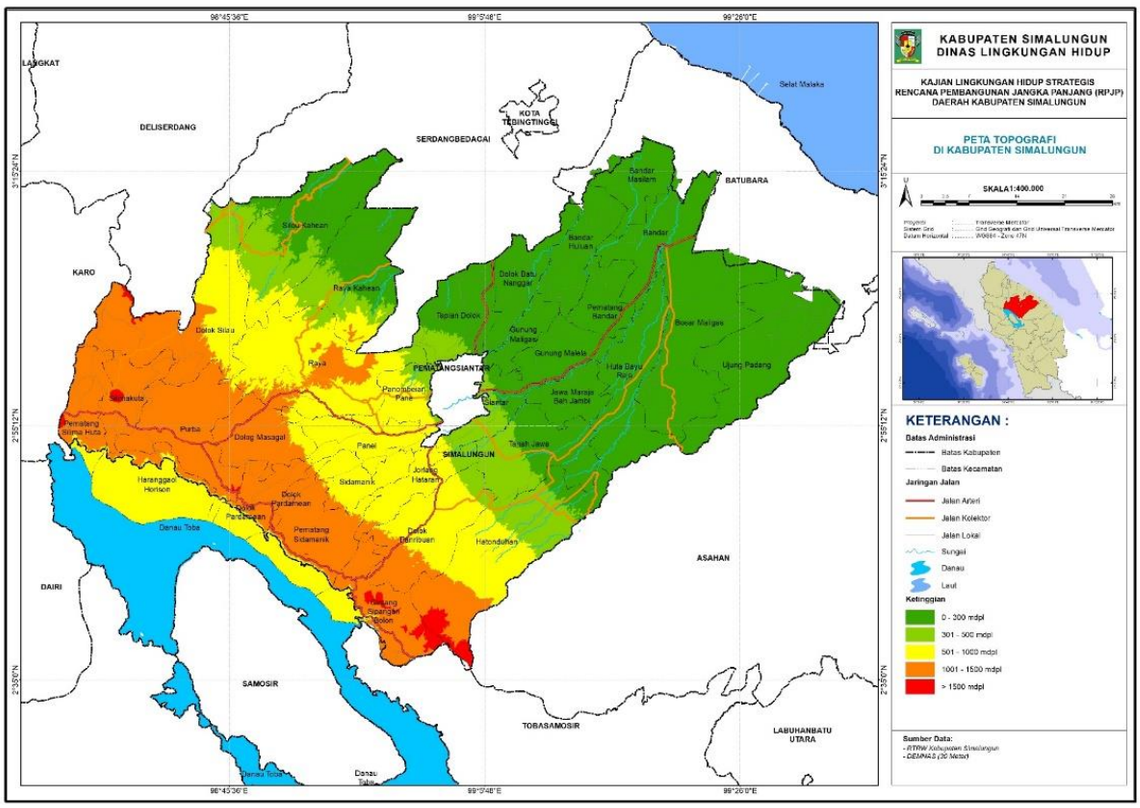

Gambar II.2 Topografi Kabupaten Simalungun
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029.

Dengan topografi, cuaca dan curah hujan yang mencukupi menjadikan Kabupaten Simalungun terkenal sebagai daerah penghasil (lumbung) beras dan perkebunan dengan mata pencaharian penduduk yang terutama adalah usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan, baik skala besar maupun perkebunan rakyat.

Letak Kabupaten Simalungun yang berada di dataran rendah hingga dataran tinggi menyebabkan posisi kemiringan lahan juga berbeda-beda. Penyebaran kemiringan

lahan/lereng di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri dari : kemiringan datar (0 – 2 %), landai (2 – 15%), bergelombang/berbukit (15 – 40 %) dan curam (>40 %). Luas lahan berdasarkan penyebaran kemiringan lahan/lereng dapat dilihat pada **Tabel II.3**

Tabel II.3 Luas Wilayah Menurut Kemiringan Lahan di Kabupaten Simalungun Tahun 2023

No	Kemiringan Lahan/Lereng	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Datar (0% - 2%)	236.176	26,80
2.	Landai (2% - 15%)	92.387	36,61
3.	Bergelombang / Berbukit (15% - 40%)	82.252	22,95
4.	Curam (>40 %)	27.845	13,63
	Jumlah	**438.660**	**100,00**

Sumber: Kabupaten Simalungun Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data luas wilayah berdasarkan kemiringan, wilayah di Kabupaten Simalungun didominasi oleh kemiringan lahan yang datar yaitu sebesar 236.176 ha. Kemudian diikuti dengan wilayah yang landai sebesar 92.387 ha. Sedangkan wilayah yang bergelombang di Kabupaten Simalungun sebesar 82.252 ha dan wilayah curam sebesar 27.845 ha.

II.1.2.2. Geologi

Kondisi batuan geologi di Kabupaten Simalungun didominasi oleh jenis batuan geologi Toba Tuff yang menyebar hampir di seluruh kabupaten dari pesisir hingga perbukitan. Pada wilayah pegunungan di Kecamatan Raya dan Kecamatan Raya Kahean terbentuk oleh formasi batuan Simboloh Center dan di Kecamatan Silimakuta dan Kecamatan Dolok Silau terbentuk oleh formasi batuan Pusat Takur-Takur. Pada pegunungan di Kecamatan Girsang Sipangan bolon terbentuk oleh batuan Peutu Formation dan batuan Bahorok Formation. Pada wilayah perbukitan di pinggiran Danau Toba terbentuk oleh batuan yang beragam, yaitu : batuan vulkanik Haranggaol Volcanic dan Peuet Sague Volcanic, Kualu Formation dan Younger Alluvium.

Tabel II.4 Luas Wilayah Kabupaten Simalungun Berdasarkan Jenis Geologi Tahun 2023

No.	Jenis Geologi	Luas (Ha)
1	Bohorok Formation	6.669,3
2	Haranggaol Volcanic	31.756,2
3	Kualu Formation	384,1
4	Minor Granite Intrus	107,4
5	Peuet Sague Volcanic	900,1
6	Peutu Formation	1.258,4
7	Samosir Formation	2,5
8	Simbolon Centre	13.574,2
9	Subayak Centre	110,3
10	Takur-Takur Centre	4.931,8
11	Toba Tuffs	397.229,3
12	Younger Alluvium	3.217,9
Total		**460.141,7**

Sumber: Peta Tematik RTRW Kabupaten Simalungun, 2023

Kabupaten Simalungun terletak di Provinsi Sumatera Utara dan termasuk dalam kawasan geologi Pegunungan Bukit Barisan yang memiliki potensi besar dalam endapan mineral dan sumber daya alam lainnya. Secara stratigrafi, wilayah ini menunjukkan formasi geologi yang kompleks dengan lapisan batuan yang beragam, termasuk batuan vulkanik, sedimen, dan metasedimen. Secara struktur geologi, Kabupaten Simalungun dipengaruhi oleh beberapa patahan aktif yang membentang sepanjang Pegunungan Bukit Barisan. Interpretasi rekahan seismik menunjukkan adanya pola patahan yang berarah barat laut-tenggara, yang memberikan pengaruh signifikan terhadap morfologi dan bentang alam daerah tersebut. Patahan ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan dan distribusi sumber daya mineral di wilayah ini.

Potensi sumber daya alam Kabupaten Simalungun tidak hanya terbatas pada mineral, tetapi juga pada sektor perikanan air tawar. Dengan keberadaan Danau Toba yang merupakan danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Simalungun memiliki potensi besar dalam hal perikanan dan budidaya ikan air tawar. Danau Toba menyediakan habitat yang ideal untuk berbagai jenis ikan, baik yang bersifat konsumsi maupun hias. Selain itu, Kabupaten Simalungun juga kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk spesies endemik yang hanya ditemukan di daerah ini. Tutupan hutan yang masih cukup luas memberikan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, serta memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata yang menawarkan pengalaman alam yang unik. Dengan demikian, Kabupaten Simalungun tidak hanya memiliki kekayaan sumber daya alam dari segi mineral dan perikanan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekowisata berbasis alam.

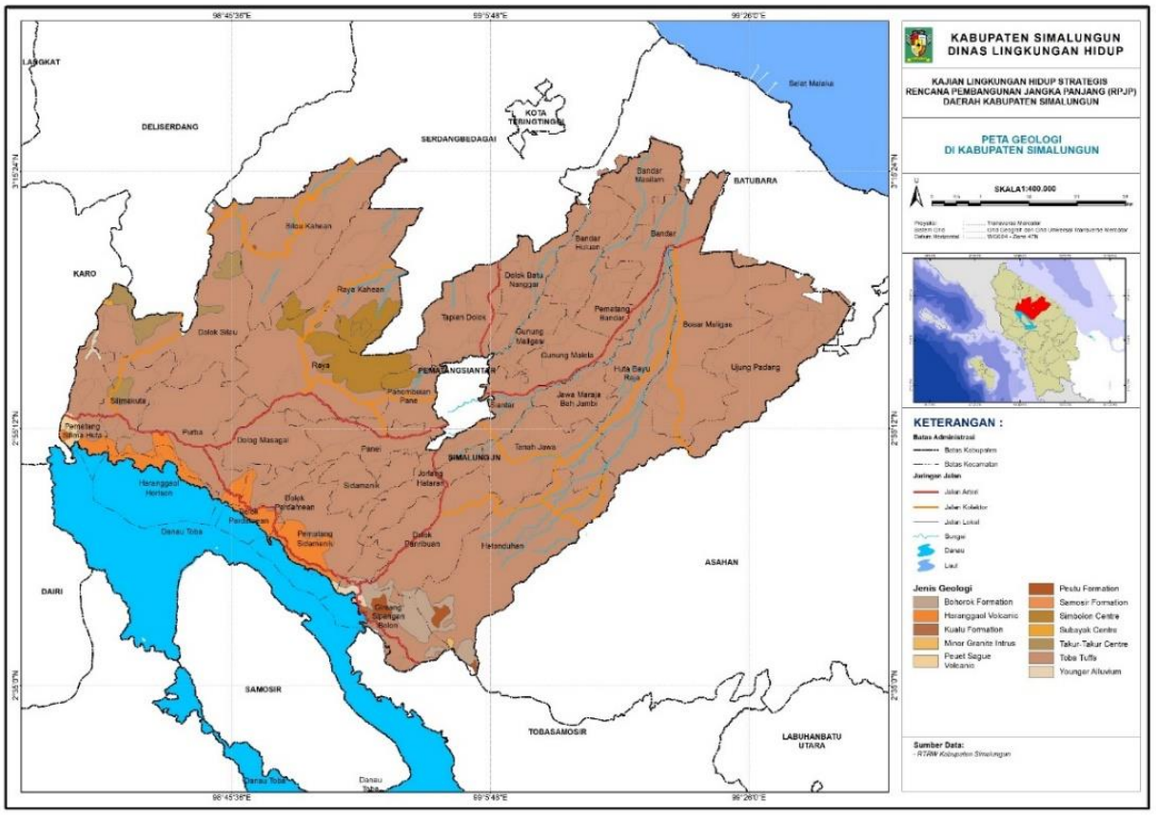

Gambar II.3 Peta Geologi Kabupaten Simalungun
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029.

Kabupaten Simalungun, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan formasi geologi yang kompleks dengan berbagai lapisan batuan. Berdasarkan peta geologi, wilayah ini terdiri dari beberapa formasi utama. Formasi Toba mencakup endapan vulkanik yang berasal dari letusan Gunung Toba pada masa Kuarter, memberikan lapisan batuan yang kaya akan material vulkanik. Formasi Haranggaol, yang berumur Tersier, terdiri dari batuan sedimen seperti batupasir, batulanau, dan serpih, memberikan variasi lapisan batuan sedimen yang signifikan.

Formasi Sipispis, yang berumur Paleozoik, terdiri dari batuan metasedimen seperti sekis dan filit, menunjukkan aktivitas metamorfisme di masa lalu. Sementara itu, Formasi Muara Takus terdiri dari batuan sedimen yang lebih muda, termasuk batupasir dan konglomerat, memberikan indikasi lingkungan pengendapan yang bervariasi dari waktu ke waktu.

Struktur geologi Kabupaten Simalungun dipengaruhi oleh beberapa patahan aktif, termasuk Patahan Sumatera yang berarah barat laut-tenggara. Patahan ini memainkan peran penting dalam membentuk morfologi daerah dan mempengaruhi distribusi sumber daya mineral di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat juga beberapa patahan lokal yang memperkaya kerumitan struktur geologi di Kabupaten Simalungun. Secara keseluruhan, peta geologi Kabupaten Simalungun menggambarkan wilayah yang kaya akan keragaman geologi dengan potensi sumber daya alam yang signifikan, termasuk mineral dan sumber daya perikanan dari Danau Toba. Keberadaan berbagai formasi

batuan dan struktur geologi yang kompleks memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika geologi yang terjadi di wilayah ini sepanjang waktu.

II.1.2.3. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri atas air permukaan yaitu sungai, rawa dan air bawah tanah. Sesuai dengan Peraturan Menteri PU nomor 11.A/PRT/M/2006 tentang Sungai dan Satuan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan lintas wilayahnya termasuk WS Belawan Ular Padang, WS Toba Asahan, WS Wampu Besitang, WS Bah Bolon dengan DAS sebagai berikut: (a) DAS Silou; (b) DAS Wampu; (c)DAS Bedagai; (d) DAS Asahan; (e) DAS Padang; (f) DAS Silou Tua; (g) DAS Ular; (h) DAS Bahapal; dan (i) DAS Bah Bolon.

Wilayah sungai lintas Kabupaten, meliputi wilayah Sungai Bah Bolon, Bah Tongguran, Bah Hapal dan Bah Pamujian serta sungai-sungai kecil/mata air. Di Kabupaten Simalungun juga terdapat banyak air terjun menyebar hampir di seluruh kecamatan dataran tinggi Kabupaten Simalungun.

Di Kabupaten Simalungun banyak terdapat sungai-sungai besar yang mengalir dari daerah perbukitan. Dari aliran sungai sungai yang terdapat di kabupaten tersebut maka wilayah Kabupaten Simalungun terbagi atas 4 (empat) wilayah sungai yaitu WS Bahbolon, WS Belawan – Ular – Padang, WS Toba Asahan – WS Wampu – Besitang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini.

Tabel II.5 Daftar Sungai di Kabupaten Simalungun

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1	Bahapal	58.50
2	Bah Karei	58.50
3	Bah Biak	61.00
4	Bah Lombut	64.70
5	Bah Kasindir	67.50
6	Aek Silou Tuh	85.50
7	Bah Boluk	89.50
8	Bah Tongguran	91.00
9	Bah Bolon/Bah Binoman	118.00

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Simalungun 2013 – 2032

Kabupaten Simalungun memiliki beberapa sungai utama yang mengalir melalui wilayahnya, masing-masing dengan panjang yang bervariasi. Sungai Bahapal dan Bah Karei memiliki panjang yang sama yaitu 58,50 km. Bah Biak memiliki panjang sedikit lebih besar yaitu 61,00 km. Sungai Bah Lombut memiliki panjang 64,70 km, sementara Sungai Bah Kasindir mencapai 67,50 km. Sungai Aek Silou Tuh adalah salah satu sungai yang lebih panjang di wilayah ini, dengan panjang 85,50 km. Sungai Bah Boluk memiliki panjang 89,50 km, dan Sungai Bah Tongguran sedikit lebih panjang dengan 91,00 km. Sungai terpanjang di Kabupaten Simalungun adalah Bah Bolon atau juga dikenal sebagai Bah Binoman, dengan panjang mencapai 118,00 km. Kabupaten Simalungun, yang

terletak di Provinsi Sumatera Utara, memiliki berbagai wilayah sungai yang memainkan peran penting dalam sistem hidrologi dan ekosistem daerah tersebut. Wilayah-wilayah sungai ini mencakup area yang luas dan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat setempat serta kegiatan pertanian dan industri.

Tabel II.6 Luas Kabupaten Simalungun Berdasarkan Pembagian Wilayah Sungai

No.	Wilayah Sungai	Luas (Ha)
1	WS Bahbolon	281.820,6
2	WS Belawan-Ular-Padang	116.724,0
3	WS Toba-Asahan	50.088,7
4	WS Wampu-Besitang	11.508,5
Total		460.141,7

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Simalungun 2013 – 2032.

Kabupaten Simalungun mencakup 4 (empat) wilayah sungai utama dengan total luas mencapai 460.141,7 hektar. Wilayah Sungai (WS) Bahbolon adalah yang terbesar di Kabupaten Simalungun, dengan luas mencapai 281.820,6 hektar. WS Wampu-Besitang, Wilayah sungai ini adalah yang terkecil di Kabupaten Simalungun, dengan luas 11.508,5 hektar. Meskipun lebih kecil dibandingkan dengan wilayah sungai lainnya, WS Wampu-Besitang tetap memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya air dan lingkungan setempat.

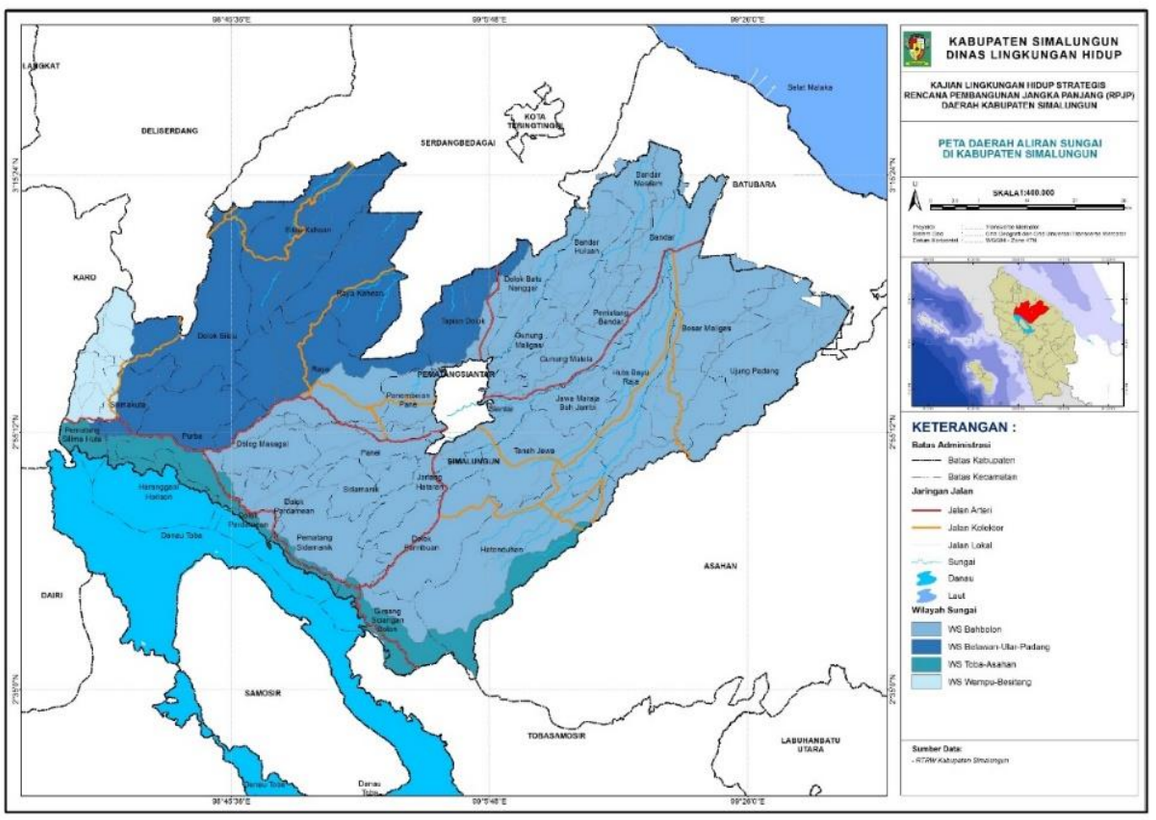

Gambar II.4 Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Simalungun
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029.

Total luas wilayah sungai di Kabupaten Simalungun mencapai 460.141,7 hektar, menunjukkan betapa pentingnya sistem hidrologi dalam mendukung kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi di wilayah ini. Setiap wilayah sungai memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan sumber daya air, irigasi, pertanian, dan ekosistem lokal. Pengelolaan yang baik dari wilayah-wilayah sungai ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun.

II.1.2.4. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 disebutkan bahwa uraian potensi pengembangan wilayah disusun dengan memperhatikan kesesuaian dengan uraian pada sub bab terdahulu serta berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Sehingga penyajian potensi pengembangan wilayah diklasifikasi ke dalam struktur ruang dan pola ruang wilayah. Secara skematik kerangka pemikiran hubungan antara uraian kondisi geografi daerah dengan uraian potensi pengembangan wilayah disampaikan pada **Gambar II.5.**

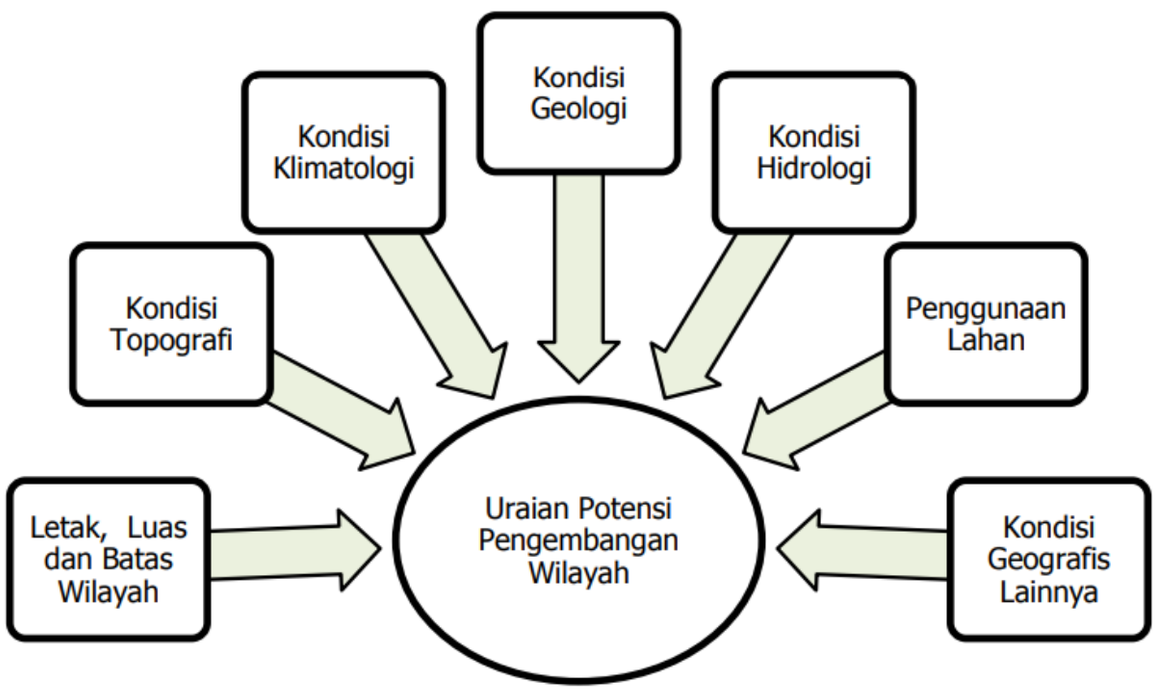

Gambar II.5 Gambar Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah
Sumber: Lampiran Permendagri No.86/2017

II.1.2.4.1. Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan serta sistem prasarana maupun sarana. Struktur ruang wilayah kota merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal kota dan jaringan infrastruktur kota sampai akhir masa perencanaan, yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani fungsi kegiatan yang ada ataupun direncanakan dalam wilayah kota pada skala

kota, yang merupakan satu kesatuan dari sistem regional, provinsi, nasional bahkaan internasional.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Simalungun adalah strategi penyusunan pusat-pusat permukiman dan jaringan prasarana serta sarana (terutama transportasi) yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pusat permukiman ini berfungsi sebagai tempat koleksi dan distribusi komoditas/jasa dan berkembang secara hierarkis sesuai dengan fungsi dan perannya, baik sebagai pusat pengembangan maupun pusat kegiatan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Simalungun mencakup beberapa aspek berikut:

1. Rencana Sistem Pusat Permukiman: Penataan pusat-pusat permukiman agar berfungsi optimal sebagai pusat pengumpulan dan distribusi.
2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi: Pengembangan jaringan transportasi untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas.
3. Rencana Sistem Jaringan Energi: Penyediaan dan pengelolaan sumber daya energi yang efisien.
4. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi: Pengembangan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan konektivitas.
5. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air: Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung kebutuhan domestik dan pertanian.
6. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya: Pengembangan infrastruktur lainnya yang mendukung kehidupan sosial ekonomi.

Tantangan utama dalam pengembangan struktur ruang di Kabupaten Simalungun adalah perbedaan karakteristik antara wilayah dataran tinggi (Simalungun Atas) dan dataran rendah (Simalungun Bawah). Penetapan struktur ruang wilayah berfokus pada penguatan sistem struktur ruang mikro di wilayah atas yang lebih sulit dikembangkan karena keterbatasan geografis.

Penguatan ini bertujuan membuka akses dari pusat-pusat penghasil sumber daya primer menuju pusat pelayanan lokal dan lingkungan. Secara keseluruhan, rencana ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan kebutuhan masyarakat. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada **Gambar II.6** berikut :

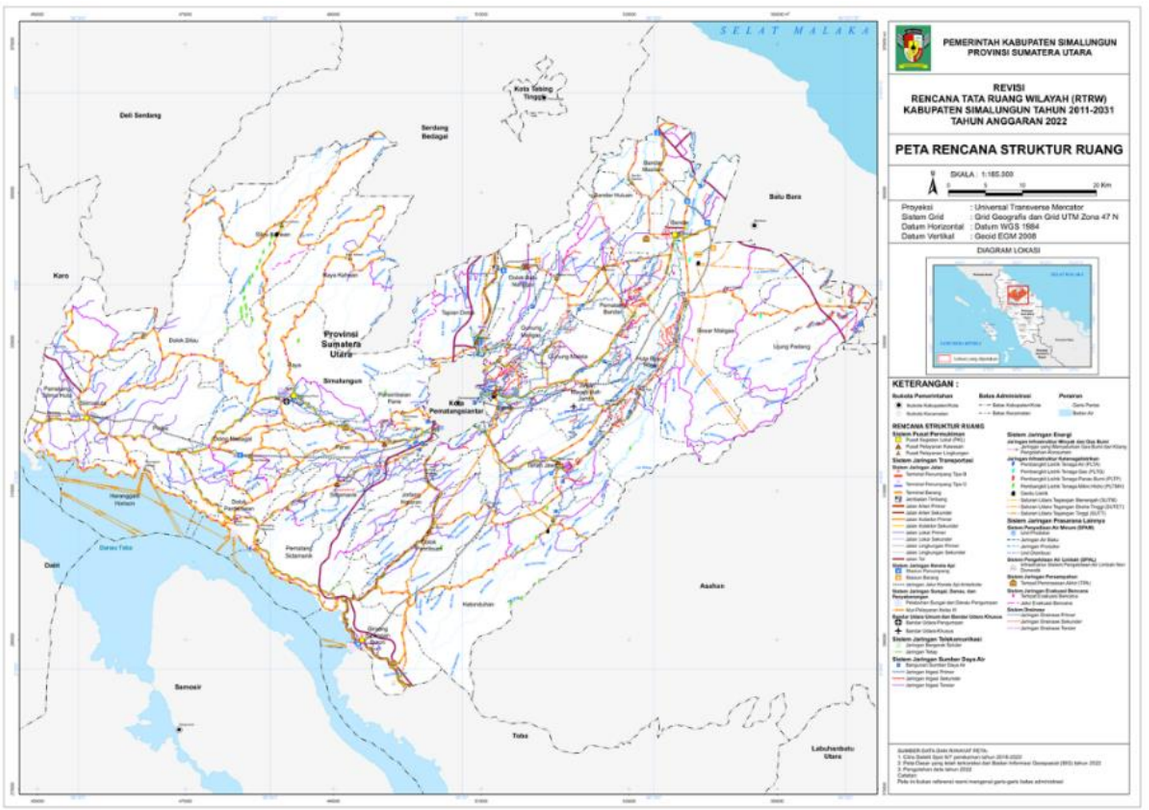

Gambar II.6 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun
Sumber: Peta Pendukung RTRW Kabupaten Simalungun, 2022

II.1.2.4.2. Pola Ruang Wilayah

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Rencana pola ruang Kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

a. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
d. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW Nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi, serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
e. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
f. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021, ditetapkan bahwa Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, dapat terdiri dari badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan hutan adat, kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya, kawasan ekosistem mangrove.

Sedangkan kawasan peruntukan budidaya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, dapat terdiri atas: kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pergaraman, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

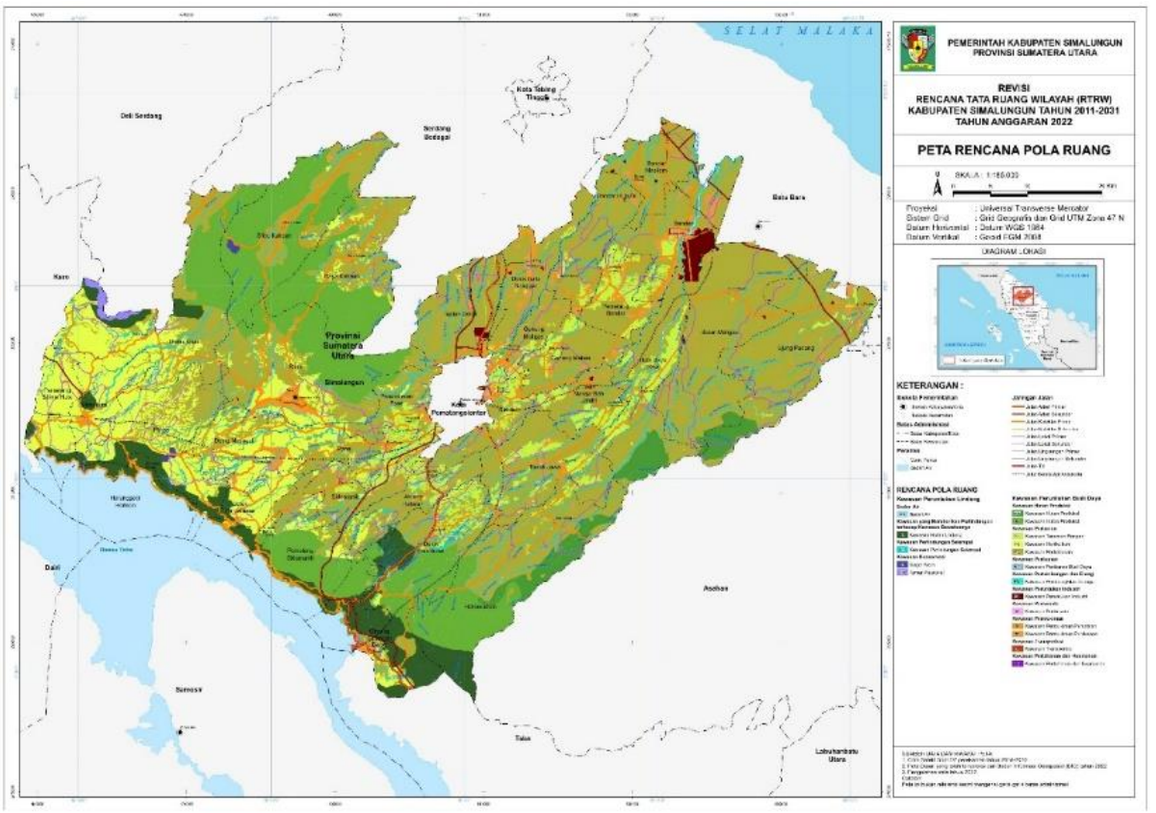

Gambar II.7 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Simalungun
Sumber: RTRW Kabupaten Simalungun, 2023

Secara hirarki rencana pola ruang Kabupaten Simalungun mengikuti arahan pola ruang RTRWN, RTRWP dan lainnya yang merupakan rencana tata ruang diatasnya serta disesuaikan dengan klasifikasi nomenklatur sistem database dalam Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Basis Data dan Penyajian Peta RTRW dan Peta RDTR. Berdasarkan kriteria dan hal tersebut diatas, arahan rencana pola ruang Kabupaten Simalungun direncanakan terdiri atas 13 (tiga belas) kawasan dengan Kawasan Lindung sebanyak 4 (empat) kawasan dan Kawasan Budidaya sebanyak 9 (sembilan) kawasan. Rencana pola ruang Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada **Tabel II.7.**

Tabel II.7 Rencana Pola Ruang Kabupaten Simalungun Tahun 2023

Kawasan	Sub Kawasan	Luas (Ha)	Persen
Badan Air	Badan Air	22.972,55	4,99
Kawasan Konservasi	Taman Nasional	876,22	0,19
	Cagar Alam	407,88	0,09
Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Perlindungan Setempat	19.758,77	4,29
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan Hutan Lindung	22.993,48	5,00
Total Kawasan Lindung		**67.008,89**	**14,56**
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	9.404,38	2,04
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	68.317,57	14,85
Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	281,42	0,06
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Budidaya	89,73	0,02
Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perdesaan	18.977,01	4,12
	Kawasan Permukiman Perkotaan	7.161,26	1,56
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	35,32	0,01
Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	31,37	0,01
Kawasan Pertanian	Kawasan Hortikultura	51.126,23	11,11
	Kawasan Perkebunan	207.412,68	45,08
	Kawasan Tanaman Pangan	27.819,65	6,05
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	2.465,05	0,54
Kawasan Transportasi	Kawasan Transportasi	17,17	0,00
Total Kawasan Budidaya		**393.138,83**	**85,44**
Total Pola Ruang		**460.147,73**	**100,00**

Sumber : RTRW Kabupaten Simalungun, 2023

Penggunaan lahan di Kabupaten Simalungun sangat beragam, meliputi permukiman, persawahan, tegalan/kebun campuran, perkebunan besar, perkebunan rakyat, hutan, semak/alang-alang, kolam/tambak, rawa-rawa, dan lainnya. Perkembangan penduduk, kemajuan ekonomi, teknologi dan informasi, serta perubahan nasional dan global mendorong perubahan pemanfaatan ruang. Perubahan ini mencakup perluasan ruang permukiman untuk rumah, perdagangan, jasa, dan fasilitas permukiman lainnya seiring dengan penyebaran penduduk. Desentralisasi keuangan dan pembangunan ke daerah juga mempercepat perluasan lahan permukiman. Penggunaan lahan untuk kegiatan non-pertanian seperti industri, transportasi, dan pertambangan berkembang pesat dan mengubah pola pemanfaatan ruang, menjadi lebih terkonsentrasi. Untuk wilayah yang masih memiliki kawasan hutan dengan fungsi ekologis penting, diperlukan pengendalian alih fungsi lahan untuk mencegah perambahan dan

penggunaan untuk usaha ekonomi formal. Kabupaten Simalungun memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Pertanian di wilayah ini mencakup sayuran dan buah-buahan yang sebagian besar dipasarkan dengan baik dan diekspor ke luar negeri maupun provinsi lain. Perkebunan luas dengan komoditas seperti sawit, karet, kopi, kakao, dan teh dimiliki oleh perkebunan besar dan rakyat

Berdasarkan **Gambar II.8** dapat diketahui bahwa alokasi ruang wilayah Kabupaten Simalungun secara rasio lebih dominan adalah kawasan yang diperuntukan kawasan budidaya yaitu sebesar 393.138,83 Ha atau 85,44% dari total pola ruang, sedangkan peruntukan ruang sebagai kawasan lindung sebesar 67.008,89 Ha atau 14,56% dari total pola ruang.

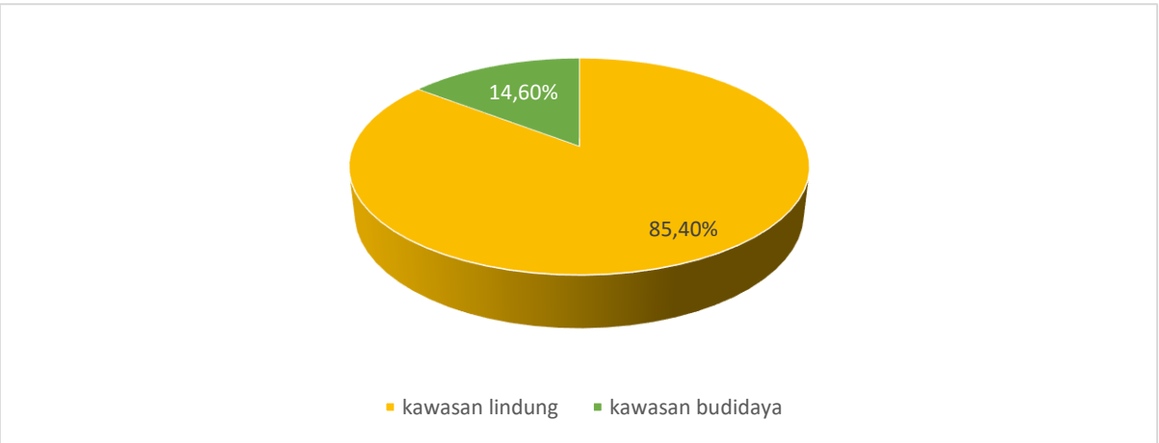

Gambar II.8 Persentase Rencana Kawasan Lindung dengan Kawasan Budidaya
Sumber: RTRW Kabupaten Simalungun, 2023

II.1.2.4.3. Rencana Kawasan Lindung Kabupaten

Kawasan peruntukan lindung merupakan area yang ditetapkan dengan tujuan utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, buatan, serta nilai sejarah dan budaya, demi mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan kawasan lindung secara umum melibatkan penetapan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatannya. Tujuannya adalah mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup melalui pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan pelestariannya, sehingga penetapan alokasi ruang dapat mendukung pengembangan wilayah sesuai dengan kapasitas, daya dukung, dan daya tampung wilayah tersebut.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelumnya, luas kawasan lindung di kabupaten tersebut ditetapkan sebesar 16.823,06 hektar, dengan sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung. Namun, dalam revisi RTRW terbaru, beberapa kebijakan terkait penataan dan pemanfaatan ruang telah mengalami perubahan, termasuk penetapan kawasan hutan. Pada RTRW sebelumnya, penetapan hutan lindung didasarkan pada SK Menhut No. 44 Tahun 2005, sedangkan dalam revisi terbaru, digunakan SK Menlhk No. 6609 Tahun 2021. Adapun luasan kawasan lindung yang ditetapkan pada kegiatn revisi pada wilayah Kabupaten Simalungun adalah 67.008,89 Ha

atau 14,56% dari luas total pola ruang. untuk lebih jelasnya kawasan Lindung yang terdapat di wilayah Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.8 Luas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Simalungun

Pola Ruang Kawasan Lindung	Kode	Luas (Ha)	Persen Terhadap Kawasan Lindung
Kawasan Hutan Lindung	**HL**	22.993,48	34,30
Kawasan Perlindungan Setempat	**PS**	19.758,77	29,49
Badan Air	**BA**	22.972,55	34,29
Cagar Alam	**CA**	407,88	0,61
Taman Nasional	**TN**	876,22	1,31
Total		**67.008,89**	**100,00**

Sumber: RTRW Kabupaten Simalungun 2023

Berdasarkan data diketahui bahwa rencana kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 22.993,48 Ha (34,30%), kawasan badan air seluas 22.976,80 (34,27%), dari total luas kawasan lindung yang direncanakan. Sedangkan luas terkecil sebagai kawasan lindung berada pada kawasan cagar alam yaitu sebesar 407,88 Ha atau 0,61% dari total luas kawasan lindung.

Di Kabupaten Simalungun, kawasan perlindungan setempat mencakup luas sebesar 19.758,77 hektar atau 4,29% dari total luas pola ruang, dan 29,49% dari total luas kawasan lindung. Kawasan perlindungan ini mencakup sempadan sungai, sempadan danau, dan sempadan ketenagalistrikan. Tujuan penetapan badan air sebagai bagian dari kawasan lindung adalah untuk merumuskan aturan yang melindungi, mengendalikan, dan/atau melestarikan badan air, agar daya dukung dan daya tampung badan air tetap terjaga. Luas yang direncanakan untuk badan air sebagai kawasan lindung adalah 22.972,55 hektar, atau 4,99% dari luas rencana pola ruang, dan 34,28% dari total kawasan yang direncanakan sebagai kawasan lindung.

Kawasan cagar alam merupakan area suaka alam yang memiliki keunikan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang harus dilindungi dan dilestarikan, sehingga perkembangannya berlangsung secara alami tanpa campur tangan manusia. Sementara taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

II.1.2.4.4. Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya adalah area yang ditetapkan untuk pengembangan kegiatan budidaya berdasarkan kesesuaian lahan. Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan lahan atau daya dukung terhadap kegiatan penggunaan lahan tertentu, serta potensi pengembangan kegiatan budidaya berdasarkan evaluasi ekonomi dan spasial. Kawasan budidaya mencerminkan aktivitas

dominan yang berkembang di dalamnya, namun tetap memungkinkan adanya kegiatan budidaya lainnya. Sebagai contoh, di kawasan peruntukan industri, perumahan untuk para pekerja dapat dikembangkan.

Tujuan penetapan kawasan budidaya adalah untuk mempermudah pengelolaan kegiatan di dalamnya, termasuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan lain sebagainya. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung akan lebih efisien jika didasarkan pada kegiatan yang cukup besar untuk mencapai skala ekonomi yang optimal.

Arahan pola pemanfaatan ruang, baik ruang darat maupun laut, untuk kegiatan budidaya mencakup kawasan hutan produksi, hutan tanaman rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, industri, permukiman, dan kawasan peruntukan budidaya lainnya. Di Kabupaten Simalungun, kawasan peruntukan budidaya mencakup sekitar 393.138,83 hektar atau 85,44% dari total luas rencana pola ruang. Kawasan ini meliputi hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, permukiman, transportasi, serta kawasan pertahanan dan keamanan. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dan penjabaran berikut :

Tabel II.9 Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Simalungun

Kawasan	Sub Kawasan	Kode	Luas (Ha)	Persen
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	HPT	9.404,38	2,39
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	HP	68.317,57	17,38
Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	W	281,42	0,07
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Budidaya	IK-2	89,73	0,02
Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perdesaan	PD	18.977,01	4,83
	Kawasan Permukiman Perkotaan	PK	7.161,26	1,82
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HK	35,32	0,01
Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	31,37	0,01
Kawasan Pertanian	Kawasan Hortikultura	P-2	51.126,23	13,00
	Kawasan Perkebunan	P-3	207.412,68	52,76
	Kawasan Tanaman Pangan	P-1	27.819,65	7,08
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	2.465,05	0,63
Kawasan Transportasi	Kawasan Transportasi	TR	17,17	0,00
Total Kawasan Budidaya			**393.138,83**	**100,00**

Sumber : RTRW Kabupaten Simalungun, 2023

Kabupaten Simalungun memiliki total luas kawasan budidaya sebesar 393.138,83 hektar, yang mencakup berbagai peruntukan. Kawasan perkebunan merupakan bagian terbesar dengan 207.412,68 hektar (52,76%), diikuti oleh kawasan hutan produksi tetap

(68.317,57 hektar atau 17,38%) dan kawasan hortikultura (51.126,23 hektar atau 13,00%). Selain itu, terdapat kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan, perikanan budidaya, pariwisata, industri, pertahanan dan keamanan, serta transportasi. Kawasan-kawasan ini ditetapkan berdasarkan kesesuaian lahan untuk mendukung berbagai kegiatan budidaya dan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.

II.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung pembangunan daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya atau ekosistem secara berkelanjutan, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui status daya dukung dan daya tampung agar dapat membuat perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan.

Tabel II.10 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Simalungun

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pangan (Kkal)	Ketersediaan Pangan (Kkal)	Selisih Ketersediaan dengan Kebutuhan	Status Daya Dukung Pangan
1	Bandar	63.792.729.000	93.920.217.249	30.127.488.249	Belum Terlampaui
2	Bandar Huluan	23.251.777.500	58.379.834.562	35.128.057.062	Belum Terlampaui
3	Bandar Masilam	24.189.207.000	62.089.492.061	37.900.285.061	Belum Terlampaui
4	Bosar Maligas	33.901.528.500	114.127.716.100	80.226.187.600	Belum Terlampaui
5	Dolog Masagal	11.262.951.000	63.836.172.411	52.573.221.411	Belum Terlampaui
6	Dolok Batu Nanggar	36.138.175.500	54.326.456.286	18.188.280.786	Belum Terlampaui
7	Dolok Panribuan	17.713.048.500	138.371.207.409	120.658.158.909	Belum Terlampaui
8	Dolok Pardamean	12.058.578.000	49.501.946.983	37.443.368.983	Belum Terlampaui
9	Dolok Silau	14.445.459.000	162.003.603.564	147.558.144.564	Belum Terlampaui
10	Girsang Sipangan Bolon	14.519.809.500	75.477.324.502	60.957.515.002	Belum Terlampaui
11	Gunung Malela	33.397.171.500	51.802.705.656	18.405.534.156	Belum Terlampaui
12	Gunung Maligas	27.529.614.000	34.532.653.416	7.003.039.416	Belum Terlampaui
13	Haranggaol Horison	5.897.451.000	59.729.880.790	53.832.429.790	Belum Terlampaui
14	Hatonduhan	21.590.005.500	152.391.300.340	130.801.294.840	Belum Terlampaui

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pangan (Kkal)	Ketersediaan Pangan (Kkal)	Selisih Ketersediaan dengan Kebutuhan	Status Daya Dukung Pangan
15	Huta Bayu Raja	28.425.652.500	134.232.195.902	105.806.543.402	Belum Terlampaui
16	Jawa Maraja Bah Jambi	18.061.806.000	52.629.449.690	34.567.643.690	Belum Terlampaui
17	Jorlang Hataran	15.494.797.500	62.360.753.950	46.865.956.450	Belum Terlampaui
18	Panei	23.287.803.000	87.081.437.250	63.793.634.250	Belum Terlampaui
19	Panombeian Pane	20.457.118.500	61.425.915.508	40.968.797.008	Belum Terlampaui
20	Pematang Bandar	31.184.286.000	54.958.932.751	23.774.646.751	Belum Terlampaui
21	Pematang Sidamanik	15.800.631.000	94.066.646.839	78.266.015.839	Belum Terlampaui
22	Pematang Silimahuta	10.944.087.000	43.355.359.934	32.411.272.934	Belum Terlampaui
23	Purba	22.331.211.000	111.010.148.143	88.678.937.143	Belum Terlampaui
24	Raya	24.214.501.500	178.650.898.118	154.436.396.618	Belum Terlampaui
25	Raya Kahean	17.418.712.500	95.446.065.373	78.027.352.873	Belum Terlampaui
26	Siantar	58.331.416.500	67.698.954.655	9.367.538.155	Belum Terlampaui
27	Sidamanik	24.299.583.000	50.130.319.963	25.830.736.963	Belum Terlampaui
28	Silimakuta	14.249.235.000	48.369.061.446	34.119.826.446	Belum Terlampaui
29	Silou Kahean	15.360.660.000	106.403.447.450	91.042.787.450	Belum Terlampaui
30	Tanah Jawa	43.657.540.500	115.042.253.094	71.384.712.594	Belum Terlampaui
31	Tapian Dolok	35.855.337.000	48.308.913.010	12.453.576.010	Belum Terlampaui
32	Ujung Padang	34.970.796.000	114.209.677.793	79.238.881.793	Belum Terlampaui
Kabupaten Simalungun		**794.032.680.000**	**2.695.870.942.198**	**1.901.838.262.198**	**Belum Terlampaui**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029.

Analisis status daya dukung pangan dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan di suatu wilayah, yang telah dibagi menjadi subwilayah dalam bentuk grid. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi grid-grid yang mengalami kekurangan pangan serta grid-grid yang memiliki kelebihan atau surplus ketersediaan pangan. Berdasarkan **Tabel II.10**, status daya dukung dan daya tampung pangan di Kabupaten Simalungun belum terlampaui dengan total kebutuhan sebanyak 794.032.680.000 Kkal sedangkan total ketersedian sebanyak 2.695.870.942.198 Kkal. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas wilayah Kabupaten Simalungun masih mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya atau dengan kata lain, jumlah produksi atau ketersediaan pangan yang dihasilkan di Kabupaten Simalungun cukup untuk mencukupi kebutuhan masyarakat tanpa memberikan tekanan berlebih pada ekosistem. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Simalungun memiliki potensi yang baik dalam mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan, terutama di sektor pertanian dan perkebunan sebagai penyokong utama ketersediaan pangan. Namun, untuk menjaga kondisi ini di masa depan, diperlukan upaya pengelolaan yang tepat, seperti peningkatan

produktivitas pangan, efisiensi distribusi, serta perlindungan lingkungan untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung pangan tersebut.

Tabel II.11 Status Daya Dukung Air Kabupaten Simalungun

No.	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/Th)	Kebutuhan Air (m3/Th)	Selisih (m3/Th)	Status DDDT Air
1	Bandar	81.757.930,70	61.072.065,60	22.995.134,50	Belum Terlampaui
2	Bandar Huluan	59.051.266,20	44.172.476,60	15.727.130,40	Belum Terlampaui
3	Bandar Masilam	59.350.744,90	35.507.726,50	24.719.221,00	Belum Terlampaui
4	Bosar Maligas	121.754.729,40	114.473.359,50	8.521.775,50	Belum Terlampaui
5	Dolog Masagal	62.476.280,60	21.300.886,20	41.577.752,20	Belum Terlampaui
6	Dolok Batu Nanggar	51.196.546,10	41.632.377,20	10.881.080,30	Belum Terlampaui
7	Dolok Panribuan	141.370.527,20	49.924.590,00	92.087.910,20	Belum Terlampaui
8	Dolok Pardamean	51.922.583,80	14.337.435,50	38.023.629,70	Belum Terlampaui
9	Dolok Silau	175.100.635,90	41.501.715,60	134.119.943,90	Belum Terlampaui
10	Girsang Sipangan Bolon	93.977.751,60	11.858.390,20	82.644.557,80	Belum Terlampaui
11	Gunung Malela	43.720.226,90	44.592.289,60	335.207,90	Belum Terlampaui
12	Gunung Maligas	26.695.375,70	24.934.934,40	2.753.475,70	Belum Terlampaui
13	Haranggaol Horison	99.980.105,20	1.732.089,30	98.458.923,30	Belum Terlampaui
14	Hatonduhan	151.220.312,90	92.824.023,60	59.176.809,10	Belum Terlampaui
15	Huta Bayu Raja	116.466.226,10	77.773.162,90	39.724.196,20	Belum Terlampaui
16	Jawa Maraja Bah Jambi	40.174.758,40	40.687.243,70	146.407,70	Belum Terlampaui
17	Jorlang Hataran	50.536.888,20	35.574.681,50	15.522.766,50	Belum Terlampaui
18	Panei	68.390.364,40	44.406.004,10	24.822.323,30	Belum Terlampaui
19	Panombeian Pane	52.039.961,50	33.442.247,30	19.334.890,80	Belum Terlampaui
20	Pematang Bandar	40.515.532,30	45.427.698,20	-3.782.671,10	Terlampaui
21	Pematang Sidamanik	108.095.020,50	20.487.667,20	88.180.771,70	Belum Terlampaui
22	Pematang Silimahuta	43.830.860,10	18.935.979,00	25.289.455,30	Belum Terlampaui
23	Purba	119.329.200,20	32.103.246,70	88.033.149,90	Belum Terlampaui
24	Raya	190.855.986,00	38.342.500,80	153.391.604,60	Belum Terlampaui
25	Raya Kahean	99.872.075,20	52.323.208,80	48.179.530,80	Belum Terlampaui
26	Siantar	51.019.296,30	46.503.846,60	6.639.558,50	Belum Terlampaui
27	Sidamanik	43.940.073,40	35.581.880,40	9.245.167,80	Belum Terlampaui
28	Silimakuta	41.578.557,60	20.663.524,10	21.429.204,30	Belum Terlampaui
29	Silou Kahean	108.875.014,10	59.833.286,40	49.602.146,50	Belum Terlampaui
30	Tanah Jawa	89.370.914,30	85.128.597,20	5.830.766,90	Belum Terlampaui
31	Tapian Dolok	57.566.888,20	51.316.326,20	7.554.586,20	Belum Terlampaui
32	Ujung Padang	132.453.846,70	99.400.921,90	34.333.233,40	Belum Terlampaui
Kabupaten Simalungun		**2.674.486.480,60**	**1.408.986.839,80**	**1.265.499.640,80**	**BelumTerlampaui**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029.

Status daya dukung air adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan kebutuhan air bagi manusia, ekosistem, dan aktivitas ekonomi, serta kapasitas lingkungan dalam mengelola dampak penggunaan air, seperti polusi atau eksploitasi berlebih, tanpa mengalami degradasi. Dalam analisis ketersediaan

air, perhitungan didasarkan pada koefisien limpasan air hujan untuk setiap jenis penutup lahan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan penduduk dan kebutuhan lahan untuk pangan. Berdasarkan hasil analisis, total ketersediaan air di Kabupaten Simalungun pada tahun 2023 mencapai 2.674.486.480,6 m^3 per tahun, sedangkan total kebutuhan air pada tahun yang sama adalah 1.408.986.839,8 m^3 per tahun. Dengan demikian, terdapat kelebihan ketersediaan air sebesar 1.265.499.640,8 m^3 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa status daya dukung air di Kabupaten Simalungun pada tahun 2023 masih dalam kondisi aman dan belum terlampaui. Dengan kata lain, ketersediaan air, baik dari sumber permukaan seperti sungai dan danau, maupun dari air tanah masih mencukupi untuk mendukung kebutuhan saat ini. Selain itu, kemampuan lingkungan untuk menyerap dan mengelola dampak dari penggunaan air, seperti polusi atau eksploitasi berlebihan masih dalam batas toleransi yang aman. Namun, untuk mempertahankan kondisi ini, penting bagi Kabupaten Simalungun untuk dapat mengelola sumber daya air secara bijaksana melalui perlindungan daerah tangkapan air, pengendalian pencemaran, dan efisiensi dalam penggunaan air agar daya dukung air tersebut tidak terancam di masa depan.

Tabel II.12 Persentase Luas Kabupaten Simalungun Berdasarkan Jasa Lingkungan Penyedia Pangan dan Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir (%)

No.	Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (%)						Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir (%)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah (%)
1	Bandar	18,5	31	-	42	8,5	100	-	2,1	5,7	16,3	75,9	100
2	Bandar Huluan	6,3	24,6	-	33,1	35,9	100	-	0,1	15,5	34,3	50,1	100
3	Bandar Masilam	2,6	82	-	13	2,4	100	-	0,6	6,3	1,2	91,9	100
4	Bosar Maligas	0	13,9	-	50,3	35,8	100	-	0,3	8,5	34,3	57	100
5	Dolog Masagal	0,4	67,1	3,7	2,6	26,3	100	2,6	-	4,9	91,3	1,2	100
6	Dolok Batu Nanggar	3,6	7,7	-	53	35,6	100	-	0,1	1,9	32,9	65,1	100
7	Dolok Panribuan	17,4	3,8	23,3	41,6	13,9	100	34,8	-	28,3	28,5	8,4	100
8	Dolok Pardamean	0,5	57	22,5	7,2	12,7	100	4,3	24,7	29,6	36,2	5,2	100
9	Dolok Silau	0,1	44,6	2,3	44,4	8,6	100	31,8	0,2	2,7	51,7	13,6	100
10	Girsang Sipangan Bolon	1,4	14,2	28,8	46,6	9	100	46,6	15,3	36,1	0,3	1,7	100
11	Gunung Malela	14,7	3,2	-	65,4	16,7	100	-	0,5	-	28,6	70,9	100
12	Gunung Maligas	12,7	4,7	-	72,6	10	100	-	-	-	18,3	81,7	100
13	Haranggaol Horison	-	81,2	4,8	2,1	12	100	1,9	83,9	13,8	0,2	0,2	100
14	Hatonduhan	3,9	1	14,9	71,3	8,9	100	19,2	0,1	21,5	6,4	52,8	100
15	Huta Bayu Raja	20,9	28,3	-	39,9	10,9	100	-	1,4	-	55,7	43	100
16	Jawa Maraja Bah Jambi	27,1	7,1	-	61,1	4,7	100	-	0,4	-	34,3	65,2	100
17	Jorlang Hataran	24,7	4,1	13,7	45,9	11,6	100	3,1	-	17,7	33,8	45,3	100
18	Pamatang Silimahuta	0	47	23,6	11,3	18,1	100	1,4	9,7	36,2	41,9	10,8	100
19	Panei	29,5	45,3	-	14,3	10,9	100	-	-	-	82,5	17,5	100
20	Panombeian Pane	23,3	20	1,2	39,4	16	100	4,8	-	1,3	56,9	37	100
21	Pematang Bandar	32,1	5,8	-	54	8	100	-	0,1	2,6	34,7	62,6	100
22	Pematang Sidamanik	2,5	27,1	20,2	21,4	28,9	100	10,7	22,4	46	9,2	11,7	100
23	Purba	0,3	27,5	33	25,3	14	100	24,1	2,4	39,5	31,7	2,3	100
24	Raya	2,9	39,6	1	46,9	9,8	100	37,2	-	1,5	50,2	11,1	100

No.	Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (%)						Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir (%)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah (%)	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Jumlah (%)
25	Raya Kahean	0	2,2	1	89,4	7,4	100	30,7	-	1,1	8,6	59,6	100
26	Siantar	28,2	5,8	-	56,2	9,8	100	-	0,4	-	34,6	65	100
27	Sidamanik	22,8	12,9	0,8	51,6	11,9	100	0	-	2,1	41,2	56,8	100
28	Silimakuta	0,6	72,1	11	11,4	4,8	100	5,4	0	13,1	73,6	7,8	100
29	Silou Kahean	-	15,8	0	69,2	14,9	100	14,4	0,1	0	30	55,5	100
30	Tanah Jawa	21,4	9,6	-	63,7	5,4	100	-	0,1	-	32,8	67,1	100
31	Tapian Dolok	0,2	4,1	-	20,1	75,6	100	-	-	-	76	24	100
32	Ujung Padang	3,2	14,2	9,8	40	32,8	100	-	0	35,9	32,1	32	100
Kabupaten Simalungun		**7,4**	**24,6**	**7,2**	**43,7**	**17,1**	**100**	**12,2**	**5**	**12,8**	**33,6**	**36,4**	**100**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029.

Jasa lingkungan atau jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh manusia dari fungsi alami ekosistem, yang mendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa jasa lingkungan yang diantaranya adalah jasa lingkungan penyedia pangan dan jasa lingkungan pengatur tata aliran air dan banjir. Jasa lingkungan penyedia pangan adalah layanan ekosistem yang secara langsung menyediakan bahan pangan yang dibutuhkan manusia, baik dari sumber alami maupun melalui sistem yang didukung oleh ekosistem. Jasa ini mencakup berbagai sumber daya alam yang mendukung ketersediaan makanan bagi masyarakat. Berdasarkan **Tabel II.12**, jasa lingkungan penyedia pangan Kabupaten Simalungun sebagian besar didominasi oleh lahan dengan jasa lingkungan rendah yang mencapai sekitar 43,7% dari total luas wilayah. Sementara itu, lahan dengan jasa lingkungan tinggi tercatat mencapai sekitar 24,6% dan lahan dengan jasa lingkungan sangat tinggi sekitar 7,4%. Adapun lahan dengan jasa lingkungan sangat rendah mencakup sekitar 17,1% dari total luas Kabupaten Simalungun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Simalungun memiliki kapasitas terbatas dalam menyediakan jasa lingkungan yang mendukung produksi pangan. Lahan dengan jasa lingkungan rendah cenderung memiliki kualitas atau kondisi yang kurang mendukung untuk produksi pangan secara optimal, seperti kesuburan tanah yang rendah, keterbatasan sumber daya air, atau kurangnya pengelolaan ekosistem yang baik. Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat melakukan berbagai upaya agar lahan untuk ketersediaan pangan tetap terjaga seperti melakukan konservasi tanah dan air, penggunaan teknologi pertanian, melakukan pengembangan jenis tanaman pangan alternatif, serta menetapkan area yang cocok untuk pertanian, kawasan lindung, dan kawasan yang membutuhkan rehabilitasi untuk memastikan keseimbangan ekosistem.

Selanjutnya, jasa lingkungan pengatur tata aliran air dan banjir adalah layanan ekosistem yang berfungsi mengelola pergerakan air di suatu wilayah, baik untuk mencegah genangan berlebih (banjir) maupun untuk mendukung ketersediaan air secara merata sepanjang tahun. Jasa ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan siklus hidrologi, mengurangi risiko bencana, dan memastikan keberlanjutan sumber daya air. Berdasarkan data pada **Tabel II.12**, terlihat bahwa di Kabupaten Simalungun jasa pengatur tata aliran air dan banjir didominasi oleh lahan dengan kategori rendah dan sangat rendah, masing-masing mencakup sekitar 33,6% dan 34,6% dari total luas wilayah Kabupaten Simalungun. Sementara itu, lahan dengan kategori sangat tinggi dan tinggi masing-masing hanya mencapai sekitar 12,2% dan 5,0% dari total luas Kabupaten Simalungun. Lahan dengan kategori rendah dan sangat rendah menunjukkan bahwa Kabupaten Simalungun memiliki lahan dengan kemampuan yang terbatas serta kurang efektif dalam mengelola aliran air, yang dapat meningkatkan risiko banjir atau

penurunan kualitas air. Hal ini menandakan perlunya upaya perbaikan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, seperti peningkatan konservasi tanah dan air, serta pembangunan infrastruktur pengendalian banjir untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Lalu terdapat pula jasa lingkungan lainnya yaitu jasa lingkungan pendukung produksi primer merujuk pada fungsi-fungsi ekosistem yang mendukung aktivitas produksi bahan dasar atau sumber daya alam yang digunakan dalam kegiatan ekonomi utama, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Berikut gambaran sebaran lahan jasa lingkungan produksi primer Kabupaten Simalungun.

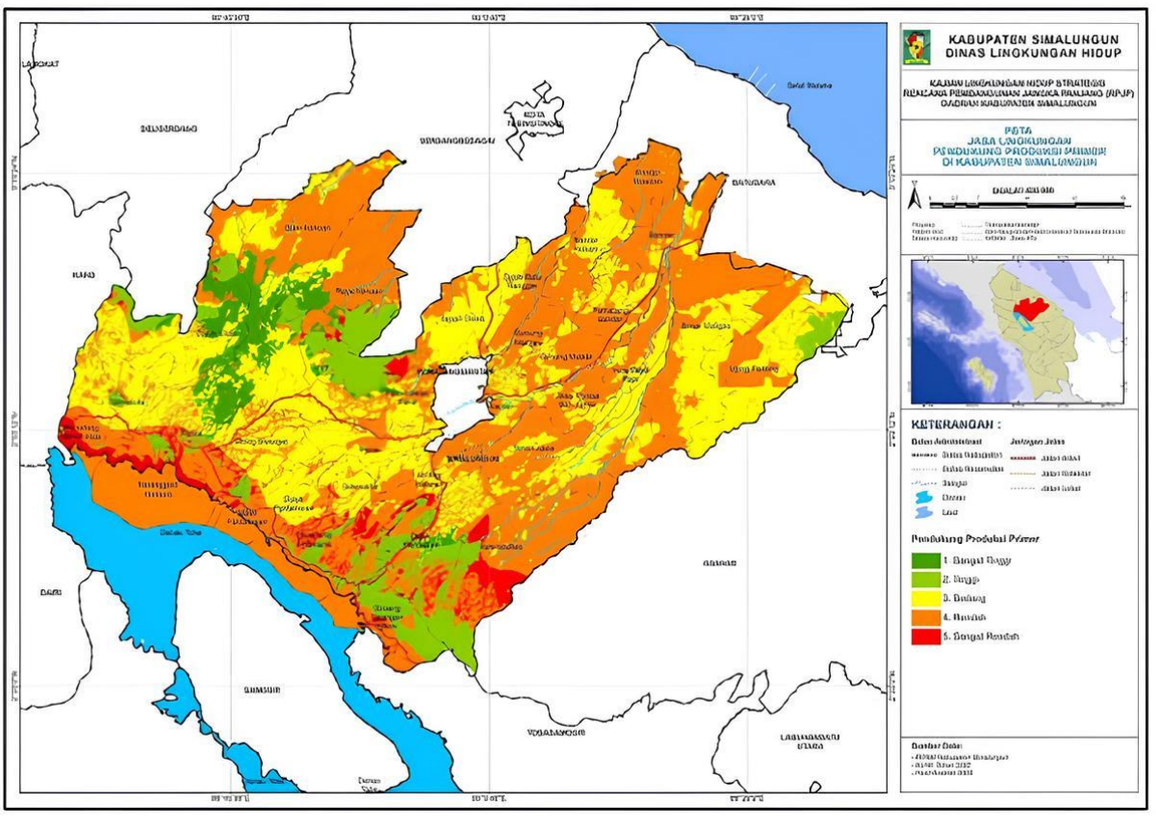

Gambar II.9 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer di Kabupaten Simalungun

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029.

II.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan pangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan air secara mandiri serta menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan menjadi indikator strategis bagi kemandirian dan ketangguhan daerah dalam menghadapi dinamika perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan tekanan global lainnya.

Peningkatan konsumsi energi, khususnya energi listrik dan bahan bakar, sering kali berbanding lurus dengan pertumbuhan sektor industri, transportasi, dan rumah tangga. Namun demikian, tantangan ketersediaan energi, terutama energi yang bersumber dari fosil, serta keterbatasan distribusi di wilayah pedesaan masih menjadi isu yang perlu diperhatikan secara serius. Pada tahun 2024, konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Simalungun berada pada kisaran 422 hingga 522 kWh per tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Angka ini mencerminkan bahwa pemanfaatan energi listrik di wilayah ini masih didominasi oleh kebutuhan rumah tangga, sementara kontribusi sektor produktif seperti pertanian modern, industri kecil, dan jasa masih terbatas.

Disparitas konsumsi listrik antarwilayah juga masih menjadi tantangan, terutama di daerah pedesaan dan kawasan perbukitan yang belum seluruhnya mendapatkan akses listrik secara stabil. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pemanfaatan teknologi di sektor pertanian dan pengolahan hasil bumi, serta menurunkan potensi peningkatan nilai tambah produk lokal. Peningkatan akses dan konsumsi energi yang merata dan berkelanjutan merupakan prasyarat penting dalam mendukung produktivitas sektor-sektor strategis, termasuk sektor pertanian. Ketersediaan energi, terutama energi listrik, menjadi faktor pendukung dalam modernisasi pertanian, pengolahan hasil pertanian, serta distribusi logistik pangan. Oleh karena itu, ketahanan energi tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Dalam rangka membangun kemandirian dan ketangguhan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, perlu ditinjau pula kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Simalungun. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup aspek ketersediaan dan produksi, tetapi juga mencakup keterjangkauan, distribusi, dan stabilitas sistem pangan yang berkelanjutan. Dalam identifikasi kapasitas daya dukung lingkungan hidup, dilakukan beberapa tahapan analisis yang digunakan untuk mengetahui alokasi pemanfaatan ruang, salah satunya adalah dengan mengetahui perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Rencana penggunaan lahan di Kabupaten Simalungun diatur berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan **Tabel II.7** dapat diketahui bahwa alokasi ruang wilayah Simalungun secara rasio lebih dominan pada kawasan yang diperuntukan untuk kawasan budidaya yaitu sebesar 393.138,83 ha atau 85,44% dari total pola ruang, sedangkan peruntukan ruang sebagai kawasan lindung sebesar 67.008,89 ha atau 14,56% dari total pola ruang. Secara keseluruhan, penggunaan lahan didominasi oleh sektor pertanian dan hutan produksi. Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Simalungun meliputi kawasan perkebunan seluas 207.412,68 ha (45,85%), kawasan hutan produksi tetap seluas

68.317,57 ha (14,85%), kawasan hortikultura seluas 51.126,23 ha (11,11%), kawasan tanaman pangan seluas 27.819,65 (6,05%). Penggunaan lahan terkecil meliputi kawasan pertahanan dan keamanan seluas 35,32 ha (0,01%) dan kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 31,37 ha (0,01%). Penggunaan lahan yang didominasi oleh sektor pertanian dan hutan produksi juga mendukung ketahanan pangan Kabupaten Simalungun. Berikut adalah tabel ketahanan pangan Kabupaten Simalungun dari tahun 2019 hingga 2024.

Tabel II.13 Ketersediaan Pangan Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan Pangan Utama					
	- Energi (Kilokalori/ Kapita/ Hari)	3.451	3.350	4.138	4.679	NA
	- Protein (Gram/ Kapita/ Hari)	98,45	91,30	89,8	132,92	NA
2	Indeks Ketahanan Pangan	80.34	81,77	80,84	81,41	82,42
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Simalungun	8,06	7,58	10,17	11,19	8,34
4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak	99,10	99,74	98,66	98,48	99,09

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan Kab. Simalungun, 2023; Badan Pangan Nasional, 2025; dan BPS, 2025.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Simalungun periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan. Meskipun sempat mengalami fluktuasi ringan, capaian indeks secara konsisten berada pada angka di atas 80, dengan nilai tertinggi sebesar 82,42 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam menjaga ketahanan pangan yang baik dan perlu terus ditingkatkan melalui program berkelanjutan di sektor pangan. Pada Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Simalungun periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah mengalami penurunan dari 8,06% di tahun 2020 menjadi 7,58% di 2021, angka prevalensi meningkat pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing menjadi 10,17% dan 11,19%. Namun demikian, pada tahun 2024 prevalensi berhasil ditekan kembali menjadi 8,34%. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa upaya perbaikan konsumsi pangan masyarakat perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan dan menurunkan angka ketidakcukupan konsumsi secara konsisten. Terkait dengan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak, meskipun angka akses air minum layak di Kabupaten Simalungun tetap tinggi, dengan persentase 98,66% pada tahun 2022, terjadi penurunan sedikit pada tahun 2023 menjadi 98,48%. Penurunan ini

perlu menjadi perhatian karena akses air bersih merupakan indikator penting untuk kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan ini antara lain penurunan kualitas infrastruktur air, perubahan pola konsumsi, atau gangguan distribusi di beberapa wilayah. Dampaknya bisa sangat signifikan terhadap kesehatan, terutama dalam mencegah penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat program pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur air bersih yang merata dan berkelanjutan, dengan fokus pada daerah-daerah yang menghadapi kesulitan dalam akses air minum layak.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan diukur melalui pencapaian nilai skor PPH. Berikut data penutup lahan Kabupaten Simalungun yang didominasi oleh perkebunan sawit.

Tabel II.14 Luas Kabupaten Simalungun Berdasarkan Jenis Penutup Lahan (Ha) Tahun 2023

No.	Penutup Lahan	Jumlah (Ha)	Persentase
1	Badan air	22.705,8	4,9
2	Hutan Rimba	56.342,5	12,2
3	Hutan tanaman	6.538,2	1,4
4	Kebun campuran	29.110,2	6,3
5	Kolam ikan air tawar	50,9	0,0
6	Ladang/tegalan	61.831,8	13,4
7	Lahan terbuka	1.285,8	0,3
8	Perkebunan	9.963,1	2,2
9	Perkebunan karet	47.830,4	10,4
10	Perkebunan kelapa sawit	149.340,5	32,5
11	Perkebunan teh	5.069,5	1,1
12	Permukiman	11.728,4	2,5
13	Rawa	75,9	0,0
14	Sawah	32.350,0	7,0
15	Semak belukar	25.913,2	5,6
16	Tambak ikan/udang	5,7	0,0
Total		**460.141,7**	**100,00**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029.

Berdasarkan data penutup lahan, Kabupaten Simalungun didominasi oleh perkebunan sawit dengan luas 149.340,5 ha atau sekitar 32,5% dari total luas Kabupaten Simalungun. Lahan permukiman terdapat seluas 11.728,4 ha atau sekitar 2,5%, sedangkan lahan pertanian seluas 61.831,8 ha atau sekitar 13,4%.

II.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Sepanjang tahun 2023, Kabupaten Simalungun mengalami variasi curah hujan yang signifikan. Berdasarkan data dari Stasiun Klimatologi BMKG, total hari hujan selama tahun 2023 tercatat sebanyak 180 hari dengan rata-rata curah hujan tahunan sekitar 290 mm. Puncak curah hujan terjadi pada bulan November dengan total curah hujan mencapai 520 mm selama 22 hari hujan. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari dengan hanya 60 mm selama 7 hari hujan. Suhu di Kabupaten Simalungun juga menunjukkan fluktuasi yang jelas sepanjang tahun. Suhu terendah yang tercatat adalah 20,5°C pada bulan Januari, sementara suhu tertinggi mencapai 32°C pada bulan Februari.

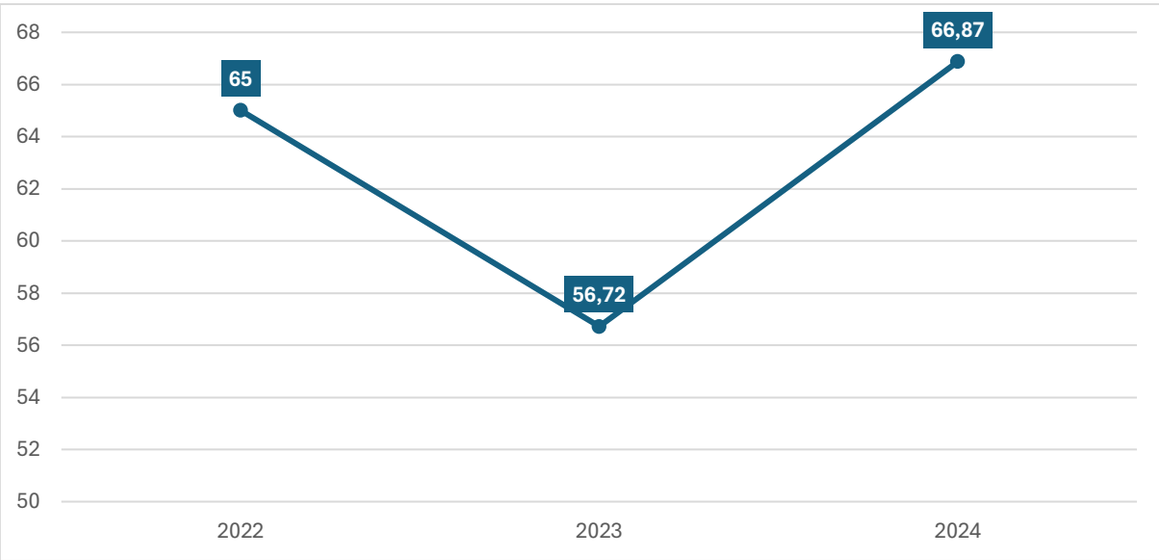

Gambar II.10 Indesk Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2022-2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, 2025.

Indeks kualitas lingkungan hidup juga perlu dibangun untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan agar kehidupan masyarakat Kabupaten Simalungun dapat berjalan dengan nyaman. Indikator penyusun indeks kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan pada **Tabel II.15,** dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 persentase indeks tutupan lahan sebesar 78,06%, indeks kualitas air 80%, dan indeks kuaitas udara 98,17%. Sementara penanganan sampah di Kabupaten Simalungun pada tahun 2023 telah mencapai 24,87%.

Tabel II.15 Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Tutupan Lahan (%)	78,06	78,187	52,11	13,66	36,66	36,96
2	Indeks Kualitas Air (%)	80	80	53,71	80	53,33	53,33

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Indeks Kualitas Udara (%)	98,17	99,66	92,55	90,76	93,92	95,62
4	Persentase timbunan sampah yang ditangani (%)	20	22	24	11,45	24,87	26,07
5	Persentase penyelesaian kasus lingkungan	86,11	68,18	23	100	9	100
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	82,38	90,96	91,75	91,25	92,96	NA
7	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	NA	NA	44,88	45,00	45,22	45,52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Simalungun, 2023; BPS Sumatera Utara, 2025

Dari Tahun 2020 hingga ke Tahun 2023 terjadi perubahan indeks tutupan lahan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun yang lain, ini dikarenakan terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi Hutan Lahan Kering Sekunder dan Pemukiman. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang bersumber dari seluruh badan air pada wilayah Kabupaten/Kota dimana perhitungan status mutu air menggunakan 8 parameter sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Indeks Kualitas Udara (IKU) di hitung menggunakan verifikasi data hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas udara *ambien* yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada wilayah kabupaten/kota dimana perhitungan IKU menggunakan parameter NO_2 dan SO_2 dengan lokasi sampling yaitu perkantoran, industri, transportasi dan pemukiman. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, persentase indeks tutupan lahan sebesar 36,66%, indeks kualitas air 53,33% dan indeks kualitas udara 93,92%. Terkait dengan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak, data menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 90,96% pada tahun 2020 menjadi 92,96% pada tahun 2023. Meskipun ada peningkatan yang signifikan, masih terdapat gap di beberapa daerah, khususnya di wilayah perdesaan dan pemukiman padat penduduk yang belum sepenuhnya terjangkau oleh fasilitas sanitasi yang layak.

Peningkatan akses ini dipengaruhi oleh faktor seperti peningkatan infrastruktur sanitasi, program pemerintah yang mendukung pembangunan fasilitas sanitasi, dan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi mengenai pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Namun, keterbatasan akses sanitasi layak tetap memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, seperti penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air dan sanitasi buruk. Oleh karena itu, peningkatan akses sanitasi yang merata dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau, perlu menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan kesehatan dan lingkungan di masa mendatang.

II.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dapat dijelaskan sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang memiliki potensi untuk mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat. Bencana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia. Konsekuensi dari bencana ini dapat berupa kerugian korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, serta dampak psikologis. Bencana sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, termasuk bencana alam (seperti bencana geologi, bencana vulkanologi, bencana hidrometeorologi, dan karhutla), bencana non alam (seperti gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dan gagal modernisasi), serta bencana sosial (seperti konflik sosial dan teror). Kerawanan bencana alam telah diidentifikasi pada dokumen KRB Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun terdapat 6 (enam) jenis risiko bencana alam. Sebaran kerawanan bencana alam pada kelas risiko tinggi tersebar hampir di seluruh kecamatan.

Tabel II.16 Kondisi Risiko Bencana Alam Untuk Risiko Tinggi per Kecamatan Di Kabupaten Simalungun Tahun 2021

No	Kecamatan	Bencana (Risiko Tinggi)						
		Gempa Bumi	Longsor	Kebakaran	Cuaca Ekstrim	Kekeringan	Banjir	Banjir Bandang
1	Bandar	0		2.496	5.836	0	0,00	76
2	Bandar Huluan	0		2.930	3.573	0	0,00	0
3	Bandar Masilam	0		163	8.049	0	0,00	0
4	Bosar Maligas	0		14.583	1.344	0	0,00	129
5	Dolog Masagal	0	53		8.361	0	0,00	0
6	Dolok Batu	0		119	3.002	0	0,00	304
7	Dolok	0	96	798	6.033	0	0,00	0
8	Dolok	0	1.043		3.881	0	0,02	0
9	Dolok Silau	0	3.155		10.335	0	0,00	0
10	Girsang	0	3.894	6	12	0	0,02	0
11	Gunung Malela	0		1.549	2.566	0	0,00	0
12	Gunung Maligas	0			2.251	0	0,00	76
13	Haranggaol	0	2.070		89	0	0,02	0
14	Hatonduhan	0	2.544	2.581	6.010	0	0,00	720
15	Huta Bayu Raja	0	14	65	7.739	0	0,00	389
16	Jawa Maraja	0			3.307	0	0,00	0
17	Jorlang Hataran	0	134		5.654	0	0,00	0
18	Pamatang	0	1.041		5.631	0	0,02	0
19	Panei	0			7.328	0	0,00	0
20	Panombeian	0	481		5.223	0	0,00	71
21	Pematang	0		1.156	4.144	0	0,00	0
22	Pematang	0	2.033	1.540	3.195	0	0,02	0
23	Purba	0	1.408		10.526	0	0,02	0
24	Raya	0	7.620		7.483	0	0,00	0
25	Raya Kahean	0	4.239		10.587	0	0,00	23
26	Siantar	0			6.023	0	0,00	0

No	Kecamatan	Bencana (Risiko Tinggi)						
		Gempa Bumi	Longsor	Kebakaran	Cuaca Ekstrim	Kekeringan	Banjir	Banjir Bandang
27	Sidamanik	0			3.417	0	0,00	0
28	Silimakuta	0	800		6.247	0	0,00	0
29	Silou Kahean	0	579		8.768	0	0,00	0
30	Tanah Jawa	0			9.688	0	0,00	85
31	Tapian Dolok	0		473	5.166	0	0,00	86
32	Ujung Padang	0		5.761	2.918	0	0,00	0
Jumlah		**0**	**31.204**	**34.221**	**174.386**	**0**	**0,11**	**1.959**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun 2025-2029

Di Kabupaten Simalungun, tidak ada kecamatan yang termasuk dalam kategori risiko tinggi gempa bumi. Namun, 16 kecamatan dengan lereng curam, seperti tebing di sepanjang Danau Toba dan kaki gunung perbukitan, memiliki risiko paling tinggi tanah longsor adalah Kecamatan Raya, total longsor mencakup 31.204 ha. Kebakaran hutan berisiko tinggi terjadi di kecamatan dengan elevasi rendah dan tebing di sekitar Danau Toba, mencakup 34.221 ha. Cuaca ekstrem berisiko tinggi terdapat di semua kecamatan, terutama di Kecamatan Raya Kahean, Purba, dan Dolok Silau, mencakup 174.386 ha.

Selain itu, tidak ada kecamatan dengan risiko tinggi kekeringan. Wilayah yang rawan banjir dengan risiko tinggi hanya mencakup 0,11 ha, sementara banjir bandang berisiko tinggi terjadi di sepanjang tiga sungai besar/kecil, mencakup 1.959 ha. Secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Simalungun memiliki risiko signifikan terhadap bencana cuaca ekstrem, tanah longsor, kebakaran hutan, dan banjir bandang. Lalu, terdapat Indeks ketahanan daerah yang dapat memberikan gambaran tentang seberapa siap dan tangguh suatu daerah dalam menjaga keberlangsungan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan perlindungan kepada masyarakat saat menghadapi berbagai gangguan atau bencana. Berdasarkan LAKIP Tahun 2024, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,22. Capaian ini menunjukkan bahwa ketahanan daerah masih berada pada level yang perlu mendapat perhatian dan penguatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai potensi risiko, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan guna mewujudkan ketahanan daerah yang lebih optimal ke depannya.

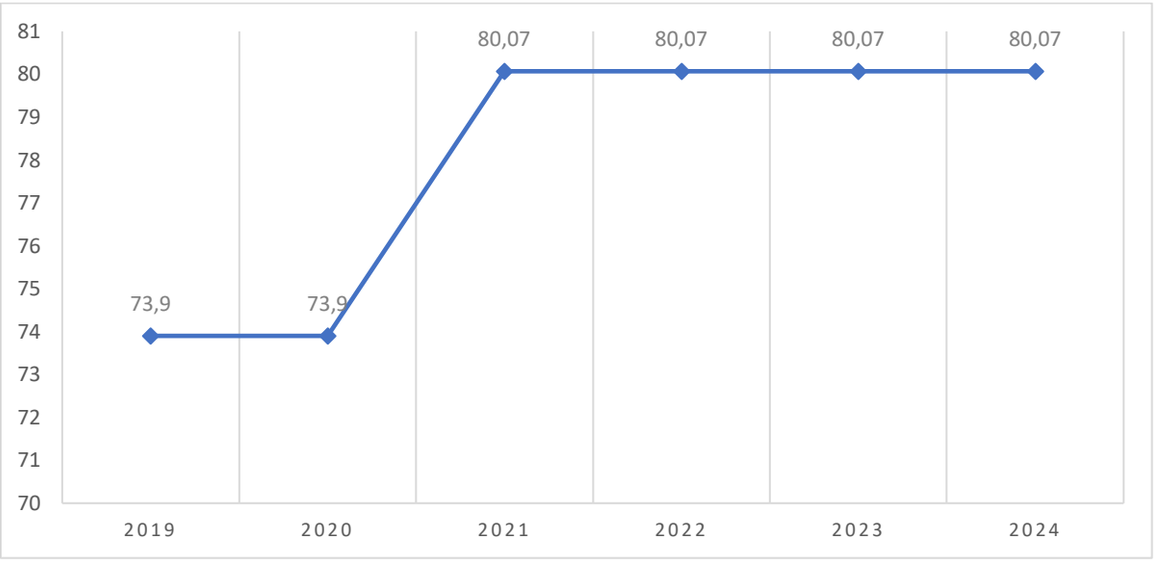

Gambar II.11 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024
Sumber : IRBI, 2024.

Pada tahun 2019 dan 2020, indeks ini tercatat sebesar 73,59 menunjukan tingkat risiko bencana yang relatif stabil. Pada tahun 2021 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai angka 80,07 dan bertahan pada angka tersebut hingga tahun 2024, hal ini menunjukan adanya peningkatan potensi terhadap risiko bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk di wilayah rawan bencana serta kurangnya kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana. Penurunan nilai indeks menunjukan potensi bahaya, kerentanan wilayah dan masyarakat mampu ditangani dengan melalui strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan sinyal posistif yang perlu dipertahankan dengan tetap meningkatkan upaya sistematis dalam mitigasi risiko, peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat, penyediaan infrastruktur tanggap darurat, serta integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan daerah secara lebih optimal.

II.1.7. Demografi

Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran suatu wilayah permasalahan yang terjadi, karena penduduk adalah sebagai objek pokok suatu wilayah yang merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari waktu ke waktu. Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal. Kondisi demografi suatu daerah umumnya menyangkut jumlah dan persebaran, laju pertumbuhan, dinamika serta komposisi lainnya.

II.1.7.1. Jumlah, Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu komponen penting dalam suatu proses pembangunan. Jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk suatu wilayah mampu mempengaruhi struktur ruang, kondisi sosial, serta kondisi ekonomi masyarakat. Jalannya pembangunan memiliki korelasi yang erat dengan komposisi penduduk yang ada. Oleh karenanya, data demografi wilayah memiliki kedudukan yang penting dalam perumusan kebijakan. Jumlah penduduk di Kabupaten Simalungun dijabarkan dalam **Tabel II.17**.

Tabel II.17 Jumlah Penduduk di Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Silimakuta	17.479	17.815	18.233	18.590	18.979
2	Pamatang Silimahuta	13.390	13.659	13.992	14.278	14.589
3	Purba	27.536	28.017	28.624	29.134	29.692
4	Haranggaol Horison	7.041	7.242	7.479	7.694	7.927
5	Dolok Pardamean	15.136	15.310	15.549	15.732	15.939
6	Sidamanik	30.853	31.087	31.453	31.702	31.996
7	Pamatang Sidamanik	19.716	19.981	20.334	20.614	20.926
8	Girsang Sipangan Bolon	17.941	18.242	18.624	18.943	19.293
9	Tanah Jawa	54.900	55.495	56.328	56.957	57.670
10	Hatonduhan	26.632	27.094	27.678	28.167	28.703
11	Dolok Panribuan	22.018	22.343	22.765	23.109	23.488
12	Jorlang Hataran	19.154	19.472	19.878	20.215	20.585
13	Panei	28.326	28.952	29.715	30.382	31.105
14	Panombeian Panei	24.993	25.508	26.141	26.689	27.284
15	Raya	30.150	30.578	31.139	31.591	32.092
16	Dolog Masagal	13.406	13.802	14.268	14.694	15.153
17	Dolok Silou	17.696	18.045	18.476	18.846	19.249
18	Silou Kahean	19.477	19.634	19.873	20.040	20.235
19	Raya Kahean	21.583	21.925	22.364	22.725	23.124
20	Tapian Dolok	45.032	45.539	46.242	46.778	47.383
21	Dolok Batu Nanggar	45.659	46.081	46.699	47.147	47.662
22	Siantar	73.536	74.271	75.323	76.101	76.989
23	Gunung Malela	41.189	41.906	42.811	43.571	44.403
24	Gunung Maligas	33.734	34.395	35.214	35.916	36.681
25	Hutabayu Raja	35.426	35.917	36.565	37.085	37.661
26	Jawa Maraja Bah Jambi	22.892	23.080	23.365	23.564	23.796
27	Pamatang Bandar	38.688	39.284	40.053	40.684	41.379
28	Bandar Huluan	29.484	29.721	30.083	30.335	30.629
29	Bandar	79.006	80.268	81.889	83.226	84.697
30	Bandar Masilam	30.015	30.476	31.071	31.558	32.095
31	Bosar Maligas	43.355	43.580	43.986	44.229	44.532
32	Ujung Padang	44.803	45.008	45.401	45.624	45.909
	Jumlah	**990.246**	**1.003.727**	**1.021.615**	**1.035.920**	**1.051.845**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2025.

Berdasarkan data, jumlah penduduk di Kabupaten Simalungun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk sebanyak 990.246 jiwa dan terus meningkat hingga mencapai 1.051.845 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh angka peningkatan angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan migrasi penduduk. Dampak positif dari pertambahan penduduk termasuk bonus demografi dan peningkatan jumlah tenaga kerja, sementara dampak negatifnya meliputi pengangguran yang lebih tinggi, peningkatan kriminalitas, penurunan kualitas lingkungan, dan terbentuknya permukiman kumuh. Kecamatan dengan peningkatan signifikan antara lain Silimakuta yang naik dari 17.479 jiwa menjadi 18.979 jiwa, Tanah Jawa dari 54.900 jiwa menjadi 57.670 jiwa, dan Bandar dari 79.006 jiwa menjadi 84.697 jiwa. Secara keseluruhan, hampir semua kecamatan di Kabupaten Simalungun menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk dalam periode tersebut.

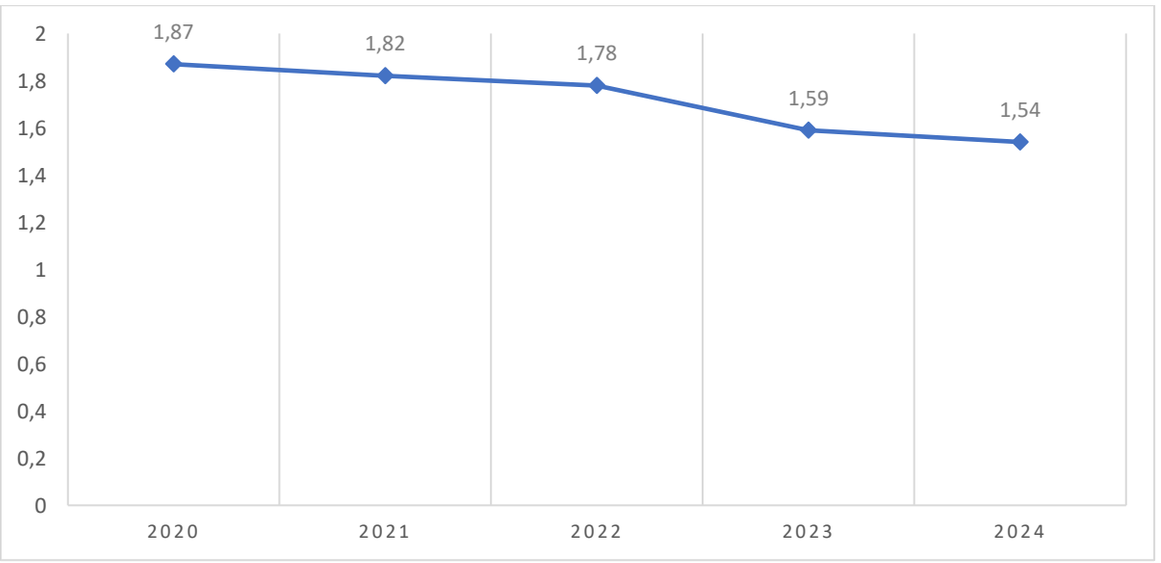

Gambar II.12 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2024.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Simalungun menunjukkan tren yang cenderung menurun dari tahun 2020 hingga 2024, meskipun jumlah penduduk total terus meningkat selama periode tersebut. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk berada pada angka 1,87%. Angka ini kemudian mengalami penurunan bertahap menjadi 1,82% pada tahun 2021, 1,78% pada tahun 2022, dan menurun lebih signifikan menjadi 1,59% pada tahun 2023, dan menjadi 1,54% pada tahun 2024.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini dapat terjadi meskipun jumlah penduduk total meningkat karena beberapa faktor. Pertama, basis populasi yang lebih besar berarti bahwa meskipun jumlah absolut penduduk yang bertambah besar, persentase pertumbuhan relatifnya lebih kecil. Kedua, mungkin terjadi penurunan angka kelahiran atau peningkatan angka kematian, yang berarti bahwa tingkat penambahan alami penduduk lebih lambat. Selain itu, migrasi masuk yang tinggi bisa menyebabkan

peningkatan jumlah penduduk total tanpa mempengaruhi laju pertumbuhan alami. Secara keseluruhan, jumlah penduduk di Kabupaten Simalungun meningkat dari 990.246 jiwa pada tahun 2020 menjadi 1.051.845 jiwa pada tahun 2024.. Namun, penurunan laju pertumbuhan penduduk mencerminkan perubahan dalam dinamika demografis, seperti penurunan angka kelahiran, peningkatan angka kematian, atau perubahan dalam pola migrasi.

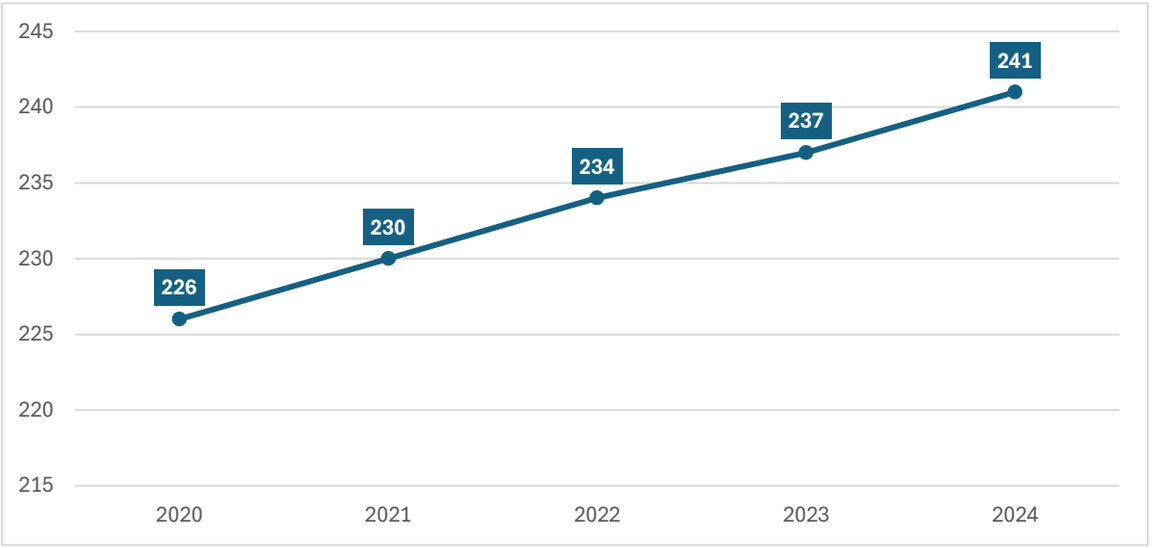

Gambar II.13 Kepadatan Penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Kepadatan penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh variasi jumlah penduduk dan luas wilayah administrasinya. Jumlah penduduk yang meningkat berhubungan dengan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk di Kabupaten Simalungun pada grafik menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk sebesar 226 jiwa/km^2 dan kenaikan ini terus berlanjut hingga mencapai 241 jiwa/km^2 pada tahun 2024.

Peningkatan kepadatan penduduk ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya termasuk peningkatan potensi ekonomi dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, peningkatan kepadatan penduduk dapat menyebabkan masalah seperti terciptanya permukiman kumuh, peningkatan pencemaran lingkungan, dan meningkatnya kompetisi dalam pekerjaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pertumbuhan populasi secara bijak.

II.1.7.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Tabel II.18 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

Kecamatan	Tahun									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
Silimakuta	8.759	8.720	8.914	8.901	9.109	9.124	9.283	9.307	9.464	9.515
Pamatang Silimahuta	6.713	6.677	6.845	6.814	7.008	6.984	7.156	7.122	7.310	7.279
Purba	13.969	13.567	14.216	13.801	14.526	14.098	14.803	14.331	15.092	14.600
Haranggaol Horison	3.537	3.504	3.635	3.607	3.752	3.727	3.861	3.833	3.976	3.951
Dolok Pardamean	7.676	7.460	7.764	7.546	7.885	7.664	7.985	7.747	8.091	7.848
Sidamanik	15.322	15.531	15.445	15.642	15.633	15.820	15.780	15.922	15.936	16.060
Pamatang Sidamanik	9.901	9.815	10.043	9.938	10.229	10.105	10.390	10.224	10.558	10.368
Girsang Sipangan Bolon	8.918	9.023	9.067	9.175	9.257	9.367	9.424	9.519	9.599	9.694
Tanah Jawa	27.484	27.416	27.830	27.665	28.296	28.032	28.690	28.267	29.105	28.565
Hatonduhan	13.305	13.327	13.517	13.577	13.788	13.890	14.026	14.141	14.276	14.427
Dolok Panribuan	11.059	10.959	11.242	11.101	11.475	11.290	11.680	11.429	11.895	11.593
Jorlang Hataran	9.520	9.634	9.676	9.796	9.875	10.003	10.051	10.164	10.234	10.351
Panei	13.997	14.329	14.314	14.638	14.698	15.017	15.052	15.330	15.421	15.684
Panombeian Panei	12.581	12.412	12.831	12.677	13.140	13.001	13.419	13.270	13.711	13.573
Raya	15.041	15.109	15.242	15.336	15.509	15.630	15.738	15.853	15.977	16.115
Dolog Masagal	6.747	6.659	6.931	6.871	7.150	7.118	7.355	7.339	7.570	7.583
Dolok Silou	8.869	8.827	9.033	9.012	9.238	9.238	9.422	9.424	9.614	9.635
Silou Kahean	9.779	9.698	9.852	9.782	9.966	9.907	10.054	9.986	10.147	10.088
Raya Kahean	10.856	10.727	11.018	10.907	11.228	11.136	11.411	11.314	11.603	11.521
Tapian Dolok	23.041	21.991	23.313	22.226	23.685	22.557	23.996	22.782	24.324	23.059
Dolok Batu Nanggar	23.116	22.543	23.323	22.758	23.628	23.071	23.872	23.275	24.130	23.532
Siantar	36.769	36.767	37.140	37.131	37.668	37.655	38.099	38.002	38.554	38.435
Gunung Malela	20.713	20.476	21.092	20.814	21.567	21.244	21.991	21.580	22.435	21.968
Gunung Maligas	17.252	16.482	17.618	16.777	18.065	17.149	18.473	17.443	18.899	17.782
Hutabayu Raja	17.534	17.892	17.783	18.134	18.111	18.454	18.393	18.692	18.689	18.972
Jawa Maraja Bah Jambi	11.370	11.522	11.472	11.608	11.623	11.742	11.743	11.821	11.870	11.926
Pamatang Bandar	19.394	19.294	19.720	19.564	20.134	19.919	20.499	20.185	20.882	20.497
Bandar Huluan	14.823	14.661	14.940	14.781	15.120	14.963	15.261	15.074	15.410	15.219
Bandar	39.756	39.250	40.447	39.821	41.319	40.570	42.096	41.130	42.909	41.788
Bandar Masilam	15.016	14.999	15.254	15.222	15.559	15.512	15.827	15.731	16.108	15.987
Bosar Maligas	21.884	21.471	22.005	21.575	22.218	21.768	22.371	21.858	22.536	21.996
Ujung Padang	22.613	22.190	22.720	22.288	22.921	22.480	23.061	22.563	23.213	22.696
Kabupaten Simalungun	**497.314**	**492.932**	**504.242**	**499.485**	**513.380**	**508.235**	**521.262**	**514.658**	**529.538**	**522.307**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2025.

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Simalungun menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki adalah 497.314 jiwa dan perempuan 492.932 jiwa. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 529.538 jiwa untuk laki-laki dan 522.307 jiwa untuk perempuan pada tahun 2024. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan ini cenderung seimbang di setiap kecamatan. Analisis mengenai perbandingan ini penting

untuk menyusun kebijakan yang berkeadilan gender serta memastikan keterlibatan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan daerah.

II.1.7.3. Struktur penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menjelaskan karakteristik penduduk berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu salah satunya berdasarkan jenis kelamin dan usia penduduk. **Gambar II.14** menunjukkan piramida penduduk Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 yang menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.

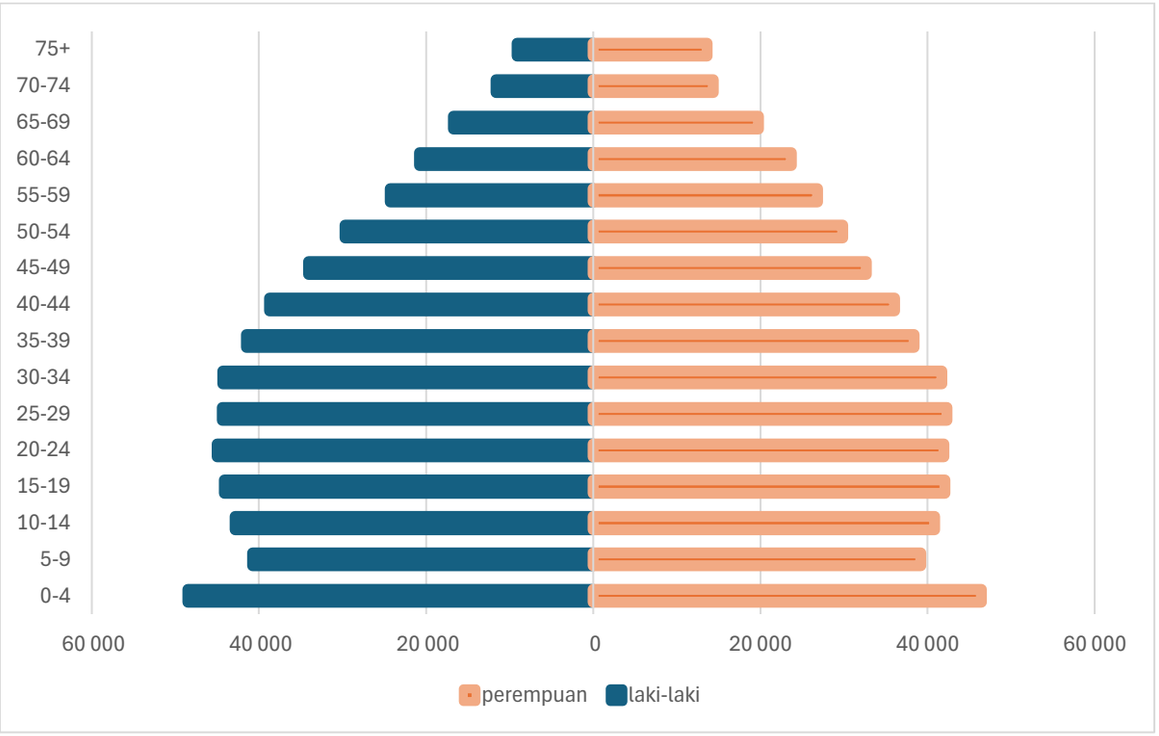

Gambar II.14 Piramida Penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2025.

Piramida penduduk Kabupaten Simalungun tahun 2024 menunjukkan tipe ekspansif, yang ditandai dengan basis yang lebar dan menyempit di bagian atas. Ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Simalungun memiliki tingkat kelahiran yang tinggi serta populasi yang didominasi oleh kelompok umur muda. Jumlah penduduk usia non-produktif di Kabupaten Simalungun, yaitu usia 0-14 tahun, sangat signifikan, serta kelompok usia 65 tahun ke atas yang juga menunjukkan jumlah yang cukup besar. Sementara itu, kelompok usia produktif, yaitu 15-64 tahun, mencakup sebagian besar populasi. Rasio ketergantungan, yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk non-produktif dan penduduk produktif menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Simalungun menanggung beban ketergantungan yang cukup besar. Secara keseluruhan, piramida penduduk ini mengindikasikan adanya potensi tenaga kerja muda yang besar, namun juga tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan untuk kelompok usia muda serta layanan sosial untuk kelompok usia lanjut.

Tabel II.19 Jumlah Penduduk Kabupaten Simalungun Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2024

Tahun	Kelompok Umur				
	2020	2021	2022	2023	2024
0 - 4	77.752	77.725	78.048	85.883	94.934
5 - 9	82.471	82.632	83.097	82.768	79.960
10 - 14	85.357	85.609	86.239	84.331	83.649
15 - 19	87.108	86.956	87.333	86.596	86.207
20 - 24	86.382	85.750	85.411	86.783	86.970
25 - 29	83.696	84.026	84.629	86.085	86.766
30 - 34	77.594	78.312	79.316	82.870	86.061
35 - 39	73.577	74.510	75.761	77.033	79.891
40 - 44	66.644	67.725	69.006	71.585	74.793
45 - 49	60.749	62.161	63.853	63.964	66.761
50 - 54	54.701	56.162	57.874	57.530	59.576
55 - 59	47.689	49.294	51.121	50.226	52.165
60 - 64	40.229	41.885	43.751	42.916	44.511
65 - 69	30.769	32.571	34.414	34.444	36.507
70 - 74	18.251	19.996	21.957	23.070	25.982
>75	17.277	18.413	19.805	19.836	22.766
Jumlah	990.246	1.003.727	1.021.615	1.035.920	1.067.499

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Jumlah penduduk Kabupaten Simalungun menurut kelompok umur tahun 2020-2024, terlihat bahwa total populasi mengalami peningkatan signifikan dari 990.246 jiwa pada tahun 2020 menjadi 1.0067.499 jiwa pada tahun 2024. Kelompok umur 0-14 tahun mengalami sedikit fluktuasi, dengan jumlah yang cenderung meningkat dari 245.580 jiwa pada tahun 2020 menjadi 258.543 jiwa pada tahun 2024. Kelompok usia produktif (15-64 tahun) juga mengalami peningkatan, misalnya kelompok 20-24 tahun yang meningkat dari 86.382 jiwa pada tahun 2020 menjadi 86.970 jiwa pada tahun 2024, dan kelompok 25-29 tahun yang naik dari 83.696 jiwa pada tahun 2020 menjadi 86.766 jiwa pada tahun 2024.

Untuk kelompok umur yang lebih tua (65 tahun ke atas), terdapat peningkatan yang signifikan, terutama di kelompok umur 70-74 tahun yang meningkat dari 18.251 jiwa pada tahun 2020 menjadi 25.982 jiwa pada tahun 2024, serta kelompok umur lebih dari 75 tahun yang naik dari 17.277 jiwa pada tahun 2020 menjadi 22.766 jiwa pada tahun 2024. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah penduduk di semua kelompok umur ini mengindikasikan pertumbuhan populasi yang berkelanjutan di Kabupaten Simalungun. Ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan penyediaan layanan yang memadai untuk semua kelompok usia, termasuk pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.

II.1.7.4. Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk (menurut komposisi umur dan jenis kelamin) di masa yang akan datang didasari oleh asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Perencanaan pembangunan pada tingkat lokal maupun nasional sangat membutuhkan informasi dasar penduduk seperti jumlah penduduk, umur, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya. Dengan demikian proyeksi penduduk sangat bermanfaat dan merupakan kunci aktivitas perencanaan pembangunan, karena dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah dan dasar pengambilan keputusan rencana dimasa yang akan datang dan juga dapat digunakan sebagai evaluasi pencapaian kegiatan pembangunan baik pada jangka pendek, jangka menengah juga jangka panjang.

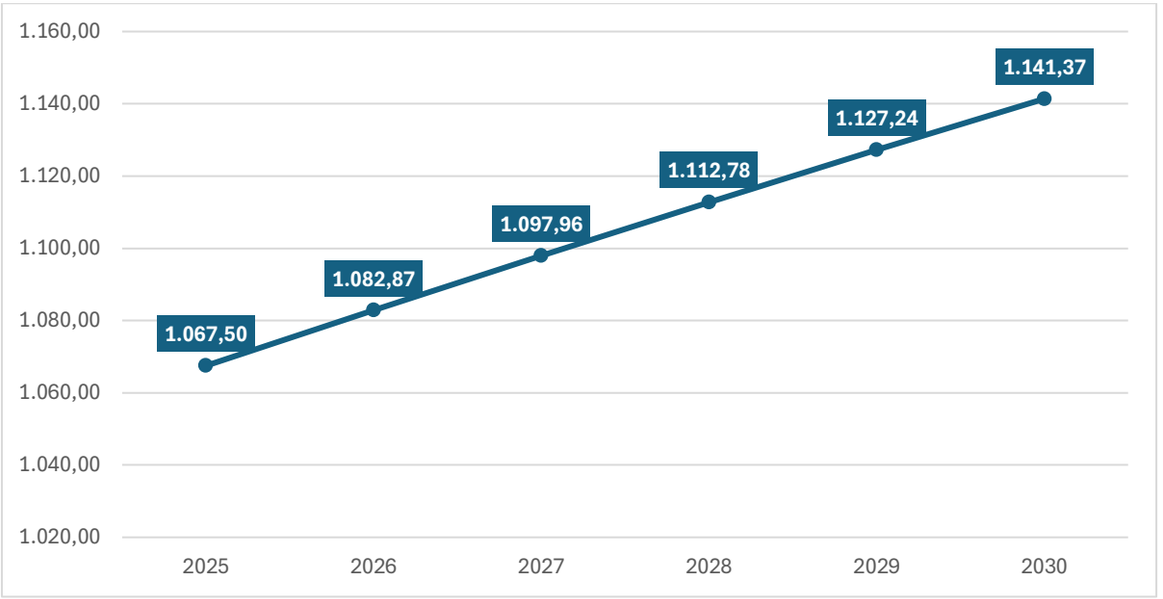

Gambar II.15 Proyeksi Penduduk Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2030 (Ribu Jiwa)

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2025.

Proyeksi penduduk Kabupaten Simalungun menunjukkan adanya tren peningkatan nilai secara konsisten dari tahun 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025, nilai tercatat sebesar 1.067,50 ribu jiwa dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, hingga mencapai angka tertinggi sebesar 1.141,37 ribu jiwa di tahun 2030. Pola pertumbuhan yang stabil ini mencerminkan adanya proyeksi perkembangan positif yang berkelanjutan pada indikator terkait. Selanjutnya, diperlukan upaya penguatan program dan kebijakan yang konsisten untuk menjaga tren positif tersebut serta memastikan pencapaian target yang telah direncanakan sesuai dengan arah pembangunan daerah.

II.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Capaian kinerja kesejahteraan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan peran

stabilitas, alokasi, dan distribusi untuk memenuhi utilitas masyarakat. Aspek sosial dan ekonomi menjadi pilar utama dalam mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai.

II.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, upaya pencapaian kesejahteraan ekonomi melibatkan peran krusial pemerintah dalam menjaga stabilitas makro ekonomi yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali. Tantangan bagi pemerintah daerah adalah memastikan distribusi ekonomi yang adil, di mana kesempatan dan manfaat ekonomi tersebar merata di seluruh wilayah dan kepada semua kelompok masyarakat. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi mencerminkan kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Maka dengan mengeksplorasi kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat menjadi acuan untuk memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

II.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk menilai total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 2 (dua) pendekatan perhitungan PDRB yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung pada tahun berjalan, dan menjadi tolak ukur kemampuan sumber daya ekonomi daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan(ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Penghitungan PDRB dilakukan untuk melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Tabel II.20 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2019 – 2024 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha (PDRB)	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15391.83	15855.11	16663.11	17619.36	18509.80	19493.41
B. Pertambangan dan Penggalian	63.07	62.79	64.49	66.52	69.70	72.81
C. Industri Pengolahan	2816.53	2736.23	2790.98	2847.09	2934.58	2988.00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	22.52	23.89	24.39	25.40	25.95	26.8
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.44	22.11	22.89	23.66	24.35	24.9
F. Konstruksi	2431.32	2352.69	2408.57	2450.43	2578.72	2584.94
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3766.36	3744.32	3798.32	3995.92	4270.10	4538.95
H. Transportasi dan Pergudangan	438.93	429.90	436.03	467.86	516.27	572.57
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	240.53	227.85	225.26	238.10	262.20	294.16
J. Informasi dan Komunikasi	183.94	196.62	206.89	218.77	235.68	255.87
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	246.65	251.79	261.81	271.92	285.84	297.67
L. Real Estate	240.65	242.45	243.42	250.93	256.56	271.14
M,N. Jasa Perusahaan	22.33	22.23	22.21	23.66	24.82	26.12
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1057.33	1049.14	1063.88	1055.78	1056.57	1114.82
P. Jasa Pendidikan	277.25	278.16	286.65	299.79	314.11	333.04
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100.23	102.58	101.69	105.29	113.34	122.6
R,S,T,U. Jasa lainnya	27.81	27.77	28.17	29.87	32.04	34.57
PDRB	27348.70	27625.69	28648.78	29990.35	31510.63	33052.35
PDRB Tanpa Migas	27348.70	27625.69	28648.78	29990.35	31510.63	33052.35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2025.

Struktur dan kinerja perekonomian daerah periode 2019-2024 mengalami pertumbuhan yang positif dan konsisten di berbagai sektor. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Simalungun. Sektor terebut meningkat dari 15.391,83 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 19.493,41 juta rupiah pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan penggerak utama perekonomian Kabupaten Simalungun merupakan sektor agraris. Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran menunjukan kenaikan yang lebih moderat, dari 2.816,53 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 2.988,00 juta rupiah pada tahun 2024. Kenaikan pada sektor industri pengolahan ini menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan nilai komoditas lokal melalui hilirisasi dan industrialisasi. Pertumbuhan dinamika konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin aktif tercemin pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dari 3.766,36 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 4.538,95 pada tahun 2024. Secara

keseluruhan, PDRB Kabupaten Simalungun meningkat dari 27.348,70 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 33.052,35 juta rupiah pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten di berbagai sektor.

Tabel II.21 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019 – 2024 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha (PDRB)	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18523.06	19718.31	21858.72	24915.28	28406.02	33338.06
B. Pertambangan dan Penggalian	88.26	89.55	93.68	98.92	106.54	112.33
C. Industri Pengolahan	4565.80	4550.63	4932.36	5294.18	5480.13	5863.36
D. Pengadaan Listrik dan Gas	26.04	27.66	28.43	30.28	31.13	30.82
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32.56	33.74	35.24	36.72	38.19	40.5
F. Konstruksi	4037.56	4041.19	4252.70	4602.29	4775.95	4823.92
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6389.22	6484.16	6747.21	7456.19	8221.26	8976.33
H. Transportasi dan Pergudangan	651.47	663.70	692.89	771.79	899.57	1032.36
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	355.38	338.56	335.35	358.92	402.84	461.87
J. Informasi dan Komunikasi	204.44	220.92	237.49	256.34	278.12	299.42
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	422.88	432.92	471.26	513.44	533.29	563.61
L. Real Estat	357.10	369.00	380.78	397.64	408.81	437.14
M,N. Jasa Perusahaan	35.56	37.11	37.76	42.01	45.59	49
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1756.54	1799.56	1824.11	1829.97	1883.00	2085.09
P. Jasa Pendidikan	412.33	422.37	435.90	457.10	480.38	516.68
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	154.14	165.45	165.60	173.19	191.59	214.19
R,S,T,U. Jasa lainnya	45.08	46.46	47.39	51.62	56.39	61.43
PDRB	38057.43	39441.34	42576.88	47285.89	52239.10	58906.11
PDRB Tanpa Migas	38057.43	39441.34	42576.88	47285.89	52239.10	58906.11

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2025.

PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2019-2024 menunjukan dinamika perekonomian daerah dari berbagai sektor terus bergerak dengan tren yang positif. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor terbesar dan terus mengalami peningkatan signifikan, dari 18.523,06 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 33.338,06 juta rupiah pada tahun 2024. Industri Pengolahan juga menunjukkan pertumbuhan stabil, meningkat dari 4.565,80 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 5.863,36 juta rupiah pada tahun 2024. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami peningkatan yang signifikan, dari 6.389,22 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 8.976,33 juta rupiah pada tahun 2024. Transportasi dan Pergudangan juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, naik dari 651,47 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 1.032,36 juta rupiah pada tahun 2024. Sektor Konstruksi mengalami

peningkatan dari 4.037,56 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 4.823,92 juta rupiah pada tahun 2024. Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan dari 38.057,43 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 58.906,11 juta rupiah pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Simalungun berada pasa jalur yang positif dan berkelanjutan.

Tabel II.22 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019 - 2024

Lapangan Usaha (PDRB)	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48.67	49.99	51.34	52.69	54.34	56,6
B. Pertambangan dan Penggalian	0.23	0.23	0.22	0.21	0.20	0,19
C. Industri Pengolahan	12.00	11.54	11.58	11.20	10.49	9,95
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07
F. Konstruksi	10.61	10.25	9.99	9.73	9.14	8.19
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.79	16.44	15.85	15.77	15.74	15.24
H. Transportasi dan Pergudangan	1.71	1.68	1.63	1.63	1.72	1.75
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.93	0.86	0.79	0.76	0.77	0.78
J. Informasi dan Komunikasi	0.54	0.56	0.56	0.54	0.53	0.51
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.11	1.10	1.11	1.09	1.02	0.96
L. Real Estat	0.94	0.94	0.89	0.84	0.78	0.74
M,N. Jasa Perusahaan	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.62	4.56	4.28	3.87	3.60	3.54
P. Jasa Pendidikan	1.08	1.07	1.02	0.97	0.92	0.88
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.41	0.42	0.39	0.37	0.37	0.36
R,S,T,U. Jasa lainnya	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.1
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
PDRB Tanpa Migas	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2025.

Distribusi PDRB periode 2019-2024 menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi ekonomi Kabupaten Simalungun dengan kontribusi yang terus meningkat, dari 48,67% pada tahun 2019 menjadi 56,6% pada tahun 2024. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dominasi sektor agraris masih menjadi kontributor utama ekonomi lokal di Kabupaten Simalungun. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi sektor dengan proporsi terbesar kedua, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 16,79% pada tahun 2019 menjadi 15,24% pada tahun 2024. Sektor Industri Pengolahan menunjukkan penurunan kontribusi dari 12,00% pada tahun 2019 menjadi 9,95% pada tahun 2024. Sektor

Konstruksi juga mengalami penurunan dari 10,61% pada tahun 2019 menjadi 8,19% pada tahun 2024. Sektor Transportasi dan Pergudangan cenderung stabil dengan kontribusi sekitar 1,75% selama periode tersebut. Beberapa sektor lainnya, seperti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan, menunjukkan penurunan kontribusi. Sektor-sektor lainnya seperti Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, serta Jasa Perusahaan, memiliki kontribusi yang relatif kecil dan stabil. Pola distribusi menurut PDRB ini menunjukan sektor-sektor tersier dan sekunder mengalami penurunan pada pandemi tahun 2020 dan terus berlanjut hingga tahun 2024, meskipun penurunan yang terjadi tidak signifikan. Namun, hal ini perlu menjadi perhatian untuk merevitaliasi sektor-sektor sekunder dan tersier dalam upaya mendukung proses industrialisasi.

Tabel II.23 Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha (PDRB)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	124,37	131,18	141,41	153,46	171,02
B. Pertambangan dan Penggalian	142,61	145,26	148,71	152,86	154,29
C. Industri Pengolahan	166,31	176,73	185,95	186,75	196,23
D. Pengadaan Listrik dan Gas	115,78	116,57	119,22	119,96	114,99
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	152,59	153,91	155,23	156,86	162,65
F. Konstruksi	171,77	176,57	187,82	185,21	186,62
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	173,17	177,64	186,59	192,53	197,76
H. Transportasi dan Pergudangan	154,38	158,91	164,96	174,24	180,3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	148,58	148,87	150,75	153,64	157,01
J. Informasi dan Komunikasi	112,36	114,79	117,18	118	117,02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	171,93	180	188,82	186,57	189,34
L. Real Estat	152,2	156,43	158,46	159,35	161,23
M,N. Jasa Perusahaan	166,92	169,98	177,51	183,73	187,61
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	171,53	171,46	173,33	178,22	187,03
P. Jasa Pendidikan	151,85	152,07	152,47	152,93	155,14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	161,29	162,84	164,48	169,04	174,71
R,S,T,U. Jasa lainnya	167,29	168,23	172,83	175,98	177,7
PDRB	142,77	148,62	157,67	165,78	178,22
PDRB Tanpa Migas	142,77	148,62	157,67	165,78	178,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2025.

Indeks implisit PDRB menurut lapangan usaha tahun 2020-2024 menunjukkan perubahan harga yang mempengaruhi nilai tambah bruto dari berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Simalungun. Sebagian besar sektor mengalami peningkatan indeks implisit, mencerminkan inflasi atau peningkatan harga. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian menunjukkan peningkatan signifikan. Sektor Industri Pengolahan mengalami sedikit fluktuasi tetapi tetap meningkat. Sektor Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran juga mencatat peningkatan yang konsisten. Beberapa sektor seperti Pengadaan Listrik dan Gas serta Pengadaan Air menunjukkan peningkatan yang lebih moderat. Indeks implisit PDRB tanpa migas meningkat dari 142,77 pada tahun 2020 menjadi 178,22 pada tahun 2024, mencerminkan kenaikan harga yang konsisten di hampir semua sektor ekonomi di Kabupaten Simalungun.

Tabel II.24 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha (PDRB)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.34	5.48	7.80	8.53	11,44
B. Pertambangan dan Penggalian	1.91	1.85	2.38	2.79	0,93
C. Industri Pengolahan	2.59	6.26	5.22	0.43	5,07
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.13	0.68	2.27	0.62	-4,14
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.45	0.87	0.86	1.04	3,01
F. Konstruksi	3.43	2.79	6.37	-1.39	0,76
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.08	2.58	5.04	3.18	2,72
H. Transportasi dan Pergudangan	4.02	2.93	3.81	5.63	3,48
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.56	0.19	1.26	1.92	2,19
J. Informasi dan Komunikasi	1.10	2.16	2.08	0.71	-0,83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.28	4.69	4.90	-1.19	1,49
L. Real Estat	2.56	2.78	1.30	0.56	1,18
M,N. Jasa Perusahaan	4.79	1.83	4.43	3.50	2,11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.25	-0.04	1.09	2.82	4,95
P. Jasa Pendidikan	2.10	0.15	0.26	0.30	1,45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.88	0.96	1.01	2.77	3,35
R,S,T,U. Jasa lainnya	3.20	0.56	2.74	1.82	0,98
PDRB	2.60	4.09	6.09	5.14	7,5
PDRB Tanpa Migas	2.60	4.09	6.09	5.14	7,5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2025.

Tabel laju pertumbuhan indeks implisit PDRB menurut lapangan usaha tahun 2020-2024 menunjukkan variasi dalam pertumbuhan harga di berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Simalungun. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat pertumbuhan signifikan setiap tahunnya, mencapai puncak pada tahun 2024 dengan laju 11,44%. Sektor Industri Pengolahan mengalami fluktuasi, dengan puncak pertumbuhan 6,26% pada tahun 2021 namun menurun tajam menjadi 0,43% pada tahun 2023 dan kemudian meningkat menjadi 5,07% di tahun 2024. Sektor Konstruksi mencatat

pertumbuhan yang tidak stabil, bahkan mengalami kontraksi sebesar -1,39% pada tahun 2023 dan sedikit mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 0,76%. Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Simalungun tumbuh dengan laju rata-rata tahunan sekitar 7,5%pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan harga di sebagian besar sektor ekonomi.

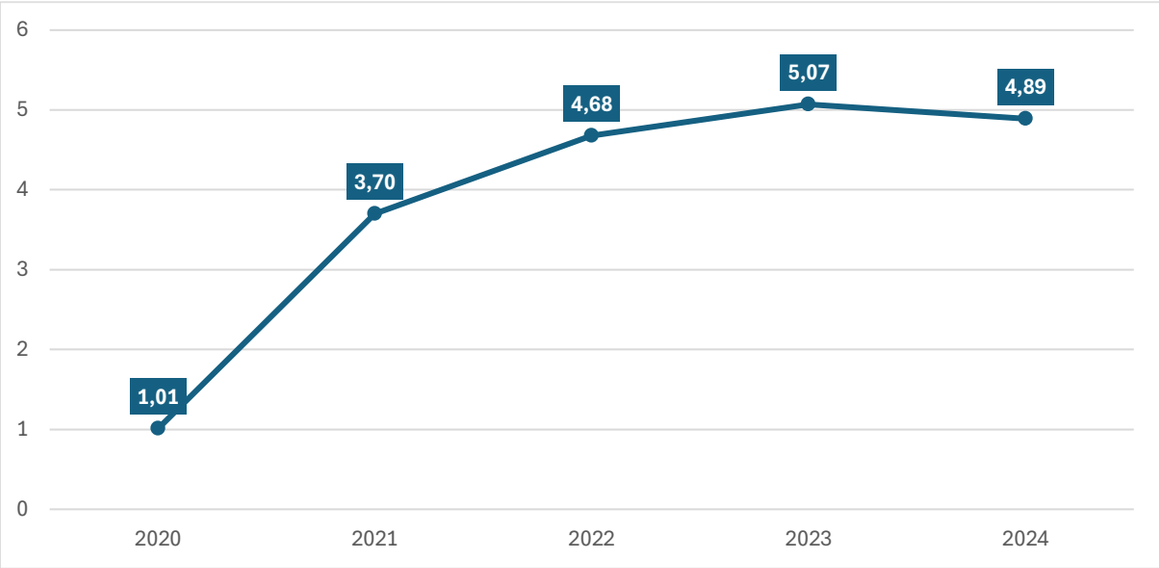

Gambar II.16 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Data Pertumbuhan Ekonomi tersebut menunjukkan pertumbuhan Kabupaten Simalungun pada tahun 2020 mengalami kontraksi tetapi masih dengan nilai yang positif yaitu sebesar 1,01% akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang juga mempengaruhi perekonomian nasional dan global. Tahun 2021 menunjukkan adanya pemulihan ekonomi, di mana Kabupaten Simalungun tumbuh sebesar 3,7% dan tren pemulihan berlanjut hingga tahun 2022 mencapai pertumbuhan sebesar 4,68%. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mulai dengan pertumbuhan sebesar 5,07%, dan kemudian di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun mengalami sedikit penurunan menjadi 4,89%.

II.2.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu penentu evaluasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik di daerah maupun di pemerintah pusat. Definisi kemiskinan menurut termologi umum disebut sebagai kemiskinan absolut yaitu suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

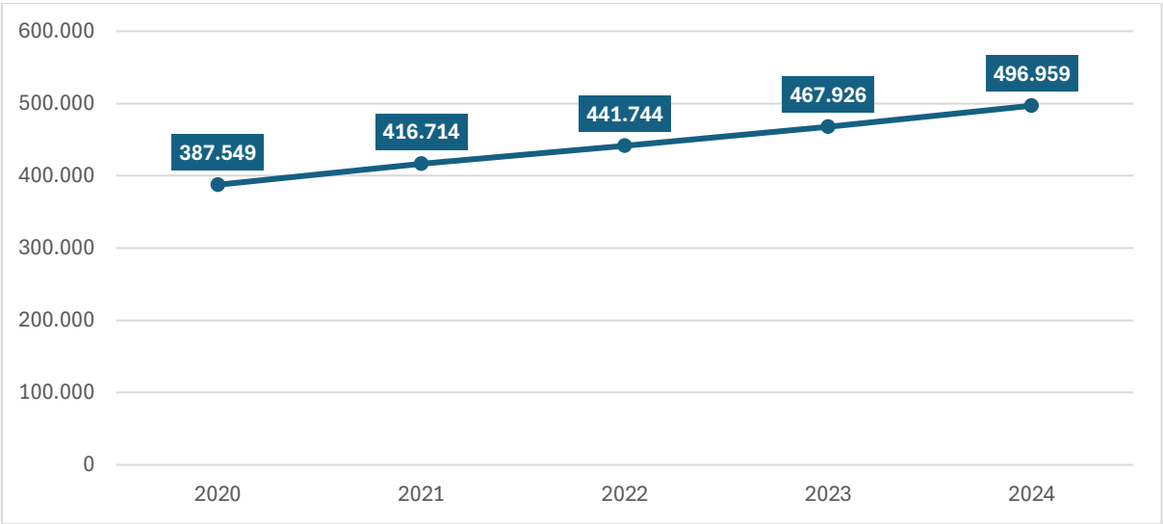

Gambar II.17 Garis Kemiskinan di Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 (Rupiah/kapita/bulan)

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Kemiskinan absolut umumnya diukur dengan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) adalah nilai minimum dalam rupiah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dasar, termasuk asupan makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari serta kebutuhan pokok non-makanan. **Gambar II.17** menunjukkan garis kemiskinan di Kabupaten Simalungun dari tahun 2020 hingga 2024, diukur dalam rupiah per kapita per bulan. Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Simalungun adalah Rp 387.549 dan terus meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai Rp 496.959. Peningkatan ini mencerminkan kenaikan biaya hidup yang mempengaruhi standar garis kemiskinan di Kabupaten Simalungun.

Tabel II.25 Indikator Kemiskinan Kabupaten Simalungun tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	387.549	416.714	441.744	467.926	496.959
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	73,64	76,99	72,47	69,21	68,05
Persentase Penduduk Miskin	8,46	8,81	8,26	7,87	7,72
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,47	1,12	1,69	1	0,75
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,35	0,23	0,52	0,21	0,12

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2025..

Tabel indikator kemiskinan Kabupaten Simalungun dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan beberapa tren penting. Garis kemiskinan mengalami peningkatan setiap tahun, dari Rp 387.549 per kapita per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp 496.959 pada tahun 2024. Jumlah penduduk miskin menunjukkan penurunan secara keseluruhan, dari 73,64 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 68,05 ribu jiwa pada tahun 2024. Persentase

penduduk miskin juga menurun dari 8,46% pada tahun 2020 menjadi 7,72% pada tahun 2024.

Indeks kedalaman kemiskinan, yang mengukur seberapa jauh rata-rata pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan, mengalami fluktuasi dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 1,69 dan kembali turun menjadi 1 pada tahun 2023 dan menurun lagi di tahun 2024 mencapai 0,75. Indeks keparahan kemiskinan, yang mengukur distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, juga mengalami fluktuasi, dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 0,52 dan menurun menjadi 0,12 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun garis kemiskinan terus meningkat, ada penurunan yang konsisten dalam jumlah dan persentase penduduk miskin, serta perbaikan dalam kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Simalungun.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Simalungun telah di integrasikan dalam satu kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) hingga implementasinya dalam Rencana Kerja Tahunan (RAT) Kabupaten Simalungun. Dimana dalam kebijakan tersebut telah tertuang target penurunan kemiskinan sebesar 7,24% pada tahun 2025.

Prioritas penanganan penduduk miskin ekstrim sesuai dari Sebaran Data P3KE Kabupaten Simalungun Berdasarkan Keluarga dan Individu Tahun 2024 dimana terdapat 12 Kecamatan dengan jumlah tingkat kemiskinan tertinggi yang diarahkan menjadi Locus Prioritas Penanganan pada 5 (lima) tahun kedepan yaitu berada di Kecamatan Bandar, Tanah Jawa, Siantar, Dolok Batu Nanggar, Ujung Padang, Bosar Maligas, Pematang Bandar, Tapian Dolok, Raya, Bandar Masilam, Gunung Maligas dan Gunung Malela.

II.2.1.3. PDRB per Kapita

Hasil dari aktivitas ekonomi akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun, yang dapat diukur dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu periode tertentu. Ukuran ini dikenal sebagai PDRB per kapita. Hasil perhitungan ini akan mencerminkan potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang terakumulasi dalam nilai PDRB untuk terbagi untuk setiap masyarakat. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per individu atau per kepala penduduk.

Tabel II.26 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Simalungun (Ribu Rupiah) Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Per Kapita		
	ADHB	ADHK (Seri 2010)	Laju Pertumbuhan
2020	40.010,29	28.024,20	-11,03
2021	42.433,45	28.552,27	1,88
2022	46.370,49	29.409,77	3,00
2023	50.427,74	30.418,01	3,43
2024	56.002,65	31.423,21	3,30

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

PDRB per kapita ADHB Kabupaten Simalungun menunjukan capaian yang konsisten meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 PDRB Per Kapita Kabupaten Simalungun mencpai 40.010,29 ribu rupiah dan meningkat hingga menjadi 56.002,65 ribu rupiah. PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Simalungun juga menunjukkan adanya peningkatan dari sebesar 28.024,20 ribu rupiah menjadi 31.423,21 ribu rupiah di tahun 2024. Sedangkan menurut laju pertumbuhan, PDRB Per Kapita Kabupaten Simalungun pada tahun 2020 sempat mencapai sebesar -11,03% di tahun 2020. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB Per Kapita mengalami peningkatan mencapai sebesar 1,88% dan terus meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 3,30%.

II.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu sarana dalam mencapai stabilitas ekonomi adalah tenaga kerja dalam keadaan *full employment*. Berbagai upaya kebijakan ditetapkan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja penuh baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu variabel yang dapat dianalisa yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

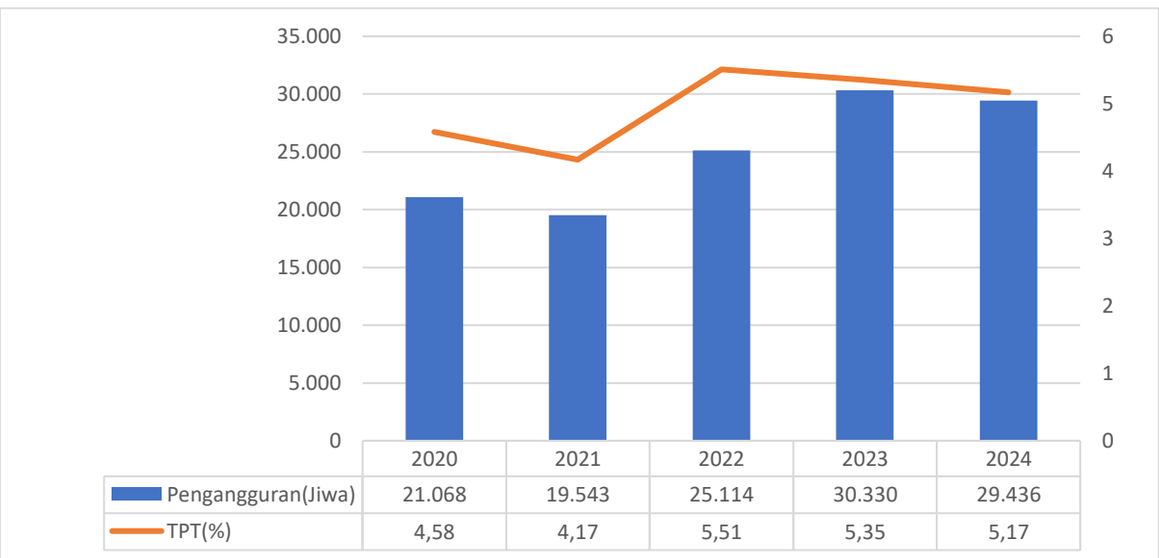

Gambar II.18 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun Dalam Angka Tahun 2020-2025.

Jumlah pengangguran di Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 mencapai 29.436 orang. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan banyaknya angkatan kerja yang ada, menghasilkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Perkembangan TPT Kabupaten Simalungun selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. TPT mengalami peningkatan terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,51% dapat diduga sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2022 itu pula menjadi TPT tertinggi di Kabupaten Simalungun. Hal ini mengartikan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat 5 orang pengangguran. Pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan TPT menjadi 5,35% beriringan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk bekerja menjadi 30.330 jiwa dan pada tahun 2024 turun kembali menjadi 5,17%. Penurunan TPT bersamaan dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja menunjukkan kemungkinan adanya peningkatan kegiatan perekonomian yang membuat tenaga kerja menjadi terserap dengan baik.

II.2.1.5. Pengeluaran per kapita disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah metode untuk menghitung pengeluaran per individu dalam suatu populasi setelah melakukan penyesuaian terhadap faktor-faktor tertentu yang memengaruhi daya beli atau nilai pengeluaran. Adapun contoh faktor yang disesuaikan seperti, inflasi, perbedaan harga, dan faktor lain yang mendorong ketidakadilan. Indikator ini untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat atau standar hidup mereka.

Tabel II.27 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

Kota/Prov	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Simalungun	11.308	11.376	11.524	11.746	12.119

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Simalungun selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita Kabupaten Simalungun mencapai sebesar 11.308 ribu rupiah dan meningkat hingga mencapai 12.119 ribu rupiah di tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan daya beli masyarakat dan perbaikan kondisi ekonomi di Kabupaten Simalungun selama periode tersebut. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa selain nominal pengeluaran per kapita yang terus naik, tren pertumbuhannya juga menunjukkan arah yang positif dan semakin stabil.

II.2.1.6. Indeks Gini

Pemerataan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan pembangunan yang baik pada suatu wilayah. Indikasi terjadinya ketimpangan ditengah pesatnya pertumbuhan ekonomi akan menjadi hambatan pencapaian pembangunan yang inklusif. Melengkapi hasil kinerja ekonomi yang ditunjukan oleh nilai PDRB, dengan hasil yang cukup baik. Indeks gini berfungsi untuk mengetahui proporsi ketimpangan yang terjadi ditengah pesatnya perekonomian Kabupaten Simalungun.

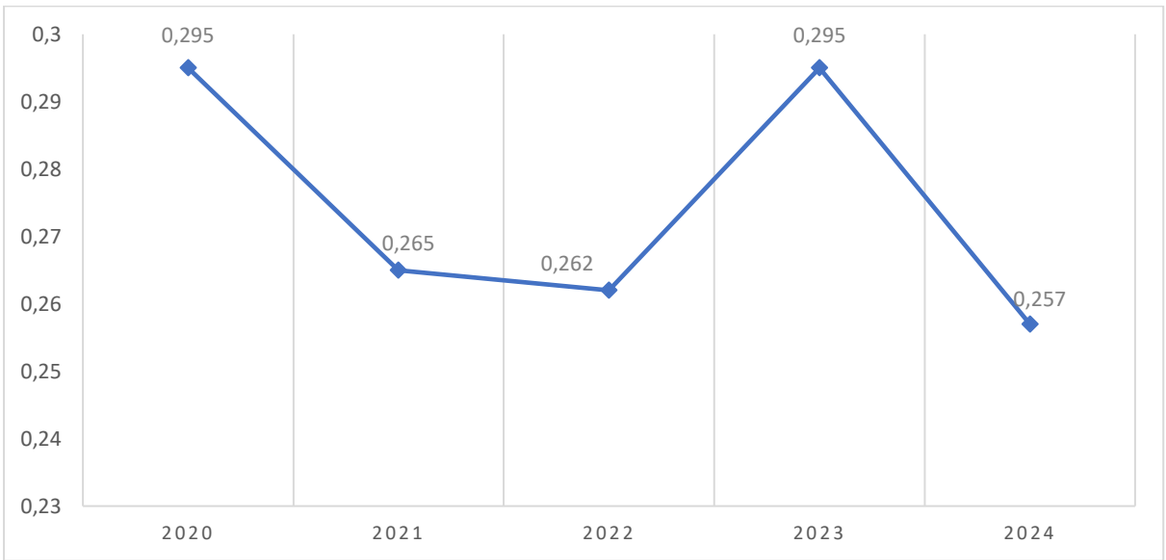

Gambar II.19 Indeks Gini Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2024.

Indeks Gini juga dikenal sebagai koefisien Gini, adalah sebuah parameter yang mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Indeks gini dihasilkan dari analisis kurva Lorenz, yang digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana pendapatan penduduk tersebar dalam berbagai kelompok pengeluaran, baik untuk kebutuhan makanan maupun non-makanan. Rentang nilai yang mungkin untuk Indeks Gini adalah antara 0 hingga 1. Ketika Indeks Gini mendekati 0, itu menandakan adanya distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat. Sebaliknya, semakin mendekati 1, semakin besar ketimpangan pendapatan di antara individu dalam masyarakat tersebut.

Gambar II.19 menunjukkan perubahan Indeks Gini di Kabupaten Simalungun selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, Indeks Gini Kabupaten Simalungun tercatat sebesar 0,295 lalu mengalami penurunan menjadi 0,265 di tahun 2021 sehingga capaian ini menandakan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan Indeks Gini sebesar 0,262. Meski begitu, pada tahun 2023, Indeks Gini kembali naik ke angka 0,295, mengindikasikan peningkatan ketimpangan pendapatan yang mirip dengan tahun 2020. Pada tahun 2024, Indeks Gini Kabupaten Simalungun kembali mengalami penurunan bahkan menjadi nilai Indeks Gini

terendah selama lima tahun terakhir. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan atau distribusi pendapatan antar penduduk Kabupaten Simalungun menjadi lebih merata.

II.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Penduduk merupakan titik sentral dari upaya pembangunan, pembangunan nasional menempatkan manusia sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat bukan sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup. Pembangunan manusia dapat diketahui dari hasil perhitungan indeks pembangunan manusia.

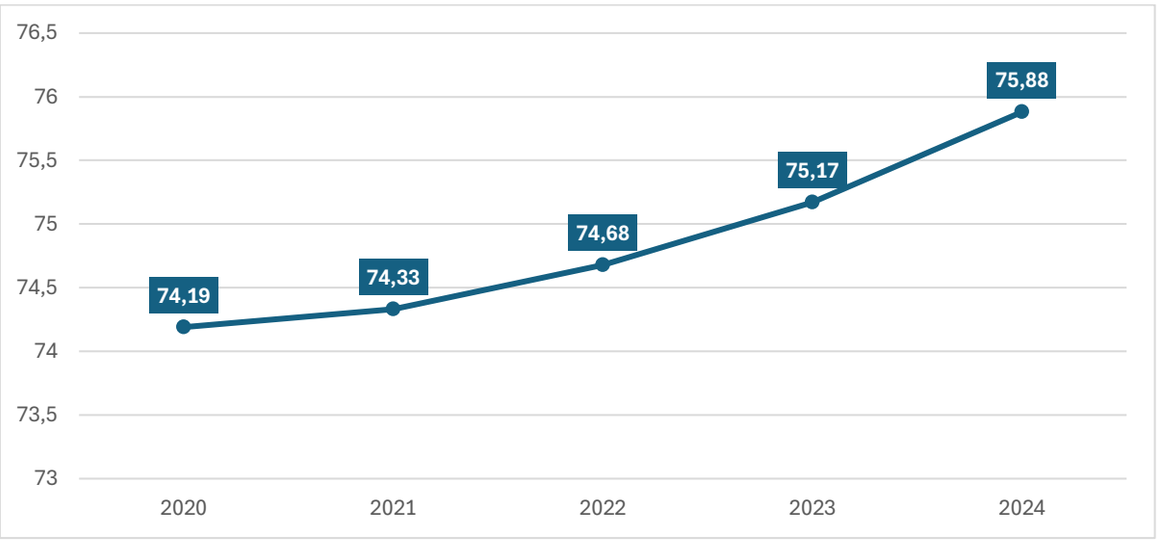

Gambar II.20 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Selama tahun 2020 hingga 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Simalungun menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Nilai IPM tercatat sebesar 74,19 pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga mencapai 75,88 pada tahun 2024. Meskipun secara angka terlihat bahwa IPM pada tahun 2020 hingga 2022 masih berada di poin 74, namun apabila diperhatikan dari nilai desimalnya, IPM tetap mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Hal ini wajar terjadi karena perubahan nilai IPM bersifat perlahan dan bertahap, dikarenakan indikator penyusunnya seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak memerlukan waktu yang panjang untuk menunjukkan perbaikan signifikan. Peningkatan IPM Kabupaten Simalungun mencerminkan bahwa Kabupaten Simalungun memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Hal ini dapat menjadi modal tenaga kerja yang potensial mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun.

II.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan bermutu merupakan hak dasar setiap warga negara. Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Kesehatan untuk semua tidak hanya mencakup peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan, tetapi juga penguatan upaya promotif dan preventif serta pengendalian penyakit, guna menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

II.2.2.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah estimasi rata-rata tahun yang diharapkan seorang individu atau kelompok penduduk untuk hidup. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin panjang rata-rata masa hidup yang diharapkan. Angka ini mencerminkan perkiraan masa hidup yang diharapkan dalam kondisi demografis dan kesehatan tertentu pada suatu wilayah atau negara.

Tabel II.28 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Simalungun	71,22	71,37	71,78	72,2	74,3

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Di Kabupaten Simalungun, UHH mengalami peningkatan dari 71,22 tahun pada 2020 menjadi 71,37 tahun pada 2021, lalu naik menjadi 71,78 tahun pada 2022, dan mencapai 74,3 tahun pada tahun 2024. Tren positif ini mencerminkan perbaikan kondisi hidup masyarakat secara umum. Peningkatan UHH tersebut didorong oleh sejumlah faktor, antara lain membaiknya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, menurunnya angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Selain itu, perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan status gizi, serta dukungan program jaminan kesehatan juga turut berkontribusi terhadap pencapaian ini.

II.2.2.2. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian derajat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Simalungun. Penanganan stunting merupakan prioritas pembangunan nasional yang perlu ditindaklanjuti secara terintegrasi di tingkat daerah, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesehatan, pendidikan, dan produktivitas generasi mendatang. Oleh karena itu,

analisis terhadap tingkat prevalensi stunting menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan intervensi yang tepat sasaran. Informasi prevalensi stunting disusun berdasarkan data sektoral yang relevan, guna memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah ke depan mampu menjawab tantangan multidimensi yang ditimbulkan oleh masalah stunting.

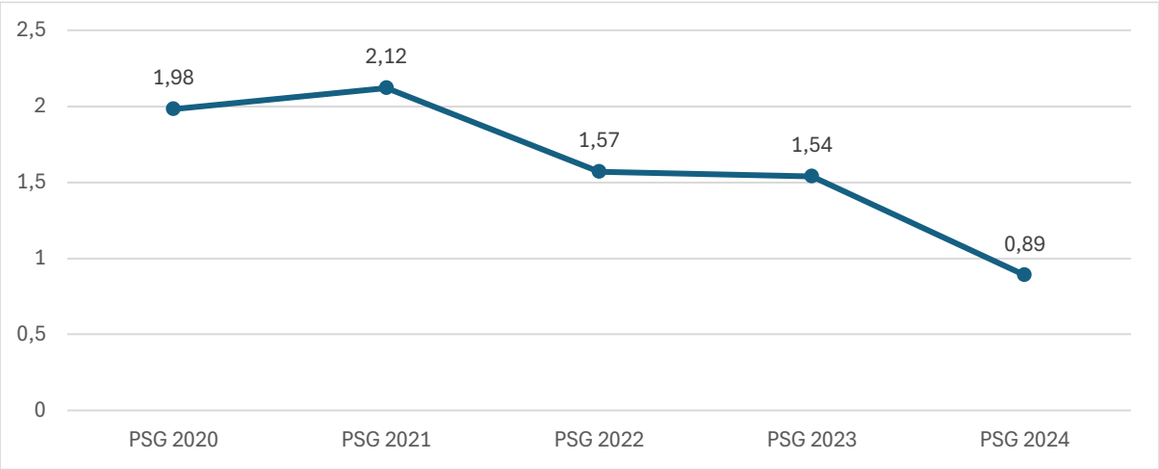

Gambar II.21 Prevalensi Stunting Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, 2025

Berdasarkan **Gambar II.21**, prevalensi stunting di Kabupaten Simalungun selama periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika efektivitas intervensi gizi yang telah dijalankan. Pada tahun 2020, prevalensi stunting tercatat sebesar 1,98%, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,12% pada tahun 2021. Namun, tren tersebut mulai menunjukkan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya, di mana angka prevalensi menurun menjadi 1,57% pada tahun 2022, 1,54% pada tahun 2023, dan mencapai titik terendah sebesar 0,89% pada tahun 2024.

Penurunan bertahap tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penanggulangan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya dalam dua tahun terakhir. Capaian ini mencerminkan mulai berfungsinya berbagai intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta peningkatan peran lintas sektor dalam mendukung program percepatan penurunan stunting. Meski demikian, fluktuasi yang terjadi di awal periode mencerminkan masih perlunya penguatan pada aspek konsistensi pelaksanaan program, pemantauan berkelanjutan, dan pemenuhan cakupan sasaran secara menyeluruh. Sebagai rekomendasi kebijakan, Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa praktik-praktik baik yang telah terbukti efektif selama dua tahun terakhir terus diperluas dan dilembagakan, termasuk dengan meningkatkan sinergi antar-perangkat daerah, memperkuat edukasi keluarga dan masyarakat tentang pola asuh dan gizi anak, serta memperluas akses layanan kesehatan yang inklusif dan berkualitas, khususnya di wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap stunting.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tahun 2025 dari 51.178 balita yang diukur terdapat 412 balita yang dinyatakan stunting. 412 Balita tersebar di 28 kecamatan. Namun, sebagai pertimbangan dari Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Simalungun, untuk penetapan sasaran Prioritas Wilayah Penanganan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan terdapat 12 Kecamatan, dimana Kecamatan Bandar Huluan merupakan Kecamatan dengan kasus stunting tertinggi dengan jumlah 68 balita stunting.

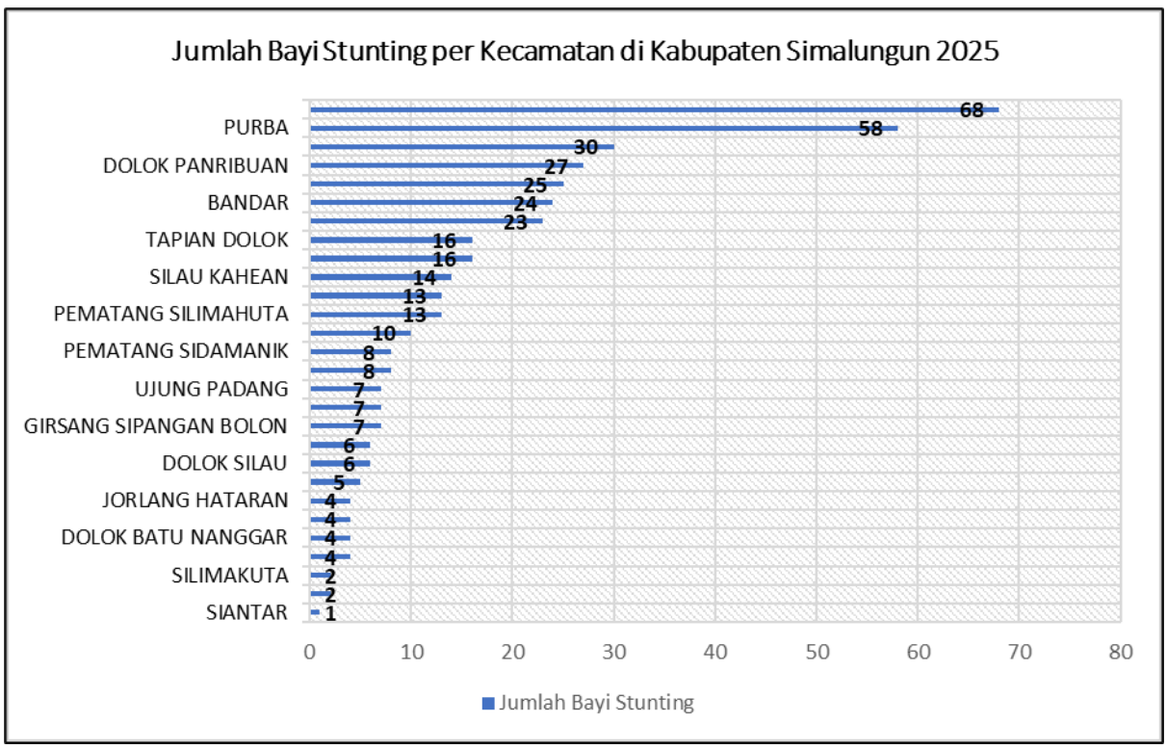

Pengukuran Prevelensi Stunting dilakukan melalui dua metode yaitu dengan Pengukuran Status Gizi (PSG) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Dimana dari hasil survei SSGI pada lima tahun terakhir kondisi Stunting Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

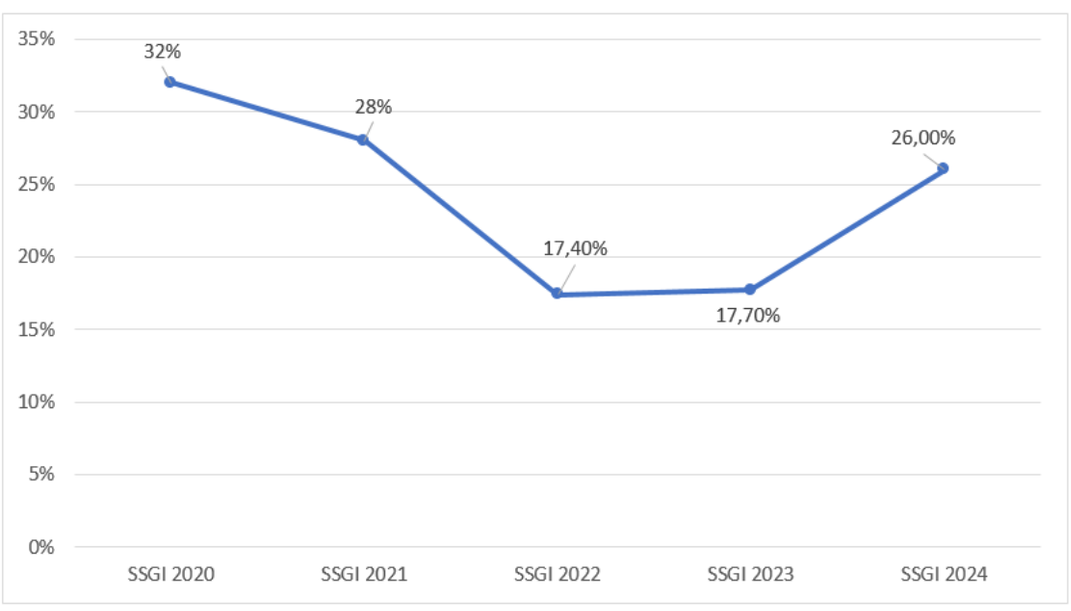

II.2.2.3. Prevalensi Tuberkolosis

Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga memengaruhi produktivitas dan beban ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penanganan TBC menjadi prioritas dalam upaya pengendalian penyakit menular di Kabupaten Simalungun. Analisis terhadap prevalensi tuberkulosis di Kabupaten Simalungun diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penyebaran kasus masih terjadi dan efektivitas intervensi program penanggulangan TBC yang telah dilaksanakan. Data prevalensi ini juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan kesehatan daerah yang lebih responsif dan tepat sasaran.

Tuberkulosis (TBC) hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global, meskipun upaya penanggulangannya telah dilaksanakan di banyak negara sejak tahun 1995. Berdasarkan Global TB Report 2023, diperkirakan ada 10,6 juta kasus TBC di seluruh dunia. Sebagian besar kasus terjadi pada laki-laki (5,8 juta), diikuti oleh perempuan (3,5 juta), serta 1,3 juta kasus pada anak-anak di bawah usia 15 tahun.

Situasi epidemi Tuberkulosis di Indonesia masih menunjukkan beban yang sangat tinggi, saat ini Indonesia berada pada peringkat kedua di dunia dengan penderita TBC terbanyak setelah India. Berdasarkan laporan Global TB Report 2023, Indonesia menyumbang sekitar 10% dari total kasus TBC global, dengan estimasi 133 kasus per 100.000 penduduk.

Menurut data Dashboard Tuberkulosis Indonesia per 1 Maret 2024, jumlah notifikasi kasus TBC pada tahun 2023 mencapai 821.200 kasus, dengan cakupan penemuan kasus sebesar 77%. Anak-anak di bawah usia 15 tahun juga terdampak oleh epidemi ini, dengan total 136.969 kasus TBC anak yang dilaporkan, menunjukkan bahwa TBC tidak hanya mempengaruhi orang dewasa tetapi juga generasi muda.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar adalah jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikalikan 100%.

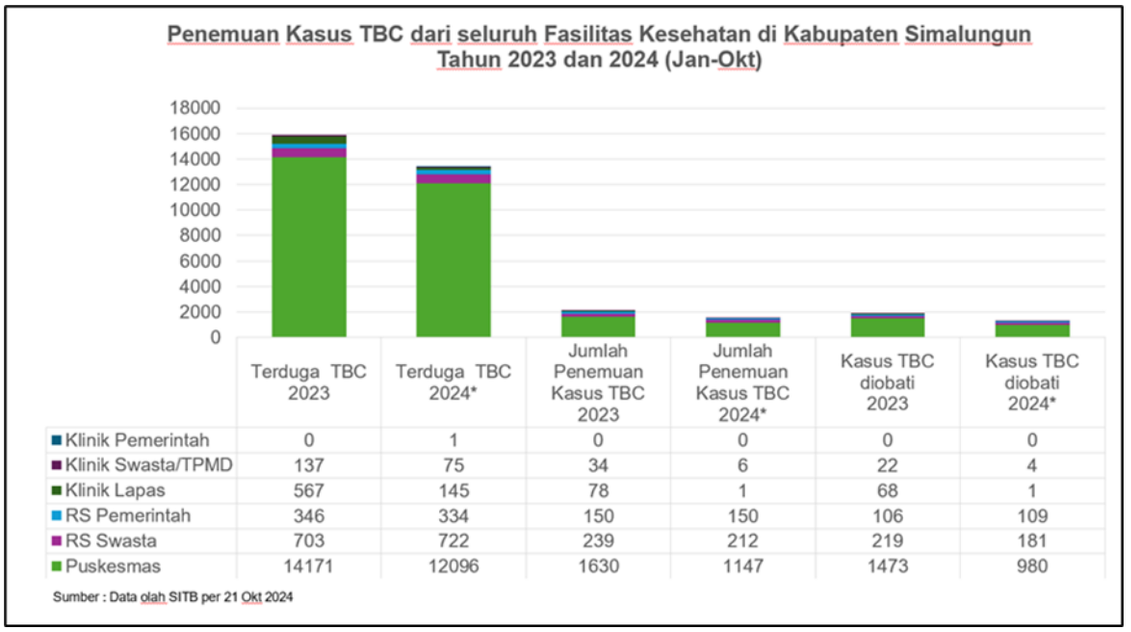

Data di atas menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang menyumbang penemuan terduga dan kasus TBC terbanyak adalah Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta. Dalam lima tahun terakhir kondisi TBC di Kabupaten Simalungun dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:

Berdasarkan grafik diatas, kasus TBC RO pada tahun 2021 menurun 10% dari tahun sebelumnya, sementara itu empat tahun terakhir kasus TBC di Kabupaten Simlaungun meningkat cukup signifikan dimana pada grafik menunjukkan pada tahun 2021 jumlah kasus TBC sebanyak 1.378 kasus menjadi 2.056 kasus pada tahun 2024. Sesuai dengan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bapak Presiden Republik Indonesia pada poin kedua menyatakan bahwa Menyelenggarakan Pemeriksaan Gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten. Hal ini harus didukung dengan misi dari pemerintah daerah bahwa penanganan kasus TBC menjadi program prioritas pada lima tahun mendatang.

II.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Pemerintah Kabupaten Simalungun menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang cerdas dan mandiri. Upaya pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah, menjadi fokus utama agar seluruh anak didik, tanpa memandang latar belakang sosial dan geografis, memperoleh kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensi dirinya. Peningkatan mutu tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan daerah menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

II.2.3.1. Rata-rata Lama Sekolah

Indikator lain dalam dimensi pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu waktu (dalam tahun) yang diperlukan dalam menyelesaikan pendidikan formal, dari SD hingga SMA. RLS menggambar tingkat literasi dan kualifikasi sistem pendidikan. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin lama waktu yang dihabiskan oleh individu dalam mengejar pendidikan formal.

Tabel II.29 Rata-rata lama Sekolah (RLS) Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Simalungun	9,6	9,61	9,63	9,72	9,73

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2024.

RLS memiliki peningkatan yang sangat lambat atau cenderung stagnan. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan atau kendala ekonomi. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Simalungun dari tahun 2020 hingga 2024 meningkat tiap tahunnya, meskipun hanya sedikit. Pada tahun 2020, RLS di Kabupaten Simalungun mencapai 9,6 tahun dan terus meningkat hingga menjadi 9,73 tahun pada tahun 2024. Capaian RLS ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Simalungun akan menempuh pendidikan selama 9,73 tahun, atau hampir setara dengan tingkat 1 (satu) di SMA/SMK/MA. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak terhadap peluang kerja, pendapatan, dan produktivitas. Masyarakat dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki akses lebih baik ke pekerjaan yang layak serta peluang usaha yang lebih produktif. Masyarakat yang akhirnya memiliki pekerjaan yang lebih layak akan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar, sehingga masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

dan dapat terlepas dari kemiskinan. Peningkatan angka RLS Kabupaten Simalungun diikuti dengan adanya penurunan angka kemiskinan Kabupaten Simalungun yaitu dari 8,46 persen pada 2020 menjadi 7,72 persen pada 2024. Meskipun laju peningkatan RLS relatif lambat dan hanya mencapai 0,13 tahun dalam lima tahun terakhir, tren positif ini tetap memberikan dampak terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat, meskipun dampaknya terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Simalungun masih terbatas. Oleh karena itu, untuk mempercepat penurunan kemiskinan di Kabupaten Simalungun, diperlukan upaya yaitu salah satunya melalui peningkatan kualitas pendidikan yang lebih signifikan, termasuk pendidikan nonformal dan pelatihan vokasi agar dapat langsung memberikan dampak pada peningkatan keterampilan kerja masyarakat miskin dan rentan. Untuk mendukung peningkatan pendidikan, pemerintah pusat telah menerapkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sehingga rata-rata lama sekolah dapat sesuai dengan harapan lama sekolah.

II.2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai waktu (dalam tahun) yang diharapkan untuk seorang dalam menyelesaikan pendidikan formal. Angka harapan lama sekolah dapat digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi tingkat harapan pendidikan dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah, semakin lama masa pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat.

Tabel II.30 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

Kota/Prov	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Simalungun	12,78	12,79	12,81	12,87	13,09

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Simalungun menunjukkan peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir, meskipun cenderung stagnan dan tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 12,78 tahun dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 13,09 tahun pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Simalungun telah mendekati jenjang wajib belajar nasional selama 12 (dua belas) tahun. Peningkatan HLS ini juga diikuti dengan adanya peningkatan RLS, meskipun peningkatan RLS relatif lambat, yakni hanya bertambah 0,13 tahun dalam lima tahun terakhir. Pendidikan yang lebih baik membuka peluang kerja yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan individu untuk mengakses lapangan kerja produktif, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menurunkan kemiskinan. Hal tersebut terlihat dari capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Simalungun yang mengalami penurunan dari 8,46 persen pada 2020 menjadi

7,72 persen pada 2024. Namun demikian, karena peningkatan RLS masih terbatas, dampaknya terhadap kemiskinan dan produktivitas tenaga kerja juga belum optimal. Hal ini tercermin dari fakta bahwa sebagian besar penduduk produktif masih didominasi oleh pekerja di sektor informal dan pertanian tradisional yang nilai tambahnya rendah. Oleh karena itu, selain terus mendorong peningkatan RLS dan HLS, perlu diimbangi dengan penguatan pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan kerja, serta diversifikasi lapangan kerja produktif untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Simalungun.

II.2.3.3. Angka Literasi/Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga pemahaman terhadap informasi secara kritis, sementara numerasi mencakup kemampuan memahami dan menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat pencapaian literasi dan numerasi menjadi indikator penting dalam mengevaluasi mutu pendidikan dasar dan keberhasilan pembelajaran di sekolah.

Skor Kemampuan Literasi jenjang Sekolah Dasar dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, Skor Kemampuan dan Literasi SD tercatat sebesar 50,25, dan meningkat menjadi 53,6 pada tahun 2024. Begitu juga dengan skor kemampuan literasi jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari tahun 2021-2024 juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023 sebesar 60,72 meningkat di tahun 2024 menjadi 63,97.

Skor kemampuan numerasi jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dari tahun 2021 sampai 2024 mengalami kenaikan yang signifikan. Dari tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,78 sehingga tahun 2024 sudah mencapai 49,89. Begitujuga dengan Skor Kemampuan Numerasi Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang juga mengalami kenaikan dari tahun 2021-2024.

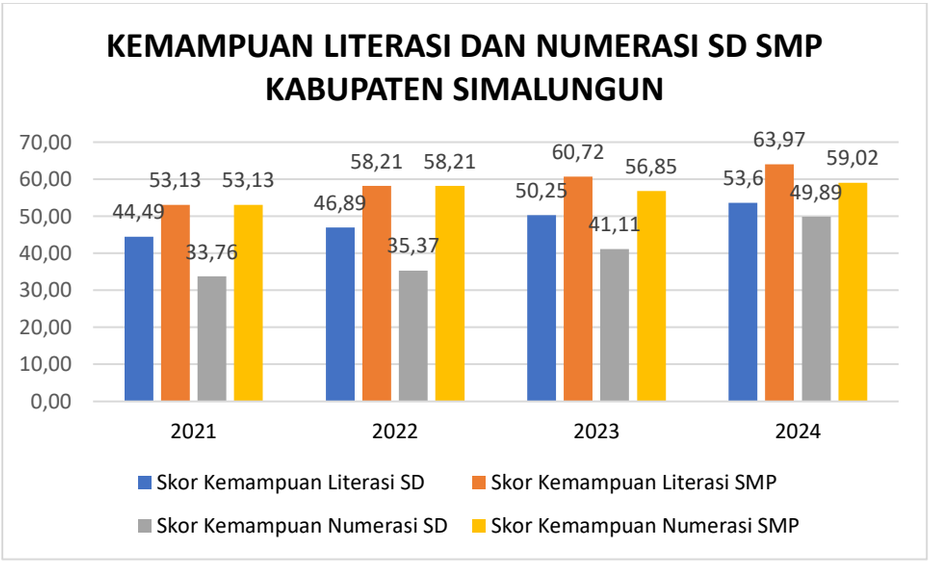

Sumber Data: https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id

II.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) digunakan untuk menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan literasi serta akses terhadap fasilitas dan sumber daya pendukung literasi, seperti perpustakaan, taman bacaan, dan kegiatan literasi lainnya. Indeks ini juga mencerminkan kesadaran, partisipasi, dan budaya baca masyarakat sebagai bagian penting dari pengembangan kapasitas individu dan pembangunan sosial. Pemantauan IPLM menjadi relevan dalam merumuskan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas hidup dan daya saing masyarakat melalui penguatan budaya literasi.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Karena dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dan informasi yang diterima menjadi lebih baik. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan per hari, jumlah pepustakaan berSNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial/promosi, dan anggota perpustakaan. Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) bertujuan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, baik dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, hingga pemustaka yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Perpustakaan Nasional mengelompokan nilai IPLM menjadi 5 kategori yaitu, Sangat Rendah (0-29,9), Rendah (30- 49,9), Sedang (50-79,9), Tinggi (80-89,9), dan Sangat Tinggi (90-100).

Dalam rangka mewujudkan program nasional Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sasaran terwujudnya Pendidikan yang berkualitas yang merata dibutuhkan penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan guna mendorong kreativitas dan inovasi yang mendukung daya cipta dan produktivitas. Pentingnya Pendidikan sepanjang hayat secara inklusif dengan mengintegrasikan kegiatan literasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berperangai kritis, ilmiah, kreatif dan inovatif. Dalam penguatan budaya literasi dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan peningkatan budaya kegemaran membaca.

Capaian Peresentase Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Simalungun dari tahun 2021 hingga 2024 selalu mengalami kenaikan. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 14,81 persen. Di tahun 2024 sudah mencapai 41,30% yang dimana masih kategori rendah. Hal ini yang menjadi focus perhatian dari Pemerintahan Kabupaten Simalungun untuk membina dan mengembangkan budaya literasi Masyarakat.

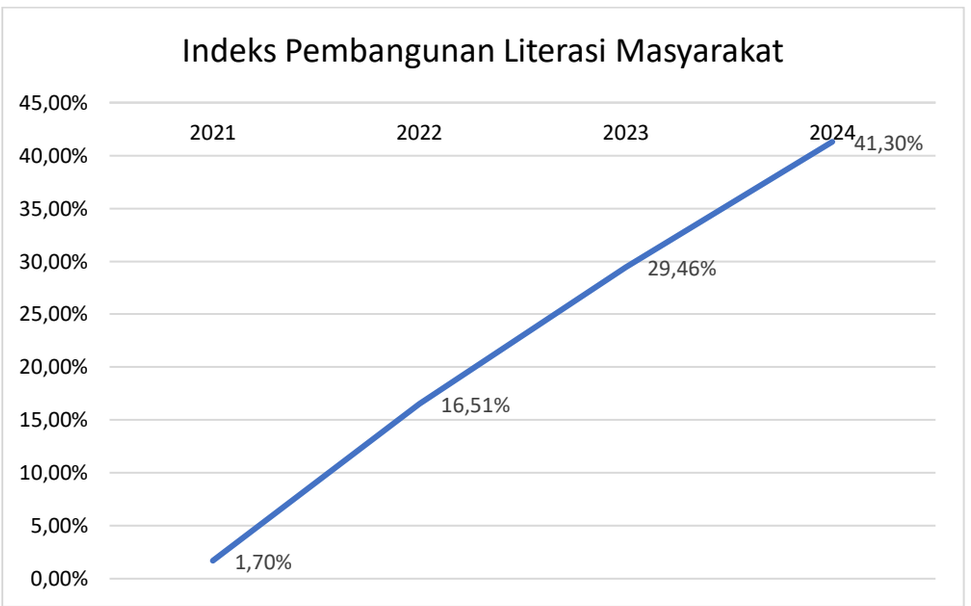

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Simalungun

II.2.3.5. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital digunakan untuk menggambarkan kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat. Indeks ini mencakup aspek penggunaan perangkat digital, pemahaman etika bermedia, keamanan data, serta penerapan teknologi dalam kegiatan pendidikan, ekonomi, dan interaksi sosial. Keberadaan indeks ini penting sebagai acuan untuk melihat sejauh mana masyarakat mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, hingga saat ini di Kabupaten Simalungun belum tersedia data resmi dan terstruktur mengenai capaian Indeks Literasi Digital. Ketiadaan data tersebut menjadi kendala dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi literasi digital masyarakat di daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pencatatan, pelaporan, dan pemetaan indikator literasi digital yang lebih terintegrasi, sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

II.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan elemen fundamental dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, ketimpangan, bencana, dan krisis kesehatan. Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk membangun sistem perlindungan sosial yang adaptif, responsif terhadap perubahan, dan mampu menjangkau kelompok rentan dan marjinal. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan jangka pendek, tetapi juga pada pemberdayaan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial. Penguatan kelembagaan, integrasi data kemiskinan, serta kolaborasi lintas sektor yang efektif menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan efisien. Perlindungan sosial yang baik dapat menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas sistem ini adalah cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, yang mencerminkan sejauh mana perlindungan sosial dapat memberikan jaminan atas hak-hak tenaga kerja di daerah. Dengan demikian, penguatan dan integrasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Di Kabupaten Simalungun, cakupan tersebut digambarkan melalui data proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, yang menjadi acuan dalam menilai tingkat perlindungan tenaga kerja sekaligus efektivitas implementasi program jaminan sosial di tingkat daerah.

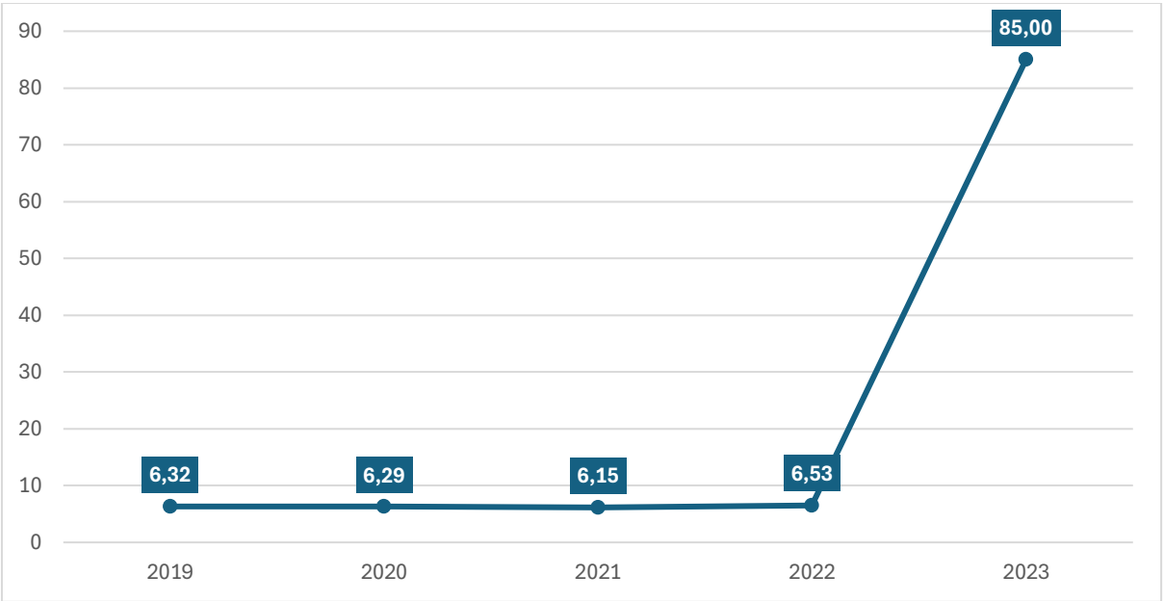

Gambar II.22 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2023
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029.

Perkembangan proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun pada tahun 2019–2023 menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun 2019 hingga 2022, capaian kepesertaan relatif stagnan dengan kisaran sekitar 6 persen, yang mencerminkan masih rendahnya partisipasi tenaga kerja dalam sistem perlindungan sosial. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan drastis hingga mencapai 85 persen. Peningkatan tajam ini kemungkinan didorong oleh beberapa faktor, antara lain penguatan regulasi dan kebijakan yang mewajibkan pemberi kerja maupun pekerja informal untuk terdaftar dalam program jaminan sosial, intensifikasi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat jaminan sosial, serta adanya dukungan program pemerintah dalam memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja, termasuk melalui subsidi iuran bagi kelompok pekerja rentan. Selain itu, kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pelaku usaha juga menjadi faktor kunci dalam memperluas basis kepesertaan. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen kuat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mempercepat transformasi sistem perlindungan tenaga kerja menuju cakupan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

II.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kehidupan beragama dan kebudayaan merupakan dua aspek fundamental dalam pembentukan karakter dan jati diri masyarakat. Kabupaten Simalungun menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas yang harmonis serta pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pembangunan di bidang agama diarahkan untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama, meningkatkan pemahaman keagamaan yang moderat,

serta mendukung peran aktif lembaga keagamaan dalam pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Sementara itu, pelestarian dan pengembangan kebudayaan difokuskan pada revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal, seni, tradisi, serta warisan budaya daerah yang menjadi kekayaan tak ternilai. Dengan demikian, visi masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju dapat diwujudkan secara selaras dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

II.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan Hidup Umat Beragama adalah suatu kondisi dimana umat beragama dalam kemajemukan dan keragaman keyakinan, dapat hidup berdampingan secara damai, rukun dan harmonis, penuh toleransi, saling menghargai, bahkan saling tolong menolong dan duduk bersama pemerintah, membuka ruang dialog, mencari titik temu dalam memecahkan masalah-masalah kerukunan antar umat beragama.

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keharmonisan hubungan antarumat beragama di suatu wilayah. Indeks ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama dalam kehidupan sosial. Tingginya indeks ini mencerminkan kondisi sosial yang kondusif, stabil, serta adanya interaksi yang harmonis antar kelompok keagamaan. Kerukunan umat beragama menjadi fondasi penting dalam menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan produktif. Oleh karena itu, penguatan toleransi, dialog antarumat, serta peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan sosial. Kriteria capaian IKUB adalah IKUB Sangat Rendah (0-20), IKUB Rendah (21-40), IKUB Sedang (41-60), IKUB Tinggi (61-80), IKUB Sangat Tinggi (80- 100). Data IKUB untuk Kabupaten Simalungun tidak tersedia, sehingga yang dianalisis adalah IKUB Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Indonesia tahun 2020-2024 mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2024 IKUB Nasional mencapai 76,47 penigkatan dari tahun 2022 yang dimana termasuk dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuatnya toleransi dan moderasi Bergama di Indonesia. Diperkuat juga dengan data IKUB dari Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan tahun 2023 dalam kategori tinggi. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuatif. Terjadi penurunan pada tahun 2022 dimana nilainya 74,96 dan meningkat Kembali di tahun 2023 menjadi 77,61.

Jika mengacu dokumen RPJMN 2025-2029, target Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2025 sebesar 76,77 dan 78,25 di tahun 2029. Untuk mencapai target nasional tersebut dibutuhkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mewujudkan terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama yang menjadi salah satu modal penting dalam pembangunan simalungun.

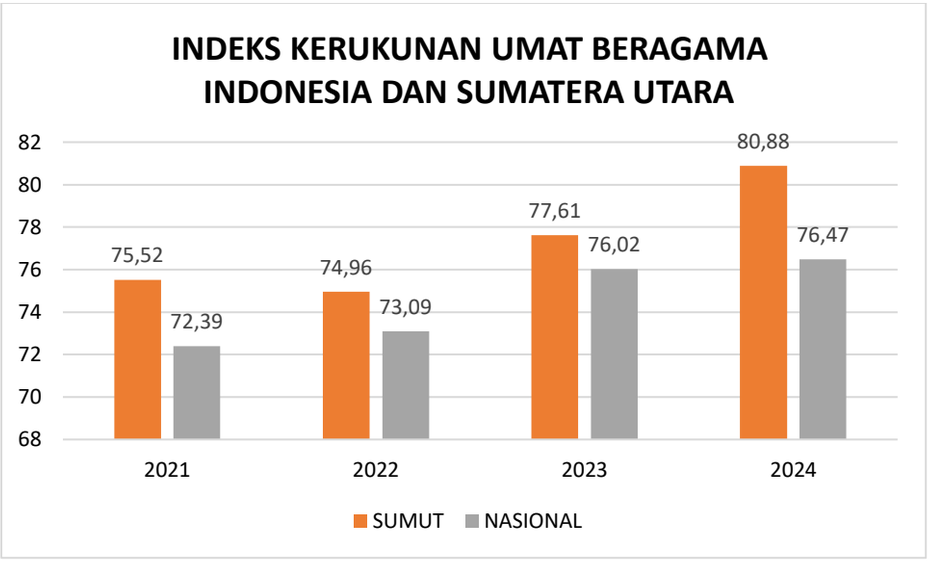

Sumber: Renstra Kemenag 2025-2029

II.2.5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan memiliki peran strategis dalam memperkuat jati diri bangsa, membangun karakter masyarakat, serta mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan di bidang ini adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), yang mencerminkan sejauh mana nilai-nilai budaya tumbuh, terjaga, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, hingga saat ini di Kabupaten Simalungun belum tersedia data resmi mengenai capaian IPK, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti untuk pengembangan kebudayaan di daerah.

II.2.6. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan keluarga yang berkualitas menjadi pondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah publik maupun domestik, guna menjamin akses dan partisipasi yang adil bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. Di samping itu, upaya penguatan masyarakat inklusif diarahkan pada terciptanya lingkungan sosial yang ramah, aman, dan setara bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kelompok marginal lainnya. Sinergi antara kebijakan keluarga, gender, dan inklusi sosial menjadi kunci dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

II.2.6.1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak telah dilaksanakan di suatu wilayah. Indeks ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan keluarga, partisipasi anak, serta perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan adanya komitmen dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan serta tumbuh kembang anak secara optimal.

Anak-anak Indonesia yang berjumlah 79,4 juta jiwa atau 28,82% dari total penduduk saat ini memegang peranan strategis dalam rangka mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045. Mereka adalah calon pemimpin bangsa ke depan yang diharapkan menjadi generasi emas yang cerdas, sehat, unggul, berkarakter dan dalam suka cita yang bersendikan kepada nilai-nilai moral yang kuat. Indonesia telah mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak telah dilaksanakan di suatu wilayah. IPA mencakup aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan keluarga, partisipasi anak, serta perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. IPA dibentuk dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), yang didasarkan pada lima klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima klaster yang menjadi dasar pembentukan IPA meliputi Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan adanya komitmen dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan serta tumbuh kembang anak secara optimal.

Nilai IPA Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukan perubahan positif. Nilai IPA Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022 60,32 mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 61,64. Sementara nilai IPA Kabupaten Simalungun dari tahun 2021-2023 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2021-2022 nilai IPA Kabupaten simalungun mengalami kenaikan dengan nilai 59,26 di tahun 2021 dan 61,89 di tahun 2022, tetapi mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 61,39.

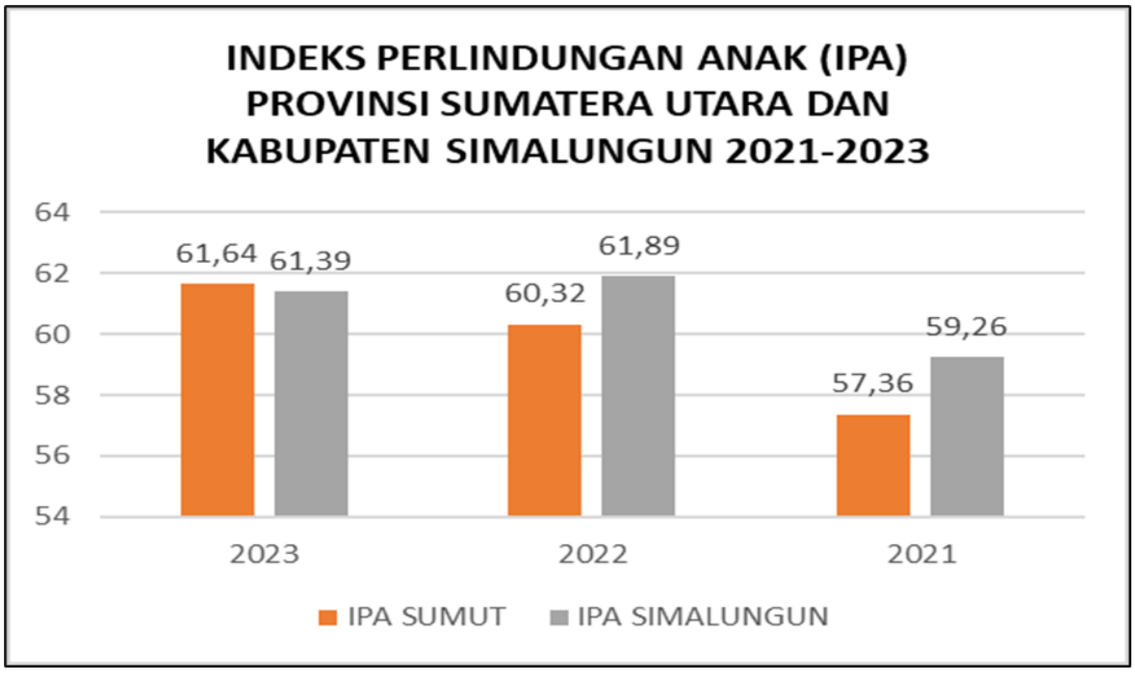

Sumber: Kemen PPPA, 2021-2023

II.2.6.2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dilepaskan dari peran penting keluarga sebagai unit sosial paling dasar. Keluarga memiliki fungsi utama dalam membentuk karakter, mendidik generasi penerus, serta memenuhi kebutuhan dasar individu dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, upaya peningkatan SDM yang unggul harus dimulai dari penguatan peran keluarga agar mampu melahirkan individu yang sehat, cerdas, mandiri, dan berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, maupun politik.

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) digunakan untuk mengukur kondisi dan mutu keluarga melalui sejumlah dimensi, seperti ketahanan fisik, ekonomi, pendidikan, psikologis, dan keharmonisan antaranggota keluarga. Sebagai elemen penting dalam struktur masyarakat, keluarga memegang peran strategis dalam membentuk kapasitas individu sejak dini. Oleh karena itu, pembangunan keluarga yang berkualitas menjadi landasan utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan. . IPKK mejadi ukuran atau indikator utama yang termuat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan iBangga dan IKK sebagai turunannya.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Kriteria nilai iBangga adalah iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40, iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70, dan iBangga yang baik (Tangguh) apabila

nilainya di atas 70. Capaian iBangga Kabupaten Simalungun tahun 2024 sudah mencapai 61,03 yang artinya Kabupaten Simalungun sudah kategori cukup baik (berkembang).

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di Tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) terdiri dari lima dimensi. Kelima dimensi tersebut meliputi: (1) Kualitas Legalitas-Struktur/KLS; (2) Kualitas Ketahanan Fisik/KKF; (3) Kualitas Ketahanan Ekonomi/KKE; (4) Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi/KKSP; dan (5) Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya/KKSB. IKK memiliki rentang nilai indeks antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: 1) IKK yang "kurang responsif gender dan hak anak" apabila nilai kurang atau di bawah 50; 2) IKK yang "cukup responsif gender dan hak anak" apabila nilai antara 50-75; dan 3) IKK yang "responsif gender dan hak anak" apabila nilai di atas 75. Nilai IKK Provinsi Sumatera Utara di tahun 2023 76,31 yang artinya sudah capai kategori "responsive gender dan haka nak". Di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,73 dari tahun 2022. Hal ini menunjukkan tren yang positif capaian IKK Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2022-2023.

II.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Berbeda dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mengukur kesetaraan pencapaian, IKG menyoroti sejauh mana kesenjangan gender menghambat pencapaian pembangunan manusia. Semakin rendah nilai IKG, semakin kecil ketimpangan gender yang terjadi, yang berarti pembangunan lebih inklusif terhadap perempuan.

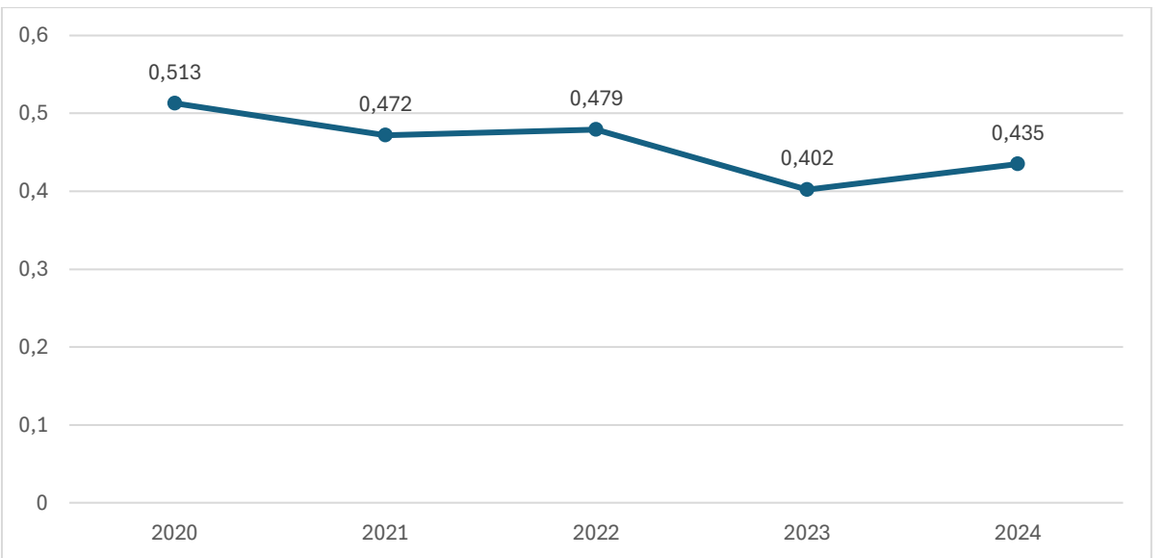

Gambar II.233 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2025.

Berdasarkan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat bahwa IKG di Kabupaten Simalungun mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, nilai IKG tercatat sebesar 0,498 dan meningkat menjadi 0,513 pada tahun 2020, yang mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan gender. Namun, tren tersebut mulai menurun pada tahun-tahun berikutnya, yaitu menjadi 0,472 pada 2021, sedikit naik menjadi 0,479 pada 2022, dan akhirnya menurun signifikan ke angka 0,402 pada tahun 2023.

Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pasar kerja, keterwakilan perempuan dalam posisi strategis, serta akses perempuan terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Kenaikan IKG pada awal periode dapat disebabkan oleh kesenjangan yang masih tinggi dalam aspek ekonomi dan politik. Sementara itu, penurunan IKG pada tahun-tahun selanjutnya mencerminkan adanya perbaikan akses perempuan terhadap kesempatan yang lebih setara, termasuk meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan kebijakan afirmatif di bidang pemberdayaan gender.

II.2.6.4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat pengukuran yang mengevaluasi sejauh mana kesetaraan dan keadilan gender tercapai dalam sebuah masyarakat. IPG tidak hanya mengukur pencapaian dalam aspek-aspek penting pembangunan manusia, tetapi juga menyoroti ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Dengan fokus pada akses, kesempatan, partisipasi, dan kendali yang setara dan adil antara laki laki dan perempuan dalam pembangunan, IPG membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan pembangunan manusia yang perlu diatasi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

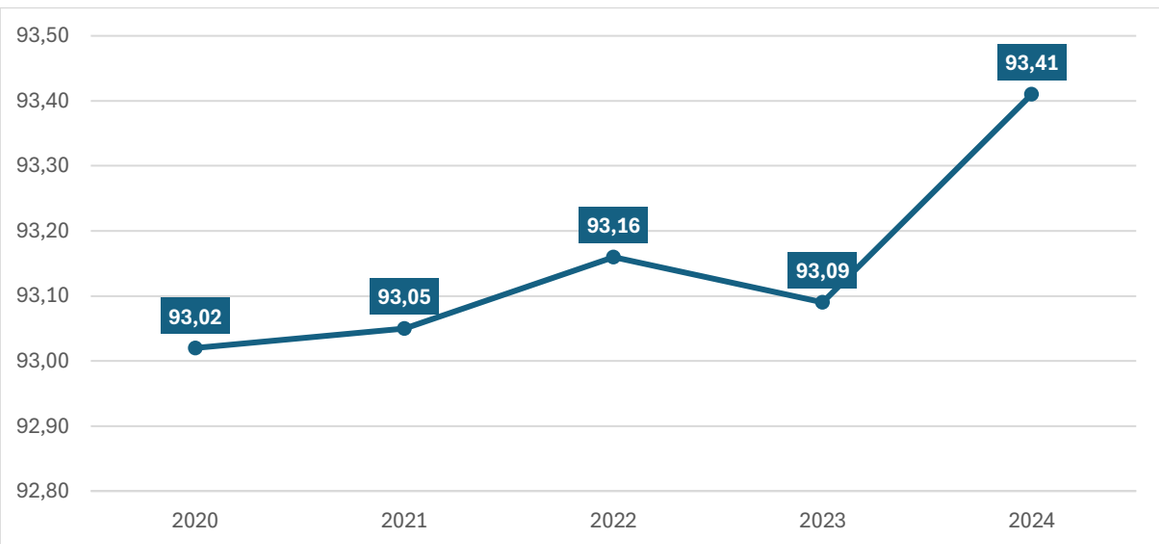

Gambar II.244 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Selama periode 2020 hingga 2024, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Simalungun mengalami fluktuasi dan peningkatan. Pada tahun 2020 nilai IPG Kabupaten Simalungun mencapai sebesar 93,02 dan terus meningkat hingga pada tahun 2022 mencapai 93,16. Namun pada tahun 2023, IPG Kabupaten Simalungun mengalami sedikit penurunan menjadi 93,09. Lalu di tahun 2024 IPG Kabupaten Simalungun kembali mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mencapai 93,41. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Simalungun masih berjalan, meskipun tidak selalu stabil dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tantangan sosial, ekonomi, dan partisipasi perempuan di berbagai sektor. Namun secara keseluruhan, tren IPG yang tetap meningkat menunjukkan bahwa pembangunan berbasis kesetaraan gender di wilayah ini tetap bergerak ke arah yang positif.

II.2.6.5. Indeks Pembangunan Pemuda

Pemuda merupakan aset berharga yang menjadi motor penggerak pembangunan, sehingga pemberdayaan mereka melalui berbagai program, seperti pelatihan kepemimpinan, pendidikan karakter, dan kewirausahaan, menjadi prioritas untuk mencetak individu yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing.

Tabel II.31 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks pembangunan pemuda	NA	NA	52,5	NA	49,55

Sumber: Bapperida Kabupaten Simalungun, 2025.

Pembangunan pemuda di suatu daerah dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yaitu indeks komposit yang menggambarkan capaian pembangunan pemuda berdasarkan tiga domain utama: pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi pemuda dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Di Kabupaten Simalungun, data IPP yang tersedia menunjukkan bahwa pada tahun 2022 indeks tercatat sebesar 52,5. Namun, pada tahun 2024, nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 49,55. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam upaya pemberdayaan pemuda, baik dari sisi akses terhadap pendidikan dan keterampilan, peluang kerja yang layak, maupun keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah. Nilai IPP ini dapat menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan generasi muda yang produktif, berdaya saing, dan berkontribusi dalam kemajuan daerah.

Upaya perbaikan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas pemuda melalui pendidikan vokasi, peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, serta penciptaan lapangan kerja yang ramah pemuda.

II.2.6.6. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah alat yang digunakan untuk menilai sejauh mana peran laki-laki dan perempuan setara dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Sebagai tambahan dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), IDG memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesetaraan dan keadilan gender yang terwujud melalui berbagai program pembangunan. IDG juga memberikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan keadilan gender. IDG terdiri dari tiga komponen utama keterwakilan perempuan dalam parlemen perempuan sebagai tenaga professional dan teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta sumbangan pendapatan. Melalui pengukuran partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG memberikan gambaran yang komprehensif tentang pemberdayaan gender dalam masyarakat.

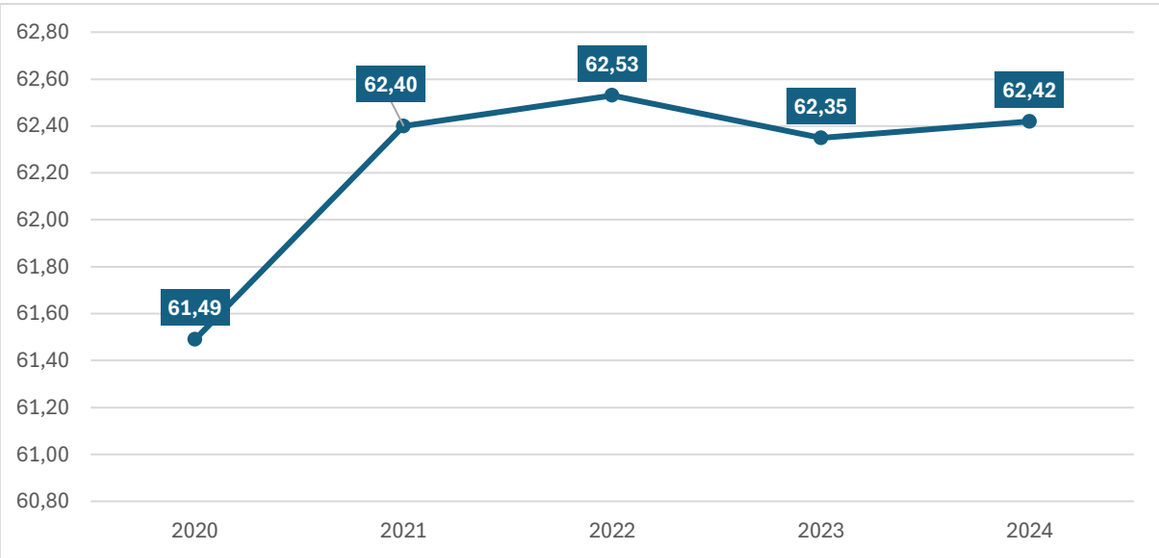

Gambar II.25 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Simalungun, 2024;BPS Indonesia, 2025.

Berdasarkan data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Simalungun dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan tetapi cenderung lambat. IDG Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan dari sebesar 61,49 pada tahun 2020 meningkat jadi 62,53 di tahun 2022. Pada tahun 2023 IDG Kabupaten Simalungun mengalami sedikit penurunan menjadi 62,35. Kemudian pada tahun 2024 IDG Kabupaten Simalungun kembali mengalami peningkatan menjadi 62,42. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pemberdayaan gender di Kabupaten Simalungun terus berjalan, kecepatan pertumbuhan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan strategis masih menghadapi tantangan. Faktor sosial budaya,

keterbatasan akses perempuan di posisi strategis, dan hambatan struktural bisa menjadi penyebab lambatnya laju peningkatan IDG dalam beberapa tahun terakhir.

II.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah dalam perencanaan pembangunan merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah-daerah lain. Evaluasi terhadap aspek daya saing daerah membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu daerah serta merumuskan strategi untuk meningkatkan daya saingnya dalam tingkat regional, nasional, maupun global.

II.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu daerah. Kualitas masyarakat menentukan bagaimana mereka mengelola dan mengoptimalkan fungsi sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Penduduk perlu dilihat sebagai subyek, tidak hanya sebagai obyek, karena merupakan bagian integral dalam proses kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penduduk harus dibina dan dilibatkan secara efektif sehingga benar-benar menjadi modal yang besar dan menguntungkan bagi proses kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Indikator rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Indikator rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah. Semakin tingginya besaran rasio ketergantungan maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara besaran rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya pula beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

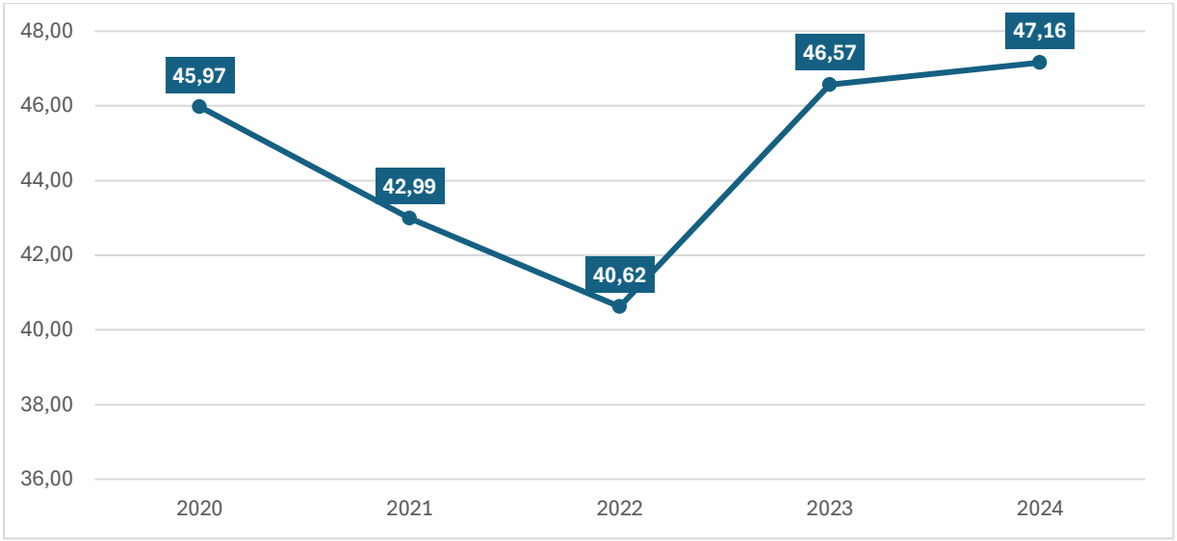

Gambar II.256 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Simalungun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian tingkat rasio ketergantungan di Kabupaten Simalungun menunjukkan dinamika yang cenderung meningkat. Pada tahun 2020, setiap 100 (seratus) orang yang berusia produktif di Kabupaten Simalungun mempunyai tanggungan sebanyak 45 (empat puluh lima) orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Besaran tersebut mengalami pergeseran hingga tahun 2022 dimana setiap 100 (seratus) orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 40 (empat puluh) orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Namun, angka rasio ketergantungan ini kembali meningkat pada tahun 2023 dimana setiap 100 (seratus) orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 46 (empat puluh enam) orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada tahun 2024 angka rasio ketergantungan Kabupaten Simalungun kembali mengalami peningkatan menjadi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang. Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat menanggulangi beban ketergantungan dengan cara menggalakkan program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan populasi. Cara ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, dukungan akses terhadap alat kontrasepsi, dan kampanye kesadaran.

II.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta inovasi merupakan penggerak utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Dalam menghadapi dinamika perubahan global dan perkembangan industri berbasis digital, Pemerintah Kabupaten Simalungun memandang pentingnya penguatan ekosistem inovasi yang adaptif dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga penelitian menjadi strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Melalui pendekatan inovatif dan

pemanfaatan Iptek secara optimal, diharapkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

II.3.2.1. Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor lapangan usaha yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rasio Industri Pengolahan adalah persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Rasio ini mencerminkan peran sektor industri dalam struktur perekonomian daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah komoditas. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar kontribusi sektor industri pengolahan dalam aktivitas ekonomi wilayah tersebut, yang mencerminkan tingkat industrialisasi dan transformasi struktural ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder.

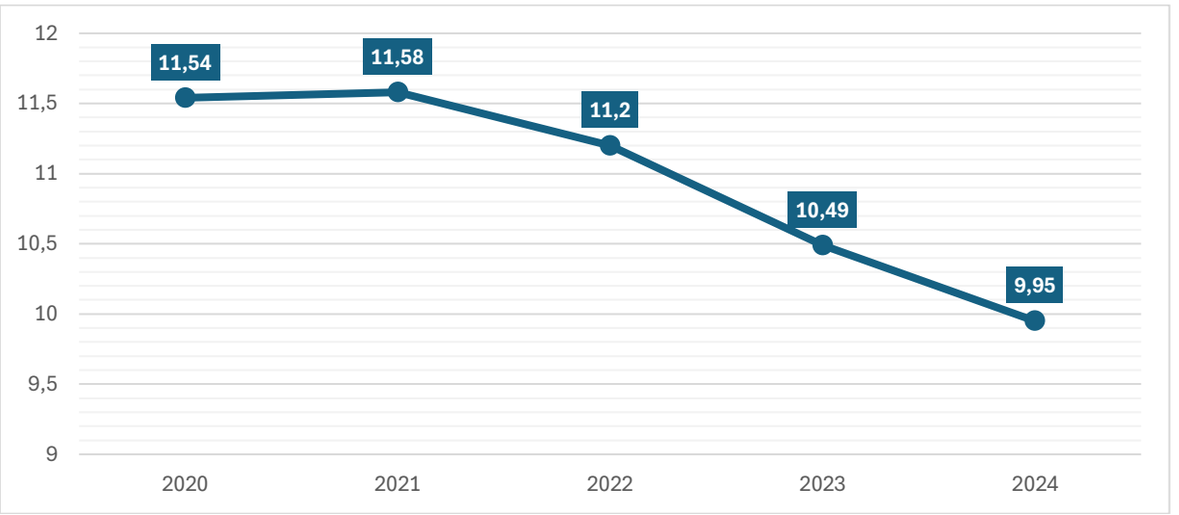

Gambar II.27 Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Berdasarkan data rasio industri pengolahan Kabupaten Simalungun dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan yang cukup konsisten. Pada tahun 2020, rasio industri pengolahan berada di angka 11,54%, kemudian sedikit meningkat menjadi 11,58% pada tahun 2021. Namun, sejak tahun 2022, terjadi penurunan yang bertahap namun signifikan—turun menjadi 11,20% di tahun 2022, 10,49% pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 9,95% pada tahun 2024. Penurunan rasio ini menunjukkan adanya pelemahan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perlambatan investasi industri, berkurangnya kapasitas produksi, atau meningkatnya dominasi sektor lain dalam struktur ekonomi daerah. Kondisi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperkuat kebijakan pengembangan industri agar

sektor ini dapat kembali tumbuh dan memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Simalungun.

II.3.2.2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor lapangan usaha yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, khususnya di bidang pariwisata dan perdagangan. Sektor ini berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong perputaran ekonomi daerah melalui penyediaan layanan jasa penginapan dan konsumsi. Rasio Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah perbandingan antara kontribusi sektor usaha penyediaan akomodasi (seperti hotel, penginapan, wisma, dan sejenisnya) dan usaha makan minum (seperti restoran, rumah makan, kafe, dan usaha kuliner lainnya) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Rasio ini menggambarkan seberapa besar peran sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah.

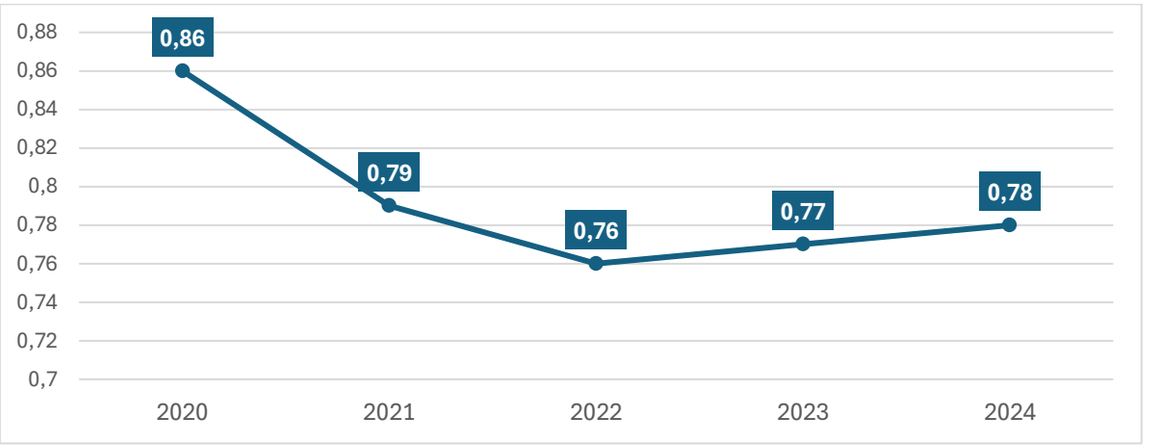

Gambar II.268 Rasio Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Rasio sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Simalungun selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 0,86%, kemudian mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 0,79% di tahun 2021, dan kembali turun menjadi 0,76% pada tahun 2022. Meskipun demikian, tren kontribusi sektor ini mulai menunjukkan pemulihan di tahun 2023 dengan nilai 0,77%, dan meningkat lagi menjadi 0,78% pada tahun 2024. Pola ini mencerminkan adanya dampak situasional yang sempat menekan kinerja sektor jasa akomodasi dan makan minum, kemungkinan akibat pandemi dan pembatasan mobilitas, namun secara bertahap mulai pulih. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan dan percepatan pemulihan sektor ini, khususnya melalui pengembangan pariwisata, promosi kuliner lokal, serta

peningkatan kualitas layanan akomodasi, guna mendorong kontribusi lebih optimal terhadap perekonomian daerah.

II.3.2.3. Tingkat Paritisipasi Angkatan Kerja

TPAK (Tingkat Paritisipasi Angkatan Kerja) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, dinyatakan dalam satuan persen. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan. Penduduk usia kerja yang semakin bertambah tidak seluruhnya masuk sebagai angkatan kerja, sebagian ada yang terkategori sebagai bukan angkatan kerja seperti penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

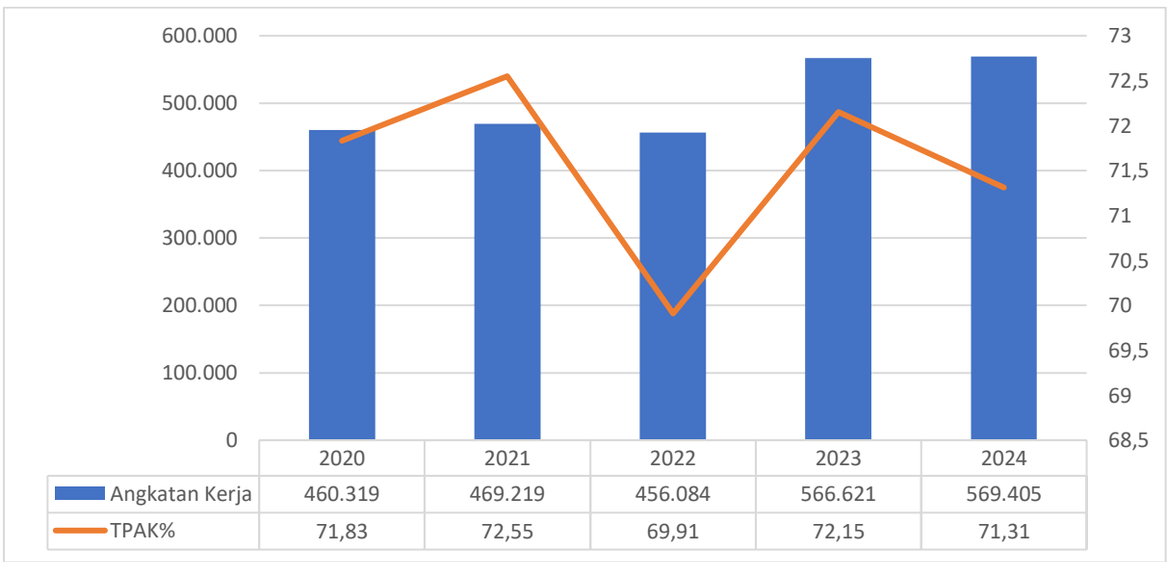

	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	460.319	469.219	456.084	566.621	569.405
TPAK%	71,83	72,55	69,91	72,15	71,31

Gambar II.279 Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2025.

Berdasarkan data TPAK dan angkatan kerja dari tahun 2019 hingga 2024, terlihat bahwa TPAK menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan di beberapa tahun. Pada tahun 2019, TPAK berada di angka 71,4%, kemudian meningkat sedikit menjadi 71,83% pada tahun 2020. Peningkatan TPAK yang signifikan terjadi pada tahun 2021, mencapai 72,55%, sebelum sedikit menurun menjadi 69,91% pada tahun 2022. Namun, TPAK kembali meningkat pada tahun 2023, mencapai 72,15%. Selama periode yang sama, jumlah angkatan kerja mengalami fluktuasi yang cukup besar. Angkatan kerja meningkat dari 436.057 jiwa pada tahun 2019 menjadi 460.319 jiwa pada tahun 2020, lalu terus naik menjadi 469.219 jiwa pada tahun 2021. Namun, jumlah angkatan kerja menurun menjadi 456.084 jiwa pada tahun 2022, sebelum melonjak tajam menjadi 566.621 jiwa pada tahun 2023. Pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja

mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan seperti tahun sebelumnya menjadi 569.405 jiwa. Peningkatan TPAK yang terjadi diiringi dengan lonjakan jumlah angkatan kerja pada tahun 2024 mencerminkan adanya peningkatan proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi dalam jumlah angkatan kerja, kecenderungan peningkatan TPAK menunjukkan adanya perbaikan dalam partisipasi kerja yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

II.3.2.4. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi menjadi salah satu pilar strategis yang tidak dapat diabaikan. Salah satu indikator utama yang mencerminkan kapasitas inovatif suatu pemerintah daerah adalah Indeks Inovasi Daerah. Indeks ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan maupun program yang inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Melalui pengukuran ini, dapat diidentifikasi tingkat kinerja daerah dalam menerapkan inovasi yang berdampak langsung terhadap efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.32 Indeks Inovasi Daerah Beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Deli Serdang	3.473 (Sangat Inovatif)	59,62 (Inovatif)	50,17 (Inovatif)	59,10 (Inovatif)	66,05 (Sangat Inovatif)
Kabupaten Serdang Bedagai	50 (Kurang Inovatif)	27,00 (Kurang Inovatif)	46,66 (Inovatif)	49,50 (Inovatif)	45,26 (Inovatif)
Kabupaten Asahan	48 (Kurang Inovatif)	35,43 (Inovatif)	42,67 (Inovatif)	48,58 (Inovatif)	48,64 (Inovatif)
Kabupaten Batubara	56 (Kurang Inovatif)	39,74 (Inovatif)	42,99 (Inovatif)	53,17 (Inovatif)	47,01 (Inovatif)
Kabupaten Karo	3.319 (Sangat Inovatif)	53,24 (Inovatif)	53,69 (Inovatif)	55,96 (Inovatif)	66,05 (Sangat Inovatif)
Kabupaten Samosir	2.502 (Sangat Inovatif)	49,57 (Inovatif)	46,64 (Inovatif)	48,88 (Inovatif)	45,04 (Inovatif)
Kabupaten Toba	35 (Kurang Inovatif)	37,68 (Inovatif)	31,79 (Kurang Inovatif)	11,76 (Kurang Inovatif)	39,74 (Inovatif)
Kabupaten Simalungun	3 (Kurang Inovatif)	0,08 (Kurang Inovatif)	11,70 (Kurang Inovatif)	41,30 (Inovatif)	41,49 (Inovatif)

Sumber : Kepetusan Menteri Dalam Negeri, 2025.

Data Indeks Inovasi Daerah pada beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa Kabupaten Simalungun menjadi kabupaten yang memiliki nilai terendah selama tahun 2020–2024. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang data capaiannya mengalami fluktuasi, angka capaian yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun konsisten menunjukkan adanya tren peningkatan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Setelah tiga tahun berturut-turut berada pada kategori kurang inovatif, capaian indeks mulai meningkat tajam sejak tahun 2023 hingga 2024 mencapai kategori inovatif. Salah satu faktor pendorong dari meningkatnya capaian ini adalah meningkatnya penggunaan *Quick Reponse Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam Pembayaran Pajak dan Retribusi, seperti retribusi Pasar, Layanan Kesehatan, Parkir dan Persampahan. Capaian tersebut digambarkan dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Simalungun pada semester II Tahun 2023 mencapai sebesar 91.6%. Hasil tersebut menjadikan Kabupaten Simalungun sebagai salah satu Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar (Sisibatas Labuhan) dengan penerimaan non tunai terbesar yaitu 98,62%. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi sudah mulai diterapkan di Kabupaten Simalungun sebagai bentuk inovasi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Simalungun ke depannya perlu melakukan komitmen dan konsistensi untuk mempertahankan serta meningkatkan indeks inovasi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan pelayanan publik yang berkualitas.

II.3.2.5. Indeks Akses Keuangan Daerah

Peningkatan inklusi keuangan merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang menetapkan inklusi keuangan sebagai salah satu dari 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP No. 34). Inklusi keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk dan/atau layanan sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, guna mendorong peningkatan kesejahteraan. Sebagai turunan dari indikator inklusi keuangan nasional, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dikembangkan untuk mengukur capaian akses keuangan di tingkat kabupaten/kota secara lebih spesifik dan terukur. IKAD merepresentasikan kondisi aksesibilitas keuangan daerah melalui tiga dimensi utama, yaitu *ketersediaan* (*availability*), penggunaan (*usage*), dan kedalaman (*depth*) layanan keuangan. Indeks ini disusun menggunakan pendekatan komposit multidimensi berdasarkan data yang tersedia secara nasional maupun lokal, dan dapat dijadikan sebagai proksi operasional terhadap capaian inklusi keuangan daerah.

Hubungan antara inklusi keuangan dan IKAD bersifat erat dan saling melengkapi. Berdasarkan analisis statistik nasional, daerah dengan capaian IKAD yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat inklusi keuangan yang lebih baik. Dengan kata lain, IKAD tidak hanya menjadi alat ukur akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga sebagai indikator kinerja kebijakan inklusi keuangan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. IKAD telah ditetapkan sebagai indikator wajib dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Pemerintah daerah Kabupaten Simalungun dapat mengintegrasikan IKAD ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten Simalungun sebagai bagian dari komitmen nasional untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 91 persen pada tahun 2025 dan 93 persen pada tahun 2029.

Tabel II.33 Baseline dan Target IKAD Kabupaten Simalungun

Kabupaten /Kota	Baseline	Target					
	IKAD - 2024	IKAD - 2025	IKAD - 2026	IKAD - 2027	IKAD - 2028	IKAD - 2029	IKAD - 2030
Kab. Simalungun	3.77	3.82	3.84	3.87	3.89	3.92	3.93

Sumber: Bappenas, 2025.

Target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Simalungun disusun secara bertahap, dari capaian baseline 3,77 pada tahun 2024 menjadi 3,82 pada tahun 2025, dan terus meningkat hingga 3,93 pada tahun 2030. Proyeksi kenaikan ini mencerminkan optimisme terhadap penguatan akses layanan keuangan melalui perluasan jaringan layanan formal, peningkatan pemanfaatan produk keuangan oleh masyarakat, serta penguatan literasi keuangan. Penetapan target yang terukur ini selaras dengan arah kebijakan inklusi keuangan nasional, sekaligus menunjukkan komitmen daerah Kabupaten Simalungun dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

II.3.2.6. Kemudahan Perijinan

Kemudahan perizinan adalah faktor krusial yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi. Proses perizinan yang efisien dan transparan memungkinkan para pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan bisnis dengan lebih cepat dan mudah. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi baru serta pertumbuhan usaha yang sudah ada. Dengan perizinan yang mudah, investor cenderung lebih termotivasi untuk menanamkan modalnya, karena mereka memiliki

keyakinan bahwa proyek mereka akan dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa hambatan administratif yang berlebihan. Selain itu, kemudahan perizinan juga mempercepat implementasi proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih luas**.**

Tabel II.34 Posisi Pinjaman yang Disalurkan Bank Umum Berdasarkan Pengguanaan (Juta Rupiah) Tahun 2019-2024

Penggunaan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Modal Kerja	429.825	512.804	635.440	793.745	803.936	823.031
Investasi	299.246	280.412	256.981	406.054	533.675	593.764
Konsumsi	456.529	491.125	796.505	801.465	683.980	751.506
Jumlah	1.185.600	1.284.340	1.688.927	2.001.264	2.021.591	2.168.301

*S*umber : *Kabupaten Simalungun Dalam Angka, 2025.*

Peningkatan penyaluran pinjaman oleh bank umum dari tahun 2019 hingga 2024 dapat dikaitkan dengan kemudahan perizinan yang semakin baik. Kemudahan perizinan memberikan dampak positif terhadap akses modal kerja, investasi, dan konsumsi. Dengan proses perizinan yang lebih efisien dan transparan, pelaku usaha mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari bank untuk memperoleh pinjaman modal kerja, yang tercermin dari peningkatan pinjaman dari Rp429.825 juta pada tahun 2019 menjadi Rp823.031 juta pada tahun 2024. Demikian pula, pinjaman untuk investasi yang awalnya mengalami penurunan, kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp593.764 juta, menunjukkan bahwa kemudahan perizinan mendorong investasi baru dan perluasan usaha. Pinjaman konsumsi mengalami fluktuasi pada tahun 2023, menjadi Rp683.980 juta dan kembali naik menjadi 751.506 juta pada tahun 2024, yang mungkin terkait dengan peningkatan kepercayaan konsumen dan peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, kebijakan kemudahan perizinan tidak hanya mempercepat pengembangan usaha dan investasi tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses ke pembiayaan.

II.3.2.7. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ekonomi kreatif menggambarkan kontribusi sektor-sektor berbasis kreativitas, inovasi, dan kearifan lokal terhadap perekonomian daerah. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti kuliner, fesyen, kriya, seni pertunjukan, serta subsektor lain yang berpotensi memberikan nilai tambah dan membuka peluang kerja baru. Dengan demikian, data mengenai proporsi ekonomi kreatif terhadap PDRB dapat menjadi dasar penting dalam melihat peran sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun hingga saat ini, di Kabupaten Simalungun belum tersedia data resmi dan terstruktur terkait proporsi ekonomi kreatif dalam PDRB. Ketiadaan data tersebut membuat analisis kontribusi

ekonomi kreatif masih terbatas, sehingga penyusunan kebijakan spesifik untuk pengembangannya belum sepenuhnya berbasis bukti. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pencatatan, pemetaan, dan pelaporan statistik ekonomi kreatif yang terintegrasi, agar dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif serta adaptif terhadap dinamika ekonomi baru.

II.3.2.8. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan digunakan untuk menggambarkan proporsi jumlah wirausaha terhadap total penduduk atau angkatan kerja di suatu daerah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki semangat berwirausaha, kemampuan menciptakan lapangan kerja baru, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Semakin tinggi rasio kewirausahaan, semakin besar pula potensi daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi berbasis usaha mandiri dan inovasi masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini di Kabupaten Simalungun belum tersedia data resmi dan terstruktur mengenai rasio kewirausahaan. Kondisi ini menyulitkan dalam memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kapasitas kewirausahaan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pencatatan, pelaporan, dan pemetaan indikator kewirausahaan yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berorientasi pada penguatan daya saing.

II.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru merupakan langkah strategis dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ekonomi hijau menekankan pada upaya pengelolaan sumber daya alam secara efisien dengan menjaga kelestarian ekosistem darat dan atmosfer, sedangkan ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perairan yang berwawasan lingkungan, dalam hal ini Kabupaten Simalungun memiliki Danau Toba sebagai sumber daya perairan. Kedua pendekatan ini memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi penerapan ekonomi hijau dan biru menjadi hal yang esensial dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

II.3.3.1. Bauran Energi Terbarukan

Bauran energi terbaru mengacu pada kombinasi berbagai sumber energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi suatu negara atau wilayah. Pendekatan ini berfokus pada diversifikasi sumber energi untuk meningkatkan keberlanjutan, efisiensi dan keamanan energi.

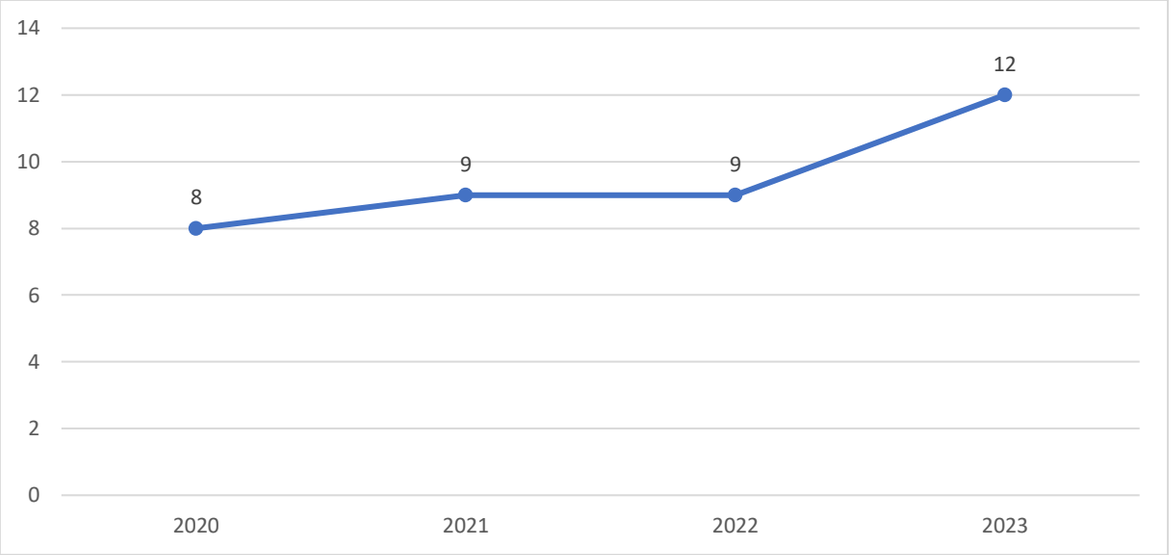

Gambar II.30 Bauran Energi Terbarukan Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2023
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029.

Bauran energi terbarukan di Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan dari berjumlah 8 (delapan) pada tahun 2020 menjadi 9 di tahun 2021 dan 2022 kemudian meningkat menjadi 12 (dua belas) pada tahun 2023. Dengan adanya energi terbarukan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi di Kabupaten Simalungun yang terus meningkatkan sambil meminimalkan dampak lingkungan dan mendukung adanya keberlanjutan.

II.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital di Kabupaten Simalungun merupakan agenda strategis yang diarahkan untuk mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan penguatan perekonomian daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Dalam rangka meningkatkan efisiensi birokrasi, memperluas akses layanan, serta menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat, pengarusutamaan transformasi digital dilaksanakan melalui tiga fokus utama, yaitu pengembangan super platform daerah, percepatan transformasi digital lintas sektor, serta penguatan produksi talenta digital lokal. Pengembangan super platform ditujukan untuk membangun ekosistem layanan digital terintegrasi yang mendukung pelayanan publik yang efektif, keterbukaan informasi, serta akselerasi ekonomi digital daerah. Percepatan transformasi digital dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur TIK, pemerataan akses internet, dan digitalisasi layanan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor perekonomian, dengan indikator pengukuran mencakup Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IDI). Sementara itu, produksi talenta digital diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Simalungun melalui penguatan literasi digital, pelatihan

keterampilan berbasis teknologi, dan pengembangan tenaga kerja terampil di bidang digital. Dengan pengarusutamaan transformasi digital yang terencana dan terukur, Kabupaten Simalungun diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang modern, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta perekonomian daerah yang lebih produktif dan berdaya saing di era digital.

II.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan suatu proses penggabungan dan sinergi antara aktivitas ekonomi dalam negeri dengan pasar internasional. Proses ini mencakup peningkatan konektivitas perdagangan, investasi, serta arus modal dan teknologi antara pelaku ekonomi domestik dan global. Integrasi yang efektif dapat memperkuat daya saing nasional, memperluas pasar bagi produk dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam menghadapi dinamika perekonomian dunia yang semakin kompleks, integrasi ekonomi domestik dan global menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh posisi negara dalam perekonomian internasional.

II.3.5.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029 merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat investasi terhadap aset tetap yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa di daerah. Evaluasi terhadap PMTB diperlukan untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas kebijakan pembangunan daerah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas sektor-sektor strategis. Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, analisis terhadap tren dan struktur PMTB menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan investasi publik dan swasta yang berkelanjutan, serta memperkuat sinergi antara belanja modal pemerintah daerah dan kontribusi investasi sektor usaha untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Tabel II.35 Pembentukan Modal tetap Bruto Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10070.00	10683.53	11320.63	11915.77	12.832,57

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun 2023.

Pada tahun 2020, nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat sebesar 10.070,00 miliar rupiah. Nilai tersebut meningkat menjadi 11.915,77 miliar rupiah pada tahun 2023, dan mencapai 12.832,57 miliar rupiah pada tahun 2024. Tren peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan investasi yang cukup stabil dan berperan penting dalam

mendukung aktivitas ekonomi daerah, khususnya di sektor pertanian, industri pengolahan, serta infrastruktur pendukung lainnya.

II.3.5.2. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor Barang dan Jasa dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029 memuat gambaran kinerja perdagangan luar daerah yang mencerminkan daya saing produk dan jasa lokal di pasar regional, nasional, maupun internasional. Evaluasi terhadap indikator ini menjadi penting untuk mengukur kontribusi sektor unggulan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, serta memperluas peluang usaha dan lapangan kerja. Analisis ekspor barang dan jasa juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi komoditas ekspor, serta penguatan ekosistem logistik dan kemitraan usaha yang mendukung peningkatan kinerja ekspor secara berkelanjutan.

Tabel II.36 Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Net Ekspor Barang dan Jasa	4089.92	5818.24	8068.44	9581.34	12.769,31

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun 2023.

Net Ekspor Barang dan Jasa juga menunjukkan perkembangan yang signifikan selama periode yang sama. Nilai ekspor bersih meningkat hampir tiga kali lipat, dari 4.089,92 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 12.769,31 miliar rupiah pada tahun 2024. Kenaikan tajam ini mengindikasikan perbaikan kinerja perdagangan luar daerah, yang kemungkinan besar didorong oleh peningkatan produksi komoditas unggulan daerah seperti hasil pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.

II.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang saling melengkapi. Kawasan perkotaan sering kali menjadi pusat aktivitas ekonomi, inovasi, dan layanan yang mendukung pembangunan, sementara wilayah perdesaan menyediakan sumber daya alam, tenaga kerja, serta potensi agribisnis yang signifikan. Pengembangan yang seimbang antara perkotaan dan perdesaan diperlukan untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Oleh karena itu, perencanaan dan kebijakan yang integratif dan berkelanjutan sangat penting untuk mengoptimalkan peran kedua wilayah tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

II.3.6.1. Aksesibilitas Daerah

Peningkatan dalam infrastruktur dapat diamati dari jumlah konstruksi yang telah selesai. Data menunjukkan bahwa ada peningkatan atas panjang jalan yang telah

dibangun dan diperbaiki di Kabupaten Simalungun dari Tahun 2020 hingga 2024 meskipun masih banyak jalan rusak yang perlu ditangani.

Tabel II.37 Kondisi Jalan Kabupaten Simalungun (km) Tahun 2019-2024

No	Keterangan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Baik	497,81	529,23	567,74	575,88	696,51	544,50
2	Sedang	175,12	151,16	121,78	149,61	185,26	372,83
3	Rusak	125,54	86,69	88,83	75,74	118,14	44,49
4	Rusak Berat	1005,31	1036,70	1025,43	1002,55	803,87	841,96

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun, 2025

Dari tahun 2019 hingga 2024, kondisi jalan di Kabupaten Simalungun menunjukkan perubahan. Persentase jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 497,81 km pada tahun 2019 menjadi 544,50 km pada tahun 2024. Sementara itu, jalan dengan kondisi sedang meningkat dari 175,12 km pada tahun 2019 menjadi 372,83 km pada tahun 2024. Jalan yang rusak mengalami penurunan dari 125,54 km pada tahun 2019 menjadi 44,49 km pada tahun 2024. Jalan dalam kondisi rusak berat juga sempat mengalami penurunan yaitu mencapai 1.005,31 km di tahun 2019 dan menjadi 841,96 km pada tahun 2024. Salah satu pendorong berkurangnya jalan dalam kondisi rusak adalah dilakukannya perbaikan pada jalan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Simalungun dan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD). Peningkatan jalan perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui penyusunan strategi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan pembangunan jalan baru yang mempertimbangkan tingkat prioritas wilayah tertinggal serta kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya, agar pemerataan infrastruktur jalan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

II.3.6.2. Penataan Wilayah

Penataan ruang wilayah adalah proses perencanaan dan pengelolaan ruang yang bertujuan untuk mengorganisasi penggunaan tanah dan sumber daya alam secara efektif dan berkelanjutan. Kegiatan penataan wilayah biasanya melibatkan analisis kondisi eksisting, identifikasi kebutuhan masyarakat, serta penyusunan rencana tata ruang yang dapat mencakup kawasan perumahan, industri, perkebunan dan ruang terbuka hijau. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, serta meminimalkan konflik penggunaan ruang.

Tabel II.38 Penataan Ruang Kabupaten Simalungun

Kecamatan	Luas (Ha)	Persen Terhadap Total
Kawasan Hutan Lindung		
Dolok Panribuan	2.394,93	10,4
Dolok Pardamean	1.323,69	5,8

Kecamatan	Luas (Ha)	Persen Terhadap Total
Dolok Silau	1.959,08	8,5
Girsang Sipangan Bolon	6.573,36	28,6
Haranggaol Horison	2.141,93	9,3
Hatonduhan	2.674,04	11,6
Jorlang Hataran	183,92	0,8
Pamatang Silima Huta	828,87	3,6
Pematang Sidamanik	1.236,01	5,4
Purba	3.059,58	13,3
Raya	3,93	0,02
Raya Kahean	4,9	0,02
Silimakuta	609,1	2,6
Tapian Dolok	0,12	0,001
Grand Total	**22.993,48**	**100**
Kawasan Perlindungan Setempat		
Bandar	804,716827	4,07
Bandar Huluan	612,247118	3,09
Bandar Masilam	599,632712	3,03
Bosar Maligas	1.076,08	5,44
Dolog Masagal	792,424452	4
Dolok Batu Nanggar	466,657979	2,36
Dolok Panribuan	989,730065	5
Dolok Pardamean	243,304461	1,23
Dolok Silau	1.258,16	6,36
Girsang Sipangan Bolon	167,209425	0,84
Gunung Malela	269,25614	1,36
Gunung Maligas	195,038533	0,99
Haranggaol Horison	27,152852	0,14
Hatonduhan	1.140,62	5,76
Huta Bayu Raja	1001,177807	5,06
Jawa Maraja Bah Jambi	387,106093	1,96
Jorlang Hataran	480,332584	2,43
Pamatang Silima Huta	159,772148	0,81
Panei	711,087371	3,59
Panombeian Pane	588,498822	2,97
Pematang Bandar	113,623834	0,57
Pematang Sidamanik	568,473612	2,87
Purba	733,144264	3,7
Raya	907,311486	4,58
Raya Kahean	657,449809	3,32
Siantar	338,512152	1,71
Sidamanik	336,922916	1,7
Silimakuta	443,547851	2,24
Silou Kahean	585,918885	2,96
Tanah Jawa	1.078,53	5,45
Tapian Dolok	860,70594	4,35
Ujung Padang	1.195,56	6,04
Grand Total	**19.758,77**	**100**
Badan Air		
Bandar	256,61	1,12
Bandar Huluan	14,64	0,06
Bandar Masilam	87,39	0,38
Bosar Maligas	68,56	0,3
Dolok Batu Nanggar	60,38	0,26
Dolok Pardamean	2.124,68	9,25

Kecamatan	Luas (Ha)	Persen Terhadap Total
Dolok Silau	5,18	0,02
Girsang Sipangan Bolon	2.143,02	9,33
Gunung Malela	69	0,3
Gunung Maligas	10,63	0,05
Haranggaol Horison	12.505,63	54,43
Hatonduhan	32,59	0,14
Huta Bayu Raja	286,62	1,25
Jawa Maraja Bah Jambi	43,11	0,19
Pamatang Silima Huta	852,42	3,71
Pematang Bandar	9,61	0,04
Pematang Sidamanik	3.843,90	16,73
Purba	439,18	1,91
Siantar	41,29	0,18
Silimakuta	0,72	0
Silou Kahean	23,38	0,1
Tanah Jawa	56,72	0,25
Tapian Dolok	1,54	0,01
Grand Total	22.972,55	**100**
Kawasan Cagar Alam		
Dolok Panribuan	0,89	0,22
Purba	204,5	50,14
Silou Kahean	202,49	49,64
Grand Total	407,88	**100**
Kawasan Taman Nasional		
Dolok Silau	876,22	100
Kawasan Budidaya Hutan Produksi		
Bosar Maligas	642,36	6,83
Hatonduhan	4.025,72	42,81
Huta Bayu Raja	2.700,30	28,71
Tanah Jawa	6,09	0,06
Ujung Padang	2.029,91	21,58
Grand Total	**9.404,38**	**100**
Kawasan Budidaya Hutan Produksi Terbatas		
Bosar Maligas	642,36	6,83
Hatonduhan	4.025,72	42,81
Huta Bayu Raja	2.700,30	28,71
Tanah Jawa	6,09	0,06
Ujung Padang	2.029,91	21,58
Grand Total	**9.404,38**	**100**
Kawasan Budidaya Hutan Produksi Tetap		
Dolok Panribuan	6.523,90	9,55
Dolok Pardamean	172,65	0,25
Dolok Silau	7.146,34	10,46
Girsang Sipangan Bolon	1.836,02	2,69
Hatonduhan	9.493,08	13,9
Jorlang Hataran	169,48	0,25
Panombeian Pane	433,04	0,63
Pematang Sidamanik	5.793,25	8,48
Raya	10.643,14	15,58
Raya Kahean	10.472,53	15,33
Silou Kahean	15.631,57	22,88
Tapian Dolok	2,57	0,004
Grand Total	**68.317,57**	**100**
Kawasan Perkebunan		

Kecamatan	Luas (Ha)	Persen Terhadap Total
Bandar	7.894,18	3,81
Bandar Huluan	8.258,75	3,98
Bandar Masilam	7.471,90	3,6
Bosar Maligas	24.516,98	11,82
Dolog Masagal	2.233,81	1,08
Dolok Batu Nanggar	7.418,65	3,58
Dolok Panribuan	4.653,66	2,24
Dolok Pardamean	447,98	0,22
Dolok Silau	8.518,70	4,11
Girsang Sipangan Bolon	1.918,41	0,92
Gunung Malela	6.385,08	3,08
Gunung Maligas	3.143,37	1,52
Haranggaol Horison	52,42	0,03
Hatonduhan	11.702,97	5,64
Huta Bayu Raja	9.519,60	4,59
Jawa Maraja Bah Jambi	4.393,14	2,12
Jorlang Hataran	4.410,40	2,13
Pamatang Silima Huta	286,09	0,14
Panei	3.225,13	1,55
Panombeian Pane	4.072,79	1,96
Pematang Bandar	3.677,61	1,77
Pematang Sidamanik	3.404,62	1,64
Purba	4.672,02	2,25
Raya	9.730,73	4,69
Raya Kahean	8.202,98	3,95
Siantar	3.869,70	1,87
Sidamanik	4.510,31	2,17
Silimakuta	184,23	0,09
Silou Kahean	6.976,11	3,36
Tanah Jawa	11.672,61	5,63
Tapian Dolok	10.412,75	5,02
Ujung Padang	19.575,01	9,44
Grand Total	**207.412,68**	**100**
Kawasan Perikanan Budidaya		
Bandar	15,17	16,91
Bandar Huluan	2,47	2,76
Bandar Masilam	4,57	5,1
Bosar Maligas	0,76	0,85
Dolog Masagal	0,62	0,69
Dolok Batu Nanggar	12,32	13,73
Dolok Panribuan	3,4	3,79
Dolok Silau	4,95	5,51
Gunung Malela	2,76	3,07
Gunung Maligas	0,88	0,98
Hatonduhan	1,53	1,7
Jawa Maraja Bah Jambi	3,9	4,35
Pamatang Silima Huta	1,47	1,64
Panei	2,84	3,17
Panombeian Pane	2,86	3,18
Pematang Bandar	2,83	3,15
Purba	3,97	4,42
Raya	11,55	12,87
Siantar	0,72	0,8
Silimakuta	2,54	2,83

Kecamatan	Luas (Ha)	Persen Terhadap Total
Tanah Jawa	7,61	8,48
Grand Total	**89,73**	**100**
Kawasan Peruntukan Industri		
Bandar	145,32	5,9
Bandar Huluan	12,85	0,52
Bandar Masilam	68,7	2,79
Bosar Maligas	1.830,38	74,25
Dolok Batu Nanggar	37,89	1,54
Gunung Malela	11,51	0,47
Gunung Maligas	10,56	0,43
Huta Bayu Raja	46,11	1,87
Jawa Maraja Bah Jambi	24,48	0,99
Siantar	25,52	1,04
Tapian Dolok	238,54	9,68
Ujung Padang	13,19	0,53
Grand Total	**2.465,05**	**100**
Kawasan Permukiman Perkotaan		
Bandar	1.324,34	18,49
Bosar Maligas	21,5	0,3
Dolok Batu Nanggar	620,29	8,66
Dolok Panribuan	297,77	4,16
Girsang Sipangan Bolon	328,93	4,59
Panei	336,39	4,7
Pematang Bandar	599,78	8,38
Raya	1.617,64	22,59
Siantar	702,49	9,81
Sidamanik	222,43	3,11
Silimakuta	391,82	5,47
Tanah Jawa	334,24	4,67
Tapian Dolok	363,66	5,08
Grand Total	**7.161,26**	**100**
Kawasan Permukiman Pedesaan		
Bandar	1.202,16	6,33
Bandar Huluan	1.025,34	5,4
Bandar Masilam	876,85	4,62
Bosar Maligas	876,81	4,62
Dolog Masagal	1.119,26	5,9
Dolok Batu Nanggar	938,59	4,95
Dolok Panribuan	336,51	1,77
Dolok Pardamean	418,75	2,21
Dolok Silau	286,88	1,51
Girsang Sipangan Bolon	75,27	0,4
Gunung Malela	882,1	4,65
Gunung Maligas	972,12	5,12
Haranggaol Horison	131,58	0,69
Hatonduhan	406,1	2,14
Huta Bayu Raja	625,59	3,3
Jawa Maraja Bah Jambi	479,52	2,53
Jorlang Hataran	369,14	1,95
Pamatang Silima Huta	189	1
Panei	573,76	3,02
Panombeian Pane	604,57	3,19
Pematang Bandar	540,7	2,85
Pematang Sidamanik	327,03	1,72

Kecamatan	Luas (Ha)	Persen Terhadap Total
Purba	682,52	3,6
Raya	418,35	2,2
Raya Kahean	424,2	2,24
Siantar	444,45	2,34
Sidamanik	388,16	2,05
Silimakuta	217,43	1,15
Silou Kahean	388,31	2,05
Tanah Jawa	780,51	4,11
Tapian Dolok	639,26	3,37
Ujung Padang	1.336,20	7,04
Grand Total	**18.977,01**	**100**
Kawasan Transportasi		
Bandar	2,87	16,73
Bandar Masilam	0,19	1,09
Bosar Maligas	10,26	59,77
Dolok Batu Nanggar	0,25	1,44
Dolok Pardamean	0,38	2,24
Girsang Sipangan Bolon	2,82	16,43
Haranggaol Horison	0,06	0,36
Tapian Dolok	0,33	1,94
Grand Total	**17,17**	**100**
Kawasan Pertahanan dan Keamanan		
Kawasan Hankam Berbahaya Parapat (TNI AL) (Kec. Girsang Sipangan Bolon)	6,54	
Batalyon Infanteri 122/ Tombak Sakti (Kec. Siantar)	21,88	
Kodim 0207/ Simalungun (Kec. Siantar)	2,54	
Korem 022/ Pantai Timur - Simalungun (Kec.Siantar)	4,35	

Sumber: RTRW Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Simalungun bertujuan untuk menciptakan suatu ruang yang mengarah kepada transformasi Kabupaten Simalungun menjadi pusat bisnis dan tujuan wisata berskala internasional di tepian sungai yang berkelanjutan. Dengan demikian, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Simalungun dirancang dengan tujuan yang sangat ambisius dan komprehensif, yang menggambarkan visi pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mewujudkan potensi dan keunggulan wilayah tersebut dalam konteks global. Selain itu, penataan ruang di Kabupaten Simalungun bertujuan untuk membangun infrastruktur yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di berbagai sektor yang telah diidentifikasi.

II.3.6.3. Ketersediaan Air Minum

Ketersediaan air minum merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan menjadi faktor krusial dalam mendukung kehidupan sehari-hari. Air minum tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan produktivitas individu

serta komunitas. Di Kabupaten Simalungun, seperti halnya di mana pun, air minum yang aman, bersih, dan mudah diakses adalah hak dasar yang harus dipenuhi bagi setiap warga. Tanpa akses yang memadai terhadap air minum yang berkualitas, masyarakat akan menghadapi risiko kesehatan yang serius akibat dari dehidrasi, penyakit air, dan kurangnya sanitasi yang tepat. Selain itu, ketersediaan air minum yang memadai juga mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, seperti pertanian, industri, pariwisata, dan layanan kesehatan. Tanpa akses yang memadai terhadap air minum, pembangunan sosial dan ekonomi Kabupaten Simalungun dapat terhambat, dan kualitas hidup masyarakat dapat menurun secara signifikan.

Tabel II.39 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi dan Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Terhadap Sanitasi Layak	82,38	90,96	91,75	91,25	92,96	94,97
Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	60,15	99,10	99,74	98,66	98,48	99,09

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2025.

Dari tahun 2019 hingga 2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dan sumber air minum layak di Kabupaten Simalungun menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak meningkat dari 60,15% pada tahun 2019 menjadi 99,74% pada tahun 2021. Kemudian persentase tersebut mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 98,66% dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 99,09%. Sedangkan pada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Kabupaten Simalungun konsisten mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2019, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mencapai 82,38% dan pada tahun 2024 mencapai 99,09%. Hasil capaian yang cenderung mengalami penigkatan ini didukung dengan adanya kolaborasi dalam meningkatkan air bersih dan sanitasi antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan United States Agency for International Development (USAID) dan Indonesia Urban Resilinet Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH Tangguh). Kolaborasi tersebut melaksanakan tindak lanjut dari penyusunan RAD-AMPL (Rencana Aksi Daerah Penyediaan Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) dan penyelesaian dokumen RISPALD (Research Information System Pengelolaan Air Limbah Domestik). Selain dengan kolaborasi tersebut, upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan sanitasi dan air bersih yaitu melalui normalisasi dan peningkatan kapasitas jaringan drainase, pembangunan kolam retensi di kawasan rawan genangan, penyediaan sumur resapan di titik-titik strategis, pembangunan waduk kecil sebagai

sumber cadangan air baku, serta pengelolaan sumber daya air secara terpadu lintas wilayah administrasi untuk mengoptimalkan distribusi dan konservasi sumber daya air. Dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan, akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi layak dapat terus ditingkatkan.

II.3.6.4. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Fasilitas perdagangan dan jasa merujuk pada infrastruktur dan layanan yang mendukung ekonomi dan pertumbuhan wilayah. Kabupaten Simalungun memiliki beragam fasilitas perdagangan dan jasa menjadi pilar utama dalam memajukan ekonomi dan mendukung pertumbuhan wilayah. Pasar merupakan salah satu infrastruktur wilayah yang mendukung aktivitas perekonomian. Pasar adalah suatu tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar sebagai fasilitas perdagangan dan jasa berfungsi sebagai tempat dimana berbagai transaksi jual beli barang dan layanan dapat berlangsung.

Tabel II.40 Jumlah Pasar menurut Kecamatan di Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Silimakuta	1	1	1	1	1	1
2	Pamatang Silimahuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Purba	1	1	1	1	1	1
4	Haranggaol Horison	1	1	1	1	1	1
5	Dolok Pardamean	1	1	1	1	2	2
6	Sidamanik	1	1	1	1	2	2
7	Pamatang Sidamanik	3	3	3	3	3	3
8	Girsang Sipangan Bolon	2	2	2	2	2	1
9	Tanah Jawa	2	2	2	2	1	1
10	Hatonduhan	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1
11	Dolok Panribuan	1	1	1	1	1	1
12	Jorlang Hataran	1	1	1	1	1	1
13	Panei	2	2	2	2	1	1
14	Panombeian Panei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Raya	2	2	2	2	2	2
16	Dolog Masagal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dolok Silou	2	2	2	2	1	1
18	Silou Kahean	1	1	1	1	1	1
19	Raya Kahean	2	2	2	2	2	2
20	Tapian Dolok	1	1	1	1	3	3
21	Dolok Batu Nanggar	1	1	1	1	1	1
22	Siantar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Gunung Malela	5	5	5	5	5	5
24	Gunung Maligas	1	1	1	1	1	1
25	Hutabayu Raja	3	3	3	3	3	3
26	Jawa Maraja Bah Jambi	1	1	1	1	1	1
27	Pamatang Bandar	2	2	2	2	1	1
28	Bandar Huluan	1	1	3	1	1	1

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	Bandar	3	3	1	2	2	2
30	Bandar Masilam	2	2	2	2	3	3
31	Bosar Maligas	6	6	6	6	6	7
32	Ujung Padang	5	5	5	5	6	5
Jumlah		**54**	**54**	**54**	**53**	**56**	**55**

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun Dalam Angka Tahun 2025.

Jumlah pasar di Kabupaten Simalungun dari tahun 2019 hingga 2021 konsisten ada sebanyak 54 unit dan baru bertambah di tahun 2023 menjadi 56 unit. Di beberapa kecamatan sempat terjadi adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah pasar seperti di Kecamatan Bandar Huluan yang pada tahun 2021 sempat bertambah menjadi ada 3 unit pasar dari yang sebelumnya hanya terdapat 1 unit, tetapi pada tahun 2022 hingga 2023 jumlah pasar di Kecamatan Bandar Huluan kembali menjadi 1 unit. Sedangkan di Kecamatan Bandar jumlah pasar sempat berkurang dari 3 unit di tahun 2020 menjadi 1 unit di tahun 2021 dan kemudian di tahun 2022 hingga 2023 jumlah pasar bertambah menjadi 2 unit. Lalu di Kecamatan Hatonduhan yang sebelumnya tidak terdapat jumlah pasar, pada tahun 2023 tersedia 1 unit pasar. Meskipun terjadi fluktuasi dalam penambahan ataupun pengurangan jumlah pasar dari tahun ke tahun, namun jumlah totalnya tetap konsisten dari tahun ke tahun bahkan di tahun 2024 mengalami penambahan dan hal ini menunjukkan pertumbuhan sektor perdagangan dalam sarana dan prasarana penunjang sektor ini.

II.3.6.5. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemandirian desa dalam aspek ekonomi, sosial, dan ekologi yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Desa mandiri merupakan tingkatan tertinggi dalam klasifikasi status perkembangan desa setelah kategori desa maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Peningkatan jumlah desa mandiri mencerminkan capaian positif pembangunan desa, khususnya dalam penguatan kapasitas kelembagaan, pemenuhan standar pelayanan dasar, serta penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Di Kabupaten Simalungun, berdasarkan data pemutakhiran IDM tahun 2024 yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simalungun, jumlah desa mandiri meningkat menjadi 11 desa atau sekitar 1,8% dari total 598 desa dan kelurahan, naik signifikan dari capaian tahun 2023 yang hanya 2 desa atau 0,3%. Perkembangan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan di tingkat lokal, meskipun secara proporsi jumlah desa mandiri masih relatif rendah dibandingkan total wilayah administratif. Kenaikan jumlah desa mandiri ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah dalam memperkuat kemandirian desa secara

berkelanjutan, sekaligus mencerminkan efektivitas program penguatan kelembagaan, peningkatan pelayanan publik desa, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

II.3.6.6. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak

Rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kualitas hidup masyarakat, karena hunian layak tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi terciptanya kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, peningkatan akses terhadap hunian layak mencerminkan upaya pemerintah untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Ketersediaan hunian yang memenuhi standar kelayakan, baik dari aspek fisik bangunan, akses air bersih, sanitasi, maupun keterjangkauan biaya, menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

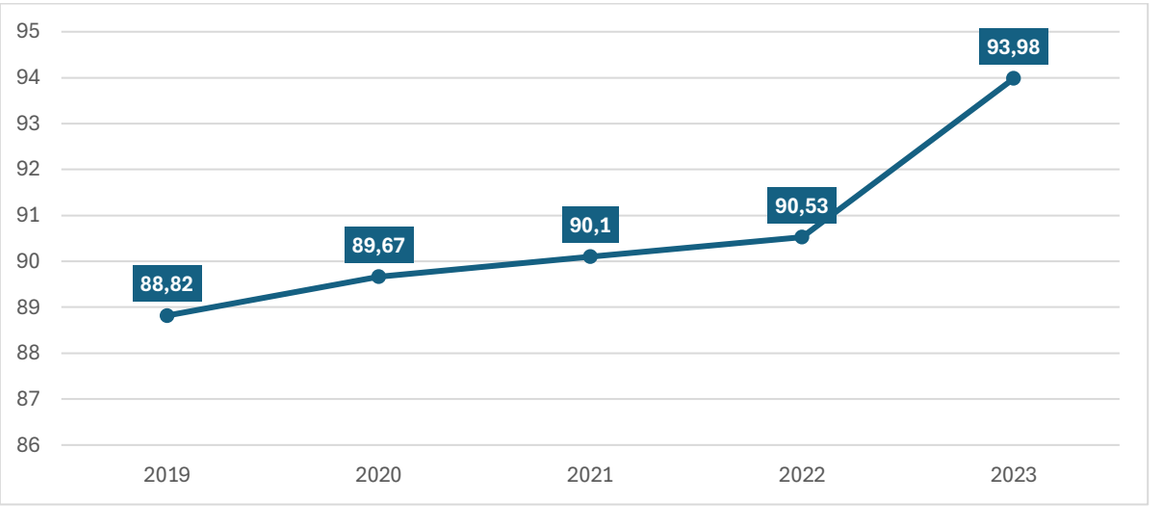

Gambar II.31 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029.

Berdasarkan data KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2025–2029, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam periode 2019–2023. Pada tahun 2019 capaian sebesar 88,82 persen, meningkat menjadi 89,67 persen pada tahun 2020, dan terus naik hingga 90,10 persen di tahun 2021. Meskipun peningkatan pada tahun 2022 relatif moderat dengan capaian 90,53 persen, lonjakan signifikan terlihat pada tahun 2023 dengan capaian mencapai 93,98 persen. Hasil capaian ini didorong oleh beberapa faktor strategis, di antaranya meningkatnya efektivitas program pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni melalui program perumahan subsidi dan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni (BSPS), sebagaimana didukung oleh Kementerian PUPR. Selain itu, peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan

perumahan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi juga berkontribusi pada pencapaian ini. Perbaikan infrastruktur dasar, seperti jaringan listrik, air bersih, serta sanitasi layak turut memperkuat kualitas hunian yang dihuni oleh rumah tangga di Kabupaten Simalungun. Secara keseluruhan, tren peningkatan ini menunjukkan arah positif bagi pencapaian target pembangunan berkelanjutan di sektor perumahan, sekaligus mencerminkan keberhasilan kebijakan daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses hunian layak.

II.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi stabil dalam variabel-variabel makroekonomi, seperti inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan neraca pembayaran, sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menjaga kepercayaan pelaku ekonomi. Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro meliputi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat guna serta pengelolaan risiko eksternal dan internal yang efektif. Dengan demikian, stabilitas ekonomi makro menjadi prasyarat utama dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkesinambungan.

II.3.7.1. Laju Inflasi

Inflasi menduduki peran sentral sebagai salah satu indikator utama yang mencerminkan kondisi serta stabilitas perekonomian suatu wilayah. Inflasi memiliki kapasitas untuk menyebabkan dampak yang signifikan, mulai dari penurunan daya beli uang hingga gangguan dalam keseimbangan sosial-ekonomi. Inflasi, secara substansial, merupakan fenomena kenaikan umum dalam harga barang dan jasa yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Kehadirannya menandakan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Dengan munculnya inflasi, nilai mata uang secara efektif tergerus, menyebabkan konsekuensi ekonomi dan sosial.

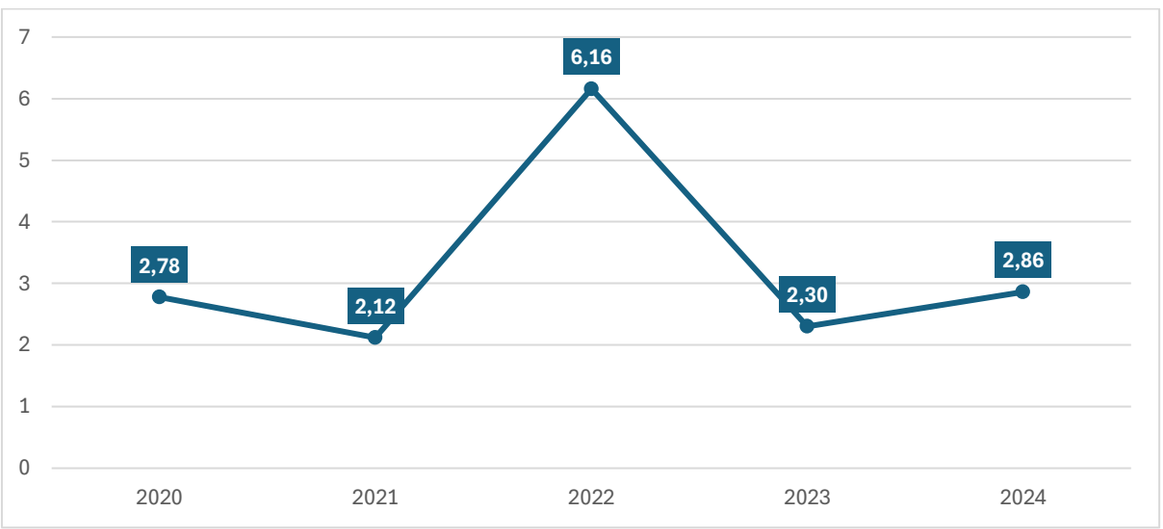

Gambar II.32 Laju Inflasi Kota Pematang Siantar Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Inflasi di Kabupaten Simalungun mengacu pada inflasi di Kota Pematangsiantar. Hal ini disebabkan oleh posisi Pematangsiantar sebagai kota terdekat sekaligus pusat kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Simalungun. Selain itu, Kota Pematangsiantar telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu kota Indeks Harga Konsumen (IHK), sehingga data inflasi resmi tersedia dan dihitung di wilayah tersebut. Pada saat ini belum terdapat penghitungan inflasi secara langsung di Kabupaten Simalungun, maka data inflasi dari Kota Pematangsiantar digunakan sebagai referensi utama. Hal ini didasarkan pada kesamaan pola konsumsi masyarakat, keterkaitan pergerakan harga barang dan jasa, serta interaksi aktivitas ekonomi antara kedua wilayah yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, inflasi di Kota Pematangsiantar dinilai paling representatif untuk menggambarkan kondisi perubahan harga di Kabupaten Simalungun. Adapun laju inflasi di Kota Pematangsiantar sempat mencapai titik tertinggi pada tahun 2022 sebesar 5,51%, diduga akibat peningkatan permintaan dan gangguan rantai pasokan global pasca pandemi. Namun demikian, inflasi tersebut mulai terkendali pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,35%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 ke angka 5,17%.

II.3.7.2. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Indikator ini menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan pajak untuk mendukung pembiayaan pembangunan, sekaligus menunjukkan kontribusi sektor perpajakan terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya fiskal yang berasal dari masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal.

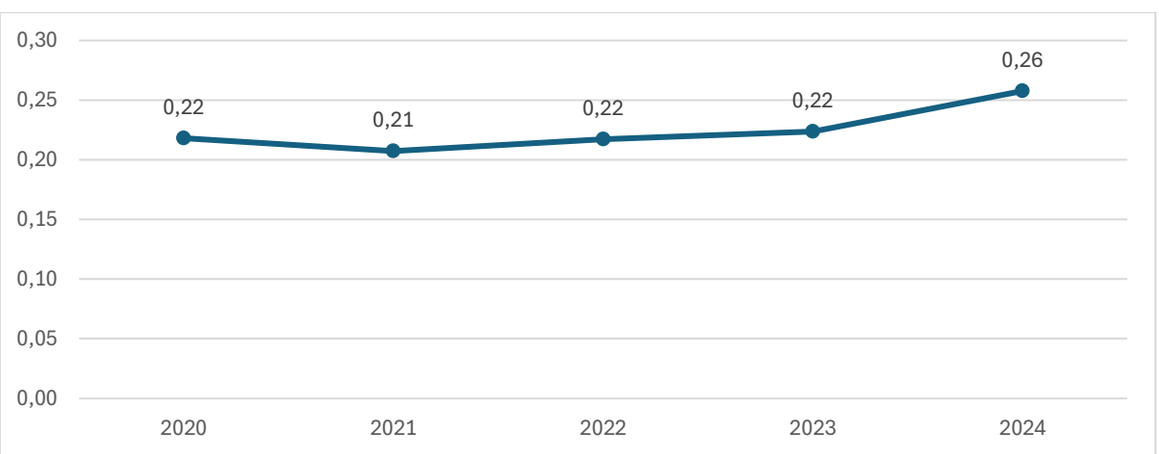

Gambar II.33 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Simalungun selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif fluktuatif namun cenderung meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2020, rasio pajak tercatat sebesar 0,22 kemudian sedikit menurun menjadi 0,21 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, rasio ini kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 0,22, dan pada tahun 2024 melonjak lebih signifikan menjadi 0,26. Perkembangan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap kinerja perekonomian daerah, meskipun pertumbuhannya masih tergolong moderat.

Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan pemerintah daerah, perbaikan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang mendorong transparansi dan kemudahan pembayaran, serta meningkatnya aktivitas ekonomi pascapandemi COVID-19 yang memperluas basis pajak, terutama dari sektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa. Selain itu, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga berkontribusi terhadap kenaikan rasio ini, sejalan dengan berbagai program edukasi dan sosialisasi pajak yang digencarkan pemerintah. Meskipun demikian, capaian ini masih menunjukkan ruang yang besar untuk optimalisasi, mengingat rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Simalungun masih berada di bawah rata-rata nasional yang pada tahun 2023 mencapai sekitar 9,95 persen. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi berkelanjutan dalam memperluas basis pajak, memperkuat kelembagaan pengelola pajak daerah, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Simalungun di masa mendatang.

II.3.7.3. Komposisi Konsumsi Kabupaten Simalungun

Pengeluaran konsumsi dalam hal ini dapat diketahui dari konsumsi komoditas pangan terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi-cumi/kerang, daging telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan kelapa, bahan minuman, bumbu-bumbuan konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi rokok, tembakau, dan sirih.

Tabel II.41 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Seminggu Menurut Kelompok Bahan Makanan (Rupiah) di Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024

Kelompok Konsumsi Makanan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bahan Makanan Lainnya	1.210	1.255	1.484	1.564	2.154	1.607
Mie Instan	894	970	1.180	1.311	1.780	1.390
Kerupuk	263	212	242	220	336	194
Bubur Bayi	41	20	19	13	11	0
Lainnya	12	53	42	20	27	23

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Berdasarkan data konsumsi makanan dari tahun 2019 hingga 2024, perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita per minggu menurut kelompok bahan makanan menunjukkan fluktuasi selama periode 2019 hingga 2024. Pengeluaran tertinggi secara konsisten berasal dari kelompok "Bahan Makanan Lainnya", yang mengalami peningkatan signifikan dari Rp1.210 pada tahun 2019 menjadi puncaknya sebesar Rp2.154 pada tahun 2023, sebelum menurun ke Rp1.607 pada tahun 2024. Kelompok "Mie Instan" juga menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dari Rp894 pada tahun 2019 menjadi Rp1.780 pada tahun 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp1.390. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat preferensi yang meningkat terhadap makanan instan, terjadi pengurangan konsumsi atau perubahan pola belanja pada tahun terakhir. Sementara itu, pengeluaran untuk kelompok "Kerupuk" cenderung fluktuatif. Setelah mengalami penurunan dari Rp263 pada tahun 2019 menjadi Rp220 pada tahun 2022, terjadi lonjakan tajam menjadi Rp336 pada tahun 2023, kemudian kembali menurun ke Rp194 pada tahun 2024. Untuk kelompok "Bubur Bayi", terjadi penurunan konsisten dari Rp41 pada tahun 2019 hingga mencapai titik terendah yaitu Rp0 pada tahun 2024. Hal ini dapat mengindikasikan berkurangnya konsumsi bubur bayi atau pergeseran ke produk lain yang tidak tercatat dalam kategori ini. Kategori "Lainnya" mengalami fluktuasi ringan dengan pengeluaran yang relatif kecil, yakni antara Rp12 hingga Rp53 selama periode enam tahun tersebut.
Secara umum, tren pengeluaran konsumsi bahan makanan di Kabupaten Simalungun mencerminkan dinamika dalam pola konsumsi masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti daya beli, preferensi konsumsi, dan ketersediaan produk di pasar.

Tabel II.42 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Bukan Makanan (Rupiah) di Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024

Rata – Rata Pengeluaran per Kapita	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	572.724	613.148	585.859	647.409	758.906	702.694
Bukan Makanan	423.839	498.507	454.267	431.638	543.703	461.665
TOTAL	996.563	1.111.655	1.040.126	1.079.047	1.302.609	1.164.359

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan data rata-rata pengeluaran per kapita dari tahun 2019 hingga 2023, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Simalungun menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, total pengeluaran per kapita sebesar Rp996.563 dan meningkat secara signifikan menjadi Rp1.164.359 pada tahun 2024. Pengeluaran untuk kelompok makanan mengalami peningkatan dari Rp572.724 pada tahun 2019 menjadi puncaknya sebesar Rp758.906 pada tahun 2023, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi Rp702.694 pada tahun

2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan konsumsi atau kenaikan harga komoditas makanan pada awal periode, namun kemungkinan terdapat perubahan pola konsumsi atau stabilisasi harga pada akhir periode. Sementara itu, kelompok bukan makanan juga menunjukkan fluktuasi, dengan pengeluaran yang meningkat dari Rp423.839 pada tahun 2019 menjadi Rp543.703 pada tahun 2023, namun menurun ke Rp461.665 pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya efisiensi belanja rumah tangga terhadap barang dan jasa non-makanan, atau akibat tekanan ekonomi yang menyebabkan pengurangan konsumsi pada kelompok ini. Peningkatan pengeluaran rumah tangga, khususnya pada kelompok makanan, dapat mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa makanan di daerah. Namun, penurunan pengeluaran pada tahun 2024 mengisyaratkan perlunya penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga dan diversifikasi sumber pendapatan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

II.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyediaan fasilitas publik menjadi fondasi dalam mendukung pencapaian pertumbuhan dan pembangunan daerah.

II.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dibutuhkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Regulasi yang berintegritas tidak hanya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif serta pelayanan publik yang berkualitas. Sementara itu, tata kelola pemerintahan yang adaptif diperlukan untuk mampu merespons berbagai tantangan dan peluang pembangunan dengan tepat, fleksibel, dan berbasis data. Berdasarkan Surat Keputusan Ombudsman RI Nomor 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Simalungun mendapatkan peringkat ke-58 dari 415 pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. Lalu menurut Keputusan Menteri Pendataan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Nomor 795 Tahun 2023 tentang hasil Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemda tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Simalungun mendapatkan peringkat 148 dari 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa Unit Pelayanan di Kabupaten Simalungun mulai melakukan pembenahan dan fokus dalam peningkatan pelayanan terhadap

masyarakat. Tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 103 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022 menunjukkan bahwa Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Simalungun mencapai nilai 1,77 dan mendapatkan predikat "Kurang" dan pada tahun 2023 indeks SPBE Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 2,32. Hal ini berarti menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun telah berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi terutama dalam digitalisasi elektronik untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada publik. Selain itu, terdapat Indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi alat ukur untuk menilai sejauh mana proses reformasi birokrasi di suatu instansi pemerintah atau lembaga publik telah dilaksanakan dan sejauh mana sistem birokrasi tersebut berhasil beradaptasi dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan perkembangan signifikan, dari nilai "C" pada tahun 2021 hingga 2023, kemudian menjadi "B" pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem dan manajemen birokrasi daerah.

Tabel II.43 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks SPBE dan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	NA	C (40,47)	C (45,58)	C (45,71)	B (62,29)
Indeks SPBE	Indeks	1,31	NA	1,77	2,32	2,37
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	NA	2,40	2,63	3,78	4,11

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2023; Satudata PANRB, 2023; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025; Bapperida Kabupaten Simalungun, 2025.

Selain indeks SPBE, terdapat Indeks Pelayanan Publik yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 2,63 menjadi 3,78 di tahun 2023. Pada tahun 2024, indeks pelayanan publik kembali mengalami penigkatan menjadi 4,11 dan mendapat predikat "sangat baik". Peningkatan indeks pelayanan publik menggambarkan bahwa respon yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun kepada masyarakat Kabupaten Simalungun melalui pelayanan publik menunjukkan adanya perbaikan. Pelayanan publik yang meningkat menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat karena pelayanan yang diberikan membuat masyarakat Kabupaten Simalungun merasakan hasil yang baik.

II.4.1.1. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal pencegahan korupsi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Indeks ini disusun untuk menilai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap praktik integritas di lingkungan instansi pemerintah, serta menggambarkan sejauh mana tata kelola pemerintahan dijalankan secara bersih, efektif, dan responsif. Pentingnya pemantauan terhadap indeks ini terletak pada perannya sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan praktik maladministrasi.

II.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Penegakan hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, serta demokrasi substansial merupakan pilar utama dalam mewujudkan negara yang stabil, adil, dan sejahtera. Hukum berkeadilan menjamin perlindungan hak dan kewajiban setiap warga negara secara merata tanpa diskriminasi, sementara keamanan nasional yang kuat memastikan keberlangsungan ketertiban dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman. Demokrasi substansial menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dan menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang harmonis.

II.4.2.1. Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan indikator yang mengukur sejauh mana peraturan daerah yang telah ditetapkan mampu dilaksanakan secara efektif serta dipatuhi oleh masyarakat dan aparatur pemerintah. Indikator ini mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat. Tingginya persentase penegakan perda menunjukkan tata kelola pemerintahan yang responsif, tertib, dan akuntabel dalam menegakkan norma hukum di daerah.

II.4.2.2. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen pengukuran untuk menilai perkembangan kehidupan demokrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. IDI disusun berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan

lembaga demokrasi. Nilai indeks ini memberikan gambaran sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan, dan akuntabilitas politik dijalankan. Evaluasi terhadap IDI menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan inklusif di daerah.

II.4.2.3. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap tingkat keamanan di suatu wilayah, baik dari ancaman kejahatan maupun potensi gangguan sosial lainnya. Indeks ini mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa terlindungi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal keselamatan pribadi, keamanan lingkungan, dan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa aman dan nyaman, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap stabilitas sosial, produktivitas ekonomi, serta iklim investasi daerah. Sebaliknya, nilai yang rendah dapat menjadi indikator adanya tantangan dalam sistem keamanan dan perlindungan warga, yang perlu direspons melalui kebijakan keamanan dan ketertiban yang lebih inklusif dan berbasis masyarakat.

II.4.2.4. Persentase Aksi HAM

Persentase aksi HAM menunjukkan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam mendukung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Indikator ini mencakup berbagai aspek, seperti penyuluhan HAM, fasilitasi layanan kelompok rentan, penyusunan rencana aksi HAM, serta partisipasi dalam program nasional dan daerah terkait HAM. Persentase ini menjadi refleksi atas komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, mendorong keadilan sosial, dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

II.4.2.5. Keamanan dan Ketertiban

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, faktor keamanan dan ketertiban adalah hal yang penting. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, Kabupaten Simalungun telah diperkuat oleh aparat kemanan yang terdiri dari aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparat Kepolisian (POLRI), dan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Kerjasama yang berkesinambungan oleh instansi yang berwenang tersebut terus dilakukan, tetapi tingkat kriminalitas yang ditunjukkan oleh jumlah kasus yang dilaporkan dan diselesaikan masih menunjukkan banyak kasus yang terjadi di masyarakat.

Tabel II.44 Banyaknya Perkara Pidana Biasa yang Diterima dan Diselesaikan Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sisa Bulan Lalu	1.300	NA	NA	NA	NA	700
Diterima	640	556	449	330	330	452
Diselesaikan	714	608	457	334	334	430
Belum Selesai	1226	NA	NA	NA	NA	722

Sumber: Simalungun Dalam Angka Tahun 2020-2025

Dari data jumlah perkara pidana yang diterima dan diselesaikan di Kabupaten Simalungun selama periode 2019 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah kasus yang dilaporkan dan diselesaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, terdapat 640 (enam ratus empat puluh) kasus yang diterima serta terdapat 1.300 (seribu tiga ratus) kasus dari total sisa kasus bulan lalu dan berhasil diselesaikan sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas) kasus. Jumlah kasus yang diterima dan diselesaikan dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami penurunan dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 452 (empat ratus lima puluh dua) yang diterima dan sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) diselesaikan.

II.4.2.6. Angka Kriminalitas

Salah satu faktor penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kriminalitas. Kriminalitas sering kali menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan, sementara tingkat kriminalitas juga dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan timbal balik antara kesejahteraan dan kriminalitas. Tingkat kriminalitas yang tinggi dapat mengancam stabilitas keamanan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan kriminalitas dengan melibatkan berbagai pihak dan lembaga sosial di masyarakat.

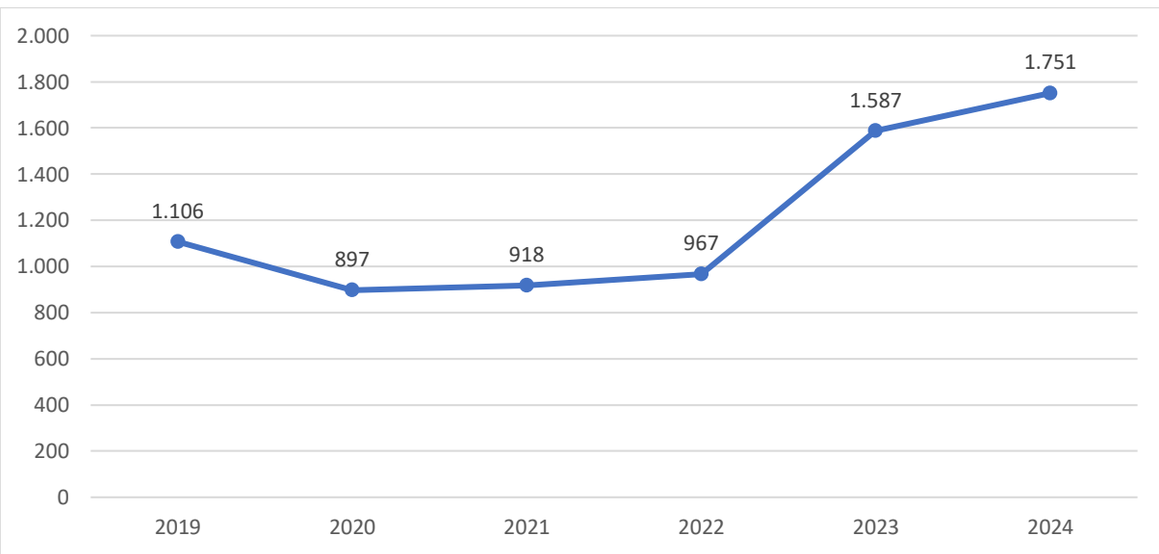

Gambar II.34 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Simalungun diselesaikan Tahun 2019 – 2024

Sumber : Kabupaten Simalungun Dalam Angka, 2021-2025.

Angka kriminalitas di Kabupaten Simalungun mengalami fluktuasi sepanjang periode 2019-2024, hal tersebut dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas masyarakat selama masa pandemi. Pada tahun 2019-2020, jumlah kejahatan yang dilaporkan turun dari 1.106 kasus menjadi 897 kasus. Pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat pada 2021-2022 mengakibatkan jumlah kasus yang dilaporkan mengalami peningkatan masing-masing 918 kasus dan 967 kasus. Pada tahun 2023, dimana mobilitas masyarakat telah berjalan normal lonjakan kasus meningkat menjadi 1.587 kasus dan terus meningkat pada tahun 2024 hingga 1.751 kasus. Peningkatan jumlah kejahatan yang dilaporkan dapat mengindikasikan adanya tekanan sosial-ekonomi di masyarakat, ketimpangan distribusi kesejahteraan maupun lemahnya sistem penegakan hukum. Namun, dari banyaknya kasus yang dilaporkan juga menjadi indikasi semakin sadarnya masyarakat Kabupaten Simalungun untuk melaporkan tindak kejahatan yang terjadi.

II.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang berdaya gentar di kawasan merupakan komponen strategis dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus memperkuat posisi daerah. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang berdaya gentar di kawasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fisik pertahanan maupun strategi hubungan antarwilayah, tetapi juga tercermin dari kondisi daya saing suatu daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana ketangguhan tersebut terbentuk. Nilai IDSD mencerminkan kapasitas daerah dalam membangun stabilitas ekonomi, kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas tata kelola pemerintahan yang berdaya saing tinggi. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin kuat pula posisi daerah dalam menghadapi tantangan eksternal, menjaga kedaulatan ekonomi, dan memperluas jejaring kerjasama antarwilayah maupun antarnegara di kawasan. Dengan demikian, IDSD tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja pembangunan daerah, tetapi juga sebagai cerminan ketahanan diplomasi dan pertahanan daerah yang adaptif dan responsif terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi regional.

Tabel II.45 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	NA	NA	2,84	3,09	3,38

Sumber : BRIN, 2025.

Indeks daya saing daerah Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan dari sebesar 2,84 pada tahun 2022 mejadi sebesar 3,38 di tahun 2024. Adanya peningkatan

pada indeks daya saing daerah di Kabupaten Simalungun menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun mempunyai daya saing ekonomi yang semakin tinggi. Sehingga dengan semakin membaiknya indeks daya saing daerah di Kabupaten Simalungun dapat membuat investor merasas tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Simalungun. Secara keseluruhan, pencapaian Kabupaten Simalungun menunjukkan arah pertumbuhan yang positif, meskipun masih perlu didorong lebih kuat agar mampu mengejar dan melampaui capaian kabupaten tetangga yang memiliki daya saing lebih tinggi. Hal ini dapat dicapai melalui strategi peningkatan kualitas layanan publik, digitalisasi pemerintahan, peningkatan investasi daerah, serta penguatan sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal.

II.4.4. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh komponen dan potensi bangsa dengan berlandaskan asas keseimbangan, pemerataan, pertumbuhan antar wilayah, kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunikasi dan interaksi lintas pelaku secara terbuka dan demokratis, manajemen publik yang efektif dan efisien, serta didukung dengan instrumen pengelolaan tata ruang, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah merupakan salah satu agenda pembangunan yang integral dengan upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, meningkatkan kehidupan demokrasi, mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik dan bersih, mempercepat kemajuan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya masyarakat.

II.4.4.1. Kinerja RPJMD Tahun 2022 – 2026

Hasil kinerja dari RPJMD Kabupaten Simalungun dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi terhadap kebijakan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2022-2026. Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan melalui hasil penyusunan dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Kabupaten Simalungun telah melaksanakan pembangunan selama tiga periode tahunan, yaitu pada tahun 2021 sebagai periode transisi, dan dilanjutkan pada tahun 2022 dan 2023.
2. Dalam mengimplementasikan RPJMD, kebijakan pada perencanaan turunannya wajib menjadikan RPJMD sebagai acuan, baik dalam Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seluruh program pembangunan yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah telah mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan.

3. Selama periode pembangunan tahunan dari tahun 2022 hingga 2023, capaian rata-rata hasil evaluasi IKU Kabupaten Simalungun menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2022, capaian IKU mencapai 90,87 dengan kategori "Baik." Pada tahun 2023, capaian IKU meningkat signifikan menjadi 96,19 dengan kategori "Sangat Baik." Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Simalungun berupaya untuk dapat terus memenuhi serta meningkatkan kinerja agar dapat mencapai sesuai target ataupun melebihi target.

Tabel II.46 Penetapan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Simalungun Tahun 2022 - 2026

No	Indikator	Kondisi Awal	Target					Realisasi			Persentase Capaian		
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	1,01	2,34	3,01	3,67	4,34	4,48	4,68	5,07	4,89	100,00%	100,00%	100,00%
2	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,86	1	1,5	2	2,5	2,8	0,79	0,77	0,78	79,00%	51,33%	39,00%
3	LPE Kategori Industri Pengolahan	-2,85	0,5	1,5	2,5	3,5	2,4	2,01	3,07	1,82	100,00%	100,00%	72,80%
4	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,01	3,52	4,28	4,68	4,88	5,2	4,02	5,74	5,26	100,00%	100,00%	100,00%
5	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	NA	3,2	4,2	4,8	5,4	5,8	37,99	84,29	14,54	100,00%	100,00%	100,00%
6	Tingkat Kemiskinan	8,46	7,97	7,73	7,49	7,24	7	8,26	7,87	7,72	96,49%	98,22%	97,02%
7	Indeks Gini	0,295	0,28	0,275	0,27	0,265	0,26	0,262	0,295	0,257	100,00%	93,22%	100,00%
8	Pendapatan Per Kapita	45,25	49,69	51,8	53,9	56,01	58,11	49,69	50,42	58,9	100,00%	97,34%	100,00%
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,58	4,39	4,29	4,19	4,1	4	5,51	5,32	5,17	79,67%	80,64%	81,04%
10	Indeks Pembangunan Manusia	73,25	74,26	74,72	75,18	75,64	76,09	73,77	75,17	75,88	99,34%	100,00%	100,00%
11	Indeks Kesehatan	78,8	79,46	79,78	80,11	80,44	80,76	71,78	65,83	79,85	90,33%	82,51%	99,68%
12	Indeks Pendidikan	67,5	68,79	69,48	70,17	70,87	71,56	NA	93	93	NA	100,00%	100,00%
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,02	93,05	93,07	93,08	93,1	93,15	93,16	93,09	93,41	100,00%	100,00%	100,00%
14	Indeks Pembangunan Pemuda	50	52,5	55	60	62,5	67	52,5	52,5	49,55	100,00%	95,45%	82,58%
15	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	CC 56,67	CC 59,17	B 61,67	B 64,67	B 66,67	C 45,58	C 45,71	B 62,29	100,00	77,25%	100,00%
16	Nilai Akuntabiltas Kinerja (SAKIP)	C 40,07	C 45	CC 55	B 60	B 64	B 70	C 48,64	C 50,02	CC 52,12	92,52%	90,95%	86,87%
17	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	90,00%	100,00%	100,00%
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	65	67,5	70	72,5	75	56,702	NA	NA	87,23%	NA	NA
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	65	66	67	68,5	70	85,4	88,43	85,17	100,00%	100,00%	100,00%
20	Indesk Inovasi Daerah	0,08	20,22	25,23	30,1	30,5	30,9	11,7	42,3	41,49	57,86%	100,00%	100,00%

No	Indikator	Kondisi Awal	Target					Realisasi			Persentase Capaian		
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
			(Kurang Inovatif)	(Kurang Inovatif)	(Inovatif)	(Inovatif)	(Inovatif)	(Kurang Inovatif)	(Inovatif)	(Inovatif)			
21	Indeks Infrastruktur	21,47	22,18	22,3	22,47	22,87	22,94	35,82	40,88	41,17	100,00%	100,00%	100,00%
22	Indeks Resiko Berencana	73,59	73,5	73	72,5	72	71,5	80,07	80,07	80,07	91,79%	91,17%	90,55%
Rata-Rata Capaian											89,28%	89,00%	88,62%

Sumber : Bapperida Kabupaten Simalungun, 2025.

Berdasarkan data Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Simalungun, selama tahun 2022 hingga 2024 terdapat beberapa indikator yang tidak tersedia datanya (NA) yaitu indeks pendidikan dan indeks pengelolaan keuangan daerah. Lalu terdapat indikator yang mengalami peningkatan signifikan seperti indeks reformasi birokrasi pada tahun 2023 mencapai 77,25% dan meningkat jadi 100% di tahun 2024. Selain itu, terdapat pula indikator yang selama tahun 2022 hingga 2024 konsisten mendapat capaian 100% yaitu laju pertumbuhan ekonomi, Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, persentase Peningkatan Investasi Daerah, indeks pembangunan gender, indeks kepuasan masyarakat, dan indeks infrastruktur. Peningkatan indikator-indikator ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Simalungun.

Tabel II.47 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 – 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Target					Realisasi			Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024	Predikat Capaian 2022	Predikat Capaian 2023	Predikat Capaian 2024
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024						
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar																
a) Pendidikan											97,68%	98,35%	100,00%	ST	ST	ST
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	61,2	64,65	67,1	80,55	84	58,32	69,4	70,1 (TW III)	95,29%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94,9	91,98	94,65	97,33	100	110,34	99,35	99,36 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalampendidikan menengah pertama	%	87,35	89,26	91,17	93,09	95	83,37	83,37	100,09 (TW III)	95,44%	93,40%	100,00%	ST	ST	ST
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikandasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	4,91	6,19	7,47	8,73	10	32,32	35,31	100 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
b) Kesehatan											53,03%	72,61%	32,79%	R	S	SR
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,64	0,06	0,06 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	26,6	80,31	18,54 (TW III)	26,60%	80,31%	18,54%	SR	T	SR
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	29	82,46	16,72 (TW III)	29,00%	82,46%	16,72%	SR	T	SR

No	IKK Outcome	Satuan	Target					Realisasi			Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024	Predikat Capaian 2022	Predikat Capaian 2023	Predikat Capaian 2024
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024						
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkanpelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	31	86,59	19,13 (TW III)	31,00%	86,59%	19,13%	SR	T	SR
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	85	90	100	100	100	15,8	84,47	16,16 (TW III)	18,59%	93,86%	16,16%	SR	ST	SR
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yangmendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	3,81	5,36	100	100	100	40,1	32,08	0,00 (TW III)	100,00%	100,00%	0,00%	ST	ST	SR
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	80	85	100	100	100	42,54	25,36	5,32 (RW III)	53,18%	29,84%	5,32%	R	SR	SR
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatansesuai standar	%	80	85	100	100	100	15,24	78,07	34,61 (TW III)	19,05%	91,85%	34,61%	SR	ST	SR
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai satndar	%	100	100	100	100	100	66	8,37	1,85 (RW III)	66,00%	8,37%	1,85%	S	SR	SR
11	Persentase penderita DM yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	58	21,99	14,19 (RW III)	58,00%	21,99%	14,19%	R	SR	SR
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	33	64,53	57,77 (RW III)	33,00%	64,53%	57,77%	SR	R	R
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	19	98,75	45,90 (TW III)	19,00%	98,75%	45,90%	SR	ST	SR
I4	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	89	57,96	28,82 (RW III)	89,00%	57,96%	28,82%	T	R	SR

No	IKK Outcome	Satuan	Target					Realisasi			Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024	Predikat Capaian 2022	Predikat Capaian 2023	Predikat Capaian 2024
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024						
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											89,11%	82,56%	80,88%	T	T	T
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	5,18	6,39	7,59	8,8	10	18,04	14,21	81,34	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	91,23	93,42	95,61	97,81	100	87,11	38,73	39,28	95,48%	41,46%	41,08%	ST	SR	SR
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	50,52	52,89	55,26	57,63	60	45,82	45,22	45,52	90,70%	85,50%	82,37%	T	T	T
4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	50	100	100,00	50,00%	100,00%	100,00%	SR	ST	ST
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	45,67	49,26	52,84	56,42	60	40,22	48,88	50,86	88,07%	99,23%	96,25%	T	ST	ST
6	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yangmemiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	65	46,43	100,00%	65,00%	46,43%	ST	R	SR
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
d) Perumahan Rakyat											36,79%	15,28%	25,86%	SR	SR	SR
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak hunibagi korban bencana kabupaten / kota	%	70,14	72,61	75,07	77,54	80	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	SR	SR	SR
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	%	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-

No	IKK Outcome	Satuan	Target					Realisasi			Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024	Predikat Capaian 2022	Predikat Capaian 2023	Predikat Capaian 2024
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024						
	pemerintah kabupaten/kota															
3	Persentasekawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0,05	1	2	3	4	0	0,01	0,067	0,00%	1,00%	3,45%	SR	SR	SR
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	5,43	6,57	7,71	8,86	10	2,56	3,95	0,024	47,15%	60,12%	1%	SR	R	ST
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU(Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	1	2	3	4	5	77	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	ST	SR	SR
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											74,07%	79,39%	68,64%	S	T	S
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	64	56	40 (TW III)	64,00%	56,00%	40,00%	R	R	SR
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	76	77	78	79	80	50	80	30 (TW III)	65,79%	100,00%	38,46%	R	ST	SR
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	80	100	100	100	100	5000	5000	5000	100,00%	100,00%	100,00%	SR	T	ST
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	75	100	100	100	100	5000	5000	2075	92,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	100	100	100	100	100	1000	1000	358	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	85	100,00%	100,00%	85,00%	ST	ST	T
7	Waktu tanggap (*response time*)penanganan kebakaran	menit	60	80	100	100	100	30	15	30	50%	18,75%	30,00%	S	SR	SR

No	IKK Outcome	Satuan	Target					Realisasi			Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024	Predikat Capaian 2022	Predikat Capaian 2023	Predikat Capaian 2024
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024						
f) Sosial											100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 9Indikator SPM)	%	1,95	2,71	3,47	4,24	5	13,84	100	83 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	32,85	37,14	41,42	45,71	50	40,5	100	59,8 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar																
a) Tenaga Kerja											90,20%	80,00%	77,29%	T	T	T
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	1	2	3	4	5	4	57,14	2,593 (TW III)	100,00%	100,00%	86,43%	ST	ST	T
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,88	3,41	3,94	4,47	5	8	29,66	100 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	66,93	68,95	70,96	72,98	75	70	0	0 (TW III)	100,00%	0,00%	0,00%	ST	SR	SR
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	78,4	80,05	81,7	83,35	85	40	81,78	82 (TW III)	51,02%	100,00%	100,00%	R	ST	ST
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanis melayanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	51,08	53,31	55,54	57,77	60	70,14	79	177,9 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST

No	IKK Outcome	Satuan	Target					Realisasi			Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024	Predikat Capaian 2022	Predikat Capaian 2023	Predikat Capaian 2024
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024						
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											62,71%	50,08%	73,86%	R	SR	S
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	98,4	98,42	98,6	98,64	98,72	50	0,29	0 (TW III)	50,81%	0,29%	0,00%	SR	SR	SR
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	0,014	0,03	100 (TW III)	0,01%	0,03%	100,00%	SR	SR	ST
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	5,68	28,29	28,17 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
4	Jumlah Indikator KLA dan LPE	-	500	530	550	600	630	528,8	578,35	525,02 (TW III)	100,00%	100,00%	95,46%	ST	ST	ST
c) Pangan											58,46%	100,00%	100,00%	R	ST	ST
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	100	100	100	100	100	58,46	651,2	100 (TW III)	58,46%	100,00%	100,00%	R	ST	ST
d) Pertanahan											100,00%	100,00%	80,00%	ST	ST	T
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	8	9	10	11	12	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	SR
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	-	-	-	-	-	100	86	N/A				#N/A	#N/A	#N/A
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Hektar	210	210	210	210	210	100	100	N/A	47,62%	47,62%	N/A	ST	ST	ST
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah	km	13,11	39,35	59,03	98,38	124,61	3200	1000	2100	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST

No	IKK Outcome	Satuan	Target					Realisasi			Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024	Predikat Capaian 2022	Predikat Capaian 2023	Predikat Capaian 2024
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024						
	Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee															
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	km	16,36	29,46	42,55	55,64	62,19	3500	9289	6300	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	10,86%	21,73%	32,60%	65,21%	76,08%	100	50	56,52	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
e) Lingkungan Hidup											98,91%	70,30%	98,02%	ST	S	ST
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	67,19	69,15	71,1	73,05	75	65	56,72	66,87	96,74%	82,02%	94,05%	ST	T	ST
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	4,5	5,88	7,25	8,63	10	80	25,11	26,07	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	40,43	42,82	45,21	47,61	50	100	12,37	47,82	100,00%	28,89%	100,00%	ST	SR	ST
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											71,83%	64,64%	45,61%	S	R	SR
1	Perekaman KTP elektronik	%	97	97	98	98	99	96,88	98,5	85,18 (TW III)	99,88%	100,00%	86,92%	ST	ST	T
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	%	50	65	70	75	80	4,22	16,4	16,73 (TW III)	8,44%	25,23%	23,90%	SR	SR	SR
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	98	99	99	99	100	97,01	99,63	41,21 (TW III)	98,99%	100,00%	41,63%	ST	ST	SR
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan datakependudukan berdasarkan janjian kerjasama	OPD	10	15	20	25	30	8	5	6 (TW III)	80,00%	33,33%	30,00%	T	SR	SR

No	IKK Outcome	Satuan	Target					Realisasi			Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024	Predikat Capaian 2022	Predikat Capaian 2023	Predikat Capaian 2024
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024						
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	13,6	17,15	23	31,6364	38,8889	17,88	24,75	46,5 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	%	6,47	6,71	7,54	7,76	7,71	14,95	21,04	33,33 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana											90,44%	98,55%	78,50%	T	ST	T
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	angka	3	2,99	2,98	2,97	2,96	2,14	2,86	2,08 (TW III)	71,33%	95,65%	69,80%	S	ST	S
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive PrevalenceRate/mCPR)	%	33,57	35,18	36,79	38,39	40	79,1	56,84	24,17 (TW III)	100,00%	100,00%	65,70%	ST	ST	R
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12	11,85	12	11,55	11	12,69	22,66	12 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
h) perhubungan											67,08%	80,00%	99,35%	S	T	ST
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	%	77,92	78,44	78,96	79,84	80	50	79	94,62	64,17%	100,00%	100,00%	R	ST	ST
2.	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100	70	60	99	70,00%	60,00%	99%	S	R	ST
j) Komunikasi dan Informatika											62,22%	70,74%	84,15%	R	S	T
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	35,89	38,17	40,45	42,72	45	10,45	10	21,21	29,11%	26,20%	52,44%	SR	T	R
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	R	SR	ST

No	IKK Outcome	Satuan	Target					Realisasi			Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024	Predikat Capaian 2022	Predikat Capaian 2023	Predikat Capaian 2024
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024						
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	1	1,5	2	2,5	3	1,57	1,50	2,85	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											100,00%	100,00%	25,95%	ST	ST	SR
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	1	1,5	2	2,5	3	70	13,14	1 (TW III)	100,00%	100,00%	50,00%	ST	ST	SR
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	17,23	19,17	21,11	23,06	25	50	20,84	0,4 (TW III)	100,00%	100,00%	1,89%	ST	ST	SR
l) Penanaman Modal											100,00%	100,00%	15,38%	ST	ST	SR
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten / kota	%	5,5	6,1	6,5	7,1	7,5	40	84,29	1 (TW III)	100,00%	100,00%	15,38%	ST	ST	SR
m) Kepemudaan dan Olahraga											20,31%	34,99%	61,18%	SR	SR	R
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatanekonomi mandiri	%	22,54	22,83	23,2	23,42	23,45	4,26	0,81	11,75 (TW III)	18,90%	3,55%	50,65%	SR	SR	SR
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosialkemasyarakatan	%	67,23	68,45	71,45	72,25	73,25	0,237	0,97	23,5 (TW III)	0,35%	1,42%	32,89%	SR	SR	SR
3	Peningkatan prestasi olahraga	medali	12	14	16	18	20	5	40	16 (TW III)	41,67%	100,00%	100,00%	SR	ST	ST
n) Statistik											100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST

No	IKK Outcome	Satuan	Target					Realisasi			Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024	Predikat Capaian 2022	Predikat Capaian 2023	Predikat Capaian 2024
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
o) Persandian											100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
p) Kebudayaan											65,00%	12,96%	23,68%	R	SR	SR
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	100	20,37	20,37	23,68	20,37%	20,37%	23,68%	R	SR	SR
q) Perpustakaan											50,87%	84,20%	100,00%	SR	T	ST
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	15	25	35	45	55	6	22,64	35 (TW III)	40,00%	90,56%	100,00%	SR	T	ST
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	15	25	35	45	55	9,26	19,46	35 (TW III)	61,73%	77,84%	100,00%	R	T	ST
r) Kearsipan											75,96%	59,44%	76,84%	S	R	T
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	29,33	32	34,67	37,33	40	40	32	24 (TW III)	100,00%	100,00%	69,22%	ST	ST	S

No	IKK Outcome	Satuan	Target					Realisasi			Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024	Predikat Capaian 2022	Predikat Capaian 2023	Predikat Capaian 2024
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024						
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	86,67	90	93,33	96,67	100	45	17	78,83 (TW III)	51,92%	18,89%	84,46%	R	SR	T
Urusan Pilihan																
a) Kelautan dan Perikanan											10,53%	24,82%	88,89%	SR	SR	T
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	kilo	760.000	765.000	765.000	770.000	780.000	80.000	189.900	680.000 (TW III)	10,53%	24,82%	88,89%	SR	SR	T
b) Pariwisata											95,00%	66,82%	-65,14%	ST	S	SR
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	5	10	10	20	25	23	10,73	-27,95	100,00%	100%	--279,5%	ST	SR	SR
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	5	10	10	20	25	30,20	26,01	12,31	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
3	Tingkat hunian akomodasi	%	40	45	45	50	50	42,05	10,47	28,71	100,00%	48,60%	63,80%	ST	SR	R
4	Kontribusi sektor pariwisata Lerhadap PDRBharga berlaku	%	1	1	1	1	1	0,76	0,77	0,78	76,00%	77,00%	78,00%	ST	T	T
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	4	5	5	6	6	7,23	8,72	7,90	100,00%	100,00%	100,00%	S	ST	ST
c) Pertanian											53,50%	100,00%	50,00%	R	ST	SR
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5,2	5,25	5,25	5,3	5,4	9	5,48	5,4 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlahkasus penyakit hewan menular	%	50	75	75	100	150	3,5	79,83	0 (TW III)	7,00%	100,00%	0,00%	SR	ST	SR

No	IKK Outcome	Satuan	Target					Realisasi			Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024	Predikat Capaian 2022	Predikat Capaian 2023	Predikat Capaian 2024
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024						
d) Kehutanan														SR	SR	SR
e) Energi dan Sumber Daya Mineral														SR	SR	SR
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panasbumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	-	-	-	-	-	0	0	NA				#N/A	#N/A	#N/A
f) Perdagangan											97,38%	97,81%	47,74%	ST	ST	SR
1	Persentase pelaku usaha yang memperolehizin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	-	25	30	30	35	45	32,56	36,94	13,42 (TW III)	100,00%	100,00%	44,73%	ST	ST	SR
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100	100	100	100	100	92,15	93,43	40,49 (TW III)	92,15%	93,43%	40,49%	ST	ST	SR
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	40	30	30	40	40	120	186,36	17,4 (TW III)	100,00%	100,00%	58,00%	ST	ST	R
f) Perindustrian											91,50%	100,00%		ST	ST	SR
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	5,12	6,34	6,34	7,56	10	20	85,84	NA (TW III)	100,00%	100,00%		ST	ST	#N/A
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunanindustri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	15	16	16	17	16	-	NA	NA (TW III)				#N/A	#N/A	#N/A
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri	%	15	16	16	18	18	24,7	29,86	NA (TW III)	100,00%	100,00%		ST	ST	#N/A

No	IKK Outcome	Satuan	Target					Realisasi			Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024	Predikat Capaian 2022	Predikat Capaian 2023	Predikat Capaian 2024
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024						
	Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait															
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengahyang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	15	16	16	18	18	24,7	29,86	NA (TW III)	100,00%	100,00%		ST	ST	#N/A
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin PerluasanKawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	15	16	16	18	18	24,7	29,86	NA (TW III)	100,00%	100,00%		ST	ST	#N/A
6	Tersedianya informasi industri secara lengkapdan terkini	%	40	40	40	40	40	23	50	NA (TW III)	57,50%	100,00%		R	ST	#N/A
h) Transmigrasi														SR	SR	SR
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan																
a) Perencanaan dan Keuangan											98,33%	91,67%	84,30%	ST	ST	T
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenagakesehatan	%	11,17	11,5	11,84	12,17	12,5	35,43	95,52	9,16 (TW III)	100,00%	100,00%	77,36%	ST	ST	T
2	Rasio PAD	%	8,58	8,93	9,29	9,64	10	43,53	90,8	8,18 (TW III)	100,00%	100,00%	88,05%	ST	ST	T
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	level 2	level 2	NA (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	level 2	level 1	Level 3	100,00%	50,00%	100,00%	ST	SR	ST
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan	%	69,71	69,78	69,85	69,93	70	70,16	75,58	63,12 (TW III)	100,00%	100,00%	90,37%	ST	ST	T

No	IKK Outcome	Satuan	Target					Realisasi			Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024	Predikat Capaian 2022	Predikat Capaian 2023	Predikat Capaian 2024
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024						
	Umum(dikurangi transfer expenditures)															
6	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	90,00%	100,00%	100,00%	T	ST	ST
b) Pengadaan											66,67%	62,16%	76,50%	S	R	T
1	Persentase jumlah total proyek konstruksiyang dibawa ketahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	45	44	43	42	41	0	0	43 (TW III)	0,00%	0,00%	100,00%	SR	SR	ST
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukanclengan metode kompetitif	%	3,86	4,14	4,43	4,71	5	60	13,36	2,43 (TW III)	100,00%	100,00%	54,85%	ST	ST	R
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	52,86	54,64	56,43	58,21	60	60	47,25	42,13 (TW III)	100,00%	86,48%	74,66%	ST	T	S
c) Kepegawaian											35,07%	65,01%	91,05%	SR	R	ST
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	171,69	178,77	185,84	192,92	200	50,77	174	135,93 (TW III)	29,57%	97,33%	73,14%	SR	ST	S
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidaktermasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	14,62	15,01	15,61	15,61	16,2	4,88	9,47	48,86 (TW III)	33,38%	63,09%	100,00%	SR	R	ST
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	12,23	14,94	19,02	20,38	25,81	5,17	5,17	37,36 (TW III)	42,27%	34,61%	100,00%	SR	SR	ST
d) Manajemen Keuangan											67,67%	54,06%	87,67%	S	R	T
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja totaldalani APBD	%	100	100	100	100	100	27,34	7,02	77 (TW III)	27,34%	7,02%	77,00%	SR	SR	T

No	IKK Outcome	Satuan	Target					Realisasi			Persentase Capaian 2022	Persentase Capaian 2023	Persentase Capaian 2024	Predikat Capaian 2022	Predikat Capaian 2023	Predikat Capaian 2024
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024						
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PADdalamAPBD	%	100	100	100	100	100	43,35	9,2	86 (TW III)	43,35%	9,20%	86,00%	SR	SR	T
3	Manajemen Aset		YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA (TW III)	100,00%	100,00%		ST	ST	#N/A
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanjadalam APBD tahun sebelumnva	%	4,25	4	3,75	4	3,25	7,68	4,73	5,31 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
e) Transparansi dan Partisipasi Publik											100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100 (TW III)	100,00%	100,00%	100,00%	ST	ST	ST
	RATA-RATA CAPAIAN										**69,74%**	**70,71%**	**62,40%**	**S**	**S**	**R**

Sumber : Evaluasi RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026

Capaian IKK Kabupaten Simalungun Tahun 2022 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Fluktuasi dalam capaian keseluruhan IKK Kabupaten Simalungun dari tahun 2022 hingga tahun 2024 menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan program dan kebijakan daerah. Meskipun pada tahun 2023 terjadi peningkatan capaian menjadi 70,71% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 69,74%, predikat capaian masih bertahan pada kategori "Sedang." Namun, pada tahun 2024, capaian IKK mengalami penurunan signifikan hingga 62,40%, yang dikategorikan sebagai "Rendah." Capaian tahun 2024 masih memungkinkan dapat meningkat dikarenakan capaian IKK saat ini banyak yang masih menampilkan capaian hingga 2024 Triwulan III (TW III).

Pada urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdapat urusan yang konsisten mencapai 100% selama dua tahun berturut-turut yaitu Urusan Sosial. Sedangkan pada Urusan Pendidikan memiliki rata-rata capaian yang mencapai lebih dari 90% dan hal ini menunjukkan bahwa capaian IKK pada urusan pendidikan telah banyak yang mencapai lebih dari 90%. Sedangkan urusan perumahan rakyat memiliki rata-rata capaian yang cenderung menurun yaitu dari 36,79% di tahun 2022 menjadi 15,28% di tahun 2023 dan pada tahun 2024 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 25,86%. Capaian IKK urusan perumahan rakyat mengalami penurunan dikarenakan tidak terdapatnya ketersediaan data pada beberapa IKK serta adanya capaian IKK yang menurun yaitu seperti jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari 100% di tahun 2022 menjadi 0% di tahun 2024.

Capaian IKK pada urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar juga teridentifikasi cenderung meningkat. Terdapat satu urusan yang konsisten mencapai angka 100% selama dua tahun berturut-turut yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta urusan koperasi dan UKM, dan urusan penanaman modal. Lalu terdapat urusan statistik dan persandian yang memiliki capaian sebear 100% selama tiga tahun berturtut-turut. Selain itu, terdapat beberapa urusan yang mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yaitu urusan pangan dengan capaian dari sebesar 58,46% menjadi 100% selama tahun 2023. Lalu terdapat urusan kepemudaan dan olahraga yang meningkat dari 20,31% menjadi 34,99% hal ini disebabkan karena adanya peningkatan yang signifikan pada salah 1 IKK yaitu Peningkatan Prestasi Olahraga yang mencapai 100% selama tahun 2023.

Pada bidang urusan pilihan, terdapat dua urusan yang teridentifikasi mengalami peningkatan capaian yang mencapai sebesar 100% di tahun 2023 yaitu urusan pertanian dan urusan perindustrian. Hal yang sama juga terjadi pada urusan perdagangan yang sebelumnya mengalami peningkatan dari 97,38% menjadi 97,81% di tahun 2023. Selain

itu, terdapat urusan yang mengalami penurunan yang cukup signfikan yaitu urusan pariwisata dari 95,00% turun menjadi 66,82% dan pada tahun 2024 tingkat capaian menurun tajam menjadi sebesar -65,14%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya IKK yang mengalami penurunan capaian yaitu Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan yang mencapai sebesar -667,50%.

Pada bidang Urusan Penunjang Pemerintahan, terdapat urusan yang mengalami peningkatan yaitu urusan Kepegawaian dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 35,07% menjadi 65,01% di tahun 2023. Sedangkan urusan perencanaan dan keuangan mengalami penurunan dari capaian sebesar 100% pada tahun 2022 hingga 2023 menurun jadi 85,26%. Selain itu, terdapat urusan yang total capaiannya mengalami fluktuasi, seperti pada urusan Manajemen Keuangan yang capaian pada tahun 2022 mencapai sebesar 67,67% lalu di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 54,06%.

II.4.4.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Penerapan pencapaian SPM diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Berikut **Tabel II.48** yang berisi mengenai Indikator yang mencakup tentang SPM.

Tabel II.48 Indikator Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Jenis Pelayanan Dasar
1	Pendidikan	a. pendidikan anak usia dini;
		b. pendidikan dasar;
		c. pendidikan kesetaraan;
2	Kesehatan	d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
		e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
		f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
		g. pelayanan kesehatan balita;
		h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
		i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
		j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
		k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
		l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
		m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
		n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
		o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus);

No	Urusan Pemerintahan Wajib	Jenis Pelayanan Dasar
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
		q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
		s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
		u. pelayanan informasi rawan bencana;
		v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
		w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
		x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
6	Sosial	y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
		z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
		aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
		ab. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
		ac. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Sumber: Permendagri No.59 Tahun 2021.

Tabel Indikator Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Simalungun mencakup beberapa urusan pemerintahan wajib dengan jenis pelayanan dasar. Pada bidang pendidikan, fokusnya mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Di bidang kesehatan, layanan meliputi kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, serta penderita hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa berat, tuberkulosis, dan HIV. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi penyediaan air minum dan pengolahan air limbah domestik. Di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, layanan mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah. Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mencakup layanan ketenteraman, informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran. Terakhir, bidang sosial mencakup rehabilitasi sosial dasar untuk penyandang disabilitas, anak terlantar,

lanjut usia terlantar, tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana.

Tabel II.49 Target dan Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Simalungun Tahun 2022-2026

NO	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					REALISASI			KONDISI AKHIR
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2026
1	**PENDIDIKAN**											
	Pendidikan anak usia dini	Persen	0	100	100	100	100	100	64,9	70,15	68,13	100
	Pendidikan dasar	Persen	0	100	100	100	100	100	73,3	99,1	84,93	100
	Pendidikan kesetaraan	Persen	0	100	100	100	100	100	24,9	20,62	20,62	100
2	**KESEHATAN**											
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	57,1	64,7	68,6	72,4	76,2	80	90,3	80,31	87,7	80
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	57,3	64,9	68,7	72,4	76,2	80	90	82,46	96,73	80
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	44,1	54,4	59,6	64,7	69,9	75	98	86,59	95,26	75
	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	49	57,7	62	66,3	70,7	75	95,5	84,47	91,19	75
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persen	80,2	85,1	87,6	90,1	92,5	95	80,1	32,08	95,77	95
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persen	19,9	29,9	35	40	45	50	69,2	78,07	52,37	50
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persen	79,81	84,9	87,4	89,9	92,5	95	54	25,36	13,27	95
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	88,24	90,5	91,6	92,8	93,9	95	73,4	8,37	9,06	95
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	36,5	46	50,8	55,5	60,3	65	9,84	21,99	48,1	65

NO	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					REALISASI			KONDISI AKHIR
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2026
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persen	39,8	48,2	52,4	56,6	60,8	65	NA	64,53	59,13	65
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	Persen	35,7	45,5	50,4	55,2	60,1	65	26,7	98,75	83,8	65
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV	Persen	78,9	84,3	87	89,6	92,3	95	71,7	57,96	68,83	95
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											
	Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	100	100	100	100	100	100	80,2	90	95,6	100
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persen	0	0	0	0	0	0	45,82	45,22	45,52	0
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**											
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di wilayah kerja kabupaten/kota	Persen	0	0	0	0	0	0	0	90	100	0
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS**											

NO	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					REALISASI			KONDISI AKHIR
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2026
	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persen	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	17	NA		100,00
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	49,26	57,84	62,13	66,42	70,71	75,00	84	100	100	75,00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	49,26	57,84	62,13	66,42	70,71	75,00	90	129,3	41,50	75,00
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	23,72	32,48	36,86	41,24	45,62	50,00	0	74	35,80	50,00
	Pelayanan Penyelamatan dan evakausi korban kebakaran	Persen	25,08	33,84	38,22	42,60	46,98	51,36	85,30	100	85,00	51,36
6	**SOSIAL**											
	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100	100
	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang anak terlantar di luar panti	Persen	0	0	0	0	0	0	NA	NA	100	0
	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang lanjut usia terlantar di luar panti	Persen	0	100	100	100	100	100	NA	NA	100	100

NO	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					REALISASI			KONDISI AKHIR
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2026
	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Persen	0	0	0	0	0	0	NA	NA	100	0
	Pelayanan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Persen	0	100	100	100	100	100	NA	NA	100	100

Sumber : Bapperida Kabupaten Simalungun, 2025.

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Simalungun Tahun 2022-2026 menunjukkan target peningkatan layanan di berbagai bidang. Di bidang pendidikan terlihat capaian beberapa indikator mengalami penurunan dan stagnansi, salah satu contoh yelayanan yang menurun adalah pelayanan pada pendidikan anak usia dini tahun tahun 2023 mencapai 70,15% kemudian di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 68,13%. Pada pelayanan pendidikan kesetaraan mengalami stagnansi di tahun 2023 dan 2024 capaian sebesar 20,62%. Penurunan capaian di bidang pendidikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 menunjukkan adanya tantangan dalam aspek aksesibilitas, partisipasi, dan keberlanjutan layanan pendidikan. Perlu adanya perbaikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada bidang kesehatan terlihat bahwa capaian beberapa indikator SPM bidang kesehatan mengalami kenaikan dan beberapa mengalami penurunan capaian. Salah satu contoh seperti pada pelayanan kesehatan ibu hamil mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 80,31% menjadi 87,7 % di tahun 2024. Capaian salah satu indikator SPM bidang kesehatan yang mengalami penurunan seperti pelayanan kesehatan pada usia lanjut di tahun 2023 capaian sebesar 78,07% turun menjadi 52,37% di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan di bidang kesehatan belum berjalan merata dan konsisten di seluruh jenis pelayanan. Ketidakseimbangan ini dapat menciptakan kesenjangan antar pelayanan. Perlu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPM kesehatan agar intervensi yang dilakukan lebih merata, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di bidang pekerjaan umum, pemenuhan kebutuhan air minum mencapai 80,22% di tahun 2022 dan meningkat menjadi 90% di tahun 2023. Sementara itu, pengolahan air limbah domestik pada tahun 2022 telah mencapai 100%, tetapi capaian di tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 12%. Perumahan rakyat fokus pada penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 90%. Bidang ketenteraman dan ketertiban rata-rata capaian mengalami kenaikan di tahun 2023 salah satunya adalah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2023 mencapai 129,25%.

Bidang sosial mencakup layanan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan, serta perlindungan sosial korban bencana pada tahun 2024 realisasi sebesar 100%. Hal ini mencerminkan kinerja yang baik dari pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar kelompok rentan. Capaian ini menunjukkan efektivitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di bidang sosial tahun 2024.

II.4.4.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)

Analisis pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Simalungun dilakukan dengan membandingkan target/indikator TPB yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB Kabupaten Simalungun. Dari analisis tersebut, diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB ke dalam empat kategori:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)
3. Indikator TPB yang belum pernah dilaksanakan (BB)
4. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (TD)

Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 220 indikator, yang terbagi dalam 17 TPB. Dari hasil analisis, 16 TPB (TPB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, dan 17) dinyatakan relevan dengan kewenangan dan kondisi Kabupaten Simalungun, sementara TPB 14 (ekosistem laut) tidak relevan karena kewenangannya berada pada tingkat provinsi. Berdasarkan kriteria penapisan, terdapat 212 indikator yang relevan dengan kewenangan Kabupaten Simalungun, dan 8 indikator lainnya tidak termasuk dalam kewenangan kabupaten tersebut.

Tabel II.50 Indikator Non Kewenangan Kabupaten Simalungun

No.	Indikator	Keterangan
	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Kabupaten Simalungun bukan merupakan pusat pertumbuhan beresiko tinggi
	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Kabupaten Simalungun Tidak Daerah Tertinggal berdasarkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2020 dan Perpres RI Nomor 131 Tahun 2015
	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Kabupaten Simalungun bukan kawasan perkotaan metropolitan
	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Kabupaten Simalungun bukan kawasan perkotaan metropolitan
	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Tidak ada kota pusaka
	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Kabupaten Simalungun bukan kawasan perkotaan metropolitan
	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Kabupaten Simalungun bukan kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang
	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Kabupaten Simalungun bukan kabupaten 3T

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun 2025 - 2029

Dari total 211 indikator, indikator yang tersedia datanya adalah sebanyak 144 indikator dan dari indikator yang tersedia datanya sebanyak 91 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) dan 53 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB), 14 indikator belum pernah dilakukan (BB) dan sebanyak 54 indikator belum memiliki data (TD). Indikator TPB tersebut dibagi kedalam empat pilar, antara lain sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam tujuan TPB memiliki capaian yang berbeda-beda. Setiap capaian per TPB ditampilkan pada **Tabel II.51.**

Tabel II.51 Capaian TPB Kabupaten Simalungun

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Telah Mencapai Target (SS)	Belum Mencapai Target (SB)	Belum Pernah Dilakukan (BB)	Tidak Ada Data (TD)	Jumlah Indikator
Tanpa Kemiskinan	9	11	2	1	23
Tanpa Kelaparan	4	7	0	0	11
Kehidupan Sehat dan Sejahtera	21	11	0	2	34
Pendidikan Berkualitas	8	4	0	1	13
Kesetaraan Gender	6	7	0	1	14
Air Bersih dan Sanitasi Layak	2	5	4	7	16
Akses Energi yang Terjangkau	1	0	0	1	2
Pekerjaan Layak Pertumbuhan Ekonomi	7	10	0	2	19
Industri, inovasi dan Infrastruktur	5	5	0	2	12
Berkurangnya kesenjangan	4	3	0	1	8
Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	5	0	2	1	8
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab	1	1	2	1	5
Penanganan Perubahan Iklim	1	0	1	0	2
Ekosistem Daratan	0	2	2	0	4
Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	15	5	0	1	21
Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	5	6	2	2	15
Jumlah	**94**	**77**	**15**	**23**	**209**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun 2025 - 2029

Melalui analisis pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025 - 2029, diketahui bahwa Kabupaten Simalungun memiliki total 211 indikator. Dari jumlah tersebut, sebanyak 91 indikator (42.92%) telah mencapai target nasional (SS). Sementara itu, terdapat 53 indikator (25%) yang belum mencapai target (SB), yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena pencapaiannya masih di bawah target atau kemajuan capaian targetnya belum sesuai rencana. Selain itu, terdapat 14 indikator (6.60%) yang belum pernah dilakukan (BB), dan 54 indikator (25.47%) yang tidak ada data (TD). Kondisi ini lebih rincinya dapat dilihat melalui rekapitulasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Simalungun, yang menggambarkan pencapaian indikator TPB di setiap tujuan TPB, menunjukkan area-area yang memerlukan perbaikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan

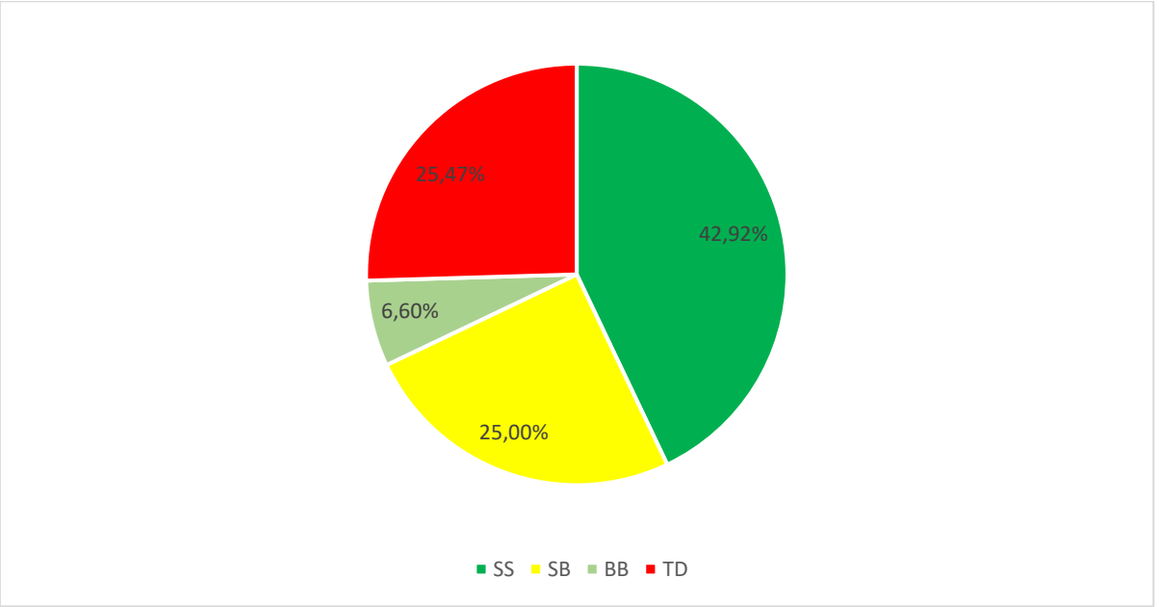

Gambar II.35 Persentase Status Ketercapaian TPB Kabupaten Simalungun
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun 2025-2029

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase status ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Simalungun dengan proporsi terbesar berada pada status "SS" (Sangat Sesuai) dengan nilai 42,92%, menunjukkan bahwa sebagian besar indikator TPB telah tercapai dengan baik. Selanjutnya, status "SB" (Sesuai) memiliki persentase 25,00%, disusul oleh "TD" (Tidak Dicapai) yang cukup signifikan sebesar 25,47%, menunjukkan adanya beberapa target yang belum terpenuhi. Terakhir, status "BB" (Belum Berproses) menempati bagian terkecil dengan 6,60%, yang menandakan bahwa masih ada beberapa inisiatif yang belum dimulai. Diagram ini mencerminkan pencapaian TPB di Kabupaten Simalungun dengan variasi status ketercapaian pada setiap indikator.

TPB yang paling banyak memiliki indikator adalah TPB 3, yaitu sebanyak 33 indikator, sedangkan yang paling sedikit adalah TPB 7 dan TPB 13, yang masing-masing

hanya memiliki 2 indikator. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data, diketahui bahwa dari 211 indikator yang relevan di Kabupaten Simalungun, sebanyak 121 indikator (67,92%) telah diisi.

Kesimpulan dari data ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah dilaksanakan dan beberapa bahkan mencapai target nasional, mencerminkan kemajuan yang signifikan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, termasuk indikator yang belum mencapai target nasional, indikator yang tidak memiliki data, serta indikator yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah. Tantangan spesifik pada masing-masing TPB dapat dilihat pada **Tabel II.52**

Tabel II.52 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Kondisi Kabupaten Simalungun

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Tantangan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di manapun	Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Simalungun dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pertama, yaitu persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional yang diharapkan menurun menjadi 7-8%, namun realisasi capaian indikator TPB pada tahun 2021 sebesar 44,45% justru mengalami peningkatan menjadi 45,73%di tahun 2022. Meskipun terjadi peningkatan persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan dari 36 jiwa di tahun 2021 meningkat menjadi 45 jiwa di tahun 2022, namun hal ini belum dapat mencapai target yang diharapkan yaitu terjadi peningkatan 17,12%. Selain itu, target rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan belum dapat meningkat menjadi 100%, dari 2021 sebesar 84,73% hanya meningkat menjadi 88,51%.
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Tantangan yang dihadapi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kedua di Kabupaten Simalungun adalah upaya untuk menurunkan prevalensi anemia pada ibu hamil. Meskipun terdapat kemajuan dalam menurunkan tingkat prevalensi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Meskipun prevalensi anemia pada ibu hamil menurun dari 11% menjadi 10%.
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Kabupaten Simalungun telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ketiga, yaitu "Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan", masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Data menunjukkan bahwa angka kematian ibu telah turun dari yang semula 0,20% menjadi 0,02%, sementara angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup turun menjadi 10 dari target 24, mencerminkan

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Tantangan
		peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan maternal dan anak di Kabupaten Simalungun. Selain itu, jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk juga telah mencapai target, menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat di Simalungun. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih belum menunjukkan penurunan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam sektor kesehatan, tantangan baru dapat muncul dan perlu diperhatikan untuk memastikan kelangsungan upaya pencegahan dan penanganan penyakit yang sudah ada.
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Tantangan yang dihadapi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan keempat di Kabupaten Simalungun adalah peningkatan yang tidak signifikan dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah tingkat pertama, dengan hasil yang cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir, APK SD stagnan sebesar 110,18 %, sementara APK SMP sebesar 100,3%. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam hal rata-rata lama sekolah penduduk, APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan persentase melek huruf penduduk, namun peningkatan dalam APK pendidikan dasar dan menengah belum mencapai target yang diharapkan. Data menunjukkan bahwa APK pendidikan dasar dan menengah tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir.
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Tantangan yang dihadapi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kelima di Kabupaten Simalungun adalah jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan, karena dari target bertambah sebanyak 16 di tahun 2022 masih menyentuh di angka 5. Selain itu tantangan yang lain adalah proporsi perempuan yang berada di posisi managerial yang belum mengalami peningkatan yang signifikan dan stagnan di tahun 2021 ke 2022 yaitu sebesar 9,70%.
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Tantangan yang dihadapi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan keenam di Kabupaten Simalungun melibatkan beberapa faktor kunci. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam hal proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, jumlah desa/kelurahan yang Open

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Tantangan
		Defecation Free (ODF), namun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak serta akses layanan sanitasi layak, yang diharapkan meningkat menjadi 100 % masih mencapai 88,51%. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, yang dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Tantangan yang dihadapi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke tujuh di Kabupaten Simalungun adalah kesesuaian indikator dengan karakteristik daerah yang mungkin tidak optimal. Meskipun indikator seperti bauran energi terbarukan dan intensitas energi primer tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi energi di Kabupaten Simalungun, tetapi tantangan utamanya adalah untuk tetap mengalokasikan sumber daya dan perhatian terhadap pengembangan energi bersih.
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Tantangan yang dihadapi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kedelapan di Kabupaten Simalungun adalah PDB Per kapita yang belum meningkat menjadi lebih dari Rp50 juta, hingga tahun 2022 masih sebesar Rp29 juta. Selain itu, tantangan lainnya persentase tenaga kerja formal yang ditargetkan menjadi 51% belum bisa mencapai targetnya, karena di tahun 2022 tercatat masih mencapai 38,23%. Meskipun terdapat faktor pendorong yang menunjukkan kemajuan, seperti peningkatan upah rata – rata per jam pekerja, tingkat setengah pengangguran, jumlah kunjungan wisatawan nusantara, namun kurangnya data yang tersedia untuk indikator lain dapat menghambat pemahaman yang komprehensif tentang kondisi lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Tantangan yang dihadapi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kesembilan di Kabupaten Simalungun adalah rendahnya peningkatan proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur, meskipun terjadi peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 namun terus menurun di tahun 2022 hingga 10,00%. Meskipun terdapat peningkatan panjang pembangunan jalan tol, panjang jalur kereta api, dan jumlah dermaga penyeberangan menunjukkan adanya progres dalam infrastruktur dan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi,

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Tantangan
		namun rendahnya peningkatan nilai tambah dari sektor-sektor tersebut terhadap PDB dan per kapita merupakan tantangan utama. Kurangnya peningkatan nilai tambah tersebut dapat mengindikasikan adanya keterbatasan dalam daya saing dan produktivitas sektor industri, serta kurangnya inovasi dan teknologi yang diterapkan dalam proses produksi. Hal ini dapat membatasi potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
10	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara	Tantangan yang dihadapi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kesepuluh di Kabupaten Simalungun adalah menjaga dan memperkuat progres yang telah dicapai dalam mengurangi ketidaksetaraan, serta memastikan keberlanjutan upaya-upaya pengurangan ketidaksetaraan tersebut di masa yang akan datang. Meskipun terdapat faktor pendorong yang menunjukkan bahwa proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dan koefisien Gini sudah mencapai target, namun tantangan utamanya adalah menurunkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, yang ditargetkan menurun menjadi 7-8 %, namun pada realisasinya justru terjadi peningkatan dari tahun 2021 sebesar 44,45% menjadi 45,73%.
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Tantangan yang dihadapi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kesebelas di Kabupaten Simalungun adalah menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), indikator ini belum tercapai karena dari target menurun menjadi 30% terjadi stagnansi di tahun 2021 hingga 2022 yaitu sebesar 80,07%. Namun demikian, persentase sampah perkotaan yang tertangani serta proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau terus mengalami peningkatan yang signifikan.
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Tantangan yang dihadapi Kabupaten Simalungun adalah terkait pengelolaan sampah. Sampah tetap menjadi salah satu hal yang perlu dijadikan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang cenderung stagnan dalam 5 tahun terakhir, dengan target 20 ton per hari timbulan sampah yang didaur ulang, baru 0,1% nya yang sudah didaur ulang. Selain itu limbah juga agar menjadi perhatian, khususnya terkait limbah B3 yang terkelola serta diolah sesuai

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Tantangan
		peraturan perundangan. Jumlah limbah B3 yang dikelola Kabupaten Simalungun di tahun 2022 sebesar sebesar 56,20% yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 53,60%.
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Kabupaten Simalungun juga menghadapi potensi bencana yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, khususnya bencana hidrometeorologi. Beberapa pengaruh perubahan iklim yang perlu diwaspadai di Kabupaten Simalungun antara lain: - Kenaikan tinggi muka air laut: Kabupaten Simalungun, yang memiliki garis pantai di sekitar Danau Toba, dapat terpengaruh oleh kenaikan muka air danau, yang bisa menyebabkan abrasi atau erosi di area pantai. Beberapa daerah perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 15% juga rentan terhadap longsor. Struktur geologi yang tidak stabil di beberapa kawasan dapat memperparah risiko longsor dan erosi. - Peningkatan gelombang ekstrem : Wilayah perairan di sekitar Kabupaten Simalungun, terutama yang dekat dengan Danau Toba, bisa mengalami peningkatan frekuensi dan intensitas gelombang ekstrem. Hal ini berpotensi membahayakan keselamatan transportasi air dan mengurangi aktivitas nelayan lokal. - Perubahan pola curah hujan : Kabupaten Simalungun menghadapi perubahan pola curah hujan yang dapat menyebabkan banjir. Beberapa titik rawan banjir telah diidentifikasi, yang dapat mengancam infrastruktur dan permukiman. Selain itu, perubahan curah hujan juga mempengaruhi ketersediaan air bersih dan pertanian, yang dapat berdampak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. - Kabupaten Simalungun merupakan wilayah yang rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang lebih efektif untuk mengurangi risiko dan

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Tantangan
		menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi di masa mendatang.
14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini merupakan indikator wewenang Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Peningkatan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan, seperti yang tercermin dalam data tahun 2021 ke 2022 sebesar 9,37% terjadi peningkatan menjadi 9,41%, namun demikian peningkatan ini belum terjadi secara konstan dari tahun ke tahun. Perubahan struktur lahan ini tidak hanya mempengaruhi estetika lingkungan, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan, belum mengalami peningkatan signifikan, pada tahun 2022 masih sebesar 0,03% lahan kritis yang direhabilitasi, sehingga penting untuk mencatat bahwa rehabilitasi lahan kritis juga harus menjadi bagian dari strategi pengelolaan lingkungan. Upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi tantangan ini adalah peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi langkah yang sangat penting. RTH tidak hanya menyediakan tempat rekreasi dan keindahan alam tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan.
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif Di semua Tingkatan	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir memiliki nilai yang fluktuatif untuk periode 2018-2022 dengan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2018, Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan sebesar 0,0115%. Sedangkan pada tahun 2022, nilainya menjadi 0,0146%. Pemerintah perlu meningkatkan perhatian dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang mana akan berpengaruh terhadap tumbuhnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Simalungun
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan	Tantangan yang dihadapi Kabupaten Simalungun adalah terkait meningkatkan total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Tantangan
	Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	sumbernya, karena proporsinya terus mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2022, berdasarkan data di tahun 2016 sebesar 7,37% dan terus menurun hingga tahun 2022 sebesar 4,93%. Selain itu rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang diharapkan dapat naik di atas 12%, pada realisasinya masih sebesar 0,22% di tahun 2022.

Kabupaten Simalungun menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Persentase penduduk miskin meningkat dari 44,45%pada 2021 menjadi 45,73% pada 2022. Upaya mengurangi anemia ibu hamil menunjukkan kemajuan, namun masih banyak yang perlu diperhatikan. Angka kematian ibu dan bayi menurun, tetapi cakupan JKN stagnan. Pendidikan mengalami stagnansi dalam Angka Partisipasi Kasar (APK). Kesetaraan gender terhambat oleh jumlah kebijakan responsif gender dan rendahnya proporsi perempuan di posisi manajerial. Akses sanitasi dan air minum layak belum mencapai target. Pertumbuhan ekonomi terhambat oleh rendahnya PDB per kapita dan persentase tenaga kerja formal. Infrastruktur dan inovasi menghadapi tantangan dalam meningkatkan nilai tambah industri. Ketidaksetaraan sosial tetap menjadi isu dengan peningkatan kemiskinan. Pengelolaan sampah dan limbah B3 menjadi perhatian utama. Perubahan iklim menimbulkan risiko bencana hidrometeorologi. Rehabilitasi lahan kritis dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau masih kurang. Kejahatan kekerasan fluktuatif tetapi cenderung menurun. Tantangan kemitraan global termasuk rendahnya total pendapatan pemerintah dan rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

II.5. Gambaran Keuangan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029, ketersediaan dan pengelolaan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu aspek krusial yang perlu dicermati secara komprehensif. Gambaran keuangan daerah ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta proyeksi fiskal jangka menengah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan. Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan, menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penganggaran yang kredibel, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penyajian gambaran keuangan daerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan lima tahunan dilakukan secara realistis dan selaras dengan kapasitas riil keuangan daerah.

II.5.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu Kabupaten Simlaungun merujuk pada pendataan dan hasil keuangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun selama periode waktu sebelumnya, yaitu pada periode 2022 - 2024. Hal ini mencakup seluruh informasi terkait dengan pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas yang terkait dengan pemerintah Kabupaten Simalungun selama periode tertentu di masa lampau. Oleh karena itu, dapat dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk melihat pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan menyajikan kinerja keuangan masa lalu Kabupaten Simlaungun, dapat diberikan gambaran tentang pengelolaan sumber daya keuangan di Kabupaten Simalungun dalam periode sebelumnya. Bab ini akan mencakup informasi terkait pendapatan pemerintah daerah, alokasi dana, dan pemenuhan kewajiban keuangan daerah, sehingga dapat ditunjukkan perkembangan struktur keuangan daerah dari waktu ke waktu untuk menjelaskan kinerja keuangan Kabupaten Simalungun.

II.5.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum komponen APBD Kabupaten Simalungun terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

II.5.1.1.1. Penerimaan APBD Kabupaten Simalungun

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, Pendapatan Daerah mencakup semua hak yang dimiliki oleh Daerah yang dapat meningkatkan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan bagian penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena berpengaruh besar terhadap kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan.

Tabel II.53 Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persen Realisasi Pendapatan terhadap APBD
2020	2.423,10	2.175,72	89,79
2021	2.355,91	2.230,85	94,69
2022	2.408,42	2.331,76	96,82
2023	2.390,49	2.390,18	99,99
2024	2.781,17	2.646,96	95,17

Sumber : BPKPD Kabupaten Simalungun, 2025.

Persentase realisasi pendapatan daerah Kabupaten Simalungun selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren capaian yang cukup positif meskipun terdapat fluktuasi pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar 89,79%, kemudian mengalami peningkatan berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 94,69% dan 96,82%. Puncak capaian terjadi pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 99,99% yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, pada tahun 2024, capaian realisasi mengalami penurunan menjadi 95,17%. Meskipun masih berada dalam kategori tinggi, penurunan tersebut perlu menjadi perhatian dalam rangka menjaga konsistensi dan keberlanjutan kinerja pendapatan daerah ke depan.

Tabel II.54 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kode	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENDAPATAN**	**2.175,72**	**2.230,85**	**2.331,76**	**2.390,18**	**2.646,96**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**159,32**	**177,65**	**174,52**	**170,62**	**219,94**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	86,05	88,27	102,71	116,75	151,77
1.1.2	Pendapatan retribusi Daerah	2,40	2,48	3,05	3,07	3,15
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,57	20,36	20,10	19,52	20,27
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56,30	66,53	48,67	31,27	44,75
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.877,04**	**1.935,65**	**2.138,24**	**2.176,97**	**2.394,30**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.804,32	1.832,47	2014,12	2028,06	2.295,76
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	72,72	103,18	95,46	115,16	98,54
1.2.3	Bantuan Keuangan			28,66	33,75	
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**433,87**	**117,55**	**19,00**	**42,59**	**32,72**
1.3.1	Pendapatan hibah	139,36		19,00	18,67	
1.3.2	Pendapatan Lainnya	294,52	117,55		23,92	32,72

Sumber : BPKPD Kabupaten Simalungun, 2025.

Pada realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020–2024, terlihat bahwa total pendapatan daerah mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, total pendapatan sebesar Rp2.175,72 miliar dan meningkat secara konsisten hingga mencapai Rp2.646,96 miliar pada tahun 2024. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp159,32 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp219,94 miliar pada tahun 2024. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi tetap menjadi komponen terbesar dari pendapatan daerah. Pada tahun 2020, jumlahnya mencapai Rp1.877,04 miliar dan terus meningkat hingga mencapai Rp2.394,30 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, komponen "Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah" justru mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Terlihat penurunan drastis pada tahun 2022 yaitu mencapai sebesar Rp19,00 miliar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun kemudian kembali naik menjadi Rp42,59 miliar di tahun 2023 dan sedikit turun lagi di tahun 2024.

II.5.1.1.1.1. Efektivitas Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), peran penting pengelolaan keuangan daerah adalah Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

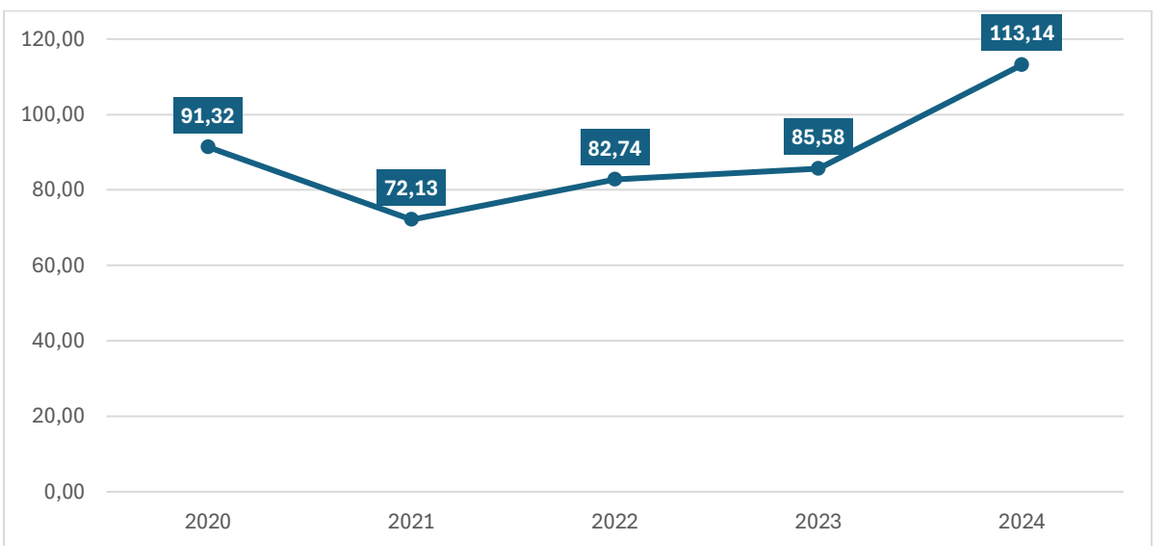

Gambar II.286 Efektivitas Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun, 2020-2024
Sumber: BPKPD Kabupaten Simalungun, 2025..

Perhitungan efektivitas realisasi ini menggunakan perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap potensi PAD. Semakin tinggi nilainya, semakin efisien pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Namun, fluktuasi dalam nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun bisa menunjukkan berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kebijakan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, atau perubahan dalam perekonomian secara keseluruhan.

Efektivitas realisasi PAD Kabupaten Simalungun selama tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika capaian yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, realisasi PAD mencapai 91,32%, namun mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 72,13%. Kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat itu, yang berdampak langsung terhadap aktivitas perekonomian daerah serta berkurangnya kapasitas fiskal. Pada tahun-tahun berikutnya, capaian realisasi mulai menunjukkan perbaikan dengan angka 82,74% di tahun 2022 dan 85,58% di tahun 2023, seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat dan optimalisasi intensifikasi serta ekstensifikasi pendapatan daerah. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana realisasi pendapatan mencapai 113,1%, melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mungkin mengindikasikan adanya upaya perbaikan atau kebijakan yang berhasil diimplementasikan pada periode tersebut.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian dapat diidentifikasi seperti pada tabel berikut.

Tabel II.55 Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Rp Miliar)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	159,32	177,65	174,52	170,62	219,94
Realisasi Pajak Daerah	86,05	88,27	102,71	116,75	151,77
Realisasi Retribusi Daerah	2,40	2,48	3,05	3,07	3,15
Pertumbuhan Pajak Daerah	0,97	2,58	16,36	13,67	30,00
Pertumbuhan Retribusi Daerah	-37,86	3,41	22,82	0,70	2,73

Sumber : BPKPD Kabupaten Simalungun, 2024.

Pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Simalungun dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, pertumbuhan pajak daerah tercatat sebesar 0,97%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak. Pada tahun 2021, terdapat pemulihan kecil dengan pertumbuhan mencapai 2,58%, mencerminkan perbaikan ekonomi yang mulai terjadi. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan pertumbuhan pajak daerah melonjak menjadi 16,36%, menunjukkan keberhasilan pemulihan ekonomi dan peningkatan efektivitas pengumpulan pajak. Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan kembali melambat menjadi 13,67% dan kembali meningkat di tahun 2024 menjasi sebesar 30,00 Persen yang mencerminkan adanya stabilisasi pasca-pemulihan.

II.5.1.1.1.2. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan daerah Kabupaten Simalungun terdiri dari realisasi pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan. Namun, selama periode tersebut penerimaan pembiayaan daerah terutama berasal dari pos Penggunaan Sisa Lebih

Penggunaan Anggaran (SiLPA). Artinya, sumber utama penerimaan pembiayaan adalah dari dana yang tidak terpakai atau tersisa dari anggaran sebelumnya. Analisis terhadap data pendapatan daerah dan pembiayaan yang telah tersedia. Dengan memahami tren dan pola penerimaan pembiayaan selama periode tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah serta merencanakan langkah-langkah yang tepat.

Tabel II.56 Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**PEMBIAYAAN**					
2	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96,11	110,84	157,92	206,42	113,19
4	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	0,34	1,19	0,00	0,00	0,00
13	**Jumlah Penerimaan**	**96,45**	**112,03**	**157,92**	**206,42**	**130,94**
14	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					
15	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	6,30	0,00	7,00
17	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22,61	114,65	0,00	0,00	0,00
18	Pembayaran Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**22,61**	**124,61**	**6,30**	**0**	**7,00**
20	**PEMBIAYAAN NETTO**	**73,85**	**(12,58)**	**151,62**	**206,42**	**123,94**

Sumber: BPKPD Kabupaten Simalungun, 2025.

Pembiayaan Netto Kabupaten Simalungun menunjukkan penurunan yang signifikan dari 73,85 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi -12,58 miliar rupiah pada tahun 2021. Sedangkan pada jumlah penerimaan pembiayaan Kabupaten Simalungun terus meningkat sepanjang tahunnya dengan penerimaan tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 206,42 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2024 jumlah penerimaan pembiayaan mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 130,94 miliar rupiah.

II.5.1.1.2. Belanja APBD Kabupaten Simalungun

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dikembalikan oleh daerah dan pengeluaran lain yang diakui sebagai pengurang ekuitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama satu tahun anggaran. Belanja Daerah dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan menggunakan klasifikasi ini, penganggaran ke depan akan disesuaikan dengan pelaporan sehingga memungkinkan perbandingan yang lebih mudah dan peningkatan kualitas informasi yang disampaikan.

II.5.1.1.2.1. Belanja APBD Kabupaten Simalungun

Selama enam tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Simalungun mencatat pertumbuhan yang signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk penyerapan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Simalungun.

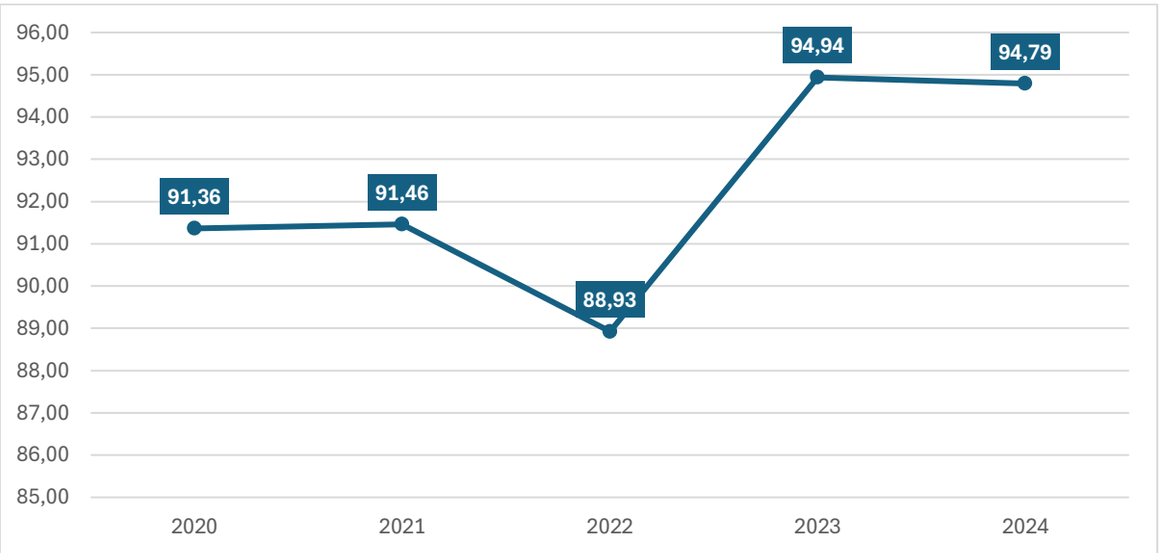

Gambar II.37. Persentase Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

Sumber: *BPKPD Kabupaten Simalungun, 2025*.

Penyerapan anggaran secara umum menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Penyerapan anggaran paling rendah terjadi pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 91,36%, kemudian mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2021 menjadi 91,46%. Pada tahun 2022, persentase realisasi belanja sedikit mengalami penurunan menjadi 88,93%, Puncak realisasi terjadi pada tahun 2023, di mana belanja daerah terealisasi sebesar 94,94%, menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, sekaligus mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran secara maksimal sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2024 realisasi belanja sedikit menurun menjadi 94,79%.

Fluktuasi ini menggambarkan adanya dinamika dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggran, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, atau peristiwa luar biasa seperti pandemi. Dinamika ini juga menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi penyerapan anggaran dari tahun ke tahun.

Tabel II.57 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	**Belanja Operasi**	**1.392,09**	**1.406,67**	**1.473,52**	**1.516,11**	**1.792,09**
1	Belanja Pegawai	903,07	915,53	900,95	862,66	964,99
2	Belanja Barang dan Jasa	258,82	361,34	534,47	585,16	725,00
3	Belanja Bunga	4,47	6,21	0,00		
4	Belanja Subsidi	0,00		1,33		
5	Belanja Hibah	225,60	114,11	36,45	67,81	101,60
6	Belanja Bantuan Sosial	0,14	9,48	0,32	0,49	0,50
B	**Belanja Modal**	**103,88**	**216,4**	**358,33**	**456,89**	**342,56**
1	Belanja Modal Tanah					
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23,88	37,01	114,50	100,33	107,66
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34,16	36,04	30,41	119,18	77,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42,85	143,35	195,33	215,36	134,99
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,98		18,10	21,24	22,92
6	Belanja Modal Aset Lainnya				0,78	
C	**Belanja Tidak Terduga**	**226,59**	**20,9**	**16,24**	**24,57**	**20,84**
D	**Belanja Transfer**	**415,95**	**416,09**	**428,69**	**468,03**	**502,21**
1	**Transfer Bagi Hasil Pendapatan**	**3,15**				**158,54**
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3,15				158,54
2	**Transfer Bantuan Keuangan**	**412,80**	**416,09**	**428,69**	**468,03**	**343,67**
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/Kelurahan	411,76	416,09	428,69	468,03	343,67

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,04				
	TOTAL	**2.138,51**	**2.060,06**	**2.276,77**	**2.465,60**	**2.657,71**

Sumber : BPKPD Kabupaten Simalungun, 2025

Berdasarkan **Tabel II.57**, Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019–2023, terlihat adanya tren peningkatan dalam total belanja daerah dari tahun ke tahun. Total belanja daerah meningkat dari Rp2.138,51 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.657,71 miliar pada tahun 2024. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah Kabupaten Simalungun, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan dari Rp1.392,09 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.792,09 miliar pada tahun 2024. Sedangkan pada belanja modal mengalami peningkatan signifikan dari Rp103,88 miliar pada tahun 2020 menjadi puncaknya Rp456,89 miliar pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun menjadi Rp342,56 miliar pada tahun 2024. Sedangkan belanja tidak terduga mengalami fluktuasi yang cenderung menurun yaitu dari Rp226,59 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp20,84 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, belanja transfer kepada pihak ketiga seperti desa atau lembaga lain juga menunjukkan adanya peningkatan dari Rp415,95 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp502,21 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini positif karena menunjukkan adanya distribusi fiskal yang lebih besar kepada wilayah dan unit pelaksana di bawah pemerintah Kabupaten Simalungun.

Tabel II.58 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 (%)

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**Belanja Operasi**	65,10	68,28	64,72	61,49	67,43
2	Belanja Pegawai	64,87	65,08	61,14	56,90	53,85
3	Belanja Barang dan Jasa	18,59	25,69	36,27	38,60	40,46
4	Belanja Bunga	0,32	0,44	0,00		
5	Belanja Subsidi	0,00		0,09		
6	Belanja Hibah	16,21	8,11	2,47	4,47	5,67
7	Belanja Bantuan Sosial	0,01	0,67	0,02	0,03	0,03
8	**Belanja Modal**	4,86	10,50	15,74	18,53	12,89
9	Belanja Modal Tanah					
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,99	17,10	31,95	21,96	31,43
11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32,89	16,66	8,49	26,09	22,48
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	41,25	66,24	54,51	47,14	39,41
13	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,87		5,05	4,65	6,69
14	Belanja Modal Aset Lainnya				0,17	
15	**Belanja Tidak Terduga**	10,60	1,01	0,71	1,00	0,78
16	Belanja Tidak Terduga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**Transfer**	19,45	20,20	18,83	18,98	18,90
18	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,76				31,57
19	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	100,00				100,00
20	Transfer Bantuan Keuangan	99,24	100,00	100,00	100,00	68,43
21	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/Kelurahan	99,75	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,25				

Sumber : BPKPD Kabupaten Simalungun, 2025.

Proporsi belanja daerah Kabupaten Simalungun paling besar adalah belanja operasi yang bersumber dari belanja pegawai dengan capaian proporsi yang fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Proporsi terbesar pada urutan kedua adalah belanja barang dan jasa mencapai 38,60% di tahun 2023. Sedangkan rata-rata belanja terendah adalah belanja subsidi yang hanya muncul pada tahun 2022 sebesar 0,09%. Proporsi belanja yang cukup stabil terdapat pada pos belanja pegawai dan belanja barang jasa. Hal ini disebabkan kedua komponen tersebut merupakan beban wajib daerah yang harus terpenuhi untuk mendukung operasionalisasi kinerja pemerintah daerah. Sementara belanja lainnya, merupakan belanja yang sangat fluktuatif pengalokasian dan penyerapannya tergantung pada kebutuhan daerah. Seluruh komponen belanja daerah terbilang fluktuatif pengalokasian penyerapan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan prioritas belanja pengeluaran terutama jika dihubungkan dengan konteks pandemi COVID-19.

II.5.1.1.2.2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang realisasi pengeluaran pembiayaan dan dampaknya terhadap keberlanjutan keuangan daerah, perlu dipahami seberapa besar pengeluaran pemerintah yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi menggunakan surplus anggaran yang ada. Pengeluaran pembiayaan, bersama dengan belanja daerah, merupakan komponen penting dari pengeluaran daerah yang memengaruhi kondisi keuangan suatu wilayah. Dengan demikian, data realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Simalungun selama lima tahun terakhir dan pertumbuhannya menjadi landasan penting untuk mengevaluasi kesehatan keuangan daerah.

Tabel II.59 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**22,61**	**124,61**	**6,30**	**-**	**7,00**
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah			6,30		7,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22,61	114,65			
Pembayaran Pinjaman Daerah					
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					

Sumber: BPKPD Kabupaten Simalungun, 2025.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Simalungun menunjukkan tren fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Total pengeluaran pembiayaan daerah mengalami fluktusi pada periode 2020-2023. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 124,61 miliar rupiah, dengan sebelumnya hanya sebesar 22,61 miliar rupiah. Pengeluaran pembiayaan yang meningkat pada tahun 2021 ini mungkin berasal dari adanya pemulihan dari berbagai sektor ekonomi dari adanya pandemi COVID-19. Kemudian pengeluaran pembiayaan juga mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 7,00 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya tidak terdapat realisasinya.

II.5.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu daerah atau wilayah tertentu, seperti kabupaten, kota, atau provinsi. Dalam neraca daerah terdapat 3 komponen penting yang perlu dijadikan perhatian yaitu: (1) Aset, terbagi menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. (2) Kewajiban, terbagi menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, dan (3) Ekuitas

Tabel II.60 Neraca Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

NO	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**ASET**					
1.1	**ASET LANCAR**					
1.1.1	Kas di Kas Daerah	75.650.269.157,68	123.851.375.538,52	193.065.179.643,51	121.361.090.622,76	93.925.115.350,33
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0		21.499.500,00
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	58.260.561,00	1.265.303,00	0		
1.1.4	Kas di BLUD	6.606.170.661,80	16.458.434.106,80	6.001.742.077,80	2.176.784.657,80	1.759.322.567,80
1.1.5	Kas Dana BOS	7.505.839.048,85	2.310.783.240,13	704.982.570,53	474.612.477,58	681.861.814,00
1.1.6	Kas Lainnya	720.872.392,00	5.842.209,00	0		
1.1.7	Kas di Bendahara Pengeluaran BPJS	0	0	0		
1.1.8	Kas di Bendaha FKTP	21.230.409.276,56	15.585.089.358,24	6.838.291.842,00	6.983.003.348,18	6.198.076.101,32
	Kas Dana BOK Puskesmas					10.600.838.718,29
1.1.9	Piutang Pendapatan	159.965.742.977,40	147.215.471.631,40	107.319.592.637,40	205.995.015.461,40	214.307.355.166,78
1.1.10	Piutang Lainnya	1.187.777.906,00	0	0		88.500,00
1.1.11	Penyisihan Piutang	-61.148.891.086,24	-67.346.443.157,28	-74.800.303.507,04	(86.790.742.487,00)	(94.180.760.493,38)
1.1.12	Beban Dibayar Dimuka	0	0	0		
1.1.13	Persediaan	18.504.936.942,72	13.252.273.452,58	13.018.540.801,69	13.458.816.361,18	27.367.030.512,18
	JUMLAH ASET LANCAR	230.281.387.837,77	251.334.091.682,39	252.148.026.065,89	263.658.580.441,90	260.680.427.737,32
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	0	0	0		
1.2.1	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	-	-	-		
1.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	100.269.037.867,85	109.323.726.046,37	115.306.527.034,90	118.601.860.580,46	182.808.626.325,48
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	100.269.037.867,85	109.323.726.046,37	115.306.527.034,90	118.601.860.580,46	182.808.626.325,48
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	100.269.037.867,85	109.323.726.046,37	115.306.527.034,90	118.601.860.580,46	182.808.626.325,48
1.3	**ASET TETAP**	-	-	-		

NO	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.3.1	Tanah	579.755.559.382,00	580.252.359.382,00	626.714.390.150,22	622.587.837.550,75	621.374.326.091,75
1.3.2	Peralatan dan Mesin	436.856.210.109,28	503.587.739.073,13	596.578.471.373,20	665.444.756.259,67	753.301.063.371,43
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.371.758.400.167,95	1.441.097.352.142,45	1.469.650.113.326,06	1.588.142.789.368,34	1.738.151.762.397,24
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.019.213.051.310,06	2.113.734.790.284,53	2.242.516.207.228,22	2.404.821.046.396,87	2.574.560.214.876,80
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	240.009.526.903,24	259.483.932.343,24	255.077.283.790,52	232.316.502.348,51	71.696.212.129,22
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.909.670.255,50	17.341.271.333,48	15.327.647.170,57	21.899.315.079,75	3.423.164.880,40
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-1.615.156.895.647,74	-1.814.242.570.299,21	-2.453.145.606.812,09	(2.981.589.870.266,88)	(3.199.475.521.760,27)
	JUMLAH ASET TETAP	3.045.345.522.480,29	3.121.254.874.259,62	2.752.718.506.226,70	2.553.622.376.737,01	2.563.031.221.986,57
1.4	**DANA CADANGAN**					
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-		
1.5	**ASET LAINNYA**	-	-	-		
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	606.447.010,37	606.447.010,37	606.447.010,37	606.447.010,37	606.447.010,37
1.5.1.1	Akumulasi Penyisihan Tagihan Jangka Panjang	-606.447.010,37	-606.447.010,37	-606.447.010,37	-606.447.010,37	-606.447.010,37
1.5.1.2	Aset Tidak Berwujud	445.500.000,00	644.171.000,00	1.412.145.900,00	2.205.829.840,00	3.035.724.383,00
	Aset Lain-Lain	183.562.568.930,25	184.029.022.504,75	187.153.201.511,75	189.195.369.792,36	190.352.014.792,36
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-183.562.568.930,25	-183.815.022.504,75	-186.939.201.511,75	-188.981.369.792,36	-189.354.264.792,36
1.5,1.3	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-445.500.000,00	-445.500.000,00	-638.829.180,00	-942.431.660,00	-1.678.896.761,00
1.5.1.4	Utang PFK Bendahara	551.652.368,00	551.652.368,00	551.652.368,00	551.652.368,00	551.652.368,00
1.5.1.5	Akumulasi Penyisihan Utang PFK Bendahara	-551.652.368,00	-551.652.368,00	-551.652.368,00	-551.652.368,00	-551.652.368,00
1.5.1.6	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	15.435.520,00	15.435.520,00	15.435.520,00	15.435.520,00	15.435.520,00
	Akumulasi Penyisihan Tagihan Piutang Penjualan	-15.435.520,00	-15.435.520,00	-15.435.520,00	-15.435.520,00	-15.435.520,00
1.5.2	Dana bergulir	296.800.000,00	296.800.000,00	296.800.000,00	296.800.000,00	296.800.000,00
	Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir	-296.800.000,00	-296.800.000,00	-296.800.000,00	-296.800.000,00	-296.800.000,00
1.5.3	Piutang Corporate Farming	1.300.746.200,00	1.300.746.200,00	1.300.746.200,00	1.300.746.200,00	1.300.746.200,00

NO	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Akumulasi Penyisihan Corporate Farming	-1.300.746.200,00	-1.300.746.200,00	-1.300.746.200,00	-1.300.746.200,00	-1.300.746.200,00
1.5.4	Piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah Macet	532.992.916,00	532.992.916,00	532.992.916,00	532.992.916,00	532.992.916,00
	Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah Macet	-532.992.916,00	-532.992.916,00	-532.992.916,00	-532.992.916,00	-532.992.916,00
1.5.5	Pajak yang Tidak Disetor	890.390.066,00	890.390.066,00	890.390.066,00	890.390.066,00	890.390.066,00
	Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak yang Tidak Disetor	-890.390.066,00	-890.390.066,00	-890.390.066,00	-890.390.066,00	-890.390.066,00
1.5.6	Aset yang Dikerjasamakan (Gedung)	9.047.615.000,00	9.047.615.000,00	9.047.615.000,00	9.047.615.000,00	9.047.615.000,00
	Akumulasi Penyusutan	-9.047.615.000,00	-9.047.615.000,00	-9.047.615.000,00	-9.047.615.000,00	-9.047.615.000,00
1.5.7	Aset yang dikerjasamakan (tanah)	**56.749.884.220,00**	**56.749.884.220,00**	**56.749.884.220,00**	**56.749.884.220,00**	**56.749.884.220,00**
	Kas yang Dibatasi Penggunaannya				**10.337.296.000,00**	**955.020.000,00**
	Jumlah Aset Lainnya	56.749.884.220,00	57.162.555.220,00	57.737.200.940,00	68.564.578.400,00	60.059.481.842,00
	JUMLAH ASET	3.432.645.832.405,91	3.539.075.247.208,38	3.177.910.260.267,49	3.004.447.396.159,37	3.066.579.757.891,37
2	**KEWAJIBAN**	-	-	-		
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**-**	**-**	**-**		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	**1.908.650.298,00**	**5.842.209,00**	**-**		
2.1.2	Utang Bunga	6.209.405.559,00	-	-		
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	114.652.955.273,00	-	-		
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	647.000.000,00	642.000.000,00	642.000.000,00	638.666.666,67	12.604.923.611,09
2.1.5	Utang Beban	40.362.095.047,36	10.254.147.522,18	28.645.094.682,21	43.452.481.583,69	45.217.203.001,36
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	47.630.000,00	-	-	1.462.299.050,00	2.614.362.270,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	163.827.736.177,36	10.901.989.731,18	29.287.094.682,21	45.553.447.300,36	60.436.488.882,45
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	-	-	-	-	-
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.2.3	Pendapatan Diterima Dimuka	14.032.611.111,10	13.393.944.444,43	12.751.944.444,43	12.116.611.111,09	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	14.032.611.111,10	13.393.944.444,43	12.751.944.444,43	12.116.611.111,09	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	**177.860.347.288,46**	**24.295.934.175,61**	**42.039.039.126,64**	**57.670.058.411,45**	**60.436.488.882,45**
2.3	**EKUITAS**	**3.254.785.485.117,18**	**3.514.779.313.032,77**	**3.135.871.221.140,85**	**2.946.777.337.747,92**	**3.006.143.269.008,92**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3.432.645.832.405,64**	**3.539.075.247.208,38**	**3.177.910.260.267,49**	**3.004.447.396.159,37**	**3.066.579.757.891,37**

Sumber : BPKPD Kabupaten Simalungun, 2025

Neraca daerah mencakup komponen aset yang akan mencerminkan semua sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun yang diharapkan memberikan manfaat atau penghasilan di masa depan. Sesuai neraca daerah yang tercatat pada **Tabel II.60**, total aset lancar Kabupaten Simalungun mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total aset lancar mencapai sekitar Rp. 230,28 miliar, kemudian naik menjadi sekitar Rp. 251,33 miliar pada tahun 2021, dan Rp. 252,15 miliar pada tahun 2022. Pada tahun selanjutnya yaitu 2023, total aset lancar tetap mengalami peningkatan menjadi Rp. 263,66 miliar. Sementara investasi jangka panjang juga menunjukkan fluktuasi, meskipun dengan tren yang lebih stabil dibandingkan aset lancar. Total investasi jangka panjang mencapai sekitar Rp. 100,27 miliar pada tahun 2020, dan menunjukkan peningkatan pada tiga tahun selanjutnya dan puncaknya mencapai Rp. 182,81 miliar pada tahun 2024.

Di sisi lain, kewajiban mencerminkan kewajiban finansial atau tanggung jawab pemerintah Kabupaten Simalungun yang timbul dari transaksi masa lalu yang diharapkan akan memerlukan pengeluaran sumber daya ekonomi di masa depan. Jumlah kewajiban pemerintah Kabupaten Simalungun cukup tinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 177,86 miliar dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 hingga mencapai Rp. 24,30 miliar. Pada dua tahun selanjutnya, jumlah kewajiban pemerintah Kabupaten Simalungun mengalami kenaikan jumlah yang sangat signifikan menjadi Rp. 42,04 miliar pada tahun 2022, dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 60,44 miliar pada tahun 2024.

Sementara itu, ekuitas dikenal sebagai modal pemerintah Kabupaten Simalungun yang merupakan bagian dari aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Simalungun setelah dikurangi seluruh kewajibannya. Ekuitas dapat mencerminkan kepemilikan terhadap aset bersih Kabupaten Simalungun setelah memenuhi kewajibannya. Ekuitas Kabupaten Simalungun sempat mengalami peningkatan perlahan dari tahun 2020 hingga 2021. Total ekuitas mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu Rp. 3.254,79 miliar menjadi Rp. 3.514,78 miliar pada tahun 2021. Ekuitas mengalami penurunan pada dua tahun selanjutnya yaitu tahun 2022 dan 2023 dengan masing-masing angka sebesar Rp. 3.135,87 miliar dan Rp. 2.946,78 miliar. Kemudian di tahun 2024 jumlah ekuitas kembali mengalami sedikit peningkatan yaitu menjadi sebesar Rp. 3.006,14 miliar.

II.5.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan Pengelolaan Keuangan untuk tahun 2019 hingga tahun 2024 diuraikan dalam pembahasan Proporsi Penggunaan Anggaran, sehingga dapat teridentifikasi proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Adapun

Analisis Pembiayaan dijelaskan pada analisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

II.5.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menggunakan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Simalungun akan memberikan gambaran mengenai seberapa besar proporsi belanja yang digunakan untuk memenuhi kebuthan administratif dan operasional dibandingkan dengan total pengeluaran keseluahan yang mencakup belanja dan pembiayaan. Persentase Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibagi Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) memberikan gambaran tentang seberapa besar proporsi belanja yang digunakan untuk kebutuhan administratif dan operasional, dibandingkan dengan total pengeluaran keseluruhan yang mencakup belanja dan pembiayaan.

Tabel II.61 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Juta Rupiah)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Juta Rupiah)	Prosentase (%)
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2020	903.065	1.414.700	63,83
2	Tahun anggaran 2021	915.525	1.406.668	65,08
3	Tahun anggaran 2022	900.949	1.473.517	61,14
4	Tahun anggaran 2023	862.658	1.516.114	56,90
5	Tahun anggaran 2024	964.985	1.799.094	53,64

Sumber: BPKPD Kabupaten Simalungun, 2025.

Tabel II.61 menunjukkan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Simalungun dari tahun 2020 hingga 2024. Total belanja untuk kebutuhan aparatur mengalami fluktuasi, dengan jumlah tertinggi sebesar 964.985 juta rupiah pada tahun 2024 dan terendah sebesar 862.658 rupiah pada tahun 2023. Total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) juga bervariasi, mencapai puncaknya sebesar 1.799.094 juta rupiah pada tahun 2024.

Belanja untuk kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2020, proporsi ini mencapai 63,83% dan sempat meningkat di tahun 2021 mencapai 65,08%. Namun, persentase mulai mengalami penurunan di tahun 2022 hingga mencapai 53,64% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya pengalihan fokus anggaran dari belanja aparatur ke sektor lain, mungkin hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta merespon kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik

yang lebih luas. Penurunan proporsi belanja aparatur ini dapat dilihat sebagai langkah positif menuju optimalisasi anggaran dan pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam memenuhi berbagai kebutuhan kota.

Di sisi lain, data hasil Indeks Pengelolaan keuangan Daerah pada tahun 2021 berada pada indeks total sebesar 36,5552 namun hanya meraih Nilai C, lalu meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 56,702 dengan tetap berada pada Nilai C. Pemantauan proporsi penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara efisien dan seimbang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan organisasi atau pemerintah daerah. Hal ini juga membantu dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan anggaran dan kebijakan belanja.

II.5.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan dilakukan untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit belanja dalam penganggaran pada tahun sebelumnya. Adapun pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Tabel II.62 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Simalungun Tahun 2020 – 2024 (Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	2.175,72	2.230,85	2.331,76	2.390,18	2.646,96
	Penerimaan Pembiayaan	96,45	112,03	157,92	206,42	130,94
2	Dikurangi Realisasi :					
3	Belanja	2.138,51	2.060,06	2.276,77	2.465,60	2.657,71
	Pengeluaran Pembiayaan	22,61	124,61	6,30	0,00	7,00
	Defisit/Surplus Riil	111,05	158,21	206,61	131,00	113,19

Sumber: BPKPD Kabupaten Simalungun, 2025.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan Kabupaten Simalungun periode 2020 hingga 2024, menunjukkan tren fluktuatif yang mencerminkan dinamika kemampuan fiskal daerah dalam menyeimbangkan antara pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Pada tahun 2020, tercatat surplus anggaran sebesar Rp111,05 miliar yang meningkat menjadi Rp158,21 miliar pada tahun 2021. Kenaikan ini didorong oleh efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan pembiayaan di tengah kondisi pandemi. Selanjutnya, pada tahun 2022, sisa lebih pembiayaan mengalami lonjakan signifikan menjadi Rp206,61 miliar seiring peningkatan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan yang cukup besar, meskipun realisasi belanja juga meningkat. Namun, pada tahun 2023, surplus mengalami penurunan menjadi Rp131,00 miliar, diikuti penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi Rp113,19 miliar. Penurunan sisa lebih anggaran tersebut disebabkan oleh meningkatnya tekanan belanja untuk mendukung program prioritas dan layanan publik strategis yang harus diakomodasi oleh pemerintah daerah. Fluktuasi defisit dan surplus ini memberikan dampak langsung terhadap ruang fiskal

daerah, di mana surplus anggaran yang menurun berpotensi membatasi fleksibilitas pemerintah dalam membiayai program pembangunan di tahun berikutnya, serta menuntut perencanaan anggaran yang lebih cermat, adaptif, dan berorientasi pada penguatan keseimbangan fiskal daerah secara berkelanjutan.

Komposisi penutup defisit riil anggaran mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Piutang Daerah.

Tabel II.63 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Simalungun Tahun 2022 - 2024

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	158.206.947.546,69	206.610.196.133,84	130.995.491.106,32
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Penyertaan Modal dari PDAM	0,00	0,00	0,00
7	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
8	Pembayaran BPJS Kesehatan dari Rumah Sakit Umum	0,00	0,00	0,00
9	Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
10	Total Komposisi Penutup Defisit	0,00	157.922.807.859,46	206.416.516.108,33

Sumber: BPKPD Kabupaten Simalungun, 2025.

Tabel II.63 menggambarkan komposisi penutup defisit keuangan daerah untuk tahun anggaran 2022 hingga 2024. Pada pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), terjadi peningkatan signifikan, di mana pada tahun 2022 SiLPA tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp158,21 miliar, dan pada tahun 2023 naik menjadi Rp206,61 miliar. Pada tahun 2024 SiLPA tahun sebelumnya menunjukkan capaian yang menurun menjadi Rp130,,99 miliar rupiah.

Dengan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan ini, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangannya untuk mendukung berbagai program pembangunan serta kegiatan operasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan jumlah saldo anggaran yang tersisa dari tahun sebelumnya setelah semua pengeluaran dan penerimaan telah dihitung. Pelampauan penerimaan PAD merujuk pada jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang melebihi target yang telah ditetapkan. Begitu juga, pelampauan penerimaan dana

perimbangan menggambarkan situasi di mana pendapatan daerah dari dana perimbangan melebihi proyeksi yang telah disusun. Kemudian, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah merujuk pada jumlah penerimaan daerah dari sumber-sumber lain yang sah, seperti bunga bank atau pendapatan dari kegiatan layanan umum, yang melebihi proyeksi yang telah ditetapkan. Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya adalah saldo belanja yang tersisa setelah semua pengeluaran telah dihitung, termasuk situasi di mana belanja yang direncanakan ternyata lebih kecil dari yang direalisasikan. Selanjutnya, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan hingga akhir tahun menggambarkan jumlah utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga pada akhir tahun anggaran yang belum dilunasi. Terakhir, kegiatan lanjutan merujuk pada program atau proyek yang masih berlanjut hingga akhir tahun anggaran dan membutuhkan pendanaan tambahan atau pengeluaran lanjutan.

Tabel II.64 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Simalungun Tahun 2022 - 2024

No	Uraian	Tahun					
		2022		2023		2024**	
		Rp	Persen dari SiLPA	Rp	Persen dari SiLPA	Rp	Persen dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	206.610.196.133,84		130.995.491.106,32		113.186.714.051,74	
1	Pelampauan penerimaan PAD	-45.707.881.513,14	-22,12	-71.646.840.861,88	-54,69	0,00	0,00
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-54.076.315.766,00	-26,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-4.059.100.983,00	-1,96	20.845.849.443,00	15,91	0,00	0,00
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	206.610.196.133,84		130.995.491.106,32		0,00	0,00
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKPD Kabupaten Simalungun, 2025.

Realisasi sisa anggaran menunjukkan efisiensi anggaran sebelumnya. Pelampauan pendapatan menunjukkan potensi kelebihan dana untuk program pemerintah. Sisa penghematan belanja bisa indikasi efisiensi, namun juga perlu perhatian jika mengganggu pembangunan. Kewajiban yang belum terselesaikan menyoroti utang yang harus diperhatikan. Informasi tentang kegiatan lanjutan membantu alokasi dana lebih

bijaksana. Dengan pemahaman ini, pemerintah daerah dapat mengelola keuangan lebih baik, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas.

II.5.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan bagian penting dari RPJMD yang merinci sumber dan alokasi dana untuk membiayai program dan aktivitas pembangunan daerah. Kerangka ini akan menjamin bahwa setiap rencana dalam RPJMD mendapat dukungan finansial yang cukup dan masuk akal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik secara efektif dan efisien demi mencapai sasaran pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan data tersebut melalui keterbukaan dalam pengelolaan anggaran. Analisis kerangka pendanaan mencakup tiga aspek yaitu evaluasi kondisi makro Kabupaten Simalungun, perkiraan pendapatan dan pengeluaran daerah untuk periode 2025-2029, serta perhitungan kerangka pendanaan itu sendiri.

II.5.3.1. Analisis Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Simalungun

Kerangka pendanaan digunakan untuk analisa keuangan yang menjadi sumber pengoperasionalan pelaksanaan ekonomi daerah. Penyusunan kerangka pendanaan harus memperhatikan keadaan makro ekonomi Kabupaten Simalungun agar anggaran dapat terserap dengan efektif dan berkontribusi penuh dalam memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Kabupaten Simalungun.

II.5.3.1.1. Stabilitas Makro Ekonomi Kabupaten Simalungun

Stabilitas ekonomi adalah tidak adanya fluktuasi berlebihan dalam ekonomi makro. Perekonomian yang stabil ditandai dengan pertumbuhan output yang cukup konstan dan inflasi yang rendah dan stabil. Variabel utama sebagai pengukur keberhasilan perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukan oleh perubahan output daerah. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa atau sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto harga konstan (riil) atau pendapatan output perkapita.

Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan sebuah fenomena moneter dalam suatu negara dimana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Pemeliharaan stabilitas harga terus menjadi tujuan utama dari kebijakan makro ekonomi. Inflasi dipandang sebagai salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inflasi disebut juga sebagai barometer kesehatan perekonomian, sesuai teori Philips bahwa inflasi dapat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

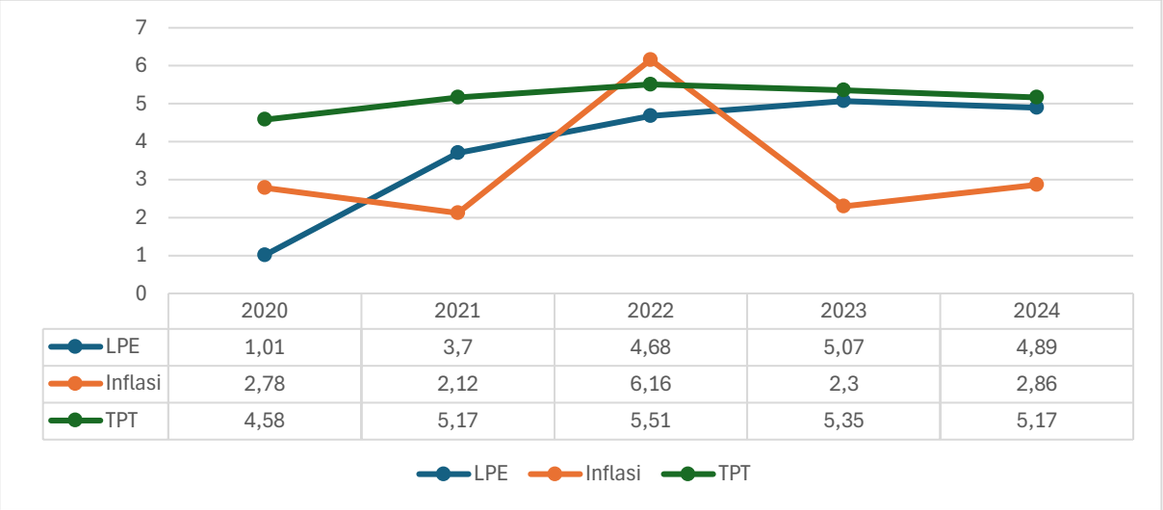

	2020	2021	2022	2023	2024
LPE	1,01	3,7	4,68	5,07	4,89
Inflasi	2,78	2,12	6,16	2,3	2,86
TPT	4,58	5,17	5,51	5,35	5,17

Gambar II.38 Indikator Stabilitas Makroekonomi Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2025; BPS Kota Pematangsiantar, 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa kondisi makro ekonomi Kabupaten Simalungun pada tahun 2020-2024 menunjukkan dinamika yang menarik. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 cukup berdampak, terlihat dari peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan masing-masing nilai sebesar 4,58% dan 4,17% dan kontraksi pertumbuhan ekonomi paling rendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,01%. Di sisi lain, Kabupaten Simalungun menunjukkan pemulihan kondisi ekonomi yang belum optimal. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik secara perlahan hingga mencapai 5.35% pada tahun 2023, sementara pertumbuhan ekonomi bangkit menjadi 5,07%.

Sedangkan untuk Inflasi Kabupaten Simalungun mengacu pada inflasi Kota Pematangsiantar. Hal ini disebabkan karena Pematangsiantar merupakan kota terdekat sekaligus pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Simalungun. Selain itu, Kota Pematangsiantar juga ditetapkan sebagai salah satu kota Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga data inflasi resmi dihitung dan tersedia di kota tersebut. Belum adanya penghitungan inflasi langsung di wilayah Kabupaten Simalungun, maka data inflasi dari Kota Pematangsiantar digunakan sebagai rujukan karena pola konsumsi masyarakat, pergerakan harga barang dan jasa, serta keterkaitan aktivitas ekonomi di kedua wilayah tersebut saling mempengaruhi. Dengan demikian, inflasi Pematangsiantar dianggap paling representatif untuk menggambarkan kondisi harga-harga di Kabupaten Simalungun. Inflasi Kota Pematangsiantar sempat mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 5,51%. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya pemulihan permintaaan rantai pasokan global, namun kembali terkendali di angka 5,35% pada tahun 2023 dan turun kembali di tahun 2024 menjadi sebesar 5,17%.

Tabel II.65. Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Simalungun, 2020-2024

Jenis Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Simalungun					
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,05	1,86	2,86	4,58	5,74
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-0,94	-4,11	1,41	8,45	11,95
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-7,65	1,66	2,99	7,7	2,37
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,62	3,12	3,55	0,9	5,49
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB Kabupaten Simalungun	**1,01**	**3,7**	**4,68**	**5,07**	**4,89**
Provinsi Sumatera Utara					
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-2,83	2,16	4,55	5,59	5,43
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-4,02	-2,59	5,47	9,27	11,79
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-1,69	3,46	-3,34	3,98	4,01
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,17	3,46	3,83	4,48	4,95
Perubahan Inventori	29,46	-7,09	10,11	7,79	-23,78
Net Ekspor Barang dan Jasa	-14,44	-105,47	-1522,84	158,85	8,71
PDRB Provinsi Sumatera Utara	**-1,07**	**2,61**	**4,73**	**5,01**	**5,03**

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2025.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Simalungun mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 1,01%. Hal ini menyebabkan perekonomian Kabupaten Simalungun pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan karena perkembangan ekonomi Kabupaten Simalungun mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengurangi rantai penyebaran pandemi COVID-19. Melihat kontraksi pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian. Pemerintah daerah berperan strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya saat pandemi terjadi. Apabila didasarkan pada PDRB pengeluaran, maka laju peningkatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi yang didominasi oleh perubahan inventori, Net Ekspor Impor, dan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Namun, untuk data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Simalungun menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini dapat

disebabkan oleh berkurangnya investasi dan proyek infrastruktur, atau kebijakan ekonomi yang tidak mendukung. Selain itu, tidak ada data untuk net ekspor barang dan jasa serta perubahan inventori, mungkin karena kurangnya pencatatan atau kontribusi yang tidak signifikan.

Sedangkan jika dilihat secara lebih luas, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Simalungun yaitu sebesar -1,07. Namun, angka kontraksi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai -2,07%. Dari sisi pengeluaran, hal ini disebabkan oleh semua komponen pengeluaran yang juga mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya. Sama halnya dengan Kabupaten Simalungun, kontraksi ini disebabkan oleh merebaknya pandemi secara masif pada tahun 2020, yang mendorong pemerintah untuk menyesuaikan anggaran berdasarkan urgensi pada saat itu, yaitu bidang kesehatan. Hal ini kemudian juga berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) dan pengeluaran Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), yang masing-masing mengalami kontaksi sebesar ke -2,83% dan -4,02%. Pada tahun 2020 ke 2021 juga terjadi penurunan yang signifikan pada komponen perubahan inventori, yaitu dari sebesar 29,46% turun menjadi -7,09%. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan pada proses distribusi logistik atau pemasaran, utamanya terjadi karena pada tahun tersebut mobilitas segala hal mulai dibatasi melalui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

II.5.3.1.2. Agregasi Stabilitas Makro Ekonomi Kabupaten Simalungun

Stabilitas makro ekonomi dapat dianalisa dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun selama periode tahun 2018 hingga tahun 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan berbagai variasi dalam pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Kabupaten Simalungun mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi selama enam tahun tersebut. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun mengalami kontraksi sebesar -0,27% karena adanya pandemi COVID-19 yang memberi dampak begitu besar terhadap berbagai sektor ekonomi, dan menghambat aktivitas bisnis serta investasi. Kemudian, pada tiga tahun berikutnya laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, menunjukkan adanya pemulihan dan kebangkitan sektor-sektor utama ekonomi yang sebelumnya terdampak pandemi.

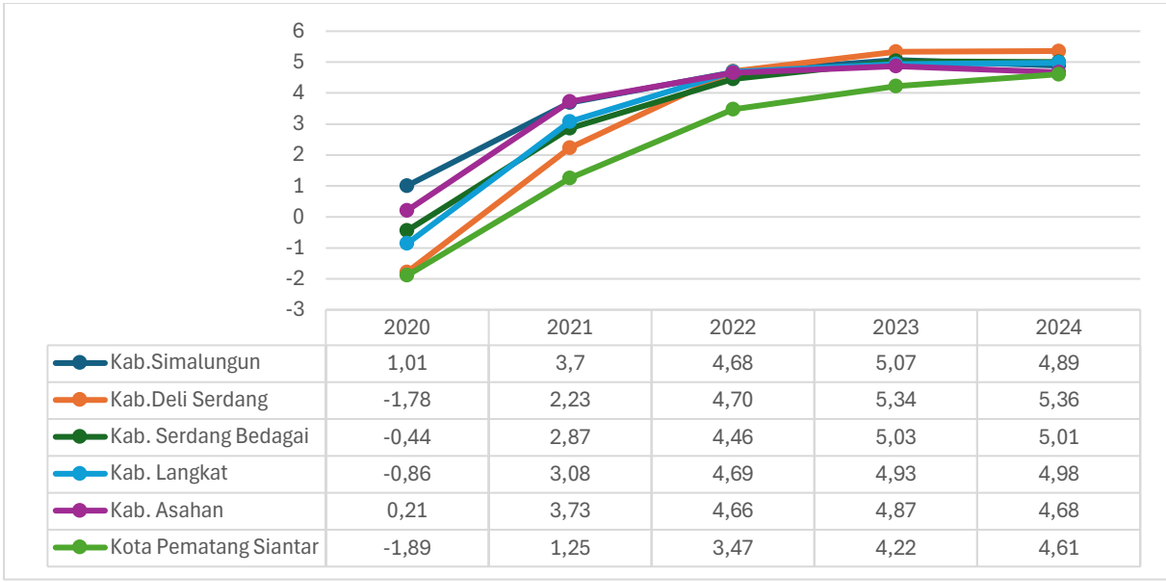

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab.Simalungun	1,01	3,7	4,68	5,07	4,89
Kab.Deli Serdang	-1,78	2,23	4,70	5,34	5,36
Kab. Serdang Bedagai	-0,44	2,87	4,46	5,03	5,01
Kab. Langkat	-0,86	3,08	4,69	4,93	4,98
Kab. Asahan	0,21	3,73	4,66	4,87	4,68
Kota Pematang Siantar	-1,89	1,25	3,47	4,22	4,61

Gambar II.299 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025.

Tingkat pengangguran terbuka digunakan untuk memberikan gambaran tentang serapan tenaga kerja dalam perekonomian. Kabupaten Simalungun memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tangguh dibandingkan kabupaten-kabupaten lain seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Asahan, dan Pematang Siantar. Namun, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Simalungun terbilang tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi bisa menandakan adanya masalah ekonomi seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, atau ketidakcocokan keterampilan antara pekerja dan lapangan kerja yang tersedia.

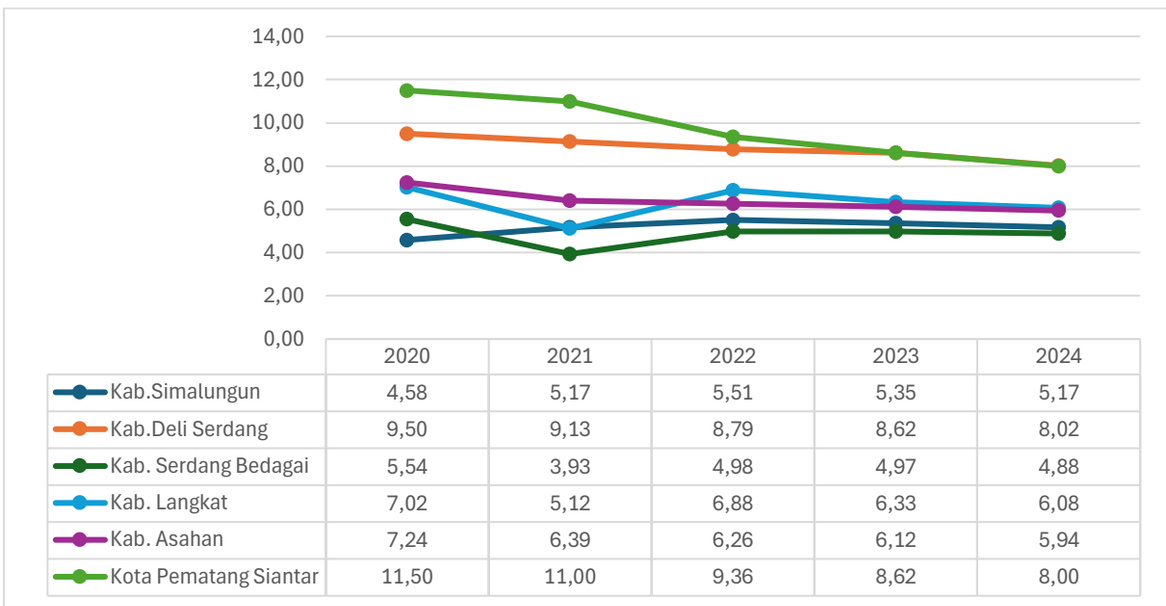

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab.Simalungun	4,58	5,17	5,51	5,35	5,17
Kab.Deli Serdang	9,50	9,13	8,79	8,62	8,02
Kab. Serdang Bedagai	5,54	3,93	4,98	4,97	4,88
Kab. Langkat	7,02	5,12	6,88	6,33	6,08
Kab. Asahan	7,24	6,39	6,26	6,12	5,94
Kota Pematang Siantar	11,50	11,00	9,36	8,62	8,00

Gambar II.40 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Simalungun diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2024

Berdasarkan data pada **Gambar II.29** dan **Gambar II.,** dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di keenam kota tersebut. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun mengalami kontraksi sebesar 1,01% dan membuat angka TPT mencapai sebesar 4,58%. Hal yang sama terjadi pada kabupaten lainnya, seperti pada Kabupaten Deli Serdang yang laju pertubuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -1,78% dengan angka TPT yang mencapai sebesar 9,50%. Selanjutnya, laju pertumbuhan ekonomi pada kabupatenlainnya dan Kota Pematangsiantar mengalami pertumbuhan positif kembali pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,7% untuk Kabupaten Simalungun, 2,23% untuk Kabupaten Deli Serdang, 2,87% untuk Kabupaten Serdang Bedagai, 3,08% untuk Kabupaten Langkat, 3,73% untuk Kabupaten Asahan, dan 1,25% untuk Kota Pematangsiantar. Angka pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perubahan positif yang sejalan dengan angka TPT pada tahun 2021, karena pada keenam kabupaten tersebut, angka TPT mengalami sedikit penurunan walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu menjadi 4,17% untuk Kabupaten Simalungun, 9,13% untuk Kabupaten Deli Serdang, 3,93% untuk Kabupaten Serdang Bedagai, 5,12% untuk Kabupaten Langkat, 6,39% untuk Kabupaten Asahan, dan 11% untuk Kota Pematangsiantar.

Kemudian pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun kembali meningkat menjadi 4,68%, Kabupaten Deli Serdang menjadi 4,70%, Kabupaten Serdang Bedagai menjadi 4,46%, Kabupaten Langkat menjadi 4,69%, Kabupaten Asahan menjadi 4,66% dan Kota Pematangsiantar menjadi 3,47%. Sedangkan untuk angka TPT ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Dari dinamika tersebut ditunjukkan bahwa kondisi perekonomian cukup mempengaruhi banyaknya pengangguran di Kabupaten Simalungun, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Asahan, dan Kota Pematangsiantar memiliki pola yang saling berhubungan yaitu pada saat perekonomian mengalami penurunan maka angka TPT akan meningkat karena penyerapan tenaga kerja tidak terserap dengan baik, pengecualian pada tahun 2021 karena pada tahun tersebut dampak pandemi Covid-19 masih cukup terasa dan belum sepenuhnya pulih. Sehingga menjaga kestabilan kegiatan perekonomian menjadi sangat penting karena banyak tenaga kerja yang berpartisipasi di dalam kegiatannya.

II.5.3.1.3. Analisis Kinerja Ekonomi

Kabupaten Simalungun termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara diantara tiga puluh dua (32) Kabupaten/Kota lainnya.

Tabel II.66 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Simalungun	4,89	56,00
Deli Serdang	5,36	73,93
Serdang Bedagai	5,01	60,74
Langkat	4,98	57,86
Asahan	4,68	70,61
Toba	4,84	47,45
Samosir	5,02	42,63
Batubara	4,12	108,18
Kota Pematang Siantar	4,61	62,62
Rata - rata	**4,83**	**64,45**

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Utara, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun menduduki peringkat kelima diantara Kabupaten lainnya dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di Kota Pematang Siantar dengan total PDRB per kapita pada tahun 2024 mencapai sebesar 56,00 juta rupiah.

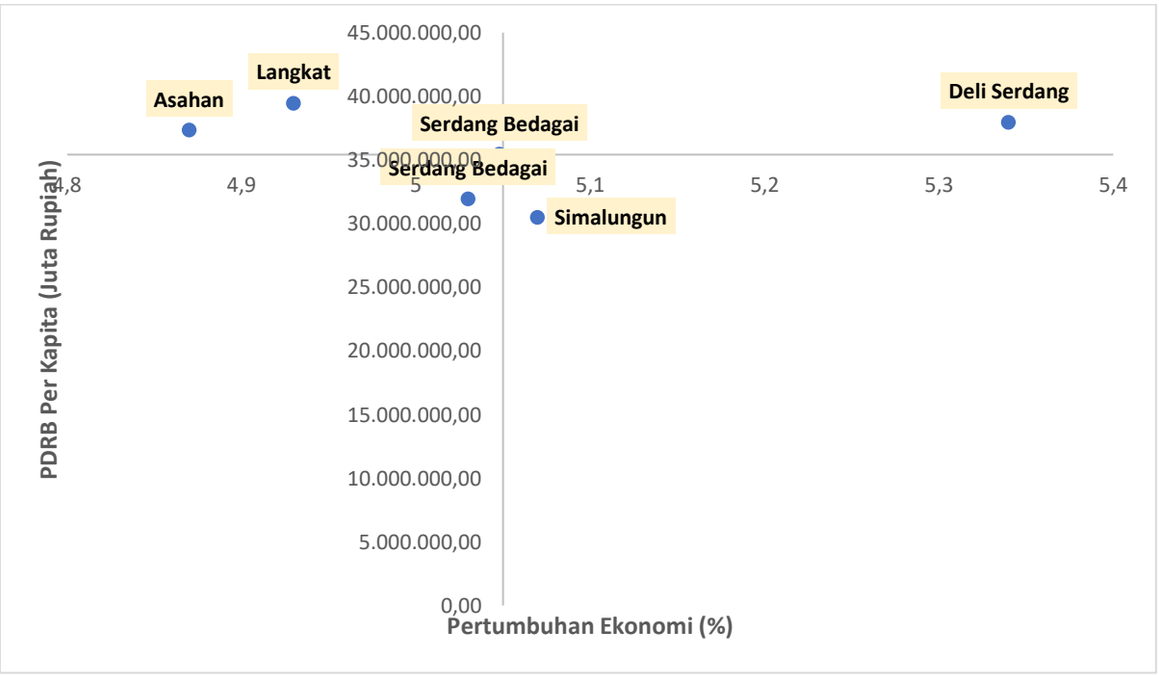

Gambar II.41 Diagram Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Simalungun, 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utarai, 2023

Kabupaten Simalungun berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan meskipun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah tersebut, tingkatnya masih belum mencapai puncak. Hasil analisis *Location Quotient* (LQ) menegaskan bahwa Kabupaten Simalungun berada dalam kuadran III dengan PDRB per kapita dan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata, sementara kabupaten/kota lain

memiliki posisi yang bervariasi dengan Kabupaten Langkat sebagai pemimpin ekonomi diantara Kabupaten/Kota tersebut. Kesimpulannya, meskipun Kabupaten Simalungun menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, masih ada potensi untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dan peran lebih dominan sebagai pemimpin ekonomi di wilayah tersebut.

II.5.3.1.4. Analisis Sektor Basis dan Non Basis

Dalam perhitungan ekonomi basis dalam ekonomi regional, penentuan sektor basis dan non-basis dilakukan dengan membandingkan pendapatan atau tenaga kerja di sektor tertentu antara wilayah bawah dan wilayah atas. Jika nilai *Location Quotient* (LQ) lebih besar dari satu, menunjukkan bahwa sektor tersebut lebih berorientasi pada ekspor dan memiliki pangsa pendapatan atau tenaga kerja yang lebih besar di wilayah bawah dibandingkan wilayah atasnya. Sebaliknya, jika nilai LQ < 1, sektor tersebut diklasifikasikan sebagai sektor non-basis. Hal ini memungkinkan untuk menentukan arah dan pertumbuhan suatu wilayah berdasarkan ekspor wilayah tersebut. Hasil perhitungan LQ menggunakan data PDRB tanpa migas tahun 2023.

Adapun sektor-sektor yang dikelompokan pada analisis ini adalah Sektor A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor B Pertambangan dan Penggalian; Sektor C Industri Pengolahan; Sektor D Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor F Konstruksi; Sektor G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor H Transportasi dan Pergudangan; Sektor I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor J Informasi dan Komunikasi; Sektor K Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor L Real Estate; Sektor M, N Jasa Perusahaan; Sektor O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor P Jasa Pendidikan; Sektor Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Sektor R, S, T, U Jasa lainnya.

Tabel II.67. LQ Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Menurut 17 Sektor Lapangan Usaha, 2023 (Tanpa Migas)

Kategori	Simalungun	Asahan	Deli Serdang	Serdang Bedagai	Langkat
A	2.31	1.58	0.47	1.75	1.75
B	0.18	0.15	0.65	0.77	7.96
C	0.54	0.06	1.68	1.00	0.77
D	0.59	0.68	1.15	0.86	1.69
E	0.80	0.55	0.46	0.13	0.41
F	0.66	0.47	1.23	0.71	0.60
G	0,73	0,93	0,97	0,83	0,51
H	0.36	0.77	1.93	0.17	0.44
I	0.36	0.34	1.20	1.18	0.90

Kategori	Simalungun	Asahan	Deli Serdang	Serdang Bedagai	Langkat
J	0.22	0.18	0.58	0.23	0.46
K	0.31	0.46	0.91	0.17	0.63
L	0.19	0.36	0.81	0.55	0.61
M,N	0,09	0.04	0.51	0.47	0.53
O	1.10	0.87	0.54	0.85	0.91
P	0.47	0.39	0.85	0.71	0.57
Q	0.38	0.61	1.02	0.90	0.50
R,S,T,U	0.19	1.02	0.51	0.89	0.36

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2024.

Analisis Kabupaten Simalungun dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain menunjukkan bahwa Kabupaten Simalungun memiliki keunggulan dalam beberapa sektor ekonomi tertentu. Kabupaten Simalungun menjadi basis untuk sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Air, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Perhitungan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Simalungun memiliki kekhasan ekonomi dalam sektor industri primer dan industri jasa.

Namun demikian, beberapa kabupaten lain juga memiliki keunggulan masing-masing. Sebagai contoh, Kabupaten Asahan menjadi basis untuk sektor Jasa Lainnya. Kabupaten Deli Serdang menjadi basis untuk sektor Perdagangan Listrik dan Gas. Kabupaten Serdang Bedagai menonjol dalam sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara Kabupaten Langkat menjadi basis untuk sektor Pertambangan dan Penggalian. Dapat disimpulkan bahwa meskipun Kabupaten Simalungun memiliki keunggulan dalam beberapa sektor khusus, keberagaman ekonomi di Provinsi Sumatera Utara memberikan potensi untuk pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi yang lebih luas di seluruh wilayah.

II.5.3.1.5. Pertumbuhan Sektoral (PS)

PS menggambarkan kontribusi sektor-sektor dalam pertumbuhan ekonomi. PS dipengaruhi oleh permintaan produk, ketersediaan input, kebijakan industri, dan struktur pasar. Analisa ini berguna untuk membantu dalam perencanaan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi regional. Apabila, PS > 0: pertumbuhan cepat sektor, PS < 0: pertumbuhan lambat sektor.

Tabel II.68 Pertumbuhan Sektoral (PS) dan Daya Saing (DS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Kategori	PS	DS				
		Simalungun	Asahan	Deli Serdang	Serdang Bedagai	Langkat
A	1,84	1,88	-9,49	-0,69	2,53	1,51
B	1,42	1,22	-0,04	-0,04	2,38	1,91
C	1,44	-0,34	0,09	-1,36	0,24	-0,45

Kategori	PS	DS				
		Simalungun	Asahan	Deli Serdang	Serdang Bedagai	Langkat
D	2,65	0.00	-0,15	0,05	2,56	0,92
E	1,96	0.03	-2,81	-1,32	1,69	-3,27
F	-1,26	-1,05	0,07	-0,43	-2,70	1,35
G	-0,72	0,93	0,16	-0,91	-0,30	-0.91
H	-6,83	-2,22	-1,53	7,83	-4,90	-4,83
I	-4,50	-0,08	-1,41	-0,88	-2,33	-1,28
J	-2,47	-0,06	-1,67	-0,97	1,98	-2,25
K	-0,45	-0,34	-0,19	-0,65	3,52	-1,25
L	1,67	-0,90	0,37	-0,61	1,38	-0,36
M,N	-1,50	-1,59	-1,49	-0,85	-1,47	-3,21
O	2,87	-1,82	-0,15	-0,41	-3,13	4,58
P	-2,11	-2,32	-0,67	-0,83	-1,34	-1,55
Q	-1,28	1,06	-0,90	0,02	-1,10	-0,31
R,S,T,U	-3,95	-1,95	-0,86	-2,23	-5,63	-1,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2024.

Dari 17 sektor hanya terdapat tujuh sektor yang mengalami pertumbuhan cepat yaitu sektor Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Real Estate, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan masing-masing nilai pertumbuhan sektoral di atas 1,00 poin. Sementara sebelas sektor lainnya mengalami pertumbuhan lambat di bawah 0,00 poin.

Dalam analisis ini, Kabupaten Simalungun memunculkan keunggulan daya saing dalam beberapa sektor kunci ekonomi, seperti Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas, dan Pengadaan Air, Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Analisa menunjukkan infrastruktur yang matang dan kelembagaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat di kabupaten tersebut.

Namun, beberapa sektor seperti Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Sektor R, S, T, U Jasa lainnya masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan daya saingnya. Sementara itu, beberapa Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Utara juga memiliki sektor-sektor yang muncul sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya, Kabupaten Asahan menonjol dalam sektor Real Estate. Kabupaten Deli Serdang memperlihatkan daya saing yang baik dalam sektor

Transportasi dang Pergudangan. Sementara Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Langkat masing-masing menonjol dalam sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan Jasa Pendidikan. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa Kabupaten Simalungun memiliki potensi untuk terus menjadi pusat ekonomi yang kuat dalam Provinsi Sumatera Utara, terutama dengan memperkuat daya saingnya dalam sektor-sektor kunci yang telah diidentifikasi.

II.5.3.1.6. Sektor Unggulan Kabupaten Simalungun

Pertumbuhan sektoral adalah peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi dalam sektor-sektor tertentu, seperti pertanian, industri, dan jasa, yang diukur melalui kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika perkembangan sektor-sektor tersebut dalam mendukung perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan daya saing merujuk pada kemampuan sektor-sektor ekonomi di daerah tersebut untuk tumbuh secara produktif dan berkelanjutan, serta bersaing dengan wilayah lain dalam menarik investasi, meningkatkan nilai tambah, dan memperluas pasar produk lokal. Daya saing yang tinggi akan tercermin dari kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kemampuan daerah menciptakan iklim usaha yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi.Kabupaten Simalungun menunjukkan sektor-sektor dengan pertumbuhan cepat dan daya saing wilayah yang baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Utara. Sektor-sektor seperti Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas, dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, merupakan sektor yang maju progresif. Namun, terdapat juga sektor-sektor dengan pertumbuhan lambat tetapi memiliki daya saing wilayah yang baik, seperti Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Di sisi lain, sektor-sektor seperti sektor Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, dan Jasa Lainnya, menunjukkan pertumbuhan yang lambat dan daya saing wilayah yang kurang baik di Kabupaten Simalungun.

Tabel II.69 Pertumbuhan Sektoral (PS) dan Daya Saing (DS) Kabupaten Simalungun Tahun 2018 - 2022

Sektor		PS	DS	Kuadran
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,84	1,88	I
B	Pertambangan dan Penggalian	1,42	1,22	I
C	Industri Pengolahan	1,44	-0,34	II
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,65	0.00	I
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,96	0.03	I
F	Konstruksi	-1,26	-1,05	III

Sektor		PS	DS	Kuadran
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,72	0,93	I
H	Transportasi dan Pergudangan	-6,83	-2,22	III
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,50	-0,08	III
J	Informasi dan Komunikasi	-2,47	-0,06	III
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,45	-0,34	III
L	Real Estate	1,67	-0,90	II
M,N	Jasa Perusahaan	-1,50	-1,59	III
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,87	-1,82	II
P	Jasa Pendidikan	-2,11	-2,32	III
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,28	1,06	IV
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-3,95	-1,95	III

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2024.

Pertumbuhan yang signifikan dalam sektor-sektor seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, menjadi katalis penting bagi perkembangan industri pengolahan. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor yang saling terkait. Misalnya, sektor transportasi dan pergudangan membutuhkan bahan baku dari industri pengolahan untuk operasional mereka, sementara pertumbuhan infrastruktur yang mendukung, seperti jaringan transportasi yang lebih baik, memberikan dorongan tambahan bagi industri pengolahan untuk mendistribusikan produk mereka secara lebih efisien. Selain itu, peningkatan konsumsi di sektor makanan dan minuman serta perdagangan besar dan eceran menghasilkan permintaan yang lebih tinggi untuk berbagai produk industri pengolahan. Dengan demikian, pertumbuhan di sektor-sektor yang disebutkan tidak hanya menciptakan permintaan langsung atas produk industri pengolahan, tetapi juga membuka peluang baru untuk ekspansi produksi, investasi, dan inovasi di seluruh rantai nilai.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), terdapat 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global, nasional, dan daerah, serta mempertimbangkan kebijakan yang ditetapkan pada awal masa RPJMD, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun serta tingkat inflasi tahun 2025 – 2029 diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel II.70 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Year-on-Year Kabupaten Simalungun Tahun 2025 – 2029

No	Uraian	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen YoY)	4,34 – 5,5	4,48 - 6,00	6,10 – 7,00	7,00 – 7,50	7,50 - 8,50
2	inflasi (Persen YoY)	4,19	6,81	5,25	7,86	6,30

Sumber : Hasil Analisis (2024)

Dalam melakukan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 sampai dengan 2029, digunakan asumsi proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun, pertumbuhan ekonomi diasumsikan terus tumbuh di atas 5%, dengan inflasi yang melebihi 4% *year-on-year* pada periode proyeksi 2025 - 2029. Capaian indikator ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang moderat dapat menjadi tanda ekonomi yang berkembang, tetapi juga memerlukan kebijakan yang tepat untuk melakukan stabilitas jangka panjang.
2. Asumsi proyeksi fiskal dilakukan berdasarkan *outlook market* global, nasional, dan lokal. Hal ini meliputi percepatan pemulihan dari COVID-19 melalui proyek-proyek strategis nasional yang akan meningkatkan investasi di Kabupaten Simalungun. Tahun 2027 diperkirakan akan terjadi pembangunan di Kabupaten Simalungun secara masif, sehingga diprediksi akan menyumbang pertumbuhan ekonomi mencapai 7,04%. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi kemungkinan juga berdampak pada tidak stabilnya laju inflasi, mempertimbangkan juga capaian inflasi Kabupaten Simalungun tahun 2022 yang mencapai 5,25%.

Terdapat tiga skenario yang digunakan dalam proses penyusunan proyeksi Pendapatan dan Belanja tahun 2025 sampai dengan 2029 untuk Kabupaten Simalungun. Ketiga skenario tersebut antara lain skenario pesismis, *business as usual*, dan optimis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Skenario pesimis, adalah skenario yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan tingkat inflasi yang tinggi sehingga akan berdampak pada tingkat pendapatan daerah yang lebih rendah dan belanja daerah yang bermasalah.

2. Skenario *business as usual*, yaitu skenario yang bersifat moderat dengan penyesuaian terhadap tren saat ini. Pada skenario ini, inflasi dianggap terkendali dan diikuti oleh belanja daerah yang relatif stabil.

3. Skenario optimis, merupakan skenario yang melihat pertumbuhan ekonomi maksimal diikuti inflasi yang terkendali dan proyek strategis yang berhasil dilaksanakan sehingga

dapat menghasilkan pendapatan daerah yang tinggi serta nilai belanja lebih besar untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik.

Ketiga skenario tersebut menunjukkan optimisme pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali diharapkan dapat menciptakan stabilitas makroekonomi yang kondusif untuk sarana investasi dan pembangunan berkelanjutan.

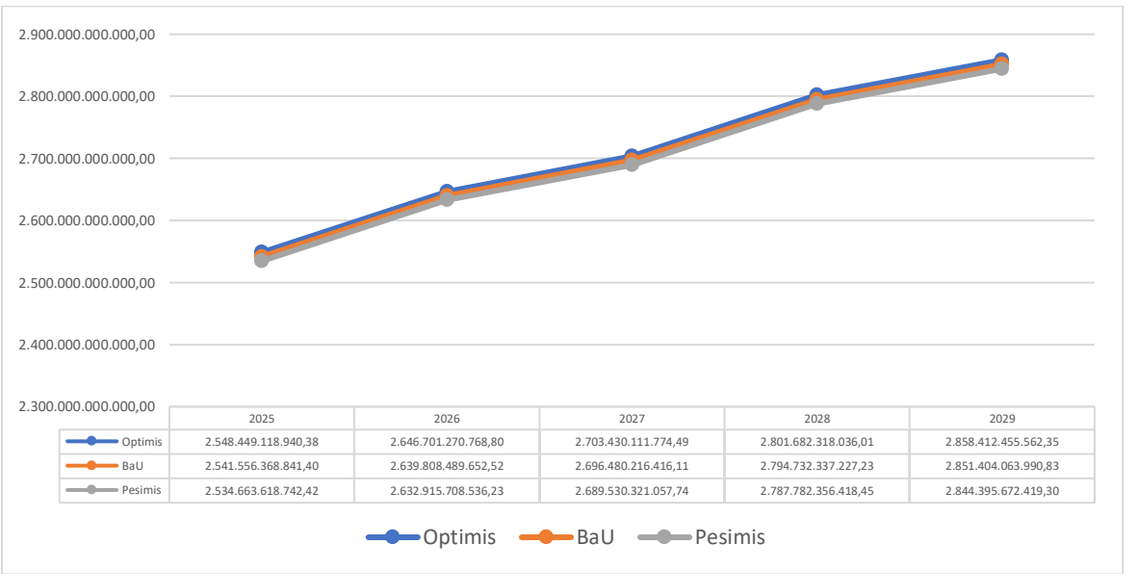

	2025	2026	2027	2028	2029
Optimis	2.548.449.118.940,38	2.646.701.270.768,80	2.703.430.111.774,49	2.801.682.318.036,01	2.858.412.455.562,35
BaU	2.541.556.368.841,40	2.639.808.489.652,52	2.696.480.216.416,11	2.794.732.337.227,23	2.851.404.063.990,83
Pesimis	2.534.663.618.742,42	2.632.915.708.536,23	2.689.530.321.057,74	2.787.782.356.418,45	2.844.395.672.419,30

Gambar II.42 Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota Simalungun Tahun 2025 – 2029
Sumber : Hasil Analisis (2024)

Skenario optimis pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp2.548.449.118.940,38 pada tahun 2025 menjadi Rp2.858.412.455.562,35 pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Simalungun akan diperkirakan mengalami pertumbuhan pendapatan daerah yang stabil dan positif dalam lima tahun ke depan. Hal yang sama juga diikuti oleh skenario BaU dimana proyeksi menunjukkan adanya pertumbuhan pendapatan daerah yang stabil dan positif dengan angka di tahun 2025 sebesar Rp2.541.556.368.841,40 menjadi Rp2.851.404.063.990,83 di tahun 2029. Skenario pesimis juga diproyeksikan mengalami kenaikan dari sebesar Rp2.534.663.618.742,42 pada tahun 2025 menjadi Rp2.844.395.672.419,30 pada tahun 2029. Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Simalungun ini mencerminkan adanya harapan yang optimis terhadap perkembangan ekonomi kabupaten, meskipun penting untuk mempertimbangkan skenario pesimis untuk perencanaan yang lebih hati-hati dan kesiapan untuk menghadapi ketidakpastian.

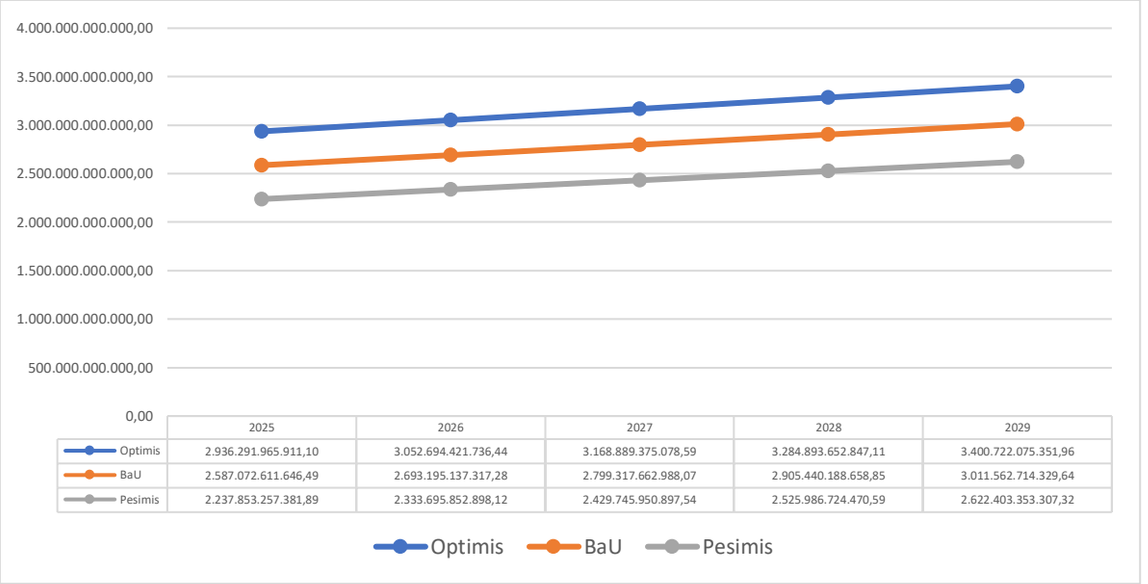

	2025	2026	2027	2028	2029
Optimis	2.936.291.965.911,10	3.052.694.421.736,44	3.168.889.375.078,59	3.284.893.652.847,11	3.400.722.075.351,96
BaU	2.587.072.611.646,49	2.693.195.137.317,28	2.799.317.662.988,07	2.905.440.188.658,85	3.011.562.714.329,64
Pesimis	2.237.853.257.381,89	2.333.695.852.898,12	2.429.745.950.897,54	2.525.986.724.470,59	2.622.403.353.307,32

Gambar II.43 Proyeksi Target Belanja Daerah Kota Simalungun Tahun 2025 -2029
Sumber : Hasil Analisis (2024)

Proyeksi target Belanja Daerah Kabupaten Simalungun untuk tahun 2025-2029 menampilkan tiga skenario serupa. Skenario optimis memperlihatkan peningkatan substansial hingga Rp2.936.291.965.911,10 menggambarkan keyakinan yang kuat terhadap pendapatan dan investasi, serta menggambarkan kemungkinan besar adanya proyek-proyek besar dan kebijakan yang efektif. Skenario *Business as Usual* (BaU) dan skenario pesimis menunjukkan pola serupa dengan skenario optimis. Angka-angka dalam skenario ini mencerminkan peningkatan dalam kondisi ekonomi yang normal dan realistis. Ketiga skenario ini berperan penting dalam perencanaan strategis Kabupaten Simalungun dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan situasi ekonomi.

II.5.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 – 2029

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun untuk periode 2026 hingga 2030 memberikan wawasan penting mengenai rencana keuangan kabupaten di masa depan. Proyeksi ini dibuat untuk membantu pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi kabupaten dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan belanja..

Proyeksi ini menjadi dasar bagi perencanaan anggaran yang terencana dan terstruktur. Dengan mengetahui tren pendapatan dan belanja yang diperkirakan, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang mendukung tujuan pembangunan kabupaten. Hal ini meliputi perencanaan alokasi anggaran secara efisien, menetapkan prioritas pengeluaran, serta memastikan penggunaan sumber daya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kemajuan kabupaten.

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2026 hingga 2030 berfungsi sebagai panduan penting dalam merancang kebijakan keuangan dan perencanaan jangka panjang, memastikan bahwa Kabupaten Simalungun dapat mengelola sumber daya secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel II.71 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026 s/d Tahun 2030 Kabupaten Simalungun (Miliar Rupiah)

No.	Uraian	Baseline 2024	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**	**2.781,17**	**3.045,38**	**3.066,24**	**3.219,55**	**3.380,53**	**3.549,56**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**194,39**	**212,86**	**214,32**	**225,04**	**236,28**	**248,1**
1.1.1	Pajak daerah	**129,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	Retribusi daerah	**4,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	**19,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	**40,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.547,45**	**2.789,46**	**2.808,56**	**2.948,98**	**3.096,44**	**3.251,26**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**2444,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**103,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3	Bantuan keuangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**39,33**	**43,06**	**43,36**	**45,53**	**47,81**	**50,2**
1.3.1	Pendapatan hibah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	Pendapatan lainnya	**39,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**BELANJA**	**2.803,67**	**3.042,43**	**3.059,03**	**3.211,41**	**3.372,26**	**3.539,84**
2.1	**Belanja Operasi**	**1.985,14**	**2.154,19**	**2.165,94**	**2.273,84**	**2.387,73**	**2.506,38**
2.1.1	Belanja Pegawai	**1107,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	**776,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.3	Belanja Bunga	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4	Belanja Subsidi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

No.	Uraian	Baseline 2024	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
2.1.5	Belanja Hibah	**101,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	**0,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Belanja Modal**	**306,96**	**333,11**	**334,93**	**351,60**	**369,22**	**387,57**
2.2.1	Belanja Modal Tanah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**96,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**79,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**110,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**21,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**20**	**21,70**	**21,82**	**22,91**	**24,05**	**25,25**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Belanja Transfer**	**491,57**	**533,43**	**536,34**	**563,06**	**591,26**	**620,64**
2.4.1	**Transfer Bagi Hasil Pendapatan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2	**Transfer Bantuan Keuangan**						
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/Kelurahan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	**30**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

No.	Uraian	Baseline 2024	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**7,5**	**8**	**8,5**	**9**	**9,5**	**10**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pembayaran Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	**Pembiayaan Netto**	**22,50**	**(7,00)**	**(7,50)**	**(8,00)**	**(8,50)**	**(9,00)**

Sumber: BPKPD Kabupaten Simalungun, 2025

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2026 hingga 2030 pada **Tabel II.71** menunjukkan pendapatan daerah Kabupaten Simalungun khususnya PAD diproyeksikan akan meningkat mencapai Rp. 236,29 Miliar pada tahun 2029, dengan catatan harus diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Kemudian untuk pendapatan transfer diharapkan juga akan mengalami peningkatan hingga tahun 2029 diperkirakan akan mencapai Rp. 3.096,44 Miliar dan hal ini didasarkan dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan dana bantuan dan lain sebagainya.

Lalu, belanja daerah juga diproyeksikan akan meningkat terutama pada belanja operasi dan belanja modal. Peningkatan tersebut turut diasumsikan dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang perlu disediakan bagi masyarakat Kabupaten Simalungun. Selain itu, belanja daerah dapat diarahkan untuk dapat membiayai berbagai urusan Pemerintah Kabupaten Simalungun baik urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang untuk menstimulus kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Simalungun.

II.5.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka keuangan bertujuan untuk menghitung aktual kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk membiayai program pembangunan daerah jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas sebenarnya kemampuan keuangan daerah, dihitung berdasarkan jumlah pendapatan daerah dikurangi belanja wajib, meliputi belanja pegawai dan belanja operasional perangkat daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah besarnya anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan aktual kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan daerah adalah dengan menghitung pendapatan daerah ditambah dengan pencairan dana cadangan dan sisa lebih perhitungan anggaran aktual pada pada perhitungan anggaran sebenarnya sehingga diperoleh angka total. Total penerimaan ini selanjutnya akan dikurangi dengan total belanja tidak langsung dan belanja untuk pembiayaan pengeluaran. Seluruh perhitungan tersebut memberikan perkiraan kapasitas aktual kapasitas fiskal daerah seperti pada **Tabel II.72.**

Tabel II.72 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun

No.	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	**3.045,38**	**3.066,24**	**3.219,55**	**3.380,53**	**3.549,56**
2	Penerimaan Pembiayaan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total penerimaan	**3.042,43**	**3.067,24**	**3.220,55**	**3.381,53**	**3.550,56**
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**2.913,23**	**3.058,74**	**3.211,55**	**3.372,03**	**3.540,55**

Tabel II.72 menunjukkan proyeksi kapasitas keuangan aktual daerah Kabupaten Simalungun, dengan nilai yang berubah-ubah. Analsisis kerangka pendanaan kapasitas keuangan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah pemetaan sumber pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan mana yang tersedia untuk pemerintah Kabupaten Simalungun harus diidentifikasi dan dianalisis. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen utang, yang mencakup pemahaman tentang jumlah utang, jadwal pembayaran, dan risiko yang terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa utang tersebut dikelola dengan bijak tanpa membahayakan stabilitas keuangan daerah.

Selain itu, hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan dengan mengevaluasi kebijakan fiskal yang telah diterapkan, termasuk pengelolaan anggaran yang disiplin dan pengendalian pengeluaran yang efektif sehingga sumber daya keuangan dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Simalungun. Selanjutnya proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun sebelumnya menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang moderat sesuai dengan tren saat ini sehingga kondisi perekonomian juga dianggap menunjukkan kemampuan sebenarnya dari kemampuan keuangan daerah Kabupaten Simalungun.

Selanjutnya, sumber daya keuangan riil daerah akan dialokasikan untuk mendukung program pembangunan yang termasuk dalam kategori prioritas I, II, dan III, seperti yang ditunjukkan dalam **Tabel II.73.**

Tabel II.73 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2026-2030

No.	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
		(Milyar Rp)	(Milyar Rp)	(Milyar Rp)	(Milyar Rp)	(Milyar Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.913,23	3.058,74	3.211,55	3.372,03	3.540,56
2	Prioritas I	1.593,55	1.672,53	1.755,36	1.848,26	1.941,43
3	Prioritas II	817,61	854,53	887,88	919,26	954,52
4	Prioritas III	502,07	531,68	568,32	604,51	644,60

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Simalungun akan digunakan untuk berbagai prioritas. Pada Prioritas I akan diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib. Prioritas II ditujukan untuk mendukung program-program prioritas daerah yang strategis dalam rangka percepatan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Sedangkan Prioritas III diperuntukkan bagi program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pilihan yang disesuaikan dengan potensi unggulan dan karakteristik wilayah.

II.6. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah merupakan tahapan krusial dalam perumusan perencanaan pembangunan jangka menengah yang terarah, responsif, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Permasalahan dan isu strategis yang diangkat dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029 didasarkan pada hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan periode sebelumnya, analisis kondisi aktual, serta dinamika eksternal yang memengaruhi arah kebijakan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif tantangan utama yang dihadapi daerah, baik dalam aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, maupun tata kelola pemerintahan. Dengan merumuskan isu-isu strategis secara tepat, Pemerintah Kabupaten Simalungun diharapkan mampu menetapkan prioritas pembangunan yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, sekaligus menjamin konsistensi dan efektivitas dalam pencapaian sasaran pembangunan lima tahunan.

II.6.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pengembangan dan peningkatan wilayah tertentu. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Ketentuan Umum Nomor 45, masalah pembangunan merujuk pada kesenjangan antara tujuan jangka panjang dan jangka menengah dengan kondisi aktual saat perencanaan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa sering kali ada ketidaksesuaian antara aspirasi yang diinginkan dan sumber daya yang tersedia saat perencanaan pembangunan dilakukan.

Untuk menyusun perencanaan pembangunan yang tepat, penting untuk terlebih dahulu memahami masalah-masalah utama yang ada di Kabupaten Simalungun. Masalah-masalah ini tidak muncul begitu saja, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan menjadi akar permasalahan. Dengan mengenali akar dari setiap masalah, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan dan program yang lebih fokus dan efektif. Tabel berikut menyajikan ringkasan dari masalah utama yang dihadapi serta akar penyebabnya sebagai dasar dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ke depan

Tabel II.74 Pohon Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul	Rendahnya kualitas SDM yang tercermin dari capaian pendidikan dan tingginya pengangguran	• Akses dan kualitas pendidikan menengah atas belum merata, terutama di wilayah pinggiran dan masyarakat berpenghasilan rendah, yang menyebabkan kesenjangan dalam pencapaian pendidikan antarwilayah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			• Kurangnya keterpaduan antara dunia pendidikan dan dunia kerja mengakibatkan lulusan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri atau lapangan kerja lokal.
			• Program pelatihan dan pengembangan keterampilan masih belum menjangkau kelompok rentan secara optimal, sehingga mempersempit peluang kerja dan meningkatkan angka pengangguran.
			• Rendahnya literasi partisipatif masyarakat membuat peran serta dalam pembangunan belum maksimal, karena minimnya informasi, kapasitas, dan ruang keterlibatan yang inklusif.
2	Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi belum inklusif dan belum menciptakan nilai tambah secara luas	• Struktur ekonomi masih didominasi sektor-sektor yang berbasis komoditas primer, tanpa penguatan sektor hilir yang mampu memberikan nilai tambah lebih besar.
			• Dukungan terhadap pengembangan UMKM masih terbatas, baik dari segi akses pembiayaan, pendampingan usaha, maupun pengembangan pasar yang berkelanjutan.
			• Keterbatasan infrastruktur ekonomi, seperti akses jalan produksi dan sarana logistik, menghambat konektivitas dan distribusi hasil usaha masyarakat.
			• Investasi belum tersebar merata dan cenderung terpusat di sektor tertentu, menyebabkan belum terciptanya efek ganda ekonomi yang luas bagi masyarakat.
3	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	• Proses reformasi birokrasi belum sepenuhnya menghasilkan perubahan mendasar dalam manajemen kinerja aparatur dan sistem pelayanan publik.
			• Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) masih menghadapi tantangan dari sisi infrastruktur TIK dan kemampuan teknis aparatur.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			• Inovasi pelayanan publik belum tumbuh secara optimal karena kurangnya dorongan terhadap pola kerja kreatif dan adaptif yang berbasis kebutuhan masyarakat.
			• Mekanisme pengawasan dan evaluasi pelayanan masih belum efektif dalam mendorong akuntabilitas dan responsivitas penyelenggara layanan publik.
4	Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup	Rendahnya kualitas lingkungan hidup daerah	• Pengelolaan lingkungan belum menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan, sehingga banyak kebijakan yang belum mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
			• Masih lemahnya pengawasan terhadap aktivitas yang berisiko merusak lingkungan, seperti pertambangan, alih fungsi lahan, dan pembangunan tanpa AMDAL yang ketat.
			• Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap perilaku ramah lingkungan masih rendah, akibat minimnya edukasi dan insentif untuk pelestarian.
			• Kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup belum memadai dari sisi sumber daya manusia, anggaran, maupun koordinasi antarinstansi.
5	Belum Optimalnya Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah yang berdampak pada akses layanan dasar	• Infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik belum tersedia secara merata, khususnya di wilayah dengan karakteristik geografis sulit dijangkau.
			• Keterbatasan anggaran dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keadilan spasial dan prioritas pelayanan dasar masyarakat.
			• Konektivitas antarwilayah masih lemah, menghambat mobilitas orang dan barang serta memperlebar kesenjangan akses antarwilayah.
			• Kurangnya sinergi antara program infrastruktur dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat menyebabkan manfaat pembangunan belum dirasakan secara luas dan merata.

Berdasarkan Tabel II.74, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pembangunan di Kabupaten Simalungun saling terkait satu sama lain dan sebagian besar dipicu oleh lemahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang belum optimal, serta kapasitas lingkungan dan ekonomi daerah yang masih rendah. Permasalahan-permasalahan mendasar ini perlu segera ditangani secara menyeluruh dan terintegrasi agar pelaksanaan pembangunan di Simalungun dapat berlangsung secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

II.6.1.1. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul

Sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor unggulan dan tujuan penataan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031, Kabupaten Simalungun diarahkan untuk melakukan pengembangan ekonomi melalui hilirisasi produk pertanian dan perkebunan. Hilirisasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian dan perkebunan lokal, sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani dan memperluas lapangan kerja di sektor agroindustri. Proses ini melibatkan peningkatan kapasitas produksi, pemrosesan, pengemasan, hingga pemasaran produk jadi yang memiliki daya saing lebih tinggi di pasar.

Namun, salah satu tantangan utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Simalungun yang terindikasi belum mendukung pengembangan sektor unggulan tersebut. SDM yang ada masih perlu ditingkatkan dari segi keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan dalam mengelola teknologi modern serta proses hilirisasi. Kurangnya pelatihan dan pendidikan yang relevan membuat tenaga kerja lokal belum siap untuk beradaptasi dengan tuntutan industri yang lebih maju. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang signifikan dalam pengembangan kapasitas SDM melalui program pendidikan, pelatihan teknis, dan peningkatan keterampilan agar dapat mendukung pengembangan ekonomi yang berbasis pada hilirisasi produk pertanian dan perkebunan di Kabupaten Simalungun.

Belum optimalnya kompetensi SDM di Kabupaten Simalungun masih menjadi permasalahan, yang utamanya disebabkan oleh dengan rendahnya aksesibilitas. Hal ini terlihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan fluktuasi pembangunan manusia Kabupaten Simalungun di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melalui tiga dimensi: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara, terlihat bahwa IPM Simalungun secara

keseluruhan lebih tinggi dibandingkan rata-rata Sumatera Utara, namun masih berada di bawah IPM Kabupaten Deli Serdang (**Gambar II.)**. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses pendidikan, kesehatan masyarakat, dan peluang pekerjaan yang terbatas mungkin menjadi penyebab utama rendahnya pembangunan sumber daya manusia yang belum optimal.

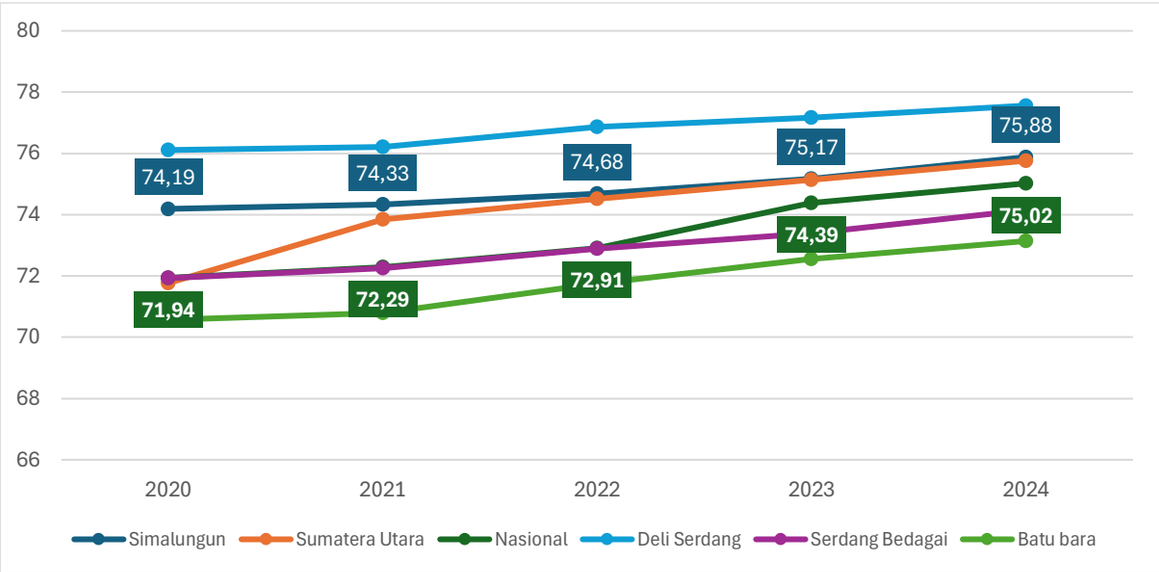

Gambar II.44 Perbandingan IPM Kabupaten Simalungun dan Daerah Pembanding
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Simalungun tetap menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia. Data terbaru menunjukkan bahwa RLS di Kabupaten Simalungun mencapai 9,73 tahun pada tahun 2024 (**Gambar II.**), angka ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Simalungun masih belum melampaui 12 tahun. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan, yang mengindikasikan bahwa masih banyak anak-anak di Kabupaten Simalungun yang belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai, kualitas kurikulum yang belum optimal, serta kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, yang secara keseluruhan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Simalungun juga menunjukkan peningkatan secara bertahap dari 12,78 tahun di tahun 2020 menjadi 13,09 tahun pada tahun 2024, namun masih berada di bawah rata-rata provinsi Sumatera Utara yang mencapai 13,49 tahun pada tahun yang sama. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Simalungun menunjukkan tren positif, analisis lebih dalam terhadap aspek aksesibilitas pendidikan, terutama melalui indikator HLS dan RLS mengungkapkan bahwa keterbatasan akses dan mutu pendidikan tetap menjadi

faktor signifikan yang mempengaruhi rendahnya kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Simalungun.

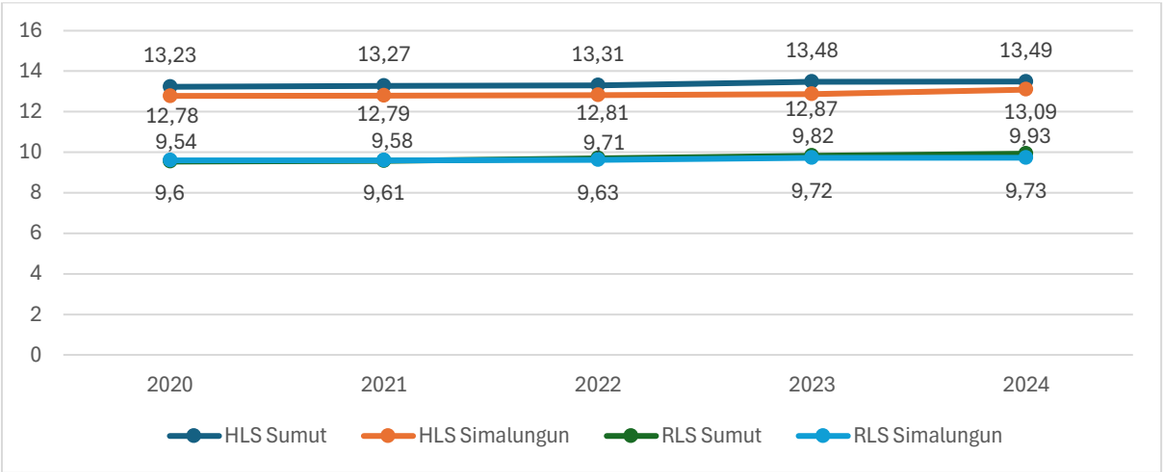

Gambar II.45 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Simalungun dan Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025.

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Simalungun masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai standar rata-rata provinsi melalui upaya yang lebih serius dalam meningkatkan akses dan motivasi masyarakat untuk menempuh pendidikan jangka panjang. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 adalah 9,73 tahun, setara dengan kelas I SMA. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan RLS Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 9,93 tahun. Meskipun demikian, angka tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan secara konsisten dari tahun-tahun sebelumnya, yang mencerminkan kemajuan positif dalam pencapaian pendidikan di Kabupaten Simalungun. Namun, capaian ini tetap menunjukkan bahwa Kabupaten Simalungun masih tertinggal dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan sebagai langkah strategis untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh di Kabupaten Simalungun.

Selain itu, angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun juga menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Belum optimalnya penanganan kemiskinan tercermin dari persentase penduduk miskin yang ditampilkan pada **Gambar II.**, yang memperlihatkan data dari tahun 2020 hingga 2024. Selama periode tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun menunjukkan tren fluktuatif, dengan kenaikan pada tahun 2021 mencapai 8,81%, kemudian menurun menjadi 8,26% pada 2022, dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 7,72% pada tahun 2024.

Meskipun penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan, angka tersebut masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di sekitar wilayah Sumatera Utara seperti Kabupaten Langkat yang secara konsisten memiliki angka kemiskinan lebih rendah. Kondisi ini menandakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Simalungun masih perlu diperkuat, baik melalui peningkatan efektivitas program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

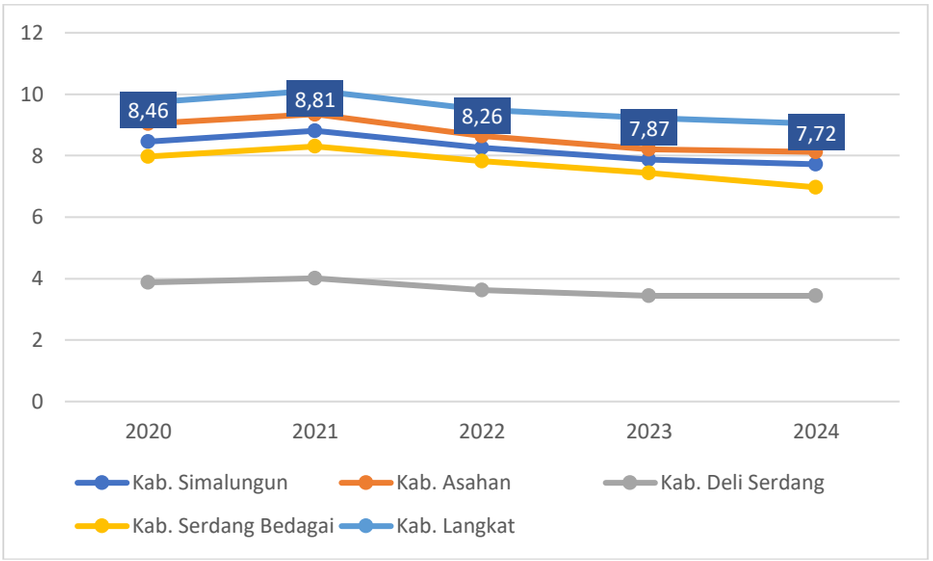

Gambar II.46 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Langkat

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2025.

Tren penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Simalungun menunjukkan adanya perbaikan dalam penanggulangan kemiskinan, namun juga mencerminkan fluktuasi yang menandakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan perlu lebih difokuskan pada konsistensi dan keberlanjutan kebijakan serta program-program pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain masih menjadi tantangan besar. Kondisi ini mencerminkan bahwa masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang berdampak langsung pada rendahnya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi yang layak. Kemiskinan menjadi salah satu penghambat utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena keterbatasan ekonomi sering kali membatasi akses masyarakat terhadap berbagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kabupaten Simalungun ditunjukkan melalui keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan bidang usaha, pekerjaan, atau disiplin ilmu tertentu. Hal ini menandakan bahwa SDM yang kompetitif mampu mendapatkan pekerjaan yang meningkatkan kesejahteraan.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator untuk menilai kondisi ini, sebagaimana digambarkan pada **Gambar II..**

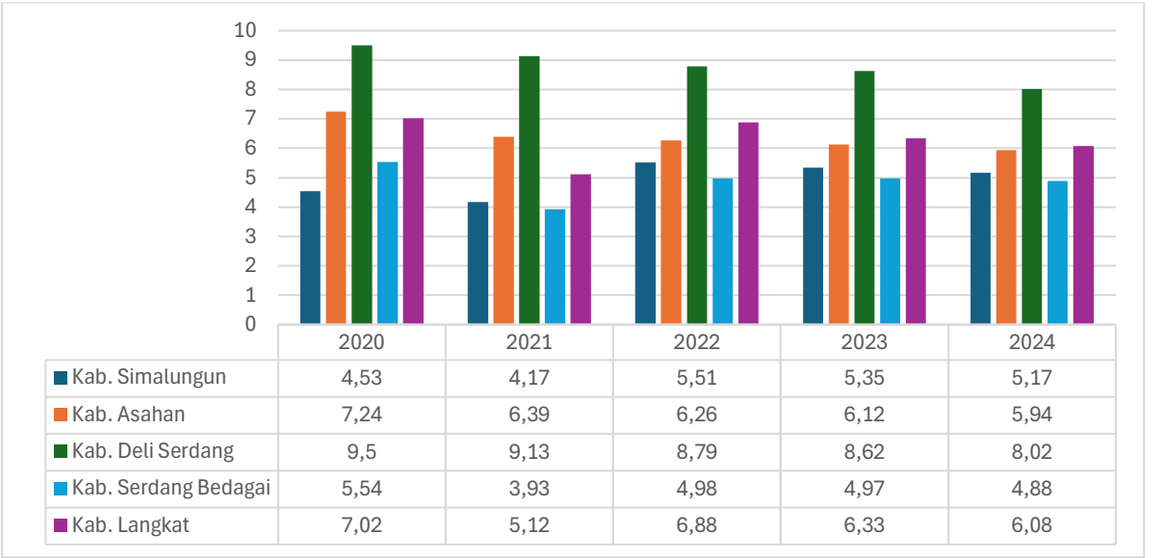

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Simalungun	4,53	4,17	5,51	5,35	5,17
Kab. Asahan	7,24	6,39	6,26	6,12	5,94
Kab. Deli Serdang	9,5	9,13	8,79	8,62	8,02
Kab. Serdang Bedagai	5,54	3,93	4,98	4,97	4,88
Kab. Langkat	7,02	5,12	6,88	6,33	6,08

Gambar II.47 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Simalungun dengan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2025.

Berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Simalungun dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa angka tersebut mengalami fluktuasi yang mencerminkan tantangan dalam optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah ini. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,53%, kemudian menurun menjadi 4,17% pada tahun 2021. Namun, angka ini kembali naik signifikan menjadi 5,51% pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 5,35% pada tahun 2023, sebelum kembali mengalami penurunan ringan menjadi 5,17% pada tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Faktor-faktor seperti minimnya akses terhadap pelatihan keterampilan yang relevan, pendidikan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri, serta ketidaktepatan dalam mencocokkan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dengan permintaan pekerjaan yang ada, turut menjadi penyebab.

Jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain seperti Deli Serdang dan Asahan yang memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi namun stabil menurun, Kabupaten Simalungun menunjukkan ketidakpastian yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran, penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri, serta kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif guna mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Terhambatnya upaya pembangunan manusia juga disebabkan oleh belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, dengan masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Tanpa memadukan aspirasi langsung dari masyarakat, yang mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dan relevansi proyek-proyek tersebut terhadap kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Simalungun.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran akan hak partisipasi dalam pembangunan juga menjadi faktor penting. Banyak masyarakat di Kabupaten Simalungun yang belum sepenuhnya memahami peran mereka dalam proses pembangunan atau merasa tidak cukup terlatih untuk berkontribusi secara aktif. Hal ini dapat membatasi potensi kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merancang solusi-solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Tidak adanya *platform* yang memadai untuk berdiskusi dan memberikan masukan dari masyarakat juga turut berkontribusi pada rendahnya keterlibatan ini. Kurangnya akses terhadap informasi yang relevan tentang proyek-proyek pembangunan, serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk terlibat secara aktif. Hal ini kemudian menimbukan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang tidak memenuhi ekspektasi mereka. Kemudian, akan berkorelasi dengan permasalahan tata kelola pemerintah.

Aspek geografis dan demografis Kabupaten Simalungun juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan beberapa wilayah yang terbatas aksesibilitas ke pusat-pusat kegiatan pembangunan, dapat memunculkan rasa terpinggirkan dibeberapa komunitas atau tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Ketidakseimbangan ini dapat memperburuk disparitas sosial-ekonomi antarwilayah dan membatasi potensi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pentingnya meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pembangunan juga menjadi fokus penting dalam mengatasi masalah ini. Melalui pendekatan edukasi, masyarakat dapat lebih baik memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pembangunan. Hal ini akan memperkuat peran aktif mereka dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan proyek-proyek pembangunan serta memastikan bahwa kebutuhan riil mereka terpenuhi.

Selain itu, penguatan kapasitas lembaga-lembaga lokal dan organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Simalungun juga diperlukan untuk mendukung keterlibatan masyarakat yang lebih efektif dalam pembangunan. Dengan memberikan pelatihan,

bimbingan teknis, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan, organisasi masyarakat dapat menjadi mitra yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Simalungun memerlukan pendekatan komprehensif yang memperbaiki akses informasi, membangun kapasitas, dan mempromosikan budaya partisipasi yang lebih kuat. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam merancang masa depan mereka sendiri yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan kebutuhan mereka yang sebenarnya.

II.6.1.2. Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi

Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Simalungun menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan secara mendalam. Salah satu masalah utamanya adalah infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur transportasi jalan masih terbatas dan kurang berkualitas, sehingga menghambat distribusi barang dan jasa serta akses ke wilayah pedesaan yang potensial untuk pengembangan ekonomi lokal. Hal ini berkorelasi dengan permasalahan pembangunan lainnya yaitu terkait kualitas infrastruktur.

Selain itu, kurangnya diversifikasi ekonomi juga menjadi masalah yang signifikan. Kabupaten Simalungun masih sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai tulang punggung utama ekonominya, dengan sedikit diversifikasi ke sektor-sektor lain seperti industri, pariwisata, atau jasa. Ketergantungan ini membuat ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas pertanian dan risiko lain yang terkait dengan sektor pertanian. Hal ini tercermin dari capaian indikator makro ekonomi, salah satunya melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB), yang mencerminkan rata-rata kontribusi ekonomi yang diterima oleh setiap penduduk.

Tabel II.75 PDRB ADHB Perkapita Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Simalungun	43.832,80	40.010,29	42.433,45	46.370,49	50.427,74	54.893,00
Provinsi Sumatra Utara	54.620,40	54.979,04	57.441,93	62.922,26	68.305,71	73.570,00
Indonesia	59.317,91	57.289,59	62.259,07	71.043,44	74.964,70	78.620,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

Tabel II.75 menunjukkan bahwa Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia mengalami penurunan PDRB per kapita pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2024, ketiga wilayah tersebut menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Kabupaten Simalungun diperkirakan mencapai 54.893,00 ribu rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara mencatat nilai sebesar 73.570,00 ribu rupiah, dan Indonesia mencapai 78.620,00 ribu rupiah.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas pembangunan ekonomi daerah secara merata. Salah satu faktor penghambatnya adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menjadi kendala lain dalam pembangunan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Simalungun. Banyak tenaga kerja lokal belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor-sektor non-pertanian yang berkembang pesat, seperti teknologi informasi, manufaktur, atau jasa profesional. Hal ini mengurangi daya saing tenaga kerja lokal dan membatasi potensi ekonomi daerah untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Selain itu, investasi di Kabupaten Simalungun masih belum dapat dikatakan stabil mengarah ke trend positif. Hal ini dapat dilihat melalui grafik di bawah yang menunjukkan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Simalungun dari tahun 2017 hingga 2020. Pada tahun 2017, total investasi di Kabupaten Simalungun mencapai puncaknya dengan nilai PMDN sekitar 500.000 miliar rupiah dan nilai PMA yang relatif kecil. Tahun 2018, meskipun terjadi sedikit penurunan, nilai PMDN tetap mendominasi, sementara nilai PMA juga mengalami sedikit peningkatan. Tahun 2019 mencatat penurunan signifikan dalam total investasi, terutama dari PMDN, dengan nilai investasi yang jauh lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya, sementara nilai PMA tetap stabil. Pada tahun 2020, terjadi pemulihan investasi dengan peningkatan signifikan baik dari PMDN maupun PMA, meskipun nilai PMDN tidak mencapai tingkat yang sama seperti tahun 2017 dan 2018.

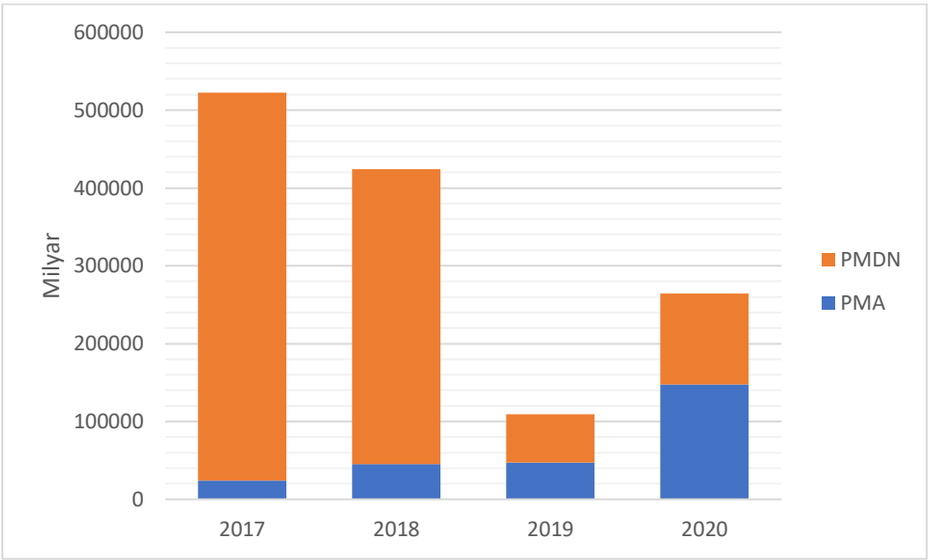

Gambar II.48 Nilai PMA dan PMDN Kabupaten Simalungun 2017-2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2024

Fluktuasi nilai PMDN dari tahun 2017 hingga 2020 menunjukkan puncak investasi pada tahun 2017, penurunan pada tahun 2018, dan lebih drastis lagi pada tahun 2019, yang mungkin disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional atau global yang mempengaruhi minat investor domestik. Namun, pemulihan terjadi pada tahun 2020 dengan nilai investasi PMDN yang kembali meningkat. Sementara itu, nilai investasi PMA menunjukkan peningkatan stabil dari tahun 2017 hingga 2020, yang menandakan adanya minat yang berkelanjutan dari investor asing di Kabupaten Simalungun. Tahun 2020 menunjukkan lonjakan signifikan dalam nilai PMA, mendekati nilai PMDN, yang menandakan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi daerah ini meskipun masih belum optimal dikarenakan belum adanya fasilitas penunjang yang memadai untuk mendorong investasi.

Adapun aksesibilitas Kabupaten Simalungun menuju fasilitas ekspor masih belum optimal. Masih dibutuhkan penguatan rantai pasok untuk menjamin bahwa produk-produk hasil hilirisasi di Kabupaten Simalungun dapat terdistribusi secara efisien dan tepat waktu. Meskipun demikian, data Net Ekspor Barang dan Jasa selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, net ekspor tercatat sebesar 4.089,92 miliar rupiah dan meningkat menjadi 5.818,24 miliar pada tahun 2021. Kenaikan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai mencapai 8.068,44 miliar, lalu melonjak menjadi 9.581,34 miliar pada tahun 2023. Puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan nilai net ekspor yang mencapai 12.769,31 miliar rupiah.

Peningkatan ini mengindikasikan adanya potensi besar dalam sektor perdagangan luar negeri Kabupaten Simalungun yang perlu didukung oleh infrastruktur logistik yang lebih memadai serta kebijakan perdagangan yang berorientasi pada penguatan ekspor. Jika potensi ini dapat dimaksimalkan dengan baik, maka sektor ekspor dapat menjadi salah satu motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

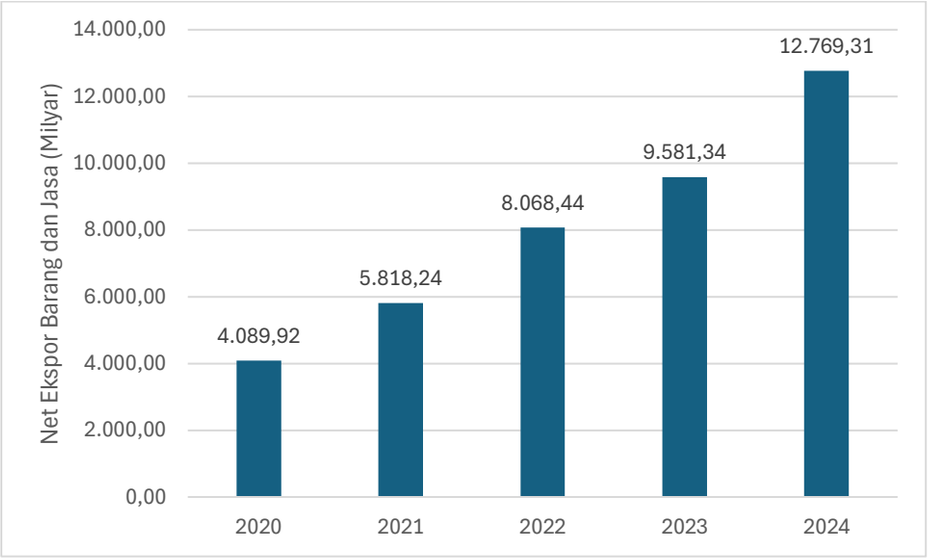

Gambar II.49 Net Ekspor Barang dan Jasa PDRB Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

Peningkatan net ekspor barang dan jasa ini mengindikasikan beberapa hal penting. Pertama, peningkatan tahunan tersebut menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa di Kabupaten Simalungun semakin kompetitif di pasar internasional, kemungkinan akibat perbaikan kualitas produk, efisiensi produksi, atau peningkatan akses pasar. Kedua, investasi signifikan dalam infrastruktur penunjang ekspor, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik, juga berkontribusi terhadap peningkatan ini, sejalan dengan inisiatif pembangunan infrastruktur yang modern dan berkelanjutan di Kabupaten Simalungun. Ketiga, pertumbuhan ekspor yang konsisten mengindikasikan adanya diversifikasi produk yang dihasilkan, mengurangi risiko ekonomi dan membuka pasar baru. Keempat, proses hilirisasi produk pertanian dan perkebunan yang didorong oleh pemerintah daerah berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekspor, karena produk olahan memiliki nilai tambah lebih tinggi di pasar internasional.

Namun, meskipun telah terjadi peningkatan yang signifikan, angka net ekspor tersebut masih belum cukup besar untuk menjadikan Kabupaten Simalungun sebagai kawasan industri utama. Untuk mencapai status tersebut, diperlukan peningkatan lebih

lanjut dalam kapasitas produksi, diversifikasi industri, dan penambahan investasi yang lebih masif dalam infrastruktur dan teknologi. Selain itu, perlu adanya strategi yang komprehensif untuk menarik investasi swasta, memperkuat kemitraan dengan sektor industri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat global. Melalui grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Simalungun telah berhasil meningkatkan net ekspor barang dan jasanya secara signifikan dari tahun 2018 hingga 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan investasi dalam infrastruktur, hilirisasi produk, serta pengembangan ekonomi berbasis teknologi dan inovasi telah memberikan hasil positif. Untuk mempertahankan tren positif ini, diperlukan upaya terus-menerus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses pasar, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, Kabupaten Simalungun dapat terus tumbuh sebagai pusat ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan di masa depan dengan tentunya diiringi dengan kondisi SDM yang mendukung.

Kondisi SDM yang mendukung ini terlihat dari data Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK yang menunjukkan fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2022, Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai 66,11% dan menurun tajam menjadi 56,44% pada tahun 2023, kemudian pada tahun 2024, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK Kabupaten Simalungun mencapai 61,27%. Kabupaten Asahan pada tahun 2020 hanya mencatatkan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 42,05%. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan relevansi program-programnya dengan kebutuhan industri lokal untuk memastikan tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.

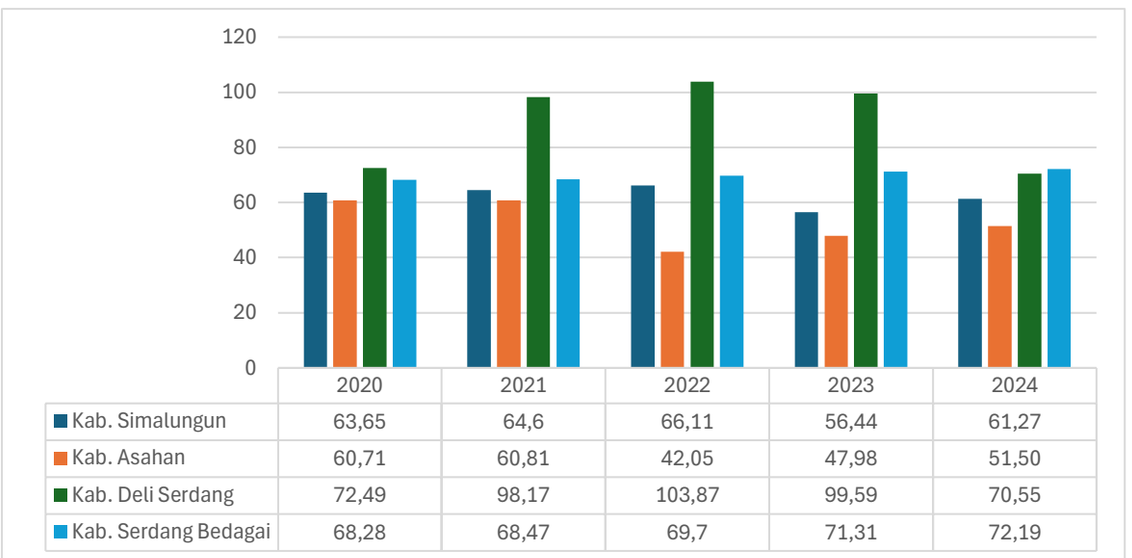

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Simalungun	63,65	64,6	66,11	56,44	61,27
Kab. Asahan	60,71	60,81	42,05	47,98	51,50
Kab. Deli Serdang	72,49	98,17	103,87	99,59	70,55
Kab. Serdang Bedagai	68,28	68,47	69,7	71,31	72,19

Gambar II.50 Angka Partisipasi Murni SMA/SMK Kabupaten Simalungun dengan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumater Utara Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

Secara keseluruhan, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta perbaikan iklim investasi dan birokrasi. Dengan upaya bersama yang terkoordinasi, Kabupaten Simalungun dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh penduduknya.

II.6.1.3. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Reformasi birokrasi merupakan serangkaian perubahan sistem birokrasi suatu negara atau pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kinerja dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Terdapat permasalahan pokok mengenai belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang disebabkan oleh permasalahan belum maskimalnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Simalungun.

Dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, implementasi reformasi birokrasi menjadi aspek yang krusial untuk terus diperkuat. Reformasi birokrasi tidak hanya menjadi indikator kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Salah satu tolok ukur dalam mengukur kemajuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang dievaluasi setiap tahun oleh Kementerian PANRB.

Berdasarkan **Tabel II.76**, Kabupaten Simalungun menunjukkan pencapaian IRB yang relatif stagnan pada level CC selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023), sebelum mengalami peningkatan ke predikat B pada tahun 2024. Capaian ini menandakan adanya perbaikan dalam aspek tata kelola, meskipun secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara, seperti Kabupaten Asahan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai, capaian IRB Kabupaten Simalungun relatif tertinggal.

Kabupaten Asahan dan Langkat, misalnya, telah menunjukkan peningkatan signifikan, di mana keduanya berhasil mencapai predikat BB pada tahun 2024 setelah meraih nilai B pada 2022 dan 2023. Sementara itu, Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kemajuan pesat dari predikat CC pada 2021–2022, menjadi B pada 2023, dan akhirnya mencapai BB pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut berhasil melaksanakan reformasi birokrasi secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

Dengan melihat perkembangan tersebut, maka upaya perbaikan IRB di Kabupaten Simalungun perlu terus ditingkatkan, baik melalui penguatan komitmen pimpinan daerah, pengembangan sistem manajemen kinerja, maupun peningkatan kualitas pelayanan berbasis digital. Reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat..

Tabel II.76 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Simalungun dengan beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024

Keterangan	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks						
Kabupaten Simalungun		NA	NA	C	C	C	CC
Kabupaten Asahan		NA	NA	NA	B	BB	BB
Kabupaten Deli Serdang		NA	NA	CC	CC	C	BB
Kabupaten Serdang Bedagai		NA	NA	CC	CC	BB	BB
Kabupaten Langkat		NA	NA	B	B	B	B

Sumber : Satudata PANRB, 2025.

Banyaknya penduduk serta keberagaman yang ada membuat beragamnya tuntutan terhadap pelayanan publik. Sehingga kebutuhan penduduk akan pelayanan masyarakat di Kabupaten Simalungun sangat kompleks. Menjamin efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Simalungun perlu menyediakan layanan dengan standar tata kelola yang baik. Menurut Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022, Kabupaten Simalungun memiliki skor 1,77, di bawah nilai rata-rata nasional 3,44. Angka rendah ini mencerminkan berbagai kendala dalam implementasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Simalungun. Faktor utama meliputi infrastruktur SPBE yang masih kurang memadai, seperti jaringan internet dan perangkat elektronik, yang menghambat kelancaran proses pemerintahan elektronik.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) SPBE, baik dari segi jumlah maupun kualitas, juga menjadi kendala serius. Kekurangan ini mempersulit implementasi efektif dari sistem SPBE di Kabupaten Simalungun. Di sisi lain, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Simalungun pada tahun yang sama tercatat sebesar 2,63. Angka ini mencerminkan bahwa indeks sistem merit di Kabupaten Simalungun juga belum optimal. Kendala-kendala dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Simalungun secara langsung mempengaruhi kualitas layanan publik. Salah satu masalah yang signifikan adalah ketidakcukupan akses pelayanan publik yang memadai. Infrastruktur dan sistem yang belum memadai dalam menyediakan layanan kepada

masyarakat menciptakan hambatan dalam mendapatkan layanan yang diperlukan, seperti perizinan, kesehatan, dan pendidikan.

Kelemahan ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang kurang efisien dan modern menjadi penghambat utama aksesibilitas layanan publik yang optimal. Pelayanan yang tidak responsif dan kurang efisien menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan mengurangi tingkat kepuasan terhadap pemerintah daerah. Namun, aspek kredibilitas aparatur pemerintah dan kepercayaan masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dalam upaya meningkatkan kondisi ini, perlu diambil langkah-langkah strategis seperti peningkatan infrastruktur SPBE, peningkatan kualitas SDM SPBE, perbaikan kebijakan dan regulasi SPBE, serta upaya maksimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kepuasan masyarakat. Secara keseluruhan, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Simalungun memerlukan perhatian serius dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Hanya dengan upaya bersama ini, Kabupaten Simalungun dapat mengoptimalkan sistem pemerintahannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

II.6.1.4. Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup

Belum optimalnya upaya pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Simalungun tercermin dari capaian **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** yang masih relatif rendah dibandingkan tingkat provinsi dan nasional. Gambar II.51 memperlihatkan bahwa meskipun terdapat tren peningkatan dari tahun ke tahun, capaian IKLH Kabupaten Simalungun belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dan masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Utara maupun Indonesia.

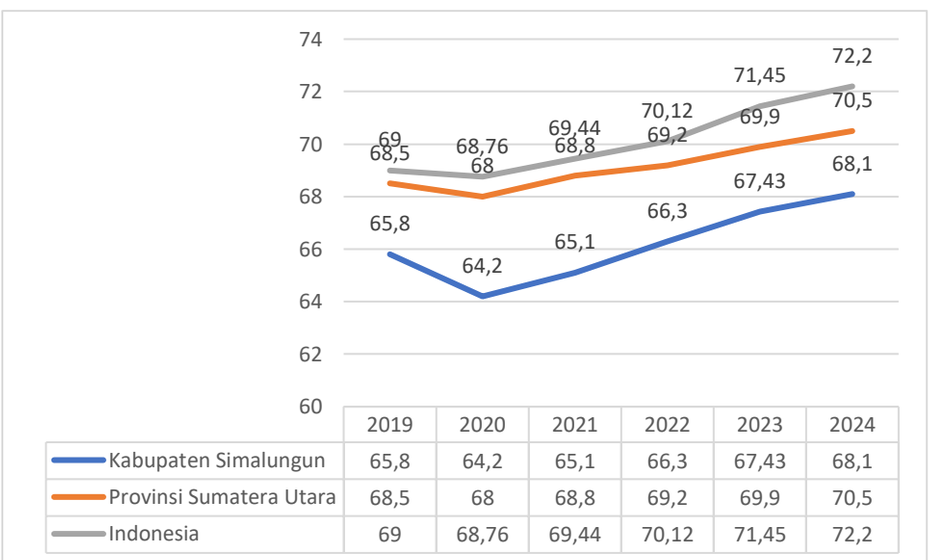

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Simalungun	65,8	64,2	65,1	66,3	67,43	68,1
Provinsi Sumatera Utara	68,5	68	68,8	69,2	69,9	70,5
Indonesia	69	68,76	69,44	70,12	71,45	72,2

Gambar II.51 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Simalungun, 2025

Pada tahun 2019, IKLH Kabupaten Simalungun tercatat sebesar 65,8, lalu mengalami penurunan menjadi 64,2 pada tahun 2020. Setelah itu, indeks ini mulai meningkat secara bertahap menjadi 65,1 di tahun 2021, 66,3 pada tahun 2022, dan 67,43 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, IKLH Kabupaten Simalungun diperkirakan mencapai 68,1, yang meskipun meningkat, masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara (70,5) dan Indonesia (72,2) di tahun yang sama.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat perbaikan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, kinerja lingkungan di Kabupaten Simalungun masih belum optimal dan memerlukan penguatan dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan lahan secara terintegrasi guna mempersempit kesenjangan dengan capaian provinsi dan nasional. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong perbaikan yang lebih signifikan di masa mendatang.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Simalungun masih belum optimal, terutama dalam hal penanganan sampah dan penyelesaian kasus lingkungan. Persentase sampah yang berhasil ditangani menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan tajam pada 2022 sebesar 11,45% sebelum naik kembali menjadi 24,87% pada 2023. Capaian ini masih tertinggal dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara dan nasional yang telah mencapai sekitar 46%. Penyelesaian kasus lingkungan juga mengalami penurunan signifikan, dari 100% pada 2022 menjadi hanya 9% di tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan menurunnya kapasitas penanganan kasus lingkungan dan perlunya penguatan sistem pengawasan serta penegakan hukum.

Selain itu, aktivitas pertambangan yang tidak diawasi secara optimal turut memperburuk kondisi lingkungan, ditambah penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan yang dapat menyebabkan degradasi tanah dan kualitas air. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan lingkungan yang lebih terintegrasi, termasuk penguatan tata guna lahan, peningkatan pengawasan, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

II.6.1.5. Belum Optimalnya Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan di Kabupaten Simalungun menjadi perhatian utama. Kondisi antara infrastruktur yang tidak memadai dan Indeks Gini yang menunjukkan ketimpangan sosial-ekonomi di Kabupaten Simalungun sangat erat. Infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang rusak dan irigasi yang tidak optimal, membatasi akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar, yang pada gilirannya meningkatkan ketimpangan

pendapatan. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur mengakibatkan daerah-daerah tertentu menjadi kurang berkembang, sehingga pendapatan dan kualitas hidup penduduk di daerah tersebut tetap rendah. Dengan demikian, peningkatan dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penanganan infrastruktur yang tepat tidak hanya akan memperbaiki kondisi fisik wilayah tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Kondisi infrastruktur tercermin dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2022, dari total panjang jalan sebesar 3.690,77 km di Kabupaten Simalungun, sekitar 1.223,19 km di antaranya mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan tantangan serius dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan, yang menjadi tulang punggung ekonomi dan mobilitas masyarakat dalam distribusi barang dan jasa di Kabupaten Simalungun. Ketimpangan sosial ekonomi di Kabupaten Simalungun masih menjadi tantangan utama, yang tercermin dari fluktuasi Indeks Gini selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, Indeks Gini tercatat sebesar 0,295, menurun pada 2021 (0,265) dan 2022 (0,262), sebelum kembali meningkat menjadi 0,295 pada 2023, dan akhirnya menurun menjadi 0,257 di tahun 2024. Nilai ini merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir, memberikan sinyal positif, meskipun perlu dikaji lebih lanjut apakah penurunan tersebut bersifat berkelanjutan..

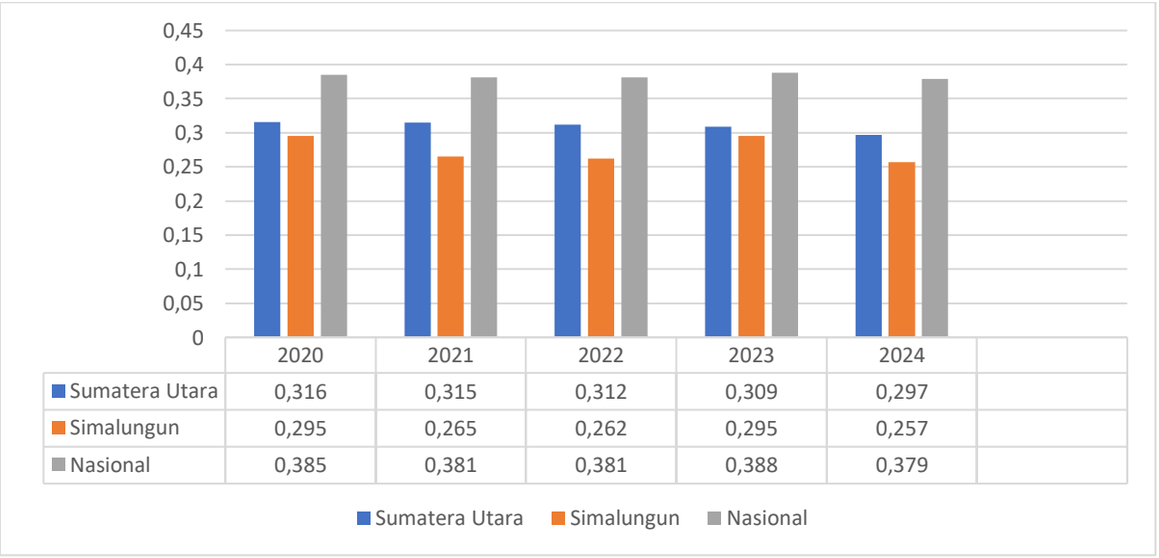

	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Utara	0,316	0,315	0,312	0,309	0,297
Simalungun	0,295	0,265	0,262	0,295	0,257
Nasional	0,385	0,381	0,381	0,388	0,379

Gambar II.52 Indeks Gini Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

Jika dibandingkan, Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 mencapai 0,297, sementara nasional sebesar 0,379. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketimpangan di Simalungun sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata

provinsi dan nasional, namun dinamika yang terjadi tetap menunjukkan adanya tantangan dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Tingginya ketimpangan ini tidak lepas dari belum meratanya pembangunan infrastruktur antarwilayah, khususnya antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Daerah perkotaan umumnya telah dilengkapi dengan akses jalan, listrik, dan fasilitas dasar lainnya, sementara wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan dalam hal aksesibilitas dan layanan publik. Kondisi ini berdampak langsung pada kesenjangan akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa sebagian besar jalan di Kabupaten Simalungun masih dalam kondisi rusak. Infrastruktur yang kurang memadai ini membatasi produktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tertinggal dan berkontribusi pada ketimpangan pendapatan.Pembangunan infrastruktur yang inklusif dan merata menjadi kunci penting untuk mengurangi ketimpangan. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan harus mengedepankan pemerataan investasi infrastruktur, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

II.6.2. Isu Strategis

Pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 memiliki peran krusial sebagai landasan awal menuju pencapaian Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045. Proses pembangunan akan menghadapi berbagai isu dan tantangan yang terus berubah, sehingga perlu adanya intervensi kebijakan untuk memanfaatkan peluang dan potensi guna mencapai target pembangunan selama lima tahun ke depan.

II.6.2.1. Isu Strategis Internasional

Isu-isu strategis internasional merupakan pada peristiwa-peristiwa dengan dampak signifikan secara global atau antarnegara, yang perlu diantisipasi dan dianalisis dalam perumusan isu strategis daerah. Peninjauan terhadap isu-isu strategis internasional bertujuan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan global. Kabupaten Simalungun mengantisipasi transformasi global yang sedang berlangsung, selaras dengan upaya kontribusi pembangunan daerah dalam pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan jangka menengah Kabupaten Simalungun tahun 2025-2029, pemahaman dan respons terhadap isu-isu strategis internasional mungkin tidak selalu memiliki dampak langsung atau peran signifikan. Hal ini dikarenakan fokus utama pembangunan jangka menengah Kabupaten Simalungun adalah pada isu-isu dan prioritas yang bersifat lokal dan regional.

Adapun isu strategis internasional yang relevan dengan karakteristik Kabupaten Simalungun meliputi ketahanan pangan dan dinamika ekonomi global.

II.6.2.1.1. Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan

Perubahan iklim merupakan salah satu isu global yang mendapat perhatian khusus dari berbagai organisasi internasional, salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan laporan dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) dalam dokumen "*Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*", peningkatan suhu global akan berdampak signifikan pada berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Simalungun. Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang secara langsung akan mengganggu aktivitas pertanian dan infrastruktur (**Gambar II.)**. Dalam konteks Kabupaten Simalungun, fenomena ini memerlukan perhatian serius dan tindakan adaptasi yang konkret. Laporan UNDP mengenai perubahan iklim dalam dokumen "*Adaptation for Smallholder Agriculture Programme*" menunjukkan bahwa adaptasi melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan penerapan teknologi ramah lingkungan sangat penting. Kabupaten Simalungun yang memiliki basis pertanian yang kuat perlu memiliki fokus pada penerapan praktik-praktik pertanian berkelanjutan yang mampu mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Misalnya, penggunaan sistem irigasi yang efisien dan pemanfaatan teknologi pemantauan cuaca dapat membantu petani mengelola lahan secara lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan kondisi iklim.

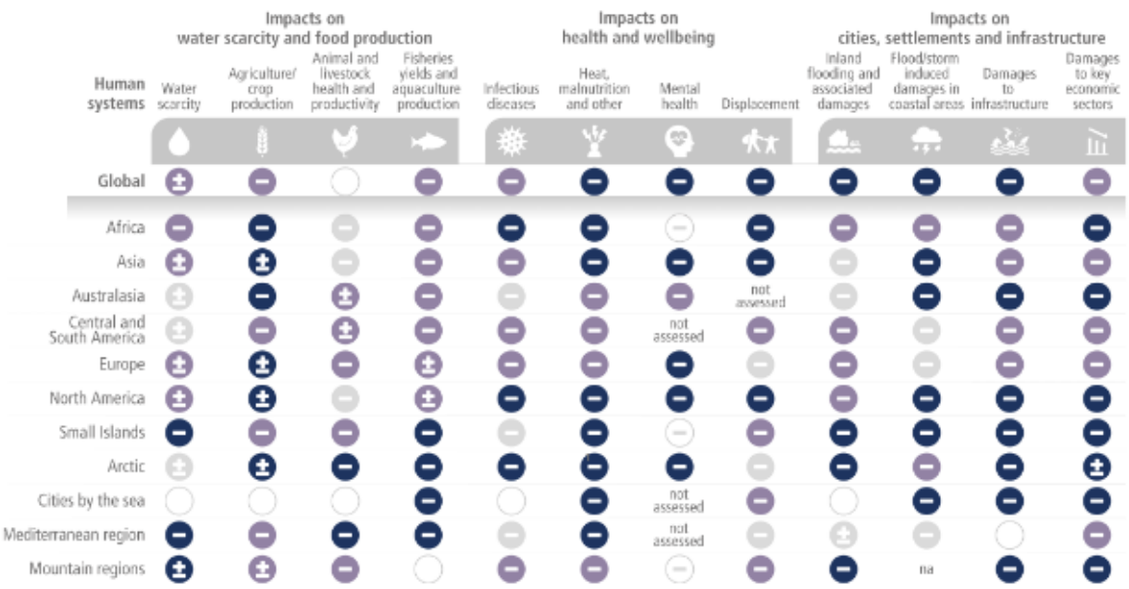

Gambar II.53 Dampak Perubahan Iklim terhadap Aspek Kehidupan Manusia
Sumber: Climate Change: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, 2022

Selain itu, ketahanan pangan menjadi isu krusial yang harus diperhatikan oleh Kabupaten Simalungun. Mengacu pada laporan FAO dan UNDP dalam dokumen "*The State of Food Security and Nutrition in the World 2021*", penguatan sistem pertanian yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan pangan di tengah tantangan perubahan iklim. Dapat dilihat pada **Gambar II.** berbagai faktor penggerak seperti perubahan iklim, kebijakan ekonomi, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial dapat memengaruhi sistem pangan secara keseluruhan. Hal yang perlu diperhatikan terkait ketahanan pangan yaitu kemampuan untuk memastikan pasokan pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Diversifikasi tanaman dan pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi ekstrem dapat dijadikan salah satu strategi efektif untuk menjaga stabilitas produksi pangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan kesejahteraan petani.

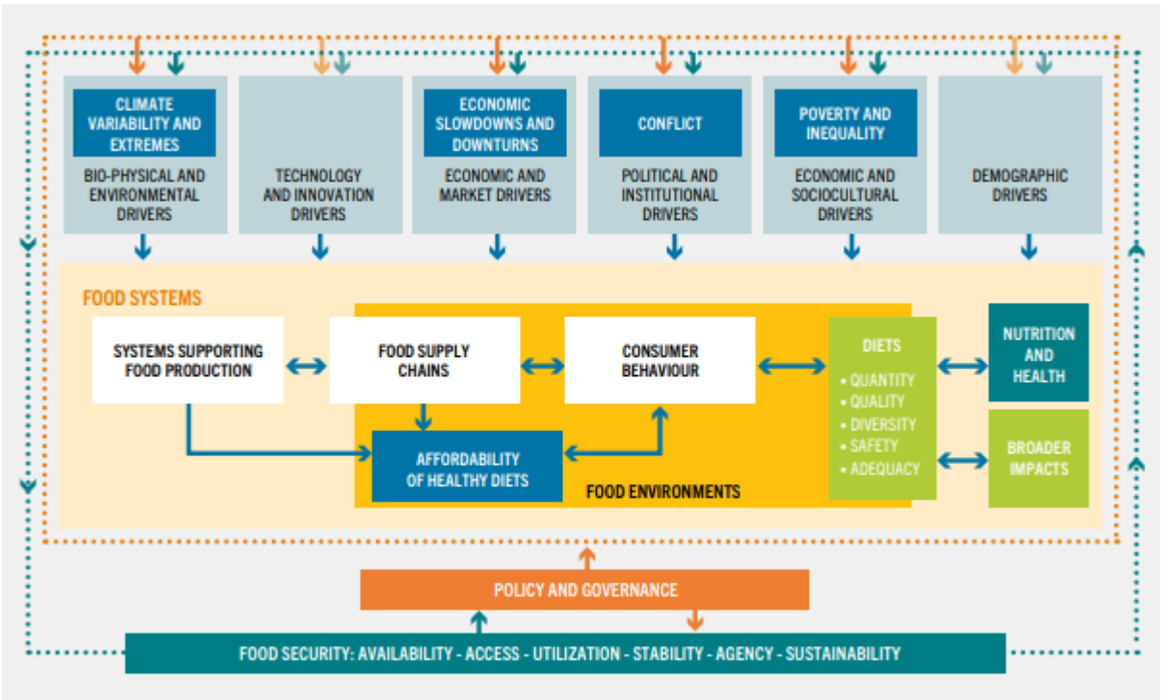

Gambar II.54 Dampak berbagai Aspek dalam Sistem Pangan yang dapat Merugikan Keamanan Pangan dan Gizi

Sumber: The State of Food Security and Nutrition in the World, 2021

Kerja sama dengan pihak internasional dan penerapan kebijakan yang sejalan dengan *Paris Agreement* juga penting untuk memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Simalungun. *Paris Agreement* menekankan pentingnya upaya bersama untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kabupaten Simalungun dapat memanfaatkan bantuan teknis dan finansial dari program-program internasional untuk mengembangkan infrastruktur hijau dan energi terbarukan, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi

ketergantungan pada sumber energi fosil dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.

II.6.2.1.2. Ketahanan Ekonomi dalam Menghadapi Ketidakpastian Global

Ketidakpastian global merupakan isu strategis yang harus menjadi perhatian serius bagi setiap negara, termasuk Kabupaten Simalungun yang turut andil untuk posisi Indonesia. Berdasarkan laporan "*World Economic Situation and Prospects 2023*" dari PBB, ketidakpastian global yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti konflik geopolitik, perubahan iklim, dan pandemi global dapat mengancam stabilitas ekonomi regional. Untuk mengatasi ketidakpastian ini, Kabupaten Simalungun perlu mengadopsi strategi ekonomi yang mampu meningkatkan daya tahan ekonomi lokal terhadap guncangan eksternal. Adapun dalam publikasi "*Human Development Report 2021/2022*" dari UNDP, salah satu strategi yang disarankan adalah diversifikasi ekonomi. Kabupaten Simalungun, yang memiliki ketergantungan besar pada sektor pertanian, perlu mengembangkan sektor-sektor lain seperti manufaktur, jasa, dan pariwisata. Diversifikasi ini tidak hanya akan mengurangi risiko ekonomi yang dihadapi ketika sektor pertanian mengalami hambatan, tetapi juga membuka peluang baru untuk meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Langkah ini dapat memperkuat struktur ekonomi daerah dan meningkatkan kemampuan Kabupaten Simalungun untuk bertahan dari ketidakpastian global.

Selain diversifikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dalam memperkuat ketahanan ekonomi. Menurut laporan "*Skills for a Changing World*" dari World Bank, investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern sangat penting. Pada **Gambar II.** merupakan gambaran ketika kemajuan teknologi semakin cepat dan pendidikan tidak mampu mengikutinya, sehingga banyak orang kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan dunia yang cepat. Kabupaten Simalungun perlu memastikan bahwa masyarakatnya memiliki keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar global. Dengan memiliki SDM yang berkualitas dan adaptif, Kabupaten Simalungun dapat lebih siap menghadapi perubahan ekonomi yang tidak terduga dan memanfaatkan peluang ekonomi baru. Penguatan infrastruktur ekonomi juga merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan.

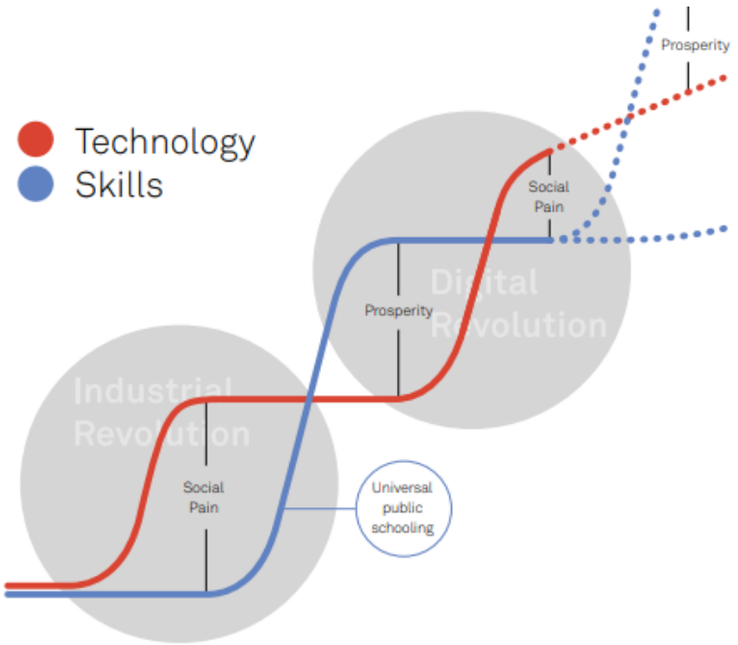

Gambar II.55 Pergerakan Kemajuan Teknologi dan Keterampilan
Sumber: Skills for a Changing World, 2016

Berdasarkan "*Global Infrastructure Outlook*" dari *Global Infrastructure Hub*, investasi dalam infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan teknologi informasi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan **Gambar II.** estimasi kekurangan investasi infrastruktur global, khususnya dalam sektor jalan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan investasi infrastruktur, terutama di sektor jalan dan listrik, terutama di negara-negara berkembang ataupun negara yang sedang berkembang. Jika dikontekstualkan kepada Kabupaten Simalungun, perlu adanya alokasi anggaran yang memadai dan menggalang kerjasama dengan sektor swasta serta lembaga internasional untuk membangun infrastruktur yang dapat meningkatkan efisiensi logistik dan konektivitas ekonomi. Infrastruktur yang kuat akan memberikan fondasi yang kokoh bagi aktivitas ekonomi dan mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian global. Adapun stabilitas makroekonomi perlu dijaga melalui kebijakan fiskal dan moneter yang *prudent*. Dalam laporan "*Fiscal Monitor*" dari IMF, disebutkan bahwa pengelolaan anggaran yang bijaksana dan pengendalian inflasi merupakan elemen penting dalam menjaga ketahanan ekonomi. Kabupaten Simalungun perlu memastikan bahwa pengeluaran publik diarahkan pada proyek-proyek yang produktif dan berkelanjutan, serta menghindari pinjaman yang berlebihan.

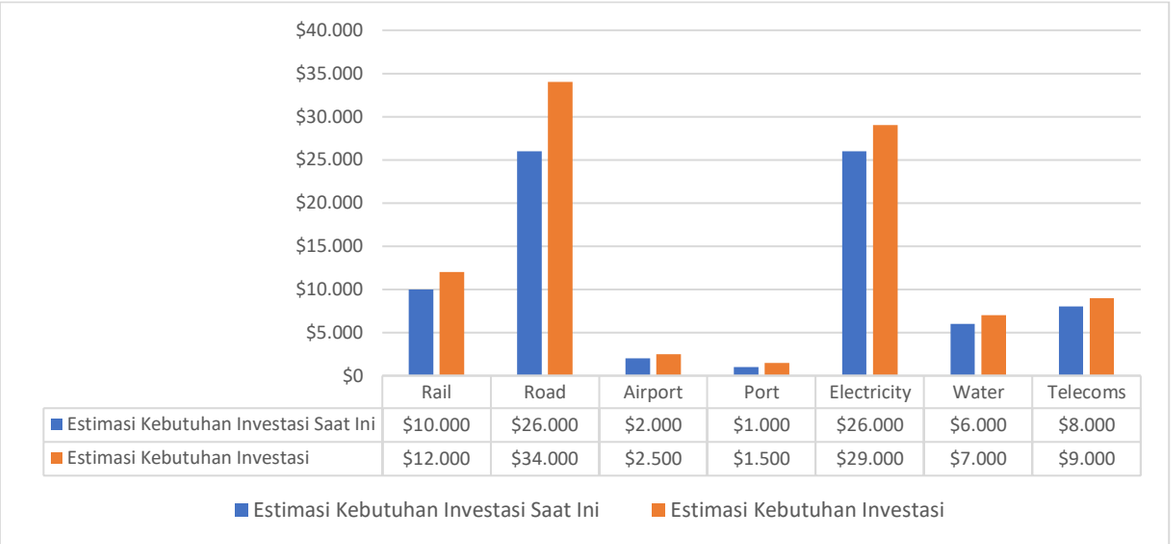

Gambar II.56 Perbandingan Proyeksi Investasi Infrastruktur berdasarkan Sektor 2016 – 2040 (dalam miliar $)

Sumber: Global Infrastructure Outlook, 2018

Gambar di atas menunjukkan adanya perbandingan estimasi kebutuhan investasi saat ini dan estimasi kebutuhan investasi mendatang untuk beberapa sektor infrastruktur, yaitu kereta api (*rail*), jalan (*road*), bandara (*airport*), pelabuhan (*port*), listrik (*electricity*), air (*water*), dan telekomunikasi (*telecoms*).

Pada sektor kereta api, estimasi kebutuhan investasi saat ini adalah $10.000, sedangkan kebutuhan mendatang diperkirakan meningkat menjadi $12.000. Jalan menjadi sektor dengan kebutuhan investasi terbesar, yaitu $26.000 saat ini, yang diproyeksikan naik signifikan menjadi $34.000. Sementara itu, sektor bandara memiliki kebutuhan investasi yang relatif kecil, yaitu $2.000 saat ini dan $2.500 di masa depan. Pelabuhan menunjukkan kebutuhan investasi yang sedikit lebih rendah, dari $1.000 saat ini menjadi $1.500. Di sektor listrik, kebutuhan saat ini sebesar $26.000, yang diprediksi meningkat menjadi $29.000. Sektor air memerlukan investasi sebesar $6.000 saat ini dan akan naik menjadi $7.000. Terakhir, untuk telekomunikasi, kebutuhan investasi saat ini adalah $8.000 dan diperkirakan naik menjadi $9.000. Secara keseluruhan, ada peningkatan kebutuhan investasi di hampir semua sektor, dengan sektor jalan dan listrik menunjukkan angka tertinggi.

II.6.2.2. Isu Strategis Nasional

Pembangunan Kabupaten Simalungun pada periode 2025 – 2029 merupakan tahap pertama sinkronisasi periode perencanaan seluruh daerah di Indonesia, sehingga seluruh daerah menghadapi isu strategis nasional yang hampir serupa di saat yang hampir bersamaan. Dalam upaya mewujudkan sinkronisasi, Provinsi Sumatera Utara sebagai pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global, serta mandala

keberagaman budaya yang harmonis, intervensi untuk arah kebijakan Sumatera Utara yang tercantum pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029 penting untuk dipertimbangkan. Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan untuk tahun 2025 berada pada kisaran 5,1–5,4% dan meningkat menjadi 5,5–6,2% pada tahun 2029. Dalam konteks sosial, upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 6,96-7,46% pada tahun 2025 dan 3,82-4,82% pada tahun 2029 menjadi prioritas utama. Peningkatan Indeks Mobilitas Sosial juga ditargetkan mencapai 0,54% pada tahun 2025 dan 0,59% pada tahun 2029, menunjukkan harapan akan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Transformasi sosial menjadi fokus dalam meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, yang mana penurunan stunting dan pengendalian penyakit akan dilakukan secara masif. Pelayanan kesehatan universal akan diperkuat. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi langkah kunci untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing. Sedangkan, dalam rangka memperkuat tata kelola dan stabilitas, harmonisasi kewenangan antara pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan, terutama di daerah afirmasi dan lambat tumbuh. Penguatan lembaga pengelolaan lintas wilayah dan kerjasama antar pemerintah daerah akan mendukung pencapaian tujuan. Melalui langkah-langkah yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan Sumatera Utara dapat mencapai visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.

Di sektor ekonomi, pengembangan agroindustri dan bioindustri sirkular diharapkan dapat mendorong hilirisasi sumber daya hayati dan meningkatkan produktivitas di sektor perkebunan, seperti kopi dan karet. Pengembangan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pemanfaatan potensi ekonomi kreatif di Kota Medan, Danau Toba, dan Nias, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, infrastruktur transportasi yang memadai, termasuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan pengembangan jaringan kereta api menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas dan konektivitas antar daerah. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai pusat kegiatan ekonomi, terdapat beberapa isu strategis level nasional yang perlu diantisipasi, terutama dengan mempertimbangkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. Oleh karena itu, pembahasan isu strategis nasional diarahkan untuk mengikuti pembagian misi transformasi yang menjadi dasar pembangunan Indonesia.

II.6.2.2.1. Isu Strategis Transformasi Sosial

Transformasi isu sosial menjadi salah satu fokus utama untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi sosial difokuskan pada pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, tangguh, unggul, dan berdaya saing. Namun, masih terdapat tantangan pada masing-masing bidang pembangunan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan transformasi sosial secara menyeluruh. Pembangunan di bidang kesehatan menghadapi tantangan cakupan dan kualitas pelayanan yang masih rendah, dengan penyakit menular dan tidak menular yang tinggi serta ketahanan kesehatan yang belum optimal. Disparitas kapasitas sistem kesehatan di berbagai wilayah juga memengaruhi kualitas layanan. Data menunjukkan bahwa 78,35% rumah sakit telah berhasil mencapai akreditasi paripurna, yang merupakan indikator kualitas pelayanan dan standar keselamatan yang tinggi di rumah sakit. Selain itu, 63,54% Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) juga telah terakreditasi paripurna, menunjukkan peningkatan dalam penyediaan layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan berstandar tinggi.

Dapat disoroti juga di bidang pendidikan, tantangan termasuk ketimpangan akses pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi, belum optimalnya kualitas pendidikan karena sarana-prasarana yang kurang memadai, serta distribusi guru berkualitas yang tidak merata. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global juga masih rendah. Data menunjukan bahwa belum optimalnya kualitas pendidikan (skor PISA membaca: 359; matematika: 366; sains: 383) yang membuat rendahnya kualitas lulusan, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah (40,49% yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi). Perlindungan sosial fokus pada penurunan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan bagi penduduk rentan. Tantangan meliputi rendahnya akurasi dan integrasi program bantuan sosial, serta terbatasnya layanan bagi kelompok rentan.

II.6.2.2.2. Isu Strategis Transformasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi jangka menengah Indonesia menghadapi berbagai isu dan tantangan struktural untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mengejar pertumbuhan berbasis produktivitas. Industrialisasi belum menunjukkan peningkatan signifikan, dengan sektor industri pengolahan mengalami penurunan peranannya. Tantangan utama dalam sektor ini mencakup inefisiensi faktor produksi, rendahnya nilai tambah produk, dan keterbatasan dalam adopsi teknologi serta

pemanfaatan RD&D (*Research, Development and Demonstration)*. RD&D merupakan strategi penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Proses ini melibatkan penerimaan dan penggunaan teknologi baru yang telah melalui tahapan penelitian, pengembangan, serta demonstrasi untuk memastikan efektivitasnya sebelum diterapkan secara luas. Dengan memanfaatkan hasil riset dan pengembangan, pemerintah dan pelaku industri dapat mempercepat modernisasi, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan solusi yang inovatif guna menghadapi tantangan di berbagai sektor, termasuk energi, kesehatan, dan pendidikan. Rendahnya produktivitas tenaga kerja juga menjadi hambatan besar, dengan mayoritas tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah bekerja di sektor bernilai tambah rendah. Sektor pertanian menghadapi tantangan serupa, termasuk rendahnya adopsi teknologi, lambatnya regenerasi petani, dan degradasi kualitas lahan.

Selain itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum berkembang optimal karena keterbatasan SDM dan infrastruktur. Sektor UMKM dan koperasi terkendala dalam permodalan dan adopsi teknologi seiring perkembangan zaman. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga belum optimal, menghadapi isu pasar terbatas dan regulasi yang belum memadai. Upaya pembangunan berkelanjutan melalui transisi energi perlu diakselerasi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, digitalisasi ekonomi dihadapkan pada tantangan keberagaman geografis dan karakteristik daerah, serta ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan yang menyebabkan belum optimalnya kualitas urbanisasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Stabilitas ekonomi makro menghadapi tantangan dalam lima tahun ke depan. Secara eksternal, perlambatan ekonomi mitra dagang utama, divergensi ekonomi global, tekanan inflasi global, kebijakan suku bunga acuan yang tinggi, perubahan iklim, serta tren digitalisasi menjadi tantangan. Belum optimalnya pemahamaan lebih dalam pada sektor keuangan, belum optimalnya fungsi intermediasi sektor keuangan, terbatasnya peran sektor keuangan non-bank, ketimpangan inklusi dan literasi keuangan, belum optimalnya pengembangan keuangan syariah, dan lemahnya perlindungan konsumen/investor menjadi tantangan bagi sektor keuangan dalam menyediakan likuiditas yang memadai untuk pembiayaan pembangunan.

Isu transformasi ekonomi pada RPJMN 2025-2029 meliputi beberapa area utama yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah isu strategis dalam lima tahun ke depan :

1. Industri
2. Ekonomi Biru
3. Ekonomi Kreatif
4. Produktivitas Tenaga Kerja
5. UMKM dan Koperasi
6. Pertanian
7. Pekerjaan Hijau
8. Pengelolaan Hutan Lestari
9. Percepatan Transisi Energi
10. Digital
11. Pariwisata
12. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
13. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Transformasi ekonomi dalam RPJMN 2025-2029 mencakup berbagai area strategis yang perlu ditangani untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Area tersebut mencakup peningkatan sektor industri, pengembangan ekonomi biru dan kreatif, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. UMKM dan koperasi memerlukan dukungan untuk tumbuh dan berkembang, sementara sektor pertanian membutuhkan inovasi untuk meningkatkan produktivitas. Pekerjaan hijau dan pengelolaan hutan lestari harus diprioritaskan untuk menjaga keseimbangan ekologi. Percepatan transisi energi dari fosil ke terbarukan sangat penting untuk ketahanan energi masa depan. Digitalisasi ekonomi, dan pariwisata perlu diperkuat untuk meningkatkan daya saing global. Integrasi ekonomi domestik dan global, serta pengembangan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan yang merata dan inklusif. Melalui isu strategis ini diketahui bahwa perlunya pendekatan holistik dan kolaboratif dalam mengimplementasikan kebijakan yang dapat mengatasi tantangan di setiap area, sehingga dapat mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

II.6.2.2.3. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola

Tata kelola adalah konsep penting dalam pembangunan yang telah diakui secara universal sebagai elemen krusial dalam merumuskan strategi pembangunan. Dalam RPJMN 2025-2029, tata kelola mencakup aspek politik, administrasi, dan hukum. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, akan tetapi bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, efektif, dan berdampak positif secara sosial dan ekonomi. Transformasi tata kelola diperlukan untuk merespon tren global besar (*global megatrends*) dan perubahan lingkungan strategis di tingkat global maupun nasional, terutama terkait dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat. Namun, masih terdapat masalah tata kelola, seperti birokrasi yang prosedural, praktik korupsi, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga, serta intervensi politik. Masalah-masalah ini menjadi kendala utama bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berikut adalah beberapa isu strategis terkait transformasi tata kelola yang masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut :

1. Integritas Partai Politik
2. Transformasi Dan Digitalisasi Pelayanan Politik
3. Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan
4. Sistem Penggajian Tunggal
5. Kualitas Regulasi
6. Manajemen Talenta
7. Integrasi Proses Bisnis

Transformasi tata kelola dalam RPJMN 2025-2029 mencakup berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian untuk memastikan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Integritas partai politik menjadi kunci dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik, sementara transformasi dan digitalisasi pelayanan politik diharapkan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan harus diperkuat untuk mengurangi praktik korupsi dan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana. Penerapan sistem penggajian tunggal akan menyederhanakan struktur penggajian dan mengurangi potensi ketidakadilan. Peningkatan kualitas regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang ada relevan dan efektif. Manajemen talenta yang baik akan memastikan bahwa SDM di sektor publik memiliki kompetensi dan motivasi yang tinggi. Integrasi proses bisnis di berbagai instansi pemerintah diharapkan meningkatkan koordinasi dan efisiensi operasional.

Simpulannya, untuk mencapai transformasi tata kelola yang efektif, diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup penguatan integritas, digitalisasi, peningkatan regulasi, dan manajemen SDM yang strategis, sehingga dapat mendukung tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

II.6.2.2.4. Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Daerah

Memastikan kepastian hukum melalui pemerintahan yang efektif dan responsif, kebijakan harus disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis. Dalam bidang hukum, kelembagaan dan praktik penegakan hukum masih belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM. Kepatuhan hukum masyarakat rendah akibat kurangnya literasi dan pemberdayaan serta akses terhadap keadilan yang terbatas. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, perkembangan teknologi dan teknologi informasi merupakan ancaman sekaligus peluang bagi pembangunan bidang tersebut. Di satu sisi, kemajuan teknologi memungkinkan munculnya ancaman baru seperti serangan siber, penyalahgunaan data, dan teknologi canggih yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengancam keamanan negara. Serangan siber, misalnya, dapat melumpuhkan infrastruktur kritis seperti jaringan listrik, sistem perbankan, dan komunikasi pemerintah. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menyediakan peluang besar bagi peningkatan kapabilitas pertahanan dan keamanan. Teknologi informasi memungkinkan pengumpulan dan analisis data intelijen secara lebih efisien, meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman, dan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga keamanan.

Di bidang demokrasi, kebebasan dan kesetaraan sipil belum terjamin, distribusi informasi dan komunikasi publik tidak merata, serta Pancasila dan konstitusionalisme belum terinternalisasi. Demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan fundamental yang menghambat kematangannya sebagai sistem pemerintahan yang sehat dan berkeadilan. Meski proses pemilihan umum dilakukan secara rutin, demokrasi sering kali bersifat prosedural semata, tanpa disertai dengan substansi yang memperkuat nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Politik uang dan politisasi isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam pemilu menunjukkan bahwa praktik-praktik koruptif dan manipulatif masih marak, mengancam integritas proses demokratis. Selain itu, fungsi lembaga perwakilan seperti DPR belum optimal dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mewakili kepentingan rakyat. Kesenjangan dalam distribusi informasi dan komunikasi publik membuat banyak warga negara tidak mendapatkan informasi yang memadai untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi. Lebih jauh lagi, nilai-nilai Pancasila dan konstitusionalisme yang seharusnya

menjadi landasan moral dan hukum bagi negara belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga memperlemah fondasi demokrasi Indonesia.

Di bidang politik luar negeri, dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, seperti konflik intra dan antarnegara, disrupsi rantai pasok global, dan tren global *economic decoupling*. Konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, baik di dalam negara maupun antarnegara, menciptakan tantangan yang kompleks bagi diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional serta internasional. Disrupsi rantai pasok global, yang diperparah oleh ketegangan perdagangan dan kebijakan proteksionisme, mengancam perekonomian nasional yang bergantung pada keterhubungan global. Tren global *economic decoupling,* terutama antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, memaksa Indonesia untuk menavigasi dengan hati-hati dalam mengambil sikap dan menentukan kebijakan ekonomi luar negeri yang seimbang. Selain itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyelesaikan perundingan batas wilayah dengan beberapa negara tetangga, yang berpotensi memicu ketegangan dan menghambat kerja sama regional.

II.6.2.2.5. Isu Strategis Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Keseimbangan antara pengakuan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan merupakan aspek fundamental dalam proses pembangunan. Agama dan kebudayaan berfungsi sebagai landasan spiritual, etika, dan moral untuk memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia menjadi kunci dalam menggerakkan transformasi pembangunan, dengan dukungan keluarga dalam membentuk nilai-nilai positif dan karakter individu yang berintegritas kuat. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah mendukung kesetaraan gender dan inklusi bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia, guna memastikan pemerataan pembangunan dan penyediaan layanan dasar yang optimal.

Indonesia menghadapi tantangan serius terkait penurunan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati yang terancam, dan ketersediaan sumber daya alam. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan telah mengurangi fungsi ekologis hutan, yang berakibat pada hilangnya habitat bagi flora dan fauna, serta berkurangnya kemampuan hutan dalam menyerap karbon dan menjaga keseimbangan iklim. Keadaan ini semakin mengkhawatirkan karena petani dan nelayan, sebagai produsen pangan utama, juga menghadapi stagnasi kesejahteraan akibat penurunan produktivitas dan keterbatasan akses terhadap teknologi serta pasar. Kondisi ini tidak hanya mengancam

ketahanan pangan nasional, tetapi juga memperburuk kondisi sosial-ekonomi komunitas pedesaan. Selain itu, isu pengelolaan sampah menjadi perhatian penting, dengan peningkatan volume sampah yang mengarah pada perkiraan penuhnya tempat pemrosesan akhir (TPA) pada tahun 2028. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah memperparah situasi ini. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya terpadu dalam konservasi lingkungan, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta pengelolaan sampah yang berkelanjutan, guna memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Berkaitan dengan konservasi lingkungan, upaya juga sedang dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan intensitasnya di sektor-sektor kunci seperti energi, lahan, kelautan dan pesisir, industri, dan pengelolaan limbah. Namun, pemenuhan ketahanan energi masih dihadapkan pada tantangan dalam penyediaan, aksesibilitas, dan harga energi. Dalam konteks ini, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi sangat penting untuk menggantikan peran energi fosil yang masih mendominasi. Untuk mewujudkan transisi ini, dibutuhkan pendanaan yang memadai serta regulasi yang mendukung investasi dan pengembangan EBT. Selain itu, inovasi teknologi juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi energi terbarukan. Kelembagaan yang kuat dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan EBT. Tanpa dukungan tersebut, upaya pengurangan emisi GRK dan peningkatan ketahanan energi akan sulit tercapai, mengingat tantangan yang ada dalam penyediaan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.

Ancaman perubahan iklim dapat meningkatkan kerugian ekonomi, kerentanan masyarakat, dan frekuensi bencana lingkungan, khususnya di sektor air, laut dan pesisir, pertanian, serta kesehatan. Perubahan pola cuaca dan naiknya permukaan laut mengakibatkan banjir dan erosi pantai yang lebih sering dan parah, mengancam komunitas pesisir dan mengganggu produksi pertanian. Masalah kelangkaan air diperparah oleh efisiensi pengelolaan yang rendah dan kerusakan sumber daya air, seperti pencemaran sungai dan danau, yang mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan pertanian. Kondisi air minum dan sanitasi yang buruk meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular, seperti diare dan kolera, yang dapat berdampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Anak-anak yang terpapar sanitasi buruk dan air yang terkontaminasi sering mengalami pertumbuhan terhambat (*stunting*) dan penurunan daya tahan tubuh, menghambat potensi mereka untuk

berkembang secara optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya terpadu dalam pengelolaan sumber daya air, peningkatan infrastruktur sanitasi, serta edukasi kesehatan dan lingkungan yang berkelanjutan, guna melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan iklim dan memastikan kesejahteraan mereka di masa depan.

II.6.2.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan Isu Global, isu Nasional dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2023 serta tantangan yang mungkin dihadapi 5 (lima) tahun yang akan datang, isu strategis Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

II.6.2.3.1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta responsiveness/ketanggapan sistem kesehatan di seluruh wilayah. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif

Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal.

Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

II.6.2.3.2. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan perbaikan jalan,bandara,serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka.

Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis *e-commerce* dan promosi melalui *platform* media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri masyarakat lokal

Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan.

II.6.2.3.3. Pembangunan Sarana Dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah

tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (*urban sprawl).* Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatera masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatera dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga.

Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota- kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurangtersediaan air akan menyebabkan ketidaktercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai.

Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

II.6.2.3.4. Pembangunan Antar Daerah Serta Desa-Kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah

pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

II.6.2.3.5. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan green waste dan ruang terbuka hijau.

Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur

iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera.

Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

II.6.2.3.6. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

II.6.2.3.7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat.

Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan core value.

Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

II.6.2.4. Tinjauan RPJPD Kabupaten Simalungun tahun 2025-2045

Isu strategis jangka panjang memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah, yang memiliki pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

II.6.2.4.1. Penanganan Stunting dan *Zero Poverty*

Kabupaten Simalungun, sebagai salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Sumatera Utara dengan populasi mencapai 1.280.626 jiwa (Dalam Angka, 2022), menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan dan *stunting*. Data BPS 2022 menunjukkan tingkat kemiskinan di wilayah ini mencapai 8,26%, sedikit di bawah rata-rata nasional 9,72%, sementara prevalensi *stunting* mencapai 28%, melebihi rata-rata nasional sebesar 24,4%. Tantangan utama meliputi faktor struktural, kultural, dan geografis. Kemiskinan struktural terpengaruh oleh ketimpangan ekonomi, akses terbatas terhadap sumber daya, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, kemiskinan kultural tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat, dan budaya kerja.

Pemerintah Kabupaten Simalungun telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar, serta melakukan penanganan stunting dengan meningkatkan gizi, layanan kesehatan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak. Stunting bukan hanya masalah fisik pada masa anak-anak, tetapi memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas generasi berikutnya, termasuk risiko penyakit kronis dan keterbatasan dalam kemampuan belajar dan beradaptasi.

Investasi dalam pencegahan *stunting* menjadi krusial dalam pembangunan jangka panjang, menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan untuk mencapai visi Kabupaten Simalungun menuju *zero poverty* dan *zero stunting* pada 2045, mengubah paradigma kemiskinan dan *stunting* di wilayah tersebut melalui kerja sama dan komitmen bersama.

II.6.2.4.2. Hilirisasi Produk Unggulan

Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang kaya akan potensi pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonominya. Dengan luas wilayah mencapai 4.372,50 km2, Kabupaten Simalungun memiliki sektor pertanian dan perkebunan yang berkembang pesat, melalui hasil komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Pemerintah Kabupaten Simalungun aktif dalam modernisasi sektor ini dengan meningkatkan produktivitas melalui infrastruktur pertanian, diversifikasi produk, dan pengembangan hasil hutan.

Potensi hilirisasi produk seperti ubi-ubian, kelapa sawit, karet, dan kopi memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Integrasi sektor pertanian dan perkebunan dengan industri pengolahan lebih lanjut dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan. Langkah-langkah strategis seperti pendirian fasilitas pengolahan modern, pelatihan keterampilan, dan promosi produk lokal mendukung penciptaan rantai nilai yang kuat dan berkelanjutan di Kabupaten Simalungun.

Pemerintah Kabupaten Simalungun juga fokus pada pengembangan industri berbasis karet dan sawit, meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan perencanaan matang dan kolaborasi efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Kabupaten Simalungun dapat mengoptimalkan potensi sektor pertanian dan perkebunan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

II.6.2.4.3. *Skill Development* Tenaga Kerja Industri sebagai Pemanfaatan Bonus Demografi

Kabupaten Simalungun, salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, memiliki potensi besar di sektor industri, terutama industri perkebunan dan manufaktur. Diperkirakan pada tahun 2045, jumlah penduduk Kabupaten Simalungun akan mencapai 2,9 juta jiwa, menciptakan peluang besar untuk memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi ini mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui *skill development* sebagai strategi utama untuk meningkatkan daya saing sektor

industri. Tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan sesuai dengan kebutuhan industri diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Pendidikan vokasi memainkan peran krusial dalam mendukung perkembangan industri perkebunan dan manufaktur di Kabupaten Simalungun. Program pendidikan ini difokuskan pada pembekalan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri lokal. Pembekalan keterampilan pada sektor perkebunan bisa dengan cara siswa diberikan pelatihan intensif dalam perawatan tanaman, teknik panen yang efisien, dan pengolahan hasil perkebunan seperti pengeringan dan penggilingan. Sementara itu, di sektor manufaktur, pendidikan vokasi mengarahkan siswa untuk menjadi operator mesin yang terampil dan teknisi mesin yang mampu melakukan perawatan dan perbaikan mesin, serta memastikan mutu produk sesuai standar sebelum dipasarkan.

Pengembangan SDM industri melalui *skill development* di Kabupaten Simalungun memerlukan kolaborasi erat antara industri, lembaga pendidikan vokasi seperti SMK dan perguruan tinggi, serta dukungan pemerintah daerah. Industri berperan dalam memberikan pelatihan sesuai kebutuhan, sementara lembaga pendidikan menyesuaikan kurikulum untuk mencocokkan dengan tuntutan lapangan kerja. Pemerintah daerah mendukung dengan alokasi dana dan subsidi untuk pelatihan vokasi guna mengoptimalkan potensi bonus demografi dan meningkatkan kualitas SDM yang dapat berkontribusi dalam pengembangan industri secara berkelanjutan.

II.6.2.4.4. Teknologi Digital Untuk Pemerintahan Modern

Peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Simalungun membutuhkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kompetensi aparatur daerah dan manajemen kinerja pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi tata kelola pemerintahan yang baik masih belum optimal di Kabupaten Simalungun. Indikasi rendahnya profesionalitas ASN dalam mengikuti diklat teknis/fungsional dan lemahnya integrasi sistem basis data dengan perencanaan dan penganggaran menghambat pengembangan dan koordinasi kebijakan pemerintah daerah, serta mengurangi akurasi produk rencana daerah.

Fokus pada penguatan integrasi sistem *database*, perencanaan, dan penganggaran berbasis Teknologi Informasi (TI) menjadi krusial dalam mengatasi tantangan ini. Kurangnya integrasi data antar departemen dan unit kerja menyebabkan kesenjangan informasi yang dapat diatasi dengan membangun *database* terintegrasi. Pendekatan ini mendukung perencanaan strategis yang akurat, penganggaran efisien, dan peningkatan kualitas layanan publik, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang tepat.

Implementasi digitalisasi dan *smart governance* berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta membangun infrastruktur TI yang responsif dan transparan. Akuntabilitas yang ditingkatkan dan transparansi yang lebih baik melalui proses digitalisasi mendorong kepercayaan publik dan memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif di Kabupaten Simalungun.

II.6.2.4.5. *Sustainable Agriculture* dan Ketahanan Pangan, Energi Air

Kabupaten Simalungun memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, dengan sebagian besar wilayah seluas 4.300 km^2 dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Komoditas utama meliputi tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu, dan kedelai, serta hortikultura berupa sayuran, buah-buahan, dan bunga. Kelapa sawit mendominasi perkebunan dengan luas lahan sekitar 30.393 hektar, diikuti oleh kopi dengan luas lahan 8.430 hektar untuk kopi arabika dan 1.897 hektar untuk kopi robusta. Kakao dan karet juga memiliki potensi besar, masing-masing dengan luas lahan 2.352 hektar dan 5.374 hektar. Potensi ini menjadikan sektor agrikultur sebagai isu strategis di Kabupaten Simalungun.

Pendekatan pertanian berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) merupakan kunci dalam mengelola sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan masa kini dan masa depan tanpa merusak lingkungan. Pertanian berkelanjutan berkontribusi pada ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi pangan, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan akses pangan bagi masyarakat miskin. Selain itu, ketahanan energi dapat tercapai melalui produksi energi terbarukan dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Ketahanan air juga dapat didukung dengan penghematan penggunaan air, peningkatan kualitas air, dan perlindungan sumber daya air.

Penerapan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Simalungun dapat dilakukan melalui berbagai praktik seperti agroforestri, pertanian organik, dan pertanian presisi. Agroforestri menggabungkan berbagai jenis tanaman untuk meningkatkan produksi pangan dan melindungi tanah dari erosi. Pertanian organik menghindari penggunaan pupuk dan pestisida sintetis, meningkatkan kesuburan tanah, dan menghasilkan produk yang lebih sehat. Teknologi dalam pertanian membantu memantau kondisi tanaman dan tanah, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mengurangi limbah. Untuk mencapai pertanian berkelanjutan, diperlukan komitmen dari pemerintah, petani, pelaku bisnis, dan konsumen.

II.6.2.4.6. Degradasi Lingkungan dan Pemanfaatan SDA Berkelanjutan

Aktivitas pertambangan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, memiliki potensi besar namun berdampak negatif pada lingkungan. Kegiatan pertambangan menyebabkan perubahan bentuk lahan, erosi, serta pencemaran air dan udara dengan limbah tambang yang mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya. Kerusakan lingkungan ini berdampak pada alih fungsi tutupan vegetasi, ancaman bagi flora dan fauna, serta menimbulkan kekeringan dan penyebaran penyakit. Dampak sosial dari aktivitas tambang termasuk konflik antara masyarakat dan perusahaan, persaingan lahan, serta banjir dan pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan di Kabupaten Simalungun masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Aktivitas industri, pertanian, dan perkebunan, serta pembuangan sampah yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah. Dampak negatif meliputi kerusakan ekosistem, risiko kesehatan bagi masyarakat, dan kerugian ekonomi karena penurunan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah dengan membentuk peraturan daerah dan menegakkan hukum, upaya ini belum berhasil sepenuhnya karena minimnya kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta kekurangan sumber daya manusia dan anggaran.

Kawasan lindung sekitar Danau Toba di Kabupaten Simalungun memiliki fungsi strategis bagi lingkungan dan perekonomian masyarakat lokal, dengan luas sekitar 26.000 hektar yang terdiri dari hutan lindung, taman nasional, dan cagar alam. Fungsi utama kawasan lindung ini termasuk sebagai daerah resapan air, penyedia oksigen, habitat bagi flora dan fauna, serta pelindung keanekaragaman hayati di sekitar Danau Toba. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kerusakan kawasan lindung, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran masih menjadi hambatan. Kerusakan kawasan lindung berdampak pada penurunan kualitas air Danau Toba, peningkatan risiko banjir dan kekeringan, serta ancaman terhadap keberlanjutan perekonomian lokal, termasuk penurunan daya tarik wisata dan pendapatan dari sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam. Upaya pelestarian melalui pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan advokasi sangat penting untuk menjaga kelestarian kawasan lindung di sekitar Danau Toba.

Langka yang dapat dilakukan dalam pelestarian lingkungan dapat ditempuh dengan melakukan program Kampung Iklim yang difokuskan pada kegiatan penghijauan, pembibitan dan pelatihan untuk mengantisipasi dan mengurangi perubahan iklim.

II.6.2.4.7. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, merupakan KEK pertama di Indonesia yang diresmikan pada tahun 2015. Dengan luas lahan 2.002,7 hektar, kawasan ini fokus pada pengembangan industri kelapa sawit dan karet hilir. KEK Sei Mangkei memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi karena lokasinya yang strategis di pintu gerbang Selat Malaka dan ketersediaan bahan baku yang melimpah.

Meskipun potensial, KEK Sei Mangkei menghadapi tantangan infrastruktur yang terbatas. Keterbatasan akses jalan dan jarak yang jauh ke pelabuhan dan bandara menghambat distribusi barang dan meningkatkan biaya logistik. Selain itu, investasi yang berhasil ditarik hingga kini hanya Rp3,2 triliun dari 11 perusahaan, jauh dari target Rp129 triliun pada tahun 2031. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan investasi juga menjadi kendala utama dalam pengembangan KEK ini.

Pengembangan KEK Sei Mangkei membutuhkan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Kerja sama dengan pihak swasta juga penting untuk mempercepat pembangunan ini. Selain itu, daya saing KEK dapat ditingkatkan dengan memberikan insentif pajak, menyederhanakan proses perizinan, dan meningkatkan promosi investasi, baik nasional maupun internasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan KEK Sei Mangkei dapat tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun dan Provinsi Sumatera Utara.

II.6.2.4.8. KSPN Danau Toba

Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 58 tahun 2017. KSPN Danau Toba mencakup wilayah 8 kabupaten di Sumatera Utara termasuk Simalungun. Kawasan Wisata Utama (KWU)/Key Tourism Areas (KTA) dalam ITMP Danau Toba di wilayah Kabupaten Simalungun yakni : Girsang Sipangan Bolon. Dalam mendukung pengembangan KSPN Danau Toba di wilayah Kabupaten Simalungun telah dibangun beberapa infrastruktur yakni :

1. Penataan Kawasan Pantai Bebas Parapat.
2. Pembangunan Gerbang KSPN.
3. Pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi –Parapat.
4. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Parapat.
5. Penataan trotoar dan drainase di Parapat.
6. Penataan Kawasan Kumuh di Parapat.

Pengembangan KTA Parapat akan difokuskan pada tema MICE dan rekreasi. Lokus pengembangan KTA Parapat mencakup pusat dan sub - pusat KTA Parapat . P usat KTA berada di area pariwisata yang telah berkembang sekitar Kelurahan Tigaraja dan Kel urahan Pardamean Ajibata. Sub - pusat pertama ada di Desa Sibaganding dan sub - pusat kedua berada di Sibisa, Kec. Ajibata.

Untuk mendukung daya dukung daya tampung lingkungan dalam pengembangan KSPN Danau Toba, hal yang menjadi permasalahan yakni terkait penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan pembangunan SPAM IKK yang mendukung layanan hotel dan perumahan warga di sekitar Danau Toba.

Selain KSPN Danau Toba, Kabupaten Simalungun juga memiliki kawasan pariwisata yang telah direvitalisasi dan akan terus dikembangkan seperti kawasan pariwisata di harangan girsang, bangunan Ikan Mas yang berada di Kecamatan Pematang Sidamanik dan Pembudidayaan tanaman Stevia yang dapat dijadikan sebagai objek wisata baru.

II.6.2.4.9. Kebijakan Program Nasional 3 (Tiga) Juta Rumah

Pemerintah Kabupaten Simalungun mendukung kebijakan Program Nasional Tiga Juta Rumah terutama dalam pemenuhan backlog (kepemilikan) rumah di Kabupaten Simalungun serta penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya mendukung program 3 juta rumah di Kabupaten Simalungun akan dilakukan sinkronisasi dan verifikasi melalui pendataan backlog dan rumah tidak layak (RTLH) yang dilakukan di kecamatan se- Kabupaten Simalungun melalui Program Perumahan. Pendataan dilakukan untuk Perumahan Perdesaan terutama pada kecamatan dengan jumlah penduduk sangat banyak yakni kecamatan Bandar, Tanah Jawa, Dolok Batu Nanggar, Gunung Malela. Untuk mendukung penanganan RTLH, Pemerintah Kabupaten Simalungun akan mendukung melalui penanganan renovasi RTLH melalui anggaran daerah. Guna merealisasikan program nasional tiga juta rumah, pemerintah akan melakukan inovasi pembiayaan, transparansi serta mendukung kebijakan pendukung.

II.6.2.4.10. Upaya Penanggulangan Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang memerlukan perhatian serius, karena secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kenaikan harga barang dan jasa yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menuntut peran aktif dari pemerintah daerah.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas harga, Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan berbagai upaya strategis dan terintegrasi. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif, sejalan dengan kerangka kebijakan 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif).

Kabupaten Simalungun telah melakukan beberapa upaya penanggulangan inflasi daerah seperti :

1. Operasi Pasar dan Pasar Murah

   Dilaksanakan secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok, terutama menjelang hari besar keagamaan atau saat terjadi tekanan inflasi.

2. Penguatan Produksi dan Distribusi Lokal

   Pemerintah daerah mendorong peningkatan kapasitas produksi sektor pertanian, peternakan, dan UMKM melalui bantuan teknis, fasilitasi akses permodalan, serta pembangunan infrastruktur pendukung distribusi.

3. Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah

   Membangun dan memperkuat sistem cadangan pangan guna mengantisipasi kekurangan pasokan akibat bencana alam, gangguan distribusi, atau lonjakan permintaan.

4. Pemantauan Harga dan Stok Secara Rutin

   TPID melakukan pemantauan berkala terhadap harga dan ketersediaan komoditas strategis di pasar untuk mendeteksi gejolak harga secara dini.

5. Digitalisasi Sistem Informasi Harga Pangan

   Penerapan sistem informasi harga secara daring untuk memberikan data yang transparan dan real-time kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

6. Koordinasi Antarlembaga dan Pemerintah Pusat

   Penguatan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta Bank Indonesia dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi.

7. Kampanye Edukasi Publik

   Mengedukasi masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak, pemanfaatan produk lokal, dan pentingnya menjaga stabilitas harga.

Dengan implementasi berbagai kebijakan dan program tersebut, Pemerintah Daerah berharap inflasi tetap berada dalam kisaran yang terkendali, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan pengendalian inflasi daerah pada akhirnya akan berdampak positif

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh di tingkat regional.

II.6.2.4.11. Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sesuai instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025. Tujuannya mempercepat penguatan ekonomi desa melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal, seperti simpan pinjam, logistik, atau klinik desa.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 adalah strategi nasional untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memperkuat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi.
2. Menjadikan desa sebagai pilar pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
3. Mengoptimalkan potensi desa melalui koperasi yang menyediakan layanan seperti sembako murah, klinik desa, simpan pinjam, cold storage, dan logistik desa.

Selain itu tujuan utama dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, membangun ekonomi desa yang kuat dan mandiri, serta mengurangi ketergantungan pada rentenir dan tengkulak. Program ini juga bertujuan untuk memperkuat swasembada pangan dan mewujudkan pemerataan ekonomi di desa. Sedangkan tujuan-tujuan spesifik Koperasi Desa Merah Putih:

1. Meningkatkan Kesejahteraan

Koperasi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat desa.

2. Membangun Ekonomi Desa

Koperasi diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

3. Mengurangi Ketergantungan

Membantu masyarakat desa untuk tidak lagi bergantung pada tengkulak dan rentenir.

4. Meningkatkan Swasembada Pangan

Koperasi dapat berperan dalam mendukung ketahanan pangan di desa.

5. Meningkatkan Inklusi Keuangan

Koperasi dapat memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat desa.

6. Menekan Inflasi

Koperasi dapat menjadi stabilisator inflasi dengan mengendalikan harga sembako dan kebutuhan pokok masyarakat.

7. Memperbaiki Rantai Distribusi

Koperasi dapat memperpendek rantai distribusi barang sehingga harga jual bisa lebih rendah dan merata.

8. Menciptakan Lapangan Kerja

Koperasi dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa.

II.6.2.4.12. Kawasan Pertanian Terpadu

Kawasan Pertanian Terpadu merupakan suatu wilayah yang dirancang dan dikelola secara khusus untuk mengintegrasikan berbagai aktivitas pertanian dalam satu system yang saling mendukung dan berkelanjutan. Kawasan Pertanian Terpadu tidak hanya berfokus pada budidaya dan produksi pertanian, akan tetapi dengan mengintegrasikan sektor lain yang meliputi :

1. Produksi tanaman pangan dan holtikultura, seperti padi dan sayuran.
2. Peternakan, seperti ayam dan sapi.
3. Perikanan, yakni budidaya ikan tawar.
4. Pengolahan atau hilirisasi hasil pertanian, seperti pembuatan kripik, abon dan bawang goring.
5. Pengolahan limbah, seperti pemanfaatan kotoran hewan untuk menghasilkan energy bio gas.
6. Agrowisata dan edukasi, yakni sebagai objek wisata yang juga memberikan edukasi.
7. Pemasaran Terpadu, dimana hasil pertanian dapat dijual secara langsung, tidak melalui tengkulak.
8. Pengemasan hasil pertanian yang baik.

Optimalisasi Kawasan Pertanian Terpadu tentunya sangat dampak yang sangat positif, adapun tujuan Kawasan Pertanian Terpadu dapat meningkatkan produktivitas dan efesiensi pertanian secara, menciptakan ketahanan pangan local dan memperkuat ketahanan pangan nasional, menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan perkenomian secara lokal.

Kecamatan Dolok Silau ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Terpadu untuk Kabupaten Simalungun pada tahun 2023. Kecamatan Dolok Silau secara geografis memiliki luas lahan yang cukup dan tingkat kesuburan tanah yang baik serta memiliki potensi lahan pertanian yang luas,sumber air yang mencukupi untuk pengairan lahan basah maupun kering, dan secara demografi memiliki jumlah penduduk 17.000 lebih yang ada di 14 Nagori. Hasil produksi pertaniannya didominasi oleh tanaman holtikultura dan sayuran seperti, bawang merah, cabai, wortel, jeruk dan lainnya, dimana tanaman ini tersebar hampir diseluruh nagori.

Kecamatan Dolok Silau ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Terpadu, juga didukung oleh kecamatan lain sebagai daerah penyangga, yakni Kecamatan Silimakuta, Pamatang

Silimakuta, Purba, dan Haranggaol, dimana empat Kecamatan tersebut memiliki geografis yang mirip dengan Kecamatan DolokSilau, sehingga cocok sebagai daerah penyangga atau pendukung.

Dengan potensi yang ada di Kecamatan Dolok Silau, perlu dilakukan optimalisasi Kawasan Pertanian Terpadu diperlukan beberapa langkah diantaranya :

1. Perencanaan yang baik.

   Dengan melaksanakan zonasi lahan yang sesuai fungsi untuk lahan tanaman holtikultura, perikanan maupun peternakan. Hal ini penting mengingat potensi pada setiap nagori tidak sama.

2. Sistem pertanian modern.

   Teknologi pertanian mutlak menjadi sarana pendukung untuk optimalisasi pertanian dan hasil produksinya, seperti penerapan rumah kaca, pemakaian drone dan pengadaan Cold Storage sebagai salah satu perlakuan pasca panen.

3. Penguatan SDM.

   Dilakukan dengan melakukan pelatihan, akses teknologi pertanian dan peran serta Dinas Terkait melalui Petugas PPL.

4. Akses Permodalan dan Pemasaran.

   Saat ini sudah ada KUR pertanian, namun potensi gagal panen oleh petani juga perlu mendapat perhatian agar dapat diatasi, sehingga petani dapat menanam kembali meskipun telah mengalami gagal panen.

Kawasan Pertanian Terpadu di Kecamatan Dolok Silau Ditetapkan pada tahun 2023 bulan Juni dengan luas 2500 Ha perlu memperhatikan beberapa hal teknis agar tujuan Kawasan Pertanian Terpadu menjadi program yang dapat diandalkan dan memberikan kontribusi bagi kemandirian pangan lokal maupun nasional, perlu memperhatikan aspek teknis, manajerial dan sosial, meliputi :

1. Zonasi lahan dan jenis tanaman dan produksi disesuaikan dengan kemampuan petani.
2. Memperkuat peran Petani, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, sehingga petani benar-benar merasa bagian dari KPT, bukan semata Program Pemerintah.
3. Kecenderungan Petani kurang optimal dari sisi manajerial, perlu mendapat perhatian melalui pelatihan.
4. Memperkuat Koordinasi Antara Petani,Pemerintah melalui Pemerintahan terdekat yakni Nagori, Kecamatan dan Dinas Terkait utamanya PPL.
5. Mempermudah akses perbankan dengan tetap memperhatikan kualifikasi calon peminjam.
6. Perlu merubah kebiasaan lama bagi petani maupun kelompok tani, yakni aktif dan bersemangat hanya ketika akan menerima bantuan.

7. Perlu adanya langkah strategis untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar yaitu harga yang tidak jelas, misalnya harga jual jauh dibawah biaya produksi petani, bahkan hasil produksi tidak laku dijual, misalnya akibat over produksi. Kondisi ini kadang terjadi pada tanaman sayuran seperti kubis.
8. Perlu adanya koordinasi dan pemantauan berkala untuk perkembangan dan serta kendala yang dihadapi.
9. Mengingat KPT tidak sebatas fokus pada peningkatan hasil produksi, namun mencakup Aspek yang lebih luas, yakni pemasaran, jaminan harga hingga pengolahan hasil produksi. Maka keterlibatan seluruh stakeholder (Petani, Pemerintah, Swasta dan pengusaha) sangat diperlukan.

II.6.2.4.13. Pinjaman Daerah

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.
Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum mengenai pinjaman daerah adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
7. PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

Prinsip-prinsip dasar mengenai pinjaman daerah diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.

Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman daerah adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

2. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut:
   DSCR = (PAD + (DBH – DBHDR) + DAU) – BW ≥ 2,5 Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain.
3. Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
4. Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Sumber pinjaman dari Pinjaman Daerah diantaranya bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Jenis dan jangka waktu pinjaman pada pinjaman daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pinjaman Jangka Pendek.
   Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.
2. Pinjaman jangka Menengah..
   Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.

3. Pinjaman Jangka Panjang.

   Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Penggunaan Pinjaman Daerah telah diatur sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

1. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. Khusus Pinjaman Jangka Panjang dalam bentuk Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

Prosedur pinjaman daerah adalah sebagai berikut :

1. Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.
2. Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pusat Investasi Pemerintah.
3. Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari Perbankan.
4. Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari Masyarakat (Obligasi Daerah).

Larangan Penjaminan pada Pinjaman Daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain;
2. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan;
3. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Pembayaran Kembali Pinjaman pada Pinjaman Daerah adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan;
2. Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah tersebut.

Pelaporan Pinjaman pada Pinjaman Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;
2. Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang harmonisasi kebijakan fiskal nasional disebutkan bahwa pinjaman daerah dapat bersumber dari:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. LKB (Lembaga Keuangan Bank) ; dan/atau
4. LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank).

Dimana pinjaman daerah tersebut dapat berbentuk konvensional atau syariah. Dalam prosedurnya dibutuhkan kesepakatan pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman. Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan perubahan atas kesepakatan Kepala Daerah dan pemberi pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi keadaan darurat berupa bencana skala nasional atau bencana skala daerah yang menyebabkan pelunasan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud apabila melebihi ketentuan dalam perjanjian pinjaman, dapat dilakukan perpanjangan waktu pelunasan melalui perubahan perjanjian pinjaman.

Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:

1. Pengelolaan Kas;

   Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud dapat dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD, namun harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
2. Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah;

   Pinjaman Daerah dalam rangka Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.
3. Pengelolaan portofolio utang Daerah;

   Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan portofolio utang Daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk menjaga komposisi utang yang optimal dan untuk meminimalkan biaya utang yang terkendali.

4. Penerusan pinjaman dan atau penyertaan modal kepada BUMD.

   Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud berupa penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud adalah yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud berasal dari APBN. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud diberikan melalui Menteri setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui penugasan kepada LKB atau LKBB.

II.6.2.5. Tinjauan RTRW Kabupaten Simalungun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun tahun 2025-2029 harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simalungun tahun 2011-2031 dikarenakan keselarasan antara keduanya merupakan landasan utama dalam memastikan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Simalungun terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dengan keselarasan antara kedua rencana ini, pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam RTRW, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dikemudian hari di Kabupaten Simalungun. Selain itu, keselarasan antara RPJMD dan RTRW penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan di Kabupaten Simalungun sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keselarasan antara RPJMD dan RTRW merupakan bagian dari strategi yang penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Simalungun.

Sesuai penjelasan dalam Undang – Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, muatan tata ruang diwujudkan melalui struktur dan pola ruang. Adapun struktur ruang dijelaskan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang mengacu pada distribusi

atau penyebaran unsur-unsur fisik atau fungsional. Muatan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Simalungun tahun 2021 – 2041 dijelaskan melalui arah pemanfaatan struktur ruang dan indikasi program struktur ruang, seperti pada tabel berikut,

Tabel II.77 Muatan Rencana Struktur Ruang dalam RTRW Kabupaten Simalungun Tahun 2010 - 2030

No.	ARAH PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN DALAM PERIODE RPJPD				MUATAN SASARAN POKOK DALAM RPJPD
			I	II	III	IV	
A	**Perwujudan Rencana Struktur Ruang**						
A.1	**Sistem Pusat Permukiman**	Kecamatan Gunung Malela, dan Keseluruhan Kabupaten Simalungun					
A.2	**Rencana Jalan Umum**	Keseluruhan Kabupaten Simalungun					
A.3	**Rencana Jalan Tol**	Kec. Bandar, Kec. Bosar Maligas, Kec. Pamatang Silima Huta, Kec. Bandar Masilam, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kec. Panei, Kec. Panombeian Pane, Kec. Pematang Sidamanik, Kec. Sidamanik, Kec. Tapian Dolok, Kec. Bandar Masilam, Kec. Bosar Maligas, Kec. Ujung Padang, Kec. Tapian Dolok,					
A.4	**Rencana Terminal**	Kec. Raya, Kec. Silimakuta, Kec. Tanah Jawa, Kec. Tapian Dolok					
A.5	**Rencana Jaringan Jalur Kereta Api**	Kec. Dolok Panribuan, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kec. Hatonduhan, Kec. Siantar, Kec. Tanah Jawa, Kec. Bosar Maligas, Kec. Huta Bayu Raja, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kec. Siantar, Kec. Dolog Masagal, Kec. Pamatang Silima Huta, Kec. Panei, Kec. Panombeian Pane, Kec. Purba, Kec. Silimakuta,					

No.	ARAH PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN DALAM PERIODE RPJPD				MUATAN SASARAN POKOK DALAM RPJPD
			I	II	III	IV	
A	**Perwujudan Rencana Struktur Ruang**						
A.6	**Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan**	Kec. Haranggaol Horison, Kec. Dolok Pardamean, Kec. Pematang Sidamanik, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kec. Pamatang Silima Huta, Kec. Purba, Kec. Silima Huta					
A.7	**Perwujudan Jaringan Energi**	Kec. Pematang Sidamanik, Kec. Bosar Maligas, Kec. Hatonduhan, Kec. Huta Bayu Raja, Kec. Raya, Kec. Dolok Panribuan, Kec. Panombeian Pane, Kec. Silou Kahean					
A.8	**Perwujudan Jaringan Telekomunikasi**						
A.9	**Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air**	Bendungan Bah Bolon					
A.10	**Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**	Kec. Panombeian Pane, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kec. Bandar, Kec. Siantar, Kec. Gunung Malela, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kec. Siantar, Kec. Siantar, Kec. Tapian Dolok					

Kesalarasan program RPJMD penting untuk mengacu kepada pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Program-program ini dapat dijadikan acuan dalam proses memanfaatkan lahan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah Kabupaten Simalungun.

II.6.2.6. Isu KLHS Kabupaten Simalungun

Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025 – 2029, diperlukan beberapa identifikasi isu strategis yang telah disusun dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029. Isu-isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun disarikan dari analisis isu-isu pembangunan berkelanjutan. Melalui metode tabulasi silang dapat dilihat hubungan keterkaitan isu utama berdasarkan capaian TPB RPJMD dengan isu strategis RPJPN, isu

strategis RPJMD Provinsi Sumatera Utara, isu RPPLH Provinsi Sumatera Utara, dan isu kondisi umum wilayah.

Isu Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (Kesehatan dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk) pada KLHS RPJMD memiliki kesamaan dengan isu masih rendahnya infrastruktur dan Kualitas SDM yang makin rendah pada isu strategis RPJPN. Isu tersebut memiliki kesamaan dengan peningkatan pelayanan dasar pada Isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara, isu penurunan kuantitas dan mutu air permukaan dan pengelolaan persampahan yang merupakan isu pokok pada RPPLH Provinsi Sumatera Utara, serta dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kinerja jasa layanan ekosistem pada isu kondisi umum wilayah.

Isu Penyediaan Akses Hunian Yang Layak Secara Merata dan Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur, memiliki kesamaan dengan isu masih rendahnya infrastruktur dan integrasi domestik terbatas pada isu strategis RPJPN. Isu tersebut memiliki kesamaan dengan peningkatan pelayanan dasar pada Isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara, isu penurunan kuantitas dan mutu air permukaan dan pengelolaan persampahan yang merupakan isu pokok pada RPPLH Provinsi Sumatera Utara, dan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa layanan ekosistem serta dampak dan risiko lingkungan hidup (mencakup persampahan dan limbah) pada isu kondisi umum wilayah.

Isu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Perbaikan Struktur Ekonomi, Industri/Manufaktur) memiliki kesamaan dengan isu produktivitas yang rendah, ekonomi laut yang belum optimal, kontribusi UMKM dan koperasi yang masih rendah serta kualitas SDM yang rendah, belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas pada isu RPJPN, berkaitan dengan isu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas tenaga kerja pada Isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara, berkaitan dengan isu posisi strategis menjadi pusat perdagangan, jasa, dan pariwisata, dan dipengaruhi oleh isu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada kondisi umum wilayah.

Isu Penguatan daya saing dan pariwisata memiliki kesamaan dengan isu Pariwisata di bawah potensinya dan Infrastruktur dan literasi digital rendah pada isu RPJPN, berkaitan dengan isu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas tenaga kerja pada Isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara, berkaitan dengan isu posisi strategis menjadi pusat perdagangan, jasa, dan pariwisata, dan dipengaruhi oleh isu Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam pada kondisi umum wilayah.

Isu Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja memiliki kesamaan dengan Rendahnya tingkat produktivitas disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah pada isu RPJPN, berkaitan dengan isu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas tenaga kerja pada Isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara, dan dipengaruhi oleh isu Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam pada kondisi umum wilayah.

Isu Pengurangan Kemiskinan dan Isu Penguatan Ketahanan Pangan pada KLHS RPJMD memiliki kesamaan dengan isu produktivitas yang rendah, pariwisata yang belum optimal, ekonomi kelautan yang belum optimal, masih rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi serta infrastruktur dan literasi digital yang masih rendah yang merupakan isu pada RPJPN, memiliki kesamaan dengan isu pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan pada Isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara, isu penurunan kuantitas dan mutu air permukaan serta alih fungsi hutan dan lahan yang merupakan isu pokok pada RPPLH Provinsi Sumatera Utara, dan dipengaruhi oleh kondisi umum daerah yang tercermin dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim serta ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Isu Pembangunan Pendidikan Berkualitas memiliki kesamaan dengan isu Infrastruktur dan literasi digital rendah dan Kualitas SDM yang makin rendah, lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi (IPTEKIN) pada Isu RPJPN, memiliki kesamaan dengan isu peningkatan pelayanan dasar pada KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara.

Isu Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pengurangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak memiliki kesamaan dengan isu kualitas SDM yang rendah, sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan, dan Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal pada isu RPJPN, memiliki kesamaan dengan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara.

Isu terkait Pengelolaan Lingkungan hidup Berkelanjutan sinergis dengan kebijakan tata ruang berbasis pembangunan berkelanjutan memiliki kesamaan dengan isu Pembangunan belum berkelanjutan pada RPJPN, kesamaan dengan isu peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati pada Isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara, ancaman kehilangan keanekaragaman hayati yang merupakan isu RPPLH Provinsi Sumatera Utara, dan dipengaruhi oleh kinerja

layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati pada Kondisi Umum wilayah.

Isu Pencegahan dan Penanggulangan Bencana memiliki kesamaan dengan isu Pembangunan belum berkelanjutan pada RPJPN, isu penanganan perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana pada KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara, memiliki unsur yang sama dengan isu penurunan kualitas udara pada isu pokok RPPLH Provinsi Sumatera Utara, dan dipengaruhi oleh kondisi umum daerah yang tercermin dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.

Isu Optimalisasi tata kelola pemerintahan terkait dengan semua isu strategis menunjukkan bahwa peran dan/atau tidak berperannya pemerintah sangat besar dalam menyebabkan munculnya/terselesaikannya isu-isu tersebut. Dengan demikian terlihat bahwa isu strategis berdasarkan capaian TPB pada KLHS RPJMD masih sejalan dan saling terkait dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Dengan melihat korelasi dan saling pengaruh antar isu menggunakan tabulasi silang antara isu utama capaian indikator TPB serta isu strategis dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya, maka dapat dirumuskan isu berdasarkan muatan KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1) Pengurangan Kemiskinan
2) Penguatan Ketahanan Pangan
3) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
4) Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
5) Penyediaan Akses Hunian Yang Layak Secara Merata
6) Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur
7) Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja
8) Penguatan Daya Saing Pariwisata
9) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Perbaikan Struktur Ekonomi, Industri/Manufaktur)
10) Peningkatan PUG dan Pengurangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
11) Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
12) Pembangunan Pendidikan Berkualitas
13) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (Kesehatan dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk)

II.6.2.7. Isu Strategis Kabupaten Simalungun

Sesuai isu strategis internasional, nasional dan provinsi yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan isu strategis Kabupaten Simalungun. Isu strategis Simalungun merupakan muatan yang perlu diantisipasi dalam pembangunan yang akan datang. Isu strategis Kabupaten Simalungun terdiri dari 6 (enam) isu strategis yaitu, optimalisasi bonus demografi melalui peningkatan kualitas SDM sebagai penguatan fondasi pembangunan; pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan; dan perlindungan sosial masyarakat; penguatan fondasi untuk transformasi ekonomi yang berkelanjutan; *good governance* untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel; serta perwujudan stabilitas daerah; ketahanan ekologi untuk mengantisipasi degradasi lingkungan; dan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi yang modern dan berkelanjutan.

Tabel II.78 Penyusunan Isu Strategis Kabupaten Simalungun

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Pertumbuhan signifikan dalam sektor Pertanian, kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 56,6%, Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 0,19% , serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 15,24% menjadi Katalis penting bagi perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Simalungun.	Belum Meratanya Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul untuk Mendukung Perkembangan Sektor Unggulan Kabupaten Simalungun	Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja		Isu Transformasi Sosial	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Optimalisasi Bonus Demografi Melalui Peningkatan Kualitas SDM Sebagai Penguatan Fondasi Pembangunan
Momentum bonus demografi dengan jumlah penduduk berusia produktif mencapai 646.731 jiwa		Pembangunan Pendidikan Berkualitas				
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (Kesehatan dan Pengendalian Penduduk)				

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Tren Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari 74,19 pada tahun 2020 menjadi 75,88 pad atahun 2024. Serta capaian IKK urusan pemberdayaan masyarakat desa yang mencapai 100%.		Peningkatan PUG dan Pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak				
Berdasarkan pada proyeksi skenario pendapatan daerah 2025-2029 Kabupaten Simalungun menunjukan pertumbuhan pendapatan daerah yang positif dan stabil di angka 5% setiap tahun. Hal ini mencerminkan adanya potensi terhadap perkembangan ekonomi daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi regional, nasional maupun global.	Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi yang berkualitas	Peningkatan pertumbuhan ekonomi (perbaikan struktur ekonomi, industri/manufaktur)	Ketahanan Ekonomi dalam Menghadapi Ketidakpastian Global	Isu Transformasi Ekonomi	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Penurunan Indeks Gini sebesar 12,88% dari 0,295 pada tahun 2023 menjadi 0,257 pada tahun 2024 merupakan sinyal pemerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Simalungun		Penguatan daya saing pariwisata				
Nilai Net Ekspor pada tahun 2024 mencapai 12.769,31 juta rupiah yang menjadi landasan besarnya potensi sektor perdagangan luar negeri		Pengurangan kemiskinan				Penguatan Fondasi Untuk Transformasi Ekonomi Yang Berkelanjutan
Peningkatan inovasi tata kelola pemerintah daerah yang diukur melalui Indeks Inovasi Daerah, berdasarkan data tahun 2023 dan 2024 indeks inovasi daerah menunjukan nilai inovatif.	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		Isu Transformasi Tata Kelola	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif	Good Governance Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel, Serta Perwujudan Stabilitas Daerah
Peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Simalungun dari 40,47 pada tahun 2021 menjadi 62,29 pada tahun 2024						
Kondisi geografis Kabupaten		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		Isu Transformasi	Pengelolaan Sumber Daya	Ketahanan Ekologi Untuk

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Simalungun yang meliputi lahan pertanian serta hutan yang masih alami. Penetapan kawasan lindung berdasarkan pola ruang RTRW Kabupaten Simalungun sebesar 67.000,89 ha.	Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Alam (SDA) Berkelanjutan	Mengantisipasi Degradasi Lingkungan
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 sebesar 219,94(milliar rupiah) dengan tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai 113,14% pada periode yang sama. Hal ini menjadi sinyal positif dalam upaya untuk mengoptimalkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah.	Belum Optimalnya Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Penguatan Ketahanan Pangan		Isu Transformasi Sosial Isu Transformasi Ekonomi	Pembangunan Sarana Dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi yang Modern Dan Berkelanjutan
		Penyediaan Akses Hunian yang layak secara merata			Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur	
		Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur			Pembangunan Antar Daerah Serta Desa-Kota	

II.6.2.7.1. Optimalisasi Bonus Demografi Melalui Peningkatan Kualitas SDM Sebagai Penguatan Fondasi Pembangunan

Dalam penguatan fondasi yang perlu didukung oleh kesiapan modal daerah, Kabupaten Simalungun perlu membentuk sumber daya manusia yang unggul. Bonus demografi mengacu pada fenomena jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar daripada jumlah penduduk non-produktif atau anak-anak serta lansia, yang ditunjukkan dengan tingginya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Kabupaten Simalungun seperti banyak daerah di Indonesia, sedang menghadapi periode bonus demografi yang dapat menjadi momentum penting untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Kabupaten Simalungun dengan potensi hilirisasi yang cukup besar perlu mengantisipasi *influx* migrasi yang cukup besar, mempertimbangkan jumlah tenaga kerja usia produktif di kabupaten/kota sekitar yang cukup besar. Hal ini untuk memastikan tenaga kerja lokal dapat memanfaatkan potensi daerah secara optimal, tanpa *spillover* yang besar ke kabupaten/kota lain.

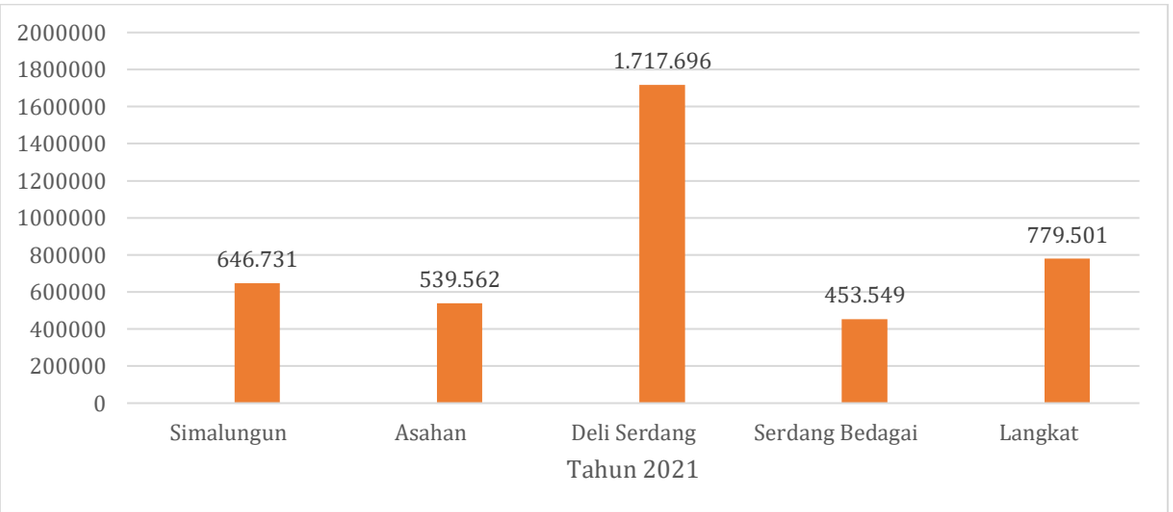

Gambar II.57 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Simalungun dengan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2024

Pada tahun 2021, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Simalungun mencapai 646.731 jiwa, sementara di Kabupaten Asahan memiliki populasi sebanyak 539.562 jiwa. Di sisi lain, Deli Serdang merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak mencapai 1.717.696 jiwa, diikuti oleh Kabupaten Langkat dan Kabupaten Serdang Bedagai dengan masing-masing populasi sebanyak 779.501 jiwa dan 453.549 jiwa.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Simalungun penting untuk memanfaatkan bonus demografi ini secara optimal, terutama melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh penduduk Kabupaten Simalungun. Hal ini

termasuk memastikan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, pelatihan untuk guru, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global. Selain itu, penting untuk mendorong pengembangan keterampilan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional, untuk mempersiapkan penduduk Kabupaten Simalungun berpartisipasi dalam pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkembang seperti pariwisata, industri kreatif, pertanian modern, dan teknologi informasi.

II.6.2.7.2. Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat

Isu strategis mengenai pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan sosial masyarakat merupakan fokus utama di Kabupaten Simalungun yang masih perlu diantisipasi dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Meskipun Kabupaten Simalungun memiliki sumber daya alam yang melimpah, tantangan untuk mengatasi disparitas sosial-ekonomi dan memastikan bahwa seluruh penduduk kabupaten dapat merasakan manfaat dari pembangunan tetap menjadi prioritas. Pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Simalungun melibatkan distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Program-program pemerataan perlu dirancang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang masih memerlukan peningkatan aksesibilitas. Investasi dalam infrastruktur jalan, air bersih, dan listrik menjadi krusial untuk memastikan bahwa seluruh penduduk dapat mengakses layanan yang sama, meningkatkan mobilitas ekonomi, dan memfasilitasi pertumbuhan sektor-sektor produktif di berbagai daerah.

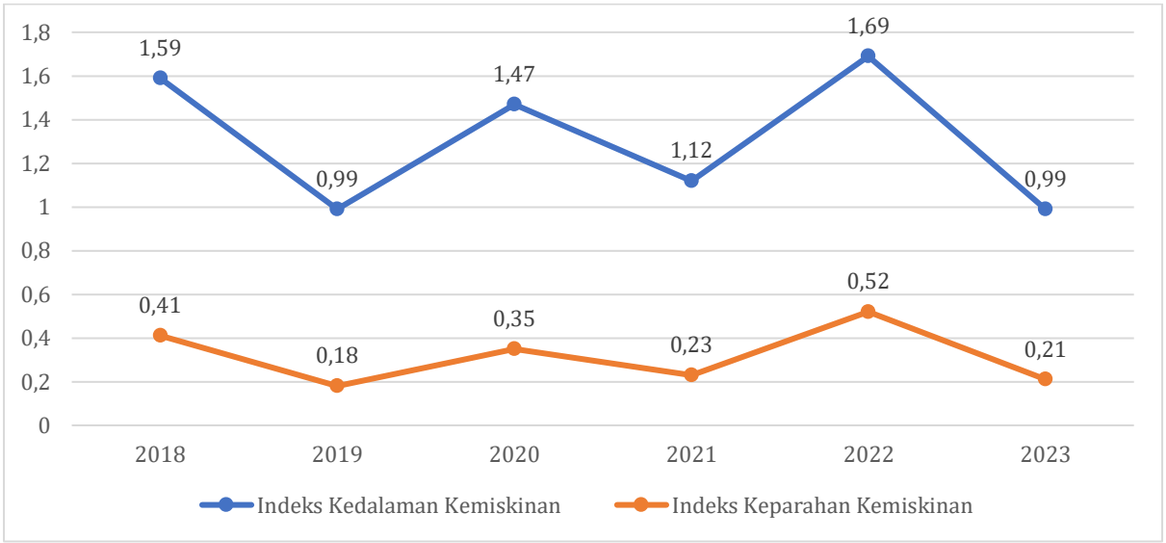

Gambar II.58 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2023 (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2024

Di Kabupaten Simalungun, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan tren yang fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2023. Indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan tajam pada tahun 2019 dan 2023 dengan masing-masing angka sebesar 0,99%. Sementara indeks keparahan kemiskinan menunjukkan variasi dengan penurunan terendah pada tahun 2019 sebesar 0,18% dan peningkatan terbesar pada tahun 2022 sebesar 0,52%. Tantangan ini membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut.

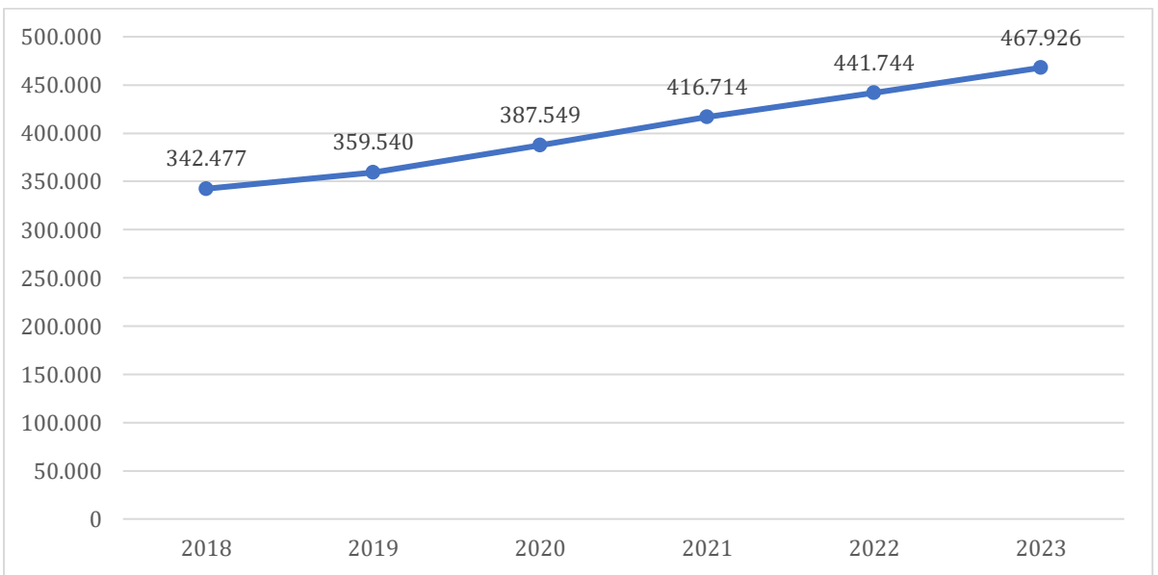

Gambar II.59 Angka Kemiskinan Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2024

Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun telah menunjukkan penurunan, dari tahun 2018 hingga 2023, dengan garis kemiskinan naik dari 342.477

pada 2018 menjadi 467.926 pada 2023, masih ada tantangan besar terutama di daerah-daerah terpencil dan wilayah dengan akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi. Program bantuan sosial, pelatihan keterampilan untuk penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha mikro dan kecil menjadi strategi yang penting untuk memberdayakan masyarakat yang rentan secara ekonomi. Perlindungan sosial masyarakat juga menjadi aspek krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Simalungun. Ini mencakup perlindungan terhadap anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya dari berbagai bentuk eksploitasi dan marginalisasi. Program-program seperti bantuan sosial, pendidikan tentang hak-hak sosial, dan keamanan sosial perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang aman dan layak.

II.6.2.7.3. Penguatan Fondasi Untuk Transformasi Ekonomi Yang Berkelanjutan

Untuk mengantisipasi dinamika ekonomi global serta memaksimalkan potensi daerah Kabupaten Simalungun, telah dirumuskan arah kebijakan periode 2025 – 2029 yaitu untuk melakukan penguatan fondasi transformasi ekonomi. Implementasi penguatan fondasi tidak hanya bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun juga untuk memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penguatan fondasi transformasi ekonomi mencakup diversifikasi sektor ekonomi, bahwa melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam yang beragam (perkebunan, pertanian, dan potensi industri), diversifikasi sektor ekonomi dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu sekaligus untuk meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap perubahan pasar global. Selain itu, diversifikasi juga dilakukan untuk memberikan lebih banyak peluang kerja bagi penduduk setempat, sehubungan dengan meningkatnya bonus demografi Kabupaten Simalungun di periode yang akan datang. Adapun pembangunan infrastruktur untuk kegiatan industri merupakan pijakan utama dalam membangun fondasi transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur jalan, transportasi, energi, dan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Simalungun, juga mendukung efisiensi dalam proses produksi dan distribusi, serta memfasilitasi akses terhadap pasar regional dan internasional.

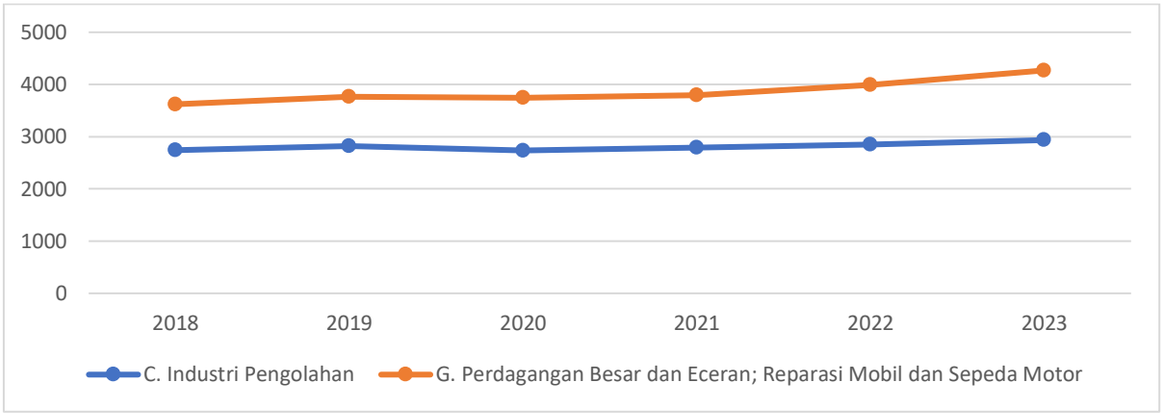

Gambar II.60 Nilai Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, 2024

Industri pengolahan dan perdagangan di Kabupaten Simalungun cenderung stagnan sejak tahun 2018. Stagnansi ini terjadi saat perkembangan ekonomi daerah semakin melambat karena berbagai faktor. Penyebab utamanya adalah infrastruktur yang terbatas, seperti jalanan yang tidak memadai dan kurangnya jasa transportasi. Beberapa faktor lain yang berkontribusi terhadap stagnansi ekonomi adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan kurangnya pendidikan yang berkualitas. Untuk mengatasi stagnansi ini, perlu adanya langkah-langkah strategis yang meliputi peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta reformasi kebijakan ekonomi untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan industri di Kabupaten Simalungun.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci dalam transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Program pelatihan dan pendidikan yang terfokus pada keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM lokal. Dengan meningkatkan kualitas SDM, Kabupaten Simalungun dapat menarik investasi, mendorong inovasi, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan fondasi transformasi ekonomi juga melibatkan upaya untuk menjaga lingkungan hidup dan keberlanjutan. Praktik ekonomi yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan penerapan teknologi hijau, perlu didorong untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Keberlanjutan lingkungan bukan hanya untuk generasi saat ini, akan tetapi juga untuk masa depan anak cucu, sehingga upaya ini harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan ekonomi di Kabupaten Simalungun.

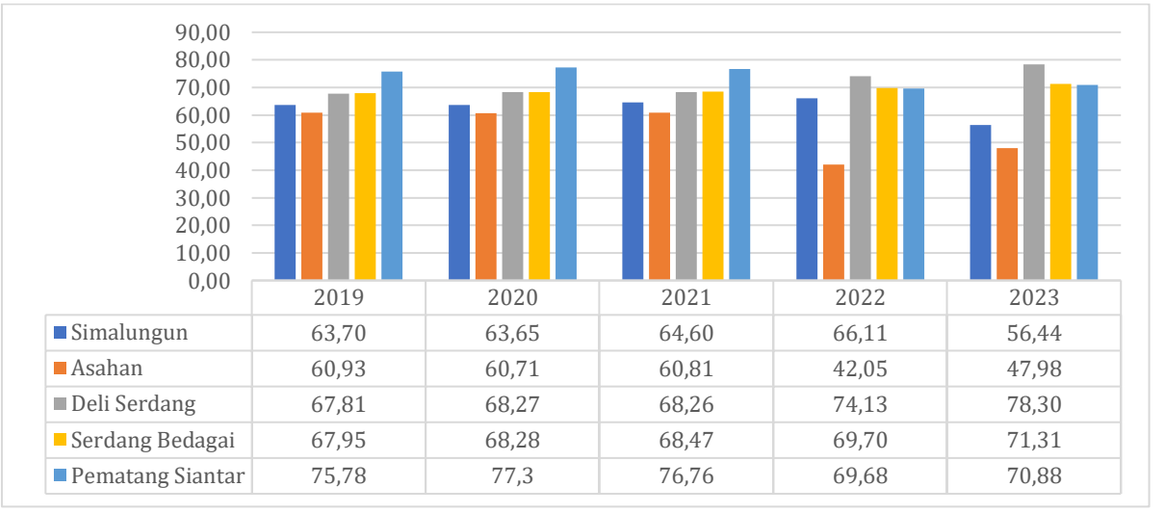

	2019	2020	2021	2022	2023
Simalungun	63,70	63,65	64,60	66,11	56,44
Asahan	60,93	60,71	60,81	42,05	47,98
Deli Serdang	67,81	68,27	68,26	74,13	78,30
Serdang Bedagai	67,95	68,28	68,47	69,70	71,31
Pematang Siantar	75,78	77,3	76,76	69,68	70,88

Gambar II.61 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMA/SMK Kabupaten Simalungun dengan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2024

Data Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi dalam tingkat partisipasi pendidikan menengah atas di beberapa kabupaten dan kota di sekitar Kabupaten Simalungun. Di Kabupaten Simalungun sendiri, APM mengalami penurunan dari 63,70% pada tahun 2019 menjadi 56,44% pada tahun 2023. Sementara itu, Kabupaten Asahan mengalami fluktuasi dari 60,93% pada tahun 2019 menjadi 47,98% pada tahun 2023. Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, dengan Deli Serdang mencapai 78,30% pada tahun 2023 dan Serdang Bedagai mencapai 71,31%. Di Pematang Siantar, meskipun mengalami fluktuasi, APM tetap relatif tinggi dengan kisaran 75,78% hingga 77,3% dari tahun 2019 hingga 2023.

Perubahan APM ini mencerminkan berbagai faktor seperti kebijakan pendidikan, aksesibilitas sekolah, dan faktor ekonomi yang mempengaruhi partisipasi pendidikan di masing-masing daerah. Peningkatan APM yang stabil di beberapa daerah menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan, sementara penurunan atau fluktuasi di daerah lain mungkin memerlukan strategi khusus untuk meningkatkan kembali partisipasi pendidikan.

Penguatan fondasi transformasi ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Simalungun memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek diversifikasi ekonomi, infrastruktur, penguatan kapasitas SDM, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, diharapkan Kabupaten Simalungun dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

II.6.2.7.4. *Good Governance* Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel, Serta Perwujudan Stabilitas Daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* adalah fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Simalungun. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan faktor utama untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya publik, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan, yaitu pelaksanaan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang perlu dievaluasi per lima tahun. Transparansi dalam konteks pelaksanaan *Good Governance* mengacu pada keterbukaan informasi publik yang meliputi kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan pengelolaan keuangan publik. Kabupaten Simalungun perlu meningkatkan aksesibilitas informasi publik kepada masyarakat, baik melalui portal *online*, pertemuan terbuka atau publikasi reguler mengenai kegiatan dan program pemerintah. Langkah ini tidak hanya meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan, tetapi juga mengurangi risiko terjadinya praktik korupsi. Selanjutnya, akuntabilitas merupakan faktor penentu dalam memastikan bahwa keputusan pemerintah di Kabupaten Simalungun didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dan transparan. Mekanisme akuntabilitas perlu diperkuat melalui audit internal dan eksternal yang teratur, pelaporan keuangan yang jelas dan terbuka, serta sistem pengaduan publik yang efektif. Dengan menegakkan akuntabilitas, Kabupaten Simalungun dapat memastikan bahwa setiap keputusan dan pengeluaran diarahkan untuk kepentingan publik secara adil dan efektif. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang diselenggarakan melalui konsultasi publik, forum dialog, atau mekanisme partisipasi lainnya. Promosi nilai-nilai etika dan integritas di kalangan birokrasi juga krusial dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Simalungun. Sistem pengawasan internal yang kuat, pelatihan etika, serta penegakan kode etik profesi bagi para pegawai publik perlu diperkuat untuk menghindari praktik-praktik nepotisme, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat memberikan insentif bagi perilaku dan praktik yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap kegiatan pelayanan publik.

Lebih lanjut, Kabupaten Simalungun juga perlu mewujudkan stabilitas daerah melalui penegakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengendalian inflasi.

Kondisi ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan rantai pasok bahan-bahan pokok ke dalam dan keluar Kabupaten Simalungun. Pengelolaan rantai pasok (*supply chain*) yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi, termasuk petani, produsen, distributor, dan pengecer. Berdasarkan publikasi UNDP tentang pengelolaan *supply chain* di daerah pedesaan, salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola aliran barang dan bahan baku. Penerapan sistem manajemen *supply chain* berbasis teknologi dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi *bottleneck*, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memastikan ketersediaan barang di pasar. Selain itu, infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas penyimpanan yang baik sangat penting untuk mendukung kelancaran aliran barang.

Pengendalian inflasi juga menjadi kunci dalam memastikan stabilitas ekonomi makro daerah. Menurut *World Bank Annual Report*, inflasi yang tidak terkendali dapat mengganggu kestabilan harga barang dan jasa, mengurangi daya beli masyarakat, dan merusak kepercayaan investor. Pemerintah Kabupaten Simalungun perlu mengimplementasikan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini dapat mencakup pengaturan harga barang-barang pokok, peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk memastikan pasokan yang stabil, serta kerjasama dengan pemerintah pusat untuk mengendalikan harga bahan bakar dan energi. Selain itu, perlu diantisipasi mekanisme penyediaan bahan pokok melalui kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnership*/PPP) juga dapat menjadi strategi efektif dalam pengelolaan *supply chain* dan pengendalian inflasi. Melalui PPP, pemerintah dapat menarik investasi untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kelancaran *supply chain* dan meningkatkan kapasitas produksi lokal. Publikasi dari OECD tentang kemitraan publik-swasta menunjukkan bahwa PPP dapat memberikan manfaat signifikan dalam hal transfer teknologi, peningkatan efisiensi operasional, dan pembiayaan proyek infrastruktur.

II.6.2.7.5. Ketahanan Ekologi Untuk Mengantisipasi Degradasi Lingkungan

Ketahanan ekologi menjadi isu strategis yang krusial dalam konteks Kabupaten Simalungun, mengingat kekayaan alamnya yang perlu dijaga dengan baik untuk keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup upaya untuk mengantisipasi dan mengelola degradasi lingkungan yang dapat terjadi akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim. Kabupaten Simalungun memiliki beragam

ekosistem, termasuk hutan, lahan pertanian, dan kawasan perairan, yang semuanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi.

Perlindungan dan restorasi hutan menjadi fokus utama dalam mempertahankan ketahanan ekologi Kabupaten Simalungun. Hutan-hutan tidak hanya menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati, akan tetapi juga berperan dalam mengatur iklim lokal, menjaga kualitas air, serta mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Upaya konservasi hutan, termasuk penghijauan, penanaman kembali, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa ekosistem hutan tetap produktif dan berfungsi dengan baik.

Berdasarkan dokumen KLHS Kabupaten Simalungun terkait dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), pentingnya mempertimbangkan aspek lingkungan dalam rencana pembangunan agar tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan, memastikan bahwa sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Pada **Tabel II.79** dapat dilihat keterkaitan indikator TPB dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten Simalungun berbasis Jasa Lingkungan.

Tabel II.79 Keterkaitan Indikator TPB dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten Simalungun berbasis Jasa Lingkungan

Tujuan, target, dan indikator TPB yang berhubungan dengan Jasa lingkungan		Capaian	Persen Luas wilayah Jasa lingkungan (JL)
Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk			
1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.			
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	SB	Jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Simalungun dominan kategori rendah 43,7% dan sangat rendah 17,1%. Sedangkan kategori tinggi hanya 24,6 % dan sangat tinggi 7,4%
			Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48 Persen dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3%.
			Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan lingkungan hidup kategori rendah (53,8%), sedang (28,3%) dan tinggi (5,1 %).
1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.			
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	SB	Jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Simalungun dominan kategori rendah 43,7% dan sangat rendah 17,1%. Sedangkan kategori tinggi hanya 24,6% dan sangat tinggi 7,4%.
			Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48% dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3%.
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	SB	Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan lingkungan hidup kategori rendah (53,8%), sedang (28,3%) dan tinggi (5,1%)
1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.			

Tujuan, target, dan indikator TPB yang berhubungan dengan Jasa lingkungan		Capaian	Persen Luas wilayah Jasa lingkungan (JL)
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	SB	Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48% dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3%.
			Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan lingkungan hidup kategori rendah (53,8%), sedang (28,3%) dan tinggi (5,1 %).
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	SB	Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48% dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3%.
			Jasa lingkungan penguraian limbah kategori sedang 57 %, kategori tinggi 14,9% dan sangat rendah 10,9%.
			Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan lingkungan hidup kategori rendah (53,8 %), sedang (28,3%) dan tinggi (5,1%).
1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.			
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	TD	Jasa lingkungan pengaturan perlindungan dan bencana alam dominan kategori sedang (50,9%) sedangkan kategori rendah sekitar 31,4% dan kategori sangat tinggi hanya 12,2 %. Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir dominan kategori rendah 33,6% dan sangat rendah 34,6%, sedangkan kategori sangat tinggi hanya 12,2%.
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	TD	
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	TD	
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	TD	

Tujuan, target, dan indikator TPB yang berhubungan dengan Jasa lingkungan		Capaian	Persen Luas wilayah Jasa lingkungan (JL)
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BB	
· Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, ketersediaan air bersih, tempat tinggal yang layak dan berkelanjutan. Jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Simalungun dominan kategori rendah 43,7% dan sangat rendah 17,1%. Sedangkan kategori tinggi hanya 24,6% dan sangat tinggi 7,4 %. Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48% dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3 %. Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan lingkungan hidup kategori rendah (53,8%), sedang (28,3%) dan tinggi (5,1%).			
· Status daya dukung pangan pangan dan air masih belum terlampaui sampai tahun 2045.			
· Kabupaten Simalungun memiliki kemampuan dalam pengaturan perlindungan dan bencana alam dominan kategori sedang (50,9%) sedangkan kategori rendah sekitar 31,4% dan kategori sangat tinggi hanya 12,2%. Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir dominan kategori rendah 33,6% dan sangat rendah 34,6%, sedangkan kategori sangat tinggi hanya 12,2 %.			
· Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah sangat perlu untuk disusun.			
Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan			
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.			
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	TD	Jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Simalungun dominan kategori rendah 43,7 % dan sangat rendah 17,1%. Sedangkan kategori tinggi hanya 24,6% dan sangat tinggi 7,4%.
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underwight) pada anak balita	SB	Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48% dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3%.
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	SB	Jasa lingkungan pendukung siklus hara kategori tinggi (48,0%), sedang (19,1%), dan rendah (18,7%)
2.1.3.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	TD	Jasa lingkungan pendukung biodiversitas dominan kategori sedang 47,87, kategori tinggi 32,1% dan sangat tinggi 12,2 %. Sedangkan kategori rendah hanya 7,8 %.
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.			

Tujuan, target, dan indikator TPB yang berhubungan dengan Jasa lingkungan		Capaian	Persen Luas wilayah Jasa lingkungan (JL)
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	SB	Jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Simalungun dominan kategori rendah 43,7 % dan sangat rendah 17,1%. Sedangkan kategori tinggi hanya 24,6 % dan sangat tinggi 7,4%
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	SB	
Ketidakcukupan konsumsi pangan dan air serta kualitas konsumsi pangan akan akan berpengaruh terhadap kualitas manusia. Kualitas kesehatan akan meningkat apabila kualitas konsumsi pangan baik sehingga dapat menghindari malnutrisi pada anak (2.2.2*) dan anemia pada ibu hamil (2.2.2.(a)). Jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Simalungun dominan kategori rendah 43,7% dan sangat rendah 17,1%. Sedangkan kategori tinggi hanya 24,6% dan sangat tinggi 7,4%.			
Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.			
3.9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.			
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	TD	Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48% dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3%
			Jasa lingkungan penguraian limbah kategori sedang 57 %, kategori tinggi 14,9% dan sangat rendah 10,9 %.
			Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan lingkungan hidup kategori rendah (53,8%), sedang (28,3%) dan tinggi (5,1%).

Tujuan, target, dan indikator TPB yang berhubungan dengan Jasa lingkungan		Capaian	Persen Luas wilayah Jasa lingkungan (JL)
Bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah akan menyebabkan potensi keracunan.			
· Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48% dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3%.			
· Jasa lingkungan penguraian limbah kategori sedang 57%, kategori tinggi 14,9% dan sangat rendah 10,9%.			
· Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan lingkungan hidup kategori rendah (53,8 %), sedang (28,3 %) dan tinggi (5,1 %)			
· Jasa lingkungan pendukung siklus hara kategori tinggi (48,0%), sedang (19,1%), dan rendah (18,7%)			
Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua			
6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.			
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	SB	Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48% dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3%.
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	TD	
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	SB	
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.			
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	TD	Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48% dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3% Jasa lingkungan penguraian limbah kategori sedang 57%, kategori tinggi 14,9% dan sangat rendah 10,9%.
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	SB	
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	SB	

Tujuan, target, dan indikator TPB yang berhubungan dengan Jasa lingkungan		Capaian	Persen Luas wilayah Jasa lingkungan (JL)
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	BB	
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	BB	
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.			
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	TD	Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48 % dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3%. Jasa lingkungan penguraian limbah kategori sedang 57%, kategori tinggi 14,9% dan sangat rendah 10,9%.
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	TD	
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	SB	
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	SB	
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.			
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	TD	Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48% dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3%.
6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.			
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	TD	Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48%dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3%.

Tujuan, target, dan indikator TPB yang berhubungan dengan Jasa lingkungan		Capaian	Persen Luas wilayah Jasa lingkungan (JL)
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	TD	
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	TD	
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	TD	
· Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48% dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3% serta Jasa lingkungan penguraian limbah kategori sedang 57%, kategori tinggi 14,9% dan sangat rendah 10,9%.			
· Untuk mengatasi masalah sanitasi, perlu dilakukan pembangunan infrastruktur air limbah (6.2.1.(e)), serta pembangunan fasilitas sanitasi dan lumpur tinja (6.3.1.(a)).			
· Pengelolaan sumber daya air perlu diatur dan diinternalisasi ke dalam RTRW untuk menjamin penyediaan air bersih dapat terus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.			
Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara			
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	SB	Jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Simalungun dominan kategori rendah 43,7% dan sangat rendah 17,1%. Sedangkan kategori tinggi hanya 24,6 % dan sangat tinggi 7,4%. Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48% dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3%. Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan lingkungan hidup kategori rendah (53,8%), sedang (28,3%) dan tinggi (5,1%)
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	TD	
10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.			
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 Persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	TD	Jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Simalungun dominan kategori rendah 43,7% dan sangat rendah 17,1%. Sedangkan kategori tinggi hanya 24,6 % dan sangat tinggi 7,4 %.

Tujuan, target, dan indikator TPB yang berhubungan dengan Jasa lingkungan		Capaian	Persen Luas wilayah Jasa lingkungan (JL)
			Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48% dan sangat rendah 31,6%. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3%.
			Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan lingkungan hidup kategori rendah (53,8 %), sedang (28,3%) dan tinggi (5,1 %)
· Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, ketersediaan air bersih, tempat tinggal yang layak dan berkelanjutan. Jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Simalungun dominan kategori rendah 43,7% dan sangat rendah 17,1 %. Sedangkan kategori tinggi hanya 24,6% dan sangat tinggi 7,4 %. Jasa lingkungan penyediaan air bersih dominan kategori rendah 48 % dan sangat rendah 31,6 %. Sedangkan kategori tinggi hingga sangat tinggi 9,3%. Jasa lingkungan tempat tinggal dan ruang hidup sangat rendah sangat tinggi (0,87%) dan sangat rendah (51,72%).			
· Status daya dukung pangan pangan dan air masih belum terlampaui sampai tahun 2045.			
Tujuan 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan			
11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.			
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	TD	Jasa lingkungan pengaturan perlindungan dan bencana alam dominan kategori sedang (50,9%) sedangkan kategori rendah sekitar 31,4 % dan kategori sangat tinggi hanya 12,2%. Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir dominan kategori rendah 33,6 %dan sangat rendah 34,6%, sedangkan kategori sangat tinggi hanya 12,2 %
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	SB	
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	TD	
11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.*			
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BB	Jasa lingkungan pengaturan perlindungan dan bencana alam dominan kategori sedang (50,9 %) sedangkan kategori rendah sekitar 31,4% dan kategori sangat tinggi hanya 12,2%.

Tujuan, target, dan indikator TPB yang berhubungan dengan Jasa lingkungan		Capaian	Persen Luas wilayah Jasa lingkungan (JL)
			Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir dominan kategori rendah 33,6 %dan sangat rendah 34,6 %, sedangkan kategori sangat tinggi hanya 12,2 %.
· Kabupaten Simalungun memiliki kemampuan dalam pengaturan perlindungan dan bencana alam dominan kategori sedang (50,9%) sedangkan kategori rendah sekitar 31,4 %dan kategori sangat tinggi hanya 12,2 %. Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir dominan kategori rendah 33,6% dan sangat rendah 34,6%, sedangkan kategori sangat tinggi hanya 12,2%.			
· Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah sangat perlu untuk disusun.			
Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan			
12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.			
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	SB	Jasa lingkungan penguraian limbah kategori sedang 57%, kategori tinggi 14,9% dan sangat rendah 10,9%.
			Jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan lingkungan hidup kategori rendah (53,8%), sedang (28,3%) dan tinggi (5,1%).
Jasa lingkungan penguraian limbah kategori sedang 57 %, kategori tinggi 14,9% dan sangat rendah 10,9%. Masih sangat perlu upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah timbulan sampah yang didaur ulang 12.5.1.(a) melalui Peningkatan kapasitas sarpras TPA, peningkatan jumlah tenaga petugas lapangan, dan sosialisasi pengurangan timbulan sampah.			
Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya			
13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.			
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BB	Jasa lingkungan pengaturan perlindungan dan bencana alam dominan kategori sedang (50,9%) sedangkan kategori rendah sekitar 31,4 % dan kategori sangat tinggi hanya 12,2%. Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir dominan kategori rendah 33,6% dan sangat rendah 34,6 %, sedangkan kategori sangat tinggi hanya 12,2 %.

<table>
<tr><th colspan="2">Tujuan, target, dan indikator TPB yang berhubungan dengan Jasa lingkungan</th><th>Capaian</th><th>Persen Luas wilayah Jasa lingkungan (JL)</th></tr>
<tr><td colspan="4">· Kabupaten Simalungun memiliki kemampuan dalam pengaturan perlindungan dan bencana alam dominan kategori sedang (50,9%) sedangkan kategori rendah sekitar 31,4 Persen dan kategori sangat tinggi hanya 12,2%. Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir dominan kategori rendah 33,6% dan sangat rendah 34,6%, sedangkan kategori sangat tinggi hanya 12,2 %.</td></tr>
<tr><td colspan="4">· Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah sangat perlu untuk disusun.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tujuan 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati</td></tr>
<tr><td>15.1.1.(a)</td><td>Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.</td><td>SB</td><td rowspan="4">Jasa lingkungan penyediaan sumber daya genetik dominan kategori rendah (51,4 %), kategori sangat tinggi (12,2 %) dan tinggi (0,3%).
Jasa lingkungan pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan kategori rendah (39,8 %), sedang (35,9 %) dan tinggi (11%).
Jasa lingkungan pendukung siklus hara kategori tinggi (48,0%), sedang (19,1%), dan rendah (18,7 %).
Jasa lingkungan pendukung produksi primer kategori rendah (49,9%) dan kategori sedang (34%), sedangkan kategori tinggi hanya 8,4%.</td></tr>
<tr><td>15.3.1.(a)</td><td>Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.</td><td>SB</td></tr>
<tr><td>15.6.1*</td><td>Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.</td><td>BB</td></tr>
<tr><td>15.9.1.(a)</td><td>Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.</td><td>BB</td></tr>
<tr><td colspan="4">· Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan berdampak terhadap perlindungan dan pencegahan dari bencana. Pemulihan lahan kritis akan berdampak terhadap penyediaan sumber daya genetik, pendukung siklus hara, yang akan berdampak terhadap penyediaan sumber-sumber air.</td></tr>
<tr><td colspan="4">· Kabupaten Simalungun telah melakukan pemulihan lahan kritis namun belum memenuhi target 15.3.1.(a), disamping perlu upaya penyusunan kerangka legislasi pemanfaatan sumber daya genetik (15.6.1*) dan pembuatan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati (15.9.1.(a)) untuk pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem daratan.</td></tr>
</table>

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Simalungun 2025-2029.

Penguatan fondasi ekonomi untuk mencapai target nasional 7% per tahun di Kabupaten Simalungun perlu mempertimbangkan kekuatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini penting karena pembangunan ekonomi yang pesat tanpa memperhatikan kemampuan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan, seperti penurunan kualitas air dan udara, deforestasi, dan peningkatan risiko bencana alam. Data menunjukkan bahwa jasa lingkungan terkait perlindungan dan bencana alam di Kabupaten Simalungun sebagian besar berada dalam kategori sedang (50,9%), sementara kategori rendah mencapai 31,4%. Selain itu, jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir didominasi oleh kategori rendah (33,6%) dan sangat rendah (34,6%). Jasa lingkungan penguraian limbah juga menunjukkan kategori sedang (57%) dan tinggi (14,9%), sementara jasa lingkungan penyediaan sumber daya genetik sebagian besar berada pada kategori rendah (51,4%). Tanpa perencanaan yang matang dan pengelolaan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi dapat memperburuk kondisi lingkungan dan mengancam keberlanjutan jangka panjang.

Pendekatan yang berkelanjutan harus diadopsi untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, namun mempertahankan kesehatan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam. Kabupaten Simalungun harus secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kerugian ekonomi akibat bencana dengan melindungi orang miskin dan rentan. Hal ini dapat dicapai melalui penyusunan dan implementasi dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB), peningkatan sistem peringatan dini cuaca dan iklim, serta pengelolaan tata aliran air dan banjir. Selain itu, sektor pangan juga perlu mendapatkan perhatian, mengingat dominasi jasa lingkungan penyediaan sumber daya genetik pada kategori rendah (51,4%) yang berdampak pada ketahanan pangan. Diharapkan pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan.

Pengelolaan lahan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mengamankan ketahanan ekologi Kabupaten Simalungun. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi, tekanan terhadap lahan bertambah. Peningkatan produktivitas pertanian harus sejalan dengan prinsip-prinsip agroekologi, yang mengutamakan keberlanjutan, pelestarian tanah, dan konservasi air. Selain itu, mengelola lahan secara berkelanjutan juga melibatkan pengendalian penggunaan lahan yang tidak terencana dan merusak, seperti penggundulan hutan liar dan konversi lahan. Selain itu, penting untuk memperkuat ketahanan ekologi Kabupaten Simalungun melalui pengelolaan sumber

daya air yang berkelanjutan. Kawasan ini memiliki kekayaan sungai dan danau yang menjadi sumber air utama bagi masyarakat dan kehidupan liar. Peningkatan kualitas air dan pengelolaan air yang efisien harus menjadi prioritas, termasuk dalam menghadapi perubahan iklim yang dapat mempengaruhi pola curah hujan dan ketersediaan air.

Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam membangun ketahanan ekologi yang kokoh di Kabupaten Simalungun. Pemerintah daerah, bersama dengan *stakeholder* terkait dan masyarakat lokal, perlu bekerja sama dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang mengarah pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan lingkungan, pendidikan lingkungan, dan program kesadaran lingkungan juga dapat membantu meningkatkan penghargaan terhadap nilai-nilai ekologi dan memperkuat upaya pelestarian. Memperkuat ketahanan ekologi di Kabupaten Simalungun bukan hanya tentang melindungi lingkungan hidup saat ini, namun juga untuk mempersiapkan generasi mendatang dengan warisan lingkungan yang lestari. Dengan melindungi hutan, mengelola lahan secara berkelanjutan, menjaga kualitas air, dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian, Kabupaten Simalungun dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan jangka panjang.

Penyelarasan pemanfaatan ruang merupakan isu strategis yang penting dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Simalungun. Hal ini melibatkan pengaturan dan pengelolaan ruang secara efektif untuk memaksimalkan potensi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kabupaten Simalungun memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keindahan alam yang perlu diintegrasikan dengan baik dalam pengembangan wilayah, termasuk lahan pertanian yang subur, kekayaan hutan, dan keindahan alam yang potensial untuk pariwisata. Penting untuk mengembangkan rencana tata ruang yang komprehensif dan terintegrasi untuk Kabupaten Simalungun. Rencana ini harus mencakup zonasi yang jelas untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, pariwisata, dan pemukiman, serta kawasan konservasi alam. Sehingga konflik penggunaan lahan dapat diminimalkan, sementara potensi setiap sektor dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, sangat penting dalam penyelarasan pemanfaatan ruang. Kolaborasi ini tidak hanya memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan, namun meminimalkan konflik kepentingan antara berbagai pihak. Melalui dialog yang terbuka dan partisipatif, setiap keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan berbagai perspektif dan memperkuat dukungan dari masyarakat.

Perlunya penegakan hukum yang kuat dalam implementasi rencana tata ruang. Pemerintah Kabupaten Simalungun harus mampu menegakkan regulasi yang ada untuk mencegah perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai, penyalahgunaan sumber daya alam, dan praktek ilegal lainnya yang dapat merusak lingkungan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dan memastikan bahwa pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelarasan pemanfaatan ruang. Pemetaan menggunakan teknologi geospasial, analisis data spasial, dan model simulasi dapat membantu dalam perencanaan yang lebih akurat dan prediktif. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Kabupaten Simalungun dapat mengidentifikasi potensi dan risiko secara lebih tepat, serta mengoptimalkan pengambilan keputusan dalam pengelolaan ruang yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penyelarasan pemanfaatan ruang adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Simalungun. Dengan mengembangkan rencana tata ruang yang komprehensif, mendorong kolaborasi lintas sektor, menegakkan hukum dengan tegas, dan memanfaatkan teknologi secara optimal, Kabupaten Simalungun dapat memaksimalkan potensi wilayahnya untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

II.6.2.7.6. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi yang Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur yang modern dan berkelanjutan menjadi isu strategis penting di Kabupaten Simalungun, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, akan tetapi menjadi fondasi bagi pengembangan berbagai sektor ekonomi lokal. Namun, dalam konteks Kabupaten Simalungun, tantangan besar yang dihadapi termasuk keterbatasan aksesibilitas di daerah terpencil, pengelolaan yang optimal, dan peningkatan investasi infrastruktur yang berkelanjutan. Infrastruktur transportasi merupakan tulang punggung untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Dengan membangun dan memperbaiki jaringan jalan utama, baik di perkotaan maupun pedesaan, akan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat untuk mengakses pasar, pendidikan, layanan kesehatan, dan tempat kerja. Namun, upaya ini harus diiringi dengan perencanaan yang matang untuk memastikan keberlanjutan lingkungan serta manfaat jangka panjang bagi perekonomian lokal.

Kemudahan dalam *supply chain* dan logistik merupakan aspek krusial bagi Kabupaten Simalungun, terutama dalam mendukung kegiatan ekspor melalui Pelabuhan Kuala Tanjung. Peningkatan infrastruktur jalan yang menghubungkan sentra-sentra

produksi di Kabupaten Simalungun dengan Pelabuhan Kuala Tanjung akan mempermudah alur distribusi barang, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi waktu pengiriman. Selain itu, adanya infrastruktur yang baik akan menarik investasi di sektor industri dan manufaktur, karena akses yang mudah ke pelabuhan ekspor utama memberikan jaminan bagi kelancaran operasional dan daya saing produk di pasar internasional. Pengembangan jaringan logistik yang terintegrasi ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, serta membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Pengembangan infrastruktur digital juga krusial dalam memajukan ekonomi berbasis teknologi di Kabupaten Simalungun. Investasi dalam jaringan internet yang cepat dan handal, serta peningkatan akses ke teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), akan membuka peluang baru bagi pelaku usaha lokal, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Pemerintah perlu mendorong investasi swasta dan kolaborasi dengan sektor teknologi untuk memastikan infrastruktur digital ini dapat menjangkau seluruh wilayah dengan efektif. Infrastruktur penunjang ekonomi berkelanjutan penting diintegrasikan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup perlindungan lingkungan, pengurangan emisi karbon, pemulihan ekosistem yang terganggu, dan membangun infrastruktur yang tahan bencana. Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Simalungun tidak hanya akan meningkatkan daya saing ekonomi, juga menjaga keseimbangan alam dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi yang modern dan berkelanjutan di Kabupaten Simalungun memerlukan kolaborasi lintas sektor serta komitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, melainkan memberdayakan masyarakat lokal dan melindungi lingkungan alam. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang hati-hati, Kabupaten Simalungun dapat mengoptimalkan potensinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD SIMALUNGUN 2025-2029

III.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

III.1.1. Visi dan Misi

III.1.1.1. Visi

Visi rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/ sebagai hasil pembangunan. RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2045, sehingga Visi RPJMD diharapkan dapat terwujud sebagai hasil pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun terpilih periode 2025-2029 adalah sebagai berikut.

"**Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju**"

Kabupaten Simalungun harus mampu berkontribusi dengan membangun sinergi dengan pemerintah pusat, Indonesia emas 2045 dan Simalungun Maju.

III.1.1.2. Misi

Menurut Inmendagri No.2 Tahun 2025, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi. Misi RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 dirancang untuk dapat mewujudkan visi. Selain itu, misi RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 juga dibuat untuk mendukung keberjalan tahap pertama RPJPD sehingga misi RPJMD mesti selaras dengan misi RPJPD. Adapun misi dalam RPJPD Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut.

1) Mewujudkan transformasi sosial untuk SDM unggul
2) Mewujudkan transformasi ekonomi melalui kegiatan ekonomi hijau, transformasi digital, dan hilirisasi.
3) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
4) Mewujudkan ketenteraman serta ketertiban umum dan stabilitas ekonomi makro daerah.
5) Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan.
6) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata berbasis karakteristik wilayah.
7) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan.

Misi RPJPD kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 dengan penjabaran misi sebagai berikut.

1) Benahi

   Membenahi pelayanan dan fasilitas publik di Kabupaten Simalungun. Pelayanan wajib pada masyarakat harus dapat direncanakan dan terdigitalisasi. Pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan yang bisa diselesaikan oleh pemerintah secara digital mengadopsi layanan perbankan yang sudah bisa di lakukan secara digital.

2) Awasi

   Melaksanakan pengawasan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Pengawasan ini menjadi penting sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam masa waktu yang diharapkan. Pengawasan juga dilakukan terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat dengan menghadirkan ASN yang mengutamakan pelayanan masyarakat.

3) Dampingi

   Melakukan pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat sehingga pemerintah dapat menjamin pencapaian kesejahteraan rakyat. Menjadikan aparatur pemerintah sebagai sahabat bagi masyarakat.

4) Solusi

   Pemerintah yang akan dibangun untuk Simalungun kedepan adalah pemerintahan yang mampu menjadi solusi terhadap permasalahan ditengah masyarakat. Masyarakat bukanlah pihak yang dapat dipersalahkan terhadap penurunan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan di suatu wilayah. Masyarakat haruslah menjadi penerima manfaat utama terhadap alokasi anggaran yang ada di Kabupaten Simalungun

5) Sinergi

   Pemerintah Kabupaten Simalungun kedepan haruslah menjadi pemerintahan yang bersinergi dengan pemerintahan pusat dan daerah. Sinergitas sangat penting untuk menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia emas 2045.

Tabel III.1 Penyandingan Misi Kepala Daerah dengan Misi RPJPD (Transformasi)

Misi Kepala Daerah Simalungun	Penyandingan dengan Misi RPJPD (Tranformasi)
Misi 1: Benahi	Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas
	Misi 7 : Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
Misi 2: Awasi	Misi 1 : Mewujudkan transformasi sosial untuk SDM unggul
	Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas
	Misi 4 : Mewujudkan ketenteraman serta ketertiban umum dan stabilitas ekonomi makro daerah
Misi 3: Dampingi	Misi 1 : Mewujudkan transformasi sosial untuk SDM unggul
	Misi 2 : Mewujudkan transformasi ekonomi melalui kegiatan ekonomi hijau, transformasi digital, dan hilirisasi
	Misi 6 : Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata berbasis karakteristik wilayah
Misi 4: Solusi	Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas
	Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan
Misi 5: Sinergi	Misi 6 : Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata berbasis karakteristik wilayah
	Misi 8 : Mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan

III.1.2. Tujuan dan Sasaran

III.1.2.1. Tujuan

Sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, tujuan memiliki peran strategis dalam menjabarkan arah pembangunan yang selaras dengan visi daerah. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, tujuan dalam dokumen RPJMD merupakan rangkaian kinerja yang secara terukur mencerminkan tingkat pencapaian visi kepala daerah selama periode lima tahun. Oleh karena itu, rumusan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029 perlu dianalisis secara cermat untuk memastikan sesuai dengan arah dan prioritas pembangunan yang ditetapkan. Tujuan menjadi landasan penting dalam menjamin konsistensi perencanaan serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah ke depan.

Selama periode perencanaan lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan tujuh tujuan utama pembangunan daerah yang berorientasi

pada pencapaian Asta Cita, yaitu delapan agenda prioritas nasional yang menjadi arah transformasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. Penetapan tujuan ini tidak hanya merefleksikan visi kepala daerah, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dan arah pembangunan nasional. Ketujuh tujuan tersebut merupakan penjabaran langsung dari lima misi pembangunan daerah, dan dirancang untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan jangka menengah melalui indikator kinerja yang terukur, terarah, dan relevan dengan tantangan aktual yang dihadapi daerah. Tujuan tersebut yaitu:

1. **Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan**

   Tujuan ini merupakan penjabaran dari Misi 1: BENAHI, yang menitik beratkan reformasi pelayanan publik dan penguatan infrastruktur sebagai prasyarat transformasi kelembagaan. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi indikator utama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inklusif, dan ramah lingkungan. Keterkaitan tujuan ini dengan Asta Cita yaitu mendukung Asta Cita 1 (pemerintahan bersih dan efektif), Asta Cita 3 (penguatan daerah), dan Asta Cita 6 (infrastruktur untuk kemandirian ekonomi).

2. **Terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap pembangunan**

   Tujuan ini selaras dengan Misi 2: AWASI, yang berfokus pada peningkatan efektivitas pengendalian pembangunan dan akuntabilitas pelaksanaan program. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi tolok ukur utama dalam mengukur kemajuan tata kelola pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab. Keterkaitan tujuan ini dengan Asta Cita yaitu mendukung Asta Cita 1 (tata kelola bersih dan terpercaya) serta Asta Cita 7 (keadilan sosial melalui pembangunan yang tepat sasaran).

3. **Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan**

   Masih dalam kerangka Misi 2: AWASI, tujuan ini berorientasi pada penguatan fungsi pengawasan internal pemerintahan daerah, melalui peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Keterkaitan tujuan ini dengan Asta Cita yaitu mendukung Asta Cita 1, terutama dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan profesional.

4. **Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya**

   Tujuan ini merupakan bagian dari Misi 3: DAMPINGI dan menekankan pada pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan penciptaan kesempatan kerja. Indikator seperti Tingkat Kemiskinan dan Gini Rasio menjadi acuan evaluasi keberhasilan tujuan. Keterkaitan tujuan dengan Asta Cita yaitu mendukung Asta Cita 3 (pembangunan dari pinggiran), Asta Cita 5 (peningkatan kualitas hidup), dan Asta Cita 7 (keadilan sosial).

5. **Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat**

Masih dalam lingkup Misi 3: DAMPINGI, tujuan ini diarahkan pada penguatan sektor ekonomi produktif lokal, khususnya UMKM, koperasi, dan ekonomi berbasis potensi daerah. Keberhasilan diukur melalui indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kab/Kota. Keterkaitan tujuan ini dengan Asta Cita yaitu mendukung Asta Cita 2 (budaya dan ekonomi lokal), Asta Cita 6 (kemandirian ekonomi), dan Asta Cita 7 (keadilan ekonomi).

6. **Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran**

Tujuan ini berasal dari Misi 4: SOLUSI, yang menempatkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai pilar kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator utama dalam mengukur pencapaian tujuan ini. Keterkaitan tujuan ini dengan Asta Cita yaitu mendukung Asta Cita 4 (revolusi karakter bangsa), Asta Cita 5 (kualitas hidup manusia), dan Asta Cita 8 (rasa aman dan perlindungan sosial).

7. **Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Simalungun**

Tujuan ini mencerminkan arah dari Misi 5: SINERGI, yang menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang terintegrasi. Keberhasilan tujuan ini dievaluasi melalui Indeks Daya Saing Daerah. Keterkaitan tujuan ini dengan Asta Cita yaitu mendukung Asta Cita 3 (penguatan peran daerah), Asta Cita 6 (penguatan infrastruktur), dan Asta Cita 7 (keadilan sosial melalui pembangunan kolaboratif).

Dengan ditetapkannya tujuh tujuan utama tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terencana, terukur, dan berkesinambungan. Setiap tujuan disusun secara spesifik dengan indikator kinerja yang dapat dievaluasi secara periodik, sehingga memudahkan proses pemantauan dan penyesuaian kebijakan di lapangan. Lebih jauh, tujuan-tujuan ini juga menjadi acuan strategis dalam perumusan program dan kegiatan perangkat daerah, agar selaras dengan visi kepala daerah, misi pembangunan, serta arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Asta Cita sebagai kerangka pembangunan Indonesia yang inklusif dan berdaya saing.

III.1.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran operasional dari tujuan pembangunan daerah yang mencerminkan hasil nyata yang ingin dicapai selama periode perencanaan. Keberadaan sasaran menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan RPJMD, sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah. Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sasaran dipahami sebagai rangkaian kinerja yang menggambarkan capaian hasil dari penyelenggaraan pembangunan daerah secara bertahap menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah.

1. Misi 1: BENAHI

Misi ini akan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan infrastruktur yang modern, berbasis digital, dan ramah lingkungan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Selain itu, misi ini menekankan pentingnya efisiensi, aksesibilitas, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik maupun pembangunan infrastruktur daerah. Sasaran dari misi ini dijabarkan ke dalam tujuan 1 yang terdiri dari 4 sasaran utama, yang secara terpadu mendukung pencapaian peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kabupaten Simalungun.

Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan

Sasaran 1.1 : Meningkatnya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang terdigitalisasi

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu layanan dasar pemerintah yang sangat erat dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kualitasnya akan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap birokrasi. Sasaran "Meningkatnya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang terdigitalisasi" muncul sebagai turunan langsung dari isu strategis "*Good Governance* untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta perwujudan stabilitas daerah." Hal ini didasari oleh kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern melalui penerapan teknologi informasi dalam layanan publik, khususnya administrasi kependudukan yang memiliki peran fundamental dalam pelayanan dasar masyarakat. Dengan digitalisasi, proses administrasi kependudukan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, transparan, akurat, dan minim penyalahgunaan, sehingga mendukung prinsip akuntabilitas serta stabilitas daerah. Sasaran ini juga sejalan dengan tujuan "Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan", karena transformasi layanan kependudukan menuju sistem elektronik akan meningkatkan kualitas pelayanan

dan efisiensi birokrasi. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencerminkan tingkat kematangan penerapan digitalisasi pemerintahan secara menyeluruh.

Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga kualitas dan aksesibilitasnya menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan serta kepuasan publik terhadap birokrasi. Sasaran "Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik" menjadi bentuk capaian untuk mencapai isu strategis "*Good Governance* untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta perwujudan stabilitas daerah." Sasaran ini disusun untuk dapat memperkuat tata kelola pelayanan yang lebih modern, inklusif, dan mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas, pelayanan publik diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, transparan, responsif, serta merata, sehingga mendukung terwujudnya akuntabilitas dan memperkuat stabilitas sosial di daerah. Selain itu, sasaran ini juga selaras dengan tujuan "Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan," karena perbaikan mutu dan akses pelayanan akan mendorong efektivitas birokrasi dan meningkatkan daya saing daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui peningkatan Indeks Pelayanan Publik yang mencerminkan sejauh mana kualitas dan akses layanan pemerintah telah terpenuhi secara optimal.

Sasaran 1.3 : Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan

Lingkungan hidup merupakan aset penting yang menopang keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, sasaran ini disusun sebagai bentuk implementasi dari isu strategis "Ketahanan Ekologi untuk mengantisipasi degradasi lingkungan." Penetapan sasaran ini didasari oleh kebutuhan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Kabupaten Simalungun yang meliputi hutan, lahan pertanian, serta kawasan perairan, sekaligus mengantisipasi ancaman kerusakan akibat aktivitas manusia maupun perubahan iklim. Melalui pembangunan yang berorientasi lingkungan, diharapkan program-program daerah mampu mendorong konservasi, restorasi, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya berperan dalam melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga penting untuk menjaga keseimbangan iklim lokal, kualitas air, serta mengurangi risiko bencana ekologis seperti banjir dan longsor. Sasaran ini sejalan dengan tujuan "Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital, serta pembangunan

infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan," karena pembangunan yang berbasis lingkungan mendukung keberlanjutan jangka panjang sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pencapaian sasaran ini akan diukur melalui indikator penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi cerminan keberhasilan daerah dalam menekan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan.

Sasaran 1.4 : Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah

Infrastruktur daerah merupakan elemen mendasar dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga kualitas layanannya sangat menentukan kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Dengan dasar tersebut, sasaran ini disusun sebagai bentuk implementasi dari isu strategis "Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi yang Berkelanjutan." Selain itu, penyusunan sasaran ini dikarenakan oleh kebutuhan Kabupaten Simalungun untuk mengatasi keterbatasan aksesibilitas, terutama di wilayah terpencil, sekaligus mendorong optimalisasi pengelolaan dan investasi infrastruktur yang berkelanjutan. Melalui peningkatan kualitas layanan infrastruktur, khususnya pada sektor transportasi, diharapkan konektivitas antarwilayah dapat semakin baik sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pasar, pendidikan, layanan kesehatan, maupun lapangan kerja. Upaya ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Sasaran ini selaras dengan tujuan "Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan" karena pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkesinambungan akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan daya saing daerah. Pencapaian sasaran ini akan diukur melalui Indeks Infrastruktur yang merefleksikan tingkat kualitas, ketersediaan, dan aksesibilitas layanan infrastruktur di Kabupaten Simalungun.

2. Misi 2: AWASI

Pada Misi 2: AWASI akan berfokus pada pelaksanaan pengawasan pembangunan serta penggunaan anggaran pemerintah agar dapat menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, sasaran pada misi ini diarahkan pada peningkatan efektivitas pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya penguatan sistem pengawasan ini dijabarkan ke dalam dua tujuan, yaitu tujuan 2 yang terdiri dari 1 sasaran, serta tujuan 3 yang terdiri dari 3 sasaran.

Tujuan 2 : Terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap pembangunan

Sasaran 2.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan

Akuntabilitas kinerja pembangunan merupakan aspek fundamental dalam memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, sasaran ini disusun untuk

mendukung keberjalanan isu strategis "Good Governance untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta perwujudan stabilitas daerah." Selain itu, penyusunan sasaran ini dikarenakan pentingnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, berintegritas, dan berorientasi hasil melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan serta evaluasi capaian secara berkesinambungan. Dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan terukur, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, sasaran ini juga selaras dengan tujuan "Terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap pembangunan," karena melalui akuntabilitas yang kuat, pengelolaan sumber daya publik dapat diarahkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip keadilan. Pencapaian sasaran ini akan diukur melalui peningkatan Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan berbasis kinerja, mengimplementasikannya secara konsisten, serta mempertanggungjawabkannya secara transparan.

Tujuan 3 : Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran 3.1 : Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. Atas dasar itu, sasaran ini dirumuskan sebagai implementasi dari isu strategis "Good Governance untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta perwujudan stabilitas daerah." Penetapan sasaran ini mencerminkan kebutuhan Kabupaten Simalungun untuk memperkuat sistem keuangan daerah yang tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap rupiah dari anggaran publik dapat digunakan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Efektivitas tata kelola keuangan juga mendorong meningkatnya keterbukaan informasi terkait proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, sehingga mampu memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan. Dengan demikian, sasaran ini secara langsung mendukung pencapaian tujuan ke-3, yaitu "Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan," karena sistem keuangan yang efektif menjadi instrumen utama untuk memastikan penggunaan sumber daya publik berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pencapaiannya diukur melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggambarkan sejauh mana tata kelola keuangan di Kabupaten Simalungun telah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

Sasaran 3.2 : Terwujudnya kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang berorientasi pada pelayanan masyarakat

Aparatur sipil negara (ASN) merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kualitas kinerjanya sangat menentukan mutu pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Dengan dasar tersebut, sasaran ini disusun sebagai bentuk implementasi dari isu strategis "Good Governance untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta perwujudan stabilitas daerah." Selain itu, penetapan sasaran ini juga didorong oleh kebutuhan Kabupaten Simalungun untuk memperkuat integritas, profesionalitas, serta orientasi pelayanan dari ASN sebagai motor utama pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan. Melalui peningkatan kapasitas dan kinerja ASN, diharapkan pelayanan publik dapat diselenggarakan secara lebih responsif, transparan, dan adil sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Upaya ini juga mendukung penguatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam tujuan "Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan." Sasaran ini akan diukur melalui Indeks Integritas Nasional dan Indeks Profesionalitas ASN yang merefleksikan sejauh mana ASN di Kabupaten Simalungun mampu menunjukkan etika, kompetensi, dan dedikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran 3.3 : Meningkatnya Akuntabilitas dan tata Kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi

Akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sasaran ini disusun sebagai bentuk implementasi dari isu strategis "Good Governance untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta perwujudan stabilitas daerah." Selain itu, penetapan sasaran ini juga didorong oleh kebutuhan Kabupaten Simalungun untuk memperkuat integritas birokrasi, menekan potensi praktik korupsi, serta memastikan pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara jujur, adil, dan transparan. Melalui peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang bersih, diharapkan tercipta birokrasi yang berintegritas tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien. Upaya ini juga mendukung pencapaian tujuan "Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan," karena tata kelola yang bebas dari korupsi merupakan syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang kredibel dan berdaya saing. Pencapaian sasaran ini akan diukur melalui Survei Penilaian Integritas (korupsi) yang menggambarkan tingkat persepsi dan pengalaman masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap praktik integritas dan pencegahan korupsi di Kabupaten Simalungun.

3. Misi 3: DAMPINGI

Misi ini akan berfokus pada pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat sehingga pemerintah dapat menjamin pencapaian kesejahteraan rakyat. Sehingga sasaran pada misi ini akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah. Upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat dijabarkan ke dalam dua tujuan yaitu tujuan 4 terdiri dari 1 sasaran dan tujuan 5 terdiri dari 2 sasaran.

Tujuan 4 : Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya

Sasaran 4.1 : Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan Kegiatan ekonomi lokal

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam memperkuat basis ekonomi daerah, sehingga keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal akan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Sebagai bentuk implementasi dari isu strategis "Penguatan Fondasi untuk Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan", sasaran ini ditetapkan untuk menjawab kebutuhan Kabupaten Simalungun dalam memaksimalkan potensi ekonomi lokal melalui diversifikasi sektor, pemanfaatan sumber daya alam, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu berkontribusi dalam pengembangan usaha berbasis potensi daerah. Melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, diharapkan tercipta peluang usaha yang lebih luas, lapangan kerja yang lebih beragam, serta peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mendukung ketahanan ekonomi daerah terhadap dinamika pasar global. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan ke-4, yaitu "Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya," karena peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi akan memperkuat kemandirian dan kesejahteraan jangka panjang. Pencapaian kinerja sasaran ini akan diukur melalui indikator PDRB per kapita serta rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencerminkan kontribusi langsung masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tujuan 5 : Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat

Sasran 5.1 : Tersedianya akses yang lebih baik untuk pembiayaan dan modal usaha bagi masyarakat

Akses terhadap pembiayaan dan modal usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, karena ketersediaan sumber pendanaan yang memadai akan memperluas peluang masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas. Dengan landasan tersebut, sasaran ini ditetapkan sebagai bentuk implementasi dari isu strategis "Penguatan

Fondasi untuk Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan." Penetapan sasaran ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan Kabupaten Simalungun untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha kecil, menengah, maupun sektor berbasis masyarakat agar lebih berdaya saing, mampu berinovasi, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan, diharapkan terbentuk ekosistem usaha yang lebih inklusif, yang tidak hanya mendukung pengembangan industri kecil-menengah, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata serta penguatan potensi budaya daerah sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Sasaran ini sejalan dengan tujuan ke-5, yaitu "Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat" karena pembiayaan yang lebih mudah diakses akan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian mereka dalam jangka panjang. Pencapaian sasaran ini akan diukur melalui indikator jumlah industri kecil-menengah, jumlah kunjungan wisatawan, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan, yang secara komprehensif merefleksikan keberhasilan dalam mengembangkan usaha lokal berbasis potensi ekonomi dan budaya Kabupaten Simalungun.

Tujuan 5.2 : Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat utama dalam memperkuat struktur ekonomi daerah, karena tenaga kerja yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bentuk implementasi dari isu strategis "Penguatan Fondasi untuk Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan", sasaran ini ditetapkan untuk menjawab tantangan Kabupaten Simalungun dalam menyiapkan angkatan kerja yang adaptif, berdaya saing, dan siap mengisi peluang kerja di berbagai sektor produktif. Melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi SDM, diharapkan tercipta penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, serta peningkatan pendapatan masyarakat yang berkontribusi pada ketahanan ekonomi daerah. Upaya ini sejalan dengan tujuan ke-5, yaitu "Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat", karena keberadaan tenaga kerja yang terampil akan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional. Pencapaian kinerja sasaran ini akan dinilai melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang merefleksikan efektivitas program peningkatan kualitas SDM dalam menjawab kebutuhan dunia kerja.

4. Misi 4: SOLUSI

Misi ini akan diarahkan pada penguatan peran pemerintah sebagai solusi nyata terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Simalungun menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari setiap alokasi anggaran pembangunan, sehingga kebijakan yang dijalankan benar-benar berorientasi pada kebutuhan publik. Oleh karena itu, sasaran pada misi ini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dasar yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Maka pada misi ini dijabarkan dari satu tujuan dengan dua sasaran utama yaitu:

Tujuan 6 : Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran

Tujuan 6.1 : Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, sekaligus menjadi kunci dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Sebagai bentuk implementasi dari isu strategis “Optimalisasi Bonus Demografi Melalui Peningkatan Kualitas SDM Sebagai Penguatan Fondasi Pembangunan” serta “Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat”, sasaran ini ditetapkan untuk menjawab kebutuhan Kabupaten Simalungun dalam menyediakan akses pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui peningkatan kualitas pendidikan, diharapkan lahir generasi muda yang memiliki kapasitas intelektual, karakter, dan keterampilan yang mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Upaya ini juga selaras dengan tujuan ke-6, yaitu “Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran”, karena pendidikan yang berkualitas akan memperkuat daya saing SDM serta membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran ini akan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencerminkan tingkat capaian akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun.

Tujuan 6.2 : Meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Simalungun

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah, karena derajat kesehatan yang baik akan menentukan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Sebagai bentuk implementasi dari isu strategis “Optimalisasi Bonus Demografi Melalui Peningkatan Kualitas SDM Sebagai Penguatan Fondasi Pembangunan” serta “Pemerataan

Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat", sasaran ini ditetapkan untuk menjawab tantangan Kabupaten Simalungun dalam memperluas akses pelayanan kesehatan yang merata, meningkatkan mutu layanan, serta memperkuat sistem kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Melalui peningkatan kualitas kesehatan, diharapkan masyarakat memiliki umur harapan hidup yang lebih tinggi, kondisi gizi yang lebih baik, serta ketahanan tubuh terhadap berbagai risiko penyakit, sehingga mendukung produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang. Upaya ini selaras dengan tujuan ke-6, yaitu "Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran", karena kesehatan yang baik merupakan pondasi penting dalam memperkuat kualitas SDM. Pencapaian sasaran ini akan diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH) yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Simalungun.

5. Misi 5: SINERGI

Misi ini akan diarahkan pada penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lebih terpadu dan saling mendukung. Maka dari itu, sasaran akan diarahkan pada penciptaan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.

Tujuan 7 : Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Simalungun

Sasaran 7.1 : Terselenggaranya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Koordinasi yang efektif antar tingkatan pemerintahan merupakan faktor kunci dalam menjamin keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang disusun dapat berjalan selaras dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran ini ditetapkan sebagai bentuk implementasi dari isu strategis "Good Governance untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel, serta Perwujudan Stabilitas Daerah", dengan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Simalungun. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan terwujud keselarasan antara RPJPD, RPJMD, dan program pembangunan sektoral, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta terhindar dari tumpang tindih kebijakan. Upaya ini juga akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, karena perencanaan yang terintegrasi memastikan penggunaan sumber daya publik lebih tepat sasaran. Sasaran ini sejalan dengan tujuan ke-7, yaitu "Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten yang

mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Simalungun", karena koordinasi yang solid akan mempercepat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pencapaian kinerja sasaran ini akan diukur melalui Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menggambarkan kualitas integrasi dan keselarasan perencanaan pembangunan di Kabupaten Simalungun. Sasaran ini menjadi fondasi dalam membangun keselarasan kebijakan dan program antar level pemerintahan, guna memastikan keterpaduan pembangunan yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penjabaran sasaran dari masing-masing misi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun telah merancang arah pembangunan yang terukur dan berbasis data. Sasaran yang dirumuskan tidak hanya memperjelas arah implementasi kebijakan, tetapi juga mencerminkan orientasi pada capaian hasil yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kesesuaian antara sasaran dan indikator kinerja menandakan adanya upaya sistematis dalam membangun tata kelola pembangunan yang akuntabel, adaptif, dan berbasis hasil. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan sistem perencanaan dan evaluasi yang responsif terhadap kebutuhan dan dinamika pembangunan di tingkat lokal.

Tabel III.2 Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2030

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Visi: Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju										
Misi 1: BENAHI	T1. Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan		Indeks Inovasi Daerah	52,55	53,95	56,36	58,76	61,17	62,37	
			Indeks kualitas lingkungan hidup	74,46	74,64	74,81	74,98	75,15	75,42	
		S1.1. Meningkatnya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang terdigitalisasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE	2,72	2,842	2,964	3,086	3,208	3,268	
		S1.2. Meningkatnya kualitas dan	Indeks Pelayanan Publik	4,30	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		aksesibilitas pelayanan publik								
		S 1.3. Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GRK (ton CO2eq)	173.083,31	196.427,81	224.109,15	256.395,70	288.934,62	325.768,62	
		S1.4 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur	0,532	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	
Misi 2: AWASI	T2. Terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap pembangunan		Indeks Reformasi Birokrasi	64,67	66,5	68,5	70,8	73,2	75,5	
		S2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan	Indeks SAKIP	54	57	60	62	64	66	
	T3. Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		S3.1. Terwujudnya tata	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,5	74	75,5	77	78,5	80	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		kelola keuangan yang efektif								
		S3.2. Terwujudnya kinerja ASN yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.								
			Indeks Profesionalitas ASN	55,79	56	56,42	56,7	57,05	57,4	
		S3.3. Meningkatnya Akuntabilitas dan tata Kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi	Indeks Integritas Nasional / Survei Penilaian Integritas (SPI)	73	74,20	76,50	77,50	78,50	80	
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
			Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1	80%	81%	82%	83%	84%	85%	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 3: DAMPINGI	T4. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya		Tingkat Kemiskinan	7,57	7,34	6,88	6,41	5,95	5,72	
			Gini Rasio	0,290	0,289	0,286	0,282	0,279	0,277	
		S4.1. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	PDRB Perkapita	58,3	78,09	101,88	125,67	149,46	161,36	
			Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	4,88	5	5,15	5,3	5,45	5,6	
	T5. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,37	5,31	5,37	5,42	5,47	5,50	
			Kontribusi PDRB Kab/Kota	5,170	5,172	5,173	5,174	5,175	5,176	
		S5.1. Tersedianya akses yang lebih baik untuk	Indeks Akses Keuangan Daerah	3,82	3,84	3,87	3,89	3,92	3,93	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		pembiayaan dan modal usaha bagi masyarakat.	Jumlah Industri Kecil Menengah	9.054	9.056	9.058	9.060	9.062	9.064	
			PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,88	0,95	1,02	1,08	1,15	1,18	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	30,56	41,67	52,78	63,89	75,00	86,11	
		S5.2 Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,12	5,09	4,98	4,88	4,77	4,72	
Misi 4: SOLUSI	T6. Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam		Indeks Pembangunan Manusia	76,35	76,99	77,63	78,27	78,91	79,22	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	alokasi anggaran.									
		S6.1. Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,2	10,01	10,23	10,44	10,65	10,76	
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,12	13,22	13,31	13,41	13,51	13,56	
		S6.2. Meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Simalungun	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,41	74,47	74,8	75,13	75,47	75,63	
Misi 5: SINERGI	T7. Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Simalungun.		Indek Daya Saing Daerah	3,59	3,66	3,73	3,8	3,88	3,91	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		S7.1. Terselenggaranya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	63,28	63,35	64,785	65,17	65,45	65,8	

Berdasarkan **Tabel III.2** terlihat bahwa perencanaan pembangunan lima tahunan telah disusun secara sistematis melalui pengelompokan yang jelas antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, dan target tahunan. Masing-masing misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang relevan, dengan dukungan indikator kinerja yang sebagian besar bersifat kuantitatif dan terukur. Beberapa indikator bahkan telah dilengkapi dengan target tahunan dari tahun 2025 hingga 2030, menunjukkan adanya orientasi jangka panjang yang konsisten serta keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun dalam mengukur capaian pembangunan bertahap.

Secara umum, penyusunan indikator dan target cukup menggambarkan keterkaitan logis antara pernyataan tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target dalam dokumen perencanaan ini menunjukkan konsistensi logis serta arah pembangunan yang terukur. Penyusunan indikator yang relevan dan penetapan target yang progresif menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa setiap misi dapat dijalankan secara efektif, akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, perencanaan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan di Kabupaten Simalungun.

III.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

III.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

III.2.1.1. Strategi

Berdasarkan Inmendagri No. 2 Tahun 2025, strategi diartikan sebagai rencana tindakan komprehensif yang memuat langkah-langkah atau upaya untuk menghadapi dinamika lingkungan dalam rangka mencapai tujuan dan/atau sasaran RPJMD. Strategi ini menjadi pedoman dalam merancang arah pembangunan jangka menengah daerah secara terukur dan adaptif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029 menuju visi **"Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju"**, strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut.

1. Misi 1 BENAHI

Misi ini mendukung pencapaian visi melalui pembenahan pelayanan dan fasilitas publik yang modern, terintegrasi, dan berbasis digital. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan wajib yang dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Digitalisasi pelayanan publik menjadi strategi kunci, dengan mengadopsi standar efisiensi dan kemudahan seperti yang diterapkan dalam sistem perbankan. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Penerapan sistem digital

diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, mewujudkan pelayanan yang responsif dan adaptif, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien. Keberhasilan misi ini diukur melalui meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan publik, khususnya layanan administrasi kependudukan, sebagai indikator kemajuan tata kelola pemerintahan daerah menuju Simalungun yang lebih maju dan modern. Strategi untuk mencapai misi ini antara lain diwujudkan melalui beberapa sasaran:

1. Meningkatnya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang terdigitalisasi, dengan strategi:
   - **2026:** Pembangunan Sistem Layanan Kependudukan Berbasis Digital
   - **2027:** Peningkatan Sistem Layanan Kependudukan Berbasis Digital
   - **2028:** Pengembangan Sistem Layanan Kependudukan Berbasis Digital
   - **2029:** Percepatan Sistem Layanan Kependudukan Berbasis Digital
   - **2030:** Penguatan Sistem Layanan Kependudukan Berbasis Digital
2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik, dengan strategi:
   - **2026:** Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk Layanan Publik
   - **2027:** Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk Layanan Publik
   - **2028:** Pengembangan Platform Layanan Terpadu
   - **2029:** Percepatan Audit Sistem Layanan Digital
   - **2030:** Penguatan Sistem Layanan Digital Lintas Sektor yang Adaptif dan Fleksibel
3. Terciptanya program-program Pembangunan yang berbasis lingkungan, dengan strategi:
   - **2026:** Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
   - **2027:** Peningkatan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
   - **2028:** Pengembangan dan perbaikan fasilitas publik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
   - **2029:** Percepatan penerapan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
   - **2030:** Penguatan penerapan teknologi ramah lingkungan
4. Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Daerah
   - **2026:** Pembangunan infrastruktur
   - **2027:** Peningkatan infrastruktur
   - **2028:** Pengembangan infrastruktur
   - **2029:** Percepatan infrastruktur
   - **2030:** Penguatan infrastruktur

2. Misi 2 AWASI

Misi ini mendukung pencapaian visi dengan menekankan pentingnya pengawasan terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat. Pengawasan diarahkan tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada aspek pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sentral sebagai pelaksana yang berorientasi pada pelayanan publik, menjunjung tinggi integritas, dan bertindak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Efektivitas misi ini tercermin dari meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan, tata kelola keuangan yang transparan, serta pelayanan ASN yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun strategi berdasarkan sasaran sebagai berikut.

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan
   - **2026:** Pembangunan kapasitas APIP
   - **2027:** Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan dasar digitalisasi, SPBE, dan pelayanan publik
   - **2028:** Pengembangan Sistem Monitoring Pengadaan secara Real-Time
   - **2029:** Percepatan analisis pola pengadaan untuk efisiensi dan akuntabilitas
   - **2030:** Penguatan peran APIP sebagai konsultan internal pemerintah daerah
2. Terwujudnya tata kelola keuangan yang efektif
   - **2026:** Pembangunan teknologi informasi penganggaran
   - **2027:** Peningkatan penerapan sistem penganggaran digital
   - **2028:** Pengembangan analisis anggaran untuk mendukung efektivitas dan efisiensi belanja
   - **2029:** Percepatan Kerja Sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka penguatan akuntabilitas keuangan daerah
   - **2030:** Penguatan Sistem Informasi Pengawasan Pembangunan Terintegrasi
3. Terwujudnya kinerja ASN yang berorientasi pada pelayanan masyarakat
   - **2026:** Pembangunan kapasitas ASN
   - **2027:** Peningkatan kompetensi teknis ASN dalam e-audit, manajemen risiko, dan audit berbasis data
   - **2028:** Pengembangan platform e-learning internal bagi ASN
   - **2029:** Percepatan pembangunan budaya inovasi ASN
   - **2030:** Penguatan sistem penghargaan berbasis kompetensi dan inovasi digital
4. Meningkatnya Akuntabilitas dan tata Kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi
   - **2026:** Pembangunan teknologi informasi pengadaan barang dan jasa

- **2027:** Peningkatan Sistem Pengawasan Layanan Digital
- **2028:** Pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan digital internal
- **2029:** Percepatan untuk Aksesibilitas dan Transparansi Hasil Audit Eksternal
- **2030:** Penguatan Sistem Informasi Pengawasan Pembangunan Terintegrasi

3. Misi 3 DAMPINGI

Misi ini mendukung tercapaianya visi dengan menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam melakukan pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat sebagai langkah strategis untuk menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat. Pendampingan ini tidak sekadar berbentuk bantuan teknis, tetapi merupakan proses pembinaan berkelanjutan yang mampu mendorong kemandirian, meningkatkan kapasitas, serta membuka akses terhadap modal, pasar, dan teknologi. Pemerintah hadir sebagai fasilitator sekaligus mitra strategis yang memperkuat potensi lokal dan memberdayakan ekonomi kerakyatan. Misi ini secara langsung berkontribusi pada meningkatnya pendapatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat sebagai dasar dari tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun strategi berdasarkan sasaran sebagai berikut.

1. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan Kegiatan ekonomi lokal

- **2026:** Pembangunan kewirausahaan yang sistematis dan berkelanjutan
- **2027:** Peningkatan Potensi Lokal
- **2028:** Pengembangan usaha kecil & koperasi
- **2029:** Percepatan akses KUR dan kredit mikro
- **2030:** Penguatan model usaha inklusif berbasis komunitas

2. Tersedianya akses yang lebih baik untuk pembiayaan dan modal usaha bagi masyarakat

- **2026:** Pembangunan Potensi Lokal
- **2027:** Peningkatan Fasilitas ruang seni dan budaya
- **2028:** Pengembangan akses jalan, penunjuk arah, fasilitas umum
- **2029:** Percepatan sentra UMKM berbasis lokal
- **2030:** Penguatan insentif dan penghargaan wirausahawan lokal terbaik

3. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

- **2026:** Pembangunan pendidikan vokasi yang melibatkan dunia usaha dan industri
- **2027:** Peningkatan pelatihan Calon Wirausaha Muda
- **2028:** Pengembangan pendidikan vokasi yang melibatkan dunia usaha dan industri
- **2029:** Percepatan pelatihan Calon Wirausaha Muda

- **2030:** Penguatan pendidikan vokasi yang melibatkan dunia usaha dan industri

4. Misi 4 SOLUSI

Misi 4 mendukung pencapaian visi dengan menghadirkan pelayanan publik yang tanggap,solutif, dan inklusif, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memastikan akses pendidikan yang merata dan layanan kesehatan yang berkualitas pemerintah Kabupaten Simalungun berupaya membangun masyarakat yang cerdas,sehat, dan produktif. Upaya ini ditunjukan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui rata-rata lama sekolah,harapan lama sekolah, serta usia harapan hidup. Peningkatan ketiga indikator tersebut menjadi indikator keberhasilan dalam membentuk masyarakat yang berpengetahuan ,sehat, dan berdaya saing. Keberhasilan ini akan mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta memperkuat daya saing daerah di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan hal tersebut disusun strategi berdasarkan sasaran sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun
   - **2026:** Pembangunan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
   - **2027:** Peningkatan lanjutan bagi tenaga pendidik untuk peningkatan profesionalisme
   - **2028:** Pengembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan infrastruktur pendidikan
   - **2029:** Percepatan pembangunan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
   - **2030:** Penguatan sarana, prasarana serta layanan untuk pendidikan
2. Meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Simalungun
   - **2026:** Pembangunan dasar untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
   - **2027:** Peningkatan layanan kesehatan sesuai kebutuhan lokal
   - **2028:** Pengembangan pembangunan dan rehabilitasi unit puskesmas di wilayah terpencil
   - **2029:** Percepatan pelatihan tenaga kesehatan berbasis teknologi
   - **2030:** Penguatan insentif dan penghargaan bagi tenaga kesehatan berprestasi

5. Misi 5 SINERGI

Misi 5 mewujudkan visi Kabupaten Simalungun melalui pada pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun melalui pembangunan insfrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. Keberhasilan misi diukur melalui peningkatan indeks daya saing daerah serta indeks perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud komitmen untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Misi ini memastikan Kabupaten Simalungun mampu membangun sistem pemerintahan yang sinergis dengan pemerintah pusat dan provinsi, guna mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui

pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan wilayah serta daya dukung lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut disusun strategi berdasarkan sasaran sebagai berikut.

1. Terselenggaranya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

- **2026:** Pembangunan perencanaan yang sinkron antara daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi
- **2027:** Peningkatan tim teknis perencanaan lintas sektor dan lintas pemerintah sebagai penghubung komunikasi pembangunan
- **2028:** Pengembangan pelaksanaan pembangunan yang berbasis lingkungan
- **2029:** Percepatan pelaksanaan pembangunan daerah
- **2030:** Penguatan pembangunan infrastruktur berbasis potensi lokal dan lingkungan

III.2.1.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan ini disusun berdasarkan analisis terhadap kondisi sosial, ekonomi, potensi daerah, serta memperhatikan tantangan dan peluang yang ada. Kebijakan yang dirumuskan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini juga mengarahkan pada penyusunan program prioritas yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Arah kebijakan tahap I RPJPD Kabupaten Simalungun berfokus pada "**Penguatan Fondasi Transformasi**". Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Simalungun perlu untuk melihat dari misi, maka dari itu perlu dilakukan penyandingan misi RPJMD terhadap misi RPJPD (Transformasi) untuk dapat melihat penyelarasan Arah Kebijakan Tahap I yang dapat menjadi dasar bagi Arah Kebijakan RPJMD.

Tabel III.3 Penyandingan Misi Kepala Daerah, Misi RPJPD, Arah Kebijakan Tahap I RPJPD dan Arah Kebijakan RPJMD

Misi Kepala Daerah Simalungun	Penyandingan dengan Misi RPJPD (Tranformasi)	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I Berdasarkan Misi RPJPD (Tranformasi)	Indikasi Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029
Misi 1 : BENAHI	Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Penguatan kualitas ASN, pelayanan publik, regulasi efektif, dan pemberdayaan masyarakat	Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik, pembangunan insfrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
	Misi 7 : Mewujudkan pembangunan sarana	Penguatan pembangunan sarana dan prasarana	

Misi Kepala Daerah Simalungun	Penyandingan dengan Misi RPJPD (Tranformasi)	Arah Kebijakan RPJPD Tahap I Berdasarkan Misi RPJPD (Tranformasi)	Indikasi Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029
	dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	yang berkualitas dan ramah lingkungan	
Misi 2 : AWASI	Misi 1 : Mewujudkan transformasi sosial untuk SDM unggul	Peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan transparansi anggaran, pengawasan berbasis teknologi, pengawasan partisipatif, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan kapasitas ASN.
	Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Penguatan kualitas ASN, pelayanan publik, regulasi efektif, dan pemberdayaan masyarakat	
	Misi 4 : Mewujudkan ketenteraman serta ketertiban umum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta demokrasi yang kuat	
Misi 3: Dampingi	Misi 1 : Mewujudkan transformasi sosial untuk SDM unggul	Peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat	Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan, inovasi teknologi, kolaborasi lintas sektor, revitalisasi pusat pertumbuhan ekonomi, serta pendampingan usaha secara inklusif yang berkelanjutan berbasis potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
	Misi 2 : Mewujudkan transformasi ekonomi melalui kegiatan ekonomi hijau, transformasi digital, dan hilirisasi	Penguatan inovasi dan teknologi dalam kegiatan industri untuk mendukung produktivitas ekonomi	
	Misi 6 : Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata berbasis karakteristik wilayah	Penguatan pembangunan kewilayahan yang merata berbasis karakteristik wilayah	
Misi 4: Solusi	Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Penguatan kualitas ASN, pelayanan publik, regulasi efektif, dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan pemerintahan yang solutif dan inklusif, pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat Simalungun, dan peningkatan ketahanan sosial.
	Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan	Penguatan kerukunan umat beragama, peran keluarga, kesetaraan gender, masyarakat inklusif dan pembangunan lingkungan yang adil	
Misi 5: Sinergi	Misi 6 : Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata berbasis karakteristik wilayah	Penguatan pembangunan kewilayahan yang merata berbasis karakteristik wilayah	Memperkuat sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan pemerintahan pusat dan provinsi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Simalungun Maju pada Indonesia Emas 2045
	Misi 8 : Mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan	Pelaksanaan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan, untuk mendukung penguatan fondasi pembangunan Kabupaten Simalungun tahun 2025 - 2029	

Indikasi arah kebijakan untuk RPJMD yang telah disesuaikan dengan penyandingan misi perlu untuk disesuaikan kembali dengan tujuan dan sasaran. Arah kebijakan dijadikan sebagai pedoman untuk dapat mencapai target dari tujuan dan sasaran. Penyesuaian arah

kebijakan dengan tujuan dan sasaran pembangunan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan benar-benar mendukung pencapaian target yang telah dirumuskan.

Tabel III.4 Penyandingan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju	Membenahi pelayanan dan fasilitas publik di Kabupaten Simalungun. Pelayanan pelayanan wajib pada masyarakat harus dapat direncanakan dan terdigitalisasi. Pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan yang bisa diselesaikan oleh pemerintah secara digital mengadopsi pelayanan perbankan yang sudah bisa dilakukan secara digital	1. Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Inovasi Daerah	1. Meningkatnya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang terdigitalisasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE	Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	2026: Pembangunan Sistem Layanan Kependudukan Berbasis Digital 2027: Peningkatan Sistem Layanan Kependudukan Berbasis Digital

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
							2028: Pengembangan Sistem Layanan Kependudukan Berbasis Digital
							2029: Percepatan Sistem Layanan Kependudukan Berbasis Digital

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
							2030: Penguatan Sistem Layanan Kependudukan Berbasis Digital
				2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		2026: Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk Layanan Publik
							2027: Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk Layanan Publik

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
							2028; Pengembangan Platform Layanan Terpadu.
							2029: Percepatan Audit Sistem Layanan Digital.
							2030: Penguatan Sistem Layanan Digital Lintas Sektor yang Adaptif dan Fleksibel
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	3. Terciptanya program-program Pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GRK		2026: Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
							2027: Peningkatan Insfrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
							2028; Pengembangan dan Perbaikan Fasilitas Publik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
							2029: Percepatan penerapan insfrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
							2030: Penguatan penerapan teknologi ramah lingkungan
				4. Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur		2026: Pembangunan infrastruktur
							2027: Peningkatan insfrastruktur

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
							2028; Pengembangan infrastruktur
							2029: Percepatan insfrastruktur
							2030: Penguatan infrastruktur

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
	Melaksanakan pengawasan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Pengawasan ini menjadi penting sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam masa waktu yang diharapkan. Pengawasan juga dilakukan terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat dengan menghadirkan ASN	2. Terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan	Indeks SAKIP	Peningkatan transparansi anggaran, pengawasan berbasis teknologi, pengawasan partisipatif, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan kapasitas ASN	2026: Pembangunan kapasitas APIP 2027: Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan dasar digitalisasi,SPBE, dan pelayanan publik 2028: Pengembangan Sistem Monitoring Pengadaan secara Real-Time

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
	yang mengutamakan pelayanan masyarakat						2029: Percepatan analisis pola pengadaan untuk efisiensi dan akuntabilitas
							2030: Penguatan peran APIP sebagai konsultan internal pemerintah daerah
		3, Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah	Opini BPK	1. Terwujudnya tata kelola keuangan yang efektif	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan transparansi anggaran, pengawasan berbasis teknologi, pengawasan partisipatif, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan kapasitas ASN	2026: Pembangunan teknologi informasi penganggaran
							2027: Peningkatan penerapan sistem penganggaran digital

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
							2028: Pengembangan analisis anggaran untuk mendukung efektivitas dan efisiensi belanja
							2029: Percepatan Kerja Sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka penguatan akuntabilitas keuangan daerah
							2030: Penguatan Sistem Informasi Pengawasan Pembangunan Terintegrasi
				2. Terwujudnya kinerja ASN yang berorientasi pada pelayanan masyarakat	Indeks Profesionalitas ASN		2026: Pembangunan kapasitas ASN
							2027: Peningkatan kompetensi teknis ASN dalam e-audit,

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
							manajemen resiko, dan audit berbasis data
							2028: Pengembangan platform e-learning internal bagi ASN
							2029: Percepatan pembangunan budaya inovasi ASN
							2030: Penguatan sistem penghargaan berbasis kompetensi dan inovasi digital
				3. Meningkatnya Akuntabilitas dan tata Kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi	Indeks Integritas Nasional / Survei Penilaian Integritas		2026: Pembangunan teknologi informasi pengadaan barang dan jasa
					Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern		2027: Peningkatan Sistem Pengawasan Layanan Digital

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
					Pemerintah (SPIP)		
					Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		2028: Pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan digital internal
					Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1		2029: Percepatan untuk Aksesibilitas dan Transparansi Hasil Audit Eksternal
							2030: Penguatan Sistem Informasi Pengawasan Pembangunan Terintegrasi

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
	Melakukan pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat sehingga pemerintah dapat menjamin pencapaian kesejahteraan rakyat. Menjadikan aparatur pemerintah sebagai sahabat bagi masyarakat	4. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya	Tingkat Kemiskinan (Persen)	1. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan Kegiatan ekonomi lokal	PDRB Perkapita	Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan, inovasi teknologi, kolaborasi lintas sektor, revitalisasi pusat pertumbuhan, serta pendampingan usaha secara inklusif yang berkelanjutan berbasis potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan rakyat	2026: Pembangunan kewirausahaan yang sistematis dan berkelanjutan
			Gini Rasio		Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan		2027: Peningkatan Potensi Lokal 2028: Pengembangan usaha kecil & koperasi

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
							2029: Percepatan akses KUR dan kredit mikro
							2030: Penguatan model usaha inklusif berbasis komunitas
	Melakukan pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat sehingga pemerintah dapat menjamin pencapaian kesejahteraan rakyat.	5. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1. Tersedianya akses yang lebih baik untuk pembiayaan dan modal usaha bagi masyarakat	Indeks Akses Keuangan Daerah	Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan, inovasi teknologi, kolaborasi lintas sektor, revitalisasi pusat	2026: Pembangunan Potensi Lokal
					Jumlah Industri Kecil Menengah		

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
	Menjadikan aparatur pemerintah sebagai sahabat bagi masyarakat	kegiatan masyarakat	Kontribusi PDRB Kab/Kota		PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	pertumbuhan, serta pendampingan usaha secara inklusif yang berkelanjutan berbasis potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan rakyat	2027: Peningkatan Fasilitas ruang seni dan budaya
					Indeks Pembangunan Kebudayaan		2028: Pengembangan akses jalan, penunjuk arah, fasilitas umum
							2029: Percepatan sentra UMKM berbasis lokal

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
							2030: Penguatan insentif dan penghargaan wirausahawan lokal terbaik
				2. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka		2026: Pembangunan pendidikan vokasi yang melibatkan dunia usaha dan industri
							2027: Peningkatan pelatihan Calon Wirausaha Muda
							2028: Pengembangan pendidikan vokasi yang melibatkan dunia usaha dan industri

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
							2029: Percepatan pelatihan Calon Wirausaha Muda
							2030: Penguatan pendidikan vokasi yang melibatkan dunia usaha dan industri
	Pemerintahan yang akan dibangun untuk simalungun kedepan adalah pemerintahan yang mampu menjadi solusi terhadap permasalahan ditengah tengah masyarakat. Masyarakat bukanlah pihak yang dapat dipersalahkan terhadap penurunan kualitas pendidikan dan kualitas	6. Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran	Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Penguatan pemerintahan yang solutif dan inklusif, pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan Masyarakat Simalungun, dan penignkatan ketahanan sosial	2026: Pembangunan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
	kesehatan di suatu wilayah. Masyarakat haruslah menjadi penerima manfaat utama terhadap seluruh alokasi anggaran yang ada di Kabupaten Simalungun				Harapan Lama Sekolah (tahun)		2027: Peningkatan lanjutan bagi tenaga pendidik untuk peningkatan profesionalisme
							2028: Pengembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan infrastruktur pendidikan
							2029: Percepatan pembangunan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
							2030: Penguatan sarana, prasarana serta layanan untuk pendidikan
				2. Meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Simalungun	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		2026: Pembangunan dasar untuk peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan
							2027: Peningkatan layanan kesehatan sesuai kebutuhan lokal

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
							2028: Pengembangan pembangunan dan rehabilitasi unit puskesmas di wilayah terpencil
							2029: Percepatan pelatihan tenaga kesehatan berbasis teknologi

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
							2030: Penguatan insentif dan penghargaan bagi tenaga kesehatan berprestasi
	Pemerintah kabupaten simalungun kedepan haruslah menjadi pemerintah yang bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Sinergisitas ini sangat penting untuk menjamin meningkatnya kesejahteraan	7. Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Simalungun	Indeks Daya Saing Daerah	1. Terselenggaranya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Memperkuat sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan	2026: Pembangunan perencanaan yang sinkron antara daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi

Visi Kepala Daerah Simalungun	Uraian Misi Kepala Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan untuk RPJMD Simalungun 2025-2029	Strategi
	masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Rancangan Pembangunan Jangka Panjang yang digagas oleh Presiden Jokowi dan diselaraskan oleh Prabowo Subianto akan membawa kabupaten simalungun menjadi Simalungun Maju					masyarakat menuju Simalungun Maju pada Indonesia Emas 2045	2027: Peningkatan tim teknis perencanaan lintas sektor dan lintas pemerintah sebagai penghubung komunikasi pembangunan
							2028: Pengembangan pelaksanaan pembangunan yang berbasis lingkungan
							2029: Percepatan pelaksanaan pembangunan daerah
							2030: Penguatan pembangunan infrastruktur berbasis potensi lokal dan lingkungan

Uraian arah kebijakan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1. **Misi 1 BENAHI** difokuskan untuk pelayanan wajib pada masyarakat yang dapat direncanakan dan terdigitalisasi dengan arah kebijakan yaitu **Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik, pembangunan insfrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.**
2. **MISI 2 AWASI** difokuskan pada pengawasan pembangunan oleh pemerintah sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam masa waktu yang diharapkan dengan arah kebijakan yaitu **Peningkatan transparansi anggaran, pengawasan berbasis teknologi, pengawasan partisipatif, penguatan pengawasan internal, peningkatan kapasitas ASN.**
3. **MISI 3 DAMPINGI** difokuskan pada pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat sehingga pemerintah dapat menjamin pencapaian kesejahteraan rakyat dengan arah kebijakan yaitu **Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan, inovasi teknologi, kolaborasi lintas sektor, revitalisasi pusat pertumbuhan ekonomi, serta pendampingan usaha secara inklusif yang berkelanjutan berbasis potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan rakyat.**
4. **MISI 4 SOLUSI** difokuskan pada masyarakat sebagai penerima manfaat utama terhadap seluruh alokasi anggaran yang ada di Kabupaten Simalungun dengan arah kebijakan yaitu **Penguatan pemerintahan yang solutif dan inklusif, pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat Simalungun, dan peningkatan ketahanan sosial.**
5. **MISI 5 SINERGI** difokuskan pada sinergisitas yang penting untuk menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045 dengan arah kebijakan yaitu **Memperkuat sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan pemerintahan pusat dan provinsi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Simalungun Maju pada Indonesia Emas 2045**.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Maka dari itu, arah kebijakan harus selaras dengan strategi untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara maksimal. Sejalan dengan hal tersebut, penahapan pembangunan daerah merupakan aspek esensial dalam pelaksanaan arah kebijakan agar berjalan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Setiap tahapan pembangunan disusun dalam kerangka waktu lima tahunan yang memperhatikan kondisi objektif daerah, proyeksi kebutuhan pembangunan, serta dinamika tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, konsistensi dan

keterpaduan antara arah kebijakan dan penahapan pembangunan menjadi landasan utama dalam menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara optimal, efektif, dan berkelanjutan.

Tabel III.5 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Simalungun

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Membangun kualitas pelayanan publik melalui prosedur yang mudah, digitalisasi layanan dasar, serta optimalisasi fasilitas pelayanan berbasis masyarakat.	Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi dengan pengembangan layanan administrasi kependudukan yang terdigitalisasi dan terintegrasi.	Mengembangkan sistem manajemen kinerja pembangunan yang akuntabel, transparan, serta berbasis hasil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah.	Mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah yang profesional dan akuntabel melalui penguatan sistem penganggaran, pelaporan, dan pengawasan berbasis elektronik.	Memperkuat kapasitas aparatur sipil negara yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas, didukung sistem meritokrasi, serta penerapan budaya kerja adaptif, digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi lokal melalui fasilitasi pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan berbasis potensi desa dan komunitas.	Memperluas akses masyarakat terhadap program pendampingan usaha produktif serta kemudahan perizinan usaha mikro, kecil, dan ekonomi kreatif di tingkat desa dan kelurahan.	Memperkuat aksesibilitas masyarakat terhadap sumber pembiayaan usaha melalui sinergi dengan lembaga keuangan daerah, koperasi, dan kemitraan perbankan.	Mengembangkan sistem pembiayaan inklusif dan program inkubasi usaha lokal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah.	Penguatan kemitraan usaha masyarakat dengan dunia usaha, koperasi, dan perbankan melalui program pemberdayaan terpadu serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan dasar yang merata, penyediaan program layanan gizi masyaarakat, serta peningkatan literasi pendidikan dan kesehatan.	Penguatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan layanan kesehatan berbasis digital, dan pemberian beasiswa pendidikan bagi	Pengembangan infrastruktur pendidikandan kesehatan inklusif, serta penguatan pelayanan puskesmas keliling	Optimalisasi digitalisasi sistem layanan pendidikan dan kesehatan,	Konsolidasi kebijakan dan efektivitas alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan untuk mencetak SDM yang sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing.

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	masyarakat kurang mampu.			
Penguatan koordinasi lintas sektor dan antar pemerintah melalui forum perencanaan terpadu serta sinkronisasi program prioritas, dan penyusunan rencana pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan	kolaborasi pelaksanaan program pembangunan berbasis wilayah melalui perjanjian kerja sama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.	Pengembangan infrastruktur dasar berbasis lingkungan yang terintegrasi antarwilayah, dengan prioritas pada kawasan strategis dan daerah tertinggal.	Optimalisasi sinergi pembangunan berkelanjutan melalui program-program prioritas serta berbasis lingkungan.	Konsolidasi kebijakan pembangunan infrastruktur regional dan penguatan kelembagaan koordinasi antar pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Penahapan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029 disusun sebagai bentuk pelaksanaan tujuan pembangunan daerah secara bertahap dan terintegrasi. Pada tahun 2025, arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada tahap konsolidasi awal serta penguatan fondasi pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, serta administrasi kependudukan. Upaya ini ditempuh melalui pembangunan dan optimalisasi sistem layanan berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat, serta penguatan infrastruktur dasar, terutama di wilayah pinggiran dan daerah yang tertinggal dari sisi pelayanan publik. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, pemerintah daerah mulai melakukan penataan awal terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Dalam bidang pengembangan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah menginisiasi penyusunan basis data potensi ekonomi desa yang komprehensif sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, dilaksanakan pula program pelatihan dasar kewirausahaan dan fasilitasi pendampingan usaha mikro berbasis potensi lokal guna memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan serta mendorong kemandirian pelaku usaha kecil. Untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, dilakukan pemetaan awal terhadap potensi inovasi daerah sebagai langkah strategis dalam merumuskan kebijakan inovasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Langkah ini diiringi dengan pembangunan kapasitas dan perencanaan sistematis terhadap pengembangan kawasan berbasis potensi unggulan daerah. Dalam aspek pembangunan wilayah, kebijakan diarahkan pada identifikasi dan penetapan kawasan prioritas pengembangan, serta penyusunan rencana penguatan

konektivitas antarwilayah untuk menciptakan integrasi wilayah yang lebih kuat serta mendukung distribusi pembangunan yang merata dan berkeadilan. Seluruh upaya tersebut diperkuat melalui pembentukan forum sinergi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun antarsektor.

Arah kebijakan pada tahun 2025 merupakan tahap awal dari proses pembangunan lima tahunan, yang berfokus pada konsolidasi sistem pemerintahan, penguatan fondasi pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur awal, pengumpulan basis data strategis, serta pembentukan mekanisme kolaboratif lintas sektor. Tahapan ini menjadi landasan penting bagi implementasi kebijakan di tahun-tahun berikutnya yang akan lebih menitikberatkan pada perluasan cakupan layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing daerah, serta integrasi pembangunan antarwilayah.

Pada tahun 2026, arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada tahap penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam lingkup pelayanan publik. Pemerintah daerah mulai menerapkan sistem penyelenggaraan pelayanan yang berbasis kompetensi, disertai penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terukur, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis hasil mulai diintegrasikan secara menyeluruh, didukung dengan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang lebih transparan. Dalam bidang ekonomi, kebijakan difokuskan pada pengembangan klaster ekonomi lokal melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), koperasi, serta pelatihan ekonomi kreatif yang berbasis potensi wilayah. Arah kebijakan inovasi mulai difokuskan pada pembangunan ekosistem riset dan pengembangan teknologi terapan melalui kolaborasi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Di sisi pembangunan wilayah, percepatan infrastruktur konektivitas dan integrasi sistem transportasi lokal menjadi prioritas utama untuk mendukung mobilitas barang dan jasa antarwilayah. Isu pelestarian lingkungan hidup mulai menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan, dengan mengintegrasikan aspek konservasi sumber daya air, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. Dalam rangka memperkuat partisipasi masyarakat, pelibatan publik diperluas melalui forum musrenbang tematik dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Arah kebijakan tahun 2026 merupakan tahap penguatan, yang bertujuan memperkokoh sistem tata kelola pemerintahan, memperluas pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, mempercepat konektivitas wilayah, serta mulai memperhatikan dimensi lingkungan dan inovasi

teknologi. Tahun ini menjadi jembatan penting untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah secara konsisten dan terukur.

Pada tahun 2027, pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan pada percepatan pencapaian kinerja pembangunan dan penguatan manajemen berbasis hasil secara menyeluruh. Pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target pembangunan. Hasil evaluasi ini dijadikan dasar dalam integrasi sistem informasi pelayanan dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, sehingga mendukung keterpaduan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Pada aspek kelembagaan, dilakukan penyempurnaan struktur organisasi perangkat daerah untuk menyesuaikan fungsi dan kewenangan dengan kebutuhan strategis RPJMD, serta memastikan kapasitas institusi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah fokus pada penguatan fondasi ekonomi produktif masyarakat melalui revitalisasi pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal, serta pengembangan zona ekonomi produktif yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan wilayah. Di sisi pembangunan wilayah, kebijakan diarahkan pada percepatan penyelesaian pembangunan jaringan jalan strategis serta penataan kawasan pertumbuhan ekonomi guna memperkuat konektivitas dan distribusi logistik. Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, dilakukan perluasan program konservasi daerah aliran sungai dan penguatan sistem peringatan dini bencana di wilayah rawan risiko bencana, sebagai respons terhadap perubahan iklim dan peningkatan frekuensi bencana. Strategi penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan dilakukan melalui penyusunan *roadmap* investasi daerah yang melibatkan sektor swasta dan dunia usaha sebagai mitra pembangunan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi daerah. Arah kebijakan tahun 2027 menekankan pada akselerasi pencapaian target pembangunan, integrasi sistem manajemen berbasis kinerja, penguatan institusi pemerintah daerah, serta peningkatan kapasitas ekonomi lokal yang didorong oleh inovasi dan kemitraan investasi. Tahun ini merupakan titik konsolidasi antara hasil pembangunan awal dengan kesiapan menuju capaian strategis jangka menengah yang berkelanjutan.

Tahun 2028 merupakan tahap untuk proses pelembagaan inovasi dan penguatan kemandirian daerah. Arah kebijakan pembangunan diarahkan pada penciptaan layanan publik yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan, dengan pemanfaatan teknologi digital secara lebih luas untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik guna memperkuat transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas fiskal. Fokus pembangunan bidang ekonomi pada tahun ini diarahkan pada replikasi program-program inovasi

unggulan yang telah terbukti berdampak, antarwilayah dan antarsektor, disertai pemberian insentif kepada perangkat daerah yang mampu menghasilkan inovasi dengan nilai manfaat luas. Pembangunan wilayah difokuskan pada penguatan kota dan desa ramah lingkungan yang terintegrasi secara fungsional dalam dokumen tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah. Upaya perlindungan lingkungan diperluas melalui rehabilitasi kawasan ekosistem kritis, serta perwujudan indeks daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Koordinasi lintas sektor dan antarwilayah diperkuat melalui sistem pengawasan terpadu guna menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan lintas wilayah. Sehingga, arah kebijakan tahun 2028 menekankan pada pelembagaan inovasi pelayanan publik, penguatan kemandirian ekonomi lokal, sinergi kelestarian lingkungan dalam pembangunan wilayah, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan pembangunan. Tahun ini menjadi momentum penguatan sistemik untuk menciptakan pembangunan yang lebih resilien, inklusif, dan berkelanjutan menjelang akhir periode RPJMD.

Tahun 2029 merupakan tahap akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029, yang difokuskan pada konsolidasi capaian pembangunan dan penguatan fondasi keberlanjutan untuk periode jangka panjang. Pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja pelayanan publik guna memastikan seluruh sasaran strategis RPJMD tercapai secara optimal. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai dasar penyusunan arah kebijakan strategis RPJMD, serta mendukung perencanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Di bidang tata kelola pemerintahan, penyelesaian pengembangan sistem informasi lintas sektor menjadi prioritas utama sebagai bentuk reformasi birokrasi digital yang menyeluruh, memungkinkan terwujudnya integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara *real time* dan transparan.

Dalam sektor ekonomi, penguatan ekonomi lokal difokuskan pada fasilitasi proses hilirisasi produk unggulan daerah dan perluasan akses pasar, termasuk peningkatan kapasitas ekspor produk berbasis potensi lokal. Pemerintah juga mendorong konsolidasi pusat-pusat inovasi daerah sebagai bagian dari upaya membentuk sumber daya manusia unggul yang menguasai teknologi dan beradaptasi dengan sistem pendidikan digital. Pembangunan wilayah diintegrasikan dalam kerangka dokumen perencanaan jangka panjang, yang mencakup evaluasi tata ruang, sistem transportasi, dan pola permukiman secara menyeluruh untuk menjamin keberlanjutan pengembangan kawasan. Dalam bidang lingkungan, kebijakan diarahkan pada harmonisasi program daerah dengan RPJMN dan RPJPD provinsi guna menjaga sinergi lintas tingkatan pemerintahan. Sebagai penguatan sinergi pembangunan, pemerintah menetapkan peta jalan pembangunan

berkelanjutan dan memperkuat kemitraan antarlembaga serta lintas wilayah dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Pada tahun 2029, arah kebijakan yang diambil berfokus pada konsolidasi hasil pembangunan, pemantapan kelembagaan dan sistem digital pemerintahan, penguatan daya saing ekonomi lokal, serta sinergi keberlanjutan lingkungan. Tahun ini menjadi penanda transisi menuju agenda pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada RPJPD 2025–2045. Dengan demikian, seluruh arah kebijakan tahunan dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap tujuan pembangunan daerah dapat dicapai secara bertahap dan terukur. Penahapan ini menjadi landasan implementatif RPJMD dalam mewujudkan transformasi Kabupaten Simalungun menuju daerah yang inklusif, tangguh, inovatif, dan berkelanjutan.

Penyusunan arah kebijakan tahunan RPJMD diselaraskan secara langsung dengan misi kepala daerah, guna memastikan konsistensi antara visi kepemimpinan dan langkah strategis pembangunan. Penyandingan ini menjadi dasar integratif agar setiap kebijakan yang dijalankan mampu menjawab tujuan pembangunan secara terarah dan berkelanjutan.

Tabel III.6 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Simalungun

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	Lokus
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Misi 1 : BENAHI Misi 2 : Awasi	Membangun kualitas pelayanan publik melalui prosedur yang mudah, digitalisasi layanan dasar, serta optimalisasi fasilitas pelayanan berbasis masyarakat.	Kabupaten Simalungun
		Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi dengan pengembangan layanan administrasi kependudukan yang terdigitalisasi dan terintegrasi.	Kabupaten Simalungun
		Mengembangkan sistem manajemen kinerja pembangunan yang akuntabel, transparan, serta berbasis hasil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah.	Kabupaten Simalungun
		Mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah yang profesional dan akuntabel melalui penguatan sistem penganggaran, pelaporan, dan pengawasan berbasis elektronik.	Kabupaten Simalungun
		Memperkuat kapasitas aparatur sipil negara yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas, didukung sistem meritokrasi, serta penerapan budaya kerja adaptif, digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Kabupaten Simalungun
3	Misi 3: Dampingi	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi lokal melalui fasilitasi pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan berbasis potensi desa dan komunitas.	Kabupaten Simalungun
		Memperluas akses masyarakat terhadap program pendampingan usaha produktif serta kemudahan perizinan usaha mikro, kecil, dan ekonomi kreatif di tingkat desa dan kelurahan.	Kabupaten Simalungun

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	Lokus
		Memperkuat aksesibilitas masyarakat terhadap sumber pembiayaan usaha melalui sinergi dengan lembaga keuangan daerah, koperasi, dan kemitraan perbankan.	Kabupaten Simalungun
		Mengembangkan sistem pembiayaan inklusif dan program inkubasi usaha lokal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah.	Kabupaten Simalungun
		Penguatan kemitraan usaha masyarakat dengan dunia usaha, koperasi, dan perbankan melalui program pemberdayaan terpadu serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.	Kec. Dolog Masagal, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kec. Dolok Panribuan, Kec. Dolok Silau, Kec. Gunung Malela, Kec. Gunung Maligas, Kec. Hatonduhan, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kec. Pamatang Silimahuta, Kec. Panei, Kec. Panombeian Pane, Kec. Pematang Bandar, Kec. Purba, Kec. Raya, Kec. Siantar, Kec. Silimakuta, Kec. Tanah jawa.
4	Misi 4: Solusi	Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan dasar yang merata, penyediaan program layanan gizi masyaarakat, serta peningkatan literasi pendidikan dan kesehatan.	Kabupaten Simalungun
		Penguatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan layanan kesehatan berbasis digital, dan pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.	Kabupaten Simalungun
		Pengembangan infrastruktur pendidikandan kesehatan inklusif, serta penguatan pelayanan puskesmas keliling	Kabupaten Simalungun
		Optimalisasi digitalisasi sistem layanan pendidikan dan kesehatan,	Kabupaten Simalungun
		Konsolidasi kebijakan dan efektivitas alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan untuk mencetak SDM yang sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing.	Kabupaten Simalungun
5	Misi 5: Sinergi	Penguatan koordinasi lintas sektor dan antar pemerintah melalui forum perencanaan terpadu serta sinkronisasi program prioritas, dan penyusunan rencana pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan	Kabupaten Simalungun
		kolaborasi pelaksanaan program pembangunan berbasis wilayah melalui perjanjian kerja sama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.	Kabupaten Simalungun
		Pengembangan infrastruktur dasar berbasis lingkungan yang terintegrasi antarwilayah, dengan prioritas pada kawasan strategis dan daerah tertinggal.	Kabupaten Simalungun
		Optimalisasi sinergi pembangunan berkelanjutan melalui program-program prioritas serta berbasis lingkungan.	Kabupaten Simalungun
		Konsolidasi kebijakan pembangunan infrastruktur regional dan penguatan kelembagaan koordinasi antar pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.	Kabupaten Simalungun

Penyandingan misi dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029 bertujuan untuk memastikan bahwa setiap strategi pembangunan selaras dengan semangat kepemimpinan daerah, menjawab kebutuhan masyarakat, dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan. Penyusunan arah kebijakan ini diselaraskan dengan lima misi kepala daerah dan diperkuat dengan penetapan lokus wilayah sebagai fokus implementasi program pembangunan.

Misi 1: Benahi dan Misi 2: Awasi difokuskan pada pembenahan kualitas layanan publik serta penguatan tata kelola pemerintahan. Arah kebijakan diarahkan pada penyediaan layanan publik yang mudah, cepat, dan berbasis digital, penguatan sistem administrasi pemerintahan yang terintegrasi, serta optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kapasitas aparatur sipil negara juga diperkuat melalui penerapan prinsip meritokrasi dan budaya kerja yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Keseluruhan kebijakan ini diterapkan di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun.

Misi 3: Dampingi menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan usaha kecil dan mikro, kemudahan perizinan, serta penguatan akses terhadap sumber pembiayaan melalui sinergi dengan lembaga keuangan. Fokus pengembangan sistem pembiayaan inklusif dan program inkubasi usaha lokal diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan desa dan komunitas. Adapun lokus utama pelaksanaan kebijakan ini mencakup kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi ekonomi lokal yang menonjol, yaitu:
Kec. Dolok Masagal, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kec. Dolok Panribuan, Kec. Dolok Silau, Kec. Gunung Malela, Kec. Gunung Maligas, Kec. Hatonduhan, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kec. Pamatang Silimakuta, Kec. Panei, Kec. Panombean Pane, Kec. Pematang Bandar, Kec. Purba, Kec. Raya, Kec. Siantar, Kec. Silimakuta, dan Kec. Tanah Jawa.

Misi 4: Solusi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Arah kebijakan menekankan pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan dasar, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang inklusif. Selain itu, dilakukan optimalisasi digitalisasi sistem layanan serta konsolidasi kebijakan anggaran untuk menghasilkan SDM yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Seluruh implementasi kebijakan ini berlaku di wilayah Kabupaten Simalungun.

Misi 5: Sinergi menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan antarwilayah. Arah kebijakan mencakup penguatan koordinasi lintas pemerintah, integrasi program prioritas pembangunan, dan kolaborasi antar level pemerintahan. Ditekankan pula pengembangan infrastruktur dasar berbasis lingkungan yang terintegrasi antarwilayah

serta optimalisasi sinergi pembangunan wilayah dengan berbasis kemitraan. Penerapan arah kebijakan ini juga mencakup seluruh wilayah Kabupaten Simalungun, dengan prioritas pada daerah yang memiliki posisi strategis dan tingkat ketertinggalan yang tinggi.

Berdasarkan penyandingan antara misi kepala daerah dan arah kebijakan yang dilengkapi dengan lokus pembangunan, dapat disimpulkan bahwa strategi pembangunan di Kabupaten Simalungun telah disusun secara terpadu dan responsif terhadap kondisi geografis dan potensi lokal. Arah kebijakan tidak hanya menjadi perwujudan visi politik kepala daerah, tetapi juga menjadi pedoman teknokratis dalam menjamin efektivitas, keterpaduan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan ini akan menjadi instrumen penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Penyesuaian antara arah kebijakan dan tujuan-sasaran memastikan bahwa setiap langkah pembangunan relevan, terukur, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, RPJMD ini menjadi fondasi strategis untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun.

Tabel III.7 Penyelarasan Arah Pembangunan RPJMD Kabupaten Simalungun dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Sasaran RPJMN

No.	Sasaran Pembangunan RPJMN	Arah pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Simalungun
1	Meningkatkan kualitas layanan publik yang inklusif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat	Transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi (SPBE) dan peningkatan aksesibilitas dan kepuasan layanan publik	Membangun kualitas pelayanan publik melalui prosedur yang mudah, digitalisasi layanan dasar, serta optimalisasi fasilitas pelayanan berbasis masyarakat.
2	Reformasi birokrasi melalui digitalisasi dan tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi	Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi	Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi dengan pengembangan layanan administrasi kependudukan yang terdigitalisasi dan terintegrasi.
3	Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Implementasi manajemen kinerja yang terukur dan akuntabel dalam setiap perangkat daerah	Mengembangkan sistem manajemen kinerja pembangunan yang akuntabel, transparan, serta berbasis hasil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah.

No.	Sasaran Pembangunan RPJMN	Arah pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Simalungun
4	Mewujudkan tata kelola fiskal yang kredibel, efisien, dan akuntabel di tingkat daerah	Penguatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berbasis teknologi informasi	Mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah yang profesional dan akuntabel melalui penguatan sistem penganggaran, pelaporan, dan pengawasan berbasis elektronik.
5	Penguatan SDM ASN dengan sistem merit, kompetensi digital, dan budaya kerja berdaya saing tinggi	Peningkatan kualitas SDM aparatur berbasis sistem merit dan kompetensi digital	Memperkuat kapasitas aparatur sipil negara yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas, didukung sistem meritokrasi, serta penerapan budaya kerja adaptif, digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
6	Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi berbasis komunitas	Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan desa; penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi lokal melalui fasilitasi pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan berbasis potensi desa dan komunitas.
7	Mendorong pertumbuhan UMKM dan sektor kreatif melalui simplifikasi regulasi dan akses pendanaan	Transformasi ekonomi inklusif dan penyederhanaan layanan perizinan usaha mikro dan ekonomi kreatif	Memperluas akses masyarakat terhadap program pendampingan usaha produktif serta kemudahan perizinan usaha mikro, kecil, dan ekonomi kreatif di tingkat desa dan kelurahan.
8	Penguatan akses pembiayaan bagi UMKM dan usaha komunitas melalui skema inklusif dan kolaboratif	Sinergi lintas kelembagaan keuangan dalam memperluas pembiayaan ekonomi kerakyatan dan koperasi	Memperkuat aksesibilitas masyarakat terhadap sumber pembiayaan usaha melalui sinergi dengan lembaga keuangan daerah, koperasi, dan kemitraan perbankan.
9	Meningkatkan kewirausahaan dan kapasitas usaha lokal melalui model pembiayaan adaptif dan pelatihan berkelanjutan	Penguatan ekonomi lokal melalui pembiayaan inklusif dan pengembangan inkubator usaha daerah	Mengembangkan sistem pembiayaan inklusif dan program inkubasi usaha lokal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah.
10	Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pengembangan ekonomi lokal melalui kolaborasi multipihak	Membangun ekosistem ekonomi daerah berbasis kemitraan strategis dengan dunia usaha dan lembaga keuangan	Penguatan kemitraan usaha masyarakat dengan dunia usaha, koperasi, dan perbankan melalui program pemberdayaan terpadu serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.

No.	Sasaran Pembangunan RPJMN	Arah pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Simalungun
11	Peningkatan kualitas SDM melalui layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan	Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penguatan literasi masyarakat serta gizi anak dan ibu	Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan dasar yang merata, penyediaan program layanan gizi masyaarakat, serta peningkatan literasi pendidikan dan kesehatan.
12	Penguatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan melalui pelatihan, bantuan beasiswa, dan sistem layanan digital terintegrasi	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan melalui pelatihan serta penguatan dukungan pembiayaan pendidikan dan layanan digital	Penguatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan layanan kesehatan berbasis digital, dan pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
13	Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dasar hingga wilayah terpencil	Peningkatan cakupan infrastruktur pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) berbasis wilayah dan desa	Pengembangan infrastruktur pendidikandan kesehatan inklusif, serta penguatan pelayanan puskesmas keliling
14	Transformasi digital sektor pendidikan dan kesehatan dalam peningkatan akses dan efisiensi layanan	Penerapan teknologi informasi dalam sistem layanan pendidikan dan kesehatan daerah	Optimalisasi digitalisasi sistem layanan pendidikan dan kesehatan,
15	Penguatan tata kelola kebijakan dan anggaran pembangunan SDM untuk mewujudkan generasi unggul dan produktif	Konsolidasi kebijakan anggaran dan penguatan koordinasi program pendidikan dan kesehatan lintas sektor	Konsolidasi kebijakan dan efektivitas alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan untuk mencetak SDM yang sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing.
16	Sinkronisasi perencanaan pusat-daerah dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan berbasis lingkungan	Penguatan perencanaan terintegrasi lintas sektor dan lintas wilayah untuk pembangunan berbasis lingkungan	Penguatan koordinasi lintas sektor dan antar pemerintah melalui forum perencanaan terpadu serta sinkronisasi program prioritas, dan penyusunan rencana pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan
17	Efektivitas pelaksanaan pembangunan melalui kemitraan antar level pemerintahan	Penguatan kolaborasi antar pemerintah melalui kesepakatan kerja sama pembangunan lintas wilayah dan kewenangan	kolaborasi pelaksanaan program pembangunan berbasis wilayah melalui perjanjian kerja sama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
18	Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung pemerataan	Pengembangan infrastruktur wilayah terpadu berbasis potensi kawasan dan keberlanjutan lingkungan	Pengembangan infrastruktur dasar berbasis lingkungan yang terintegrasi antarwilayah, dengan prioritas pada

No.	Sasaran Pembangunan RPJMN	Arah pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Simalungun
	dan pembangunan berkelanjutan		kawasan strategis dan daerah tertinggal.
19	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah	Sinergi kebijakan pembangunan prioritas berbasis lingkungan antara pemda dan mitra pembangunan	Optimalisasi sinergi pembangunan berkelanjutan melalui program-program prioritas serta berbasis lingkungan.
20	Penguatan tata kelola dan koordinasi antar pemerintah dalam pembangunan kawasan untuk mendukung kesejahteraan dan pemerataan pembangunan	Penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam koordinasi pembangunan wilayah dan sinergi kebijakan lintas daerah	Konsolidasi kebijakan pembangunan infrastruktur regional dan penguatan kelembagaan koordinasi antar pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memastikan keterpaduan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029 dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya terhadap arah pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara serta sasaran pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Secara substansi, arah kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun mencakup isu-isu strategis seperti peningkatan kualitas layanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan. Seluruhnya telah dipastikan relevan dengan arah kebijakan provinsi dan sasaran pembangunan nasional.

III.2.2. Program Prioritas Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan program sebagai instrumen pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Program prioritas menjadi landasan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang terarah, dan berkesinambungan. Program prioritas disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta sebagai implementasi dari misi guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Simalungun.

Tabel III.8 Program Prioritas Kabupaten Simalungun

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Visi: Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju						
MISI 1 : BENAHI	T1. Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan			Indeks Inovasi Daerah		
				Indeks kualitas lingkungan hidup		
		S1.1. Meningkatnya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang terdigitalisasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE		
			Terkelolanya data dan informasi kependudukan secara sistematis dan terintegrasi sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data	Persentase OPD dalam pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat	Persentase keluarga yang mengikuti	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			dalam pembinaan keluarga berencana (KB).	kelompok kegiatan ketahanan keluarga.		
			Terkelolanya data gender dan anak secara terstruktur dan berkelanjutan	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		S1.2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik		
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI
			Menguatnya perumusan kebijakan dan strategi pembangunan	Persentase fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat.	Konektivitas darat dan persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi sosial	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				publik pemerintah daerah (survei)		
			Tersedianya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui sistem satu pintu	Persentase pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	Program Pelayanan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Tersedianya data investasi yang akurat dan terkini	Persentase data dan informasi tentang perizinan dan non perizinan yang akurat	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Pengelolaan Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Meningkatnya kualitas Kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN (RSUD)
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga Kesehatan	Presentase Peningkatan kompetensi SDM bidang Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	DINAS KESEHATAN (RSUD)
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk.	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital dan pesentase kepemilikan kartu identitas anak.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah.	Persentase Anak usia 16-18 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) dan Persentase	Pengelolalan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (APS)		
		S1.3. Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan		Penurunan Emisi GRK (ton CO2eq)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan gedung dalam kondisi baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,	Cakupan pelayanan pengembangan perumahan bagi masyarakat korban	Program Penanggulangan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat, dan Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana	bencana dan terdampak relokasi		
			Terjaganya ketahanan pangan dan stabilitas produksi pertanian di daerah	Persentase luas lahan yang dilakukan pengamatan pengendalian OPT	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	DINAS PERTANIAN
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Presentase Limbah B3 yang Terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		S1.4 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur		
			Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak, aman, dan	Cakupan pelayanan pengembangan perumahan bagi	Program Pengembangan Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			terjangkau bagi masyarakat	masyarakat korban bencana dan terdampak relokasi		
			Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir, abrasi dan banjir rob serta luas layanan irigasi multikomoditas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan air minum bagi masyarakat	Presentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga yang Aendapatkan akses SPAM yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			Tercegahnya genangan dan banjir melalui pengelolaan sistem drainase yang terkoneksi dengan sungai	Panjang sistem drainase lingkungan yang dioptimalisasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi yang Profesional	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Program Pengembangan Jasa Konstrruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung agar Sesuai Dengan Standar Teknis dan Keselamatan	Persentase Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung dan Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Program Penataan Bangunan Gedung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Berkualitas yang Nyaman dan Aman	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Peningkatan Konektivitas Darat dan Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan	DINAS PERHUBUNGAN
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Persentase Peningkatan Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	DINAS PERHUBUNGAN
MISI 2: AWASI	T2. Terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap pembangunan			Indeks Reformasi Birokrasi		
		S2.1. Meningkatnya akuntabilitas		Indeks SAKIP		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		kinerja pembangunan				
			Terjalinnya proses penyusunan rencana pembangunan dan pendanaannya	Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
			Persentase pelaksanaan penataan administrasi pemerintahan dan kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan sosial	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN& BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	T3. Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah			Opini BPK		
		S3.1. Terwujudnya tata kelola keuangan yang efektif		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFRORMATIKA

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				publik Pemerintah Daerah (Survei)		
		S3.2. Terwujudnya kinerja ASN yang berorientasi pada pelayanan masyarakat		Indeks Profesionalitas ASN		
			Terselenggaranya manajemen ASN secara profesional	Persentase layanan administrasi kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Meningkatnya manajemen keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang baik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		S3.3. Meningkatnya Akuntabilitas dan tata Kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi		Indeks Integritas Nasional / Survei Penilaian Integritas (SPI)		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	INSPEKTORAT DAERAH

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		INSPEKTORAT DAERAH
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH
MISI 3: DAMPINGI	T4. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya			Tingkat Kemiskinan		
				Gini Rasio		
		S4.1. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal		PDRB Perkapita		
				Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan hidup untuk Masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya produktivitas dan ketahanan sektor pertanian daerah	Persentase kelompok tani yang memperoleh bantuan sarana produksi pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DINAS PERTANIAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Terbentuknya kemitraan rantai pasok antara usaha besar dan UMKM dalam mempercepat skala usaha	Persentase usaha mikro yang meningkat skala usahanya	Program Pengembangan UMKM	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Terdorongnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Perekonomian dan Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi,	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Penilaian kesehatan KSP/ USP koperasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				Berkualitas		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program pengembangan UMKM	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Program penguatan badan hukum koperasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana yang ditingkatkan kualitasnya	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga kebutuhan pokok dan harga barang penting	program Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan harga barang penting	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Meningkatnya kemandirian kelompok rentan dan komunitas adat terpencil melalui	Peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	Program Pemberdayaan Sosial	DINAS SOSIAL

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			penguatan kapasitas sosial			
	T5. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat			Laju Pertumbuhan Ekonomi		
				Kontribusi PDRB Kab/Kota		
		S5.1. Tersedianya akses yang lebih baik untuk pembiayaan dan modal usaha bagi masyarakat.		Indeks Akses Keuangan Daerah		
				Jumlah Industri Kecil Menengah		
				PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		
				Indeks Pembangunan Kebudayaan		
			Terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui penyusunan kebijakan insentif dan peta potensi	Persentase regulasi pemerintah pusat yang mendukung kemudahan investasi dari total regulasi terkait investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Terciptanya industri yang tumbuh secara terencana dan berkelanjutan	Persentase pertumbuhan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya keberlanjutan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan pelindungan hukum koperasi	Persentase peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya untuk menjaga keberlangsungan usaha perikanan daerah	Peningkatan produksi perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya daya tarik wisata dan destinasi unggulan di Kabupaten Simalungun	Persentase daya tarik wisata yang dikembangkan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat pelatihan	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Meningkatnya Jangkauan pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan dan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		S5.2 Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.		Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Tersedianya pelayanan perizinan dan non perizinan penanama modal melalui sistem satu pintu	Persentase pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	Program Pelayanan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program promosi penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalu pelatihan berbasis kompetensi	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINAS KETENAGAKERJAAN
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
MISI 4: SOLUSI	T6. Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan			Indeks Pembangunan Manusia		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
	masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran.					
		S6.1. Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun.		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)		
				Harapan Lama Sekolah (tahun)		
			Meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal	Meningkatnya : APK PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				APM SD		
				APM SMP		
				Kualitas Pendidikan Non Formal (PNF)		
			Meratanya distribusi dan peningkatan kapasitas pendidik serta tenaga kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 persentase guru (honorer negeri dan swasta) yang memenuhi kompetensi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DINAS PENDIDIKAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas dan akses layanan perpustakaan	Persentase pemenuhan koleksi buku sesuai dengan analisa kebutuhan	Program Pembinaan Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		S6.2. Meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Simalungun		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun);		
			Tersedianya layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penguatan fasilitas UKP dan UKM	Cakupan pemenuhan SPM bidang kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
			Optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Persentase desa yang melaksanakan pos pembinaan terpadu	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
			Meningkatanya Mutu dan Disitribusi Tenaga Kesehatan	persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa	Persentase lembaga/kader lembaga yang dilatih	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
MISI 5: SINERGI	T7. Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Simalungun			Indeks Daya Saing Daerah		
		S7.1. Terselenggaranya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
			Terciptanya pembangunan yang terkoordinasi dan sinergis di tingkat daerah	Persentase capaian koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Dalam mendukung pelaksanaan Misi 1: BENAHI, Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan Tujuan 1: Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital, dengan sasaran seperti S1.2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik. Outcome yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kemandirian kelompok rentan dan komunitas adat terpencil melalui penguatan kapasitas sosial, salah satunya indikator " Peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan". Indikator tersebut dalam pelaksanaannya didukung dengan melakukan program prioritas yaitu Program Pemberdayaan Sosial. Pada misi 2: AWASI terdapat Sasaran S2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan, dengan outcome " Terjalinnya proses penyusunan rencana pembangunan dan pendanaannya". Outcome ini didukung oleh indikator Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pada Misi 3: DAMPINGI, yang berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat, ditetapkan Tujuan 5: Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya, dengan sasaran S4.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal. Outcome yang diharapkan adalah Meningkatnya daya tarik wisata dan destinasi unggulan di Kabupaten Simalungun yang diukur melalui indikator berupa Persentase daya tarik wisata yang dikembangkan. Program prioritas untuk mewujudkan outcome ini adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata. Pada sasaran S5.1 Tersedianya akses yang lebih baik untuk pembiayaan dan modal usaha bagi masyarakat, diarahkan untuk mencapai outcome "Terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui penyusunan kebijakan insentif dan peta potensi". Outcome tersebut diukur dengan indikator berupa persentase regulasi pemerintah pusat yang mendukung kemudahan investasi dari total regulasi terkait investasi.

Pada Misi 4: SOLUSI dan Misi 5: SINERGI, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dasar serta penguatan konektivitas antarwilayah. Tujuan 6 dari Misi 4 dijabarkan melalui Sasaran S6.1 dan S6.2, dengan outcome berupa meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar hingga menengah, serta meningkatnya kualitas layanan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan. Program prioritas seperti Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat menjadi instrumen utama untuk mewujudkan indikator outcomenya yaitu Meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal. Sementara itu, Misi 5 menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam salah satu sasaran seperi Sasaran S7.1, dengan outcome "Terciptanya pembangunan yang terkoordinasi dan sinergis di tingkat daerah". Outcome ini

diwujudkan melalui program lintas OPD yakni Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah.

III.2.3. Program Hasil Terbaik Cepat

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) merupakan pendekatan program yang dirancang untuk menghasilkan dampak nyata, terukur, dan signifikan dalam jangka waktu relatif singkat, khususnya pada sektor-sektor prioritas yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan PHTC sebagai bagian dari strategi percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah, dengan fokus pada penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat mendesak, serta sebagai upaya membangun fondasi kepercayaan publik dan memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan. Pelaksanaan PHTC didasarkan pada hasil identifikasi isu-isu strategis, analisis data empirik, serta kebutuhan riil masyarakat, sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran jangka menengah dan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berikut penyandingan PHTC dari RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJMD Kabupaten Simalungun.

Tabel III.9 Program Hasil Terbaik Cepat dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten Simalungun

PHTC dalam RPJMN	PHTC dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara	PHTC dalam RPJMD Kabupaten Simalungun
Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.	Peningkatan kualitas layanan, akses dan jaminan Kesehatan Gratis Bagi Seluruh Penduduk Sumatera Utara dalam rangka peningkatan Usia Harapan Hidup	Percepatan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung akses layanan kesehatan gratis, pemenuhan gizi masyarakat rentan
Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit		
Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut		Pemberdayaan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pelatihan, pembiayaan dan askes pasar, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	Penyediaan SDM Unggul yang Siap Bekerja	Peningkatan kualitas masyarakat Simalungun yang unggul melalui penguatan pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan sosial dan

PHTC dalam RPJMN	PHTC dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara	PHTC dalam RPJMD Kabupaten Simalungun
Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi		pengembangan SDM yang siap kerja.
Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	Peningkatan Produktivitas Pangan dan Kesejahteraan Petani	Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan daerah
Menaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Responsif, Lincah dan Memahami Kebutuhan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang adaptif dan digital, serta penguatan kapasitas fiskal daerah
Mendirikan Badan Penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.		
Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa , Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Terhubung dan Ramah Lingkungan	Percepatan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung akses layanan kesehatan gratis, pemenuhan gizi masyarakat rentan.
	Meningkatkan Peran Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Untuk Menghasilkan Kemajuan Daerah	Meningkatkan peran desa untuk mendukung pembangunan daerah

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) menjadi salah satu prioritas utama dalam dokumen perencanaan nasional maupun daerah, sebagai upaya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, produktif, unggul, dan berdaya saing. Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), transformasi

human capital diwujudkan melalui program-program strategis seperti pemberian makanan bergizi dan sehat di sekolah serta pesantren, bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan penyakit menular seperti TBC, hingga pembangunan rumah sakit yang lengkap dan berkualitas di setiap kabupaten. Selaras dengan arah pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memprioritaskan peningkatan kualitas layanan, akses, dan jaminan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk, yang bertujuan untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH). Di tingkat Kabupaten Simalungun, pendekatan serupa dilakukan dengan mengintegrasikan aspek pemenuhan gizi masyarakat rentan ke dalam pembangunan infrastruktur dasar yang berorientasi pada inklusivitas dan keberlanjutan. Program ini juga diperkuat oleh kolaborasi aktif antara masyarakat dan pemerintahan desa, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan dasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Lebih lanjut, penguatan *human capital* juga dilakukan melalui sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Di tingkat nasional, strategi ini diwujudkan melalui penyediaan SDM unggul yang siap bekerja serta pembangunan sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. Provinsi Sumatera Utara mendukung hal ini dengan fokus pada pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan, pembiayaan dan askes pasar. Kabupaten Simalungun sendiri menekankan penguatan pendidikan, perlindungan sosial, dan pengembangan SDM yang unggul sebagai upaya mencetak generasi siap kerja yang berkualitas dan kompetitif.

Ketahanan pangan sebagai bagian dari penguatan kapasitas masyarakat juga menjadi perhatian di semua level. Pemerintah pusat menjalankan program cetak lahan pertanian dan penguatan lumbung pangan di tingkat desa, daerah, hingga nasional. Hal ini sejalan dengan strategi Provinsi Sumatera Utara yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani, serta diikuti oleh Kabupaten Simalungun yang mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan sejahtera juga menjadi bagian tak terpisahkan dari PHTC. Pemerintah pusat mendorong peningkatan kesejahteraan ASN, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI/POLRI, dan penyuluh, serta merancang pembentukan Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio penerimaan terhadap PDB. Di tingkat provinsi, arah kebijakan ini diterjemahkan melalui birokrasi yang responsif, lincah, serta memahami kebutuhan masyarakat. Kabupaten Simalungun juga mengadopsi pendekatan ini dengan penguatan

kualitas tata kelola berbasis digital, peningkatan kesejahteraan aparatur, dan optimalisasi kapasitas fiskal daerah.

Di sisi lain, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan menjadi fondasi PHTC yang tidak terpisahkan. Program-program nasional seperti pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT), serta penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk generasi milenial, Gen Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah, diperkuat dengan kebijakan daerah. Provinsi Sumatera Utara melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata, terhubung, dan ramah lingkungan, sedangkan Kabupaten Simalungun berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan akses layanan dasar secara inklusif.

Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui sinergi kebijakan, percepatan pelaksanaan, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Dukungan ini diwujudkan dengan penyesuaian program daerah, penyediaan data dan sumber daya, percepatan perizinan, pengalokasian anggaran, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha. Upaya tersebut diarahkan untuk menghasilkan capaian nyata yang cepat dirasakan masyarakat, sejalan dengan sasaran pembangunan daerah dan target PHTC Provinsi Sumatera Utara. Bentuk dukungan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Bentuk Dukungan Program Kabupaten Simalungun Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sumatera Utara

PHTC	TAHUN	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
							2026	2027	2028	2029	2030
1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) (Kepulauan Nias – 2026, + Pantai Barat - 2027, + Dataran Tinggi – 2028, + Pantai Timur – 2029) 33 Kabupaten/ Kota	**2025**	Menyusun Kajian Akademis/Konsultan Pendidikan Tentang Bersekolah Gratis • 33 Kabupaten/Kota	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Provsu, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - basis data penerima - mengelola operasional sekolah - mengawasi implementasi agar tepat sasaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	91.800.000.000	91.800.000.000	91.800.000.000	91.800.000.000	91.800.000.000
	2028	Pelaksanaan Kegiatan PUBG •Kepulauan Nias, Pantai Barat, dan dataran tinggi				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
	2029	Pelaksanaan Kegiatan PUBG •Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	40.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
	2030	Pelaksanaan Kegiatan PUBG •Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	550.000.000	550.000.000	860.000.000	550.000.000	550.000.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	peningkatan layanan umum prangkat daerah	3.085.000.000	3.126.000.000	3.150.000.000	3.186.000.000	3.217.000.000
2. Program Berobat Gratis (Probis)	2025	Melakukan Launching UHC Penyusunan regulasi MoU	Dukungan anggaran Kabupaten/Kota pada Tahun	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	65000000000	69100000000	74100000000	79100000000	84100000000

melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).		33 Kabupaten/Kota dimulai Oktober 2025 • 33 Kabupaten/Kota	2025 80% dan setiap tahun akan berkurang sebesar 2,5% Verifikasi dan Validasi Data Peserta : - Memastikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) akurat untuk sasaran PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah. - Melakukan pemutakhiran data PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah. secara berkala melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. - Menghapus data ganda atau peserta yang tidak memenuhi kriteria. - Menyinkronkan basis data peserta PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah. dengan provinsi dan BPJS Kesehatan	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						
	2026	- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000
	2027	- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	500000000	500000000	500000000	500000000	500000000
	2028	- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien									

		otomatis) • 33 Kabupaten/Kota									
	2029	- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota									
	2030	- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota									
3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	2025	Identifikasi lokasi sentra cabai; sosialisasi teknologi Solar Dry Dome (SDD) pelatihan awal pengolahan cabai kering Pembangunan SDD 10 unit •Deli serdang •Batubara •Karo	- Memperkuat sistem informasi harga dan produksi di tingkat petani - Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	120.306.450	132.337.095	145.570.805	291.141.610	320.255.771

		•Serdang Bedagai •Langkat dan •Simalungun									
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	527.926.157	580.718.773	638.790.650	702.669.715	772.936.687
				Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pembangunan solar dryer drome	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	175.000.000	180.000.000	185.000.000	190.000.000	195.000.000
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah kabuaten/Kota	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
4. Digitalisasi Pelayanan Publik "Cepat, Responsif, Handal, dan	2025	Pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, Audit kesiapan infrastruktur dan SDM, Penyusunan	Kesiapan Infrastruktur Internet di Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Akses Internet					

Solutif" (CERDAS)		roadmap & kebijakan pendukung • 33 Kabupaten/Kota									
	2026	Pengembangan dan pengujian platform digital layanan, Integrasi dengan data kependudukan & sistem informasi lainnya, dan Pelatihan SDMinternal • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet, Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Akses Internet	100.000.000				
	2027	Peluncuran resmi layanan digital tahap pertama, Integrasi lintas instansi, Peningkatan kapasitas jaringan & infrastruktur • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet di Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Akses Internet		110.000.000			
	2028	Peluncuran resmi layanan digital tahap pertama, Integrasi lintas instansi, Peningkatan kapasitas jaringan & infrastruktur • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet di Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Akses Internet			115.500.000		
	2029	Optimalisasi user experience, Penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan SOP, Pelaksanaan	Kesiapan Infrastruktur Internet, Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Penyediaan Akses Internet				130.000.000	

		audit mutu dan keamanan sistem • 33 Kabupaten/Kota			Kabupaten/ Kota						
	2030	Optimalisasi user experience, Penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan SOP, Pelaksanaan audit mutu dan keamanan sistem • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet, Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Akses Internet					140.000.000
5 a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	2025	Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan •Kawasan Pertumbuhan : Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Asahan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara Kab. Serdang	Kabupaten/kota yang menjadi lokasi proyek akan terlibat aktif dalam koordinasi lapangan, penyediaan data lokal, dan dukungan administratif. Dalam rangka penyiapan dukungan RC.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rekonstruksi Jalan	72.655.000.000				

		Bedagai, Kab. Toba, Kab. Dairi Kawasan Afirmasi : Kab. Nias Utara, Kab. Nias, Kab. Nias Barat, Kota Gunungsitoli Target pembangunan tahun ini mencakup 103,23 km jalan dan 245,5 meter jembatan									
						Penggantian Jembatan	2.500.000.000				
	2026	Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan • Kawasan Pertumbuhan : Kota Medan, Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Kab. Karo, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu,				Rekonstruksi Jalan	72.655.000.000				

		Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Langkat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan Kawasan Afirmasi : Kab. Nias Selatan, kab. Nias Barat, Kab. Nias Utara, target: jalan 187,95 km jembatan 231,10 m.									
						Penggantian Jembatan	2.500.000.000				
	2027	Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan • Kawasan Pertumbuhan : Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Toba, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli				Rekonstruksi Jalan		79.920.500.000				

		Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Mandailing Natal, Kab. Pakpak Bharat serta target: jalan 120,10 km & jembatan 666,65 m									
						Penggantian Jembatan		2.500.000.000			
b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	2026	Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi target 6.776 Ha. •Batubara, Padang Lawas Utara, P.Siantar, Simalungun	- Dukungan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier - sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi - Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan. - Digitalisasi sistem irigasi (smart irrigation) berbasis sensor dan aplikasi. - Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.000.000.000	4.500.000.000	5.401.550.000	4.767.665.000	3.800.000.000
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	6.250.000.000				

			- Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigas	166.950.356				
						Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	125.000.000				
	2029	Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi •Simalungun, Deli Serdang, Padang Lawas		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Akses yang Berkualitas	Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	4.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000	6.000.000.000
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa				7.000.000.000	
						Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigas				150.015.082	
						Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi				125.000.000	
c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan	2025	- Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/ Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan	Bupati/Walikota : 1. Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = by name by addres) 2. SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		150.000.000			
						Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang		400.000.000			

program 3 juta rumah		data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Simalungun, Kab. Batubara, Kab. Labuhan batu Utara, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias Utara, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Pematang Siantar dan Kota Padang Sidimpuan	Ha 3. SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada kabupaten /Kota Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di Kab/Kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan. Dinas PUPR Kabupaten/Kota : Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota : Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi			Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota					
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		1.925.000.000			
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		300.000.000			
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1.680.000.000			
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan		650.000.000			

			langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan.			Permukiman Kumuh Baru					
	2027	- Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/ Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Labuhanbatu, Kab. Simalungun, Kab. Dairi, Kab. Samosir, Nias dan Nias Selatan		PROGRAM PENINGKATAN PRASARABA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		2.500.000.000			
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		3.500.000.000			
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				150.000.000	
						Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota				400.000.000	
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				2.275.000.000	
	2029	- Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman				500.000.000	

		Nota Kesepahaman/ Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan, Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun, Kota Tebing Tinggi, Humbang Hasundutan dan Kab. Toba				Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1.750.000.000	
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				650.000.000	
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARABA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				3.500.000.000	
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				4.500.000.000	
6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui	2025	Penandatanganan Nota Kesepahaman, penetapan SK Tim,	1. Penyediaan fasilitator, pembiayaan dan penyusunan data pendukung,								

Restorative Justice (PRESTICE).		penyusunan panduan teknis pelaksanaan dan Sosialisasi program PRESTICE di 8 kab/kota	serta integrasi dengan program perlindungan sosial lainnya di daerah. 2. Pelaksanaan pelatihan mediator dilakukan sembari pemberian bantuan bantuan hukum 3. Replikasi Satgas Kabupaten/Kota 4. Pembanguan Posko Pengaduan								
	2026	Pelaksanaan awal PRESTICE di 15 kabupaten/kota, Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota dan pemutakhiran strategi tahun berikutnya, monev pelaksanaan kegiatan •15 Kabupaten/Kota (Padang Lawas Utara, Kab. Dairi, Kab. Simalungun, Kab. Asahan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir, Kab. Toba, Kab. Labuhan Batu, Kab. Tapanuli Utara, Kota Tanjung Balai, Kota Sibolga, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Tapanuli Tengah)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000
	2027	Ekspansi pelaksanaan ke 20 kabupaten/kota, Pelatihan mediator gelombang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	20.000.000		40.000.000	

		kedua, monev pelaksanaan kegiatan •20 Kab/Kota (Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kota Gunungsitoli, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Karo, Kab. Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kab. Batu Bara, Kota Pematang Siantar, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Dairi, Kab. Simalungun)									
	2029	33 Kabupaten Kota		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	20.000.000		40.000.000	
	2030	33 Kabupaten Kota		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	20.000.000		40.000.000	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	20.000.000		40.000.000	

				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.000.000	200.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	-	-	-	-	-

					Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	300.000.000	315.000.000	330.750.000	347.287.500	364.651.875
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000	18.888.888
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	-	-	-	-	-

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Simalungun juga berkomitmen mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) melalui penyelarasan kebijakan dan program daerah dengan arah kebijakan nasional, percepatan perizinan dan fasilitasi pelaksanaan proyek, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan. Dukungan ini juga mencakup penyediaan data dan informasi, pelibatan masyarakat dan sektor swasta, serta upaya mengatasi hambatan pelaksanaan agar PSN di wilayah Kabupaten Simalungun dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemajuan pembangunan daerah. Bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap Program Strategis Nasional (PSN) dapat dilihat pada tabel berikut :

Dukungan Pemerintah Kabupaten Simalungun Terhadap Program Strategis Nasional

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Perumahan dan Pemukiman	**Kec. Panei, Kec. Gunung Maligas, Kec. Tanah Jawa, Kec. Raya, Kec. Bandar, Kec. Tapian Dolok, Kec. Panombean Panei, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kec. Siantar, Kec. Gunung Malela**	2025-2026	**TARGETING / PENERIMA MANFAAT**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator)	Dinas PKP (OPD yang mengampu Perumahan)	APBN, BUMN, SWASTA
	- Pembangunan 3 Juta Rumah			- Utilisasi data makro (Susenas) dan data mikro (Regsosek) untuk mengembangkan housing queue atau antrian perumahan			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten /Kota		400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000			
				PROGRAMMING		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		1.750.000.000	1.925.000.000	2.100.000.000	2.275.000.000	2.450.000.000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
				- Memastikan keterpaduan program perumahan dengan penyediaan infrastruktur dasar permukiman yaitu air minum, air limbah, persampahan, jalan dan drainase lingkungan, listrik, dan sistem	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000			

				transportasi publik											
				- Pemanfaatan lahan yang belum dioptimalisasi	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1.575.000.000	1.680.000.000	1.715.000.000	1.750.000.000	1.820.000.000			
				STANDAR KEANDALAN BANGUNAN			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000			
				- Mempersiapkan regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penerbitan PBG dan SLF	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARABA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		2.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000			
				KESESUAIAN DENGAN TATA RUANG			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		3.000.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000			

				- Memanfaatkan tools tata ruang untuk pengembangan perumahan ke depan dan pengendalian pembangunan											
2	Makan Bergizi Gratis (MBG)												Badan Gizi Nasional (Koordinator)	Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dins Pendidikan, Dinas Kesehatan	APBN, SWASTA
	- Program Makan Bergizi	1. Batu 7 2. Raya Bayu 3. Tanah Jawa		**Kesehatan**	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.	9.266.436.801	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000			
				- Pengukuran antropometri (tinggi badan, lingkar lengan atas)												
				- Sertifikasi hygiene dan sanitasi satuan pelayanan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene	120.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000			

						Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								
				- Inspeksi Kesehatan lingkungan di tingkat satuan pelayanan							-				
				- Pemeriksaan kualitas sumbe air bersih	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.495.399.985	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000			
				Pendidikan											
				- Penyediaan Infrastruktur sanitasi, air bersih, fasilitas transit, penyaluran makanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi	-	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000			
				- Penyelarasan waktu pemberian makanan pada siswa dan santri											
				- Renovasi dapur (satuan pendidikan yang menjadi SP)											

				- Pelatihan tenaga pendidik untuk penyelenggaraan MBG											
				- Pelibatan orang siswa dalam perilaku hidup sehat dan pemberian makan bergizi											
				- Penguatan peran kantin sehat											
				Pangan dan Pertanian											
				- Penjaminan ketersediaan stok dan keragaman bahan pangan local yang memenuhi standar mutu giz	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok Pangan dan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten /Kota		30.000.000	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota		120.000.000	144.000.000	162.000.000	180.000.000	192.000.000			
				- Penjaminan keamanan bahan pangan segar			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota		120.000.000	144.000.000	162.000.000	180.000.000	192.000.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	

				- Pengawasan keamanan makanan(uji keamanan pangan)											
				Infrastruktur Dasar											
				-Konektivitas											
				- Telekomunikas											
				- Listrik dan bahan bakar											
				- Pengelolaan limbah											
				Satuan Pelayanan											
				- Penyediaan/pembangunan SP											
				- Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih untuk SP	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	174.500.000	174.500.000	220.000.000	250.000.000	270.000.000	290.000.000			
				Pemberdayaan Masyarakat, Petani, dan Peternak Lokal	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	375.000.000	375.000.000			

							dan Pelatihan									
				- Pemberdayaan dan korporatisasi petani, peternak, dan nelayan		Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	100.000.000	110.000.000	115.000.000	120.000.000	125.000.000	130.000.000			
							Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	2.000.000.000	2.100.000.000	2.200.000.000	2.300.000.000	2.400.000.000	2.500.000.000			
							Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	500.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000	750.000.000			
							Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	500.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000			
					PROGRAM PROGRAM	Penyediaan dan	Peningkatan	400.000.000	410.000.000	420.000.000	430.000.000	440.000.000	450.000.000			

					PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota									
							Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	535.500.000	630.000.000	690.000.000	760.000.000	830.000.000	910.000.000			
				- Pembinaan dan peningkatan kapasitas BUMDES, UMKM, dan koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		150.000.000	450.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
							Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		268.222.071	400.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000			
				terkait pembiayaan, kemampuan												

				manajemen, pengolahan logistik bahan pangan, pengadaan barang/jasa												
				sebagai penyedia komoditas dan pengelola program												
				Ketersediaan Data												
				'- Sumber data penerima MBG (sekolah, madrasah, pesantren, Posyandu)												
				Sosialisasi Pagan Aman	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tigkat daerah kabupaten/ kota	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	15.693.800	14.610.200	16.071.220	17.678.342	19.446.176	21.390.794		Disperindag	APBD
3	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan															
	- Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	SD : 1. SD Negeri 091496 Pematang Tanah Jawa 2. SD Negeri 091621 Perdagangan Kec. Bandar	**2026-2029**	Update data kondisi satuan pendidikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	peningkatan layanan umum prangkat daerah	Rp -	Rp 3.085.000.000,00	Rp 3.126.000.000,00	Rp 3.150.000.000,00	Rp 3.186.000.000,00	Rp 3.217.000.000,00	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Koordinator)	Dinas Pendidikan	APBN, APBD
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Rp 2.600.000.000,00	Rp 3.600.000.000,00	Rp 2.600.000.000,00	Rp 3.600.000.000,00	Rp 2.600.000.000,00			

							Pembangunan Ruang Kelas Baru		Rp 4.000.000.000,00	Rp 4.000.000.000,00	Rp 4.000.000.000,00	Rp 4.000.000.000,00	Rp 4.000.000.000,00			
	- Pembangunan dan Penyelenggaraan sekolah Unggul	SD : 1. SD Negeri 091496 Pematang Tanah Jawa 2. SD Negeri 091621 Perdagangan Kec. Bandar SMP : 1. SMP Negeri 1 Gunung Malela 2. SMP Negeri 1 Dolok Batunanggar	**2026-2027**	Dukungan penyediaan lahan bagi sekolah unggul (pada daerah yang sesuai dengan kriteria lokasi prioritas)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi	Rp -	Rp 44.000.000,00	Rp 44.000.000,00	Rp 44.000.000,00	Rp 44.000.000,00	Rp 44.000.000,00	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Dinas Pendidikan	APBN, APBD
	- Pembangunan Rumah sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten / Kota	RSUD Parapat	**2026**	**Pembangunan RS Lengkap Berkualitas dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses**	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp 240.625.900,00	Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBN, APBN (DAK)
				- Menyiapkan ketersediaan infrastruktur dan SDM Kesehatan		Terselenggaranya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 67.723.962.319,36	Rp 100.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00			
				- Menyiapkan anggaran untuk operasional layanan kesehatan	Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Pembangunan Puskesmas	Rp 13.816.409.000,00	Rp 5.200.000.000,00	Rp 5.200.000.000,00	Rp 5.200.000.000,00	Rp 5.200.000.000,00	Rp 5.200.000.000,00			

				Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis			Pengembangan Puskesmas	Rp 4.979.512.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00			
				- Menyusun dan menetapkan kebijakan untuk mendorong pelaksanaan dan tata kelola Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada wilayah kerja			Relahabiltasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp -	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00			
				- Membina fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas dan Labkesmas) untuk pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di wilayahnya, termasuk	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehetan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktek Tenaga	Rp46.118.600,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00			
				Penyediaan BMHP	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								RSUD Parapat	
				Penyediaan SPApendukung												
				Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan					Rp 1.800.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.250.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00	Rp 2.550.000.000,00			
				- Mengoordinasikan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada wilayah kerja												
				- Menyusun rekomendasi tindak lanjut terhadap temuan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis												

				pada wilayah kerja											
	- Program Penuntasan TBC	Kecamatan Siantar; Kecamatan Bandar; Kecamatan Tanah Jawa; Kecamatan Tapian Dolok; Kecamatan Hutabayu Raja (Sumber: Simalungun dalam Angka)	**2026**	**Penuntasan Kasus TBC**	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	960.226.401	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBN (Rupiah Murni), APBN (PHLN) APBN (DAK), lainnya
				- Memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan terlaporkan dalam sistem informasi TBC;			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.249.400.905	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000		Dinas Kesehatan	
				- Memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan					15.000.000	17.000.000	17.000.000	20.000.000	20.000.000		RSUD TUAN RONDAHAIM	
				- Menyusun dan menetapkankebijakan kepala daerah untuk mendorong pasien TBC menjalankan pengobatan sampai selesai			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	49.739.600	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		Dinas Kesehatan	
				- Mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan TBC di daerah;					25.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000		RSUD PARAPAT	
				- Menyediakan pendanaan penanggulangan TBC dari beberapa sumber					30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000		RSUD PERDAGANGAN	
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis		670.000.000	720.000.000	820.000.000	920.000.000	1.020.000.000		Dinas Kesehatan	

						sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten /Kota								
									80.000.000	406.118.199	426.407.512	447.714.610	470.090.383	RSUD PERDAGANGAN	APBN, APBD, Swasta
								50.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	100.000.000	RSUD TUAN RONDAHAIM	
								-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	RSUD PARAPAT	
4	Swasembada Pangan	Kec. Tanah Jawa, Kec. Hutabayu Raja, Kec. Pematang Bandar, Kec. Panei, Kec. Dolok Panribuan, Kec. Purba, Kec. Raya, Kec. Pematang Silimakuta, Kec. Dolok Silou, Kec. Silimakuta, Kec. Sidamanik, Kec. Pamatang Sidamanik,Kec. Bandar Huluan, Kec. Ujung Padang, Kec. Bandar, Kec. Tapian Dolok, Kec. Dolok Batu Nanggar,	2025-2030		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa		6250000000	6425000000	6700000000	7000000000	7375000000			
	- Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat						Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigas		166950356	162313009	181274600	150015082	194773401	Kementerian Kehutanan (Koordinator)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	APBN, APBD, Swasta
	- Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional						Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi		125000000	125000000	125000000	125000000	125000000			

		Kec. Bosar Maligas													
				- Memastikan status lahan (kepemilikan lahan) yang akan diintervensi									Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR	APBN, KPBU
				- Memastikan ketersediaan petani dan pemberdayaan penyuluh pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	- Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		12.000.000 32.000.000	17.000.000 32.000.000	22.000.000 32.000.000	27.000.000 32.000.000	32.000.000 32.000.000			
							- Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten /Kota									
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		400.000.000 4.000.000.000	400.000.000 4.500.000.000	400.000.000 5.401.550.000	400.000.000 4.767.665.000	400.000.000 3.800.000.000			
		Kec. Tanah Jawa, Kec. Hutabayu Raja, Kec. Pematang Bandar, Kec. Panei, Kec. Dolok Panribuan, Kec. Purba, Kec. Raya, Kec. Pematang Silimakuta, Kec. Dolok Silou, Kec. Silimakuta, Kec. Sidamanik, Kec. Pamatang	2025-2030	- Memberikan dukungan atas pembangunan/rehabilitasi daerah irigasi di kewenangan provinsi/kab/kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa		6250000000	6425000000	6700000000	7000000000	7375000000			
							Operasi dan Pemelihara		166950356	162313009	181274600	150015082	194773401			

		Sidamanik,Kec. Bandar Huluan, Kec. Ujung Padang, Kec. Bandar, Kec. Tapian Dolok, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kec. Bosar Maligas					an Bendung Irigas									
							Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi		125000000	125000000	125000000	125000000	125000000			
							- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani									
				- Komitmen keberlanjutan pengelolaan													
	- Peningkatan Produksi Daging, Sapi, dan Susu Sapi													Kementerian Pertanian, Swasta	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Swasta, BUMN, APBN, APBD, Lainnya, KPBU
5	Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital															
	- Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	SE-KABUPATEN SIMALUNGUN	2025-2030		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah,		200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Koordinator)	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBN, APBD

							serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE									
							Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan		150.000.000	157.500.000	163.375.000	173.643.750	182.325.938			
							Penyediaan Akses Internet		100.000.000	110.000.000	115.500.000	130.000.000	140.000.000			
	- Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5000) Seluruh Wilayah Indonesia													Badan Informasi Geospasial	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBN (PHLN), APBN
	- Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi													Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia		BUMN, APBN
6	Pengembangan KEK Sei Mangkei															
	- BUPP Kek Sei Mangkei, Hilirisasi, Industrialisasi, Transformasi Digital				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		10.000.000.000						Dinas Pekerjaan Umum	

7	Bioethanol (Berbasis Tebu)													Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Swasembada Energi		
8	Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa dan Rumput Laut															
	- Hilirisasi, Industrialisasi, Transformasi Digital															

Selain PHTC, Pemerintah Kabupaten Simalungun memiliki beberapa program unggulan. Program unggulan adalah serangkaian kegiatan strategis yang dirancang, diprioritaskan, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya percepatan pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, dengan memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program unggulan Kabupaten Simalungun terdiri dari 11 program unggulan yang meliputi :

1) Mensukseskan program pemerintah makan siang gratis
2) Mempersiapkan pembangunan universitas yang bersubsidi
3) Jaminan modal sementara bagi petani dan usaha mikro dan kecil
4) Digitalisasi Layanan Publik
5) Beasiswa bagi pelajar untuk semua tingkatan
6) Subsidi kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan
7) Menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat
8) Mempersiapkan layanan internet gratis di setiap desa
9) Menyediakan subsidi bagi penyeleggara kegiatan budaya dan pariwisata
10) Menyediakan stimulus bagi penggiat rumah ibadah seperti guru ngaji dan guru sekolah minggu
11) Perbaikan infrastruktur publik seperti jalan dan sarana air minum masyarakat.

masukin sini

Enam program PHTC dan program unggulan tersebut kemudian diterjemahkan secara lebih rinci dan sistematis ke dalam Prioritas Kabupaten Simalungun untuk periode 2025–2029. Seluruh program ini merupakan penguatan atas *quick wins* dan yang dirancang secara sektoral dan lintas urusan pemerintahan, sambil tetap menjaga konsistensi dengan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Prioritas Kabupaten Simalungun terdiri dari 9 prioritas, yaitu :

1) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan di Seluruh Jenjang
2) Fasilitasi Akses Pembiayaan Modal Usaha bagi Petani, UMKM, dan Pelaku Ekonomi Lokal
3) Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi

4) Pemberdayaan Masyarakat melalui Subsidi Lembaga dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Kebutuhan Daerah
5) Penyediaan Akses Internet Gratis di Kawasan Perdesaan untuk Mendukung Konektivitas Digital
6) Dukungan Subsidi Kegiatan Pelestarian Budaya, Kearifan Lokal, dan Pengembangan Pariwisata Desa
7) Pemberian Insentif bagi Penggerak Kegiatan Keagamaan di Lingkugan Sosial Masyarakat
8) Peningkatan Infrastruktur Dasar dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Sarana Air Minum, dan Fasilitas Umum Masyarakat
9) Penyediaan Layanan Kesehatan Masyarakat yang Terpadu, Merata, dan Mudah Diakses di Seluruh Wilayah

Dalam proses penyusunan prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Simalungun tidak hanya berpedoman pada kondisi, isu strategis, dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal, tetapi juga memperhatikan keselarasan dengan perencanaan pembangunan yang ditetapkan pada tingkat provinsi dan nasional. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan prioritas yang akan dilakukan dapat mendukung prioritas pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional. Adapun hasil penyandingan antara prioritas Kabupaten Simalungun dengan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas Nasional dapat dilihat pada **Tabel III.10.**

Tabel III.10 Penyelarasan Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun

Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	Prioritas Provinsi Sumatera Utara RPJMD 2025-2029	Prioritas Kabupaten Simalungun RPJMD 2025-2029
PP-8. Penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi	PP-1 Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill Sesuai Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah Lokal	PP-1 Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan di Seluruh Jenjang
PP-2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara	PP-4 Penguatan Stabilitas Makroekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	PP-2 Fasilitasi Akses Pembiayaan Modal Usaha bagi Petani, UMKM, dan Pelaku Ekonomi Lokal
PP-1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	PP-6 Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Lebih Produktif	
PP-3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	PP-10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	PP-3 Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi
PP-4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	PP-11 Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada	

Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	Prioritas Provinsi Sumatera Utara RPJMD 2025-2029	Prioritas Kabupaten Simalungun RPJMD 2025-2029
PP-8. Penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi	Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	
PP-10. Penguatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas	PP-2 Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi	PP-4 Pemberdayaan Masyarakat melalui Subsidi Lembaga dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Kebutuhan Daerah
PP-5. Pemberantasan kemiskinan	PP-9 Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan	
PP-8. Penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi	PP-15 Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	PP-5 Penyediaan Akses Internet Gratis di Kawasan Perdesaan untuk Mendukung Konektivitas Digital
PP-17. Pelestarian budaya, pengembangan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	PP-7 Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat	PP-6 Dukungan Subsidi Kegiatan Pelestarian Budaya, Kearifan Lokal, dan Pengembangan Pariwisata Desa
PP-16. Kerukunan antarumat beragama dan kebebasan beribadah	PP-16 Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	PP-7 Pemberian Insentif bagi Penggerak Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sosial Masyarakat
PP-13. Pembangunan hunian berkualitas dan terjangkau	PP-12 Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	PP-8 Peningkatan Infrastruktur Dasar dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Sarana Air Minum, dan Fasilitas Umum Masyarakat
PP-7. Pelayanan kesehatan universal	PP-3 Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	PP-9 Penyediaan Layanan Kesehatan Masyarakat yang Terpadu, Merata, dan Mudah Diakses di Seluruh Wilayah

Penyelarasan prioritas kabupaten dengan tingkat provinsi dan nasional perlu dilakukan agar prioritas yang dirancang oleh pemerintah kabupaten dapat berjalan searah, saling mendukung, dan berkontribusi optimal terhadap pencapaian target pembangunan provinsi dan nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai prioritas-prioritas Kabupaten Simalungun.

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan di Seluruh Jenjang

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing. Dalam konteks pembangunan daerah, kualitas dan akses layanan pendidikan yang merata menjadi faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan adaptif terhadap perkembangan global. Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan program peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan di seluruh jenjang sebagai salah satu prioritas strategis. Program ini meliputi upaya pemenuhan gizi peserta didik, penyediaan beasiswa pendidikan, fasilitasi proses belajar-mengajar yang kondusif, serta dukungan layanan pendidikan tinggi bagi mahasiswa daerah. Program ini selaras dengan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu "Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill Sesuai Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah Lokal" dan selaras dengan prioritas nasional dalam "Penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi". Melalui program ini, diharapkan tercipta pemerataan layanan pendidikan berkualitas mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sekaligus memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan industri dan teknologi.

2. Fasilitasi Akses Pembiayaan Modal Usaha bagi Petani, UMKM, dan Pelaku Ekonomi Lokal

Penguatan ekonomi lokal menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketahanan ekonomi daerah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pelaku ekonomi lokal, khususnya petani dan pelaku UMKM di Kabupaten Simalungun, ialah terbatasnya akses terhadap permodalan yang terjangkau dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan program fasilitasi akses pembiayaan modal usaha sebagai prioritas unggulan sebagai bentuk dukungan untuk mengatasi hal tersebut. Program ini bertujuan menyediakan skema pembiayaan yang adaptif bagi petani, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan, koperasi, dan mitra swasta. Program ini mendukung prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada "Penguatan Stabilitas Makroekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah" dan prioritas "Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Lebih Produktif". Lalu program ini juga mendukung prioritas nasional pada "Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara" dan "Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air". Dengan hadirnya program ini, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas usaha, penguatan ketahanan pangan daerah, dan terciptanya lapangan kerja baru di Kabupaten Simalungun.

3. Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor kehidupan bertransformasi ke arah digital, termasuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Simalungun merespon perkembangan ini dengan menetapkan program transformasi digital sebagai prioritas. Prioritas ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik melalui penerapan sistem informasi digital di berbagai sektor pemerintahan. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk memperluas akses layanan digital kepada masyarakat di berbagai wilayah. Implementasi program ini akan memperkuat kinerja pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. Program ini menjadi pendukung langsung prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam ” Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan” dan “Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat” serta sejalan dengan prioritas nasional yaitu ”Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi” dan ”Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi”.

4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Subsidi Lembaga dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Kebutuhan Daerah

Pemerintah Kabupaten Simalungun menempatkan subsidi kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu prioritas strategis dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan keterampilan yang terjangkau, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun akan memberikan dukungan finansial langsung kepada lembaga atau institusi penyelenggara pendidikan dan pelatihan nonformal, seperti kursus keterampilan, balai latihan kerja, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), serta lembaga pelatihan berbasis komunitas. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban biaya operasional penyelenggara, sehingga mereka dapat menyelenggarakan program pelatihan dengan biaya yang lebih terjangkau bagi masyarakat, tanpa mengurangi kualitas fasilitas, tenaga pengajar, maupun materi pelatihan yang diberikan. Prioritas ini mendukung prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam ”Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi” dan ”Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan”. Selain itu, prioritas ini juga sejalan dengan prioritas nasional yaitu prioritas ”Penguatan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan, Anak, Dan Penyandang Disabilitas” dan prioritas ”Pemberantasan Kemiskinan”. Dengan adanya subsidi ini, diharapkan penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kapasitas sarana prasarana, memperluas jenis pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat, dan

menyediakan layanan pelatihan yang murah, berkualitas, serta mudah diakses. Outcome dari prioritas ini bukan hanya terciptanya biaya pelatihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat Simalungun, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan daya saing SDM lokal.

5. Penyediaan Akses Internet Gratis di Kawasan Perdesaan untuk Mendukung Konektivitas Digital

Internet merupakan sarana penting dalam mendorong kemajuan daerah di era digital saat ini. Pemerintah Kabupaten Simalungun menempatkan program penyediaan layanan internet gratis di kawasan perdesaan sebagai prioritas strategis untuk memperluas pemerataan akses informasi dan layanan publik. Program ini bertujuan menyediakan akses internet gratis di seluruh desa, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah desa, pelajar, pelaku UMKM, dan komunitas lokal. Kehadiran layanan ini diharapkan memperkuat literasi digital, membuka peluang usaha berbasis daring, serta meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pemerintahan desa. Program ini menjadi pendukung utama prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam ”Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa”, sekaligus sejalan dengan prioritas nasional dalam prioritas ”Penguatan Pendidikan, Sains, Teknologi, Dan Digitalisasi”. Outcome dari prioritas ini diharapkan berupa meningkatnya literasi digital masyarakat desa, terbukanya akses usaha dan informasi berbasis daring, serta tumbuhnya ekosistem layanan publik dan ekonomi digital di kawasan pedesaan Kabupaten Simalungun.

6. Dukungan Subsidi Kegiatan Pelestarian Budaya, Kearifan Lokal, dan Pengembangan Pariwisata Desa

Kabupaten Simalungun dikenal sebagai kawasan yang kaya akan warisan budaya dan potensi wisata alam. Budaya di Kabupaten Simalungun meliputi tradisi kesenian seperti Pesta Rondang-Bintang, musik khas Hasapi, Taganing, dan Sarune, serta ritual adat yang diwariskan lintas generasi dan kerap ditampilkan dalam berbagai festival daerah. Namun demikian, di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, eksistensi tradisi budaya dan seni tersebut menghadapi tantangan berupa penurunan partisipasi masyarakat dan keterbatasan dukungan penyelenggaraan kegiatan. Dari sisi pariwisata, Simalungun memiliki potensi wisata alam unggulan seperti kawasan Danau Toba, Desa Haranggaol, serta destinasi agrowisata dataran tinggi yang menyimpan kekuatan atraksi alam dan budaya. Festival budaya, atraksi wisata berbasis masyarakat, hingga produk ekonomi kreatif lokal seperti kopi Arabika, ulos, dan kerajinan bambu menjadi bagian penting dari kekayaan budaya daerah yang perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan. Melihat kekayaan budaya serta potensi wisata alam tersebut, diperlukan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga keberlanjutan aktivitas

budaya serta mendorong optimalisasi pengelolaan potensi pariwisata berbasis masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan program dukungan subsidi untuk kegiatan pelestarian budaya, kearifan lokal, dan pengembangan pariwisata desa. Program ini bertujuan memperkuat peran komunitas budaya, sanggar seni, dan kelompok masyarakat dalam menjaga warisan budaya daerah, sekaligus mendorong tumbuhnya destinasi wisata berbasis desa. Subsidi diberikan kepada pelaku budaya, penyelenggara festival, serta pelaku wisata lokal untuk meningkatkan kualitas kegiatan dan daya saing pariwisata desa. Program ini mendukung prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam ”Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan” serta sejalan dengan prioritas nasional yaitu ”Pelestarian Budaya, Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga”.

7. Pemberian Insentif bagi Penggerak Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sosial Masyarakat

Kehidupan sosial masyarakat yang harmonis tidak terlepas dari peran aktif penggerak kegiatan keagamaan di lingkungan sosial. Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan program pemberian insentif bagi penggerak kegiatan keagamaan sebagai bentuk apresiasi sekaligus penguatan ketahanan sosial masyarakat. Program ini menyasar guru ngaji, guru sekolah minggu, dan tokoh agama lainnya yang aktif membina masyarakat di lingkungannya. Diharapkan insentif ini dapat memotivasi pelaku keagamaan untuk terus berperan dalam menciptakan suasana yang harmonis, toleran, dan rukun di tengah masyarakat. Program ini menjadi pendukung bagi prioritas Provinsi Sumatera Utara dalam ”Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun” dan sejalan dengan prioritas nasional ”Kerukunan Antarumat Beragama dan Kebebasan Beribadah”.

8. Peningkatan Infrastruktur Dasar dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Sarana Air Minum, dan Fasilitas Umum Masyarakat

Infrastruktur dasar menjadi komponen vital dalam mendukung mobilitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan program peningkatan infrastruktur dasar sebagai salah satu prioritas unggulan, dengan fokus pada pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, sarana air minum, dan fasilitas umum masyarakat. Program ini dirancang untuk memperbaiki konektivitas antarwilayah, mempermudah akses layanan publik, serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat. Kehadiran infrastruktur yang baik diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan secara lebih efektif. Program ini sejalan dengan prioritas Provinsi Sumatera Utara dalam ”Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak

pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal" dan sejalan dengan prioritas nasional dalam mendukung prioritas "Pembangunan Hunian Berkualitas dan Terjangkau".

9. Penyediaan Layanan Kesehatan Masyarakat yang Terpadu, Merata, dan Mudah Diakses di Seluruh Wilayah

Pelayanan kesehatan masyarakat yang merata, terpadu, dan mudah diakses merupakan kebutuhan dasar dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui program ini berkomitmen memperkuat layanan kesehatan dasar, memperluas jangkauan layanan kesehatan terpadu, serta meningkatkan kapasitas sarana dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah. Program ini meliputi penyediaan layanan kesehatan gratis, pemenuhan gizi masyarakat rentan, serta peningkatan fasilitas puskesmas dan posyandu. Kehadiran layanan ini diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menekan angka kematian ibu dan anak, serta mencegah penyakit menular. Program ini mendukung prioritas Provinsi Sumatera Utara yaitu dalam "Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu" dan sejalan dengan prioritas nasional dalam mendukung prioritas "Pelayanan Kesehatan Universal".

III.2.4. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah.

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah adalah proses penataan kembali susunan dan fungsi organisasi di lingkungan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah. Perubahan ini dapat meliputi pembentukan, penggabungan, atau pemisahan perangkat daerah, serta penyesuaian tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan SOTK Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun adalah :

1. Dasar Hukum

   Perubahan SOTK harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan turunannya yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
2. Analisis dan Kajian

   Perubahan SOTK membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam terkait beban kerja, fungsi, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
3. Kesesuaian dengan Visi dan Misi Kepala Daerah

Perubahan SOTK harus sesuai dan selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta rencana pembangunan daerah.

4. Partisipasi

   Proses perubahan SOTK juga perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat.

5. Evaluasi

   Setelah perubahan SOTK diterapkan, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas dan efisiensi dari perubahan yang telah dilakukan. Contoh Perubahan SOTK sebagai berikut :

   a. Penggabungan Dinas

      Beberapa dinas dengan tugas dan fungsi yang saling berkaitan dapat digabungkan menjadi satu dinas yang lebih besar.

   b. Pemisahan Badan dan Dinas

      Dinas yang memiliki beban kerja terlalu besar dapat dipisahkan menjadi beberapa dinas yang lebih fokus pada urusan tertentu.

   c. Pembentukan Badan dan Dinas

      Badan baru dapat dibentuk untuk menangani urusan pemerintahan yang memerlukan keahlian khusus, seperti penelitian dan pengembangan.

   d. Penyesuaian Tugas dan Fungsi

      Tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

Perubahan SOTK Perangkat Daerah merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Tujuannya adalah untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mempertimbangkan hal ini maka dipandang perlu untuk memisahkan beberapa badan dan dinas oleh karena memiliki beban kerja terlalu besar dan diharapkan nantinya pemisahan badan dan dinas tersebut dapat lebih fokus pada urusan tertentu seperti :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat menjadi 2 Dinas Perangkat Daerah, yaitu : Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang mempunyai tugas dan fungsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat menjadi 2 Badan Perangkat Daerah, yaitu : Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan dan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

RPJMD SIMALUNGUN 2025-2029

Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 pada Bab IV RPJMD akan memuat daftar program perangkat daerah Tahun 2025–2029 yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan, lengkap dengan indikator kinerja, target, serta perangkat daerah penanggung jawab. Bab ini tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai penghubung strategis dan operasional antara sasaran prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Bab III dengan rencana evaluasi kinerja yang akan dibahas pada Bab V. Dengan demikian, Bab IV memastikan adanya keterkaitan logis antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah. Penyusunan program perangkat daerah dalam Bab IV diarahkan agar setiap program benar-benar selaras dengan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun, serta dapat diukur efektivitas dan dampaknya melalui mekanisme evaluasi yang akuntabel.

IV.1. Program Perangkat Daerah

Dalam rangka mengimplementasikan program prioritas daerah secara sistematis dan terukur, diperlukan perumusan program perangkat daerah yang berfungsi sebagai penjabaran operasional atas arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Setiap program dirancang untuk mendukung pencapaian *outcome* pada masing-masing urusan pemerintahan, dengan berorientasi pada hasil yang terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pelaksanaan program menjadi tanggung jawab perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan urusan pemerintahan yang diemban, baik dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, maupun urusan pilihan. Penyelarasan antara program dengan indikator kinerja dan target *outcome* menjadi faktor krusial dalam menjamin efektivitas pelaksanaan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta konsistensi terhadap arah pembangunan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap program yang disusun harus secara langsung terkait dan selaras dengan sasaran dan arah kebijakan, sehingga memastikan adanya kesinambungan logis antara perencanaan strategis dan operasional. Program perangkat daerah berperan sebagai instrumen pelaksanaan untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran, dengan indikator kinerja program dan outcome yang ditetapkan harus secara eksplisit mendukung pencapaian kinerja daerah.

Tabel IV.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar														
1.01	**Pendidikan**														DINAS PENDIDIKAN
1.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS PENDIDIKAN
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	79	100	794.664.293.502	100	640.763.484.947	100	677.170.242.537	100	717.503.621.338	100	759.859.952.410	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**														DINAS PENDIDIKAN
	Meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal	Meningkatnya : APM SD	%	%	100	202.305.000.000	100	212.982.891.235	100	223.623.331.936	100	234.797.535.443	100	246.532.189.899	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMP	%	100	100		100		100		100		100		DINAS PENDIDIKAN
		APK PAUD,	%	100	100		100		100		100		100		DINAS PENDIDIKAN
		Kualitas PNF	%	100	100		100		100		100		100		DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	**Program Pengembangan Kurikulum**														DINAS PENDIDIKAN
	Ditetapkannya kurikulum muatan lokal yang relevan dengan potensi daerah	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	-	-	100	1.646.651.894	100	1.728.917.196	100	1.815.309.222	100	1.906.034.307	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**														DINAS PENDIDIKAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meratanya distribusi dan peningkatan kapasitas pendidik serta tenaga kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 persentase guru (honorer negeri dan swasta) yang memenuhi kompetensi	%	94 (Target 2025 RKPD)	-	-	45	30.704.169.572	52	33.237.305.949	60	35.897.513.566	68	38.691.145.984	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05	**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**														DINAS PENDIDIKAN
	Terawasinya perizinan lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat	Persentase sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	%	93,18 (Target 2025 RKPD)	-	-	8	1.097.633.133	10	1.152.469.933	12	1.210.057.545	15	1.270.533.508	DINAS PENDIDIKAN
1.01.06	**Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**														DINAS PENDIDIKAN
	Berkembangnya bahasa serta sastra daerah sebagai warisan budaya	Persentase sekolah yang mengembangkan bahasa dan sastra	%	100 (2021)	-	100.000.000	80	1.102.651.913	100	1.157.739.447	125	1.215.590.371	150	1.276.342.852	DINAS PENDIDIKAN
1.02	**Kesehatan**														
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS KESEHATAN
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	42,36	100	169.130.000.000	100	145.503.356.865	100	150.523.600.160	100	155.845.840.530	100	160.485.177.827	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**														DINAS KESEHATAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Tersedianya layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penguatan fasilitas UKP dan UKM	Cakupan pemenuhan SPM bidang kesehatan	%	31,67	72,00	152.810.626.716	42,00	108.644.037.544	50,00	115.070.982.192	58,00	121.820.325.518	65,00	128.908.187.457	DINAS KESEHATAN
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**														DINAS KESEHATAN
	Menguatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%	77,54	50,00	1.050.000.000	83,00	2.053.286.867	86,00	2.205.826.433	89,00	2.366.017.933	92,00	2.534.243.964	DINAS KESEHATAN
1.02.04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**														DINAS KESEHATAN
	Terjaminnya ketersediaan dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan.	%	60	100	600.000.000	67	578.973.872	72	592.911.165	77	607.547.602	82	622.918.142	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**														DINAS KESEHATAN
	Optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Persentase desa yang selaksanakan pos pembinaan terpadu	%	62.13 (2023)	100	550.000.000	70	832.311.002	74	873.892.538	78	917.559.954	82	963.417.543	DINAS KESEHATAN
		Persentase posyandu aktif	%		66		70		74		78		82		DINAS KESEHATAN
	RSUD Parapat														
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														RSUD Parapat

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	88,82	-	18.960.355.000	100	30.690.128.455	100	31.873.666.746	100	32.116.575.577	100	33.421.823.477	RSUD Parapat
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**														RSUD Parapat
	Tersedianya layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penguatan fasilitas UKP dan UKM	Cakupan pelayanan kesehatan yang tertangani	%	100	-	10.960.802	100	31.090.604.329	100	32.643.863.981	100	34.275.040.730	100	35.988.030.428	RSUD Parapat
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**														RSUD Parapat
	Menguatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%		-	100.000.000	60,00	586.615.176	70,00	615.921.962	80,00	646.698.882	90,00	679.019.442	RSUD Parapat
	RSUD Perdagangan														RSUD Perdagangan
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														RSUD Perdagangan
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	70	100	29.467.155.641	100	28.004.625.300	100	29.253.834.714	100	30.565.708.969	100	31.943.381.307	RSUD Perdagangan
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**														RSUD Perdagangan

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Tersedianya layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penguatan fasilitas UKP dan UKM	Cakupan pemenuhan SPM bidang kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (indikator dari Inmen)	%		100	6.791.106.838	100	5.331.280.362	100	5.597.626.509	100	5.877.333.538	100	6.171.069.493	RSUD Perdagangan
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**														RSUD Perdagangan
	Menguatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%	37	50,00	50.000.000	60,00	406.118.199	70,00	426.407.512	80,00	447.714.610	90,00	470.090.383	RSUD Perdagangan
	RSUD Rondahaim														RSUD Rondahaim
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														RSUD Rondahaim
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	100	100	22.048.800.000	100	21.799.704.434	100	22.288.471.847	100	25.851.921.192	100	26.493.786.566	RSUD Rondahaim
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**														RSUD Rondahaim
	Tersedianya layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penguatan fasilitas UKP dan UKM	Cakupan pelayanan kesehatan yang tertangani	%	100	-	9.232.523.262	100	25.184.239.772	100	26.442.422.570	100	27.763.720.345	100	29.151.288.848	RSUD Rondahaim

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**														RSUD Rondahaim
	Menguatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%		100	100.000.000	60,00	767.112.153	70,00	805.436.412	80,00	845.683.153	90,00	887.948.501	RSUD Rondahaim
		Pesentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	%	94	100		100		100		100		100		RSUD Rondahaim
1.03	**Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**														DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	27,76 (2023)	-	33.191.910.000	100	33.484.458.675	100	36.007.435.816	100	39.606.810.973	100	43.286.404.046	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.02	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**														DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir , Presentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Presentase luas layanan irigasi	%	99,31	-	26.250.000.000	11	39.549.252.038	14	41.525.098.402	17	43.600.060.331	20	45.779.093.604	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.03	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**														DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan akses SPAM yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	SR	1.117	-	16.500.000.000	1.900	20.107.274.734	2.400	22.110.999.427	3.000	24.215.238.164	3.600	26.425.016.646	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.04	**Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**														DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Ketersediaan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	0	-	0	6	1.748.419.630	9	1.835.769.160	13	1.927.500.457	17	2.023.832.608	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.05	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**														DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	498	-	5.520.000.000	750	8.627.475.108	950	9.258.332.823	1.200	9.920.836.632	1.500	10.616.568.839	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.06	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**														DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Tercegahnya genangan dan banjir melalui pengelolaan sistem drainase yang terkoneksi dengan sungai	Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	m	568	-	7.200.000.000	850	5.171.247.628	1.050	5.429.598.678	1.300	5.700.909.548	1.600	5.985.828.227	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.08	**Program Penataan Bangunan Gedung**														DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Teraturnya pembangunan gedung agar sesuai dengan standar teknis dan keselamatan	Jumlah bangunan gedung dalam kondisi baik	Unit	16	100	21.912.324.347	9	48.770.753.913	9	49.158.974.045	9	49.566.668.696	9	49.994.811.593	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.09	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**														DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Terdukungnya keteraturan, kenyamanan, dan keindahan lingkungan binaan melalui penataan kawasan bangunan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	Unit	5	100	4.202.675.653	10	4.262.747.511	10	4.325.833.282	10	4.392.083.663	10	4.461.656.884	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.10	**Program Penyelenggaraan Jalan**														DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Meningkatnya kualitas jalan di wilayah Kabupaten Simalungun	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota	%	50,86	100	117.691.169.590	55,21	236.085.106.723	58,01	252.875.627.443	64,03	270.508.421.123	67,27	289.025.601.410	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.11	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**														DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme pelaku jasa konstruksi lokal	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Orang	50 (2023 RKPD)	-	285.000.000	100	294.268.848	100	303.974.351	100	314.166.717	100	324.870.290	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.12	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**														DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Terwujudnya tata ruang yang tertib, efisien, dan berkelanjutan	Persentase pemanfaatan lahan sesuai RTRW Kabupaten	%	20 (2023 RKPD)	-	2.766.581.038	35	2.979.793.386	40	3.298.685.801	45	3.523.542.288	50	3.854.661.050	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.04	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**														DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.04.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	98,88 (2023)	-	3.010.683.217	100	11.330.610.267	100	12.546.963.803	100	13.774.170.412	100	15.012.772.747	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.04.02	**Program Pengembangan Perumahan**														DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	77,54 (Target 2025 RKPD)	-	175.000.000	84,5	757.648.506	88	795.499.969	91,5	835.250.198	95	876.994.130	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.04.03	**Program Kawasan Permukiman**														DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Meningkatnya kualitas kawasan pemukimanl	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	99 (2023)	-	940.000.000	60	3.773.914.652	45	3.887.435.725	30	3.911.667.783	15	4.047.146.376	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.04.04	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**														DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Berkurangnya pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Presentase kawasan permukiman dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0 (2023 RKPD)	0	850.000.000	25	971.344.239	40	1.019.871.756	60	1.070.833.587	80	1.124.351.449	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.04.05	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**														DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase pemukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Perumahan	29	-	100.000.000	42	10.166.676.921	50	10.334.791.450	58	10.616.355.569	66	10.812.041.757	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**														SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100	-	6.321.347.910	100	211.550.501.148	100	212.077.186.378	100	213.655.373.836	100	214.387.638.632	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**														SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tertib melalui pengendalian gangguan ketenteraman	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	95 (2022 RKPD)	-	2.940.000.000	97	880.570.773	97,5	1.024.481.593	98	1.175.611.497	98,5	1.334.321.441	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**														DINAS / BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS / BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100	100	9.063.109.564	100	8.000.000.000	100	8.500.000.000	100	9.000.000.000	100	9.500.000.000	DINAS / BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	**Program Penanggulangan Bencana**														DINAS / BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat, dan Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana, Penanganan Tanggap Darurat Bencana, dan Penanganan Pasca Bencana	%	61	-	8.400.000.000	70	9.670.667.857	75	11.752.498.316	80	13.938.760.885	85	15.234.677.169	DINAS / BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**														DINAS / BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Edukasi Rawan Kebakaran, Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Rawan Kebakaran	%	44	-	11.850.000.000	58	928.508.179	66	1.064.903.817	74	1.103.125.190	82	1.243.263.587	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06	**Sosial**														DINAS SOSIAL
1.06.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS SOSIAL
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	23,75	-	856.240.000	100	4.973.884.627	100	5.127.371.506	100	5.293.574.200	100	5.473.128.499	DINAS SOSIAL
1.06.02	**Program Pemberdayaan Sosial**														DINAS SOSIAL
	Meningkatnya kemandirian kelompok rentan dan komunitas adat terpencil melalui penguatan kapasitas sosial	Peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	%	43 (TW III)	-	400.000.000	52	1.108.704.320	56	1.164.094.227	60	1.222.262.692	65	1.283.348.641	DINAS SOSIAL
1.06.03	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**														DINAS SOSIAL
	Meningkatnya perlindungan dan pemulihan bagi warga negara migran yang menjadi korban	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertanganin	%		-	-	100	700.000.000	100	800.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04	**Program Rehabilitasi Sosial**														DINAS SOSIAL

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terpulihkannya integrasi sosial bagi kelompok rentan dan terlantar	Cakupan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25 (TW III)	-	585.000.000	33	1.538.445.637	37	1.615.305.048	41	1.696.020.004	45	1.780.783.282	DINAS SOSIAL
1.06.05	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**														DINAS SOSIAL
	Terlindunginya dasar dan jaminan sosial bagi kelompok rentan, terutama anak terlantar dan fakir miskin	Persentase kecamatan yang melakukan pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	%	30 (TW III)	-	475.600.000	42	959.590.898	48	992.543.487	54	1.027.149.098	60	1.063.490.379	DINAS SOSIAL
1.06.06	**Program Penanganan Bencana**														DINAS SOSIAL
	Terlindunginya sosial bagi korban bencana alam maupun bencana sosial	Cakupan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	40 (TW III)	-	771.551.973	50	1.590.366.032	55	1.524.774.388	60	1.565.925.151	65	1.614.155.441	DINAS SOSIAL
1.06.07	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**														DINAS SOSIAL
	Meningkatnya pemeliharaan fisik makam dan fasilitas pendukung	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%		-	-	100	300.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	DINAS SOSIAL
	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
2.07	**Tenaga Kerja**														DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS KETENAGAKERJAAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100	100	3.562.234.536	100	5.478.540.188	100	5.659.957.648	100	6.627.991.311	100	6.819.425.015	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.02	**Program Perencanaan Tenaga kerja**														DINAS KETENAGAKERJAAN
	Terciptanya perencanaan tenaga kerja yang akurat dan adaptif	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	%	100	100	166.162.000	100	120.000.000	100	200.000.000	100	120.000.000	100	200.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.03	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**														DINAS KETENAGAKERJAAN
	Meningkatknya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	%	6,63	8,02	2.335.000.000	8,82	4.043.000.000	9,7	4.389.400.000	10,67	4.744.620.000	11,74	5.109.101.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.04	**Program Penempatan Tenaga Kerja**														DINAS KETENAGAKERJAAN
	Meningkatnya akses dan peluang kerja, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	%	56,49	60,5	272.421.700	63,53	417.500.000	66,71	477.500.000	70,05	537.500.000	73,55	597.500.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.05	**Program Hubungan Industrial**														DINAS KETENAGAKERJAAN
	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan	Persentase Perusahan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	%	82,03	82,83	223.188.200	100	492.674.800	100	550.808.500	100	619.598.900	100	689.078.500	DINAS KETENAGAKERJAAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**														DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	3	100	2.220.951.788	100	3.363.545.860	100	3.531.585.696	100	3.708.055.016	100	3.893.375.293	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02	**Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**														DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Terintegrasinya perspektif gender dalam pembangunan melalui pelembagaan PUG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	30	0,6	145.000.000	40	603.508.179	44	614.903.817	47	628.125.190	50	643.263.587	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08.03	**Program Perlindungan Perempuan**														DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Terlindunginya perempuan dari berbagai bentuk kekerasan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan	%	96,35 (2023)	-	100.000.000	99	145.701.636	99,5	152.980.763	99,8	160.625.038	100	168.652.717	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**														DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Meningkatnya kualitas hidup keluarga melalui penguatan nilai kesetaraan gender dan perlindungan hak anak	Cakupan pembinaan keluarga balita stunting dan PAAR di Nagori Lokus stunting	%	88,42 (2022)	-	232.000.000	20	339.970.484	24	356.955.114	27	374.791.755	30	393.523.007	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**														DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terkelolanya data gender dan anak secara terstruktur dan berkelanjutan	Persentase OPD yang memiliki data Gender dan Anak	%	50 (2022)	100	90.000.000	68	291.403.272	74	305.961.527	80	321.250.076	85	337.305.435	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**														DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara menyeluruh di berbagai sektor	Skor/Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	Poin	344,48	510	206.560.000	68	554.940.967	74	563.910.229	80	574.583.511	85	587.046.014	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	**Program Perlindungan Khusus Anak**														DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Terpenuhinya kebutuhan dan perlindungan anak yang memerlukan perlakuan khusus	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan pendampingan	%	100	-	104.055.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	650.000.000	100	700.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09	**Pangan**														DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	9	100	1.712.486.076	100	12.156.135.325	100	13.371.748.857	100	14.708.923.743	100	16.179.816.117	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.02	**Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan**														DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	%	0	-	150.000.000	100	3.000.000.000	100	3.010.000.000	100	3.010.000.000	100	3.010.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.03	**Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**														DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya diversivikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	0	-	694.570.350	91	1.212.570.350	91	1.292.570.350	91,5	1.372.570.350	91,5	1.452.570.350	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.04	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**														DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Teratasinya kerawanan pangan di Kabupaten Simalungun	Persentase penurunan Daerah Rawan Pangan	%	0	-	179.000.000	10	918.736.235	18	964.635.501	25	1.012.837.240	33	1.063.456.575	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.05	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**														DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Terawasinya keamanan pangan segar di Kabupaten Simalungun	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	%	86,86 (2022)	-	144.000.000	94	247.692.781	95,5	260.067.298	97	273.062.565	98	286.709.620	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.10	**Pertanahan**														DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.10.3	**Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum**														DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	%		-	-	100	500.000.000	100	600.000.000	100	700.000.000	100	800.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.10.04	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**														DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Pesentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	56,52 (2024)	-	42.000.000	57,5 (2024)	179.504.415	58 (2024)	188.472.300	58,5 (2024)	197.890.047	59 (2024)	207.780.148	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.10.05	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**														DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Meningkatnya penyelesaian ganti rugi kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100 (2021 RKPD)	-	60.000.000	100	485.672.120	100	509.935.878	100	535.416.794	100	562.175.725	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.10.06	**Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente**														DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reformasi agrarian (TORA)	Tersedianya tanah obyek landform (T0L) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%		=	37.500.000	100	600.000.000	100	700.000.000	100	800.000.000	100	900.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.10.08	**Program Pengelolaan Tanah Kosong**														DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase tanah kosong yang dikelola	%	3	-	-	8	260.369.044	12	263.385.030	17	266.552.307	23	269.878.443	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.10.10	**Program Penatagunaan Tanah**														DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Peserntase luas lokasi konsolidasi tanah	%	100 (Target 2025 RKPD)	-	32.500.000	100	221.903.813	100	322.998.108	100	424.147.297	100	525.354.125	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.11	**Lingkungan Hidup**														DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	61	-	14.517.577.366	100	7.248.898.114	100	8.661.005.917	100	9.093.786.530	100	9.548.273.594	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**														DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	-	800.000.000	100	1.266.940.400	100	1.480.113.046	100	1.703.979.198	100	1.939.073.533	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**														DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan	Indeks Kualitas air dan Indeks Kualitas Udara	Indeks	53,33 (IKA)/ 95,62 (IKU)	-	620.000.000	72,04 / 83,95	2.784.843.933	72,24 / 84,15	2.923.972.323	72,44 / 84,35	3.070.079.894	75	3.223.515.605	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**														DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	Indeks	36,96	-	-	62,65	853.287.060	62,72	895.916.542	62,79	940.684.473	62,82	987.697.774	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**														DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	44,56	-	60.000.000	57,61	135.988.193	61,96	142.782.046	66,3	149.916.702	70,65	157.409.203	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**														DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	47,82 (Rasio Jumlah Penanggung Jawab Usaha yang melanggar dengan usaha yang diperiksa	-	100.000.000	41	271.976.387	39	285.564.092	37	299.833.404	35	314.818.406	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**														DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	60	-	-	66	349.683.926	69	367.153.832	72	385.500.091	75	404.766.522	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**														DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	0	-	50.000.000	100	106.847.866	100	112.185.893	100	117.791.695	100	123.678.659	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**														DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	Persen	100 (DLH, 2025)	-	-	100	106.847.866	100	112.185.893	100	117.791.695	100	123.678.659	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan**														DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase timbunan sampah yang ditangani oleh Pemda	Persen	26,07 (DLH, 2025)	=	6.567.929.382	30	11.228.728.345	30	12.289.297.219	30	13.403.068.045	30p	14.572.700.921	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks		0		0,6		1		1,5		2,1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**														DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	30	99,50	5.145.558.477	100	6.953.562.139	100	7.250.996.945	100	7.563.352.151	100	7.891.373.778	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	**Program Pendaftaran Penduduk**														DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akurasi data pendaftaran penduduk yang mencakup pelayanan pembuatan dokumen kependudukan serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaannya, sehingga tersedia data penduduk yang valid dan terkini	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	%	44	52	633.000.000	60	1.457.016.359	68	1.529.807.633	75	1.606.250.381	80	1.686.527.174	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	**Program Pencatatan Sipil**														DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Terpenuhinya hak-hak sipil masyarakat melalui pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dilakukan secara tertib, akurat, dan akuntabel.	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	%	56	63	110.000.000	70	123.409.175	78	134.570.504	85	146.291.725	90	158.600.833	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**														DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Terkelolanya data dan informasi kependudukan secara sistematis dan terintegrasi sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	57	100	425.000.000	72	317.678.023	78	338.544.855	85	360.458.442	90	383.471.123	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12.05	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**														DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Tersusunnya profil kependudukan yang mencerminkan dinamika penduduk berdasarkan data terkini, proyeksi penduduk, serta analisis kebutuhan pembangunan.	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	50.000.000	115	48.567.212	122	50.993.588	127	53.541.679	130	56.217.572	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**														DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2.13.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100 (2023)	100	4.147.204.245	100	5.689.753.612	100	5.974.008.772	100	6.272.523.195	100	6.586.009.842	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.13.02	**Program Penataan Desa**														DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
	Terfasilitasinya Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	%	-	60	230.078.200	-	-	60	850.000.000	65	800.000.000	70	950.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2.13.03	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**														DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
	Berkembangnya kawasan pedesaan berbasis potensi lokal yang memperkuat kerja sama antar desa dengan pihak ketiga.	Persentase terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa(BPKAD)	%	90(TW III)	92	145.959.600	94	191.403.272	96	205.961.527	98	221.250.076	100	237.305.435	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2.13.04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**														DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan meningkatkan kapasitas administrasi pemerintah desa agar tertib dan akuntabel	Persentase fasilitas dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	%	38 (TW III)	-	1.740.252.100	58	4.575.031.366	68	4.803.595.969	78	5.043.626.195	85	5.295.695.326	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2.13.05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**														DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adata dalam pembangunan desa	Persentase lembaga/kader lembaga yang dilatih	%	75% (RKPD 2024 SIM)	-	1.487.092.400	85	3.025.737.305	90	3.176.900.519	93	3.335.646.624	95	3.502.354.764	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2.14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**														DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100 (2023)	100	6.864.594.639	100	11.590.546.127	100	12.169.599.768	100	12.777.700.825	100	13.416.301.667	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02	**Program Pengendalian Penduduk**														DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Terkendalinya jumlah dan distribusi penduduk melalui kebijakan yang terkoordinasi.	Total f*ertility rate*	angka/indeks	2,45	2,42	543.184.000	2,4	1.738.256.941	2,38	1.825.098.752	2,36	1.916.296.860	2,34	2.012.069.081	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	**Program Pembinaan Keluarga Berencana**														DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-kb dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi(*unmeet need*)	%	14	9,8	7.408.468.314	9,6	10.392.910.682	9,4	10.912.131.494	9,2	11.457.398.291	9	12.030.013.373	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (m-CPR)	%	56,3											
		PA MKJP	%	24,2											
2.14.04	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**														DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Terwujudnya keluarga yang tangguh, mandiri, dan berkualitas	Persentase kelompok UPPKS yang aktif dan mandiri	%	80	82	395.236.186	84	6.059.590.378	86	6.112.526.595	88	6.168.118.283	90	6.226.498.216	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase masyarakat terjangkau program bangga kencana	%	73,1											
2.15	**Perbuhungan**														DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS PERHUBUNGAN
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	29	100	11.124.294.000	100	9.554.837.950	100	9.982.148.508	100	10.435.910.862	100	11.117.447.602	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.15.02	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**														DINAS PERHUBUNGAN
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat dan Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	68	74	41.773.065.360	80	5.306.992.130	87	5.377.284.238	94	5.451.102.451	100	5.528.623.074	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03	**Program Pengelolaan Pelayaran**														DINAS PERHUBUNGAN
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut	%		100	200.000.000	100	1.250.000.000	100	1.350.000.000	100	1.450.000.000	100	1.550.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.16	**Komunikasi dan Informatika**														DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	42 (TW II)	100	4.212.667.790	100	4.761.461.383	100	4.894.343.955	100	5.138.908.755	100	5.395.739.894	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**														DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan kualitas Informasi Publik Daerah (Survei)	%	89 (2022)	-	450.000.000	93	2.787.273.400	95	2.876.564.030	97	2.970.333.800	100	3.068.806.666	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.16.03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**														DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Poin	97,89 (RKPD Provsu 2025)	-	4.807.846.106	98,5	2.233.880.617	98,7	2.295.524.224	99,3	2.360.260.095	100	2.428.242.845	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**														DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	78	100	3.580.120.172	100	5.351.016.188	100	5.888.300.648	100	6.437.859.311	100	7.073.623.015	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**														DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja koperasi	Persentase jumlah koperasi USP/KSP yang difasilitasi dalampenerbitan ijin usaha	%	0	-	-	30	350.000.000	30	400.000.000	30	550.000.000	30	550.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**														DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terbentuknya penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam sebagai dasar pembinaan dan pengambilan keputusan	Cakupan KSP/USP yang dinilai kesehatannya	%	10 (2022 RKPD)	-	-	15	250.000.000	16	250.000.000	17	250.000.000	18	250.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**														DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pendidikan dan pelatihan	Persentase anggota koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	%	9	-	242.000.000	18	450.000.000	22	525.000.000	26	525.000.000	30	525.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**														DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Meningkatnya keberlanjutan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan pelindungan hukum koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	9	-	242.000.000	14	1.095.000.000	17	1.160.000.000	21	1.280.000.000	25	1.600.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**														DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Terbentuknya kemitraan rantai pasok antara usaha besar dan UMKM dalam mempercepat skala usaha	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	%	5	-	-	14	2.375.000.000	18	2.400.000.000	22	2.420.000.000	26	2.450.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.17.08	**Program Pengembangan UMKM**														DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Bertumbuhnya usaha kecil menjadi usaha mikro yang berdaya saing dan berdaya tahan	Persentase usaha mikro yang meningkat skala usahanya	%	6	-	200.000.000	17	1.200.000.000	22	1.300.000.000	26	1.300.000.000	30	1.400.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18	**Penanaman Modal**														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100	100	4.168.760.755	100	10.249.288.000	100	11.758.704.000	100	13.522.491.000	100	15.550.449.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.02	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui penyusunan kebijakan insentif dan peta potensi investasi	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	%	100	-	170.500.000	100	1.010.690.000	100	1.190.250.000	100	1.368.900.000	100	1.574.550.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	**Program Promosi Penanaman Modal**														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Tertariknya minat investor dalam dan luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	%	100	-	80.000.000	100	362.084.000	100	416.398.000	100	478.854.000	100	550.684.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Tersedianya pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal melalui sistem satu pintu	Persentase dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	90	-	294.750.000	90	586.500.000	90	674.475.000	90	775.645.000	90	891.993.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Terjaganya integritas iklim investasi sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	%	100	-	154.750.000	100	641.327.000	100	737.527.000	100	848.160.000	100	975.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**														DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Tersedianya data investasi yang akurat dan terkini	Persentase data dan informasi tentang perizinan dan non perizinan yang akurat	%	58,99 (2022)	-	5.000.000	70	100.600.000	75	115.700.000	80	133.000.000	85	153.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.19	**Kepemudaan dan Olahraga**														DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	25	100	3.837.140.000	100	5.998.032.796	100	6.297.689.317	100	6.612.377.688	100	6.942.849.502	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.02	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**														DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Terciptanya pemuda yang produktif dan berdaya saing	Persentase wirausaha muda	%	16,67 (TW III)	-	377.109.800	27	1.564.348.791	32	1.692.461.435	36	1.827.000.670	40	1.968.287.826	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**														DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya prestasi olahraga daerah	Persentase prestasi olahraga ditingkat nasional dan internasional dalam ajang yang diikuti	%	95,38% (RKPD 2024)	-	2.457.717.768	97,3	3.007.275.129	98	3.457.270.790	99,5	3.929.839.853	100	4.426.110.988	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**							\							DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya peran pramuka dalam pembangunan daerah melalui pengembangan karakter dan kepemimpinan generasi muda	Persentase pelajar mengikuti pelatihan kepramukaan	%	100 (2023)	-	200.000.000	100	529.382.610	100	555.830.107	100	583.604.305	100	612.771.540	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.20	**Statistik**														DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**														DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Tercapainya Kolaborasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	%	97,36 (RKPD Provsu 2025)	-	70.000.000	100	777.075.391	100	815.897.404	100	856.666.870	100	899.481.159	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	**Persandian**														DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**														DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Poin	96,37 (RKPD Provsu 2025)	-	70.000.000	100	679.940.967	100	713.910.229	100	749.583.511	100	787.046.014	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22	**Kebudayaan**														DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.22.02	**Program Pengembangan Kebudayaan**														DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan.	%	16,67 (2023)	30	1.050.000.000	27	234.278.248	32	345.900.853	36	463.122.850	40	586.224.209	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
2.22.03	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**														DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional.	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan.	%	25 (2022)	-	150.000.000	34	583.775.676	38	712.858.870	42	848.417.342	46	990.774.855	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
2.22.04	**Program Pembinaan Sejarah**														DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
	Meningkatnya akses terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Sejarah Lokal.	%	0 (2022 RKPD)	-	100.000.000	4	388.537.696	6	407.948.702	8	428.333.435	10	449.740.580	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.22.05	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**														DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan, Presentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan.	%	43,75 (2022)	-	300.000.000	55	510.440.292	60	585.900.580	64	665.146.228	67	748.366.503	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
2.22.06	**Program Pengelolaan Permuseuman**														DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
	Meningkatnya tata kelola museum.	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum.	%	34% (RKPD Provsu 2025)	-	-	42,5	796.986.842	46	886.762.748	48	981.042.136	50	1.080.050.181	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
2.23	**Perpustakaan**														DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	20	100	4.076.270.123	100	5.599.738.000	100	6.079.332.592	100	6.582.985.376	100	7.111.899.260	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**														DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Meningkatnya kualitas dan akses layanan perpustakaan	Persentase pemenuhan koleksi buku sesuai dengan analisa kebutuhan	%	21 (TW III)	-	540.000.000	38	3.889.540.272	45	4.033.899.201	53	4.185.499.692	60	4.344.703.826	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24	**Kearsipan**														
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**														DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tertib dokumen	Persentase instansi yang mendapat pendampingan sistem kearsipan	%	16 (2023)	-	150.000.000	28	158.571.836	34	171.489.861	40	185.055.901	45	199.302.356	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**														DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Terlindunginya arsip dari risiko kehilangan, kerusakan, dan bencana	Persentase daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	%	100	-	-	100	245.643.245	100	257.915.368	100	270.803.106	100	284.337.238	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Urusan Pilihan														

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25	**Kelautan dan Perikanan**														DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.03	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**														DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap	Persentase tersedianya data dan informasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan produksi perikanan tangkap	%	100	100	94.500.000	100	275.000.000	100	535.000.000	100	631.500.000	100	719.650.000	
3.25.04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**														DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya untuk menjaga keberlangsungan usaha perikanan daerah	Persentase tersedianya data dan informasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan produksi perikanan budidaya	%	100	100	3.268.983.574	100	5.750.782.000	100	7.065.000.000	100	7.420.000.000	100	7.750.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.05	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**														DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Terciptanya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengawasan	Persentase pengawasan usaha perikanan	%		100	50.000.000	100	200.000.000	100	220.000.000	100	230.000.000	100	240.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25.06	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**														DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya nilai tambah komoditas perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir	Persentase tersedianya data dan informasi peningkatan kapasitas kelembagaan, produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan serta konsumsi ikan	%	100	100	135.500.000	100	282.500.000	100	1.260.000.000	100	1.390.000.000	100	1.520.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.26	**Pariwisata**														DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
3.26.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	18,22	100	4.654.525.669	100	10.436.961.371	100	10.913.337.964	100	11.418.627.683	100	11.954.276.182	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**														DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	30 (TW III)	-	1.050.000.000	42	7.751.327.028	48	8.138.576.610	54	8.545.252.025	60	8.972.324.564	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03	**Program Pemasaran Pariwisata**														DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	50 (TW III)	100	1.250.000.000	70	3.942.688.478	80	4.039.743.511	90	4.141.667.174	100	4.248.702.898	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
3.26.04	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**														DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%		-	-	85	1.100.000.000	90	1.200.000.000	95	1.300.000.000	100	1.400.000.000	
3.26.05	**Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**														DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	200 (2023)	-	600.000.000	300	1.602.717.994	350	1.682.788.397	400	1.766.875.419	450	1.855.179.891	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF
3.27	**Pertanian**														DINAS PERTANIAN
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS PERTANIAN
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	38	100	26.770.640.000	100	26.546.273.000	100	26.803.273.000	100	27.060.273.000	100	27.217.273.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**														DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya produktivitas dan ketahanan sektor pertanian daerah	Persentase kelompok tani yang memperoleh bantuan sarana produksi pertanian	%	28	-	18.179.100.000	36	16.815.760.000	37	17.721.796.000	38	15.028.906.000	39	15.329.300.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**														DINAS PERTANIAN
	Terjaganya keberlanjutan usaha pertanian dan meningkatnya kesejahteraan petani	Persentase peningkatan pengembangan prasarana	%	3	-	16.370.000.000	9	16.266.300.000	12	16.366.300.000	15	16.466.300.000	18	16.252.908.500	DINAS PERTANIAN
3.27.04	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**														DINAS PERTANIAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terjaminnya kesehatan hewan dan terlindunginya masyarakat dari risiko penyakit zoonosis	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	54	-	600.500.000	61	93.800.000	62	104.400.000	63	115.000.000	64	125.600.000	DINAS PERTANIAN
3.27.05	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**														DINAS PERTANIAN
	Terjaganya ketahanan pangan dan stabilitas produksi pertanian di daerah	Persentase luas lahan yang dilakukan pengamatan pengendalian OPT	%	0	-	1.500.000.000	11	105.000.000	12	110.000.000	13	115.000.000	14	120.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.06	**Program Perizinan Usaha Pertanian**														DINAS PERTANIAN
	Berkembangnya sektor pertanian yang tertib dan berdaya saing	Persentase kepatuhan usaha pertanian	%	0	-	-	6	35.000.000	7	40.000.000	8	45.000.000	9	50.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07	**Program Penyuluhan Pertanian**														DINAS PERTANIAN
	Menguatnya produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian	Cakupan bina kelompok tani	%	32	-	1.934.271.798	32	50.000.000	32	55.000.000	32	60.000.000	32	65.000.000	DINAS PERTANIAN
3.30	**Perdagangan**														DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**														DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terciptanya iklim usaha yang tertib dan aman di Kabupaten Simalungun	Persentase rekomendasi yang diberikan	%	0	20	-	21	744.150.000	22	818.515.000	23	900.421.500	24	990.463.650	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**														DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Lancarnya arus barang dan meningkatnya akses pasar di daerah	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	%	0	40	8.107.783.000	40	4.228.950.000	42	4.651.845.000	42	5.117.029.500	44	5.628.732.450	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04	**Program Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**														DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	39,12	55	224.655.400	55	1.554.723.398	57	1.710.195.738	57	2.012.229.037	59	2.213.451.942	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05	**Program Pengembangan Ekspor**														DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya kontribusi ekspor terhadap perekonomian daerah	Persentase fasilitasi pengembagan ekspor	%	34,20	40	193.550.000	40	579.310.518	42	637.241.570	44	700.965.728	46	771.062.301	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**														DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Terbangunnya kepercayaan konsumen dan pelaku usaha terhadap sistem perdagangan daerah	Persentase alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapan nya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	38,48	45	92.497.700	50	792.136.764	50	848.250.440	55	958.485.484	60	1.054.334.032	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07	**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**														DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	44,99	45	10.932.100	46	413.333.580	46	454.666.938	47	500.133.632	47	550.146.995	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31	**Perindustrian**														DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100	100	3.608.904.920	100	12.689.598.035	100	13.958.557.840	100	15.161.774.614	100	17.071.226.716	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**														DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Terciptanya industri yang tumbuh secara terencana dan berkelanjutan	Persentase pertumbuhan industri	%	4,54	35	193.686.060	35	10.296.149.645	37	11.265.264.610	39	12.458.341.071	40	13.704.175.178	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**														DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Terdorongnya pertumbuhan sektor industri yang berbasis regulasi	Persentase Rekomendasi yang diberikan	%	0	-	-	21	242.000.000	23	266.200.000	23	292.820.000	24	322.102.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.31.04	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**														DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya pengelolaan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase sosialisasi sistem informasi industri nasional	%	1,12	-	-	6	167.769.888	7	184.546.877	7	203.001.565	8	223.301.722	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan														
4.01	**Sekretariat Daerah**														SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														SEKRETARIAT DAERAH
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	37	100	49.758.020.401	100	42.769.811.293	100	45.256.267.941	100	47.867.454.205	100	50.609.606.565	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**														SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan sosial.	Persentase pelaksanaan penataan administrasi pemerintahan dan kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat	%	36	-	19.129.935.000	58	16.143.446.451	67	16.949.959.047	76	17.796.929.219	85	18.686.379.844	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01.03	**Program Perekonomian dan Pembangunan**														SEKRETARIAT DAERAH
	Terdorongnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	%	51	100	2.830.000.000	69	5.836.068.225	75	6.127.633.137	83	6.433.823.994	90	6.755.372.094	SEKRETARIAT DAERAH
4.02	**Sekretariat DPRD**														SEKRETARIAT DPRD
4.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														SEKRETARIAT DPRD
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	58	100	43.103.437.924	100	42.422.154.889	100	45.791.324.657	100	47.279.340.509	100	50.892.144.748	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**														SEKRETARIAT DPRD
	Meningkatnya efektivitas peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Perda yang diselesaikan pembahasannya	%	27	38	17.842.713.200	49	13.665.842.100	58	14.348.575.730	66	15.065.557.736	75	15.818.500.538	SEKRETARIAT DPRD
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan														
5.01	**Perencanaan**														BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100	100	5.357.074.063	100	5.917.043.785	100	5.642.580.798	100	6.260.533.947	100	5.982.816.437	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.02	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**														BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	Terjalinnya proses penyusunan rencana pembangunan dan pendanaannya	Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	724.499.665	100	1.291.166.700	100	1.333.416.700	100	1.376.166.700	100	1.588.338.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.03	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**														BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terciptanya pembangunan yang terkoordinasi dan sinergis di tingkat daerah	Persentase capaian koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	935.500.000	100	1.096.000.000	100	1.204.175.000	100	1.320.538.250	100	1.447.272.063	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.02	**Keuangan**														BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	98	100	94.859.957.854	100	131.466.254.923	100	143.021.803.569	100	156.260.742.668	100	168.023.446.696	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**														BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya manajemen keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang baik	%	95	-	529.973.718.880	95	329.630.000.000	95	331.610.000.000	95	333.590.000.000	95	335.570.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**														BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Terjaminnya pengelolaan aset daerah secara efisien	Persentase Asset	%	95	-	3.577.000.000	95	3.500.000.000	95	3.600.000.000	95	3.700.000.000	95	3.800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**														BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase capaian pengelolaan pendapatan daerah	%	95	-	4.937.000.000	95	5.000.000.000	95	5.050.000.000	95	5.100.000.000	95	5.150.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.03	**Kepegawaian**														BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	95	95	109.449.460.820	100	7.488.016.386	100	7.962.029.463	100	8.459.820.743	100	8.982.579.135	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**					0									BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Terselenggaranya manajemen ASN secara profesional	Persentase layanan administrasi kepegawaian	%	90	90	1.619.811.133	43	3.344.121.376	55	3.511.190.782	66	3.686.640.992	75	3.870.891.044	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.04	**Pendidikan dan Pelatihan**														BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**														BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan tenaga kerja daerah	Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan sumber daya manusia	%	50.	65	5.592.479.100	35	12.093.235.777	45	12.697.403.357	52	13.331.878.159	60	13.998.175.542	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05	**Penelitian dan Pengembangan**														BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.05.02	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**														BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Menguatnya perumusan kebijakan dan strategi pembangunan	Persentase fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	%	100	100	70.000.000	100	302.000.000	100	355.960.000	100	430.038.800	100	364.239.964	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.05.03	**Program Riset dan Inovasi Daerah**														BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	Meningkatkan kapasitas daerah dalam menghasilkan kebijakan dan solusi	Persentase fasilitasi riset dan inovasi daerah	%	-	100	400.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan														
6.01	**Inspektorat**														INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														INSPEKTORAT DAERAH
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	98	100	14.488.487.504	100	19.222.950.000	100	20.184.097.500	100	21.193.302.375	100	22.252.967.494	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**														INSPEKTORAT DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Menurunnya Terjadinya Penyelenggaraan Atau Penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1	%	69,75	80	2.280.642.100	81	4.542.150.000	82	4.769.257.500	83	5.007.720.375	84	5.258.106.394	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	**Program Urusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi**														INSPEKTORAT DAERAH
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui pemberian pendampingan dan asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	%	1. Level 2 2. Level 3	Level 3	781.085.500	Level 3	1.422.500.000	Level 3	1.493.625.000	Level 3	1.568.306.250	Level 3	1.646.721.563	INSPEKTORAT DAERAH
	Unsur Kewilayahan														
7.01	**Kecamatan**														
	Kecamatan Siantar														KECAMATAN SIANTAR
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN SIANTAR
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	70	100	3.930.077.910	100	4.400.721.574	100	4.700.314.938	100	5.000.726.513	100	5.300.547.210	KECAMATAN SIANTAR
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN SIANTAR

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	5.000.000	100	10.703.859	100	11.238.615	100	11.800.196	100	12.389.943	KECAMATAN SIANTAR
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN SIANTAR
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%		-	-	100	267.596.481	100	280.965.369	100	295.004.889	100	309.748.572	KECAMATAN SIANTAR
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN SIANTAR
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	5.000.000	100	23.295.362	100	24.459.178	100	25.681.375	100	26.964.873	KECAMATAN SIANTAR
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN SIANTAR
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	13	100	15.000.000	100	47.292.925	100	49.655.638	100	52.136.874	100	54.742.558	KECAMATAN SIANTAR
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN SIANTAR
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	5.000.000	100	37.857.172	100	39.748.483	100	41.734.670	100	43.820.475	KECAMATAN SIANTAR

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kecamatan Gunung Malela														KECAMATAN GUNUNG MALELA
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN GUNUNG MALELA
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	30	100	3.262.572.565	100	3.200.750.518	100	3.400.794.041	100	3.600.668.540	100	3.878.815.566	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN GUNUNG MALELA
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		-	-	100	7.998.294	100	8.397.882	100	8.817.515	100	9.258.195	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN GUNUNG MALELA
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%		-	-	100	199.957.360	100	209.947.057	100	220.437.872	100	231.454.863	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN GUNUNG MALELA
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		-	-	100	17.407.101	100	18.276.745	100	19.190.013	100	20.149.087	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN GUNUNG MALELA

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%	40	100	55.000.000	100	35.338.912	100	37.104.413	100	38.958.478	100	40.905.536	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN GUNUNG MALELA
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%	-	-	-	100	28.288.190	100	29.701.444	100	31.185.591	100	32.744.177	KECAMATAN GUNUNG MALELA
	Kecamatan Gunung Maligas														KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	%	33	100	2.713.036.686	100	2.328.883.020	100	2.495.191.131	100	2.669.841.856	100	2.853.252.325	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	10.000.000	100	7.555.979	100	7.933.470	100	8.329.896	100	8.746.206	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN GUNUNG MALIGAS

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%		100	10.000.000	100	188.899.486	100	198.336.741	100	208.247.402	100	218.655.140	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	10.000.000	100	16.444.468	100	17.266.020	100	18.128.783	100	19.034.819	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%	34	100	52.000.000	100	33.384.629	100	35.052.496	100	36.804.029	100	38.643.412	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%	40	100	10.000.000	100	26.723.820	100	28.058.919	100	29.460.991	100	30.933.386	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
	Kecamatan Panei														KECAMATAN PANEI
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN PANEI

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	32	100	3.392.340.225	100	3.501.053.546	100	3.675.963.148	100	3.859.646.845	100	4.052.543.342	KECAMATAN PANEI
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN PANEI
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	5.000.000	100	7.946.776	100	8.343.790	100	8.760.720	100	9.198.561	KECAMATAN PANEI
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN PANEI
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%	99	100	200.000.000	100	198.669.407	100	208.594.758	100	219.018.001	100	229.964.030	KECAMATAN PANEI
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN PANEI
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	5.000.000	100	17.294.980	100	18.159.022	100	19.066.408	100	20.019.304	KECAMATAN PANEI
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN PANEI
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%	99,6	100	10.936.000	100	35.111.289	100	36.865.418	100	38.707.541	100	40.642.057	KECAMATAN PANEI
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan**														KECAMATAN PANEI

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pemerintahan Desa														
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	5.000.000	100	28.105.982	100	29.510.132	100	30.984.720	100	32.533.267	KECAMATAN PANEI
	Kecamatan Panombeian Panei														KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	41	100	2.737.702.216	100	3.449.092.368	100	3.621.406.034	100	3.802.363.574	100	3.992.397.182	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		-	-	100	7.828.834	100	8.219.955	100	8.630.697	100	9.062.040	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%		-	-	100	195.720.838	100	205.498.882	100	215.767.427	100	226.550.999	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		-	-	100	17.038.295	100	17.889.513	100	18.783.432	100	19.722.186	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%	67	100	35.074.000	100	34.590.182	100	36.318.277	100	38.133.060	100	40.038.865	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		-	-	100	27.688.845	100	29.072.155	100	30.524.858	100	32.050.422	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
	Kecamatan Jorlang Hataran														KECAMATAN JORLANG HATARAN
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN JORLANG HATARAN
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	41	100	3.013.000.000	100	4.066.437.316	100	4.269.593.000	100	4.482.939.706	100	4.706.986.982	KECAMATAN JORLANG HATARAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN JORLANG HATARAN
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	19.761.964	100	9.230.098	100	9.691.226	100	10.175.485	100	10.684.033	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN JORLANG HATARAN
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pemeliharaan, pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%	50	100	200.000.000	100	230.752.452	100	242.280.644	100	254.387.132	100	267.100.831	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN JORLANG HATARAN
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	100.000.000	100	20.087.939	100	21.091.515	100	22.145.434	100	23.252.214	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN JORLANG HATARAN
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%		100	50.000.000	100	40.781.397	100	42.818.800	100	44.958.407	100	47.205.327	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN JORLANG HATARAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	84.123.219	100	32.644.806	100	34.275.712	100	35.988.430	100	37.787.052	KECAMATAN JORLANG HATARAN
	Kecamatan Raya Kahean														KECAMATAN RAYA KAHEAN
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN RAYA KAHEAN
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	75	100	2.090.749.054	100	3.783.013.422	100	3.922.050.361	100	4.068.061.893	100	4.221.396.749	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN RAYA KAHEAN
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		-	-	100	6.316.951	100	6.632.541	100	6.963.961	100	7.312.004	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN RAYA KAHEAN
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%	50	100	200.000.000	100	157.923.784	100	165.813.520	100	174.099.033	100	182.800.112	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN RAYA KAHEAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		-	-	100	13.747.908	100	14.434.741	100	15.156.029	100	15.913.493	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN RAYA KAHEAN
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%	94,33 (2023)	100	25.000.000	100	27.910.224	100	29.304.594	100	30.768.912	100	32.306.673	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN RAYA KAHEAN
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		-	-	100	22.341.653	100	23.457.823	100	24.629.984	100	25.860.935	KECAMATAN RAYA KAHEAN
	Kecamatan Bosar Maligas														KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	25	100	2.925.670.350	100	3.217.097.138	100	3.377.820.523	100	3.546.606.372	100	3.723.857.808	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN BOSAR MALIGAS

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	14.000.000	100	7.302.245	100	7.667.059	100	8.050.173	100	8.452.503	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%	49	100	160.000.000	100	182.556.128	100	191.676.474	100	201.254.330	100	211.312.570	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	3.000.000	100	15.892.253	100	16.686.217	100	17.520.008	100	18.395.619	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%	11	100	37.660.530	100	32.263.553	100	33.875.412	100	35.568.128	100	37.345.743	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN BOSAR MALIGAS
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	6.000.000	100	25.826.418	100	27.116.684	100	28.471.674	100	29.894.624	KECAMATAN BOSAR MALIGAS

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kecamatan Sidamanik														KECAMATAN SIDAMANIK
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN SIDAMANIK
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	16 (TW III)	100	3.540.528.839	100	4.426.666.450	100	4.647.818.870	100	4.880.065.091	100	5.123.959.805	KECAMATAN SIDAMANIK
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN SIDAMANIK
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		-	-	100	10.047.755	100	10.549.732	100	11.076.890	100	11.630.488	KECAMATAN SIDAMANIK
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN SIDAMANIK
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%	100 (TW III)	100	200.000.000	100	251.193.872	100	263.743.301	100	276.922.253	100	290.762.207	KECAMATAN SIDAMANIK
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN SIDAMANIK
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		-	-	100	21.867.448	100	22.959.927	100	24.107.208	100	25.312.033	KECAMATAN SIDAMANIK
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN SIDAMANIK

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%	40 (TW III)	100	20.000.000	100	44.394.055	100	46.611.944	100	48.941.089	100	51.387.055	KECAMATAN SIDAMANIK
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN SIDAMANIK
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		-	-	100	35.536.676	100	37.312.058	100	39.176.499	100	41.134.453	KECAMATAN SIDAMANIK
	Kecamatan Pamatang Sidamanik														KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	93,96 (2022)	100	2.927.382.568	100	3.198.587.373	100	3.343.398.286	100	3.595.473.437	100	3.755.176.035	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		-	-	100	6.579.284	100	6.907.979	100	7.253.163	100	7.615.660	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%	49	100	200.000.000	100	164.482.098	100	172.699.482	100	181.329.078	100	190.391.499	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		-	-	100	14.318.836	100	15.034.192	100	15.785.434	100	16.574.354	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%		-	-	100	29.069.289	100	30.521.566	100	32.046.694	100	33.648.316	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		-	-	100	23.269.465	100	24.431.988	100	25.652.826	100	26.934.897	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kecamatan Tanah Jawa														KECAMATAN TANAH JAWA
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN TANAH JAWA
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	61	100	4.248.663.362	100	4.447.647.405	100	4.669.848.015	100	4.903.195.008	100	5.148.245.703	KECAMATAN TANAH JAWA
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN TANAH JAWA
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	5.000.000	100	10.095.378	100	10.599.734	100	11.129.391	100	11.685.613	KECAMATAN TANAH JAWA
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN TANAH JAWA
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%	100	100	200.000.000	100	252.384.449	100	264.993.358	100	278.234.774	100	292.140.325	KECAMATAN TANAH JAWA
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN TANAH JAWA
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	5.000.000	100	21.971.093	100	23.068.749	100	24.221.469	100	25.432.003	KECAMATAN TANAH JAWA
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN TANAH JAWA

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%	29	100	10.834.400	100	44.604.468	100	46.832.869	100	49.173.054	100	51.630.613	KECAMATAN TANAH JAWA
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN TANAH JAWA
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	5.000.000	100	35.705.109	100	37.488.905	100	39.362.183	100	41.329.417	KECAMATAN TANAH JAWA
	Kecamatan Hatonduhan														KECAMATAN HATONDUHAN
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN HATONDUHAN
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	22	100	2.401.003.637	100	2.897.834.098	100	3.042.607.379	100	3.194.643.008	100	3.354.304.104	KECAMATAN HATONDUHAN
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN HATONDUHAN
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	2.700.000	100	6.577.574	100	6.906.184	100	7.251.278	100	7.613.681	KECAMATAN HATONDUHAN
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN HATONDUHAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%		100	2.700.000	100	164.439.353	100	172.654.601	100	181.281.955	100	190.342.021	KECAMATAN HATONDUHAN
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN HATONDUHAN
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	1.800.000	100	14.315.114	100	15.030.285	100	15.781.331	100	16.570.047	KECAMATAN HATONDUHAN
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN HATONDUHAN
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	-	81	34.000.000	100	29.061.735	100	30.513.634	100	32.038.365	100	33.639.571	KECAMATAN HATONDUHAN
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN HATONDUHAN
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%	80	81	900.000	100	23.263.418	100	24.425.638	100	25.646.160	100	26.927.897	KECAMATAN HATONDUHAN
	Kecamatan Dolok Panribuan														KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	24,34 (TW III)	100	2.237.441.320	100	2.576.938.127	100	2.790.691.983	100	2.910.152.142	100	3.135.603.919	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	2.000.000	100	5.168.249	100	5.426.451	100	5.697.604	100	5.982.358	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%		100	1.000.000	100	129.206.235	100	135.661.266	100	142.440.106	100	149.558.943	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	1.000.000	100	11.247.928	100	11.809.865	100	12.399.990	100	13.019.714	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	55 (TW III)	100	17.748.597	100	22.834.907	100	23.975.719	100	25.173.759	100	26.431.887	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan**														KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pemerintahan Desa														
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	1.000.000	100	18.278.950	100	19.192.150	100	20.151.160	100	21.158.270	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
	Kecamatan Purba														KECAMATAN PURBA
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN PURBA
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	87	94	2.397110.988	100	2.734.768.804	100	2.956.407.743	100	3.184.148.530	100	3.218.296.257	KECAMATAN PURBA
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN PURBA
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		-	-	100	5.526.497	100	5.802.596	100	6.092.545	100	6.397.037	KECAMATAN PURBA
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN PURBA
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%	100 (2023)	100	200.000.000	100	138.162.432	100	145.064.908	100	152.313.636	100	159.925.930	KECAMATAN PURBA

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN PURBA
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		-	-	100	12.027.602	100	12.628.490	100	13.259.521	100	13.922.203	KECAMATAN PURBA
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN PURBA
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%	79 (2023)	100	60.000.000	100	24.417.756	100	25.637.646	100	26.918.730	100	28.264.067	KECAMATAN PURBA
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN PURBA
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		-	-	100	19.545.993	100	20.522.494	100	21.547.979	100	22.624.899	KECAMATAN PURBA
	Kecamatan Haranggaol Horison														KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	61	100	1.867.699.290	100	3.023.554.091	100	3.174.608.234	100	3.333.239.796	100	3.499.827.648	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	tingkat kabupaten/kota.														
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	2.000.000	100	6.862.936	100	7.205.803	100	7.565.869	100	7.943.994	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%	100	100	110.000.000	100	171.573.411	100	180.145.070	100	189.146.714	100	198.599.842	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	2.000.000	100	14.936.163	100	15.682.361	100	16.465.991	100	17.288.924	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN HARANGGAOL HORISON

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%	29	100	25.000.000	100	30.322.553	100	31.837.441	100	33.428.322	100	35.098.994	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	2.000.000	100	24.272.681	100	25.485.323	100	26.758.796	100	28.096.141	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
	Kecamatan Girsang Sipangan Bolon														KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	81	93	3.681.167.759	100	4.422.439.256	100	4.643.380.489	100	4.875.404.930	100	5.119.066.739	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		-	-	100	10.038.160	100	10.539.658	100	11.066.312	100	11.619.382	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%	100 (2023)	100	600.000.000	100	250.953.998	100	263.491.442	100	276.657.810	100	290.484.547	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		-	-	100	21.846.566	100	22.938.002	100	24.084.187	100	25.287.861	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%	35 (2023)	100	163.400.000	100	44.351.661	100	46.567.432	100	48.894.354	100	51.337.984	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		-	-	100	35.502.741	100	37.276.427	100	39.139.088	100	41.095.172	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
	Kecamatan Dolok Batu Nanggar														KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	27,6 (TW III)	100	4.420.378.365	100	4.293.091.152	100	4.507.570.266	100	4.732.808.424	100	4.969.343.579	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	55.610.000	100	9.744.562	100	10.231.392	100	10.742.643	100	11.279.537	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase Terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	99 (TW III)	100	400.000.000	100	243.614.061	100	255.784.808	100	268.566.084	100	281.988.415	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	14.500.000	100	21.207.595	100	22.267.108	100	23.379.770	100	24.548.238	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	%	50 (TW III)	100	26.270.000	100	43.054.458	100	45.205.421	100	47.464.285	100	49.836.443	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	15.000.000	100	34.464.352	100	36.186.161	100	37.994.343	100	39.893.215	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
	Kecamatan Huta Bayu Raja														KECAMATAN HUTA BAYU RAJA

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	49	60	2.632.469.589	100	3.271.239.099	100	3.444.659.196	100	3.626.778.670	100	3.818.032.489	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		-	-	100	7.879.103	100	8.272.736	100	8.686.115	100	9.120.228	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%	100	100	200.000.000	100	196.977.568	100	206.818.396	100	217.152.876	100	228.005.690	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		-	-	100	17.147.698	100	18.004.382	100	18.904.041	100	19.848.823	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase jumlah urusan pemerintah umum	%	29	100	25.000.000	100	34.812.286	100	36.551.478	100	38.377.914	100	40.295.956	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		-	-	100	27.866.636	100	29.258.829	100	30.720.859	100	32.256.219	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
	Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi														KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	13 (TW II)	100	2.164.397.602	100	2.153.426.508	100	2.261.009.831	100	2.373.989.920	100	2.492.636.614	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	1.000.000	100	4.887.900	100	5.132.095	100	5.388.540	100	5.657.847	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%		-	-	100	122.197.493	100	128.302.374	100	134.713.498	100	141.446.176	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	2.000.000	100	10.637.789	100	11.169.243	100	11.727.358	100	12.313.465	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	113 (TW II)	100	28.000.000	100	21.596.236	100	22.675.166	100	23.808.218	100	24.998.099	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	2.000.000	100	17.287.415	100	18.151.080	100	19.058.068	100	20.010.548	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
	Kecamatan Dolok Pardamean														KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	50	100	1.610.203.501	100	1.815.662.829	100	1.906.371.771	100	2.001.630.999	100	2.101.668.029	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	3.000.000	100	4.121.236	100	4.327.129	100	4.543.351	100	4.770.417	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%		-	-	100	103.030.888	100	108.178.222	100	113.583.765	100	119.260.427	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	6.542.569	100	8.969.258	100	9.417.354	100	9.887.929	100	10.382.105	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	50	100	16.374.937	100	18.208.879	100	19.118.579	100	20.073.913	100	21.077.162	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	3.941.243	100	14.575.894	100	15.304.093	100	16.068.822	100	16.871.905	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
	Kecamatan Pematang Bandar														KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	21	100	3.680.657.223	100	4.154.702.680	100	4.362.268.026	100	4.580.245.597	100	4.809.156.004	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	20.000.000	100	9.430.445	100	9.901.582	100	10.396.353	100	10.915.939	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%	17 (TW III)	100	400.000.000	100	235.761.123	100	247.539.545	100	259.908.814	100	272.898.474	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN PEMATANG BANDAR

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	20.000.000	100	20.523.965	100	21.549.324	100	22.626.119	100	23.756.922	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%	33 (TW III)	100	45.000.000	100	41.666.591	100	43.748.218	100	45.934.266	100	48.229.958	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	30.000.000	100	33.353.388	100	35.019.695	100	36.769.589	100	38.607.251	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
	Kecamatan Bandar Huluan														KECAMATAN BANDAR HULUAN
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN BANDAR HULUAN
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	32	100	2.176.837.764	100	2.847.197.171	100	2.979.448.848	100	3.018.334.745	100	3.164.186.573	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN BANDAR HULUAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	2.500.000	100	6.008.672	100	6.308.860	100	6.624.107	100	6.955.165	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN BANDAR HULUAN
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%		100	2.500.000	100	150.216.809	100	157.721.511	100	165.602.675	100	173.879.125	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN BANDAR HULUAN
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	1.000.000	100	13.076.984	100	13.730.299	100	14.416.386	100	15.136.885	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN BANDAR HULUAN
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	94	100	25.000.000	100	26.548.153	100	27.874.475	100	29.267.331	100	30.730.047	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN BANDAR HULUAN
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	1.500.000	100	21.251.339	100	22.313.037	100	23.427.995	100	24.598.873	KECAMATAN BANDAR HULUAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kecamatan Bandar														KECAMATAN BANDAR
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN BANDAR
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	80	88	4.703.384.472	100	4.714.640.400	100	4.950.179.749	100	5.197.534.600	100	5.457.295.728	KECAMATAN BANDAR
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN BANDAR
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	2.000.000	100	10.701.405	100	11.236.038	100	11.797.490	100	12.387.102	KECAMATAN BANDAR
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN BANDAR
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%	100 (TW III)	100	400.000.000	100	267.535.129	100	280.900.952	100	294.937.253	100	309.677.556	KECAMATAN BANDAR
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN BANDAR
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	1.000.000	100	23.290.021	100	24.453.570	100	25.675.487	100	26.958.691	KECAMATAN BANDAR
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN BANDAR

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%	16 (2023)	100	54.000.000	100	47.282.082	100	49.644.254	100	52.124.921	100	54.730.007	KECAMATAN BANDAR
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN BANDAR
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	3.000.000	100	37.848.492	100	39.739.370	100	41.725.101	100	43.810.428	KECAMATAN BANDAR
	Kecamatan Bandar Masilam														KECAMATAN BANDAR MASILAM
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN BANDAR MASILAM
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	%	52	100	1.871.965.747	100	2.270.116.925	100	2.383.529.999	100	2.502.632.282	100	2.627.708.233	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN BANDAR MASILAM
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	2.000.000	100	5.152.766	100	5.410.194	100	5.680.535	100	5.964.436	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN BANDAR MASILAM

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%		100	2.600.000	100	128.819.162	100	135.254.855	100	142.013.387	100	149.110.897	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN BANDAR MASILAM
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	2.000.000	100	11.214.232	100	11.774.485	100	12.362.843	100	12.980.710	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN BANDAR MASILAM
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase Terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	13	100	64.100.000	100	22.766.499	100	23.903.893	100	25.098.344	100	26.352.702	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN BANDAR MASILAM
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	2.000.000	100	18.224.190	100	19.134.655	100	20.090.792	100	21.094.884	KECAMATAN BANDAR MASILAM
	Kecamatan Silimahuta														KECAMATAN SILIMAHUTA
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN SILIMAHUTA

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	35	100	2.844.309.698	100	2.749.157.310	100	2.886.502.828	100	3.030.738.090	100	3.182.207.586	KECAMATAN SILIMAHUTA
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN SILIMAHUTA
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	1.500.000	100	6.240.104	100	6.551.854	100	6.879.243	100	7.223.052	KECAMATAN SILIMAHUTA
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN SILIMAHUTA
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%	100 (TW III)	100	200.000.000	100	156.002.599	100	163.796.354	100	171.981.071	100	180.576.299	KECAMATAN SILIMAHUTA
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN SILIMAHUTA
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	2.000.000	100	13.580.661	100	14.259.139	100	14.971.652	100	15.719.901	KECAMATAN SILIMAHUTA
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN SILIMAHUTA
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase Terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintah umum	%	3,75 (TW III)	100	38.570.100	100	27.570.688	100	28.948.096	100	30.394.599	100	31.913.653	KECAMATAN SILIMAHUTA
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan**														KECAMATAN SILIMAHUTA

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pemerintahan Desa														
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	2.000.000	100	22.069.861	100	23.172.452	100	24.330.353	100	25.546.330	KECAMATAN SILIMAHUTA
	Kecamatan Silou Kahean														KECAMATAN SILOU KAHEAN
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN SILOU KAHEAN
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	28	100	1.741.631.854	100	1.987.796.576	100	2.102.092.911	100	2.322.122.761	100	2.548.172.802	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN SILOU KAHEAN
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		-	-	100	5.192.896	100	5.452.329	100	5.724.775	100	6.010.887	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN SILOU KAHEAN
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%		-	-	100	129.822.404	100	136.308.219	100	143.119.386	100	150.272.172	KECAMATAN SILOU KAHEAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN SILOU KAHEAN
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		-	-	100	11.301.568	100	11.866.185	100	12.459.125	100	13.081.804	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN SILOU KAHEAN
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase Terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	80 (TW III)	100	30.000.000	100	22.943.804	100	24.090.056	100	25.293.809	100	26.557.937	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN SILOU KAHEAN
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		-	-	100	18.366.120	100	19.283.675	100	20.247.259	100	21.259.171	KECAMATAN SILOU KAHEAN
	Kecamatan Tapian Dolok														KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	100	100	3.860.901.727	100	4.143.135.372	100	4.350.122.825	100	4.567.493.514	100	4.795.766.601	KECAMATAN TAPIAN DOLOK

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	14.702.519	100	9.404.189	100	9.874.014	100	10.367.408	100	10.885.547	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100 (TW III)	100	200.000.000	100	235.104.729	100	246.850.358	100	259.185.190	100	272.138.684	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	19.493.168	100	20.466.823	100	21.489.328	100	22.563.125	100	23.690.779	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase Terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	100 (TW III)	100	50.864.903	100	41.550.585	100	43.626.416	100	45.806.378	100	48.095.678	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN TAPIAN DOLOK

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	31.678.246	100	33.260.527	100	34.922.195	100	36.667.217	100	38.499.762	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
	Kecamatan Raya														KECAMATAN RAYA
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN RAYA
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	15	100	4.512.537.414	100	4.353.918.218	100	4.601.411.679	100	4.961.320.304	100	5.234.264.850	KECAMATAN RAYA
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN RAYA
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%	25 (TW II)	100	9.500.000	100	11.244.524	100	11.806.290	100	12.396.237	100	13.015.773	KECAMATAN RAYA
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN RAYA
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	25	100	1.000.000.000	100	281.113.094	100	295.157.260	100	309.905.933	100	325.394.337	KECAMATAN RAYA
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN RAYA

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		-	-	100	24.472.038	100	25.694.640	100	26.978.572	100	28.326.900	KECAMATAN RAYA
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN RAYA
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	29	100	90.055.000	100	49.681.746	100	52.163.803	100	54.770.369	100	57.507.669	KECAMATAN RAYA
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN RAYA
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%	42	-	-	100	39.769.382	100	41.756.226	100	43.842.737	100	46.033.899	KECAMATAN RAYA
	Kecamatan Ujung Padang														KECAMATAN UJUNG PADANG
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN UJUNG PADANG
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	46,9 (2023)	100	2.617.394.294	100	2.389.804.593	100	2.649.164.467	100	2.916.518.405	100	3.292.266.112	KECAMATAN UJUNG PADANG
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN UJUNG PADANG

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		-	-	100	7.240.296	100	7.602.015	100	7.981.879	100	8.380.795	KECAMATAN UJUNG PADANG
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN UJUNG PADANG
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	66,66 (TW III)	100	200.000.000	100	181.007.396	100	190.050.369	100	199.546.970	100	209.519.880	KECAMATAN UJUNG PADANG
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN UJUNG PADANG
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		-	-	100	15.757.430	100	16.544.657	100	17.371.375	100	18.239.558	KECAMATAN UJUNG PADANG
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN UJUNG PADANG
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	42	100	28.255.784	100	31.989.842	100	33.588.027	100	35.266.382	100	37.028.917	KECAMATAN UJUNG PADANG
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN UJUNG PADANG
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		-	-	100	25.607.318	100	26.886.637	100	28.230.132	100	29.641.010	KECAMATAN UJUNG PADANG

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kecamatan Pamatang Silimahuta														KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	100	100	1.987.546.469	100	2.137.463.475	100	2.244.249.298	100	2.356.391.883	100	2.474.159.067	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	3.000.000	100	4.851.666	100	5.094.052	100	5.348.595	100	5.615.906	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%		100	3.000.000	100	121.291.661	100	127.351.288	100	133.714.886	100	140.397.657	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%	100 (TW III)	100	3.000.000	100	10.558.932	100	11.086.447	100	11.640.425	100	12.222.187	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.	%	42	100	42.949.251	100	21.436.147	100	22.507.078	100	23.631.731	100	24.812.792	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	3.000.000	100	17.159.266	100	18.016.528	100	18.916.794	100	19.862.213	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
	Kecamatan Dolog Masagal														KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	37,39	100	1.489.132.328	100	1.596.206.775	100	1.675.951.883	100	1.759.697.292	100	1.847.643.018	KECAMATAN DOLOG MASAGAL

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		-	-	100	3.623.109	100	3.804.116	100	3.994.204	100	4.193.825	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%		-	-	100	90.577.722	100	95.102.906	100	99.855.090	100	104.845.624	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		-	-	100	7.885.159	100	8.279.095	100	8.692.792	100	9.127.238	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	%	66,66 (TW III)	100	21.360.000	100	16.008.003	100	16.807.749	100	17.647.613	100	18.529.602	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN DOLOG MASAGAL

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		-	-	100	12.814.131	100	13.454.314	100	14.126.611	100	14.832.627	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
	Kecamatan Dolok Silou														KECAMATAN DOLOK SILOU
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														KECAMATAN DOLOK SILOU
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	23	100	1.741.431.000	100	2.076.826.760	100	2.180.583.226	100	2.289.544.489	100	2.403.970.790	KECAMATAN DOLOK SILOU
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														KECAMATAN DOLOK SILOU
	Meningkatnya efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan publik	%		100	1.000.000	100	4.714.032	100	4.949.541	100	5.196.864	100	5.456.591	KECAMATAN DOLOK SILOU
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**														KECAMATAN DOLOK SILOU
	Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan	%		100	4.000.000	100	117.850.794	100	123.738.518	100	129.921.591	100	136.414.780	KECAMATAN DOLOK SILOU
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**														KECAMATAN DOLOK SILOU

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	%		100	1.000.000	100	10.259.391	100	10.771.941	100	11.310.203	100	11.875.461	KECAMATAN DOLOK SILOU
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**														KECAMATAN DOLOK SILOU
	Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	40.198.048	100	20.828.034	100	21.868.585	100	22.961.333	100	24.108.889	KECAMATAN DOLOK SILOU
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**														KECAMATAN DOLOK SILOU
	Terlaksananya aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan	%		100	1.000.000	100	16.672.483	100	17.505.426	100	18.380.152	100	19.298.751	KECAMATAN DOLOK SILOU
	Unsur Pemerintahan Umum														
8.01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**														BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**														BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Menguatnya kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%	34	100	4.518.246.745	100	7.226.029.154	100	8.686.953.577	100	9.170.999.627	100	10.679.323.387	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.02	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**														BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Menguatnya wawasan kebangsaan melalui kebijakan dan implementasi nilai-nilai Pancasila	Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	%	20	35	1.723.000.000	50	444.782.801	60	467.003.764	70	490.339.411	75	514.845.476	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**														BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Menguatnya demokrasi melalui pendidikan politik	Persentase lembaga politik yang berkontribusi dalam pendidikan politik	%	13	25	2.066.380.600	35	1.253.945.772	45	1.316.591.816	55	1.382.380.412	60	1.451.468.686	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**														BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Menguatnya peran organisasi masyarakat	Persentase organisasi masyarakat dan parpol yang diawasi	%	29	35	315.000.000	45	180.304.803	55	189.312.675	65	198.772.414	75	208.706.613	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**														BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Menguatnya ketahanan daerah melalui kebijakan dan pelaksanaan strategi pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan	Persentase potensi konflik yang difasilitasi	%	33	45	150.000.000	55	291.403.272	60	305.961.527	65	321.250.076	70	337.305.435	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Penanganan Konflik Sosial**														BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Terjaganya stabilitas wilayah melalui penguatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas penanganan konflik sosial	Persentase laporan hasil pemantauan terhadap orang asing dan tenaga kerja asing.	%	17	20	150.000.000	25	1.564.425.176	30	1.642.582.502	35	1.724.660.482	40	1.810.855.146	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL						3.042.429.086.677		3.059.038.269.073		3.211.417.231.181		3.372.261.135.855		3.539.849.151.747	

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis dan operasional, program perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah juga dilengkapi dengan proyeksi kebutuhan anggaran. Perhitungan pagu anggaran program dilakukan dengan menggunakan proyeksi kemampuan keuangan daerah berdasarkan estimasi APBD Kabupaten Simalungun untuk periode perencanaan yang telah disusun. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa program yang dirancang tidak hanya relevan secara substantif terhadap prioritas pembangunan daerah, tetapi juga realistis dan dapat diimplementasikan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah. Sejalan dengan prinsip kesinambungan pembangunan, rencana program perangkat daerah disusun untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah hingga tahun 2030. Oleh karena itu, program pada tahun 2030 merupakan bagian integral dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, sekaligus menjadi pijakan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030. Dengan demikian, program tahun 2030 tidak hanya menjadi bagian dari siklus perencanaan jangka menengah saat ini, tetapi juga menjadi tanggung jawab awal bagi kepala daerah terpilih pada periode pemerintahan 2030–2034. Selanjutnya, penjelasan mengenai masing-masing program akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

IV.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

IV.1.1.1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal. Pelaksanaannya mencakup manajemen operasional satuan pendidikan serta penguatan sistem pendataan dan pelaporan. Program ini mendukung tercapainya pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini dilaksanakan untuk menyusun dan menetapkan kurikulum muatan lokal yang relevan dengan potensi daerah. Penyesuaian kurikulum dilakukan untuk menjawab kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Pelaksanaan program mencakup koordinasi lintas sektor dan pelatihan pendidik.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini ditujukan untuk pemerataan distribusi dan peningkatan kapasitas pendidik serta tenaga kependidikan. Kegiatan meliputi pelatihan, sertifikasi, serta rekrutmen dan pendataan tenaga pendidik. Tujuannya adalah

memastikan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten di seluruh satuan pendidikan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini mencakup pengaturan dan pengawasan perizinan lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat. Melalui penerbitan izin, diharapkan lembaga pendidikan dapat beroperasi sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan. Program ini juga menjadi instrumen pengendali kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini bertujuan melestarikan dan mengembangkan bahasa serta sastra daerah sebagai warisan budaya. Kegiatan meliputi pembinaan komunitas bahasa, penerbitan karya sastra lokal, dan penguatan peran bahasa daerah dalam pendidikan. Program ini penting untuk menjaga identitas budaya di tingkat kabupaten.

IV.1.1.2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk menjamin tersedianya layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penguatan fasilitas UKP dan UKM. Kegiatan mencakup penyediaan sarana prasarana, perizinan rumah sakit, serta pengelolaan sistem informasi kesehatan. Tujuan utama adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara merata.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini fokus pada penguatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan. Pelaksanaannya mencakup perencanaan kebutuhan SDM, pelatihan, sertifikasi, serta penerbitan izin praktik. Program ini mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini bertujuan menjamin ketersediaan dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman. Pengawasan dilakukan melalui perizinan usaha, inspeksi, sertifikasi, dan pengendalian pasca-produksi. Program ini mendukung perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk tidak layak konsumsi atau pakai.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini bertujuan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Kegiatan meliputi advokasi, penguatan kemitraan, promosi kesehatan, serta pengembangan dan pelaksanaan UKBM. Program ini penting untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri.

IV.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini bertujuan menjamin keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya air secara optimal. Kegiatan mencakup pengelolaan wilayah sungai, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan sistem irigasi skala kecil. Program ini mendukung ketahanan air dan produktivitas pertanian masyarakat.

b. Program Pengelolaan dan Pengembagan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air minum bagi masyarakat. Kegiatan meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan SPAM. Tujuannya adalah menjamin akses air minum aman dan layak secara berkelanjutan.

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini bertujuan meningkatkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Fokus kegiatan mencakup pembangunan infrastruktur, pengelolaan TPA, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Program ini mendukung terciptanya lingkungan bersih dan sehat.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan pengelolaan air limbah domestik. Kegiatan meliputi pembangunan infrastruktur IPAL, sistem pengumpulan, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Program ini penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat.

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini bertujuan mencegah genangan dan banjir melalui pengelolaan sistem drainase yang terkoneksi dengan sungai. Kegiatan meliputi pembangunan saluran drainase, rehabilitasi, dan pemeliharaan berkala. Program ini mendukung pengurangan risiko bencana hidrometeorologi di kawasan permukiman.

f. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan untuk pengaturan pembangunan gedung agar sesuai dengan standar teknis dan keselamatan. Kegiatan meliputi perizinan bangunan (IMB), pengawasan konstruksi, dan penerbitan sertifikat laik fungsi. Program ini memastikan bangunan aman, layak huni, dan sesuai tata ruang.

g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini mendukung keteraturan, kenyamanan, dan keindahan lingkungan binaan melalui penataan kawasan bangunan. Kegiatan meliputi pengendalian estetika, fungsi ruang, serta integrasi bangunan dengan lingkungan sekitar. Program ini juga berperan menjaga identitas kawasan kota dan permukiman.

h. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas jalan di wilayah Kabupaten Simalungun. Fokus kegiatan adalah pada peningkatan konektivitas dan kelancaran transportasi. Program ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas antar wilayah.

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pelaku jasa konstruksi lokal. Kegiatan mencakup pelatihan tenaga kerja, pengelolaan data usaha, serta pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Program ini juga mendorong daya saing sektor konstruksi di daerah.

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan untuk mewujudkan tata ruang yang tertib, efisien, dan berkelanjutan. Kegiatan meliputi penetapan RTRW dan RRTR, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Program ini menjadi dasar perencanaan pembangunan lintas sektor di daerah.

IV.1.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan mencakup pembangunan, rehabilitasi, dan distribusi rumah untuk korban bencana, relokasi, serta pembangunan rumah susun. Program ini juga mencakup pengaturan perizinan pembangunan dan kepemilikan rumah.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penataan dan penanganan kawasan permukiman, termasuk kawasan kumuh di bawah 10 hektar. Kegiatan mencakup perizinan, peningkatan infrastruktur, dan penataan ruang permukiman. Program ini mendukung terciptanya kawasan hunian yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan untuk mencegah dan mengurangi pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman kumuh. Pendekatan dilakukan melalui upaya promotif, preventif, dan kolaboratif bersama masyarakat. Program ini mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan berisiko tinggi.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini bertujuan menyediakan dan meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dalam kawasan perumahan. Kegiatan meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, dan penerangan jalan. Program ini mendukung kenyamanan dan kelayakan hunian masyarakat.

IV.1.1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib melalui pengendalian gangguan ketenteraman. Kegiatan mencakup penegakan Perda, operasi ketertiban, serta pembinaan dan penguatan kapasitas PPNS. Program ini mendukung stabilitas sosial dan perlindungan hak masyarakat.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana di daerah. Kegiatan meliputi pelayanan informasi, penyusunan rencana kontingensi, penyelamatan korban, dan rehabilitasi pasca-bencana. Program ini memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam manajemen bencana secara terpadu.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan untuk mencegah dan menangani kejadian kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran secara cepat dan efektif. Kegiatan meliputi pengendalian dan pemadaman kebakaran, inspeksi, investigasi, serta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini juga mendukung operasi pencarian dan pertolongan di wilayah rawan.

IV.1.1.6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian kelompok rentan dan komunitas adat terpencil melalui penguatan kapasitas sosial. Kegiatan meliputi pengelolaan bantuan sosial, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, serta penguatan kelembagaan sosial. Program ini mendukung inklusi sosial dan pengentasan kemiskinan.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini bertujuan memberikan perlindungan dan pemulihan bagi warga negara migran yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran HAM. Kegiatan mencakup identifikasi korban, layanan pendampingan, bantuan hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Seluruh upaya diarahkan untuk menjamin hak-hak dasar dan keselamatan warga negara migran, serta memperkuat sistem perlindungan di Kabupaten Simalungun.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial bagi kelompok rentan dan terlantar. Sasaran program meliputi penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia, gelandangan, pengemis, serta PMKS lainnya di luar panti.

Program ini bertujuan memulihkan fungsi sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini ditujukan untuk memberikan perlindungan dasar dan jaminan sosial bagi kelompok rentan, terutama anak terlantar dan fakir miskin. Kegiatan meliputi pemeliharaan, pendataan, dan penyaluran bantuan. Program ini mendukung pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi korban bencana alam maupun bencana sosial. Kegiatan mencakup penyediaan bantuan darurat, pendampingan pemulihan, serta pelatihan kesiapsiagaan masyarakat. Program ini memperkuat ketahanan sosial masyarakat terhadap risiko bencana.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini bertujuan menjaga kelestarian, kerapihan, dan kehormatan Taman Makam Pahlawan sebagai tempat penghormatan bagi para pahlawan bangsa. Kegiatan mencakup pemeliharaan fisik makam dan fasilitas pendukung, pendataan dan penataan administrasi, serta penyelenggaraan upacara dan kegiatan penghormatan. Seluruh upaya diarahkan untuk menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan dan memperkuat semangat nasionalisme di Kabupaten Simalungun.

IV.1.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

IV.1.2.1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan untuk menyusun perencanaan tenaga kerja yang terpadu dan berbasis data melalui penyusunan informasi pasar kerja, proyeksi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja, analisis ketenagakerjaan, serta pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten Simalungun guna mendukung kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi. Kegiatan mencakup pembinaan lembaga pelatihan, konsultansi produktivitas, serta pengukuran produktivitas. Seluruh upaya diarahkan untuk mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Simalungun.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini difokuskan untuk meningkatkan akses dan peluang kerja, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Dilaksanakan melalui pelayanan antar kerja, pengelolaan informasi pasar kerja, pengaturan LPTKS, dan pelindungan PMI. Pelayanan ini dilaksanakan secara terpadu di Kabupaten Simalungun.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini ditujukan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Dicapai melalui penyusunan regulasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Upaya ini memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja dan pengusaha.

IV.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini bertujuan mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan melalui pelembagaan PUG. Selain itu, dilakukan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Seluruh kegiatan dilakukan pada level Kabupaten Simalungun untuk mewujudkan kesetaraan gender.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Meliputi upaya pencegahan, penyediaan layanan rujukan, serta penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan. Seluruh kegiatan difokuskan pada kebutuhan di Kabupaten Simalungun.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui penguatan nilai kesetaraan gender dan perlindungan hak anak. Dilakukan dengan mengembangkan lembaga layanan dan penyediaan layanan terpadu. Sasaran utama adalah keluarga-keluarga di wilayah Kabupaten Simalungun.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini fokus pada pengelolaan data gender dan anak secara terstruktur dan berkelanjutan. Kegiatan meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dalam kerangka kelembagaan. Dilaksanakan di Kabupaten Simalungun sebagai dasar pengambilan kebijakan.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh di berbagai sektor. Melalui pelembagaan prinsip-prinsip PHA dan penguatan lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak. Program ini dilaksanakan secara terpadu di Kabupaten Simalungun.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini bertujuan memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi khusus melalui pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. Kegiatan mencakup pelayanan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, disabilitas, konflik hukum, dan bencana. Seluruh upaya diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di Kabupaten Simalungun.

IV.1.2.3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini dilaksanakan untuk mengatasi kerawanan pangan di Kabupaten Simalungun. Fokus utamanya adalah pemetaan wilayah rawan pangan dan penyediaan bantuan pangan. Langkah ini bertujuan memastikan akses pangan bagi masyarakat rentan.

b. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini difokuskan pada pengawasan keamanan pangan segar di Kabupaten Simalungun. Kegiatan mencakup inspeksi, pengujian mutu, dan

edukasi pelaku usaha pangan. Tujuannya adalah menjamin pangan yang aman dan layak konsumsi bagi masyarakat.

IV.1.2.4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Program ini bertujuan menjamin ketersediaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik melalui proses pengadaan tanah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pengadaan tanah. Seluruh upaya diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan kepentingan umum di Kabupaten Simalungun.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini bertujuan menyelesaikan berbagai sengketa atas tanah garapan di Kabupaten Simalungun. Penyelesaian dilakukan melalui mediasi, fasilitasi hukum, dan penetapan hak penguasaan. Hal ini untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah konflik sosial.

c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini mendukung proses pembangunan dengan memberikan ganti kerugian dan santunan atas tanah masyarakat yang digunakan. Pelaksanaannya memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi. Tujuannya adalah memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat.

d. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah Absente

Program ini bertujuan mendukung pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah melalui redistribusi tanah serta penyelesaian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente. Kegiatan mencakup identifikasi, penataan, pemberian hak atas tanah, dan pembayaran ganti kerugian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh upaya diarahkan untuk menciptakan keadilan agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Simalungun.

e. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program ini diarahkan pada pendataan, inventarisasi, dan pemanfaatan tanah kosong di wilayah Kabupaten Simalungun. Langkah ini penting untuk optimalisasi aset daerah dan mendorong kegiatan produktif. Pengelolaan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

c. Program Penatagunaan Tanah

Program ini bertujuan menata pemanfaatan tanah agar sesuai dengan peruntukannya dalam satu wilayah Kabupaten Simalungun. Kegiatan mencakup pengaturan zonasi dan pengendalian penggunaan lahan. Tujuannya adalah menciptakan keterpaduan pembangunan wilayah.

IV.1.2.5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Kabupaten Simalungun. RPPLH menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penyusunan dilakukan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Fokus utamanya adalah menjaga kualitas air, udara, dan tanah. Pelaksanaan program mencakup pengawasan dan penerapan sanksi lingkungan.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini ditujukan untuk melindungi dan mengelola keanekaragaman hayati di Kabupaten Simalungun. Kegiatan mencakup konservasi spesies, ekosistem, dan sumber daya genetik lokal. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan ekologi dan nilai ekonomi biodiversitas.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini fokus pada pengendalian B3 dan limbah B3 melalui pengawasan, penyimpanan sementara, dan pengumpulan di wilayah Kabupaten Simalungun. Tujuannya adalah mencegah dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan untuk memastikan ketaatan terhadap izin lingkungan dan PPLH yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Simalungun. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan. Tujuannya adalah menjamin kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Kegiatan mencakup pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan oleh lembaga kemasyarakatan. Fokusnya adalah pembentukan perilaku ramah lingkungan secara berkelanjutan.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini memberikan apresiasi kepada masyarakat atau kelompok yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Penghargaan diberikan sebagai bentuk motivasi dan pengakuan atas praktik baik. Kegiatan ini juga mendorong replikasi inovasi lingkungan.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini menyediakan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat terkait isu lingkungan hidup. Pengaduan ditindaklanjuti melalui verifikasi, investigasi, dan penyelesaian sesuai ketentuan. Tujuannya adalah menjamin hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini mencakup pengangkutan, pemrosesan akhir, dan pendaurulangan sampah, termasuk pengawasan atas peran pihak swasta. Fokus

utamanya adalah mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat. Program ini juga mendukung pengurangan volume sampah ke TPA.

IV.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi data pendaftaran penduduk. Kegiatan meliputi pelayanan pembuatan dokumen kependudukan serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Program ini mendukung tersedianya data penduduk yang valid dan terkini.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini dilaksanakan untuk memastikan hak-hak sipil masyarakat melalui pelayanan pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Penyelenggaraan dilakukan secara tertib, akurat, dan akuntabel. Program ini juga mencakup pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini bertujuan mengelola data dan informasi kependudukan secara sistematis dan terintegrasi. Kegiatan mencakup pengumpulan, pemanfaatan, penyajian, dan penataan informasi administrasi kependudukan. Tujuannya adalah mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan untuk menyusun profil kependudukan yang mencerminkan dinamika penduduk di Kabupaten Simalungun. Profil disusun berdasarkan data terkini, proyeksi penduduk, serta analisis kebutuhan pembangunan. Hasilnya digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang responsif terhadap isu demografi.

IV.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini bertujuan memperkuat kerja sama antar desa dan dengan pihak ketiga melalui fasilitasi yang mendorong sinergi pembangunan perdesaan. Kegiatan mencakup pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan desa.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas administrasi pemerintahan desa agar tertib dan akuntabel. Kegiatan mencakup pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini ditujukan untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa. Kegiatan mencakup fasilitasi, pelatihan, dan dukungan terhadap kelembagaan yang ada di tingkat desa. Program ini mendorong pelestarian nilai-nilai lokal dan kearifan budaya dalam pembangunan.

IV.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini bertujuan mengendalikan jumlah dan distribusi penduduk melalui kebijakan yang terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan Kabupaten Simalungun. Kegiatan mencakup pemetaan dan sinkronisasi upaya pengendalian kuantitas penduduk. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung wilayah.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Program ini diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana melalui edukasi dan pelayanan KB. Kegiatan meliputi advokasi, pendayagunaan penyuluh, penyediaan alat dan obat kontrasepsi, serta keterlibatan organisasi masyarakat. Program ini menyesuaikan pendekatan dengan kearifan lokal dan kondisi wilayah.

c. Program Pemberdayaan dana Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini bertujuan membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan yang berkelanjutan. Kegiatan mencakup peningkatan kapasitas keluarga dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten Simalungun. Program ini mendukung terwujudnya keluarga yang tangguh, mandiri, dan berkualitas.

IV.1.2.9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas serta angkutan jalan di wilayah Kabupaten Simalungun. Kegiatan mencakup penyusunan rencana induk jaringan transportasi, pengelolaan terminal tipe C, penyediaan perlengkapan jalan, hingga pengujian kendaraan bermotor. Program ini juga mencakup pemberian izin parkir, penetapan tarif dan trayek, serta persetujuan Andalalin.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini bertujuan menjamin keselamatan, kelancaran, dan keamanan transportasi laut melalui pengaturan lalu lintas pelayaran, pengawasan keselamatan kapal, serta peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan. Kegiatan mencakup pengawasan kelaiklautan kapal, pengelolaan trayek, dan pelayanan jasa kepelabuhanan. Seluruh upaya diarahkan untuk mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi maritim di Kabupaten Simalungun.

IV.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem komunikasi publik dan pelayanan informasi antar perangkat daerah. Fokus utama program meliputi pengelolaan jaringan intra, penanganan pengaduan masyarakat, dan optimalisasi data center daerah. Dengan program ini, diharapkan penyebaran informasi pemerintah menjadi lebih efektif dan responsif.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini mendukung pengelolaan sistem e-government melalui pengaturan nama domain dan subdomain di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan mencakup pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik berbasis digital secara terintegrasi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah.

IV.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi di Kabupaten Simalungun. Kegiatan meliputi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas. Dengan program ini, legalitas dan kepatuhan koperasi dapat terjamin.

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini dilaksanakan untuk menjamin operasional koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan terhadap koperasi, koperasi simpan pinjam, dan unit simpan pinjam koperasi di wilayah Kabupaten Simalungun. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja koperasi.

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini bertujuan untuk menilai kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Penilaian dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi operasional dan keuangan koperasi. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengambilan keputusan.

d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pendidikan dan pelatihan. Kegiatan ditujukan bagi pengelola koperasi di wilayah Kabupaten Simalungun. Tujuannya adalah memperkuat tata kelola dan pengelolaan koperasi secara profesional.

e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini dilaksanakan untuk memperkuat kemandirian koperasi melalui upaya pemberdayaan dan perlindungan. Kegiatan mencakup pembinaan

kelembagaan dan perlindungan hukum koperasi di Kabupaten Simalungun. Program ini diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan koperasi.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini bertujuan untuk memperkuat UMKM melalui fasilitasi pendataan, kemitraan, dan akses perizinan. Kegiatan juga mencakup pembentukan mekanisme kepemilikan saham LKM dari APBD, serta pemberdayaan UMKM dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu, program mendukung kemitraan rantai pasok antara usaha besar dan UMKM untuk mempercepat skala usaha.

g. Program Pengembangan UMKM

Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro agar berkembang menjadi usaha kecil. Kegiatan difokuskan pada pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas usaha. Hal ini dilakukan agar UMKM dapat bersaing dan berdaya tahan secara berkelanjutan.

h. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

Program ini bertujuan meningkatkan legalitas dan kelembagaan koperasi melalui fasilitasi pembentukan, pengesahan, dan pembinaan koperasi berbadan hukum. Kegiatan mencakup pendampingan penyusunan anggaran dasar, penyuluhan kelembagaan, serta pemutakhiran data koperasi. Seluruh upaya diarahkan untuk memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di Kabupaten Simalungun.

IV.1.2.12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyusunan kebijakan insentif dan peta potensi investasi. Kegiatan juga meliputi fasilitasi proyek infrastruktur strategis dan pembentukan BUMD. Program ini mendukung peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi daerah.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mempromosikan potensi investasi daerah kepada investor dalam dan luar negeri. Kegiatan mencakup pameran, publikasi,

dan forum investasi di Kabupaten Simalungun. Tujuannya adalah menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini menyediakan pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal melalui sistem satu pintu. Pelayanan dilakukan secara terpadu dan efisien untuk mendukung iklim investasi daerah. Program ini juga bertujuan meningkatkan kepuasan investor dan efektivitas birokrasi.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan untuk memastikan kegiatan penanaman modal berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan mencakup monitoring, evaluasi, dan penegakan kepatuhan investor di tingkat daerah. Hal ini dilakukan guna menjaga integritas iklim investasi.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk menyediakan data investasi yang akurat dan terkini di Kabupaten Simalungun. Kegiatan mencakup integrasi data perizinan dan pengelolaan sistem informasi penanaman modal. Program ini mendukung transparansi dan pengambilan kebijakan berbasis data.

IV.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini bertujuan untuk membina dan memberdayakan pemuda melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan organisasi kepemudaan. Fokus kegiatan meliputi wirausaha muda, pemuda pelopor, dan kaderisasi pemuda. Tujuannya adalah menciptakan pemuda yang produktif dan berdaya saing.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan untuk mengembangkan olahraga pendidikan, prestasi, dan rekreasi di Kabupaten Simalungun. Kegiatan mencakup pembinaan atlet, penyelenggaraan kejuaraan, dan dukungan terhadap organisasi olahraga. Tujuannya adalah meningkatkan prestasi olahraga daerah.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini bertujuan membina organisasi kepramukaan sebagai sarana pengembangan karakter dan kepemimpinan generasi muda. Kegiatan mencakup pelatihan, pembinaan gugus depan, dan dukungan kegiatan pramuka. Dengan program ini, diharapkan peran pramuka dalam pembangunan daerah semakin optimal.

IV.1.2.14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan untuk menyusun dan mengelola data statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Simalungun. Data yang dihasilkan digunakan sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan daerah. Program ini mendukung keterpaduan dan akurasi informasi pembangunan.

IV.1.2.15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini bertujuan untuk menjaga keamanan informasi dan komunikasi antar perangkat daerah. Kegiatan meliputi penerapan sistem persandian dan pengelolaan pola hubungan sandi. Hal ini penting untuk melindungi data strategis pemerintah daerah dari ancaman siber.

IV.1.2.16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini dilaksanakan untuk membina dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal melalui pengelolaan lembaga adat dan pelestarian kesenian. Kegiatan difokuskan pada penguatan identitas budaya daerah. Tujuannya adalah menjaga keberagaman budaya sebagai kekuatan pembangunan.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini bertujuan melestarikan dan memajukan kesenian tradisional yang tumbuh dari masyarakat. Kegiatan mencakup pembinaan kelompok seni,

pelatihan, dan pertunjukan budaya. Dengan demikian, kesenian daerah tetap lestari dan berkembang secara berkelanjutan.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sejarah lokal. Kegiatan mencakup dokumentasi sejarah, pendidikan sejarah lokal, dan pelibatan masyarakat. Tujuannya adalah memperkuat identitas dan kecintaan terhadap daerah.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan untuk melindungi dan mengelola cagar budaya agar tetap terjaga keasliannya. Kegiatan meliputi penetapan cagar budaya, izin pelestarian, serta pengelolaan zonasi. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan warisan budaya daerah.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini bertujuan mengelola museum sebagai pusat pelestarian dan edukasi sejarah serta budaya lokal. Kegiatan mencakup pemeliharaan koleksi, kurasi pameran, dan peningkatan layanan pengunjung. Museum diharapkan menjadi sarana pembelajaran dan pelestarian identitas daerah.

IV.1.2.17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan perpustakaan di Kabupaten Simalungun. Kegiatan mencakup pengembangan koleksi, promosi budaya membaca, dan peningkatan literasi masyarakat. Tujuannya adalah memperkuat budaya literasi dan mendukung pembangunan berbasis pengetahuan**.**

IV.1.2.18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini bertujuan untuk mengelola arsip dinamis dan statis secara terstruktur dan berkelanjutan. Kegiatan mencakup pembinaan dan pengawasan

kearsipan pada perangkat daerah dan BUMD. Hal ini dilakukan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tertib dokumen.

b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program ini bertujuan untuk melindungi arsip dari risiko kehilangan, kerusakan, dan bencana. Kegiatan mencakup pemusnahan arsip retensi pendek, penyelamatan arsip dari OPD yang dibubarkan, serta pencarian arsip hilang. Program ini juga memastikan keaslian arsip melalui autentikasi dan alih media.

IV.1.3. Urusan Pilihan

IV.1.3.1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap melalui pengelolaan sumber daya ikan, pembinaan nelayan, dan pengawasan kegiatan penangkapan. Kegiatan mencakup penyediaan sarana prasarana tangkap, pemberdayaan kelompok nelayan, serta pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan. Seluruh upaya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Simalungun.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya melalui penerbitan izin usaha dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil. Kegiatan mencakup penerbitan tanda daftar serta pengawasan kegiatan budidaya ikan agar berjalan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha perikanan daerah.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini bertujuan menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengawasan pemanfaatan sumber daya, penegakan hukum, dan pencegahan praktik ilegal. Kegiatan mencakup patroli pengawasan, sosialisasi peraturan, serta penindakan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Seluruh upaya diarahkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Simalungun.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini bertujuan untuk mendorong nilai tambah komoditas perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kegiatan mencakup penguatan

mutu produk, pembukaan akses pasar, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha sehingga memperluas peluang ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal. Hal ini dilakukan untuk mendukung penguatan rantai nilai hasil perikanan melalui pembinaan mutu dan keamanan produk, serta penerbitan tanda daftar usaha.

IV.1.3.2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan destinasi unggulan di Kabupaten Simalungun. Kegiatan mencakup pengelolaan kawasan strategis pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha dan penyusunan rencana induk pariwisata. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya saing destinasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pemasaran destinasi wisata di dalam dan luar negeri. Kegiatan mencakup pemasaran yang dilakukan melalui promosi, publikasi, serta kerja sama dengan pelaku industri pariwisata. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya dan produk kreatif masyarakat. Kegiatan mencakup fasilitasi pendaftaran HKI, edukasi literasi HKI, pendampingan pelaku ekonomi kreatif, serta promosi produk berbasis kekayaan intelektual. Seluruh upaya diarahkan untuk meningkatkan daya saing, inovasi, dan keberlanjutan ekonomi kreatif di Kabupaten Simalungun.

c. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kegiatan mencakup pelatihan, pembinaan, serta pendampingan kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Hal ini dilakukan untuk mendorong profesionalitas, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata daerah secara berkelanjutan.

IV.1.3.3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan sektor pertanian daerah. Kegiatan mencakup pengawasan dan penyediaan sarana produksi pertanian, pengelolaan sumber daya genetik, serta peningkatan mutu dan distribusi benih maupun bibit ternak. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan sistem pertanian yang efisien, adaptif, dan berdaya saing di tingkat daerah.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan usaha pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kegiatan mencakup pembangunan prasarana pertanian, seperti lahan penggembalaan umum dan wilayah sumber bibit ternak, serta pengelolaan sarana tersebut guna mendukung penguatan sistem produksi pertanian. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem pertanian yang berdaya tahan dan mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi para petani.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan untuk menjamin kesehatan hewan dan melindungi masyarakat dari risiko penyakit zoonosis. Kegiatan mencakup pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan, penyediaan layanan medis, serta penguatan laboratorium veteriner untuk mendukung upaya pengendalian dan pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan guna memastikan sistem kesehatan masyarakat veteriner yang terpadu dan berkelanjutan.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas produksi pertanian di daerah. Kegiatan mencakup deteksi dini, mitigasi, serta respons cepat terhadap bencana yang berdampak pada sektor pertanian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana secara efektif, sehingga sistem pertanian daerah tetap tangguh dan berkelanjutan.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian yang tertib dan berdaya saing. Kegiatan mencakup penerbitan izin usaha pertanian, yang meliputi produksi benih, pemeliharaan hewan, serta fasilitas pendukung seperti rumah potong dan pasar hewan. Hal ini dilakukan untuk menjamin legalitas dan kelayakan usaha, sehingga iklim usaha pertanian menjadi lebih teratur, transparan, dan kompetitif.

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk memperkuat produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian. Kegiatan mencakup penyuluhan yang terstruktur dan berkelanjutan kepada petani, dengan materi meliputi teknik budidaya, manajemen usaha tani, serta pemanfaatan teknologi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petani agar mampu menghadapi tantangan pertanian modern secara lebih adaptif dan efektif.

IV.1.3.4. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang tertib dan aman di Kabupaten Simalungun. Kegiatan mencakup penerbitan izin usaha perdagangan, pendaftaran gudang dan waralaba, serta pengawasan distribusi bahan berbahaya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini bertujuan untuk memperlancar arus barang dan meningkatkan akses pasar di daerah. Kegiatan mencakup pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi, seperti pasar rakyat dan pusat logistik, serta pembinaan kepada pengelola sarana distribusi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendukung sistem distribusi yang efisien, merata, dan berdaya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

c. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang

Program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar. Kegiatan mencakup pengawasan terhadap

distribusi pupuk, pestisida, serta barang penting lainnya yang berpengaruh langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjamin akses yang adil dan merata terhadap barang pokok dengan harga yang wajar, sekaligus menjaga keseimbangan antara sisi produksi dan konsumsi.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi ekspor terhadap perekonomian daerah. Kegiatan mencakup promosi, pameran, dan misi dagang yang mendorong pelaku usaha daerah untuk menembus pasar ekspor, dengan fokus pada produk unggulan yang memiliki daya saing internasional. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperkuat posisi daerah dalam perdagangan global.

e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program ini bertujuan untuk membangun kepercayaan konsumen dan pelaku usaha terhadap sistem perdagangan daerah. Kegiatan mencakup pelaksanaan metrologi legal, seperti tera dan tera ulang, untuk memastikan ketepatan alat ukur serta perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan untuk menjamin keadilan dalam transaksi, memastikan standar yang konsisten, dan mendukung transparansi dalam perdagangan daerah.

IV.1.3.5. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencana dan Pembangunan Industri

Program ini bertujuan untuk menciptakan industri yang tumbuh secara terencana dan berkelanjutan. Kegiatan mencakup penyusunan dan penerapan rencana pembangunan industri di Kabupaten Simalungun, serta evaluasi terhadap implementasi rencana tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan untuk mendorong perkembangan industri yang efisien, berdaya saing, dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian daerah.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor industri yang berbasis regulasi. Kegiatan mencakup penerbitan izin usaha industri dan kawasan industri untuk memastikan bahwa aktivitas industri berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan

efisiensi dalam pembangunan industri, sehingga sektor industri berkembang secara teratur dan berkelanjutan.

e. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini bertujuan mendukung pengelolaan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Kegiatan meliputi fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisis, serta diseminasi data industri dan kawasan industri di lingkup kabupaten/kota. Selain itu, program ini memastikan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data ke SIINas untuk mendukung kebijakan pembangunan industri yang akurat dan berkelanjutan.

IV.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

IV.1.4.1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas organisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan mencakup berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melalui penguatan kapasitas lembaga dan sistem administrasi pemerintahan yang lebih efisien. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan sosial. Kegiatan mencakup penguatan sistem administrasi pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat, serta fasilitasi koordinasi hukum dan kerja sama daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program-program pemerintah berjalan dengan efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

c. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan mencakup pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah, pengelolaan administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa. Hal ini dilakukan untuk mengawasi kebijakan sumber daya alam

untuk memastikan pemanfaatannya yang optimal dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah.

IV.1.4.2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan mencakup dukungan dalam pembentukan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD, menyerap aspirasi masyarakat, melaksanakan kode etik DPRD, dan memfasilitasi kerja sama daerah di tingkat Kabupaten/Kota, untuk memastikan keterlibatan aktif DPRD dalam pembangunan daerah yang lebih baik.

IV.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

IV.1.5.1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk mendukung proses penyusunan rencana pembangunan dan pendanaannya. Kegiatan mencakup analisis data pemerintahan, pengendalian, serta pelaporan implementasi pembangunan melalui sistem informasi daerah yang terintegrasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan secara efisien, terkontrol, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang terkoordinasi dan sinergis di tingkat daerah. Kegiatan mencakup penyelarasan perencanaan di berbagai sektor, seperti pemerintahan, sumber daya manusia, ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan integrasi antar sektor yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

IV.1.5.2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen keuangan daerah. Kegiatan mencakup penyusunan anggaran, pengelolaan kas, akuntansi dan pelaporan, serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel, mendukung kelancaran operasional pemerintahan dan pembangunan daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan aset daerah secara efisien. Kegiatan mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap barang milik daerah untuk memastikan aset daerah dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah. Kegiatan ini akan mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah melalui optimasi pengelolaan pendapatan daerah yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

IV.1.5.3. Kepegawaian

Rencana program prioritas pada unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen ASN secara profesional. Kegiatan mencakup pengadaan, pemberhentian, mutasi, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas aparatur negara yang kompeten dan adaptif, guna mendukung efektifitas pemerintahan.

IV.1.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas pada unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur dan tenaga kerja daerah. Kegiatan mencakup pelatihan teknis, sertifikasi, penguatan manajerial, dan kelembagaan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang kompeten, adaptif, dan memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan pembangunan.

IV.1.5.5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas pada unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program ini bertujuan untuk memperkuat perumusan kebijakan dan strategi pembangunan. Kegiatan mencakup penelitian dan inovasi lintas sektor untuk mendukung kebijakan pembangunan yang berbasis data dan riset. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Program Riset dan Inovasi Daerah

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas daerah dalam menghasilkan kebijakan dan solusi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Kegiatan mencakup fasilitasi penelitian terapan, pengembangan inovasi daerah, kolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi, serta diseminasi hasil riset. Seluruh upaya diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Simalungun.

IV.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

IV.1.6.1. Inspektorat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan efektif. Kegiatan mencakup pengawasan internal dan audit tematik dalam rangka mencegah penyimpangan serta meningkatkan kinerja pemerintahan di tingkat daerah.

b. Program Urusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui pemberian pendampingan, asistensi teknis, dan fasilitasi kebijakan kepada perangkat daerah. Kegiatan mencakup penyusunan pedoman, bimbingan teknis, supervisi program, serta evaluasi implementasi kebijakan. Seluruh upaya diarahkan untuk memastikan konsistensi, efektivitas, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Simalungun.

IV.1.7. Unsur Kewilayahan

IV.1.7.1. Kecamatan

Rencana program prioritas pada unsur kewilayahan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan mencakup koordinasi, pengelolaan fasilitas, dan pelaksanaan tugas pemerintahan yang didelegasikan kepada kecamatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan mencakup pemberdayaan desa dan kelurahan, penguatan lembaga kemasyarakatan, dan sinergi kebijakan pembangunan lokal. Hal ini dilakukan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berbasis pada kebutuhan setempat.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Kegiatan mencakup koordinasi pelaksanaan ketenteraman umum, penegakan aturan, dan harmonisasi kebijakan hukum di tingkat lokal. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan keamanan di tingkat daerah.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum. Kegiatan mencakup fasilitasi, rekomendasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah di tingkat desa dan kelurahan.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pembinaan aparatur desa didorong untuk memahami dan menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan. Kegiatan pengawasan dilakukan guna mencegah potensi penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

IV.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

IV.1.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan kesatuan bangsa dan politik adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk memperkuat wawasan kebangsaan melalui kebijakan dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Kegiatan mencakup penyuluhan dan pelatihan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik

Program ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi melalui pendidikan politik. Kegiatan mencakup pembinaan etika, pengembangan budaya politik partisipatif, dan kerjasama antara partai politik dan institusi pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini bertujuan untuk memperkuat peran organisasi masyarakat. Kegiatan mencakup pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat untuk mendukung ketertiban sosial dan partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dalam proses pembangunan.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan daerah melalui kebijakan dan pelaksanaan strategi pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan budaya di daerah.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas wilayah melalui penguatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas penanganan konflik sosial. Kegiatan ini mencakup penguatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial secara komprehensif dan responsif. Hal ini dilakukan untuk memastikan terciptanya ketertiban dan keharmonisan sosial di daerah.

IV.2. Kinerja Penyelenggaraan Daerah

IV.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, selaras dengan visi dan misi kepala daerah. IKU ditentukan berdasarkan analisis terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta hasil penjenjangan kinerja untuk memastikan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun periode 2025-2030. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, IKU untuk 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel IV.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Simalungun

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
1	Tingkat Kemiskinan	%	7,57	7,34	6,88	6,41	5,95	5,72	
2	Gini Rasio	Rasio	0,29	0,289	0,286	0,282	0,279	0,277	
3	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2Eq	173.083,31	196.427,81	224.109,15	256.395,70	288.934,62	325.768,62	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,46	74,64	74,81	74,98	75,15	75,42	
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,35	76,99	77,63	78,27	78,91	79,22	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,12	5,09	4,98	4,88	4,77	4,72	
7	PDRB Perkapita	Rp Juta	58,3	78,09	101,88	125,67	149,46	161,36	
8	Kontribusi PDRB Kab/Kota	%	5,17	5,172	5,173	5,174	5,175	5,176	
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37	5,31	5,37	5,42	5,47	5,5	
10	Indeks Integritas Nasional	Indeks	73,00	74,20	76,50	77,50	78,50	80,00	
11	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,55	53,95	56,36	58,76	61,17	62,37	
12	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,30	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	
13	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE	Indeks	2,72	2,842	2,964	3,086	3,208	3,268	
14	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,532	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,67	66,5	68,5	70,8	73,2	75,5	

16	Indeks SAKIP	Indeks	54	57	60	62	64	66	
17	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	72,5	74	75,5	77	78,5	80	
19	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	55,79	56	56,42	56,7	57,05	57,4	
20	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
21	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
22	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1	%	80%	81%	82%	83%	84%	85%	
23	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	4,88	5	5,15	5,3	5,45	5,6	
24	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,82	3,84	3,87	3,89	3,92	3,93	
25	Jumlah Industri Kecil Menengah	Angka	9.054	9.056	9.058	9.060	9.062	9.064	
26	PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	0,88	0,95	1,02	1,08	1,15	1,18	
27	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	30,56	41,67	52,78	63,89	75,00	86,11	
28	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	10,2	10,01	10,23	10,44	10,65	10,76	
29	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,12	13,22	13,31	13,41	13,51	13,56	
30	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,41	74,47	74,8	75,13	75,47	75,63	

31	Indek Daya Saing Daerah	Indeks	3,59	3,66	3,73	3,8	3,88	3,91	
32	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	63,28	63,35	64,785	65,17	65,45	65,8	

Keterangan *) Tahun 2030 merupakan kinerja Kepala Daerah periode berikutnya

Sebagai bagian dari upaya integrasi dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan, indikator kinerja utama yang digunakan dalam RPJMD Kabupaten diselaraskan dengan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN 2025–2029. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah mendukung pencapaian target pembangunan di tingkat yang lebih luas, baik pada level provinsi maupun nasional.

Tabel IV.3 Penyandingan Indikator Kinerja Utama dengan Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Sasaran Pembangunan RPJMN

No	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara	Sasaran Pembangunan RPJMN
1	Tingkat Kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan hingga di bawah 5% pada tahun 2030	Pengurangan jumlah penduduk miskin ekstrem menjadi 0% pada 2024, dan kemiskinan total di bawah 7% pada 2029
2	Gini Rasio	Menurunnya ketimpangan pendapatan dengan target Gini Rasio 0,284 pada 2030	Penurunan ketimpangan pendapatan menuju distribusi ekonomi yang lebih inklusif dan adil.
3	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan rendah karbon	Pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai target NDC (Nationally Determined Contribution
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup provinsi di atas 75 poin (kategori baik)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara nasional melalui pengelolaan SDA dan pengendalian polusi.
5	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya IPM hingga mencapai 79,15 pada 2030	Peningkatan kualitas SDM secara menyeluruh melalui pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurunnya pengangguran terbuka secara bertahap hingga di bawah 5%	Peningkatan kesempatan kerja, khususnya bagi pemuda dan perempuan, serta pengurangan pengangguran terbuka.
7	PDRB Perkapita	Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah dan daya beli masyarakat	Peningkatan pendapatan per kapita nasional menuju negara berpenghasilan menengah tinggi.

No	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara	Sasaran Pembangunan RPJMN
8	Kontribusi PDRB Kab/Kota	Meningkatnya kontribusi kabupaten/kota dalam struktur ekonomi provinsi	Penguatan ekonomi daerah melalui hilirisasi dan pembangunan berbasis potensi lokal.
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Stabilitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 7%	Pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan sebesar 6–7% per tahun.
10	Indeks Integritas Nasional	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan bebas korupsi	Peningkatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta penurunan indeks persepsi korupsi.
11	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kinerja inovasi perangkat daerah dan daya saing daerah	Penguatan ekosistem inovasi dan digitalisasi pelayanan publik di tingkat nasional dan daerah.
12	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju kategori “Sangat Baik”	Terwujudnya pelayanan publik prima melalui transformasi digital dan penguatan kapasitas ASN.

Tabel IV.3memuat daftar indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Simalungun. Setiap indikator disandingkan dengan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN 2025–2029. Penyandingan ini bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antara arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional. Indikator-indikator tersebut mencakup dimensi sosial (kemiskinan, pengangguran, IPM), ekonomi (PDRB, pertumbuhan ekonomi), lingkungan (emisi GRK, kualitas lingkungan hidup), serta tata kelola (indeks pelayanan publik, integritas, dan inovasi). Setiap indikator memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis pembangunan yang lebih tinggi, baik dalam hal penguatan daya saing, peningkatan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan, maupun keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, keberadaan tabel ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program daerah telah dirancang secara terpadu untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi, serta memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten.

IV.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Penetapan IKD beserta targetnya telah mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mandat dalam pencapaian kinerja pada urusan pemerintahan daerah. Selain itu, potensi daerah juga dipandang sebagai modal dalam pencapaian kinerja, dengan tetap memperhatikan kemampuan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Dengan demikian, setiap OPD dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut IKD yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan:

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Simalungun

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83,2	83,95	84,7	85,45	86,2	87	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	10,75	10,52	9,85	9,18	8,51	8,17	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	74,46	74,64	74,81	74,98	75,15	75,42	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,25	14,49	17,94	21,4	24,85	26,57	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	27,5	28,59	32,69	36,78	40,88	42,20	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	ton	173.083,31	196.427,81	224.109,15	256.395,70	288.934,62	325.768,62	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
7	Indeks Risiko Bencana	Angka	80	79,19	78,39	77,58	76,77	76,37	Indikator yang wajib

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
									ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,54	1,44	1,39	1,35	1,30	1,26	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
9	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	244,5	248,2	251,9	255,6	259,3	263	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
10	Sex Ratio	Rasio	101,50	101,62	101,74	101,86	101,98	102,10	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
11	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	422	547	672	797	922	985	Indikator yang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
									wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
12	Kapasitas Air Baku	m3	1,5	2,34	3,19	4,03	4,88	5,3	Indikator terdapat di IUP RPJPD
13	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	30,47	34,22	37,98	41,73	45,49	47,36	Indikator terdapat di IUP RPJPD
14	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	%	18,48	20,82	23,17	25,51	27,86	29,03	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
15	Indeks Ketahanan Daerah	%	0,24	0,26	0,27	0,29	0,30	0,32	Indikator yang wajib ada dari Inmen

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
									No.2 Tahun 2025
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37	5,31	5,37	5,42	5,47	5,50	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,57	7,34	6,88	6,41	5,95	5,72	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	58,3	78,09	101,88	125,67	149,46	161,36	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,12	5,09	4,98	4,88	4,77	4,72	Indikator yang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
									wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
5	Indeks Gini	Angka	0,290	0,289	0,286	0,282	0,279	0,277	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	76,35	76,99	77,63	78,27	78,91	79,22	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,30	74,47	74,80	75,13	75,47	75,63	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
8	Indeks Persentase Capaian SPM Kesehatan	Persen	69	70	71	72	73	74	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
9	Prevalensi Stunting	%	17,00	16,27	15,24	14,80	13,80	13,20	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,02	10,01	10,23	10,44	10,65	10,76	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,94	13,03	13,11	13,20	13,24	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	50	60	68	75	80	85	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
									Tahun 2025
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	40,50	42,68	44,85	47,03	49,20	50,29	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
14	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	80,99	81,94	82,89	83,84	84,79	85,74	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	30,56	41,67	52,78	63,89	75,00	86,11	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
16	Indeks Perlindungan Anak	Angka	63,80	64,00	64,20	64,50	65,00	65,20	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
17	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	61,7	62,22	62,74	63,26	63,78	64,03	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
18	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,44	0,39	0,38	0,36	0,35	0,34	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
19	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,6	93,8	94	94,2	94,5	94,8	Indikator yang wajib

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
									ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
20	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup	72,95	72,55	71,90	71,50	71,10	70,85	Indikator terdapat di IUP RPJPD
21	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkolosis (%)	%	91	91	91	91	91	91	Indikator terdapat di IUP RPJPD
22	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (% treatment success rate)	%	90	90	90	90	90	90	Indikator terdapat di IUP RPJPD
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,60	98,80	99,00	99,20	99,40	99,60	Indikator terdapat di IUP RPJPD
24	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	%	26,25	28,36	30,47	32,58	34,69	35,74	Indikator terdapat di IUP RPJPD
25	capaian standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat daerah untuk Literasi	%	58,28	59,44	60,59	61,75	62,91	63,48	Indikator terdapat di IUP RPJPD
26	capaian standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat daerah untuk Numerasi	%	52,54	53,52	54,49	55,47	56,44	56,93	Indikator terdapat di IUP RPJPD
27	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	51	53	55,5	58	60,5	63	Indikator yang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
									wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Angka Ketergantungan	%	46,5	45,5	44,5	43,5	42,5	41,5	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,34	10,91	11,71	12,52	13,33	13,73	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,88	0,95	1,02	1,08	1,15	1,18	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
									dan terdapat di IUP RPJPD
4	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	5,17	5,172	5,173	5,174	5,175	5,176	Indikator terdapat di sasaran visi RPJPD
5	Rasio Kewirausahaan	%	1,44	1,62	1,80	1,88	2,03	2,17	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,5	73	73,5	74	74,5	75	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	52,55	53,95	56,36	58,76	61,17	62,37	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
8	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	51,12 (Prov)	52,75 (Prov)	54,38 (Prov)	56,01 (Prov)	57,64 (Prov)	58,94 (Prov)	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Poin	49,79 (Prov)	51,79 (Prov)	55,79 (Prov)	58,79 (Prov)	60,79 (Prov)	65,23 (Prov)	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
10	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Angka	45,50	47,61	49,39	51,20	53,45	54,45	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	21,5	21,72	21,43	21,15	20,87	20,72	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
									2025 dan terdapat di IUP RPJPD
12	Ekspor Barang dan Jasa	%	22,90	23,23	23,67	24,53	24,75	24,97	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
13	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	0,532	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
14	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	72,10	72,11	72,12	72,13	72,14	72,15	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
15	Persentase Desa Mandiri	%	5,5	7,5	9,5	10,5	12	14	Indikator yang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
									wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
16	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,25	0,09	0,19	0,28	0,37	0,42	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
17	Tingkat Inflasi	%	2,0	2,88	2,75	2,63	2,5	2,44	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59,39	60,33	61,27	62,20	63,14	63.61	Indikator terdapat di IUP RPJPD
19	Tingkat Penguasaan IPTEK	%	0,5	0,78	1,06	1,34	1,63	1,77	Indikator terdapat di IUP RPJPD
20	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	ribu orang	17.531	18.298	19.478	20.512	21.667	22.529	Indikator terdapat di IUP RPJPD
21	Jumlah Industri Kecil Menengah	Jumlah (unit)	4.665	5.161	5.661	6.161	6.661	7.161	Indikator terdapat di IUP RPJPD
22	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	5,45 (Prov)	5,50 (Prov)	5,55 (Prov)	5,60 (Prov)	5,65 (Prov)	5,70 (Prov)	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
23	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	18,42 (Prov)	18,50-20,00 (Prov)	20,00-25,00 (Prov)	25,00-30,00 (Prov)	30,00-40,00 (Prov)	40,00-50,00 (Prov)	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	77,08	77,58	78,08	78,58	79,08	79,58	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,72	2,842	2,964	3,086	3,208	3,268	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,30	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
									di IUP RPJPD
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	73,00	74,20	76,50	77,50	78,50	80,00	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
5	Indeks Rasa Aman	Angka	60,00	62,00	63,50	64,00	64,50	65,00	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
6	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	70,00	72,00	73,00	75,00	77,00	80,00	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025
7	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,59	3,66	3,73	3,8	3,88	3,91	Indikator yang wajib ada dari Inmen

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
									No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
8	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	60 (Sedang)	65 (Sedang)	69 (Sedang)	72 (Sedang)	78 (Sedang)	81 (Tinggi)	Indikator yang wajib ada dari Inmen No.2 Tahun 2025 dan terdapat di IUP RPJPD
9	Persentase Penegakan Hukum Perda	%	70	71,88	73,75	75,63	77,5	78,44	Indikator terdapat di IUP RPJPD
10	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	70	71,25	72,5	73,75	75	75,63	Indikator terdapat di IUP RPJPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar									
a) Pendidikan									
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	62,01	65,19	68,38	71,56	74,6	77,64	
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,82	99,98	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	4,27	5,77	7,26	8,03	8,79	9,55	
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	56,1	58,6	61,1	63,6	66,1	68,6	
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	52,79	55,69	58,59	61,49	64,39	67,29	
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65,07	66,17	67,27	68,37	69,47	70,57	
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	60,52	62,02	63,52	65,02	66,52	68,02	
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	26,2	27,24	28,53	30,01	31,61	33,05	
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	58,82	59,57	60,32	61,07	61,82	62,57	
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	59,16	61,66	64,16	66,66	69,16	71,66	
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	56,4	58,8	61,2	63,6	66	68,4	
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	72,73	73,63	74,53	75,43	76,33	77,23	
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	67,77	69,27	70,77	72,27	73,77	75,27	
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	70,91	71,91	72,91	73,91	74,91	75,91	
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	70,04	71,04	72,04	73,04	74,04	75,04	
b) Kesehatan									
1	Jumlah Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 kelahiran hidup	72,95	72,55	71,90	71,50	71,10	70,85	
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	17,00	16,27	15,24	14,80	13,80	13,20	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	86	89,00	92	94	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	84,5	86,50	88,5	90	91,5	93	
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	88,5	90,00	91,5	93	94	95	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	86	87,50	89	90	91	92	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	38	44	50	56	62	68	
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	32	38	44	50	56	62	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	80	82	84	86	88	90	
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	12	16	20	25	30	35	
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	27	32	37	42	47	52	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	68	71	74	77	80	83	
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	99,5	100	100	100	100	100	
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	62	66	70	74	78	82	
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	81,5	82	82,57	83	83,50	85	
2	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	39,56	40,10	40,46	41	41,57	42,25	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
3	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	46	46,10	46,50	47	47,39	47,70	
4	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	
5	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	51,97	52,54	55,21	58,01	64,03	67,27	
6	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	46,43	48	50,25	53,45	55	58	
7	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	
d) Perumahan Rakyat									
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	
3	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	0,00067	0,00072	0,00077	0,00082	0,00087	0,00092	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	21,50	21,45	21,40	21,35	21,30	21,25	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	0,0003	0,00034	0,00038	0,00042	0,00046	0,0005	
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	50	60	68	75	82	90	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	40	50	60	70	80	90	
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	5	10	18	28	40	55	
7	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	80	100	100	100	100	100	
9	Persentase penanganan pra bencana	%	20	20	20	20	20	20	
10	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	
11	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	90	92	94	96	100		
f) Sosial									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	20	25	30	35	40	45	
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	10	10	10	10	10	10	
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDSyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	
13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	50	55	60	65	70	75	
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
a) Tenaga Kerja									
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	7,29	8,02	8,82	9,7	10,67	11,74	
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	82,43	82,83	83,23	83,63	84,03	84,43	
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanis layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	57,62	60,5	63,53	66,71	70,05	73,55	
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,55	93,77	93,98	94,20	94,41	94,52	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,44	0,39	0,38	0,36	0,35	0,34	
3	Persentase ARG Daerah	%	50,00	50,20	60,00	60,70	70,40	80,00	
4	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	22,35	21,33	20,34	19,34	18,34	17,35	
c) Pangan									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	32,3	100	100	100	100	100	
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai 0-100	90,5	90,5	91	91	91,5	91,5	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	
d) Pertanahan									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100	100	100	100	100	100	
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	100	100	100	100	100	
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	57	57,5	58	58,5	59	59,5	
e) Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	indeks	74,46	74,64	74,81	74,98	75,15	75,42	
2	Persentase Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Indeks	0	0,3	0,6	1	1,5	2,1	
3	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	45	43	41	39	37	35	
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	57,25	58	59	60	60,5	61,1	
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	69,8	70,15	70,65	71,2	71,7	72,25	
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	97,3	97,8	98,25	98,78	99,1	99,5	
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	18	19	20	21	22	23	
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	7	8	9	10	10,5	11	
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	50,79	55,92	61,34	67,10	77,06	83,81	
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	0	0	0	60	60	62	
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	60	60	62	62	64	64	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga emasyarakatan Desa	%	75	75	75	76	76	77	
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2,33	2,31	2,30	2,29	2,28	2,27	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	57,3	58,3	59,3	60,3	61,3	62,3	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10	9,8	9,6	9,4	9,2	9	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun	14,9	14,6	14,4	14,1	13,9	13,6	
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai 0-100	60,92	61,6	62,28	62,97	63,65	63,69	
h) perhubungan									
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota		100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	70	74	80	87	94	100	
j) Komunikasi dan Informatika									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	30%	40%	45%	50%	60%	70%	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60	63	66	70	73	75	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	10	10	15	15	15	20	
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Persentase Koperasi Aktif	%	43,75	55,39	57,00	59,00	65,00	67,00	
2	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	%	9,57	40,37	43,00	47,00	50,00	55,00	
3	Persentase Koperasi yang Bermitra	%	2,93	3,24	4,00	4,20	5,00	5,50	
4	Rasio Pertumbuhan Wirausaha	%	1,90	2,00	2,20	2,30	2,40	2,50	
5	Persentase Usaha Kecil yang Bermitra	%	0,90	1,20	1,40	1,50	1,70	1,80	
6	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	1,53	1,65	1,80	1,85	2,00	2,20	
l) Penanaman Modal									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	7,1	7,5	8,1	8,5	9,1	9,5	
2	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	
m) Kepemudaan dan Olahraga									
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	8	10	12	14	16	18	
n) Statistik									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
o) Persandian									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	
p) Kebudayaan									
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	30,56	41,67	52,78	63,89	75	86,11	
q) Perpustakaan									
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	45	47	49	51	53	55	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	45	47	49	51	53	55	
r) Kearsipan									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	42	45	50	55	60	65	
Urusan Pilihan									
a) Kelautan dan Perikanan									
1	Jumlah Produksi Perikanan Budi Daya	Ton	775.000	96.025	96.985	98.927	99.916	101.917	
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton		225	228	230	233	235	
b) Pariwisata									
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	5	6	7	8	9	10	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	5	6	7	8	9	10	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
3	Tingkat hunian akomodasi	%	30	31	32	33	34	35	
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	%	0,88	0,95	1,02	1,08	1,15	1,18	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	8	8,5	9	9,5	10	10,5	
c) Pertanian									
1	Produktivitas Pertanian Padi per Tahun (Kw/Ha)	Kw/Ha	52,69	52,73	52,75	52,77	52,79	52,81	
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	30	40	50	60	70	80	
d) Perdagangan									
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP) pusat perbelanjaan dan IUTM SIUP toko swalayan	%	20	22	24	27	30	35	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	97	97	97	98	98	99	
3	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	80	80	85	85	90	90	
e) Perindustrian									
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	2,88	3,38	3.88	4,38	4.38	4,88	
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	28,67	30,67	35,67	40,67	45,67	50,67	
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	6,01	6,30	6,59	6,88	7,17	7,46	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
4	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	40,02	43,36	46,7	50,04	53,38	56,72	
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	47	43,36	46,7	50,04	53,38	56,72	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	30	33	35	37	40	43	
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
a) Perencanaan									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
b) Keuangan									
1	Rasio Belanja Pegawai di Luar guru dan tenaga kesehatan	%	9,58	9,25	9	8,75	8,50	8,25	
2	Ratio PAD	%	8,50	8,25	8	7,80	7,50	7,30	
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	%	75,58	75,80	76	76,25	76,50	76,75	
4	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
5	Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	%	7,50	7,25	7	6,75	6,50	6,25	
6	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	8,50	8,25	8	7,80	7,50	7,30	
7	Manajemen Aset		YA	YA	YA	YA	YA	YA	
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	4,73	4,50	4,25	4	3,50	3,25	
c) Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	84	85	86	87	88	89	
d) Penelitian dan Pengembangan									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%				100	100	100	
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	100	100	100	100	100	100	
e) Fungsi Pengawasan									
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (1-6)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
3	Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK-RI	%	80	81	82	83	84	85	
f) Fungsi Pengadaan									
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin							
g) Hubungan dengan Perwakilan Daerah									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	40	50	60	70	80	80	
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	10	11	12	13	14	15	
h) Pelayanan Publik									
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	93	94	95	96	97	98	

Keterangan *) Tahun 2030 merupakan kinerja Kepala Daerah periode berikutnya

IV.2.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan mandat yang harus dipastikan keberlangsungannya melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara secara merata dan berkeadilan. Landasan hukum pelaksanaan SPM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang menjadi acuan bagi daerah dalam merumuskan perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja pelayanan dasar. Penerapan SPM tidak lagi hanya berorientasi pada indikator dan batas waktu pencapaian, melainkan mengedepankan prinsip kesesuaian kewenangan, keterukuran, kesinambungan, keterjangkauan, dan ketepatan sasaran melalui tahapan pengumpulan data empiris, perhitungan kebutuhan, penyusunan rencana, hingga pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Sejalan dengan itu, RPJMD Kabupaten Simalungun 2025–2029 mengintegrasikan penerapan SPM sebagai acuan dalam penetapan target pembangunan di enam urusan wajib pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta sosial. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pembangunan Kabupaten Simalungun disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.5 Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Realisasi		*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun					
			2022	2023		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDIDIKAN**										
	Pendidikan anak usia dini	%	64,9	70,15	68,13	71,23	72,30	73,38	74,46	75,53	76,61
	Pendidikan dasar	%	73,3	99,1	84,93	88,807	92,683	96,56	100	100	100
	Pendidikan kesetaraan	%	24,9	20,62	20,62	100	100	100	100	100	100
2	**KESEHATAN**										
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	90,3	80,31	87,7	88,57	89,43	90	91	92	93
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	90	82,46	96,73	98,97	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	98	86,59	95,26	98,15	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Balita	%	95,5	84,47	91,19	92,57	93,26	93,95	94,64	95,32	96
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	80,1	32,08	95,77	96,14	96,51	96,88	97,25	97,62	98
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	69,2	78,07	52,37	54,48	56,59	58,7	60,81	62,91	65
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	54	25,36	13,27	15,23	17,19	19,15	21,11	23,06	25
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	73,4	8,37	9,06	9,72	10,38	11,04	11,7	12,36	13
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	9,84	21,99	48,1	60,3	65	68	70	72	75
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	50,23	98	59,13	60,8	65	68	70	72	75
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	26,7	98,75	83,8	85,67	87,54	89,41	91,28	93,14	95
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV	%	71,7	57,96	68,83	92,3	95	96	97	98	99

No	Indikator	Satuan	Realisasi		*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun					
			2022	2023		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**										
	Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	80,2	90	95,6	90	90	90	92	93	95
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	%	100	12	45,52	90	90	92	93	95	95
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**										
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di wilayah kerja kabupaten/kota	%	0	90	100	45,45	46,45	47,45	48,45	49,45	50,45
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	%	0	0	100	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS**										
	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	%	35,60	80	35,60 (2022)	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	84	100	100 (2023)	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	90	129,3	90 (2022)	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	0	74	74 (2023)	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Penyelamatan dan evakausi korban kebakaran	%	85,3	100	100 (2023)	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi		*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun					
			2022	2023		2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	**SOSIAL**										
	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti	%	73,77	0,20	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang anak terlantar di luar panti	%	NA	0	0	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang lanjut usia terlantar di luar panti	%	100	0	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan rehabilitasi sosial penyandang gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	%	NA	0	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	%	97,5	74,40	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel indikator pembangunan daerah, arah kebijakan Kabupaten Simalungun tahun 2025–2030 difokuskan pada pencapaian target yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Pada bidang pendidikan, target diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan kesetaraan. Di bidang kesehatan, upaya difokuskan pada peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta layanan kesehatan pada kelompok rentan seperti usia lanjut dan penderita gangguan jiwa. Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, target difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses air minum layak dan pengolahan limbah domestik. Sementara itu, bidang perumahan dan kawasan permukiman menitikberatkan pada penyediaan rumah layak huni, terutama bagi korban bencana dan kelompok masyarakat terdampak program pemerintah daerah. Untuk bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Linmas), fokus diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, termasuk penyelamatan dan evakuasi korban. Adapun di bidang sosial, sasaran pembangunan lebih menekankan pada layanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lansia, serta korban bencana atau gelandangan.

IV.2.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/*SDG's*)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan melalui Resolusi PBB Nomor A/RES/70/1 pada tahun 2015, yang telah diadopsi oleh Indonesia sebagai kerangka pembangunan nasional hingga tahun 2030. Implementasinya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai instrumen yang memuat tujuan dan sasaran global. Pembangunan berkelanjutan tersebut berlandaskan pada prinsip inklusivitas dan tata kelola yang mampu menjaga kesinambungan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs yang terdiri atas 17 (tujuh belas) tujuan utama merupakan komitmen global dan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Simalungun, dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel IV.6 Penetapan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2030

No. TPB	Tujuan	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari	1.1.1*	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	7,2						
			1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki- laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7,2	7,24	7	6,76	6,52	6,28	
					1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi sesuai dengan definisi nasional							
			1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1*	Proporasi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, unutk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil / melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan							
					1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	55,73	79,98	84,48	88,98	93,48	97,98	

					1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	6,1	6,86	7	7,14	7,28	7,42	
					1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	2,1535 (2023)	2,26	2,32	2,59	2,86	3,13	
					1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	22.398 (2023)	31.239	32.759	34.280	35.800	37.321	
			1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar							
					1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	98,61 (2023)	98,86	98,99	99,11	99,24	99,36	
					1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12- 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	94 (2023)	95,14	95,71	96,29	96,86	97,43	
					1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	90 (2023)	91,71	92,57	93,43	94,29	95,14	

					1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	38,73 (2023)	42,92	45,38	47,85	50,31	52,77	
					1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	89,63 (2023)	92,31	93,65	95	96,34	97,68	
					1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	0,069	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	
					1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	99,35 (2023)	96,82	97,32	97,82	98,33	98,83	
					1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	83,37 (2023)	85,26	86,2	87,15	88,09	89,04	
					1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	95,68 (2023)	96,63	97,1	97,57	98,04	98,52	
					1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.		6,88	6,49	6,09	5,7	5,3	
					1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan							
			1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	1	0	0	0	0	0	
					1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	0 (2023)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	

					1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	0 (2023)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
					1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	-	0	0	0	0	0	
					1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan resiko bencana yang selaras dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*							
					1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan resiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan resiko bencana nasional							
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi ketidakcukapan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)*							
					2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada balita.	1,48 (2022)	1,11	0,99	0,86	0,74	0,62	
		Sosial			2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	3,41	2,1	1,8	0,6	0	0	
		Sosial			2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	11,9 (2023)	11,32	11,92	12,51	13,11	13,71	

		Sosial	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi *stunting* (Pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	2,92	0,85	0,65	0,45	0,25	0,05	
					2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	
					2.2.2*	Prevalensi anak balita yang menderita gemuk		Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	
					2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
					2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	3,76 (2023)	3,26	3,01	2,76	2,51	2,26	
					2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	55,2 (2023)	65,45	71,4	77,35	83,3	89,25	
					2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	93,9 (2023)	94,12	95	95,89	96,78	97,66	
					2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 Tahun	7,4	7,04	6,97	6,9	6,83	6,76	

		Sosial	2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan.							
					2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	137.268,47 (2023)	156.729,24	166.550,62	176.372,00	186.193,38	196.014,76	
					2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan.							
					2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut subsektor.							

		Pertanian	2.4	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjuntan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktifitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.							
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	10,05	3,55	2,05	0,55	0	0	
					3.1.2.(a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	87,61	94,15	96,25				
					3.1.2.(b)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.							

		Kesehatan	3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1.(a)	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	0,25	0,16	0,14	0,12	0,1	0,8	
					3.2.1.(b)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	-	4	3	2	1	0	
					3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	0,24	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11	
		Kesehatan	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1*	Jumlah Infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	86	41	34	27	20	13	
					3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	138	129	127	125	123	121	
					3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang							
					3.3.3.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria.							
					3.3.4*	Insiden hepatitis B per 100.000 penduduk							
					3.3.5*	Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).(Angka pencapaian pengobatan penyakit Filariasis)	1	1	1	1	1	1	
					3.3.5.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi kusta							

					3.3.5.(b)	Jumlah Kabupaten/Kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi							
		Kesehatan	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	18,19	14,5	13,75	13	12,25	11,5	
					3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	16,9	12,9	11,2	9,5	7,8	6,1	
					3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	0,21	0,15	0,12	0,9	0,6	0,3	
		Kesehatan	3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis							
					3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi							
					3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	-	8,5	8	7,5	7	6,5	
		DPPKB	3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	12,57	17,32	18,27	19,22	20,17	21,12	

					3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	90 (2023)	91,43	92,14	92,86	93,57	94,29	
					3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	77,7 (2023)	86,53	89,49	92,44	95,4	98,36	
					3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	-	2,44	2,42	2,4	2,38	2,36	
					3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	13,94 (2023)	12,81	12,25	11,69	11,13	10,56	
					3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,82	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	
			3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	2,82						
					3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	-	11,55	11	10,45	9,95	9,45	
					3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	584 (2023)	595	601	606	612	617	
					3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan .							

					3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	55,73	80	83,75	87,5	91,25	95	
			3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	-	25,5	24	22,5	21	19,5	
			3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak Negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1*	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	85 (2023)	90	92,5	95	97,5	100	
					3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	100	100	100	100	100	100	

			3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	1,49	2	2,15	2,3	2,45	2,6	
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatka n Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pendidikan	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	100	100	100	100	100	100	
					4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi	78,35 (2023)	82,54	84,63	86,72	88,81	90,9	
					4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi	69,64 (2023)	75,21	77,16	79,1	81,05	82,99	
					4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	95 (2023)	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	
					4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	100,3 (2023)	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	
					4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	9,9 (2023)	10,19	10,33	10,48	10,62	10,77	
					4.1.2.*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat							

					4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat							
		Pendidikan	4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 Bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.							
					4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.							
					4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	94,23 (2023)	95,78	96,55	97,32	98,09	98,86	
		Pendidikan	4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang smaa bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan, dan pendidikan tinggi, termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.							
		Pendidikan	4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	

				layak dan kewirausahaan.									
					4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 Tahun) dan dewasa (usia 15-59 Tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	58	67,5	70	72,5	75	77,5	
			4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat;	99,48:99,24	99,78:99,58	99,88:99,64				
					4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/sederajat;	78,29:79,49	86,29:87,49	88,29:89,49				
			4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99,54	99,58	99,6	99,62	99,64	99,66	
					4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15- 24 tahun dan umur 15-59 tahun.	95,53 (2023)	96,28	96,59	96,9	97,21	97,36	
			4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi SD/MI/sederajat yang memiliki fasilitas tertentu		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	

					4.a.1*	Proporsi SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas tertentu		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
					4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir	0	0	0	0	0	0	
			4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	82,33 (2023)	86,23	88,18	90,13	92,08	94,03	
					4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	41	47	48,5	50	51,5	53	
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberday akan Kaum Perempuan	Sosial	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	3 (2023)	3	4	4	5	5	
					5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin							
			5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang tertangani		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	

					5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir							
					5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.							
			5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun							
					5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	13,94 (2023)	12,81	12,25	11,69	11,13	10,56	
			5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	0,16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
					5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	18	20	21	22	23	24	
					5.5.3*	Partisipasi angkatan kerja perempuan	43,81	59,39	60,33	61,27	62,2	63,14	

			5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut	5.6.1.*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan							
					5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	22,80 (2023)	8,4	8,15	7,9	7,65	7,15	
					5.6.2.*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi							
			5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	78	83	84	91,5	93	94,5	
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	99,1	99,31	99,4	99,49	99,58	99,67	
					6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak.	38,73 (2023)	42,92	45,38	47,85	50,31	52,77	

			6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	1,1	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	
					6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	TD (2023)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
					6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	89,63 (2023)	100	100	100	100	100	
					6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	280 (2023)	300	305	310	315	320	
					6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	153 (2023)	183	198	213	228	243	
					6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	0 (2023)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	

			6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman							
					6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0 (2023)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
					6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	53,33 (2023)	61,33	95,33	69,33	73,33	77,33	
			6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkahan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkahan air.	6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.							
					6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.							

8	Meningkatka n Pertumbuha n Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekono mi	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	-	4,34	5	5,16	5,32	5,48	
					8.1.1.(a)	PDB per kapita.	45,25	56,01	58,11	60,21	62,31	64,41	
			8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.							
			8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non- pertanian, berdasarkan jenis kelamin.		Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	
					8.3.1.(a)	Persentase pertumbuhan UMKM		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	

			8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	13.295 (2023)	14.064,35	14.465,56	14.878,21	15.302,64	15.739,18	
					8.5.2*	Tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja <35 (%)		Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	
			8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15- 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).		Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	
			8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	0,77 (2023)	12,56%	13,32%	14,08%	14,84%	15,60%	
					8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	27.259 (2023)	29.259	30.259	31.259	32.259	33.259	
					8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	2.530.572 (2023)	3.030.572	3.280.572	3.530.572	3.780.572	4.030.572	
					8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	14.889.387.822 (2023)						
			8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Bank Sumut Jumlah kantor = 36, ATM = 38, proses pembukaan = 1 (2023)	Bank Sumut, jumlah kantor	Bank Sumut, jumlah kantor	Bank Sumut, jumlah kantor	Bank Sumut, jumlah kantor	Bank Sumut, jumlah kantor	
								36, ATM	36, ATM	36, ATM	36, ATM	36, ATM	

								38	38	38	38	38	
								proses	proses	proses	proses	proses	
								pembuk	pembuk	pembuk	pembuk	pembuk	
								aan = 1	aan = 1	aan = 1	aan = 1	aan = 1	
					8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	16,06 (2023)	17,90%	18,82%	19,74%	20,66%	21,58%	
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi	9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional	27,59	53,23	59,64	66,05	72,46	78,87	
					9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi							
					9.1.2 (b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	6 (2023)	6	6	6	6	6	
					9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis	1	1	1	1	1	1	
						Persentase kondisi jalan dengan kualitas baik.	30,39	31,99	32,79	33,59	34,39	35,19	
			9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	10,49 (2023)	14,63%	16,70%	18,77%	20,84%	22,92%	

					9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	-0.33	3,5	5	6,5	8	9,5	
					9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	16,99 (2023)	18,01	19,09	20,24	21,45	22,74	
			9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	31 (2023)	32,42%	33%	34%	35%	35%	
			9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	9.c.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	87,06 (2023)	88,5	90	91,5	93	94,5	
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Ekonomi	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,2950 (2023)	0,29	0,289	0,286	0,282	0,279	
					10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7,20%	7,24	7	6,76	6,52	6,28	
					10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal	29	11	9	7	5	3	
					10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	2	4	4	4	4	4	

					10.1.1(d)	Jumlah Daerah Tertinggal							
					10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	
					10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.		Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	
			10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	-	25,5	24	22,5	21	19,5	
			10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	76 (2023)	90,00%	90,50%	91,00%	91,50%	92,00%	
					10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan	-	78	79	80	81	82	
					10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelaranagn diskriminasi	-						
			10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	6,1	6,86	7	89,00%	90,00%	91,00%	

11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Lingkungan	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	54,574	56,57	57,094	59,31	60,68	62,05	
			11,2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluasjangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan		meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	
					11.2.1.(a)	proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	-	33	34	35	36	37	
					11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	-						
			11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegritas di semua negara.	11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.							
			11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)							

			11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal per 100.000 orang.	1	0	0	0	0	0	
					11.5.1*	Jumlah korban hilang per 100.000 orang.	0	0	0	0	0	0	
					11.5.1*	Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang.	0	0	0	0	0	0	
					11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	750.000.000	450.000.000	400.000.000	350.000.000	300.000.000	250.000.000	
			11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya							
					11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	97,50% (2023)	98,08	98,37	98,66	98,95	99,24	
					11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	75	82	83,5	8,5	86,5	8,8	
					11.6.2(a)	Rata-rata tahunana materi pertikular halus PM 10							
						Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (DAK) (%)		meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	

			11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau perkotaan.		meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	
					11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua							
					11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir							
			11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	11.b.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0 (2023)	1	1	1	1	1	
					11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana							

					11.c.1.(a)	Persentase daerah yang memiliki perda bangunan gedung yang berkelanjutan, berketahanan, dan menggunakan material lokal.							
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjuta n	Lingkungan	12.3	Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen	12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan							
			12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	52,98	60	61,5	6,3	6,45	6,6	
			12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	0,1% (2023)	0,15%	0,20%	0,25%	0,30%	0,35%	
					12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	-						

			12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	0	1	2	3	4	5	
					12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	3	3	3	3	3	3	
			12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	24	24	24	24	24	24	
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Lingkungan	13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0 (2023)	1	1	1	1	1	
					13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang							
					13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	6,95	11,45	11,6	11,75	11,9	12,05	

15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Lingkungan	15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1*	Proporsi luas area hutan terhadap luas daratan	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	
					15.1.2(a)	Luas kawasan hutan (ha)	101,493,87	101,493,87	101,493,87	101,493,87	101,493,87	101,493,87	
			15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	10	22,5	25	27,5	30	3,25	

16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembanguna n Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaa n yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	6	0	0	0	0	0	
					16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	0	0	
					16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
					16.1.4.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	-	100	100	100	100	100	
			16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir							
					16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya							
					16.2.2.*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi							

					16.2.3	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang tertangani (%)		Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
					16.2.3.(a)	proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun							
			16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	-	0	0	0	0	0	
					16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	-	0	0	0	0	0	
			16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	-	79	79,5	80	80,5	81	
			16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	76	84,5	86	87,5	89	90,5	
					16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
					16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	50,02% /C (2023)	57,82%	61,33%	64,84%	68,35%	71,86%	
					16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	-	67,5	70	7,25	7,5	7,75	
					16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan.	99,95% (2023)	99,96%	99,97%	99,97%	99,98%	99,99%	
					16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	-	35	35	35	35	35	

					16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	45,71%/ C (2023)	51,78%	54,40%	57,02%	59,64%	62,26%	
					16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik.	92,53 (2023)	93,81	94,45	95,09	95,73	96,37	
					16.6.2.(a)	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategore baik.							
			16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	
					16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	18,42	20	20	20	20	20	
			16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	97,48% (2023)	97,70%	97,90%	98,10%	98,30%	98,50%	
					16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	38,82% (2023)	47,74%	50,81%	53,87%	56,94%	60,00%	
					16.9.1(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	36,2	45	47,5	50	52,5	55	
					16.9.1(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	74,35	76,5	78	79,5	81	82,5	
					16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	95,68% (2023)	96,48%	96,88%	97,28%	97,68%	98,09%	

17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisa si Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	-	19	19,5	20	21,5	23	
					17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	-	17	17	17	17	17	
					17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	-	14,5	16	17,5	19	20,5	
			17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(a)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	TD (2023)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	

			17.8	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	72,65% (2023)	74,00%	75,50%	77,00%	78,50%	80,00%	
			17.19	pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi produk domestk bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahuh 2020							
					17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian *(Vital Statistics Register)*							

BAB V
PENUTUP

RPJMD SIMALUNGUN 2025-2029

V.1. Kesimpulan

RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja yang menjadi acuan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Dalam perjalanannya, RPJMD ini mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengawasan pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta sinergi antara pemerintahan kabupaten, provinsi dan nasional.

RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029 merupakan dokumen operasional pembangunan daerah lima tahunan yang memuat penjabaran visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas yang terukur serta disertai indikator kinerja sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD ini dilakukan secara akuntabel dengan menerapkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up), sehingga memastikan bahwa dokumen ini mencerminkan kebutuhan masyarakat, arah kebijakan pemerintah daerah, serta selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, RPJMD ini memiliki keterkaitan langsung dengan dokumen RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2045 sebagai arah pembangunan jangka panjang, RPJMN 2025–2029, dan Asta Cita yang menjadi bagian integral dalam kerangka pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 dirancang untuk mendukung pencapaian visi: **"Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju"**, dengan menjabarkan misi sebagai berikut:

1. Benahi

   Membenahi pelayanan dan fasilitas publik di Kabupaten Simalungun. Pelayanan wajib pada masyarakat harus dapat direncanakan dan terdigitalisasi. Pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan yang bisa diselesaikan oleh pemerintah secara digital mengadopsi layanan perbankan yang sudah bisa di lakukan secara digital.

2. Awasi

   Melaksanakan pengawasan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Pengawasan ini menjadi penting sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam masa waktu yang diharapkan. Pengawasan juga dilakukan terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat dengan menghadirkan ASN yang mengutamakan pelayanan masyarakat.

3. Dampingi

Melakukan pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat sehingga pemerintah dapat menjamin pencapaian kesejahteraan rakyat. Menjadikan aparatur pemerintah sebagai sahabat bagi masyarakat.

4. Solusi

Pemerintah yang akan dibangun untuk Simalungun kedepan adalah pemerintahan yang mampu menjadi solusi terhadap permasalahan ditengah masyarakat. Masyarakat bukanlah pihak yang dapat dipersalahkan terhadap penurunan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan di suatu wilayah. Masyarakat haruslah menjadi penerima manfaat utama terhadap alokasi anggaran yang ada di Kabupaten Simalungun

5. Sinergi

Pemerintah Kabupaten Simalungun kedepan haruslah menjadi pemerintahan yang bersinergi dengan pemerintahan pusat dan daerah. Sinergitas sangat penting untuk menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia emas 2045.

RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029 memiliki peran sentral sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang wajib menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah untuk periode lima tahun ke depan. Integrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dilakukan melalui penjabaran sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja RPJMD ke dalam Renstra masing-masing perangkat daerah sesuai urusan, sehingga memastikan keselarasan pelaksanaan pembangunan di tiap sektor. Selanjutnya, RPJMD menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang berisi prioritas pembangunan, target kinerja, dan rencana kegiatan sesuai tahapan pencapaian target RPJMD. Dalam aspek penganggaran, integrasi RPJMD dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dilakukan dengan menjadikan program prioritas dan target kinerja RPJMD sebagai dasar dalam menetapkan prioritas alokasi anggaran tahunan daerah. Selain itu, RPJMD juga menjadi rujukan dalam proses penilaian kinerja pembangunan daerah oleh pemerintah pusat, melalui kesesuaian capaian indikator makro dan kinerja pembangunan dengan standar dan target nasional.

V.2. Kaidah Pelaksanaan

Agar RPJMD dapat diimplementasikan secara efektif, maka pelaksanaannya harus mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Konsistensi Perencanaan: RPJMD harus dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dokumen anggaran tahunan seperti KUA-PPAS dan APBD.

2. Sinergi dan Kolaborasi: Pembangunan Kabupaten Simalungun memerlukan sinergi antar-perangkat daerah serta kerja sama dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.
3. Berbasis Data dan Bukti: Setiap kebijakan dan program pembangunan harus berdasarkan data yang akurat dan analisis yang komprehensif agar keputusan yang diambil tepat sasaran.
4. Fleksibilitas dan Adaptasi: Dalam menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan, RPJMD harus dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi yang berkembang dengan tetap mengacu pada tujuan utama pembangunan daerah.
5. Partisipasi Masyarakat: Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan harus terus ditingkatkan untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan warga.

V.3. Pengendalian dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kinerja: Evaluasi dilakukan melalui pemantauan pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
2. Pelaporan Berkala: Pemerintah Kabupaten Simalungun wajib menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta laporan evaluasi pembangunan daerah lainnya.
3. Forum Evaluasi dan Umpan Balik: Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi untuk mendapatkan masukan terhadap efektivitas kebijakan dan program Pembangunan.
4. Rekomendasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Hasil evaluasi harus dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi dan perbaikan terhadap kebijakan dan program yang belum optimal.
5. Pengawasan oleh DPRD dan Masyarakat: DPRD dan masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan RPJMD guna memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

V.4. Sistem Insentif dan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah

Hasil pengendalian yang diperoleh melalui pemantauan dan evaluasi menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pemberian insentif bagi perangkat daerah yang berkontribusi secara signifikan dalam pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Sistem insentif ini dirancang untuk memperkuat efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan adanya insentif yang tepat dan berbasis kinerja, diharapkan perangkat daerah semakin

termotivasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

Dalam proses pengendalian pembangunan, sistem insentif dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu:

1. **Insentif Finansial**
   - Tambahan alokasi anggaran bagi perangkat daerah yang berhasil mencapai target kinerja secara optimal;
   - Penghargaan dalam bentuk insentif berbasis kinerja yang dpat digunakan untuk mendukung program strategis daerah.
2. **Insentif Non-Finansial**
   - Pemberian penghargaan atas inovasi dan pencapain kinerja yang unggul dalam mendukung Pembangunan daerah;
   - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan sertifikasi bagi perangkat daerah.

Pemberian insentif ini tidak hanya didasarkan pada pencapaian target semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi indikator keberhasilan perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan. Ruang lingkup yang digunakan sebagai dasar pemberian insentif mencakup:

1. Keberhasilan implementasi program pembangunan yang selaras dengan RPJMD dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat;
2. Pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, termasuk efektivitas penggunaan anggaran serta inovasi dalam peningkatan kualitas layanan publik;
3. Kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas.

Agar sistem insentif ini dapat diterapkan secara transparan dan berkeadilan, diperlukan tata kelola pelaksanaan yang terstruktur dan didukung oleh komitmen bersama. Oleh karena itu, dilakukan pembagian peran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Bapperida bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah dan menyusun rekomendasi pemberian insentif;
2. Sekretariat Daerah berperan dalam mengoordinasikan kebijakan pemberian insentif dengan mempertimbangkan aspek regulasi, keuangan daerah, dan keberlanjutan program insentif;
3. DPRD dan masyarakat memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi sistem insentif untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya.

Sejalan dengan kebijakan sistem insentif, Manajemen Risiko Pembangunan Daerah menjadi aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan. Kompleksitas program dan kegiatan prioritas menuntut adanya pengelolaan risiko yang sistematis, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah. Penerapan manajemen risiko di tingkat daerah mencakup langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi risiko utama yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah, baik dari aspek kebijakan, anggaran, maupun kondisi eksternal yang berpengaruh;
2. Pengukuran dan mitigasi risiko dengan menentukan strategi yang tepat guna mengurangi dampak risiko terhadap pencapaian target pembangunan;
3. Integrasi pengelolaan risiko dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi telah dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek manajemen risiko melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta sertifikasi bagi pegawai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko pembangunan.

Dengan adanya sistem insentif yang berbasis kinerja serta penerapan manajemen risiko yang terstruktur, diharapkan motivasi dan efektivitas perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan semakin meningkat. Sinergi antara insentif dan pengelolaan risiko ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Simalungun yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Pemerintah Kabupaten Simalungun
Tahun 2025